WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Peraturan Wali Kota, yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Wali Kota Pekalongan.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan berisi satu atau lebih sub kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai hasil kegiatan.
17. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

(2) RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran RPJMD untuk waktu pelaksanaan Tahun 2022.

(3) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan :

a. Renja PD Kota Pekalongan Tahun 2022;

b. Rancangan KUA serta PPAS, dan Rancangan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022.

(4) Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja PD Tahun 2022 dengan RKPD Tahun 2022.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas narasi RKPD Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Narasi RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, kaidah pelaksanaan, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD Tahun 2020 dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah, prioritas pembangunan nasional, provinsi dan Kota Pekalongan tahun 2022, serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan.

e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2022 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat indikator kinerja tahun 2022.

g. BAB VII PENUTUP

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD

Pasal 5

(1) PD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Renja PD dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran sub kegiatan, hasil kegiatan dan *outcome* masing-masing program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda, Kepala Badan Keuangan Daerah dan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan sebagai bahan penyusunan evaluasi RKPD.

(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD.

BAB V
PERUBAHAN RKPD

Pasal 6

(1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

d. pergeseran pagu, penghapusan dan/atau penambahan kegiatan/sub kegiatan antar Perangkat Daerah, penambahan dan/atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan/sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan/sub kegiatan.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Perwal.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Agustus 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH KOTA SETDA PEKALONGAN

SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ***ii***
DAFTAR TABEL ***vi***
DAFTAR GAMBAR ***xvii***
BAB I PENDAHULUAN ***1***
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 2
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 4
1.3.1. RKPD dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 4
1.3.2. RKPD dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 6
1.3.3. RKPD dengan RKP Tahun 2022 8
1.3.4. RKPD dengan Renja OPD Tahun 2021 9
1.3.5. RKPD dengan RAPBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 9
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 10
1.4.1. Maksud 10
1.4.2. Tujuan 10
1.5. SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2022 10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ***13***
2.1. Aspek Geografi Dan Demografi 14
2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif 14
2.1.2. Topografi dan Jenis Tanah 17
2.1.3. Geologi 18
2.1.4. Hidrologi 19
2.1.5. Klimatologi 21
2.1.6. Penggunaan Lahan 22
2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah 24
2.1.8. Wilayah Rawan Bencana 30
2.1.9. Aspek Demografi 32
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 36
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi 36
2.2.2. Struktur Ekonomi 37
2.2.3. Inflasi 42
2.2.4. PDRB per Kapita 44
2.2.5. Indeks Gini 45
2.2.6. Kemiskinan 45
2.2.7. Angka Rasio Penduduk yang Bekerja 52

2.2.8. Angka Kriminalitas yang Ditangani 53
2.2.9. Indeks Pembangunan Manusia 53
2.2.10. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 55
2.2.11. Harapan Lama Sekolah 55
2.2.12. Usia Harapan Hidup 56
2.2.13. Pengeluaran Per Kapita 57
2.2.14. Angka Partisipasi Kasar 58
2.2.15. Angka Pendidikan yang Ditamatkan 59
2.2.16. Angka Partisipasi Murni (APM) 59
2.2.17. Angka Kematian Bayi (AKB) 60
2.2.18. Angka Kematian Balita (AKABA) 61
2.2.19. Angka Kematian Ibu (AKI) 62
2.2.20. Angka Kesakitan 62
2.2.21. Prevalensi Balita Stunting 63
2.2.22. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 63
2.2.23. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 64
2.2.24. Kebudayaan 65
2.2.25. Pemuda dan Olahraga 66
2.3. Aspek Pelayanan Umum 67
2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 67
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 98
2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 139
2.3.4. Unsur Penunjang 149
2.3.5. Unsur Pendukung 154
2.3.6. Unsur Pengawasan 159
2.3.7. Unsur Pemerintahan Umum 160
2.4. Aspek Daya Saing Daerah 162
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah 162
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah 162
2.4.3. Fokus Iklim Investasi 167
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia 169
2.4.5. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 170
2.5. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Tahun 2020 176
2.5.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Sampai Dengan Tahun 2020 176
2.5.2. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2020 183
2.5.3. Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020 222
2.5.4. Hasil Evaluasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) Tahun 2020 228
2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah 253

2.6.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 253
2.6.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 259
2.7. Isu Strategis 266
2.7.1. Tata Kelola Pemerintahan 267
2.7.2. Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup 268
2.7.3. Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman 270
2.7.4. Peningkatan Derajat Kesehatan (Masa Pandemi *COVID-19*) 272
2.7.5. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran 273
2.7.6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 274
2.7.7. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal 275
2.7.8. Pelestarian Budaya Lokal 277
2.7.9. Kondusivitas Wilayah 277
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 279
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 279
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 281
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 285
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 289
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 290
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 291
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 297
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 297
4.1.1. Gambaran Kota Pekalongan dalam visi tahun 2021-2026 297
4.1.2. Misi 301
4.1.3. Tujuan Dan Sasaran 305
4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022 315
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional 316
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 326
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan 330
4.2.4. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 346
4.2.5. Pokok-Pokok Pikiran DPRD 348
4.2.6. Inovasi Kebijakan Pembangunan 349
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 357
5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2022 357

5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 357
5.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 361
5.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 368
5.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 371
5.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 371
5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 373
5.1.7. Unsur Kewilayahan 374
5.1.8. Unsur Pemerintahan Umum 374
5.1.9. Non Urusan 375
5.2 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 729
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 731
6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2022 731
6.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 732
BAB VII PENUTUP 741
DAFTAR PUSTAKA 743

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan RPJMD Tahun 2021-2026 5
Tabel 1.2 Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022..... 6
Tabel 1.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional 8
Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan 16
Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2020 21
Tabel 2.3 Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 22
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 33
Tabel 2.5 Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2016-2020 34
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)..... 35
Tabel 2.7 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (persen)..... 37
Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 42
Tabel 2.9 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020..... 44
Tabel 2.10 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2016 – 2020..... 44
Tabel 2.11 Indeks Gini Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2020 45
Tabel 2.12 Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 46
Tabel 2.13 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 53
Tabel 2.14 Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 55
Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020..... 58
Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender di Kota Pekalongan Tahun 2020 59
Tabel 2.17 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2019 59
Tabel 2.18 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 60

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni di Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2020 60
Tabel 2.20 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 61
Tabel 2.21 Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 62
Tabel 2.22 Angka Kesakitan di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 63
Tabel 2.23 Prevalensi Balita Stunting Kota PekalonganTahun 2016-2020 63
Tabel 2.24 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 66
Tabel 2.25 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 66
Tabel 2.26 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 66
Tabel 2.27 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 67
Tabel 2.28 Jenjang Pendidikan PAUD/TK di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 68
Tabel 2.29 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 68
Tabel 2.30 Angka Partisipasi Sekolah Jenjang TK-SMP di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 69
Tabel 2.31 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 69
Tabel 2.32 Rasio Ketersediaan Sekolah Untuk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 70
Tabel 2.33 Rasio Guru dan Murid di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 70
Tabel 2.34 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 71
Tabel 2.35 Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 71
Tabel 2.36 Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 71
Tabel 2.37 Kondisi Bangunan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016 – 2020 72
Tabel 2.38 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan 2016 – 2020 72
Tabel 2.39 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI danSMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 73
Tabel 2.40 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 73
Tabel 2.41 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan tahun 2016 – 2020 74
Tabel 2.42 Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 74
Tabel 2.43 Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 74

Tabel 2.44 Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2020 75
Tabel 2.45 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per 1.000 Balita di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 75
Tabel 2.46 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 76
Tabel 2.47 Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi Tahun 2016 - 2020 76
Tabel 2.48 Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 77
Tabel 2.49 Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 77
Tabel 2.50 Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek Tahun 2019 - 2020 78
Tabel 2.51 Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar Tahun 2016 - 2020 79
Tabel 2.52 Persentase Balita Usia <6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 79
Tabel 2.53 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 80
Tabel 2.54 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 80
Tabel 2.55 Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran Tahun 2016 - 2020 82
Tabel 2.56 Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat Tahun 2016 - 2020 82
Tabel 2.57 Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 83
Tabel 2.58 Cakupan Rumah Tangga Sehat di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 84
Tabel 2.59 Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2016–2020 85
Tabel 2.60 Kondisi Jaringan Jalan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 85
Tabel 2.61 Rasio Jaringan Irigasi di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 86
Tabel 2.62 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 86
Tabel 2.63 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 86
Tabel 2.64 Data Saluran Drainase di Wilayah Kota PekalonganTahun 2020 87
Tabel 2.65 Genangan Banjir dan Rob di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 87
Tabel 2.66 Pembangunan Revetment di Kota Pekalongan Tahun 2015-2020 88
Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 89

Tabel 2.68 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW 90
Tabel 2.69 Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 91
Tabel 2.70 Data Kebutuhan Rumah (Backlog) di Kota Pekalongan Tahun 2020 91
Tabel 2.71 Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 91
Tabel 2.72 Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 92
Tabel 2.73 Penduduk Bersanitasi di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 92
Tabel 2.74 Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2020 93
Tabel 2.75 Rasio Jumlah Polisi PP (PNS) dan Jumlah Polisi PP (Banpol Non PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan 2016 – 2020 94
Tabel 2.76 Penyelesaian Pelanggaran Perda di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 95
Tabel 2.77 Rasio Jumlah Linmas (Ton Inti) dan Linmas (Kecamatan dan Kelurahan) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 95
Tabel 2.78 Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 96
Tabel 2.79 Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 97
Tabel 2.80 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 97
Tabel 2.81 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan DTKS di Kota Pekalongan Tahun 2019-2020 98
Tabel 2.82 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 99
Tabel 2.83 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 100
Tabel 2.84 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2016 – 2020 100
Tabel 2.85 Persentase Perusahaan Menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 101
Tabel 2.86 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 102
Tabel 2.87 Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 104
Tabel 2.88 Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 105
Tabel 2.89 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 105
Tabel 2.90 Konsumsi Energi Per Kapita/tahun di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 106
Tabel 2.91 Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 107

Tabel 2.92 Persentase Tertib Hukum Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 108
Tabel 2.93 Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 109
Tabel 2.94 Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 110
Tabel 2.95 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2017-2020 111
Tabel 2.96 Persentase Penduduk ber-NIK di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 112
Tabel 2.97 Penerbitan Akta Kematian di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 113
Tabel 2.98 Penerbitan Akta Nikah di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 114
Tabel 2.99 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 114
Tabel 2.100 PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 115
Tabel 2.101 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 115
Tabel 2.102 Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 116
Tabel 2.103 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 116
Tabel 2.104 Kategori Tingkat Pelayanan Jalan 117
Tabel 2.105 Kinerja Ruas Jalan di Kota Pekalongan yang Diukur Dari Tingkat Pelayanan 118
Tabel 2.106 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 120
Tabel 2.107 Faktor Muat (Load Factor) Angkutan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 121
Tabel 2.108 Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 122
Tabel 2.109 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 122
Tabel 2.110 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 123
Tabel 2.111 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Pekalongan 2016 – 2020 123
Tabel 2.112 Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin di Kota Pekalongan 2016 – 2020 124
Tabel 2.113 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 124
Tabel 2.114 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2016 – 2020 125
Tabel 2.115 Jalur Perlintasan Kereta Api di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 126
Tabel 2.116 Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 126
Tabel 2.117 Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 126

Tabel 2.118 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pekalongan di Tahun 2020 127
Tabel 2.119 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2016 - 2020 128
Tabel 2.120 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 128
Tabel 2.121 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2016-2020 129
Tabel 2.122 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 129
Tabel 2.123 Persentase Rumah Tangga Pelanggan Telepon Tetap di Kota Pekalongan 2016-2020 129
Tabel 2.124 Persentase Koperasi Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 131
Tabel 2.125 Jumlah UMKM di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 132
Tabel 2.126 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 132
Tabel 2.127 Realisasi PMDN di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 133
Tabel 2.128 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 133
Tabel 2.129 Perkembangan Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 133
Tabel 2.130 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 135
Tabel 2.131 Penyelenggaraan Festival/ Pentas Seni/ Event di Kota Pekalongan Tahun 2020 135
Tabel 2.132 Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2018-2020 136
Tabel 2.133 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 136
Tabel 2.134 Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 137
Tabel 2.135 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 137
Tabel 2.136 Pemanfaatan Arsip Statis Tahun 2017-2020 138
Tabel 2.137 Sertifikasi Kompetensi Kearsipan Tahun 2017-2020 139
Tabel 2.138 Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2016- 2020 (kg) 139
Tabel 2.139 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (kg/kapita/tahun) 140
Tabel 2.140 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 140
Tabel 2.141 Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (ton) 141
Tabel 2.142 Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 141
Tabel 2.143 Tingkat Okupansi Hotel di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019 142

Tabel 2.144 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 142
Tabel 2.145 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020..... 143
Tabel 2.146 Produksi Padi di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 143
Tabel 2.147 Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 144
Tabel 2.148 Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 144
Tabel 2.149 Jumlah Pedagang/Usaha Informal di Kota Pekalongan Tahun 2020 145
Tabel 2.150 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 146
Tabel 2.151 Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 147
Tabel 2.152 Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 147
Tabel 2.153 Jumlah IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 147
Tabel 2.154 Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020..... 148
Tabel 2.155 Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 148
Tabel 2.156 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 149
Tabel 2.157 Jumlah Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 149
Tabel 2.158 Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020..... 150
Tabel 2.159 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2020 151
Tabel 2.160 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2018-2019 153
Tabel 2.161 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2020..... 153
Tabel 2.162 Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2020 156
Tabel 2.163 Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2020..... 156
Tabel 2.164 Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 158
Tabel 2.165 Jumlah Aparatur yang Melakukan General Check-up dan Mengikuti Diklat Purna Tugas di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020..... 158
Tabel 2.166 Tingkat Kematangan SPIP Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 160
Tabel 2.167 Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 160
Tabel 2.168 Jumlah Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 160

Tabel 2.169 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 161
Tabel 2.170 Tingkat Partisipasi Politik di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 161
Tabel 2.171 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2016 – 2020 162
Tabel 2.172 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 163
Tabel 2.173 Penggunaan Air Tanah Untuk Kebutuhan Sambungan Rumah (SR) di Kota Pekalongan Tahun 2019-2020 165
Tabel 2.174 Persentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 166
Tabel 2.175 Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 167
Tabel 2.176 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha 167
Tabel 2.177 Inovasi Daerah Lainnya 174
Tabel 2.178 Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan 175
Tabel 2.179 Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan 176
Tabel 2.180 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan Tahun 2020 177
Tabel 2.181 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2020 183
Tabel 2.182 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2020 187
Tabel 2.183 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2020 192
Tabel 2.184 Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2020 193
Tabel 2.185 Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas Kota Pekalongan Tahun 2020 194
Tabel 2.186 Capaian Indikator Urusan Sosial Kota Pekalongan Tahun 2020 195
Tabel 2.187 Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2020 195
Tabel 2.188 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2020 197
Tabel 2.189 Capaian Indikator Urusan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2020 197
Tabel 2.190 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kota Pekalongan Tahun 2020 198
Tabel 2.191 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2020 198
Tabel 2.192 Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2020 200
Tabel 2.193 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pekalongan Tahun 2020 201
Tabel 2.194 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2020 201

Tabel 2.195 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2020 202
Tabel 2.196 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2020 203
Tabel 2.197 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2020 204
Tabel 2.198 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Pekalongan Tahun 2020 205
Tabel 2.199 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kota Pekalongan Tahun 2020 205
Tabel 2.200 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2020 206
Tabel 2.201 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kota Pekalongan Tahun 2020 207
Tabel 2.202 Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2020 207
Tabel 2.203 Capaian Indikator Urusan Statistik Kota Pekalongan Tahun 2020 208
Tabel 2.204 Capaian Indikator Urusan Persandian Kota Pekalongan Tahun 2020 209
Tabel 2.205 Capaian Indikator Urusan Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan Tahun 2020 209
Tabel 2.206 Capaian Indikator Urusan Pariwisata Kota Pekalongan Tahun 2020 210
Tabel 2.207 Capaian Indikator Urusan Pertanian Kota Pekalongan Tahun 2020 211
Tabel 2.208 Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kota Pekalongan Tahun 2020 212
Tabel 2.209 Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kota Pekalongan Tahun 2020 212
Tabel 2.210 Capaian Indikator Urusan Perencanaan Kota Pekalongan Tahun 2020 213
Tabel 2.211 Capaian Indikator Urusan Keuangan Kota Pekalongan Tahun 2020 214
Tabel 2.212 Capaian Indikator Urusan Kepegawaian dan Diklat Kota Pekalongan Tahun 2020 215
Tabel 2.213 Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan Tahun 2020 216
Tabel 2.214 Capaian Indikator Urusan Fungsi Lain Kota Pekalongan Tahun 2020 217
Tabel 2.215 Capaian Indikator Urusan Rutin Kota Pekalongan Tahun 2020 220
Tabel 2.216 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2020 222
Tabel 2.217 Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2020 223
Tabel 2.218 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Pekalongan Tahun 2020 225

Tabel 2.219 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Pekalongan Tahun 2020 226
Tabel 2.220 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2020 226
Tabel 2.221 Capaian SPM Bidang Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2020 228
Tabel 2.222 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2020 229
Tabel 2.223 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2020 238
Tabel 2.224 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2020 244
Tabel 2.225 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2020 250
Tabel 2.226 Permasalahan Pembangunan Daerah 253
Tabel 2.227 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 259
Tabel 2.228 Isu Strategis 266
Tabel 3.1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (persen) 283
Tabel 3.2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2016 – 2020 284
Tabel 3.3 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 285
Tabel 3.4 Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan 287
Tabel 3.5 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan 288
Tabel 3.6 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan 288
Tabel 3.7 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan 288
Tabel 3.8 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan 289
Tabel 3.9 Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan 289
Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2023 293
Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 295
Tabel 3.12 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 296
Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021– 2026 Visi : "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius" 307
Tabel 4.2 Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 311
Tabel 4.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 314

Tabel 4.4 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2022 332
Tabel 4.5 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 335
Tabel 4.6 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional 346
Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 376
Tabel 5.2 Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Pekalongan Tahun 2022 729
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekalonggan Tahun 2022 731
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 732

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 4
Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan 15
Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Pekalongan 16
Gambar 2.3 Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan 17
Gambar 2.4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan 19
Gambar 2.5 Wilayah Sungai Pemali-Comal 19
Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan 23
Gambar 2.7 Peta Rencana Struktur Ruang 25
Gambar 2.8 Peta Rencana Pola Ruang 26
Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 33
Gambar 2.10 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 34
Gambar 2.11 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 35
Gambar 2.12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 36
Gambar 2.13 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2016 – 2020 37
Gambar 2.14 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2020 43
Gambar 2.15 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2016 – 2020 43
Gambar 2.16 Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 46
Gambar 2.17 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 (000 jiwa) 47
Gambar 2.18 Perbandiangan Rasio Penduduk Miskin Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 48
Gambar 2.19 Perbandiangan Tingkat Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 49
Gambar 2.20 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 49
Gambar 2.21 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 50
Gambar 2.22 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 51
Gambar 2.23 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 51

Gambar 2.24 Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 52
Gambar 2.25 Rasio TKK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 53
Gambar 2.26 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2016-2020 54
Gambar 2.27 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 55
Gambar 2.28 Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 56
Gambar 2.29 Perbandingan Umur Harapan Hidup di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 57
Gambar 2.30 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2016-2020 57
Gambar 2.31 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2016-2020 61
Gambar 2.32 Perbandingan IPG di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 64
Gambar 2.33 Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 65
Gambar 2.34 Persentase Kunjungan di RSUD Bendan Kota Pekalongan Periode Tahun 2016 - 2020 78
Gambar 2.35 Perkembangan Persebaran COVID-19 di Kota Pekalongan Bulan Maret-Desember 2020 81
Gambar 2.36 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 99
Gambar 2.37 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 101
Gambar 2.38 Jumlah Perempuan Dalam Jabatan ASN di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 102
Gambar 2.39 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 103
Gambar 2.40 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 103
Gambar 2.41 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 107
Gambar 2.42 Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2016 – 2020 108
Gambar 2.43 Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020 109
Gambar 2.44 Persentase Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 110
Gambar 2.45 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 112
Gambar 2.46 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 113
Gambar 2.47 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 116

Gambar 2.48 Peta Tingkat Pelayanan Jalan di Kota Pekalongan 118
Gambar 2.49 Indeks SPBE Kota Pekalongan Tahun 2019 131
Gambar 2.50 Jumlah Arsip yang Dipeliharan dan Diselamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 138
Gambar 2.51 Realisasi Nilai Ekspor dan Impor di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 146
Gambar 2.52 Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2016-2020..... 162
Gambar 2.53 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Kota Pekalongan Tahun 2016-2020..... 163
Gambar 2.54 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Kota Pekalongan Tahun 2016-2020..... 164
Gambar 2.55 Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 165
Gambar 2.56 Ketersediaan Listrik di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020..... 166
Gambar 2.57 Perkembangan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2017-2020 168
Gambar 2.58 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 169
Gambar 2.59 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 169
Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020..... 281
Gambar 3.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2016 – 2020..... 282
Gambar 3.3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2020 284
Gambar 4.1 Ilustrasi Visi dan Misi 304
Gambar 4.2 SIM Filariasis..... 350
Gambar 4.3 SIM Cascading..... 351
Gambar 4.4 Rekam Medis Elektronik (RME) 352
Gambar 4.5 Aplikasi Manajemen Go Online (Megono)..... 353
Gambar 4.6 Aplikasi Manajemen Karyawan Online (Makaryo) 354
Gambar 4.7 WhatsApp Auto 355

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran perencanaan pembangunan tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada tanggal 26 Februari 2021, maka Pemerintah Kota Pekalongan menyusun RPJMD baru yaitu RPJMD Tahun 2021-2026. Sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka RKPD Kota Pekalongan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, serta mempedomani RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

RKPD Kota Pekalongan Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2020 serta permasalahan global yaitu pandemi *COVID-19* yang saat ini masih berlangsung dan berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kota Pekalongan. Permasalahan lain yang tidak kalah penting yaitu banjir dan rob yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2022 akan fokus pada peningkatan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia dalam rangka pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) serta penanganan banjir dan rob yang didukung dengan peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. RKPD Kota Pekalongan Tahun 2022, serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2022, RPJMN Tahun 2020-2024, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 serta mendukung pencapaian agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dokumen RKPD Tahun 2022 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2022 meliputi :

1) Persiapan;
2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
3) Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;
4) Forum Perangkat Daerah;
5) Penyusunan Rancangan RKPD;
6) Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
7) Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
8) Penetapan RKPD.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2022 ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;

30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan yang dituangkan dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2022 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan Kota Pekalongan. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan.

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, maka RKPD Kota Pekalongan Tahun 2022 disesuaikan dan berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, serta memperhatikan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Selengkapnya disajikan dalam gambar berikut.

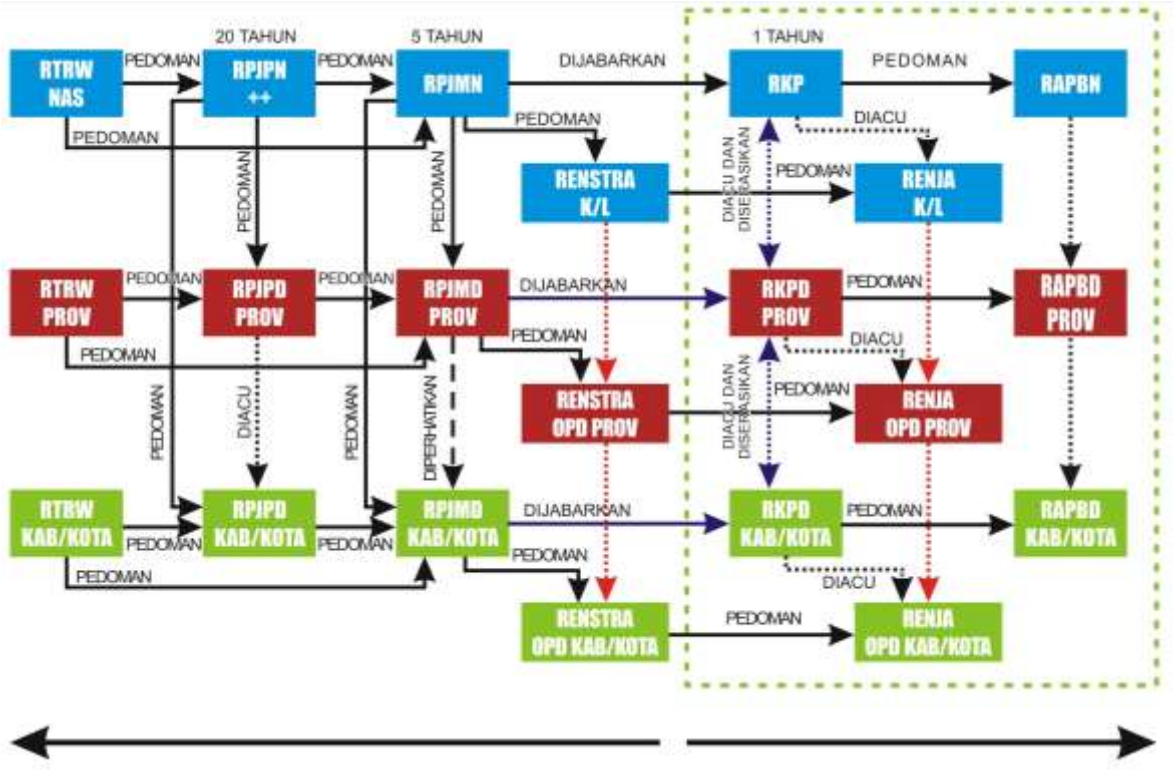

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

1.3.1. RKPD dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan menjabarkan rencana tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat

rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Kota Pekalongan Tahun 2022 merupakan penjabaran atas rencana pembangunan tahun pertama RPJMD periode 2021-2026, yaitu tahun 2022. Arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2022 yang dituangkan di dalam RKPD tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan tahun 2022 RPJMD.

Tabel 1.1 Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2022
Tema	*Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM*	*Tema*	*Sinergi Program Dan Kegiatan Pembangunan Dengan Pemerintah Pusat Dan Provinsi Dalam Rangka Penataan Lingkungan Yang Nyaman Bagi Akitivitas Sosial Ekonomi Masyarakat dengan Berlandaskan Nilai-Nilai Religiusitas*
1	Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP	1	Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP
2	Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan	2	Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan
3	Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menemukenali anak tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal, nonformal, ataupun lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga	3	Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menemukenali anak tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal, nonformal, ataupun lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga
4	Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	4	Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja
5	Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak	5	Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak
6	Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	6	Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
7	Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan	7	Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan

No.	Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2022
	mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun		mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun
8	Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	8	Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun
9	Peningkatan promosi, pemberdayaan dan pengelolaan pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, dengan lebih mendorong peran berbagai pihak, baik swasta, komunitas, ataupun masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	9	Peningkatan promosi, pemberdayaan dan pengelolaan pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, dengan lebih mendorong peran berbagai pihak, baik swasta, komunitas, ataupun masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal
10	Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan *event* seni dan budaya	10	Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan *event* seni dan budaya
11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
12	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	12	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

1.3.2. RKPD dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Sinergitas pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat diperlukan. Oleh karena itu, RKPD Kota Pekalongan berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah Provinsi. Penyelarasan prioritas pembangunan antara Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
1	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan	9	Peningkatan promosi, pemberdayaan dan pengelolaan pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, dengan lebih mendorong peran berbagai pihak, baik

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
	ketahanan bencana		swasta, komunitas, ataupun masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal
		7	Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun
2	Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	2	Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan
		6	Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		8	Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun
3	Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing	1	Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang ada
		3	Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menemukenali anak tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal, nonformal, ataupun lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga
		5	Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak
		4	Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja
		10	Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan *event* seni dan budaya

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
4	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
		12	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

1.3.3. RKPD dengan RKP Tahun 2022

Sebagaimana sinergitas pembangunan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa tengah, sinergitas dengan Pusat juga dilakukan. RKPD berpedoman pada RKP, dilakukan dengan penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dan Nasional.

Tabel 1.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	9	Peningkatan promosi, pemberdayaan dan pengelolaan pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, dengan lebih mendorong peran berbagai pihak, baik swasta, komunitas, ataupun masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	7	Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2	Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	6	Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		8	Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	**PRIORITAS**	**NO**	**PRIORITAS**
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang ada
		3	Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menemukenali anak tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal, nonformal, ataupun lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga
		5	Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak
		4	Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10	Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan *event* seni dan budaya
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	11	Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
		12	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

1.3.4. RKPD dengan Renja OPD Tahun 2021

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman pada RKPD. Renja memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.3.5. RKPD dengan RAPBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022

RKPD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota, menjadi pedoman dalam menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai

pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk :

a. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022;
b. Menjadi acuan dalam penyusunan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022.

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 adalah :

a. Menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah; dan
b. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.

1.5. SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2022

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2020, hasil evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2020, hasil evaluasi SDG's tahun 2020, dan permasalahan pembangunan daerah.

1. Kondisi Umum Daerah menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
2. Evaluasi pelaksanaan RPJMD sampai dengan tahun 2020 yang mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, realisasi target kinerja, dan Perangkat Daerah penanggung jawab.
3. Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi

daerah dan evaluasi pelaksanaan program, SPM dan SDG's tahun 2020 dan mengerucut menjadi isu strategis.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi sampai tahun 2020 dan perkiraan tahun 2022, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah tahun 2022, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Pekalongan, pokok-pokok pikiran DPRD serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program pembangunan daerah tahun 2022 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2022, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah dan dokumen rencana pembangunan lainnya yang relevan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berisi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Daerah Kota Pekalongan yang ditargetkan di tahun 2022.

BAB VII PENUTUP

Berisi penegasan arah kebijakan, prioritas dan fokus RKPD Kota Pekalongan Tahun 2022 yang telah sinkron dengan kebijakan Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah (terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29 kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan hanya 0,14 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Kota Pekalongan dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya serta jalur kereta api. Aksesbilitas Kota Pekalongan semakin meningkat dengan telah terbangunnya jalur rel ganda kereta api dan diharapkan akan terus meningkat dengan dibangunnya *interchange* jalan tol ke Jl. Dr. Sutomo (jalur regional/jalan arteri primer PANTURA) Kota Pekalongan pada tahun 2018.

Secara historis-morfologis, Kota Pekalongan yang berbentuk linier dengan kecenderungan ke arah Barat dan Timur menandakan kuatnya jalur transportasi regional pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier kota juga berkembang ke arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kota Pekalongan dengan kawasan sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini tentunya menjadi keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami.

Kota Pekalongan, sebagaimana wilayah di Pantura Jawa lainnya, sekarang ini terus mengalami bencana sebagai akibat dari pasang naik air laut atau rob. Genangan ini terus meluas dan dirasakan hampir di seluruh wilayah bagian Utara Kota Pekalongan, bahkan sudah meluas sampai ke wilayah bagian Barat dan Timur Kota Pekalongan. Namun demikian, kondisi ini diharapkan akan berkurang secara signifikan, sejalan dengan akan selesainya pembangunan tanggul rob oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Di samping itu, Pemerintah Pusat juga telah menetapkan Program Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi, dimana Kota Pekalongan menjadi salah satu sasaran program tersebut khususnya dalam hal penanganan masalah banjir rob.

Perkembangan terakhir, pandemi ***COVID-19*** (*Corona Virus Disease 2019*) yang melanda dunia telah berdampak terhadap tatanan ekonomi, sosial-budaya dan politik sebagian besar dunia, termasuk Indonesia, Provinsi Jawa Tengah maupun Kota Pekalongan. Dampak pandemi pun telah berimplikasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah pada tahun 2020 ini dan tentunya masih akan berdampak pada tahun-tahun berikutnya.

Secara umum, gambaran umum kondisi Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6 50’ 42" s.d. 6 55’ 44” Lintang Selatan dan 109 37’ 55” s.d. 109 42’ 19” Bujur Timur serta dengan koordinat fiktif 510.00 – 518.00 Km membujur dan 517.75 – 526.75 Km melintang. Batas wilayah secara administratif adalah :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kab. Batang
- Sebelah Selatan : Kab. Pekalongan dan Kab. Batang
- Sebelah Barat : Kab. Pekalongan

Berdasarkan Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 luas wilayah Kota Pekalongan adalah 45,25 Km^2. Berdasarkan revisi RTRW Kota Pekalongan yang telah disahkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.642 Ha atau 46,42 km^2. Perubahan ini dikarenakan adanya :

a. Pemutakhiran garis pantai sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
b. Pemutakhiran segmen batas wilayah administrasi
c. Perbaikan atas hasil kajian teknis dari pusat pemetaan batas wilayah pada Badan Informasi Geospasial terhadap perhitungan luas wilayah.

Dengan demikian maka luas wilayah Kota Pekalongan bertambah 1,16 Ha yang sebagian besar disebabkan oleh pemutakhiran garis pantai.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang manjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi : sektor primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.

Sebagai daerah yang telah berkembang, perekonomian Kota Pekalongan tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan sebesar 5,50 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,69 persen. Distribusi PDRB tertinggi terhadap struktur perekonomian di Kota Pekalongan disumbang oleh sektor perdagangan yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,79 persen, penyumbang terbesar kedua adalah sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 20,88 persen dan di urutan ketiga adalah sektor Konstruksi sebesar 14,63 persen. Didukung dengan posisi strategis Kota Pekalongan di

jalur Pantai Utara Jawa, maka Kota Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan daerah lainnya. Keunggulan ini diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang;
c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan; dan
d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan.

Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7 Km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

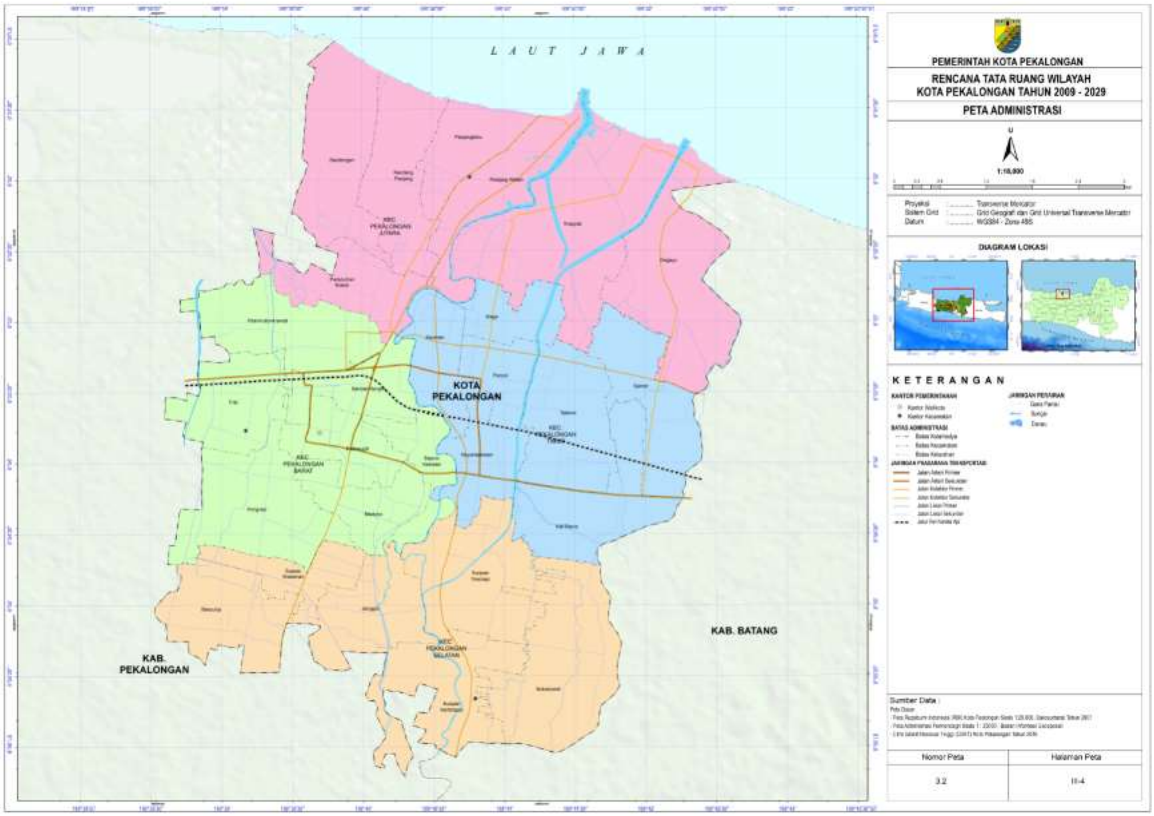

Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arat Barat dan Timur serta jalan ke arah Selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan sepanjang koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa.

Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan

No	Kecamatan	Luas (Km^2)	Persentase Luas (persen)
1	Kecamatan Pekalongan Barat	10,00	22
2	Kecamatan Pekalongan Timur	9,63	21
3	Kecamatan Pekalongan Selatan	11,47	25
4	Kecamatan Pekalongan Utara	15,32	33
	TOTAL	46,42	100

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirto dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru.

Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 15,32 Km^2 atau 33 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan.

2.1.2. Topografi dan Jenis Tanah

Secara topografis wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan antara 0 - 6 meter dpl. Keseluruhan wilayah berada pada kemiringan lereng 0-8 persen. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa keseluruhan wilayah Kota Pekalangan sangat datar, beda tinggi yang sangat kecil dan bahkan di beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut seperti di Kawasan Pabean Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan penelitian dan pendapat beberapa ahli, penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan telah terjadi secara siginifikan dan menjadi salah satu ancaman bagi pengembangan wilayah kota ke depan sehingga harus mendapatkan perhatian yang sangat serius untuk menanggulanginya.

Gambar 2.3 Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Wilayah yang sangat datar, kemudian terdapat kawasan yang memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut, berimplikasi terhadap pengelolaan sumberdaya air, terutama drainase. Tantangan pengelolaan sumberdaya air dan drainase ini tentunya akan semakin berat dihadapi Kota Pekalongan, apalagi dengan adanya fenomena pemanasan global dan perubahan iklim yang berimplikasi terjadinya kenaikan permukaan air laut.

Terdapat 4 (empat) jenis tanah di wilayah Kota Pekalongan, yaitu alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua serta alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan. Sebaran tanah alluvial hidromorf yaitu di kawasan Utara kota. Sebaran alluvial kelabu tua di wilayah

Timur dan Barat kota serta sebaran tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan terdapat di sepanjang koridor ke arah Selatan kota.

Jenis tanah alluvial hidromorf mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat, dan memiliki permeabilitas (*water run off*) lambat. Jenis tanah ini biasanya banyak digenangi oleh air sehingga warnanya tua kelabu sampai kehitaman. Daerah penyebarannya terdapat di berbagai ketinggian tetapi umumnya di dataran rendah dengan wilayah relatif datar. Jenis tanah alluvial hidromorf cocok dimanfaatkan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Jenis tanah alluvial kelabu tua mempunyai ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf, namun warnanya yang kelabu tua. Jenis tanah alluvial kelabu tua cocok juga digunakan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Demikian juga jenis tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan memiliki ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf dan cocok dimanfaatkan untuk penggunaan pertanian, pertambakan dan permukiman.

Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir, yaitu merupakan kawasan hilir dan muara beberapa sungai. Dengan kondisi tersebut maka kondisi ini berimplikasi terhadap sebagian wilayah Kota Pekalongan, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, curah hujan dan kondisi aliran sungai dari hulu. Bahkan di beberapa tempat sudah mengalami genangan permanen karena elevasinya yang sangat rendah, di bawah permukaan air laut. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya kawasan rob dan genangan pada kawasan permukiman, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Sebaran permukiman berada pada seluruh wilayah kota, terutama sepanjang koridor jalan karena seluruh wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang datar.

2.1.3. Geologi

Berdasarkan informasi batuan yang berasal dari analisis Peta Geologi Lembar Pekalongan, Skala 1:1000 yang bersumber dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung bahwa Litologi batuan di Kota Pekalongan merupakan endapan sedimen alluvium, terbentuk pada jaman holosen periode tersier dengan ketebalan ± 150 m yang terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan lempung, endapan sungai dan rawa. Endapan alluvium ini terbentuk menutupi lapisan batuan anggota breksi formasi Ligung yang bersusunan andesit, lava andesit hornblend dan tufa yang merupakan bagian atas formasi Ligung yang terbentuk pada pliosen akhir- pliosen awal. Lapisan alluvium pada permukaan di sepanjang pantai didominasi oleh pasir sedangkan di daerah muara adalah lempung, endapan sungai dan rawa.

Morfologi pantai di bagian Barat, berpasir halus yang bercampur dengan vegetasi seperti semak belukar atau ladang dan di pantai bagian Timur adalah berpasir cenderung berlumpur. Bentuk lahan di Kota Pekalongan dibedakan menjadi 2 bentukan yaitu dataran alluvial dan dataran alluvial pantai. Dataran alluvial merupakan hasil proses *fluvial* sedangkan dataran alluvial pantai merupakan hasil dari proses *marine*.

Satuan-satuan bentuk lahan yang berada pada kelompok dataran alluvial semuanya tersusun atas batuan yang berasal dari pengendapan material yang dibawa oleh aliran air karena diendapkan oleh aliran air maka terdapat sortasi yang baik. Material yang berukuran halus akan diendapkan belakangan dibandingkan dengan material yang berukuran kasar.

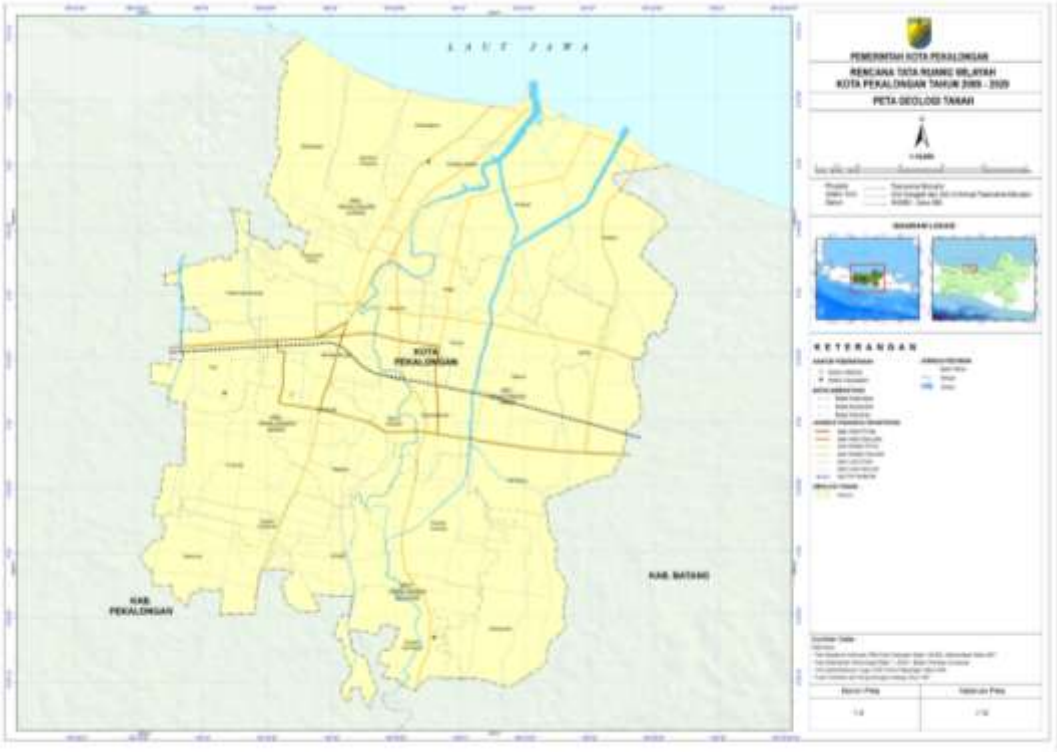

Gambar 2.4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

2.1.4. Hidrologi

Kota Pekalongan sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dialiri beberapa sungai. Terdapat 4 (empat) sungai yang melewati wilayah Kota Pekalongan yaitu Sungai Meduri, Bremi, Pekalongan dan Banger. Keempat sungai tersebut termasuk ke dalam 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Sengkarang, DAS Kupang dan DAS Gabus.

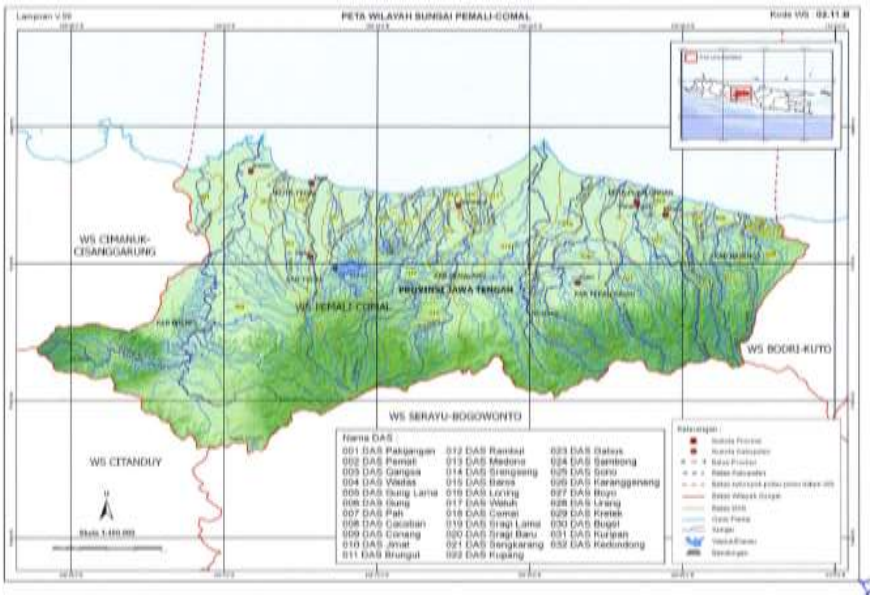

Gambar 2.5 Wilayah Sungai Pemali-Comal

Sumber : Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang Wilayah Sungai

Daerah Irigasi (DI) yang berada di wilayah Kota Pekalongan meliputi DI kewenangan Pemerintah, DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan. DI kewenangan Pemerintah meliputi DI Kupang-Kroempeng seluas 919 Ha dan DI Pesantren Kletak seluas 271 Ha. DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi DI Asem Siketek/Kesetu seluas 262 Ha. Sedangkan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan meliputi DI tambak yang terletak di wilayah Utara Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan merupakan dataran rendah yang hanya memiliki elevasi maksimum sekitar 6 mdpl menyebabkan laju aliran sungai menuju muara tidak terlalu deras karena berada pada wilayah muara sehingga setiap limbah yang dibuang ke sungai banyak yang mengendap. Ditambah lagi dengan beban pencemaran yang sangat besar dari buangan limbah rumah tangga dan industri di wilayah Kota Pekalongan maupun dari wilayah hulu (terutama Kabupaten Pekalongan) maka air permukaan di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa dimanfaatkan sebagai air baku untuk air bersih. Di wilayah Kota Pekalongan muncul suatu keyakinan, jika air sungainya berwarna-warni atau sangat kotor maka menunjukkan perekonomian sedang bagus. Air sungai yang kotor tersebut menunjukkan limbah buangan industri di Kota Pekalongan meningkat karena terjadinya proses produksi industri yang meningkat. Sebaliknya, jika air sungai relatif bersih maka menandakan berkurangnya proses produksi yang dilakukan industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah (CAT) di Indonesia maka wilayah Kota Pekalongan termasuk dalam bagian CAT Pekalongan-Pemalang. CAT Pekalongan-Pemalang berlokasi pada 1090 18’ 45,31” - 1090 51’ 52,35” Bujur Timur dan 060 46’ 33,52” - 070 13’ 24,20” Lintang Selatan, yang meliputi wilayah Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Air baku untuk air bersih Kota Pekalongan berasal dari wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Sumber air baku dari wilayah Kabupaten Pekalongan dan Batang meliputi : a) sumber air baku dari Program SPAM Regional Petanglong Tahap 1 yang terletak di Desa Jambangan Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan; b) sumber air baku dari Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, pemanfaatan melalui Instalasi Pengolah Air (IPA); c) sumber air baku dari mata air Desa Kembanglangit Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pemanfaatan dengan pengambilan langsung; d) sumber air baku dari mata air di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, pemanfaatan dengan pengambilan langsung, pemanfaatan melalui IPA (Instalasi Pengolahan Air). Sumber air baku bagi air minum dari wilayah Kota Pekalongan berasal dari pemanfaatan air tanah karena tidak adanya sumber mata air dan air permukaan yang sudah tidak memungkinkan dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

Dengan memperhatikan faktor topografi, geologi dan kondisi hidrogeologi, sumber daya air tanah di wilayah Kota Pekalongan termasuk ke dalam kategori air tanah dataran pantai sehingga kondisi air tanahnya sebagian besar merupakan air tanah dangkal. Air tanah dataran pantai ditutupi oleh *al gluvium* dan endapan pantai sebagai hasil rombakan batuan yang lebih tua. Kondisi ini dapat kita temui di sebagian besar wilayah, ketika kita melubangi tanah 1 (satu) meter saja maka akan segera keluar rembesan air tanah. Dengan memperhitungkan sebaran batuan, vegetasi dan kemiringan lereng, maka diperkirakan 30 persen dari jumlah curah hujan tersebut merupakan surplus pengisian kembali air tanah.

Karena ketersediaan air tanah yang cukup memadai maka beberapa lokasi telah dilakukan pengeboran sumur tanah dalam yang dikelola oleh PDAM Kota Pekalongan maupun PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Tetapi dengan kecenderungan tekanan kebutuhan yang semakin meningkat, baik kebutuhan perumahan/permukiman maupun kebutuhan industri pengolahan, dan kondisi wilayah

Kota Pekalongan yang merupakan wilayah pesisir maka sebaiknya pengambilan air tanah dalam di wilayah Kota Pekalongan diharapkan dapat dikendalikan sehingga tidak mengganggu ketersediaannya. Dari data Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, pada tahun 1985 PDAM Kota Pekalongan mulai membuat sumur bagi air baku dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Namun ketika tahun 2015 PDAM membuat sumur maka kedalamannya telah mencapai ± 24 meter. Dari kondisi tersebut, selama 30 tahun, bahwa setiap tahunnya telah terjadi penurunan permukaan air tanah rata-rata 11 centimeter per tahun. Data ini tentunya menunjukkan pemanfaatan air tanah yang telah melebihi daya dukungnya. Apabila hal ini berlangsung terus-menerus maka dapat menimbulkan risiko lingkungan yang sangat besar, utamanya intrusi air laut dan penurunan permukaan tanah.

Bertambahnya jumlah penduduk menjadikan kebutuhan akan air bersih juga terus bertambah. Sebagai salah satu sumber terbaik untuk air bersih, air tanah terus diambil secara intensif, terutama untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Seringkali, pengambilan air tanah ini menjadi tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan ketersediaan serta zona pemanfaatannya yang dapat berdampak terhadap kuantitas, kualitas dan daya dukung lingkungan pada CAT setempat. Dampak dari pengambilan air tanah bisa menimbulkan terjadinya penurunan muka air tanah yang melebihi ambang batas dan juga amblesan tanah dan daya rusak air tanah lain seperti pencemaran air tanah dan penyusupan (intrusi) air laut.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2020 sedang melakukan penelitian untuk memastikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat segera didapatkan sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengambilan kebijakan ke depan bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pekalongan.

2.1.5. Klimatologi

Iklim Kota Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, jumlah hari hujan paling banyak terjadi pada tahun 2016, dengan hari hujan sebanyak 140 hari dan curah hujan paling banyak terjadi pada tahun 2020 sebanyak 2.896 mm. Sementara itu selama lima tahun terakhir jumlah curah hujan paling sedikit terjadi pada tahun 2017, dengan jumlah hari hujan sebanyak 104 hari dan curah hujan sebanyak 1.647 mm^3.

Dilihat dari kondisi tersebut maka menurut Smith dan Ferguson tipe iklim di wilayah Kota Pekalongan adalah Tipe B. Iklim Tipe B menggambarkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah basah, dengan nilai Q (perbandingan bulan kering dan bulan basah dikalikan 100 persen) bernilai antara 14,3-33,3 persen. Sementara itu suhu/temperatur di wilayah Kota Pekalongan sepanjang tahun 2020 berkisar antara 23,40^{o}C – 33,1^{o}C.

Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2020

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)
1	Januari	17	497
2	Februari	17	763
3	Maret	13	351
4	April	9	203

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)
5	Mei	6	252
6	Juni	4	20
7	Juli	4	15
8	Agustus	7	76
9	September	9	135
10	Oktober	6	76
11	Nopember	9	196
12	Desember	15	312
TOTAL		116	2.896
Tahun 2019		80	1.831
Tahun 2018		93	1.710
Tahun 2017		104	1.647
Tahun 2016		140	2.477

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2021, 2021

2.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah sawah dan kering. Luas tanah di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari fungsi/penggunaannya maka mengalami pergeseran. Tanah sawah luasnya setiap tahun berkurang, sebaliknya tanah kering mengalami peningkatan perluasan. Pada tahun 2020, luas tanah sawah adalah 886 Ha, hal ini berkurang sekitar 4,22 persen dari luas 925 Ha pada tahun 2019. Sedangkan untuk tanah kering meningkat menjadi 3.756 Ha, ada penambahan sekitar 4,33 persen dari luas 3.600 Ha pada tahun 2019.

Tabel 2.3 Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Pekalongan Barat	81,00	918,70	999,70
2	Pekalongan Timur	271,00	692,37	963,37
3	Pekalongan Selatan	419,00	728,38	1.147,38
4	Pekalongan Utara	115,00	1.416,50	1.531,50
TOTAL		886,00	3.756,00 (pembulatan)	4.642,00 (pembulatan)
Tahun 2019		925,00	3.600,00	4.525,00
Tahun 2018		969,00	3.556,00	4.525,00
Tahun 2017		980,00	3.545,00	4.525,00
Tahun 2016		1.152,00	3.373,00	4.525,00

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2021, 2021

Menurut sistem pengairannya, sawah-sawah di Kota Pekalongan adalah dengan sistem pengairan teknis. Total sawah irigasi teknis tahun 2020 adalah seluas 886 Ha, yang meliputi Kecamatan Pekalongan Barat seluas 81 Ha, Kecamatan Pekalongan Timur seluas 271 Ha, Kecamatan Pekalongan Selatan seluas 419 Ha dan Kecamatan Pekalongan Utara seluas 115 Ha. Kecenderungan yang ada, dari tahun ke tahun, jumlah sawah irigasi teknis semakin menyusut. Jumlah sawah irigasi teknis di Kota Pekalongan tahun 2016 seluas 1.152 Ha dan tahun 2017 seluas 980 Ha. Adapun jumlah sawah irigasi

teknis pada tahun 2018 dan 2019 seluas 969 Ha dan 925 Ha dan tahun 2020 seluas 886 Ha.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan guna lahan yang kecenderungannya semakin meningkat untuk kawasan terbangun (*built up area*). Kawasan terbangun tersebut terutama untuk pembangunan perumahan/kawasan permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. Di samping karena kebutuhan untuk kegiatan budidaya non pertanian, semakin berkurangnya sawah/sawah beririgasi teknis karena semakin meluasnya kawasan sawah yang terkena air laut sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi lahan *idle* (lahan menganggur atau lahan yang tidak digunakan), terutama lahan yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.

Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Dimana lahan yang dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu: lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut, maupun lahan tidak beririgasi. Berdasarkan revisi RTRW Kota Pekalongan yang telah disahkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 maka telah dialokasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 521 Ha atau berkurang dari luasan sebelumnya yaitu seluas 737 Ha. Perubahan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam luasan yang lebih kecil karena didasarkan kondisi dan fakta di lapangan semakin menyempitkan lahan pertanian di wilayah Kota Pekalongan serta semakin meningkatnya kebutuhan lahan bagi pengembangan permukiman, sarana dan prasarana perkotaan.

Dalam proses perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009–2029, diusulkan perubahan luasan dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut. Usulan tersebut adalah penyesuaian lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam luasan yang lebih kecil karena didasarkan kondisi dan fakta di lapangan semakin menyempitkan lahan pertanian di wilayah Kota Pekalongan serta semakin meningkatnya kebutuhan lahan bagi pengembangan prasarana dan sarana perkotaan.

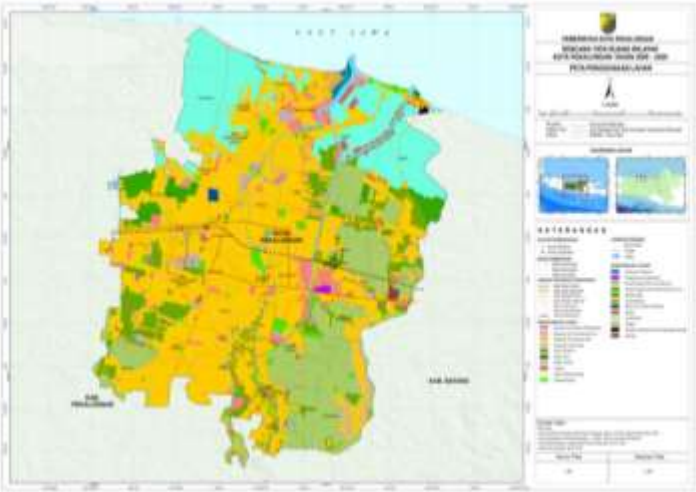

Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Penggunaan lahan di wilayah Kota Pekalongan yang paling dominan adalah kawasan permukiman, pertanian, tambak serta perdagangan dan jasa. Akibat kebutuhan bagi pengembangan wilayah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana perkotaan maka tekanan terhadap kebutuhan lahan akan terus meningkat. Kecenderungan tekanan tersebut lebih banyak terhadap penggunaan sawah karena sawah dan tambak tentunya memiliki nilai lahan (*land value*) yang relatif lebih rendah. Sedangkan pilihan penggunaan tambak tidak dilakukan karena sebagian besar tambak berlokasi di wilayah Utara, yang merupakan kawasan rob/pasang surut sehingga kecenderungan alih fungsi lahan adalah pada lahan pertanian.

Permasalahan umum pengembangan wilayah di Kota Pekalongan adalah keterbatasan lahan. Kebutuhan pembangunan perkotaan berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan lahan. Tentunya, kecenderungannya adalah menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian. Namun, di sisi lain terdapat kebijakan untuk tetap mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satu dinamika permasalahan perkotaan ini harus dikelola sebaik-baiknya, khususnya dalam kerangka kebijakan penataan ruang. Fokus pelaksanaan urusan penataan ruang harus lebih ditekankan pada tataran pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan RPJPD bahwa visi Kota Pekalongan adalah “Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Sedangkan berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah “Terwujudnya Kota Kreatif yang didukung Perdagangan dan Jasa, Industri, dan Perikanan, yang Nyaman, Aman, Produktif, serta Berkelanjutan”.

Sebagaimana visi dan tujuan di atas serta kondisi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa wilayah Kota Pekalongan memiliki kekhasan kondisi yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Secara geografis alami, Kota Pekalongan merupakan simpul strategis di koridor pantai Utara Pulau Jawa. Berdasarkan sistem pengembangan wilayah pun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan batik sebagai penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus dikembangkan yaitu sektor perikanan dan industri. Pengembangan batik, perikanan industri ke depan diharapkan dapat semakin terus ditingkatkan dengan daya inovasi yang dimiliki seluruh warga Kota Pekalongan sehingga dapat memberikan nilai tambah (*value added*) setinggi-tingginya bagi Kota Pekalongan. Namun demikian, tentunya pengembangan potensi tersebut harus tetap dibingkai dalam kerangka tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan Kota Pekalongan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, rencana struktur ruang Kota Pekalongan terdiri atas Pusat Kegiatan dan Sistem Jaringan Prasarana. Pusat Kegiatan dijabarkan dalam hirarki yang terdiri dari Pusat Palayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Lingkungan (PL). Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi kawasan Alun-Alun, pusat kegiatan perdagangan-jasa skala regional dan kawasan Stasiun di Kelurahan Bendan Kergon. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota, SPPK Kecamatan Pekalongan Utara terletak di Kelurahan Panjang Wetan, SPPK Kecamatan Pekalongan Barat terletak di Kelurahan Tirto, SPPK Kecamatan Pekalongan Timur terletak di Kelurahan Kalibaros, SPPK Kecamatan Pekalongan Selatan

terletak di Kelurahan Banyurip. Pusat Lingkungan sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota berada di Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Degayu, Kelurahan Gamer, Kelurahan Kuripan Kertoharjo dan Kelurahan Sokoduwet.

Untuk sistem jaringan prasarana terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan. Untuk rata-rata ketercapaian infrastruktur dasar perkotaan di Kota Pekalongan, pada tahun 2019 mencapai 91,41 persen yang terdiri dari sektor air minum, sanitasi dan persampahan. Gambaran lebih detail dapat dilihat pada peta rencana struktur ruang berikut.

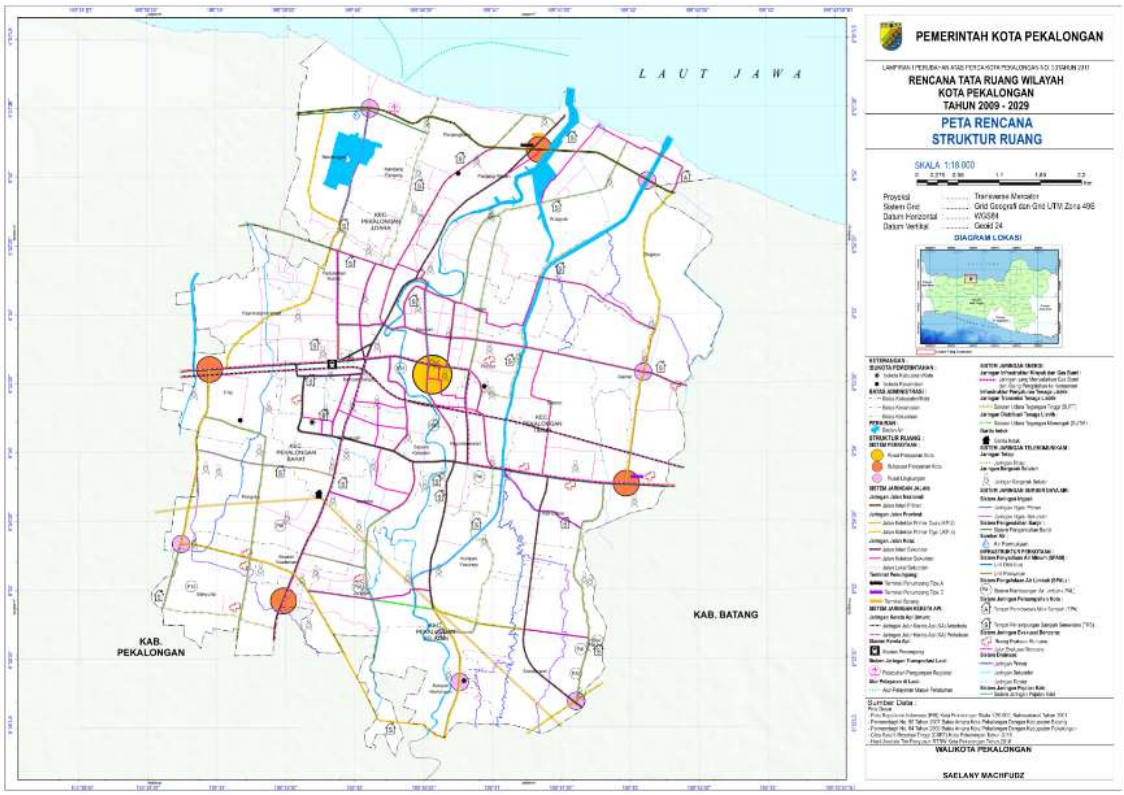

Gambar 2.7 Peta Rencana Struktur Ruang

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, 2021

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan memperhatikan rencana pola ruang, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, ruang terbuka hijau (RTH) kota dan kawasan ekosistem mangrove. Adapun kawasan budidaya terdiri atas kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan pertahanan keamanan. Rencana pola ruang digambarkan sebagaimana peta berikut.

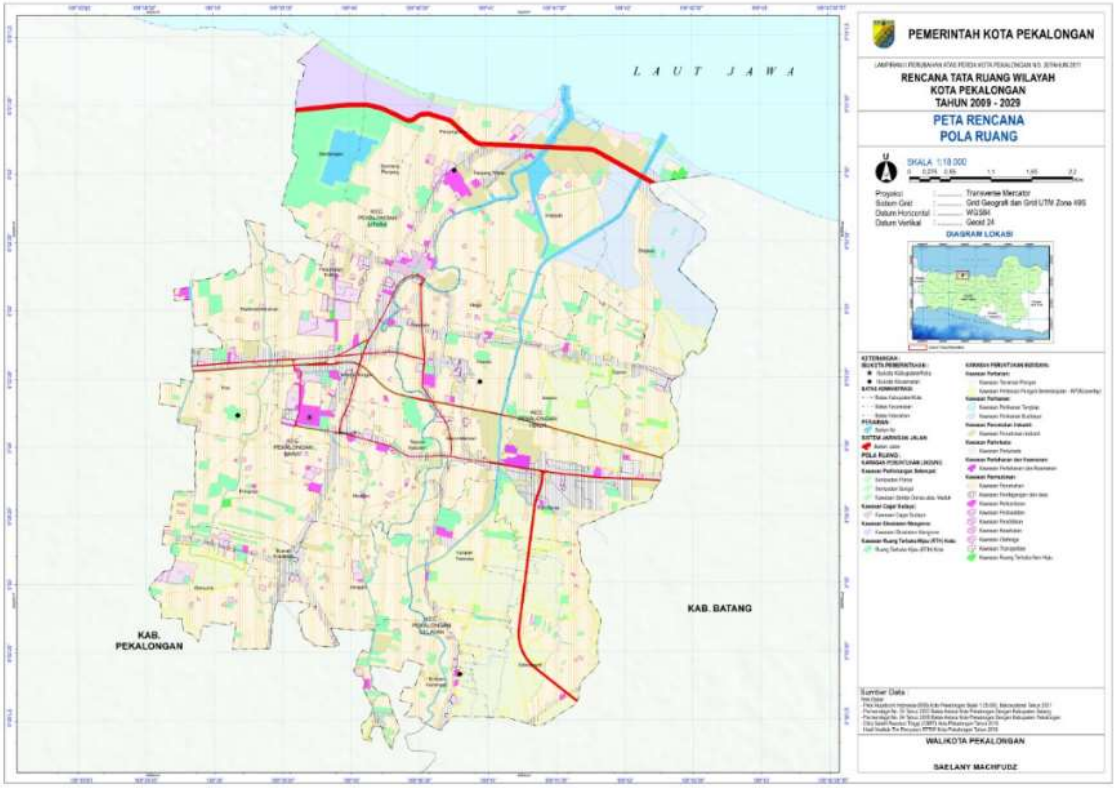

Gambar 2.8 Peta Rencana Pola Ruang

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kota Pekalongan, sebagaimana tertuang pada Rencana Pola Ruang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 pada Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

1. Kawasan Lindung

1) Kawasan Perlindungan Setempat

Terdiri atas sempadan sungai, sempadan pantai dan kawasan sekitar danau atau waduk. Sempadan sungai memiliki luas ± 24 Ha, sempadan pantai memiliki luas ± 23 Ha dan kawasan sekitar danau atau waduk memiliki luas ± 15 Ha. Kawasan sempadan sungai bertanggul dengan lebar sempadan sungai 3 meter meliputi sempadan Sungai Kupang, Gawe, Banger Lama dan Gabus. Kawasan sempadan sungai tidak bertanggul dengan lebar sempadan sungai 10 meter meliputi Sungai Meduri dan Bremi. Sempadan pantai diperuntukkan perlindungan pantai dari erosi dan abrasi serta perlindungan untuk mangrove dan terumbu karang, selebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar ke arah darat yang berlokasi di Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi, Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Krapyak dan Degayu. Kawasan sekitar danau atau waduk yang berfungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk yang berada di Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara.

2) Kawasan Cagar Budaya

Seluas ± 9 Ha, terdiri dari Kawasan Heritage Jetayu di Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara.

3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

Terdiri dari RTH publik seluas 338 Ha (atau sekitar 13,16 persen dari luas wilayah terbangun Kota Pekalongan) RTH Publik terdiri dari taman, lapangan dan Pemakaman yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pekalongan.

4) Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan Ekosistem Mangrove merupakan sebuah lingkungan dengan ciri khusus dimana lantai hutannya digenangi oleh air dimana salinitas juga fluktuasi permukaan air tersebut sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kawasan ekosistem mangrove berada di Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Krapyak dan Panjang Baru seluas 89 (delapan puluh sembilan) hektar.

2. Kawasan budidaya

1) Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian berupa tanaman pangan seluas 521 (lima ratus dua puluh satu) Ha berada di Kelurahan Banyurip, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo, Sokoduwet, Pringrejo, Degayu, Gamer, Kalibaros dan Setono. Lahan pertanian tanaman pangan tersebut merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

2) Kawasan Perikanan

Terdiri atas kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap seluas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar berupa pengembangan fasilitas hasil perikanan tangkap meliputi :

a. Pengolahan hasil perikanan berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara.
b. Kawasan pemasaran hasil perikanan berupa fasilitas pelelangan/ pasar ikan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan dan/ atau Kelurahan Krapyak.
c. Teknopark perikanan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan.
d. Prasarana penunjang pelabuhan perikanan.

Kawasan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 173 (seratus tujuh puluh tiga) hektar berada di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

3. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman terdiri atas kawasan perumahan seluas kurang lebih, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan olahraga, kawasan transportasi, kawasan ruang terbuka non hijau dan kawasan sektor informal yang tersebar di seluruh Kota Pekalongan. Dengan luas sebagai berikut:

a. Kawasan perumahan dengan luas kurang lebh 2.429 (dua ribu empat ratus dua puluh sembilan) hektar.
b. Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hektar.
c. Kawasan perkantoran terdiri atas perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta dengan luas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektar.
d. Kawasan peribadatan dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektar.
e. Kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 98 (Sembilan puluh delapan) hektar.
f. Kawasan kesehatan dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.

g. Kawasan olahraga dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar.
h. Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.
i. Kawasan ruang terbuka non hijau dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar.
j. Kawasan sektor informal.

4. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar dan industri menengah. Seluas kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hektar berada di :

a. Kecamatan Pekalongan Selatan berada di:
   1. Kelurahan Banyurip;
   2. Kelurahan Buaran Kradenan;
   3. Kelurahan Jenggot;
   4. Kelurahan Kuripan Kertoharjo; dan
   5. Kelurahan Kuripan Yosorejo.
b. Kecamatan Pekalongan Utara berada di:
   1. Kelurahan Bandengan;
   2. Kelurahan Krapyak;
   3. Kelurahan Padukuhan Kraton;
   4. Kelurahan Panjang Wetan;
   5. Kelurahan Kandang Panjang; dan
   6. Kelurahan Panjangbaru.
c. Kecamatan Pekalongan Timur berada di:
   1. Kelurahan Gamer;
   2. Kelurahan Kali Baros;
   3. Kelurahan Klego;
   4. Kelurahan Noyontaansari;
   5. Kelurahan Poncol; dan
   6. Kelurahan Setono.
d. Kecamatan Pekalongan Barat berada di:
   1. Kelurahan Bendan Kergon;
   2. Kelurahan Medono;
   3. Kelurahan Pasirkratonkramat;
   4. Kelurahan Pringrejo;
   5. Kelurahan Sapuro Kebulen; dan
   6. Kelurahan Tirto.

5. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata terdiri dari pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan. Pariwisata budaya berada di Kelurahan Panjang Wetan (Kawasan Jetayu), Kelurahan Krapyak, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kelurahan Pringrejo Kelurahan Noyontaansari dan Kelurahan Kauman. Pariwisata alam seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar berada di Kelurahan Krapyak, Panjang Wetan dan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara. Pengembangan pariwisata buatan, meliputi wisata belanja batik, kerajinan tenun, dan *handycraft* terletak di Kelurahan Podosugih, Medono, Bendan Kergon, Poncol, Kali

Baros, Gamer, Noyontaansari, Setono, Klego, Banyurip, Kauman; dan Pasirkratonkramat.

6. Kawasan Pertahanan-Keamanan Negara

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas asrama dan markas Brimob di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur; asrama dan kantor Polwil di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat; kantor Polwil di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor Polresta di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; dan kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat.

7. Sinergi Kota Pekalongan Dengan Daerah Tetangga Berkaitan Dengan Aspek Tata Ruang

Terkait aspek perencanaan tata ruang dalam revisi Perda RTRW Kota Pekalongan telah direncanakan beberapa hal yang dapat bersinergi dengan Perda RTRW Kabupaten Pekalongan dan Perda RTRW Kabupaten Batang, sebagai berikut:

1) Struktur Ruang

a. Telah direncanakan Jalan Lingkar Utara Petanglong, yang akan menghubungkan kawasan strategis PLTU Batang dan Kawasan Industri Terpadu (di Kabupaten Batang) – Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara dan Kawasan Wisata Pantai (di Kota Pekalongan) – Rencana Kawasan Industri (di Kabupaten Pekalongan) – jalur Pantura. Adanya Jalan Lingkar Utara Petanglong ini akan mempermudah akses ke kawasan-kawasan strategis tersebut, sekaligus juga akan mengurangi kemacetan di jalur Pantura, sehingga harapannya akan menaikkan potensi pertumbuhan ekonomi di 3 daerah tersebut.

b. Telah direncanakan jalur transportasi masal (BRT) yang menghubungkan dari Kota Batang – Kota Pekalongan – Kota Kajen. Diharapkan dengan disediakannya fasilitas transportasi masal (BRT) yang nyaman ini, akan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, sehingga akan mengurangi kepadatan lalu-lintas pada jalur-jalur yang menghubungkan 3 daerah tersebut.

2) Pola Ruang

Perencanaan Pola Ruang untuk wilayah-wilayah perbatasan telah melalui proses padu serasi dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, sehingga sudah ada sinkronisasi. Namun demikian, perlu diperhatikan juga perkembangan potensi kebencanaan di masa mendatang yang ada di wilayah-wilayah perbatasan tersebut, yang menjadikan perlu dipikirkan dan disepakati bersama antara dua daerah yang berbatasan, rencana Pola Ruang yang lebih feasible.

Pada wilayah-wilayah yang dekat pantai, “pergerakan kawasan yang terdampak rob dengan probabilitas tinggi bergeser dari tahun 2025 hingga 2030 pada kawasan tambak. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan tambak merupakan lahan yang memiliki probabilitas paling tinggi terdampak dan berubah menjadi kawasan rob. Hingga pada akhir tahun 2035, rob mulai masuk pada kawasan persawahan untuk menjadi kawasan rob. Hal ini tentu menggambarkan dampak yang yang diberikan pada risiko bencana banjir, mengancam aktivitas ekonomi masyarakat di lokasi kajian, khususnya aktivitas perikanan dan pertanian” (Laporan *Loss and Damage Assesment in Pekalongan City* dan

Pekalongan Regency Under Zurich Flood Resilience Alliance Program, Yayasan Mercy Corps Indonesia, 2021).

3) Batas Wilayah administratif

Telah dilakukan kegiatan survey dan perapatan patok batas wilayah di 3 daerah tersebut, yang melibatkan Bagian Tata Pemerintahan Setda, Lurah / Kepala Desa yang berbatasan dan BPN. Yang outputnya akan menghasilkan batas wilayah yang lebih detail deliniasinya. Untuk melegal formalkan out put kegiatan ini perlu dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan di tingkat kepala daerah, kemudian dimintakan persetujuan ke Kementerian Dalam Negeri.

2.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat dinamis, dengan berbagai macam proses fisik, termasuk kenaikan muka air laut, penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), serta erosi-sedimentasi. Selain itu, wilayah pesisir juga menerima berbagai dampak yang disebabkan oleh aktivitas manusia, sebagai contohnya adalah beban bangunan serta ekstraksi air tanah besar-besaran yang menyebabkan penurunan permukaan tanah. Semua proses tersebut mempengaruhi perubahan garis pantai dan perkembangan bentuk landskap pesisir.

Pekalongan sebagai salah satu kota pesisir di pantai Utara Jawa dengan topografi yang landai merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kondisi ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan topografi di pantai Selatan Jawa yang relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan bahwa kondisi geografis Pekalongan memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap pemanasan global. Tingginya nilai kerentanan itu tidak terlepas dari kondisi geomorfologi Pekalongan yang berupa pantai berpasir dan erosi pantai mencapai lebih dari 1 meter per tahun. Selain itu, kisaran pasang surutnya sekitar 0,7 meter. Berdasarkan kajian yang dilakukan Diposaptono (2009), penghitungan nilai risiko terhadap kenaikan paras muka air laut di Pekalongan rata-rata 2,4. Nilai tersebut dikategorikan sebagai daerah berisiko besar.

Bencana alam yang telah dan resiko terjadi di wilayah Kota Pekalongan meliputi abrasi, rob, banjir dan angin puting beliung. Perubahan iklim global yang ditandai dengan kenaikan suhu bumi dan kenaikan permukaan air laut bisa jadi juga telah melanda wilayah Kota Pekalongan. Dalam beberapa tahun ini, upaya untuk menanggulangi rob/air pasang di wilayah Kota Pekalongan terus-menerus dilakukan namun kawasan tergenang rob senantiasa bertambah luas dan bertambah intensitasnya.

Berdasarkan potensi ancaman bencana maka terdapat 4 (empat) potensi bencana di wilayah Kota Pekalongan yaitu bencana rob, bencana banjir, bencana abrasi dan bencana angin puting beliung. Keempat ancaman tersebut merupakan ancaman bagi wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Ancaman bencana, bukan lagi hanya pada kawasan di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara saja, tetapi juga menjadi ancaman bagi keseluruhan kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur. Ancaman untuk keempat kecamatan tersebut adalah banjir. Banjir menjadi potensi yang besar karena topografi wilayah Kota Pekalongan yang sangat datar dan merupakan kawasan muara dari beberapa sungai dari kawasan hulu di daerah lainnya.

Bencana yang cukup signifikan memberikan dampak bagi masyarakat yang tinggal di Kota Pekalongan, khususnya Kecamatan Pekalongan Utara antara lain bencana banjir dan banjir rob/pasang. Bencana tersebut memberi dampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di kota ini. Tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur dan sarana

wilayah saja, melainkan juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Jumlah kawasan kumuh (*slum area*) yang masih terdapat di wilayah Kota Pekalongan, terutama disebabkan oleh bencana rob ini, Faktor pemicu terjadinya kawasan kumuh, bukan hanya karena prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang tidak memadai saja tetapi akibat rob yang lebih dominan.

Abrasi di Kota Pekalongan telah menimbulkan persoalan sosial yang kompleks. Abrasi terparah di Kota Pekalongan terjadi di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yaitu di Pantai Sari. Di sana abrasi bahkan telah mengganggu ketenangan hidup sekitar 200 kepala keluarga (KK). Pasalnya, abrasi telah menimbulkan rob yang hampir setiap hari menggenangi rumah penduduk. Akibatnya, warga di sana banyak yang terkena penyakit kulit dan terganggu aktivitasnya.

Penurunan permukaan tanah juga menjadi resiko bencana yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan naskah akademik penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan (KSP) Petanglong bahwa penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan terjadi karena tanah yang membentuk wilayah Kota Pekalongan adalah tanah alluvial, yang merupakan hasil sedimentasi. Tanah-tanah hasil sedimentasi masih memerlukan waktu ratusan tahun ke depan agar kondisi tanah menjadi stabil. Penurunan permukaan tanah juga memungkinkan terjadi karena kondisi cekungan air tanah yang kosong akibat eksploitasi atau pengambilan air tanah dalam yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini terutama disebabkan oleh pengambilan air tanah yang terjadi, kapasitasnya melebihi dari kapasitas pengisian alami air tanah.

Berdasarkan gambaran potensi kebencanaan di Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kota (Pasal 5) dan strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana (Pasal 13A) melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029, yaitu :

1) Kebijakan penataan ruang wilayah kota, meliputi :
   a. Pengembangan kegiatan industri kreatif yang mempertimbangkan kualitas lingkungan;
   b. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang mampu meningkatkan peran Kota sebagai pusat kawasan regional Petanglong;
   c. Pengaturan kegiatan industri;
   d. Peningkatan hasil perikanan dan optimalisasi lahan pertanian;
   e. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
   f. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
   g. Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan;
   h. Peningakatan pengelolaan kawasan strategis Kota;
   i. Peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana; dan
   j. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.
2) Strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana, meliputi :
   a. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung penanganan kawasan rawan bencana;
   b. Mengembangkan RTH di sekitar DAS dan pada kawasan rawan bencana risiko tinggi;
   c. Meningkatkan mitigasi bencana risiko tinggi;

d. Mewujudkan arahan peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana; dan
e. Mewujudkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana.

Pada Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 disebutkan adanya Sistem jaringan evakuasi bencana berupa jalan yang direncanakan sebagai jalur evakuasi bencana menuju ruang evakuasi bencana. Jalur evakuasi bencana terdiri dari :

a. Jalur evakuasi terhadap bencana abrasi, meliputi Jalan Pantai Slamaran di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara dan Jalan Pantai Sari dan Jalan Samudra di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
b. Jalur evakuasi terhadap bencana rob, meliputi Jalan Samudera Kelurahan Panjang Baru dan Kelurahan Kandang Panjang, Jalan Samudera Pasai di Kelurahan Panjang Baru, Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan, dan Jalan WR. Supratman di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
c. Jalur evakuasi terhadap bencana banjir terdapat di :
   - Kecamatan Pekalongan Selatan, meliputi Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Banyurip dan Kelurahan Buaran Kradenan;
   - Kecamatan Pekalongan Barat, meliputi Jalan Ahmad Dahlan di Kelurahan Tirto, Kelurahan Pringrejo dan Jalan Pemuda di Kelurahan Bendan Kergon; dan Jalan Gajah Mada di Kelurahan Pasir Kraton Kramat;
   - Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi Jalan WR. Supratman dan Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan, Jalan Diponegoro dan Jalan Imam Bonjol di Kelurahan Padukuhan Kraton.
d. Jalur evakuasi terhadap bencana angin topan, terdapat di Jalan Ki Mangun Sarkoro di Kelurahan Degayu dan Jalan Patimura di Kelurahan Gamer.

Sedangkan Ruang evakuasi bencana, antara lain :

- Lapangan;
- Stadion;
- Taman publik;
- Bangunan rumah;
- Bangunan kantor pemerintah;
- Bangunan fasilitas sosial;
- Bangunan fasilitas umum, dan
- Ruang/bangunan Lainnya.

2.1.9. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2020 berdasarkan proyeksi BPS Kota Pekalongan sebanyak 307.150 jiwa, terdiri dari 155.145 jiwa laki-laki dan 152.005 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima tahun terakhir, jumlah laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada angka sex rasio sebesar 102,07 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102,07 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kota Pekalongan dan berdasarkan jenis kelaminnya, disajikan dalam tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
2016	149.623	149.599	299.222
2017	150.887	150.983	301.870
2018	152.202	152.275	304.477
2019	153.778	153.319	307.097
2020	155.145	152.005	307.150

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata penambahan jumlah penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sekitar 2.625 jiwa. Pada tahun 2020 bertambah 53 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,85 persen.

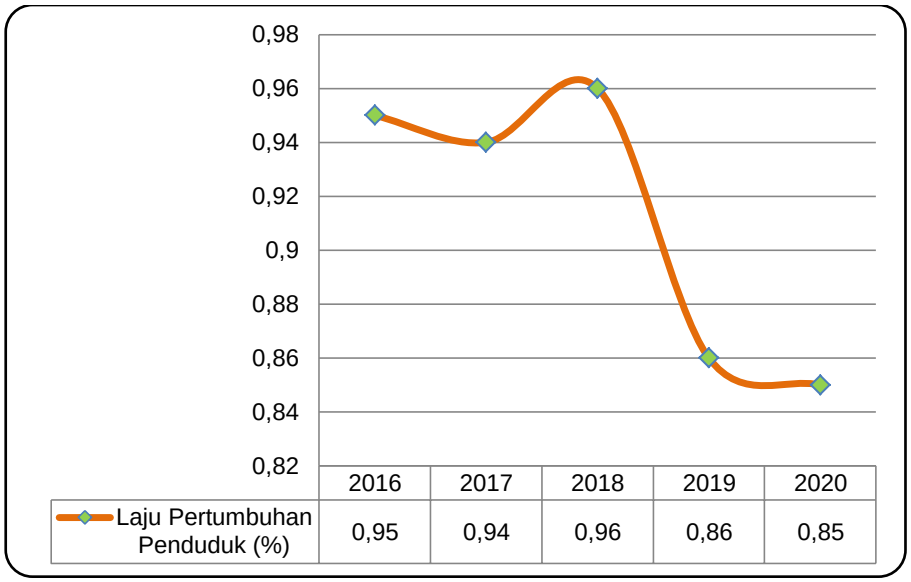

Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Gambar 2.9 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan tahun 2016-2020. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,85 persen. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan cenderung menurun.

Dari segi kepadatan penduduk, Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan bertambahnya penduduk yang lahir, penduduk yang meninggal, migrasi masuk ke kota Pekalongan dan keluar Kota Pekalongan, kepadatan penduduk per kilometer persegi mengalami peningkatan. Berikut data kepadatan penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 disajikan dalam Gambar 2.10 berikut.

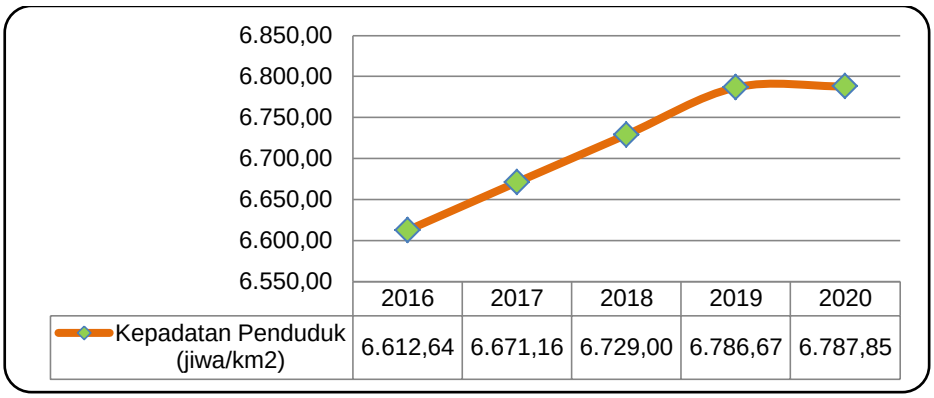

Gambar 2.10 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berpendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Pekalongan pada Tahun 2020, pendidikan SD ke bawah sebanyak 52.326 jiwa (35,79 persen), diikuti SMP sebanyak 29.357 jiwa (20,08 persen) dan Sekolah Menengah (SM) ke atas sebanyak 64.536 jiwa (44,13 persen) Adapun jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2020 berjumlah 146.219 jiwa.

Secara bertahap mulai tahun 2016, struktur pekerja yang lulusan SD kebawah berfluktuatif akan tetapi tidak signifikan baik secara persentase maupun jumlah. Demikian juga struktur pekerja pada pendidikan SLTP dan Sekolah Menengah (SM) keatas selama lima tahun baik dalam jumlah kuantitatif maupun persentase mengalami perbaikan namum tidak signifikan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan komposisi pekerja pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu 52.326 jiwa (35,79 persen) dan tingkat SLTP 29.357 jiwa (20,08 persen). Namun pada tingkat pendidikan SM (Sekolah Menengah) ke atas meningkat yaitu 64.536 jiwa (44,13 persen). Secara lengkap data Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja						
	≤SD		SLTP		≥SM		Jumlah
	orang	persen	orang	persen	orang	persen	
2016	58.503	40,80	30.951	21,59	53.922	37,61	143.376
2017	61.346	41,03	30.055	20,11	58.086	38,86	149.487
2018	61.358	40,47	31.072	20,50	59.167	39,03	151.597
2019	56.934	35,89	35.203	22,19	66.498	41,92	158.635
2020	52.326	35,79	29.357	20,08	64.536	44,13	146.219

Sumber : diolah dari Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

*) BPS tidak melakukan survei untuk tahun 2016 dan data yang disajikan sama dengan tahun 2015

Pada tingkat minimal Sekolah Menengah, secara struktur pekerja yang bekerja meningkat *trend*nya selama lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2016 berjumlah 53.922 jiwa atau setara 37,61 persen dari jumlah pekerja, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 64.536 jiwa atau setara 44,13 persen. Secara garis besar selama lima tahun terakhir jumlah pekerja untuk tingkat SD, SMP dan SM mengalami fluktuasi, dan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 158.635 jiwa.

Dalam konteks rentang usia, penduduk Kota Pekalongan tahun 2020 paling banyak berada pada rentang usia 25-29 tahun yaitu sebanyak 25.645 jiwa, diikuti rentang usia 30-34 tahun sebanyak 25.585 jiwa. Sedangkan jumlah lansia di atas usia 60 tahun sebanyak 16.721 jiwa. Dan pada rentang usia lainnya perbedaan jumlah penduduk tidak terlalu signifikan. Secara lengkap data Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 menurut kelompok umur dan jenis kelamin (jiwa) disajikan dalam Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)

Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	12.254	11.703	23.957
5-9	12.600	11.956	24.556
10-14	12.639	11.832	24.471
15-19	13.086	12.291	25.377
20-24	13.023	12.144	25.167
25-29	13.443	12.202	25.645
30-34	13.395	12.190	25.585
35-39	12.737	12.109	24.846
40-44	12.004	11.861	23.865
45-49	10.130	10.510	20.640
50-54	8.981	9.632	18.613
55-59	7.628	8.052	15.680
60-64	5.793	6.234	12.027
65+	7.432	9.289	16.721
Jumlah	155.145	152.005	307.150

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Dan disajikan dalam bentuk diagram piramida seperti berikut.

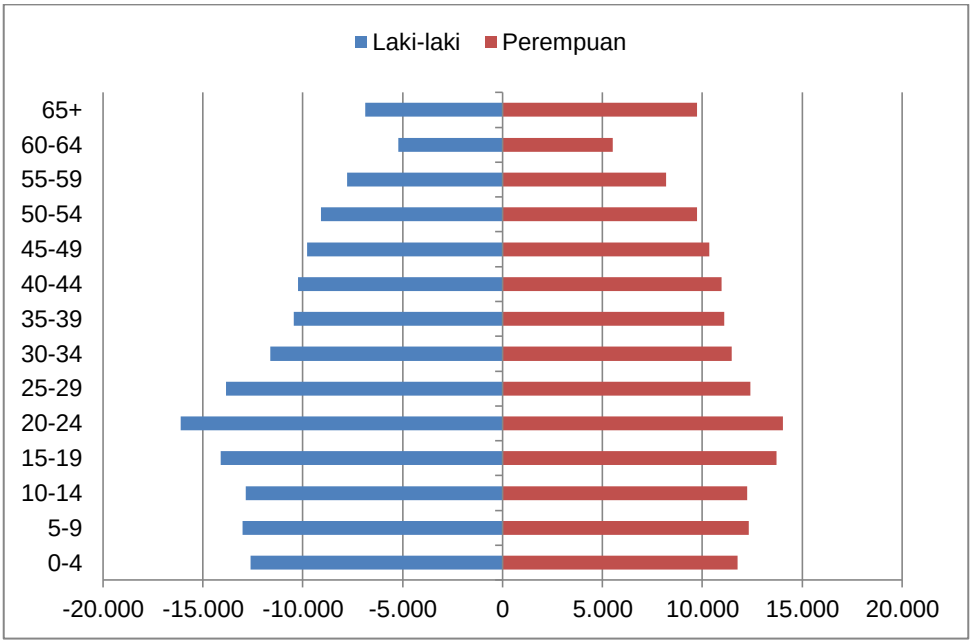

Gambar 2.11 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021 (diolah), 2021

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi, namun meningkat dari 5,36 persen di tahun 2016 menjadi 5,50 persen di tahun 2019. Di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam bahkan minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu *COVID-19* yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak pada munculnya kebijakan *lockdown*. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global.

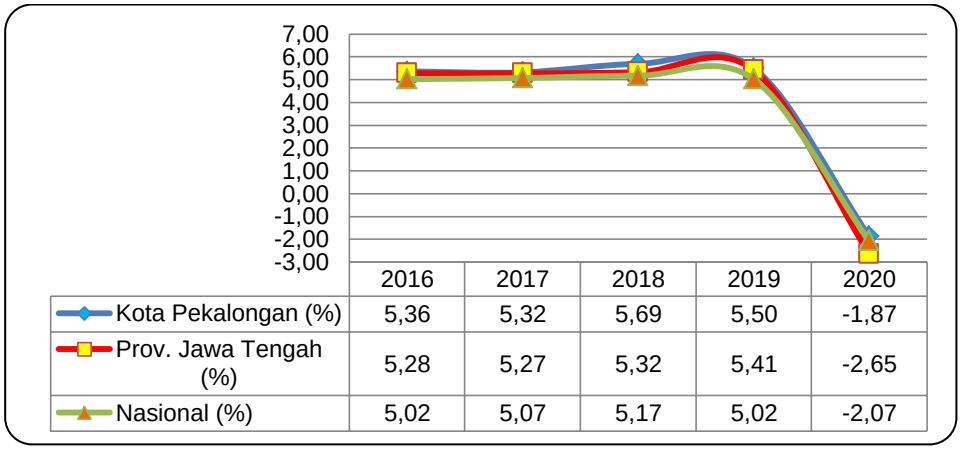

	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Pekalongan (%)	5,36	5,32	5,69	5,50	-1,87
Prov. Jawa Tengah (%)	5,28	5,27	5,32	5,41	-2,65
Nasional (%)	5,02	5,07	5,17	5,02	-2,07

Gambar 2.12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021 (diolah), 2021

Meskipun demikian, persentase pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sepanjang lima tahun terakhir selalu di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Begitu juga jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selalu di atas pertumbuhan ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada pada posisi tertinggi di tahun 2018 yaitu sebesar 5,69 persen, dan posisi terendah pada tahun 2020 yaitu -1,87 persen.

Jika dibandingkan dengan Daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum berada di posisi tengah diantara ketiga Daerah tersebut. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Tegal, diatas Kota Salatiga dan Kota Magelang. Tahun 2017 berada dibawah ketiga Kota tersebut, pada tahun 2018 dan 2019 berada diatas Kota Magelang, dibawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Sementara itu di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Salatiga, diatas Kota Tegal dan Kota Magelang. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.13 berikut.

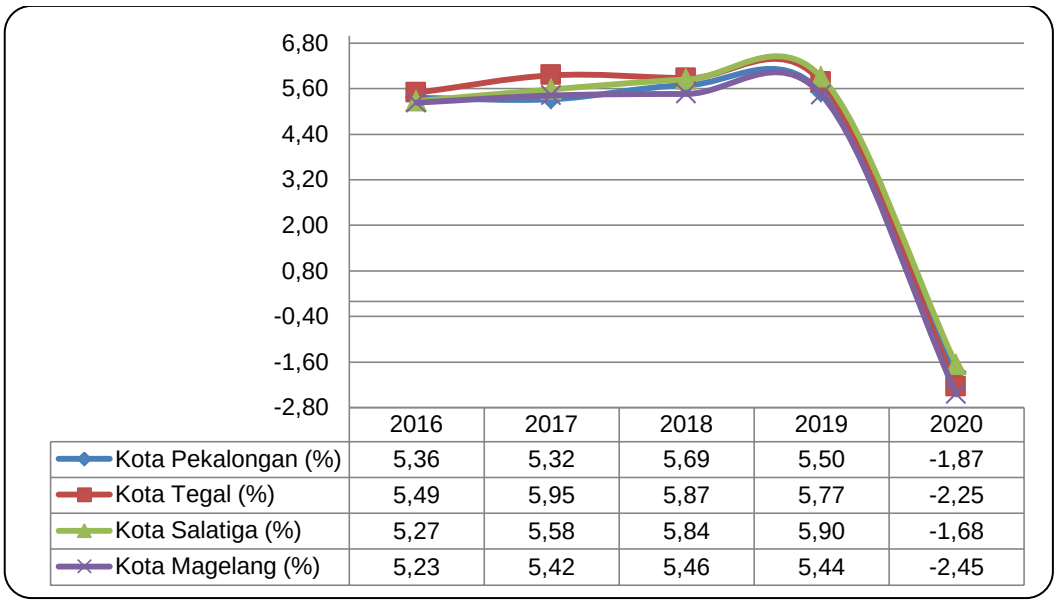

Gambar 2.13 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2016 – 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

2.2.2. Struktur Ekonomi

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pengolahan dan konstruksi yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama lima tahun. Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2020 adalah pada lapangan usaha Industri Pengolahan yakni 21,40 persen dan ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yakni 20,85 persen, kemudian diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,16 persen dan ini turun dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar 21,80 persen dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,60 persen dan ini turun dibandingkan tahun 2019 yakni 14,64 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 6 persen. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan disajikan dalam Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (persen)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,26	4,74	4,67	4,66	5,10
B	Pertambangan dan Penggalian	–	–	-	-	-
C	Industri Pengolahan	21,43	21,13	20,94	20,85	21,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,10	0,12
F	Konstruksi	14,36	14,39	14,60	14,64	14,60

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,72	21,78	21,76	21,80	21,16
H	Transportasi dan Pergudangan	6,05	6,32	6,28	6,40	5,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,42	5,39	5,42	5,44	5,32
J	Informasi dan Komunikasi	3,88	4,15	4,21	4,36	5,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,14	6,26	6,27	6,13	6,22
L	Real Estat	2,68	2,68	2,71	2,71	2,74
M,N	Jasa Perusahaan	0,40	0,41	0,42	0,44	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,75	4,72	4,58	4,47	4,50
P	Jasa Pendidikan	4,58	4,67	4,75	4,65	4,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,25	1,26	1,29	1,44
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,82	1,84	1,87	1,90	1,91
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

PDRB Kota Pekalongan menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub kategori usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2020, peranan pada kategori atau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar 5,10 persen. Peranan kategori ini mengalami fluktuasi. Tahun 2016, peranan kategori ini sebesar 5,26 persen, kemudian melemah tahun 2017 sebesar 4,74 persen, dan semakin menurun tahun 2018 sebesar 4,67 persen, tahun 2019 sebesar 4,66 persen dan meningkat 5,10 persen di tahun 2020.

Industri Pengolahan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas Industri Batubara dan Pengilangan Minyak, Industri Makanan dan Minuman, Pengolahan Tembakau, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit; Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, Industri Barang Galian bukan Logam, Industri Logam Dasar, Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik,

Optik dan Peralatan Listrik, Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL, Industri Alat Angkutan, Industri Furnitur dan Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Kategori ini memiliki peranan dalam sektor perekonomian PDRB Kota Pekalongan sebesar 21,40 persen pada tahun 2020.

Peran kategori ini cenderung mengalami pelemahan hingga tahun 2019, yakni pada tahun 2016 sebesar 21,43 persen, pada tahun 2019 makin lemah menjadi 20,85 persen.

Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, mempunyai peran sebesar 0,16 persen terhadap perekonomian Kota Pekalongan pada tahun 2020, sama seperti tahun 2019 yaitu 0,16 persen. Peran kategori ini dalam struktur perekonomian cukup stabil. Tahun 2016 hingga tahun 2020 peran kategori ini sebesar 0,16 persen.

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian tidak termasuk dalam kategori ini. Peranan kategori ini terhadap struktur perekonomian di Kota Pekalongan stabil selama 2015-2018 yaitu sebesar 0,11 persen dan menurun 0,10 persen pada tahun 2019, kemudian meningkat 0,12 persen pada tahun 2020.

Konstruksi

Pada tahun 2020 kategori konstruksi mempunyai peran dalam struktur perekonomian sebesar 14,60 persen terhadap total perekonomian Kota Pekalongan. Secara umum, peran kategori ini pada perekonomian cenderung meningkat yaitu tahun 2016 sebesar 14,36 persen, tahun 2017 sebesar 14,39 persen, tahun 2018 sebesar 14,60 persen dan tahun 2019 sebesar 14,64 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi di Kota Pekalongan besarannya tahun 2020 adalah -1,09 persen pada tahun 2016 pertumbuhannnya 4,52 persen. Pertumbuhan konstruksi di tahun 2017 besarnya 5,51 persen, 5,59 persen pada tahun 2018, dan 4,71 persen pada tahun 2019.

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai peran terhadap PDRB selalu lebih dari 20 persen. Pada tahun 2020, peranan kategori ini sebesar 21,16 persen lebih kecil dibandingkan peranan di tahun 2019 yang sudah mencapai 21,80 persen terhadap PDRB Kota Pekalongan.

Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 (enam) sub kategori, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Kategori ini peranannya terhadap struktur perekonomian Kota Pekalongan sebesar 5,01 persen di tahun 2020. Selama kurun waktu lima tahun terakhir dari 2016 – 2020 peran kategori ini berfluktuatif. Tahun 2016 6,05 persen, tahun 2017 naik menjadi 6,32 persen. Tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 6,28 persen, namun tahun 2019 kembali meningkat menjadi 6,40 persen.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2020, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam struktur perekonomian Kota Pekalongan sebesar 5,32 persen. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan tahun 2019 merupakan yang paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun

terakhir yaitu tahun 2016 sebesar 5,42 persen, tahun 2017 sebesar 5,39 persen, tahun 2018 sebesar 5,42 persen dan tahun 2020 sebesar 5,32 persen.

Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini menjadi indikator kemajuan suatu daerah, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap PDRB Kota Pekalongan tahun 2016 sebesar 3,88 persen, tahun 2017 sebesar 4,15 persen, tahun 2018 sebesar 4,21 persen, tahun 2019 sebesar 4,36 persen dan tahun 2020 sebesar 5,15 persen. Laju pertumbuhan ekonomi pada kategori ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat yaitu tahun 2016 sebesar 8,47 persen, tahun 2017 sebesar 11,94 persen, tahun 2018 sebesar 10,43 persen, tahun 2019 sebesar 10,57 persen, dan tahun 2020 sebesar 17,20 persen.

Jasa Keuangan dan Asuransi

Kegiatan kategori jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2020, perannya sebesar 6,22 persen terhadap PDRB Kota Pekalongan. Secara umum, selama empat tahun terakhir peran kategori ini pada perekonomian berfluktuatif yaitu tahun 2016 sebesar 6,14 persen, tahun 2017 sebesar 6,26 persen, tahun 2018 sebesar 6,27 persen, dan tahun 2019 sebesar 6,13 persen.

Real Estate

Kategori real estate memberikan peran yang relatif stabil bagi PDRB Kota Pekalongan dengan peranan sekitar 2,7 persen. Berturut-turut sumbangan kategori real estate selama tahun 2016-2020 sebesar 2,68 persen, 2,68 persen, 2,71 persen, 2,71 persen dan 2,74 persen. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini cukup signifikan dengan pertumbuhan selalu di atas 5 persen pada tahun 2016-2019, namun melambat pada tahun 2020 dikisaran -0,08 persen. Laju pertumbuhan dari tahun 2016-2019 adalah tahun 2016 sebesar 6,54 persen, pada tahun 2017 5,84 persen, 5,97 persen di tahun 2018, dan 5,62 persen di tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar -0,08 persen.

Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir, peran dalam struktur perekonomian di Kota Pekalongan kategori jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah, yaitu dari 0,40 persen pada tahun 2016, tahun 2017 menjadi sebesar 0,41 persen, tahun 2018 sebesar 0,42 persen, tahun 2019 sebesar 0,44 persen dan tahun 2020 turun menjadi 0,43 persen. Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Kota Pekalongan. Laju pertumbuhan kategori jasa perusahaan sangat fluktuatif dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Laju pertumbuhan pada tahun 2016 pertumbuhannya sebesar 10,28 persen, pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 7,85 persen, ditahun 2018 tumbuh sebesar 7,95, tahun 2019 tumbuh sebesar 8,31 persen dan melambat sebesar -4,32 persen di tahun 2020.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2016-2019 peranan kategori ini relatif stabil namun menunjukkan sedikit penurunan, yaitu dengan nilai peran tahun 2016 sebesar 4,75 persen, tahun 2017 sebesar 4,72 persen, tahun 2018 sebesar 4,58 persen, tahun 2019 sebesar 4,47 persen dan meningkat di tahun 2020 sebesar 4,50 persen. Laju pertumbuhan dari kategori ini cenderung fluktuatif , yaitu dari sebesar 2,58 persen di tahun 2016 menjadi 3,75 persen di tahun 2017.

Pertumbuhan pada 2018 sebesar 3,99 persen, 3,82 persen di tahun 2019 dan -1,00 persen di tahun 2020.

Jasa Pendidikan

Pada tahun 2020, jasa pendidikan mempunyai peranan 4,73 persen dalam struktur perekonomian Kota Pekalongan. Angka ini meningkat dibandingkan pada tahun 2019 yang peranannya sebesar 4,65 persen. Trend peningkatan peran kategori ini juga terlihat pada kurun waktu antara 2016-2018 yaitu tahun 2016 sebesar 4,58 persen, tahun 2017 sebesar 4,67 persen, dan di tahun 2018 sebesar 4,75 persen. Berdasarkan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kota Pekalongan mengalami fluktuasi pada periode tahun 2016 – 2020, masing-masing yaitu 7,49 persen di tahun 2016, tahun 2017 tumbuh sebesar 6,82 persen, tahun 2018 tumbuh sebesar 7,59 persen, tahun 2018 tumbuh sebesar 2,63 persen dan pertumbuhannya melambat di tahun 2020 sebesar -0,56 persen.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Selama tahun 2015-2020 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu tahun tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar 1,25 persen, tahun 2018 sebesar 1,26 persen, tahun 2019 sebesar 1,29 persen dan tahun 2020 sebesar 1,44 persen. Dilihat dari laju pertumbuhannya, terjadi perlambatan ekonomi khususnya kegiatan jasa kesehatan dan kegiatan sosial dari tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 9,65 persen melambat di tahun 2017 hingga tahun 2019 sebesar masing-masing 7,74 persen, 7,93 persen dan 7,84 persen, dan meningkat pertumbuhannya di tahun 2020 sebesar 8,35 persen.

Jasa lainnya

Peranan Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Pekalongan relatif kecil yaitu berturut-turut tahun 2016 sebesar 1,82 persen, tahun 2017 sebesar 1,84 persen, tahun 2018 sebesar 1,87 persen, tahun 2019 sebesar 1,90 persen dan tahun 2020 sebesar 1,91 persen. Dilihat dari sisi laju pertumbuhannya, kategori ini mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi selama tahun 2016-2020, yaitu tahun 2016 sebesar 7,23 persen, pada tahun 2016 pertumbuhannya naik menjadi 8,09 persen, tahun 2018 naik menjadi 9,02 persen, tahun 2019 pertumbuhannya melambat menjadi 8,47 persen dan tahun 2020 kembali turun menjadi -1,19 persen.

2.2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2016-2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan bertumbuh antara 5,36 persen pada tahun 2016 dan 5,50 persen pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan mengalami perlambatan sebesar -1,87 persen. Pada tahun 2016, pertumbuhan tiga besar yakni Jasa Perusahaan sebesar 10,28 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,65 persen, dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,03 persen. Pada tahun 2020, lapangan usaha yang mengalami pergeseran pertumbuhan ekonomi, tiga besar diantaranya adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 17,20 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,35 persen dan Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,91 persen. Hal ini sesuai dengan Kota Pekalongan yang saat ini sedang menuju Pekalongan *Smart City*.

Pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan disajikan dalam tabel Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,98	-4,80	3,03	4,63	6,36
B	Pertambangan dan Penggalian	–	–	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4,16	4,35	4,46	4,84	-0,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,69	4,93	5,29	3,72	-0,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,16	5,86	5,16	4,21	6,91
F	Konstruksi	4,52	5,51	5,59	4,71	-1,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,86	5,71	5,53	5,47	-4,68
H	Transportasi dan Pergudangan	5,16	5,84	7,07	7,53	-24,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,94	5,92	5,88	6,76	-3,78
J	Informasi dan Komunikasi	8,47	11,94	10,43	10,57	17,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,03	7,35	5,12	3,76	0,93
L	Real Estat	6,54	5,84	5,97	5,62	-0,08
M,N	Jasa Perusahaan	10,28	7,85	7,95	8,31	-4,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,58	3,75	3,99	3,82	-1,00
P	Jasa Pendidikan	7,49	6,82	7,59	2,63	-0,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,65	7,74	7,93	7,84	8,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,23	8,09	9,02	8,47	-1,19
Produk Domestik Regional Bruto		5,36	5,32	5,69	5,50	-1,87

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2016-2020 berfluktuasi namun berkesinambungan, dengan penopang pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan pada tahun 2019 mayoritas adalah sektor Informasi dan Komunikasi.

2.2.3. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2016 – 2020, inflasi di Kota Pekalongan

cenderung berfluktuasi dari kisaran 2,36 persen sampai 3,61 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2020 lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Gambar 2.14 berikut.

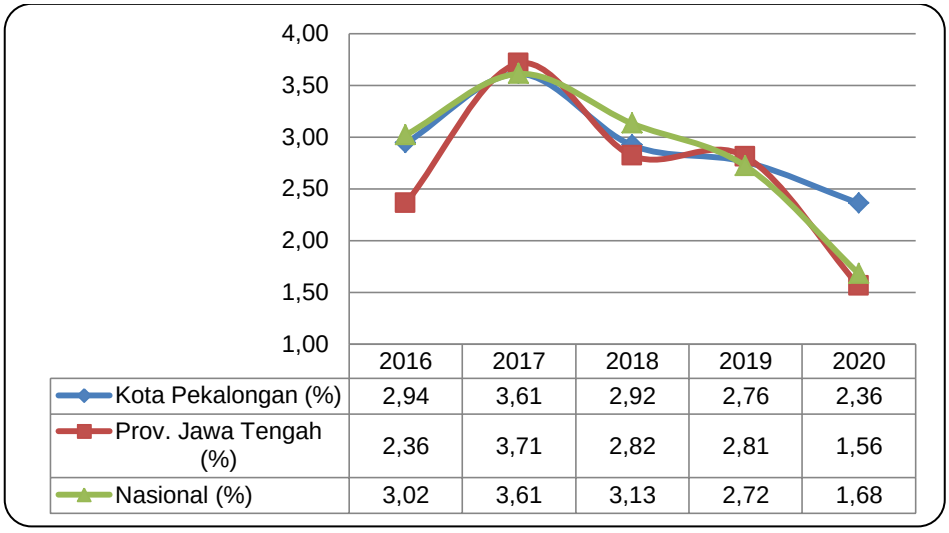

	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Pekalongan (%)	2,94	3,61	2,92	2,76	2,36
Prov. Jawa Tengah (%)	2,36	3,71	2,82	2,81	1,56
Nasional (%)	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

Gambar 2.14 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2020

Sumber : www.bps.go.id, 2021

Jika dibandingkan dengan daerah setara (Kota Tegal, Kota Salatiga, dan Kota Magelang), inflasi Kota Pekalongan tahun 2016 berada di posisi paling atas yaitu 2,94%. Tahun 2017 di urutan ketiga tertinggi yaitu Kota Tegal (4,03%), Kota Magelang (3,90%), Kota Pekalongan (3,61%) dan Kota Salatiga (3,50). Tahun 2018 berada pada urutan tertinggi kedua yaitu Kota Tegal (3,08%), Kota Pekalongan (2,92%), Kota Magelang (2,65%) dan Kota Salatiga (2,47%). Tahun 2019 berada pada urutan tertinggi bersama Kota Salatiga yaitu 2,76%, dan untuk Kota Tegal sebesar 2,56% dan Kota Magelang sebesar 2,19%. Untuk tahun 2020, inflasi Kota Pekalongan sama dengan Kota Tegal yaitu 2,36%, sementara Kota Salatiga dan Kota Magelang tidak dilakukan penghitungan laju inflasi.

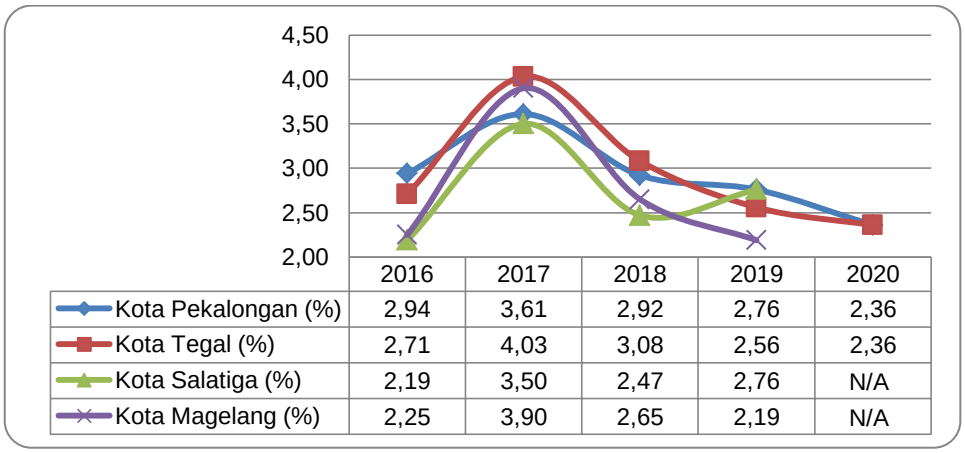

	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Pekalongan (%)	2,94	3,61	2,92	2,76	2,36
Kota Tegal (%)	2,71	4,03	3,08	2,56	2,36
Kota Salatiga (%)	2,19	3,50	2,47	2,76	N/A
Kota Magelang (%)	2,25	3,90	2,65	2,19	N/A

Gambar 2.15 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2016 – 2020

Sumber : www.bps.go.id, 2021

Penyumbang inflasi terbesar di Kota Pekalongan adalah kelompok Bahan Makanan, kesehatan, pendidikan, sandang, kemudian kelompok umum, makanan jadi, perumahan dan transport. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Kelompok Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Umum	2,94	3,61	2,92	2,76	-
Bahan Makanan	6,03	4,63	3,66	8,00	-
Makanan Jadi	5,85	2,46	3,05	1,60	-
Perumahan	0,88	4,02	3,47	0,40	0,33
Sandang	5,01	5,40	2,51	3,31	4,01
Kesehatan	1,99	1,15	0,54	4,75	2,89
Pendidikan	2,84	3,26	1,33	3,74	-2,71
Transport	-3,07	3,96	2,43	0,31	1,33
Perlengkapan	-	-	-	-	2,70
Infokom	-	-	-	-	1,20
Rekreasi	-	-	-	-	6,27
Restoran	-	-	-	-	1,76
Perawatan Pribadi	-	-	-	-	4,20

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

2.2.4. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 28,43 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 35,41 juta rupiah. Namun mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 35,22 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar Rp. 35,22 juta menurun sebesar 0,53 persen dibanding PDRB per kapita tahun 2019 sebesar Rp. 35,41 juta.

Tabel 2.10 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	8.507,54	9.274,26	10.089,25	10.873,98	10.818,53

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
- ADHK (Miliar Rp)	6.367,27	6.706,27	7.087,92	7.477,43	7.337,83
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	28,43	30,72	33,14	35,41	35,22
- ADHK (Juta Rp)	21,28	22,22	23,28	24,35	23,89
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (persen)	8,39	8,06	7,86	6,86	-0,53
- ADHK (persen)	4,42	4,40	4,79	4,60	-1,88

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

2.2.5. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 (nol) menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Indeks gini pada tahun 2018 sebesar 0,336 seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,69 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 5,50 persen sehingga menurunkan indeks gini Kota Pekalongan menjadi 0,305. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi 1,87%. Meskipun demikian, indeks gini masih meningkat menjadi 0,314. Indeks gini Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11 Indeks Gini Kota Pekalongan
Tahun 2018 – 2020

Tahun	Indeks Gini
2018	0,336
2019	0,305
2020	0,314

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

2.2.6. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.

2.2.6.1. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan pada Februari 2021, Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan sebesar Rp.460.789/kapita/bulan. Angka ini sedikit di bawah Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp.475.477.Sedangkan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.395.407,00.

Tabel 2.12 Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Tahun	GK Kota Pekalongan (Rp)	GK Kab Batang (Rp)	GK Kab Pekalongan (Rp)	GK Kota Tegal (Rp)	GK Kota Salatiga (Rp)	GKProvinsi Jawa Tengah (Rp)	GK Nasional (Rp)
2016	375.600	240.541	341.648	395.631	345.146	317.348	364.527
2017	390.555	249.292	354.435	418.845	359.944	333.224	374.478
2018	415.172	256.549	361.297	455.488	380.856	350.875	401.220
2019	425.026	286.116	382.832	465.047	418.955	369.385	425.250
2020	460.789	309.202	403.662	502.031	454.154	395.407	475.477

Sumber : BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2021

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa garis kemiskinan di Kota Pekalongan berada di atas rata-rata garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, di mana pada tahun 2020 garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.395.407 dan garis kemiskinan Kota Pekalongan sebesar Rp.460.789.

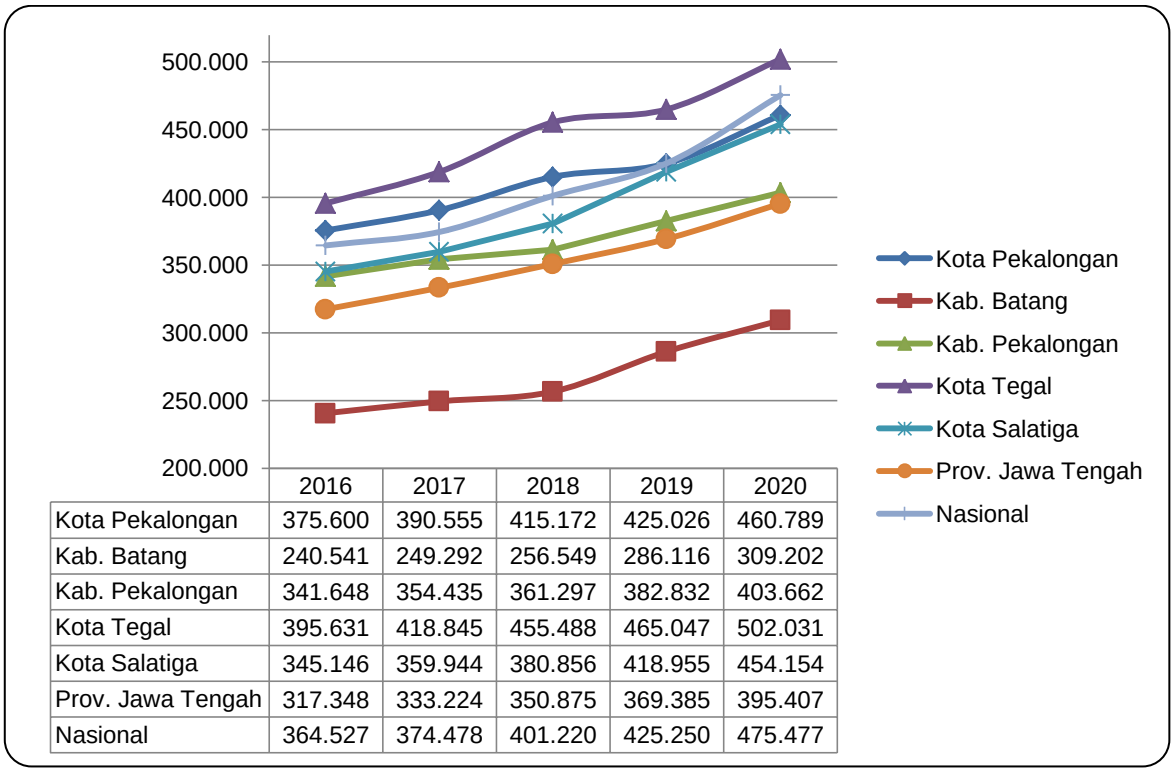

	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Pekalongan	375.600	390.555	415.172	425.026	460.789
Kab. Batang	240.541	249.292	256.549	286.116	309.202
Kab. Pekalongan	341.648	354.435	361.297	382.832	403.662
Kota Tegal	395.631	418.845	455.488	465.047	502.031
Kota Salatiga	345.146	359.944	380.856	418.955	454.154
Prov. Jawa Tengah	317.348	333.224	350.875	369.385	395.407
Nasional	364.527	374.478	401.220	425.250	475.477

Gambar 2.16 Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2021

2.2.6.2. Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan di Kota Pekalongan diantaranya adanya program-program nasional seperti PKH, bantuan pangan non tunai, beasiswa untuk siswa miskin dan program Pemerintah Kota Pekalongan antara lain bantuan Fasilitas Operasional Pendidikan (FOP) ke masyarakat. FOP bertujuan menekan beban pengeluaran non konsumsi rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, meningkatkan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan usaha kecil dan mikro, dan sinergitas serta peningkatan kerjasama penanganan lintas sektor, keterlibatan swasta, perguruan tinggi, perbankan dan unsur masyarakat.

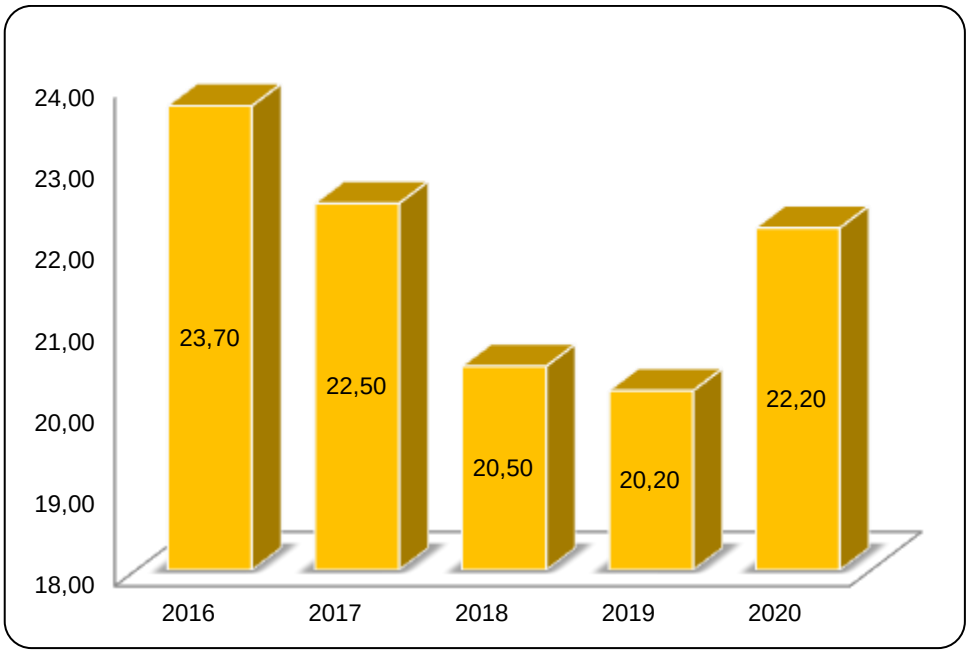

Gambar 2.17 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 (000 jiwa)

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

Sepanjang kurun waktu tahun 2016-2019, bisa dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Pekalongan selalu mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga mencapai sekitar 22,20 ribu jiwa. Hal ini dikarenakan dampak pandemi *COVID-19*. Namun jika dibandingkan dengan Daerah yang setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, angka kemiskinan Kota Pekalongan tahun 2020 lebih tinggi dari Kota Salatiga dan Kota Magelang, namun lebih rendah dari Kota Tegal, serta lebih rendah dari Provinsi dan Nasional.

Selama kurun waktu 2016 hingga tahun 2020 tingkat kemiskinan Kota Pekalongan selalu berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Tingkat kemiskinan Kota Pekalongan juga cenderung menurun. Selama tahun 2016 hingga tahun 2019 angka ini terus mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Kota Pekalongan mengalami kenaikan menjadi 7,17 persen.

Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,27 persen, sedangkan tingkat kemiskinan Kota Pekalongan 7,92 persen. Selanjutnya pada

tahun 2017 tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Tengah turun menjadi 13,01 persen, sedangkan tingkat kemiskinan Kota Pekalongan mengalami penurunan sebesar 0,45 persen sehingga menjadi 7,47 persen.

Tahun 2018 tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi sebesar 11,32 persen, sedangkan Kota Pekalongan mencapai 6,75 persen. Kemudian pada tahun 2019 tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi sebesar 10,80 persen, sedangkan Kota Pekalongan menduduki angka 6,60 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Tengah meningkat menjadi 11,41 persen, begitu juga dengan tingkat kemiskinan Kota Pekalongan meningkat sebesar 0,57 persen sehingga menjadi 7,17 persen.

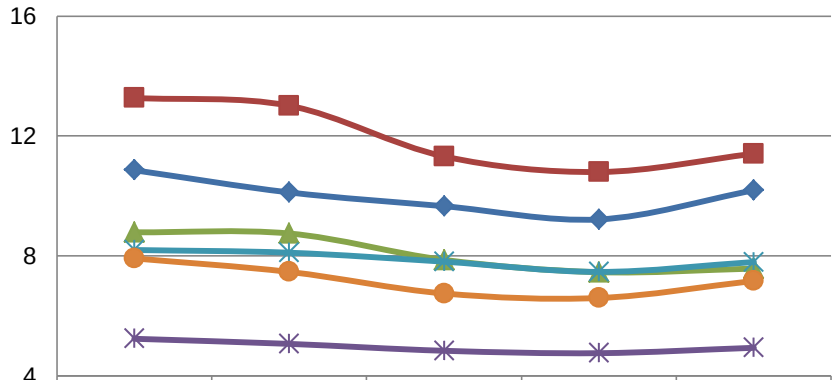

	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional (%)	10,86	10,12	9,66	9,22	10,19
Prov. Jawa Tengah (%)	13,27	13,01	11,32	10,8	11,41
Kota Magelang (%)	8,79	8,75	7,87	7,46	7,58
Kota Salatiga (%)	5,24	5,07	4,84	4,76	4,94
Kota Tegal (%)	8,2	8,11	7,81	7,47	7,80
Kota Pekalongan (%)	7,92	7,47	6,75	6,60	7,17

Gambar 2.18 Perbandiangan Rasio Penduduk Miskin Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber : www.bps.go.id (diolah), 2021

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan Kota Pekalongan selalu berada di bawah tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Dari tahun 2016 sampai tahun 2019 terjadi penurunan tingkat kemiskinan meski belum signifikan. Namun dengan ada pandemi *COVID-19* di tahun 2020, tingkat kemiskinan kembali meningkat di angka 7,17 persen.

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah daripada rata-rata provinsi, di mana tingkat kemiskinan rata-rata provinsi tahun 2020 sebesar 11,41 persen, sedangkan tingkat kemiskinan Kota Pekalongan jauh di bawahnya, yaitu 7,17 persen. Jika diurutkan, maka tingkat kemiskinan Kota Pekalongan berada pada urutan terendah ketiga di Provinsi Jawa Tengah.

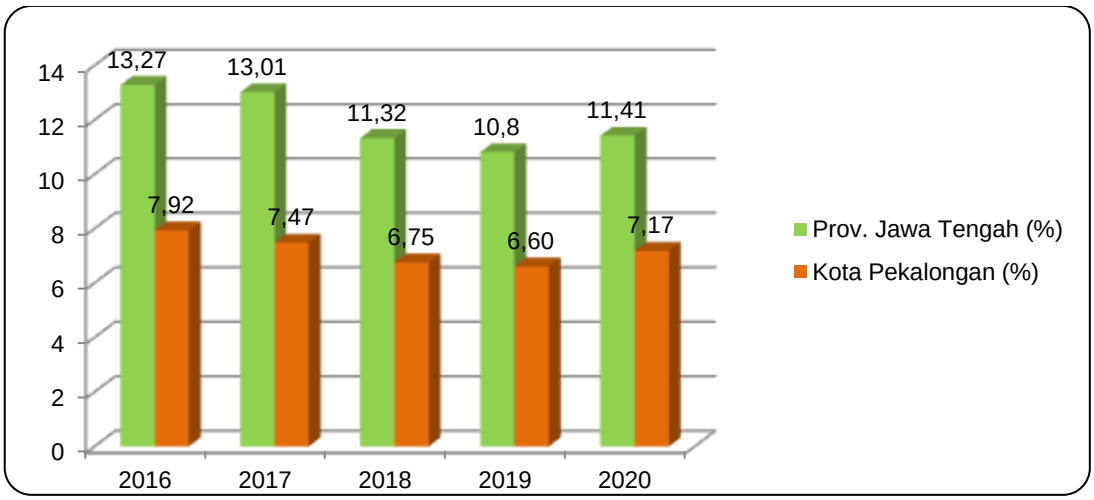

Gambar 2.19 Perbandiangan Tingkat Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Sumber : www.bps.go.id (diolah), 2021

2.2.6.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan selama kurun waktu 2016-2020 relatif stagnan bahkan ada kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 2016 sebesar 0,80. Selanjutnya naik pada tahun 2017 menjadi sebesar 0,92. Namun pada tahun 2018 indeks ini mengalami kenaikan sebesar 0,09 yaitu menjadi 1,01. Dan pada tahun 2019 mencapai 0,92 serta mengalami kenaikan kembali menjadi 1,28 di tahun 2020. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 disajikan dalam Gambar 2.20 berikut.

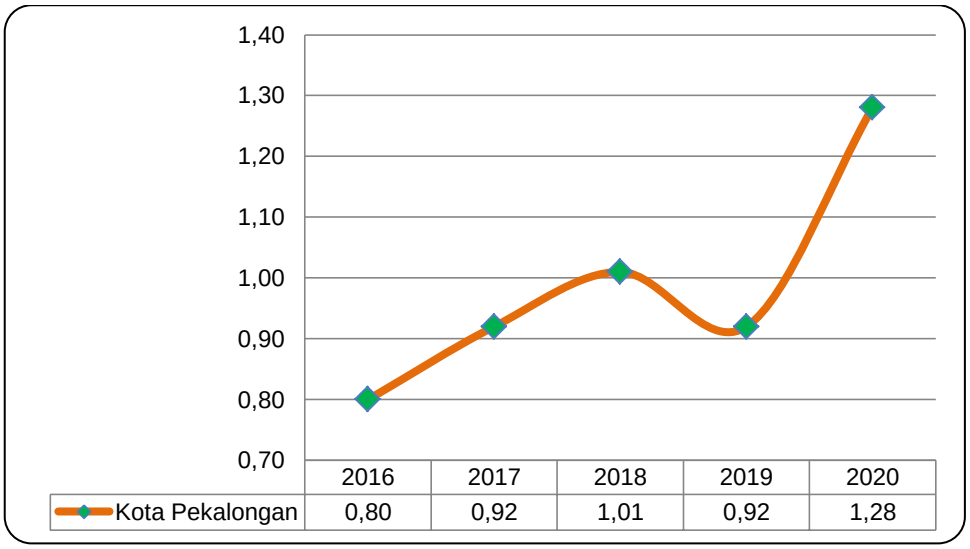

Gambar 2.20 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kota Pekalongan (diolah), 2021

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan cenderung stagnan. Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan cenderung menurun. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Tegal, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih rendah. Kondisi perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Salatiga cenderung fluktuatif dibanding Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan masih berada di bawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi dan Nasional. Namun perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan mengingat angka indeks yang cenderung mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.21 berikut.

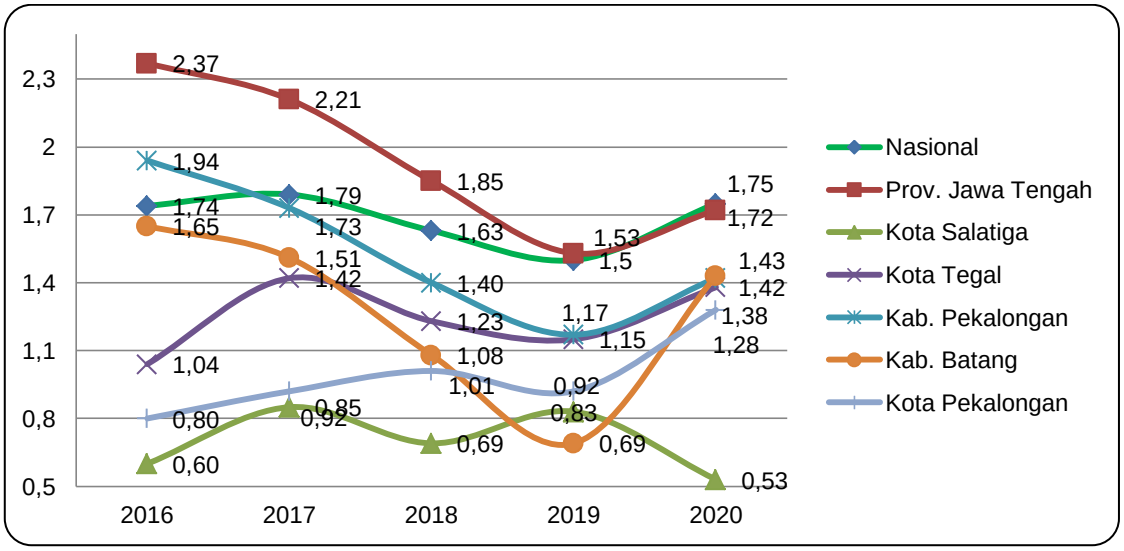

Gambar 2.21 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber : Sumber : BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2021

2.2.6.4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*–P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks keparahan kemiskinan Kota Pekalongan pada tahun 2016 sebesar 0,13. Tahun selanjutnya, yaitu tahun 2017 indeks ini mengalami kenaikan menjadi 0,20, yang berarti kondisi memburuk. Kemudian indeks ini justru naik lagi pada 2018 menjadi 0,22 dan di tahun 2019 turun menjadi 0,18. Namun indeks P2 ini meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 0,30 yang artinya ketimpangan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin pada tahun 2020 semakin bertambah dibanding tahun 2019.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan yang cenderung mengalami tren penurunan terus-menerus dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan justru cenderung naik. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Tegal dan Kota Salatiga pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih rendah. Namun pada tahun 2020 Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan lebih

rendah dibandingkan Kota Tegal dan lebih tinggi dibandingan dengan Kota Salatiga. Kondisi perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan, Kota Tegal, dan Kota Salatiga cenderung fluktuatif dibanding Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan.

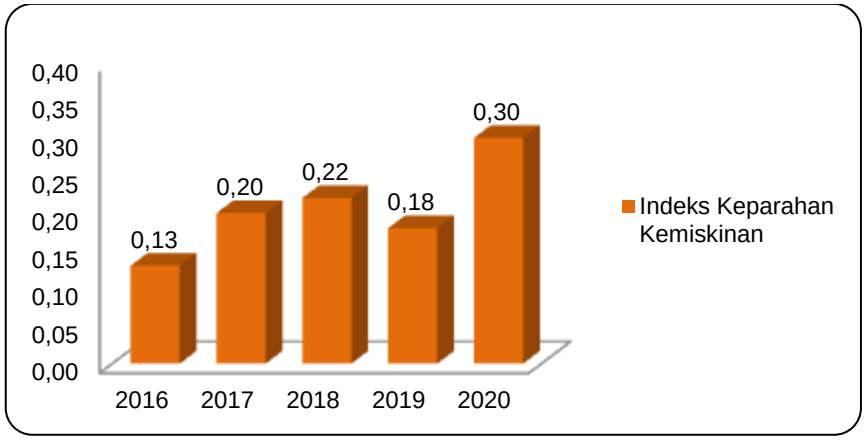

Gambar 2.22 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kota Pekalongan (diolah), 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan masih berada di bawah Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi dan Nasional. Namun perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menurunkan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan mengingat angka indeks yang cenderung mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya.

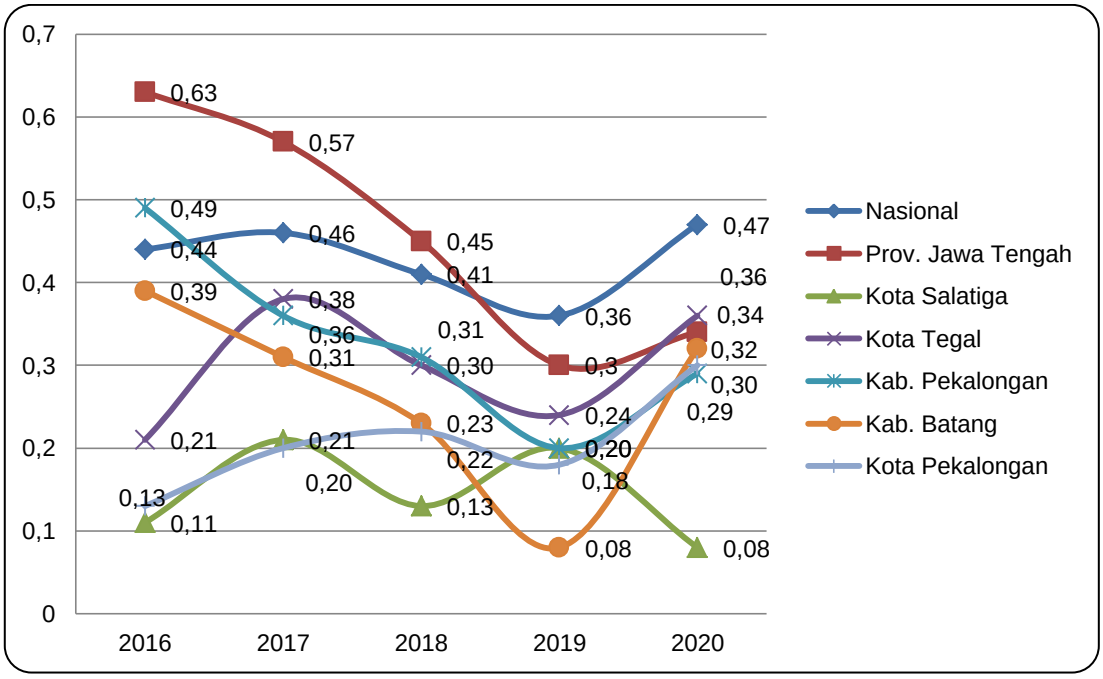

Gambar 2.23 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2021

Pasca pandemi *COVID-19*, kondisi perekonomian belum pulih sepenuhnya. Hal ini dikarenakan penduduk terdampak pandemi, di antaranya penduduk yang telah menjadi

pengangguran akibat PHK pada beberapa perusahaan, para pengusaha yang mengalami penurunan penghasilan akibat daya beli masyarakat yang menurun sebagai dampak dari pandemi *COVID-19*. Kondisi ini mengakibatkan besarnya kemungkinan peningkatan jumlah penduduk miskin (absolut) maupun persentase penduduk miskin di Kota Pekalongan.

Peningkatan penduduk miskin baik secara absolut maupun persentase ini dikarenakan bertambahnya penduduk yang penghasilannya rendah atau di bawah garis kemiskinan serta mereka yang sebelum pandemi bekerja di luar kota kemudian kembali ke Kota Pekalongan karena kehilangan pekerjaan dan pasca pandemi masih berada di Kota Pekalongan.

2.2.7. Angka Rasio Penduduk yang Bekerja

Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan Tahun 2020 tercatat sekitar 236.675 orang. Dari jumlah tersebut, persentase angkatan kerja menurun dari 72,32 persen menjadi 66,45 persen atau turun 5,87 poin pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa rasio jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 Tahun ke atas) menurun. Sisanya, yaitu 33,55 persen adalah Bukan Angkatan Kerja, yaitu rasio penduduk berusia kerja yang bukan termasuk angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja. Penurunan TPAK pada tahun 2020 seiring dengan penurunan jumlah penduduk usia kerja.

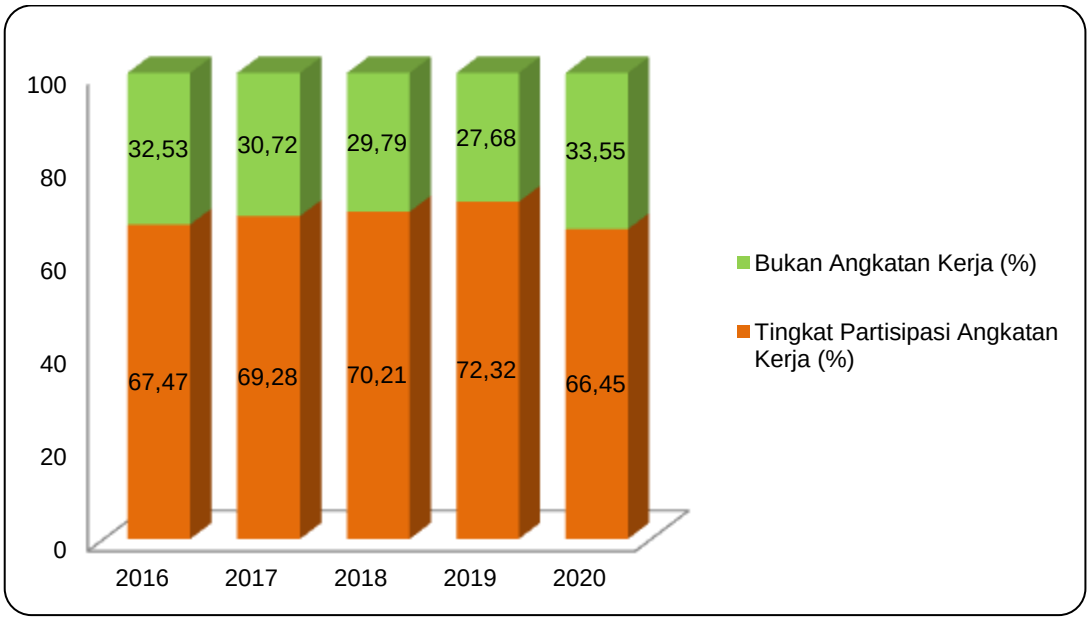

Gambar 2.24 Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

Sementara itu Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Pekalongan cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja yang bekerja yang mencapai 92,98 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,02 persen atau meningkat 1,25 poin, artinya adalah pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 7 orang yang benar-benar menganggur.

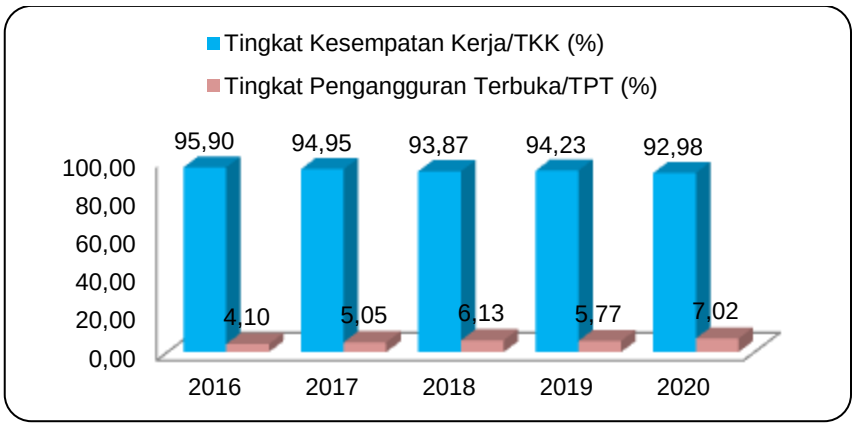

Gambar 2.25 Rasio TKK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

*Keterangan : tahun 2016 sama dengan 2015 karena tidak ada Sakernas Tahunan

Nilai TPT mengalami peningkatan yang disebabkan meningkatnya jumlah kelulusan anak sekolah yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Beberapa musibah seperti kebakaran Pasar Banjarsari dan bencana banjir rob yang menggenangi wilayah industri di Kota Pekalongan juga mengurangi penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Upaya yang telah dilakukan antara lain menarik investor yang padat karya dengan cara memberi kemudahan dalam proses perizinan, peningkatan kapasitas ketrampilan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja, dan penyebarluasan informasi pasar kerja, serta pembinaan masyarakat penganggur melalui pengembangan kewirausahaan.

2.2.8. Angka Kriminalitas yang Ditangani

Kriminalitas di Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai 2020 cenderung meningkat. Angka kriminalitas dihitung per 10.000 penduduk, dimana pada tahun 2016 berada di angka 3,34 dan menurun di angka 1,03 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 meningkat di angka 3,78 dan kembali melonjak di tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 4,59 dan 4,69. Sepanjang lima tahun terakhir, rata-rata kasus tertinggi ada pencurian.

Tabel 2.13 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Angka Kriminalitas
2016	3,34
2017	1,03
2018	3,78
2019	4,59
2020	4,69

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2021

2.2.9. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat

lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Perkembangan IPM Kota Pekalongan terus meningkat dari tahun 2016 yang hanya sebesar 73,32 menjadi 74,98 di tahun 2020. Dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Jawa Tengah, IPM Kota Pekalongan diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Apabila dilihat dari IPM se-eks Karisidenan Pekalongan, dari tahun 2016 sampai 2020, Kota Pekalongan menempati urutan kedua di bawah Kota Tegal.

Hampir sama dengan PDRB, Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2016 juga mengalami perubahan. Komponen yang ada sekarang berubah menjadi : Angka Harapan Hidup (tetap), Harapan Lama Sekolah (baru), Rata-rata Lama Sekolah (tetap), dan Pengeluaran per Kapita per bulan (baru). Baik secara nilai ataupun secara peringkat, penghitungan ini telah menggeser posisi pemeringkatan IPM secara nasional, termasuk di Jawa Tengah, terutama untuk peringkat Kota Pekalongan. Namun demikian, terdapat pendekatan baru yang harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan, yaitu dengan dimasukkannya komponen Harapan Lama Sekolah. Kota Pekalongan memiliki riwayat pemahaman tentang kemanfaatan pendidikan yang relatif belum terlalu lama. Bagi sebagian masyarakat di Kota Pekalongan, kesempatan dan waktu yang ada lebih diprioritaskan untuk kegiatan membatik ataupun berdagang. Angka harapan lama sekolah meskipun memiliki kecenderungan mengalami peningkatan, namun masih belum sesuai harapan yang tentunya berimplikasi terhadap IPM Kota Pekalongan.

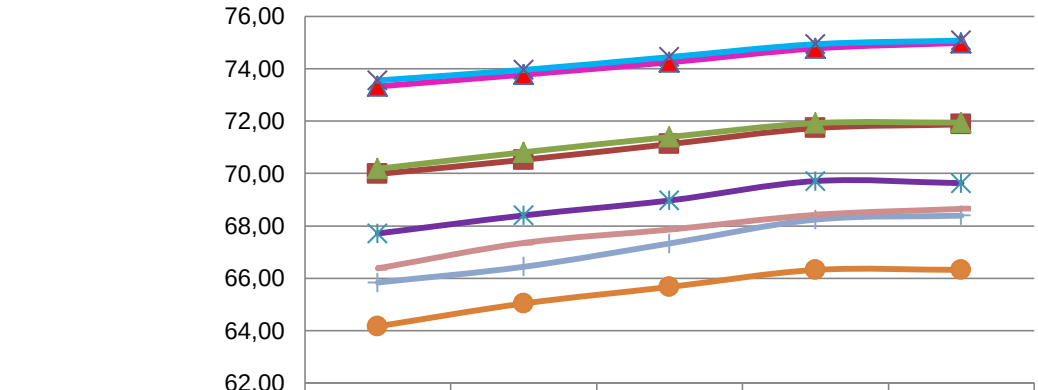

	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Pekalongan (%)	73,32	73,77	74,24	74,77	74,98
Prov. Jateng (%)	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87
Nasional (%)	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94
Kota Tegal (%)	73,55	73,95	74,44	74,93	75,07
Kab. Pekalongan (%)	67,71	68,40	68,97	69,71	69,63
Kab. Pemalang (%)	64,17	65,04	65,67	66,32	66,32
Kab. Tegal (%)	65,84	66,44	67,33	68,24	68,39
Kab. Batang (%)	66,38	67,35	67,86	68,42	68,65

Gambar 2.26 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2016-2020

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021

Pekerjaan rumah yang lain adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk Kota Pekalongan masih baru sampai di kelas 9 semester 1. Jadi

belum sampai lulus kelas 9 SMP. Oleh karena itu, selain menjadikan hal ini sebagai beban dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, juga menjadi masukan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Sehingga arah komunikasi pembangunan lebih dapat tersampaikan dengan baik. Secara lengkap, Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020 disajikan dalam Tabel 2.14 berikut.

Tabel 2.14 Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Usia Harapan Hidup (tahun)	Pengeluaran per Kapita per tahun (Rp 000)	IPM
2016	8,29	12,77	73,32	11.721,00	73,32
2017	8,56	12,78	74,19	11.800,00	73,77
2018	8,57	12,79	74,25	12.312,00	74,24
2019	8,71	12,83	74,28	12.680,00	74,77
2020	8,96	12,84	74,38	12.467,00	74,98

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

2.2.10. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan secara moderat. Apabila pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah hanya 8,29 tahun, pada tahun berikutnya, 2017 menjadi 8,56 tahun. Pada tahun 2018, rata-rata lama sekolah menjadi 8,57 tahun, di tahun 2019 sebesar 8,71 tahun dan tahun 2020 menjadi 8,96 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2020 berada pada angka 7,69.

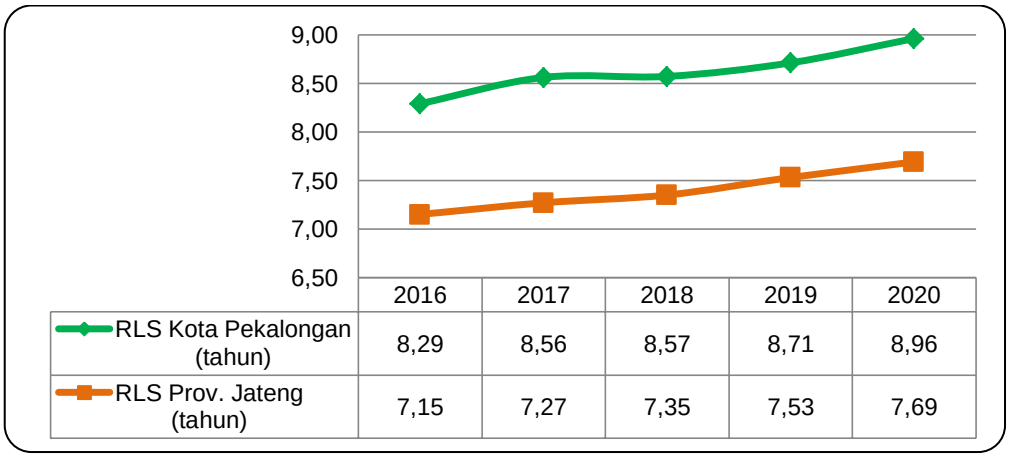

Gambar 2.27 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021

2.2.11. Harapan Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

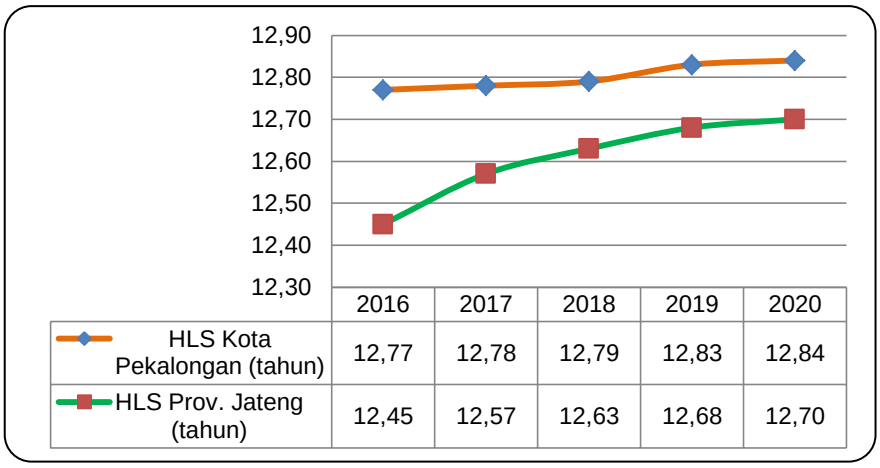

	2016	2017	2018	2019	2020
HLS Kota Pekalongan (tahun)	12,77	12,78	12,79	12,83	12,84
HLS Prov. Jateng (tahun)	12,45	12,57	12,63	12,68	12,70

Gambar 2.28 Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Pekalongan selama lima tahun terakhir berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan cenderung meningkat di tiap tahunnya.

Pada tahun 2020 angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan sebesar 12,84 tahun, artinya bahwa penduduk Kota Pekalongan yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan masih bersekolah selama minimal 12 tahun ke depan atau minimal di umur 19 tahun masih sekolah.

2.2.12. Usia Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2016 - 2020, Umur Harapan Hidup di Kota Pekalongan semakin meningkat dari 73,32 pada tahun 2016 menjadi 74,38 di tahun 2020, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan di Kota Pekalongan dapat bertahan hidup hingga mencapai usia 74 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan secara umum sudah semakin membaik.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi UHH dan bersifat kompleks yaitu aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek lingkungan. Faktor dominan yang mempengaruhi UHH adalah aspek kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan serta menjadi investasi di masa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka diperlukan berbagai upaya paradigma sehat melalui kegiatan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lintas sektor. Perwujudan peningkatan UHH sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan ibu, bayi dan balita; perbaikan gizi; perubahan perilaku; pencegahan penyakit menular dan tidak menular; kesehatan lingkungan serta faktor pelayanan kesehatan dengan pendekatan *continuum of care* atau asuhan pelayanan kesehatan berkesinambungan yang komprehensif disepanjang siklus kehidupan mulai dari sejak masa kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia) yang

melibatkan peran keluarga, komunitas, fasilitas kesehatan primer (Puskesmas) dan fasilitas kesehatan rujukan (Rumah Sakit).

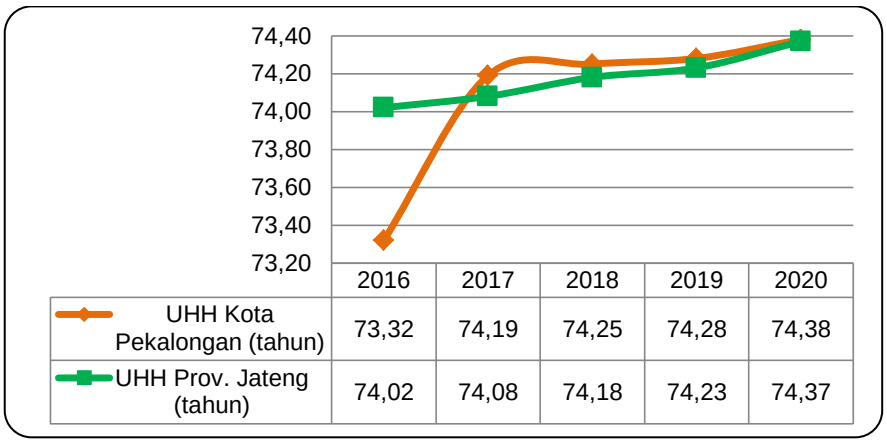

	2016	2017	2018	2019	2020
UHH Kota Pekalongan (tahun)	73,32	74,19	74,25	74,28	74,38
UHH Prov. Jateng (tahun)	74,02	74,08	74,18	74,23	74,37

Gambar 2.29 Perbandingan Umur Harapan Hidup di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021

Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan angka Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.29. Dari tahun 2016 - 2020, UHH Kota Pekalongan selalu di atas Provinsi Jawa Tengah.

2.2.13. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukan tingkat kesejahteraan penduduknya pada suatu wilayah. Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2016-2019. Pada tahun 2016 pengeluaran per kapita Kota Pekalongan sebesar Rp.11.721.000, kemudian meningkat menjadi Rp.11.800.000 pada tahun 2017. Di tahun 2018 berada di angka Rp.12.312.000, dan di tahun 2019 naik hingga Rp.12.680.000. Namun pada tahun 2020 pengeluaran per kapita Kota Pekalongan menurun sebesar Rp.12.467.000.

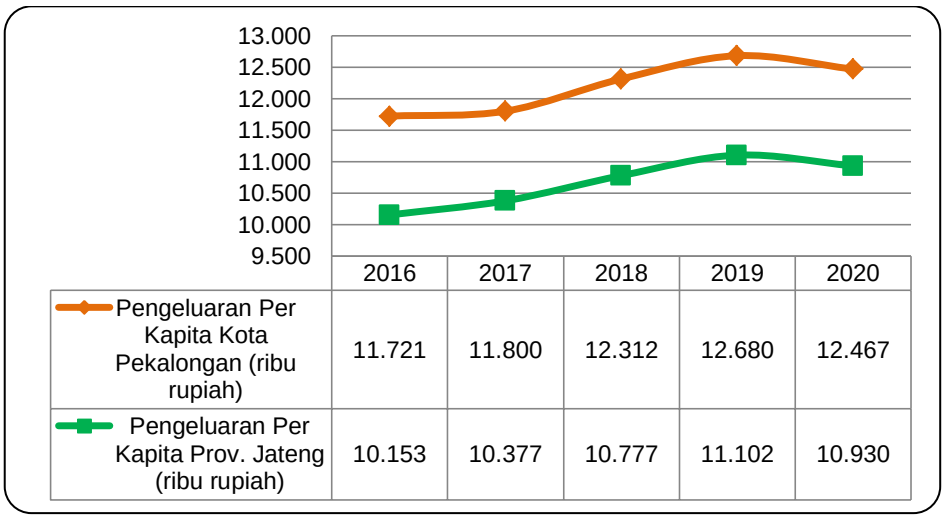

	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan (ribu rupiah)	11.721	11.800	12.312	12.680	12.467
Pengeluaran Per Kapita Prov. Jateng (ribu rupiah)	10.153	10.377	10.777	11.102	10.930

Gambar 2.30 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

2.2.14. Angka Partisipasi Kasar

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah antara lain : Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK Kota Pekalongan sepanjang 5 (lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi, baik di jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.

Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Tahun	SD/MI/Sederajat (persen)		SMP/MTs/Sederajat (persen)		SMA/MA/SMK/Sederajat (persen)	
	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah
2016	116,78	109,46	79,95	89,96	119,17	86,27
2017	114,47	108,44	82,97	91,09	92,04	84,35
2018	110,86	108,18	74,54	91,96	74,41	84,15
2019	112,45	107,74	75,91	91,70	74,92	86,76
2020	110,98	106,32	79,36	93,21	78,66	86,83

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

Pada tahun 2016, APK jenjang SD/MI/sederajat sebesar 116,78 persen, tahun 2017 sebesar 114,47 persen, pada tahun 2018 menurun sebesar 110,86 persen, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 112,45 persen. Pada akhir periode (tahun 2020) APK jenjang SD/MI/sederajat kembali mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019, yaitu 110,98 persen. APK di jenjang SMP/MTs juga mengalami fluktuasi seperti APK jenjang SD/MI. APK jenjang SMP/MTs mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 79,95 persen menjadi 82,97 persen di tahun 2017. Namun pada tahun 2018 turun menjadi 74,54 persen, meningkat kembali di tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sebesar 75,91 persen dan 79,36 persen. Sementara itu APK jenjang SMA/MA/SMK mengalami penurunan dari awal periode (tahun 2016) hingga tahun 2019 dan di akhir periode (tahun 2020) meningkat menjadi 78,66 persen.

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, APK jenjang SD/MI berada di atas 100 persen selama periode tahun 2016-2020, namun cenderung mengalami penurunan, hingga pada tahun 2020, yaitu sebesar 106,32 persen. APK jenjang SMP/MTs berada di atas 89 persen, dan APK jenjang SMA/MA/SMK berada di kisaran 84-86 persen. Secara umum, APK Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan APK Provinsi Jawa tengah.

Angka partisipasi kasar kota menurut jenis sekolah berbasis gender di Kota Pekalongan bervariasi. Pada jenjang SD/MI, angka partisipasi kasar berbasis gender lebih di dominasi laki-laki dengan nilai 102,02. Sedangkan angka partisipasi kasar SMP/setara lebih didominasi kaum perempuan dengan nilai 110,31. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender di Kota Pekalongan Tahun 2020

Rasio	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
Angka Partisipasi Kasar	SD/Setara (persen)	102,02	100,56
	SMP/Setara (persen)	100,98	110,31
	SMA/Setara (persen)	N/A	N/A

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

2.2.15. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2017-2019, persentase pada jenjang pendidikan SD/sederajat berada di posisi tinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Pada tahun 2017 dan 2018, persentase pendidikan yang ditamatkan jenjang SMA/sederajat lebih tinggi daripada SMP/sederajat. Namun di tahun 2019 posisi tersebut berubah dimana pada jenjang SMP/sederajat lebih tinggi daripada jenjang SMA/sederajat. Sementara untuk jenjang Diploma IV/S1/S2 persentasenya lebih tinggi dari jenjang Diploma I/II/III/Sarjana Muda dalam kurun waktu 2017-2019. Untuk kategori Tidak/Belum Tamat SD/sederajat berada di kisaran angka 15-19 persen, dan untuk kategori Tidak/Belum Pernah Sekolah berada di kisaran angka ± 1 persen. Untuk tahun 2020 BPS tidak menghitung angka pendidikan yang ditamatkan sehingga tidak tersedia data.

Tabel 2.17 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2019

Tahun	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak/Belum Tamat SD sederajat	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Diploma I/II/III/Sarjana Muda	Diploma IV/S1/ S2
2017	1,87	15,86	28,04	21,42	26,73	1,35	4,74
2018	1,53	18,41	27,96	20,61	25,32	1,79	4,37
2019	0,87	15,78	27,51	25,82	22,66	1,81	5,55
2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : pekalongankota.bps.go.id, 2021

2.2.16. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Capaian APM Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 jenjang SD/MI berada di kisaran 98 persen sampai dengan 100 persen. Capaian APM pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2020 meningkat jika dibandingkan tahun 2019. Demikian juga APM pada jenjang SM/MA/SMK pada akhir periode (2020) mengalami peningkatan. Secara rinci perkembangan APM di Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 baik SD/MI, SMP/MTs dan SM/MA disajikan dalam Tabel 2.18 berikut.

Tabel 2.18 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Tahun	SD/MI/Sederajat (persen)		SMP/MTs/Sederajat (persen)		SMA/MA/SMK/Sederajat (persen)	
	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah
2016	100,00	96,64	74,49	78,89	52,91	58,49
2017	98,23	97,13	74,08	79,13	55,32	59,20
2018	100,00	97,75	74,54	79,31	74,41	59,31
2019	99,52	97,77	71,85	79,84	54,81	59,35
2020	99,48	98,00	74,55	81,00	55,58	59,74

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

Perkembangan Angka Partisipasi Murni berdasarkan gender di Kota Pekalongan pada tahun 2020, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan. Pada tingkat SD/setara, APM laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Sedangkan pada jenjang SMP/setara, APM perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.19 berikut.

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni di Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2020

Rasio	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
Angka Partisipasi Murni	SD/Setara	83,73	82,07
	SMP/Setara	59,28	62,97
	SMA/Setara	N/A	N/A

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

2.2.17. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi merupakan kejadian kematian yang terjadi pada periode sejak bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Kematian bayi dipengaruhi oleh jumlah kematian neonatal, yang merupakan masalah yang kontribusinya sangat tinggi terhadap kematian bayi. Penyebab kematian neonatal antara lain adanya infeksi (pneumonia, tetanus, diare), prematur/BBLR, dan kelainan *congenital*. Status kesehatan bayi tersebut sangat terkait dengan beberapa faktor ibu selama hamil dan ibu melahirkan, seperti rendahnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, rendahnya pemeriksaan selama masa kehamilan, dan juga status gizi ibu hamil yang masih rendah.

Angka Kematian Bayi dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi. Angka Kematian Bayi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 12,36 per 1.000 kelahiran hidup dan terendah pada tahun 2020 sebesar 8,81 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi berbanding terbalik dengan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Jika tren Angka Kematian Bayi di suatu wilayah cenderung meningkat maka tren Angka Kelangsungan Hidup Bayi akan semakin menurun. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dari tahun 2016 sampai 2020 per 1.000 kelahiran mengalami fluktuasi seiring dengan naik turunnya Angka Kematian Bayi. Angka Kelangsungan Hidup Bayi terendah terjadi pada tahun 2016 dengan angka 987,64 bayi per 1.000 kelahiran hidup dan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan angka 990,92 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Namun mulai tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 989,01 bayi per 1.000 kelahiran hidup

dan turun kembali menjadi 988,01 bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi 991,19 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Adapun penyebab Angka Kematian Bayi di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan oleh kasus BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), *asfiksia*, kelainan *kongenital*, kelainan saluran pencernaan, *pnemonia*, diare dan adanya penyakit penyerta lainnya.

Tabel 2.20 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	AKB per 1000 kelahiran	AKHB per 1000 kelahiran
2016	12,36	987,64
2017	9,08	990,92
2018	10,99	989,01
2019	11,99	988,01
2020	8,81	991,19

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

2.2.18. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan kesehatan pada balita dan kondisi sosial, ekonomi dan sanitasi lingkungan tempat balita tinggal.

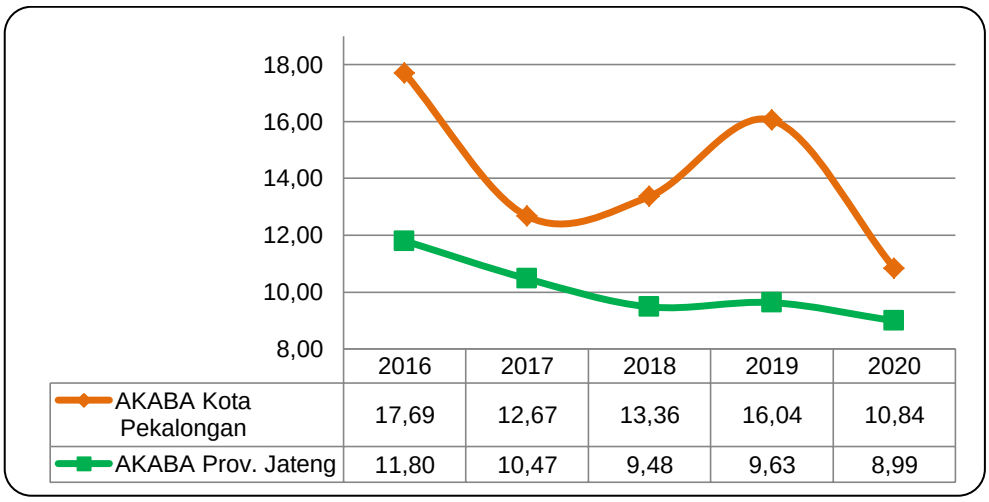

Gambar 2.31 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Sumber : Evaluasi RKPD Kota Pekalongan TW. IV Tahun 2020 dan Buku Saku Kinerja Program Kesehatan 2020 Dinkes Jawa Tengah, 2021

Capaian AKABA dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 cenderung berfluktuasi. AKABA tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 17,69 per 1.000 KH kemudian menurun menjadi 12,67 per 1.000 KH pada Tahun 2017. Namun mulai tahun 2018 sampai 2019 meningkat kembali dari 13,36 per 1.000 KH pada tahun 2018 menjadi 16,04 per 1.000 KH pada tahun 2019. Namun kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 10,84 per 1.000 KH. Tingginya Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya disebabkan oleh adanya penyakit penyerta pada Balita

seperti ISPA, Diare, DBD, Campak ataupun kombinasi dari penyakit menular lainnya serta kurangnya pemahaman orang tua tentang deteksi dini balita sakit. Sementara itu AKABA di tingkat Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016 – 2020 mengalami tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2016, AKABA sebesar 11,80 per 1.000 KH, kemudian turun ditahun 2017 menjadi 10,47 per 1.000 KH, tahun 2018 menurun menjadi 9,48 per 1.000 KH, naik menjadi 9,63 per 1.000 KH pada tahun 2019 dan kembali menurun menjadi 8,99 per 1.000 KH di tahun 2020.

2.2.19. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya Angka Kematian Ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula.

Tabel 2.21 Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI per 100.000 kelahiran hidup
2016	8	5824	137,36
2017	10	5839	171,26
2018	7	5911	118,42
2019	6	5923	101,30
2020	9	5905	152,41

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

Kondisi Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 semakin meningkat. Pada tahun 2016 AKI sebesar 137,36 dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 8 kasus meningkat menjadi 171,26 pada tahun 2017 dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 10 kasus. Namun mulai tahun 2018 Pemerintah Kota Pekalongan berhasil menurunkan jumlah kasus kematian ibu menjadi 118,42 per 100.000 KH pada tahun 2018 dan kemudian menurun lagi menjadi 101,30 per 100.000 KH pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 AKI kembali meningkat menjadi 152,41 dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 9 kasus. Adapun penyebab langsung kematian Ibu di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan karena kasus pre eklamsia berat, perdarahan dan emboli air ketuban.

2.2.20. Angka Kesakitan

Angka kesakitan (Morbiditas) merupakan angka yang menunjukan tingkat kesakitan akibat gangguan struktur maupun fungsi tubuh seseorang yang merupakan derajat sakit, cedera maupun gangguan pada populasi yang merupakan penyimpangan dari status sehat atau kesejahteraan suatu masyarakat. Angka Morbiditas merupakan indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat umum yang dilihat dari persentase penduduk dengan keluhan kesehatan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

Angka kesakitan di Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016, angka kesakitan berada di angka 10,59 persen. Angka tersebut terus maningkat sampai dengan tahun 2019 dan mencapai angka tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu 16,68 persen dan di tahun 2020 menurun menjadi 12,89 persen. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22 Angka Kesakitan di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Angka Kesakitan (persen)
2016	10,59
2017	13,33
2018	13,07
2019	16,68
2020	12,89

Sumber : jateng.bps.go.id, 2021

2.2.21. Prevalensi Balita Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak Balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan dibadingkan umur berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan. Menurut WHO stunting atau pertumbuhan yang terhambat mencerminkan proses kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan linier sebagai akibat dari kondisi kesehatan atau gizi yang kurang optimal. Berdasarkan populasi, tingkat stunting yang tinggi dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk dan peningkatan risiko sering dan awal terpapar dengan kondisi buruk seperti penyakit atau praktik pemberian makan yang tidak tepat.

Gambaran prevalensi angka stunting Kota Pekalongan dari tahun 2016 – 2020 disajikan dalam Tabel 2.23 berikut.

Tabel 2.23 Prevalensi Balita Stunting Kota PekalonganTahun 2016-2020

Tahun	Prevalensi Stunting
2016	8,90%
2017	8,06%
2018	6,99%
2019	6,87%
2020	9,42%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

Dari Tabel 2.23 dapat dilihat bahwa prevalensi Balita Stunting di Kota Pekalongan pada tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami penurunan dari 8,9% di tahun 2016 menjadi 6,87% di tahun 2019 namun di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 9,42%.

2.2.22. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan

manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

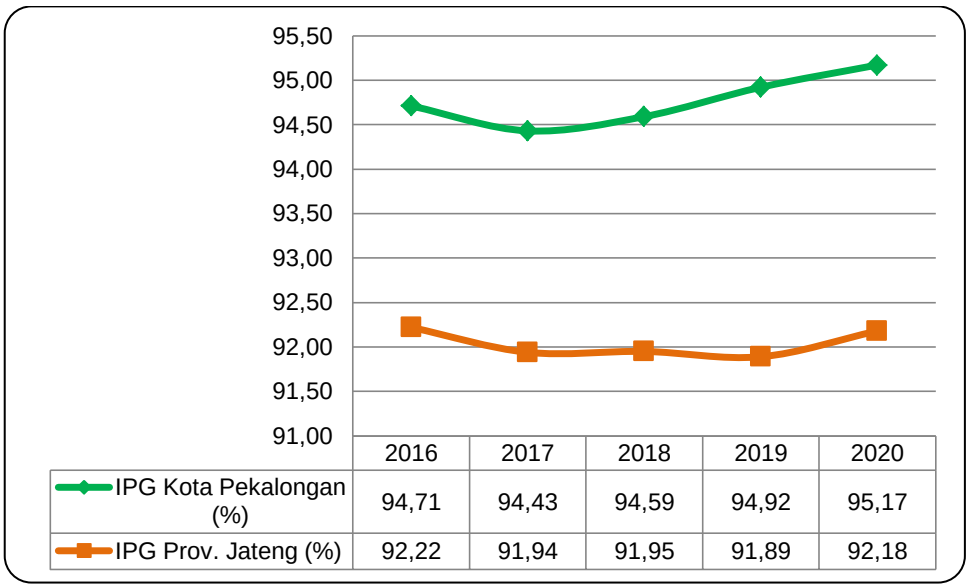

	2016	2017	2018	2019	2020
IPG Kota Pekalongan (%)	94,71	94,43	94,59	94,92	95,17
IPG Prov. Jateng (%)	92,22	91,94	91,95	91,89	92,18

Gambar 2.32 Perbandingan IPG di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021

Perkembangan IPG Kota Pekalongan sepanjang tahun 2016-2020 cenderung relatif stabil. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020, IPG Kota Pekalongan sebesar 95,17 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Pekalongan semakin membaik khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan pendapatan. Sedangkan jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah.

2.2.23. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2020, nilai IDG Kota Pekalongan berfluktuasi. Pada tahun 2016, nilai IDG Kota Pekalongan sebesar 67,44, kemudian menurun di tahun 2017 menjadi 65,11 dan meningkat kembali ditahun 2018 diangka 68,62. Pada tahun 2019 menurun cukup drastis di angka 60,95 dan kembali menurun di tahun 2020 di angka 58,29.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2016-2020, nilai IDG Kota Pekalongan masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.33. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan di Kota Pekalongan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dalam kehidupan ekonomi dan politik menurun partisipasinya.

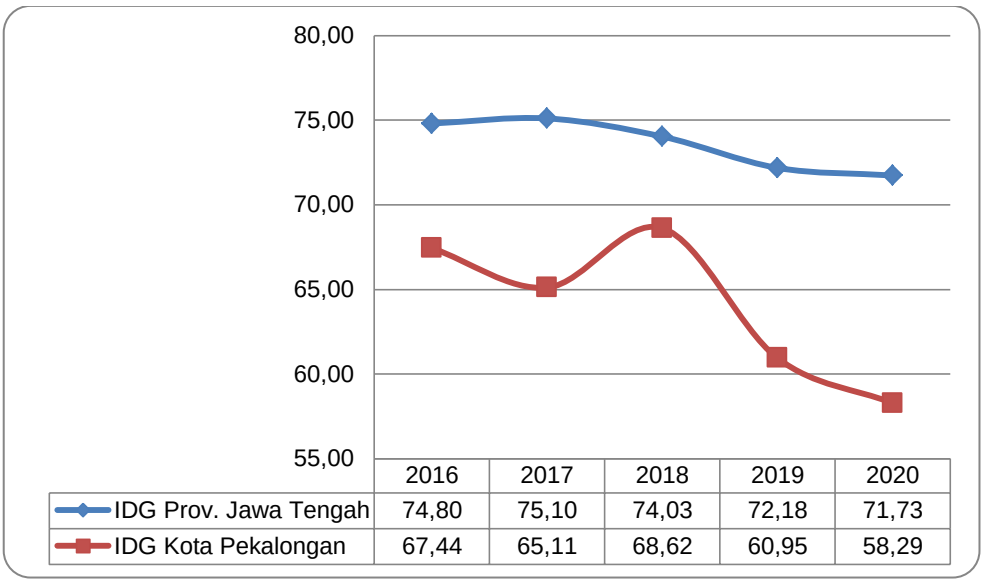

Gambar 2.33 Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Sumber : www.bps.go.id, 2021

2.2.24. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi. Pengaruh budaya global dapat disesuaikan dengan idenditas nasional yang mengandung nilai-nilai luhur yang sesuai dengan falsafah Pancasila.

Kota Pekalongan sebagai sebuah kota pesisir, dalam proses pembangunannya juga memandang bahwa faktor-faktor budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan. Kesenian merupakan salah satu wujud kebudayaan yang ada di Kota Pekalongan. Kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur budaya, seperi pengaruh budaya Jawa, Arab, Tionghoa dan juga pesisir. Beberapa kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan antara lain : Simtuduror, Sheik Rebana, Kendang Pencak dan Nyadranan. Kegiatan tersebut masuk dalam agenda Pekan Batik Tahunan dan dilaksanakan dalam peringatan hari-hari besar di Kota Pekalongan.

Perkembangan jumlah kelompok kesenian di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.24 menunjukkan kecenderungan peningkatan. Dibandingkan pada tahun 2016 maka jumlah kelompok kesenian pada tahun 2018, 2019 dan 2020 mencapai hampir dua kali lipatnya. Jumlah kelompok kesenian pada tahun 2019 dan 2020 mengalami sedikit penyusutan dibandingkan tahun 2018. Jumlah gedung kesenian di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2016 sampai 2020 berjumlah tetap yakni empat buah gedung kesenian, sehingga persentase sarana budaya per jumlah kelompok menunjukkan kecenderungan penurunan karena belum adanya penambahan sarana budaya selama tahun 2016 s.d. 2020.

Tabel 2.24 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok Kesenian	82	109	164	162	162
Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
Persentase Sarana Budaya per Jumlah Kelompok (persen)	4,87	3,67	2,44	2,47	2,47

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

2.2.25. Pemuda dan Olahraga

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran dan arti penting bagi proses pembangunan. Pembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pekalongan. Pada tahun 2016 jumlah organisasi pemuda yaitu 8 organisasi. Jumlahnya relatif tetap, dimana pada tahun 2017 dan 2018 hanya 9 organisasi dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2019 menjadi 26 organisasi pemuda. Sementara itu jumlah kegiatannya tidak berubah banyak, antara 8 sampai 10 kegiatan kepemudaan sepanjang lima tahun terakhir.

Adapun organisasi yang masih berperan aktif selama tahun 2016-2020 antara lain adalah PPI, Forum Kota Pekalongan, Gerakan Pemuda Nusantara, Forum Pemuda Mataram, GMPI, Pemuda Muhammadiyah, KAMMI, KNPI, dan Karang Taruna. Lebih lengkapnya perkembangan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.25 berikut.

Tabel 2.25 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Pemuda	8	9	9	26	24
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	10	8	8	8	8

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Selain organisasi kepemudaan, Dinparbudpora juga melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap klub-klub olahraga yang ada di Kota Pekalongan. Tidak banyak jumlah klub olahraga di Kota Pekalongan, jumlahnya 20 klub. Dari tahun 2016, jumlah klub olahraga adalah 19 klub, berkurang menjadi 16 klub pada tahun 2017, dan bertambah lagi menjadi 20 klub pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Sementara itu fasilitas gedung olahraga yang tersedia sampai saat ini berjumlah 2 unit.

Tabel 2.26 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Klub Olahraga	19	16	20	20	20
Jumlah Gedung Olahraga	2	2	2	2	2

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Jumlah organisasi olahraga di Kota Pekalongan tahun 2016 berjumlah 30 organisasi dan jumlahnya masih tetap hingga tahun 2018 dan terdapat penambahan 1 (satu)

organisasi olahraga di tahun 2019 sehingga menjadi 31 organisasi olahraga. Begitu pula dengan gelanggang/balai remaja selain milik swasta, jumlahnya tetap dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yakni sebanyak 3 gelanggang yaitu GOR Jetayu, Stadion Hoegeng dan Warung Apresiasi. Untuk lapangan olahraga bisa dikatakan cukup banyak, yaitu berjumlah 55 lapangan pada tahun 2020, dimana sebelumnya di tahun 2016 hanya berjumlah 12 lapangan. Hal ini dikarenakan lapangan olahraga milik sekolah turut diperhitungkan. Kegiatan olahraga sebanyak 8 kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, diantaranya Popda tingkat Kota, Popda tingkat karesidenan, Popda tingkat provinsi, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) tingkat karesidenan, tingkat provinsi, Pekan Olahraga Wilayah Dulongmas, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), dan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov). Penyelenggaraan olahraga selama tahun 2018 dan 2019 terdiri dari penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan, pusat pelatihan olahraga tingkat karesidenan/provinsi, penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota dan pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat.

Tabel 2.27 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Olahraga	30	30	30	31	31
Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3
Lapangan olahraga	12	55	55	55	55
Jumlah kegiatan olahraga	5	7	7	8	8

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Pemerintah Kota Pekalongan selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang pendidikan sebagai berikut.

a. Angka Partisipasi Sekolah

1) PAUD

PAUD sebagai salah satu tempat untuk membina anak usia dini merupakan salah jenjang pendidikan yang ditargetkan dalam pembangunan Kota Pekalongan. Dalam lima tahun terakhir, jumlah siswa PAUD/TK di Kota Pekalongan cenderung fluktuatif dengan hasil akhir di tahun 2020 menurun. Jumlahnya meningkat pada tahun 2017 dan 2019, namun di tahun 2020 menurun cukup banyak, semula 9.019 siswa menjadi 7.485 siswa. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.28 berikut.

Tabel 2.28 Jenjang Pendidikan PAUD/TK di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah siswa TK/RA	Jumlah anak usia 4-6 tahun	Persentase PAUD
2016	7.901	15.422	51,23
2017	8.107	15.873	51,07
2018	8.000	16.180	49,44
2019	9.019	16.625	54,25
2020	7.485	15.710	47,64

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

2) Pendidikan Dasar

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2016-2020 pada jenjang pendidikan SD/MI cenderung bervariasi, dari 110,93 di tahun 2016 menjadi 103,79 di tahun 2020. Sementara itu capaian APS jenjang SMP/MTs cenderung meningkat dari 102,67 di tahun 2016 menjadi 103,67 di tahun 2020. Dalam perjalanannya, di tahun 2019 capaian APS jenjang SD/MI dan SMP/MTS tidak mencapai target seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang selalu di atas 100 persen. Hal ini karena adanya kebijakan Zonasi yang mulai diterapkan di tahun ajaran 2018/2019. Selain itu, sebagian besar orang tua menyekolahkan anaknya di usia yang lebih muda daripada ketentuan yang berlaku juga menjadi faktor penurunan target ini.

Perkembangan APS Kota Pekalongan untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam Tabel 2.29 berikut.

Tabel 2.29 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
APS SD/MI	110,93	110,57	106,97	98,67	103,79
APS SMP/MTs	102,67	104,21	104,67	97,69	103,67

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

3) Usia 5-15 tahun

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Indikator APS untuk mencapai sasaran meningkatnya akses layanan pendidikan di Kota Pekalongan pada tingkat TK, SD, SMP, Paket A, Paket B, RA, MI, MTs.

Secara series, Angka Partisipasi Sekolah di jenjang pendidikan yang menjadi kewenanangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.30 berikut.

Tabel 2.30 Angka Partisipasi Sekolah Jenjang TK-SMP di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun		Jml. Anak Usia Sekolah TK s.d SMP	Jml. Penduduk Usia 5 – 15 Tahun	APS (persen)	
2016	L	26.481	28.331	93,47	95,55
	P	25.853	26.439	97,78	
2017	L	27.187	29.166	93,21	94,84
	P	26.245	27.172	96,59	
2018	L	28.202	29.456	95,74	98,65
	P	28.051	27.569	101,75	
2019	L	29.622	29.585	100,13	100,77
	P	28.028	27.625	101,46	
2020	L	28.348	29.524	96,02	96,75
	P	27.019	27.703	97,53	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, ketersedian jumlah SD/MI cenderung naik namun tidak signifikan, dimana pada tahun 2016 sebanyak 145 sekolah dan di tahun 2020 sebanyak 146 sekolah. Sedangkan jumlah sekolah SMP/MTs cenderung stagnan yaitu 38 sekolah. Untuk jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun, secara umum cenderung fluktuatif. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.31 berikut.

Tabel 2.31 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah SD/MI	145	146	149	149	146
Jumlah SMP/MTs	37	38	38	38	38
Jumlah Penduduk Usia 7-12 th	30.519	29.873	30.524	32.855	31.581
Jumlah Penduduk Usia 13-15 th	15.682	15.229	15.330	15.385	15.067

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan data diatas maka rasio ketersediaan sekolah untuk usia sekolah pendidikan dasar di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32 Rasio Ketersediaan Sekolah Untuk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Rasio per 10.000 penduduk usia 7-12 thn dan usia 13-15 thn
2016	39,61
2017	40,57
2018	40,78
2019	38,76
2020	39,44

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

c. Rasio Guru terhadap Murid Per 10.000 Penduduk Usia Sekolah

Rasio guru terhadap murid per 10.000 penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran di kelas. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, rasio ketersedian guru pendidikan dasar yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah murid setiap 10.000 usia anak sekolah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 rasio sebesar 599,41, kemudian mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 menjadi 586,37 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.33 berikut.

Tabel 2.33 Rasio Guru dan Murid di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
	Jumlah Guru	1.889	1.763	1.887	1.840	1.841
	Jumlah Murid	32.242	32.121	32.210	32.092	31.752
2	SMP/MTs					
	Jumlah Guru	1.015	963	993	933	932
	Jumlah Murid	16.206	16.168	15.905	15.759	15.539
Jumlah Guru (SD/MI+SMP/MTs)		2.904	2.726	2.880	2.773	2.773
Jumlah Murid (SD.MI+SMP/MTS)		48.448	48.289	48.115	47.851	47.291
Rasio Guru (SD/MI+SMP/MTs) Per Murid Per 10.000 penduduk		599,41	564,52	598,57	579,51	586,37

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2021, 2021

d. Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata

Rasio guru terhadap murid rata-rata adalah perbandingan guru sekolah pendidikan dasar per kelas dengan jumlah murid pendidikan dasar per 10.000 anak usia sekolah. Sesuai Tabel 2.35, rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata dalam 10.000 anak usia sekolah mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2016-2020, dan berakhir menurun di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2016 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.34 berikut.

Tabel 2.34 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah guru pendidikan dasar*)	Jumlah kelas pendidikan dasar*)	Jumlah guru sekolah per kelas*)	Murid Pendidikan dasar*)	Rasio guru/murid per kelas rata-rata setiap 10.000 anak usia sekolah
2016	2.904	1.654	1,76	48.448	0,360
2017	2.726	1.708	1,6	48.289	0,331
2018	2.880	1.689	1,71	48.115	0,354
2019	2.773	1.778	1,56	47.843	0,326
2020	2.801	1.770	1,58	47.882	0,330

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

*) data pertengahan tahun ajaran

Sementara itu rasio guru dan murid jenjang SD/MI di Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 juga mengalami fluktuasi. Mulai dari 0,5 di tahun 2016, mengalami naik turun sampai tahun 2020 dengan kondisi terakhir di angka 0,46 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.35 berikut.

Tabel 2.35 Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Karakteristik	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Guru SD/MI*)	1.889	1.763	1.887	1.840	1.856
Rombongan Kelas*)	1.161	1.195	1.215	1.173	1.265
Jumlah Guru Sekolah SD/MI per Kelas*)	1,62	1,47	1,55	1,57	1,47
Murid SD/MI*)	32.242	32.121	32.210	32.855	31.995
Rasio guru terhadap murid (SD/MI) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk	0,5	0,46	0,48	0,48	0,46

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

*) data pertengahan tahun ajaran

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama / Sederajat digambarkan dalam tabel rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk dari tahun 2016-2020. Selama lima tahun terakhir, rasio tersebut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 berada di angka 1,27, kemudian turun di tahun 2017 dan 2018. Namun kembali naik di tahun 2019 di angka 1,26 dan menurun di tahun 2020 menjadi 1,18. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.36 berikut.

Tabel 2.36 Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Karakteristik	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Guru SMP/MTs*)	1.015	963	933	933	945
Rombongan Kelas*)	493	513	516	481	505
Jumlah Guru Sekolah SMP/MTs per Kelas*)	2,06	1,88	1,81	1,94	1,87

Karakteristik	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Murid SMP/MTs*)	16.206	16.168	15.905	15.385	15.887
Rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk	1,27	1,16	1,14	1,26	1,18

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

*) data pertengahan tahun ajaran

e. Fasilitas Pendidikan

Kondisi bangunan penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu faktor utama terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolahan. Bangunan sekolah yang baik memberikan kontribusi yang baik terhadap kegiatan proses belajar mengajar bagi pendidik dan peserta didik.

Dalam kurun waktu 2016-2020, kondisi bangunan SD/setara dan SMP/setara mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016-2018 kondisi bangunan SD/setara meningkat, namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan sampai di angka 73,30 persen. Hal serupa juga terjadi pada kondisi bangunan SMP/setara, dimana pada tahun 2016 sebesar 77,87 persen dan pada tahun 2017 menjadi 94,82 persen. Sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 86,80 persen, namun kembali meningkat pada tahun 2019 yaitu sebesar 92,10 persen dan menurun drastis di tahun 2020 mejadi 68,95 persen. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.37 berikut.

Tabel 2.37 Kondisi Bangunan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016 – 2020

Jenjang	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI (persen)	86,51	91,65	95,01	92,72	73,30
SMP/MTs (persen)	77,87	94,82	88,86	94,13	68,95

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

f. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya, kondisi ekonomi orang tua yang miskin, dan keadaan geografis.

Angka putus sekolah untuk jejang pendidikan SD/MI dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2016 sebesar 0,09 persen dan pada tahun 2017 menurun menjadi 0,07 persen, kemudian meningkat di tahun 2020 sebesar 0,29 persen. Sama halnya dengan jenjang SD/MI, jenjang SMP/MTs juga fluktuatif. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.38 berikut.

Tabel 2.38 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan 2016 – 2020

Jenjang	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI (persen)	0,09	0,07	0,07	0,10	0,29

Jenjang	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SMP/MTs (persen)	0,43	0,14	0,15	0,46	0,97

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2020, 2021

g. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan sekolah menunjukan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/setara, sepanjang tahun 2016-2020 mencapai tingkat kelulusan sebesar 100 persen. Untuk angka kelulusan sekolah SMP/sederajat selama kurun waktu 2016-2020 dapat mencapai 100 persen di tahun 2017 sampai 2020. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.39 berikut.

Tabel 2.39 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI danSMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Jenjang	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	100	100	100	100	100
SMP/MTs	99,98	100	100	100	100

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2020, 2021

Dari nilai ujian akhir nasional, jenjang SD/MI cenderung fluktuatif. Begitu pula dengan jenjang SMP/MTs. Pada Tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi *COVID-19* tidak diselenggarakan Ujian Akhir Nasional. Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs disajikan dalam Tabel 2.40 berikut.

Tabel 2.40 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Jenjang	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD	7,30	7,53	7,26	69,69	0,00
	MI	7,26				
2	SMP	6,088	6,13	5,74	59,02	0,00
	MTs	5,393				

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2020, 2021

h. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah adalah salah satu bukti nyata dari kegiatan pendidikan yang secara berjenjang terjadi dalam siklus pendidikan. Angka melanjutkan sekolah dari tingkat SD/setara ke jenjang SMP/setara dalam kurun waktu tahun 2016-2020 telah diatas 100 persen, meskipun dalam perjalanannya cenderung fluktuatif. Sementara itu untuk angka melanjutkan dari jenjang pendidikan dari SMP/setara ke SMA/setara sepanjang tahun 2016-2020 cenderung menurun dan sempat berada di bawah 100 persen di tahun 107 dan 2018. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.41 berikut.

Tabel 2.41 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan tahun 2016 – 2020

Jenjang	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	113,35	111,82	102,44	104,78	102,79
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	105,12	98,41	98,00	101,25	102,44

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

i. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Peningkatan kualitas pendidik dapat diukur dari tingkat pendidikan yang dimiliki. Tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tingkat pendidikan S1 atau D4 terus ditingkatkan, baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs. Meskipun pada kenyataannya selalu mengalami fluktuasi seperti yang disajikan dalam Tabel 2.42 berikut.

Tabel 2.42 Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Jenjang	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/DIV	90,45	94,23	92,42	92,80	93,53
Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/DIV	92,12	93,39	93,96	94,96	95,66

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

j. Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A

Mutu penyelenggaraan pendidikan salah satunya ditunjukkan dengan nilai akreditasi sekolah. Tabel 2.45 menunjukkan sekolah jenjang TK sampai SMP yang memperoleh akreditasi A.

Tabel 2.43 Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jenjang TK/RA					
- Sekolah Terakreditasi A	-	3	8	18	18
- Jumlah Sekolah	104	108	109	110	110
- Persen	0,00	2,78	7,34	16,36	16,36
Jenjang SD/MI					
- Sekolah Terakreditasi A	85	99	95	102	99
- Jumlah Sekolah	145	146	149	149	146
- Persen	58,62	76,81	63,76	68,46	67,81
Jenjang SMP/MTs					
- Sekolah Terakreditasi A	18	23	23	26	26
- Jumlah Sekolah	37	38	38	38	38
- Persen	48,65	60,53	60,53	68,42	68,42
Jenjang TK-SMP					

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
- Sekolah Terakreditasi A	103	122	122	146	143
- Jumlah Sekolah	286	292	292	297	294
- Persen	36,00	41,78	42,57	49,16	48,64

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

k. Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter

Persentase Implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di Kota Pekalongan diukur berdasarkan rata-rata persentase implementasi pendidikan keagamaan dan implementasi pendidikan karakter. Pendidikan keagamaan di Kota Pekalongan telah diimplementasikan di seluruh jenjang mulai Usia Dini sampai dengan Pendidikan Dasar (PAUD, SD dan SMP). Sedangkan pendidikan karakter diukur berdasarkan jumlah sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 (K-13).

Tabel 2.44 Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2020

Tahun	Sekolah yang mengimplementasi pendidikan keagamaan		Sekolah yang mengimplementasi pendidikan karakter		Rata-rata
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
2018	297	100	142	47,81	73,90
2019	297	100	200	67,34	83,67
2020	294	100	294	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

Realisasi kinerja indikator persentase penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter pada tahun 2020 melebihi target yang ditetapkan RPJMD.

2. Kesehatan

a. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

Tabel 2.45 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per 1.000 Balita di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah balita	Rasio Posyandu /Balita
2016	406	21.420	18,95
2017	407	22.933	17,75
2018	409	23.269	17,58
2019	411	23.173	17,74
2020	414	23.008	17,99
Rata-rata			18,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

Jumlah Posyandu dari tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan tiap tahunnya, sedangkan Rasio Posyandu per 1000 balita tidak terlalu banyak

mengalami perubahan, dengan asumsi pertambahan Posyandu jumlahnya hampir sama dengan jumlah per 1000 Balita. Rata-rata Rasio pos pelayanan terpadu per 1000 Balita selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2016 – 2020 adalah 18,00 yang berarti setiap seribu balita yang ada dilayani oleh 18 posyandu atau setiap posyandu melayani sebanyak 56 balita yang ada di wilayah tersebut.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 berdasarkan data pada Tabel 2.46, secara aggregat, jumlah puskesmas, puskesmas pembantu tidak mengalami perubahan jumlah. Sedangkan untuk Rumah Sakit, dengan bertambahnya 1 (satu) Rumah Sakit maka ada perubahan rasio. Rasio tersebut, menggambarkan rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Sumah Sakit terhadap 1.000 penduduk setiap tahunnya.

Tabel 2.46 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun		Puskesmas		Pustu		Poliklinik		Rumah Sakit	
	Jumlah Penduduk	Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio
2016	299.222	14	0,047	27	0,090	22	0,074	8	0,027
2017	301.870	14	0,046	27	0,089	14	0,046	8	0,027
2018	304.477	14	0,046	27	0,089	13	0,043	9	0,030
2019	307.097	14	0,046	27	0,088	12	0,039	9	0,029
2020	307.150	14	0,046	26	0.085	11	0.036	9	0.029

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

b. Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi

Akreditasi merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap manajemen RS karena telah memenuhi standar yang ditentukan. Data rumah sakit di Kota Pekalongan yang telah terakreditasi secara rinci disajikan dalam Tabel 2.47 berikut.

Tabel 2.47 Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi Tahun 2016 - 2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi	8	8	8	9	9
Jumlah seluruh rumah sakit	8	8	9	9	9
Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi	100,00	100,00	88,89	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

c. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Ketersediaan dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kesehatan masyarakat

penting sebagai modal masyarakat dalam menjalani aktifitas kehidupan. Kurun waktu 2016 – 2020, rasio dokter umum di Kota Pekalongan lebih besar dibandingkan dokter spesialis dan dokter gigi. Menurut Standar Target Rasio Kebutuhan SDMK Tahun 2014, tahun 2019 dan tahun 2025 dalam Kepmenko Bidang Kesra No.54 Tahun 2013, rasio dokter spesialis sudah mencapai target sebesar 11 per 100.000 penduduk. Rasio dokter umum berdasarkan data yang diolah sudah memenuhi standar dan target rasio Kebutuhan SDMK yaitu 45 dokter per 100.000 penduduk. Untuk Rasio dokter gigi berdasarkan data yang diolah untuk tahun 2018 sudah mencapai target rasio Kebutuhan SDMK yaitu 13 dokter gigi per 100.000 penduduk dokter gigi per 1.000 penduduk. Secara umum rasio dokter persatuan penduduk meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2018, namun menurun di tahun 2019 dan sedikit meningkat di tahun 2020. Data perkembangan rasio dokter disajikan dalam Tabel 2.48 berikut.

Tabel 2.48 Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dokter Spesialis	0,42	0,48	0,53	0,39	0,42
Dokter Umum	0,52	0,79	0,91	0,60	0,66
Dokter Gigi	0,1	0,17	0,16	0,11	0,12
Rasio Dokter per satuan penduduk	0,94	1,45	1,60	1,1	1,2

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

Tenaga paramedis dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, tenaga paramedis yang terdiri dari perawat, bidan dan bidang kefarmasian perlu terus ditambah agar tercapai rasio per 1.000 penduduk minimal terdapat satu tenaga para medis.

Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis (perawat, bidan, tenaga farmasi) di Kota Pekalongan dari Tahun 2016 – 2020 semakin membaik. Secara rinci disajikan dalam Tabel 2.49 berikut.

Tabel 2.49 Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Perawat	2,23	2,32	2,58	2,63	2,71
Rasio Bidan	0,95	1,00	1,20	1,08	1,09
Rasio Farmasi	0,44	0,93	1,18	0,84	0,90
Perawat	698	709	804	827	832
Bidan	286	304	375	339	335
Tenaga Farmasi	133	285	348	265	276

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

d. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya utama dalam pembangunan kesehatan. Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tenaga kesehatan harus mempunyai ijin, kecuali tenaga kesehatan masyarakat. Tujuan dari perijinan ini

selain melindungi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan juga melindungi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar. Mulai Tahun 2019 DPMPTSP Kota Pekalongan telah mengeluarkan izin bagi tenaga kesehatan di Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perizinan Tenaga Kesehatan. Secara rinci disajikan dalam Tabel 2.50 berikut.

Tabel 2.50 Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek Tahun 2019 - 2020

Uraian	2019	2020
Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek (yang dikeluarkan DPMPTSP)	544	698
Jumlah tenaga kesehatan yang berkewajiban memiliki Surat Ijin Praktek	2.348	2.498
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	23,17	27,94

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

e. Jumlah Kunjungan di RSUD Bendan

Pandemi *COVID-19* telah memengaruhi operasional rumah sakit. Wabah virus corona menyebabkan penurunan kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap non *COVID-19*. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan tingkat okupansi. Rasio Kunjungan di RSUD Bendan Kota Pekalongan menunjukkan tren yang negatif pada tahun 2020 yaitu sebesar -14,39 persen. Secara rinci disajikan dalam Gambar 2.34 berikut.

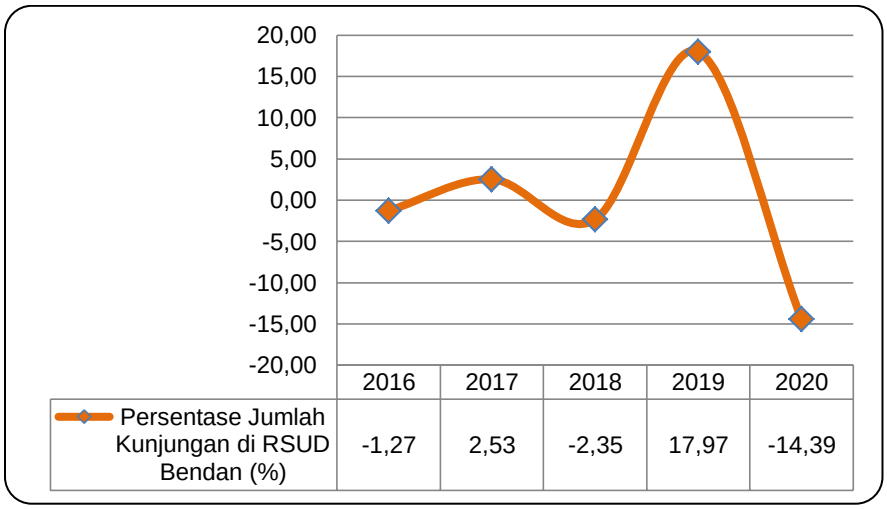

Gambar 2.34 Persentase Kunjungan di RSUD Bendan Kota Pekalongan Periode Tahun 2016 - 2020

Sumber : RSUD Bendan, 2021

Jumlah Kunjungan pasien pada tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan secara signifikan disebabkan adanya pengembangan pelayanan di RSUD Bendan. Namun sejak terjadinya Pandemi *COVID-19* secara global termasuk Kota Pekalongan mulai bulan Maret 2020 mengakibatkan penurunan kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap non *COVID-19* secara signifikan. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan tingkat pemakaian tempat tidur rumah sakit. Rasio kunjungan pasien di RSUD Bendan Kota Pekalongan menunjukkan

tren yang negatif pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar -14,39 persen.

f. Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar

Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Secara rinci sarana farmasi di Kota Pekalongan yang telah memenuhi standar disajikan dalam Tabel 2.51 berikut.

Tabel 2.51 Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar Tahun 2016 - 2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Sarana Farmasi yang memenuhi standar	364	50	161	102	61
Sarana Farmasi yang dilakukan pengawasan	420	60	208	115	68
Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar	86,67	83,33	77,40	88,70	89,71

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

g. Persentase Balita Usia <6 bulan mendapat ASI Eksklusif

Pemberian makanan bayi yang terbaik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif (usia 0-6 bulan), dengan ASI Eksklusif dan dilanjutkan sampai dengan usia 24 bulan. Sedangkan makanan pendamping ASI dapat diberikan sejak usia bayi 6 bulan. ASI, yang sangat bermanfaat bagi bayi, merupakan makanan yang sempurna dan terbaik karena mengandung unsur-unsur yang bermanfaat untuk tumbuh kembang bayi secara optimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas, pada tahun 2020 presentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif adalah 53,40 persen. Angka ini sudah memenuhi presentase yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu 47 persen. Untuk terus meningkatkan persentase ini maka dilakukan sosialisasi dan kampanye pemberian ASI eksklusif di puskesmas dan posyandu di Kota Pekalongan menyadarkan para ibu-ibu. Presentase Balita (usia 0 – 6 bulan) yang mendapatkan ASI Eksklusif selama 5 tahun terakhir sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.52 berikut.

Tabel 2.52 Persentase Balita Usia <6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Jumlah Bayi	Jumlah Bayi yang diberi ASI Ekslusif	Cakupan (persen)
2016	1.996	1.731	86,72
2017	5.066	2.168	42,80
2018	5.176	2.668	51,55
2019	5.136	2.938	57,20
2020	4.524	2.416	53,40

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2020, 2021

h. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Persentase balita gizi buruk di Kota Pekalongan 2020 sebesar 0,16 persen. Secara umum jumlah kasus balita gizi buruk di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi. Meski ada penurunan jumlah balita gizi buruk pada tahun 2019 sebanyak 12 kasus, tetapi jumlah balita gizi buruk sampai dengan tahun 2020 terus mengalami kenaikan menjadi 35 kasus. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.53 berikut.

Tabel 2.53 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase balita gizi buruk
2016	37	23.468	0,16
2017	31	22.933	0,14
2018	19	22.666	0,08
2019	12	23.050	0,05
2020	35	22.506	0,16

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

i. Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi

Penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kota Pekalongan adalah TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD). Kondisi penyakit menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (2016 - 2020) disajikan dalam Tabel 2.54 berikut.

Tabel 2.54 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (persen)	CFR TB per 100.000 penduduk	CNR TB per 100.000 penduduk	HIV/AIDS	
					HIV	AIDS
2016	15,56	0,00	5,33	193,97	14	14
2017	14,42	4,55	5,9	214,72	32	16
2018	11,24	8,57	4,17	260,67	68	29
2019	18,19	1,75	4,78	249,71	57	40
2020	26,89	7,06	1,27	171,14	118	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

Pandemi *COVID-19* yang melanda secara global termasuk Kota Pekalongan sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini sangat berpengaruh pada seluruh sektor kehidupan baik sektor kesehatan, sosial maupun ekonomi. Sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Indonesia terus mengalami peningkatan tajam dalam jumlah *COVID-19* kasus di berbagai provinsi dan kabupaten dalam beberapa bulan terakhir. Penyebaran virus *COVID-19* juga terjadi di Kota Pekalongan. Data penderita *COVID-19* bersifat fluktuatif yang mengalami perubahan setiap hari.

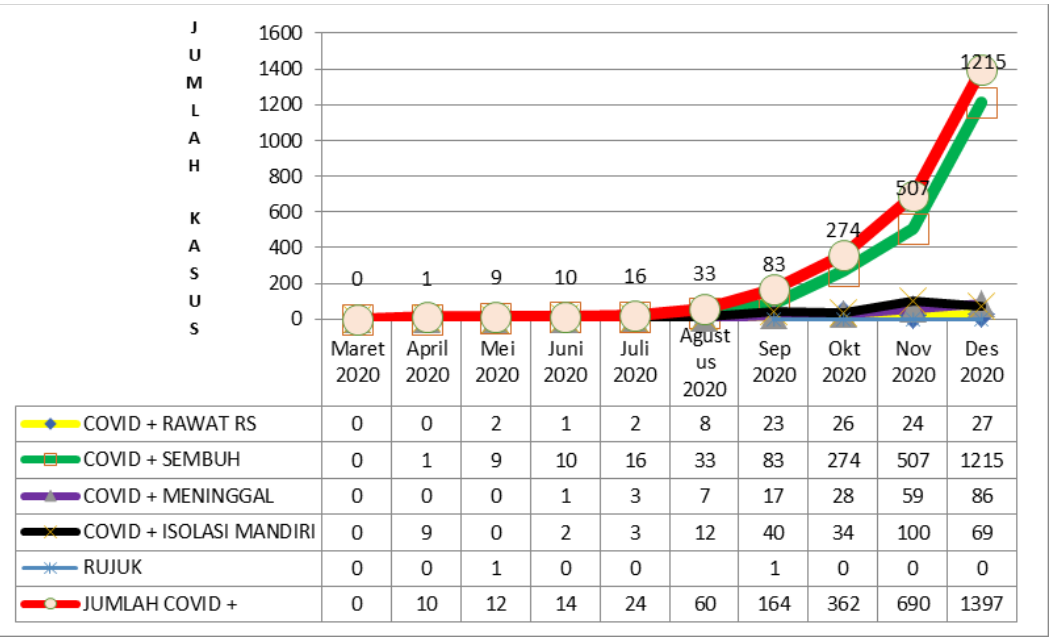

	Maret 2020	April 2020	Mei 2020	Juni 2020	Juli 2020	Agustus 2020	Sep 2020	Okt 2020	Nov 2020	Des 2020
COVID + RAWAT RS	0	0	2	1	2	8	23	26	24	27
COVID + SEMBUH	0	1	9	10	16	33	83	274	507	1215
COVID + MENINGGAL	0	0	0	1	3	7	17	28	59	86
COVID + ISOLASI MANDIRI	0	9	0	2	3	12	40	34	100	69
RUJUK	0	0	1	0	0		1	0	0	0
JUMLAH COVID +	0	10	12	14	24	60	164	362	690	1397

Gambar 2.35 Perkembangan Persebaran *COVID-19* di Kota Pekalongan Bulan Maret-Desember 2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan (diolah), 2021

Secara umum Pandemi *COVID-19* di Kota Pekalongan naik secara signifikan. Persebaran kasus *COVID-19* mulai terkonfirmasi pada bulan April 2020 sejumlah 10 kasus. Terhitung sampai bulan Desember 2020 ada 1.397 kasus jumlah orang yang sudah terjangkit *COVID-19*. Tercatat sampai akhir tahun 2020 terdapat 27 dirawat RS, 1.215 kasus sudah sembuh, 86 kasus meninggal, dan isolasi mandiri 69 kasus.

i. Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran

Pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan / atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan daya saing Industri Rumah Tangga (IRT) atau yang sering dikenal dengan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang dihasilkan IRTP serta menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen. Upaya Dinas Kesehatan dalam pengawasan Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga adalah dengan rutin melakukan pemeriksaan sampling terhadap produk olahan pangan industry rumah tangga. Secara rinci disajikan dalam Tabel 2.55 berikut.

Tabel 2.55 Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran Tahun 2016 - 2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah sample produk pangan olahan industry rumah tangga yang bebas dari cemaran (mikro biologi, fisika, kimia)	249	105	161	2.008	648
Jumlah sample produk pangan olahan produk rumah tangga yang dilakukan pemeriksaan	270	135	208	2.104	654
Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	92,22	77,78	77,40	95,44	99,08

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

j. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) terdiri dari rumah makan / restoran, jasa boga / catering, penjaja makanan, depot air minum dan kantin. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rangka upaya preventif dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan melakukan pembinaan dan pengawasan Temoat Pengelolaan Makanan untuk menjaga keamanan makanan yang beredar di masyarakat. Data rinci Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat disajikan dalam Tabel 2.56 berikut.

Tabel 2.56 Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat Tahun 2016 - 2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	825	772	770	606	609
Seluruh Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)	869	826	849	658	664
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	94,94	93,46	90,69	92,10	91,72

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

k. Jumlah Penduduk Miskin yang memanfaatkan Jamkesmas dan Jamkesda

Berdasarkan BPS, jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya sampai dengan tahun 2019. Namun kembali melonjak

pada tahun 2020 yaitu sebanyak 22.160 orang. Dan pada kenyataannya penerima BPJS Kesehatan melebihi jumlah penduduk miskin.

Data kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kota Pekalongan tahun 2020 adalah PBI APBN sebanyak 88.685 jiwa dan Jamkesda sebanyak 70.307 jiwa. Secara lengkap data penduduk miskin yang mendapat jaminan kesehatan di Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (tahun 2016 - 2020) disajikan dalam Tabel 2.57 berikut.

Tabel 2.57 Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penerima Jamkesmas	Persentase Penerima Jamkesmas	Jumlah Penerima Jamkesda	Persentase Penerima Jamkesda
2016	299.222	23.650	77.379	25,86	36.060	12,05
2017	301.870	22.510	77.464	25,66	50.621	16,77
2018	304.477	20.520	77.415	25,43	65.946	21,66
2019	307.097	20.268	79.933	26,03	70.931	23,10
2020	307.150	22.160	88.685	28,87	70.307	22,89

Sumber : BPS, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

I. Indeks Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari Agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program ini didukung oleh program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama Pembangunan Kesehatan yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015.

Program Indonesia Sehat dilakukan melalui pendekatan keluarga, yang ditujukan untuk pencapaian keluarga sehat dengan indikator Indeks Keluarga Sehat. Ada 12 Indikator Keluarga Sehat Menurut Kemenkes RI, yaitu :

1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif;
5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih;
12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan Program Percepatan Indikator Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Dari hasil pendataan tersebut menunjukkan bahwa hingga Bulan Maret 2019

pendataan PIS-PK dinilai masih rendah. Dari jumlah 97.594 jumlah KK hanya 59.593 KK yang telah dilakukan pendataan PIS-PK atau sekitar 61 persen. Dari jumlah 59.593 KK yang didata, angka IKS baru mencapai 0,16 persen. Sedangkan angka ideal IKS yaitu 0,8 persen dari jumlah data.

m. Rumah Tangga Sehat

Rumah Tangga Sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangga, terdiri dari persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI Eksklusif, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari serta tidak merokok di dalam rumah. Penerapan 10 indikator PHBS di tingkat rumah tangga sangat tergantung dengan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Sebab upaya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat akan menunjang pola perilaku kehidupan rakyat yang sehat secara berkelanjutan.

Cakupan rumah tangga sehat di Kota Pekalongan tahun 2017 dan 2018 meningkat cukup signifikan. Dari target 75,20 persen di tahun 2017, terealisasi 83,51 persen, dan target 75,40 persen di tahun 2018, terealisasi 96,34 persen, namun pada tahun 2019 menurun 94, 60 persen dan meningkat kembali ditahun 2020 dengan realisasi 96,78 persen. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.58 berikut.

Tabel 2.58 Cakupan Rumah Tangga Sehat di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Cakupan Rumah Tangga Sehat (persen)
2016	92,66
2017	83,51
2018	96,34
2019	94,60
2020	96,78

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pembangunan prasarana kota meliputi jalan dan jembatan, irigasi dan drainase, pengendalian banjir serta penataan ruang.

a. Jalan

Jalan raya di Kota Pekalongan terbagi menjadi dua kategori berdasarkan kewenangan. Jalan raya milik Pemerintah Pusat dan jalan milik Pemerintah Kota. Kurun waktu 2016-2020, kondisi jalan di Kota Pekalongan mengalami perubahan. Perubahan panjang jalan Negara terjadi mulai tahun 2017, dimana sebelumnya 10,37 Km berkurang menjadi 9,090 Km. Pada tahun 2018, 2019 dan 2020 kembali bertambah menjadi 9,420 Km dengan kondisi baik 67,40 persen, kondisi sedang 20,16 persen dan kondisi rusak 12,42 persen.

Tabel 2.59 Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2016–2020

Tahun	Jalan Negara						
	Panjang Jalan Negara (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (persen)
2016	10,73	10,73	0	0	100	0	0
2017	9,090	8,585	0,505	0	94,44	5,56	0
2018	9,420	7,250	2,170	0	76,96	23,03	0
2019	9,420	3,433	4,359	1,642	36,49	46,32	17,45
2020	9,420	6,350	1,900	1,170	67,40	20,16	12,42

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2019, DPUPR Kota Pekalongan, 2021

Sedangkan untuk jalan kota, dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami perubahan seiring bertambahnya panjang jalan yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi maupun penambahan ruas jalan kota. Pada tahun 2016 panjang jalan kota semula 140,49 km berubah menjadi 153,41 km. Jalan dalam kondisi baik perkotaan dibawah kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2020 sepanjang 104,71 km. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.60 berikut.

Tabel 2.60 Kondisi Jaringan Jalan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jalan Kota						
	Panjang Jalan Kota (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (persen)
2016	140,49	108,29	12,92	19,27	77,08	9,20	13,72
2017	153,41	92,64	22,11	38,66	60,39	14,41	25,20
2018	153,41	96,04	21,97	35,41	62,60	14,32	23,08
2019	153,41	110,23	12,15	29,35	71,85	7,92	20,22
2020	153,41	104,71	18,27	30,43	68,25	11,90	19,83

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2021

b. Irigasi

Rasio jaringan irigasi di Kota Pekalongan pada tahun 2016-2020 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 26,58 persen. Kondisi ini menggambarkan penggunaan lahan yang hanya sedikit merubah fungsi lahan dikarenakan pemerintah berupaya mempertahankan penggunaan lahan sepanjang lima tahun. Adapun data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.61.

Tabel 2.61 Rasio Jaringan Irigasi di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Jaringan Irigasi (persen)	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2021

Senada dengan rasio jaringan irigasi, luas irigasi yang tercatat dalam kondisi baik juga tidak mengalami perubahan dalam tiga tahun (tahun 2016 sampai dengan tahun 2018). Pada tahun 2018 luas irigasi dalam kondisi baik tercatat 76,43 persen, tahun 2019 menurun menjadi 70,43 persen dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 66,14 persen, sebagimana disajikan dalam Tabel 2.62 berikut.

Tabel 2.62 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Luas irigasi kota dalam kondisi baik (persen)	76,43	76,43	76,43	70,43	66,14

Sumber : Profil DPUPR Kota Pekalongan, 2021

Pantauan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan selama periode 2016-2020, pemanfaatan sempadan sungai sebagai kegiatan atau aktifitas ekonomi maupun tempat tinggal tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 25 persen berkurang dari tahun 2014 sebesar 40 persen. Hal ini dilakukan dengan membongkar bangunan tidak berizin di sempadan sungai. Aktifitas pembongkaran atas bangunan liar dilakukan terutama di Kecamatan Pekalongan Utara. Perkembangan kondisi sempadan sungai yang dipakai bangunan liar disajikan dalam Tabel 2.63 berikut.

Tabel 2.63 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (persen)	25	25	25	25	25

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2021

c. Drainase

Selain saluran irigasi, yang setiap tahunnya menjadi perhatian pemerintah adalah saluran drainase. Total panjang saluran drainase di Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2020 sepanjang 31.715 meter, terdiri dari saluran drainase primer dan sekunder. Sistem drainase primer di Kota Pekalongan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut :

1) Kawasan Barat (3 buah), meliputi Kali Bremi, Kali Kranding, dan Kali Pekalongan
2) Kawasan Tengah (2 buah), meliputi Kali Sibulanan, Kali Banger Lama
3) Kawasan Timur (6 buah), meliputi Kali Banger, Kali Susukan, Kali Cempayan, Kali Sitotok, Kali Selorejo dan Kali Gabus

Sedangkan Sub sistem drainase terdiri dari 8 buah yaitu Sub sistem Bremi, Sub sistem Bandengan, Sub sistem Pabean, Sub sistem Loji, Sub sistem Banger Lama, Sub sistem Sibulanan, Sub sistem Banger Hilir, Sub sistem Banger Hulu.

Saluran Drainase Sekunder, selain sungai, di Kota Pekalongan terdapat beberapa jaringan saluran irigasi maupun pembuangan, antara lain sebagai berikut : Saluran Sekunder Grabyak, Saluran Sekunder Baros, Saluran Sekunder Larangan, Saluran Sekunder Asem Binatur dan Saluran Sekunder Podo Timur. Secara keseluruhan, terdapat 53 saluran drainase yang terletak di jalan utama Kota dengan konstruksi batu belah dan saluran tanah, jenis saluran terbuka, tertutup dan gorong-gorong, dengan kondisi baik sepanjang 15.287 meter, kondisi rusak sepanjang 7.534 meter dan kondisi sebagian rusak sepanjang 8.894 meter.

Tabel 2.64 Data Saluran Drainase di Wilayah Kota PekalonganTahun 2020

FUNGSI	KONDISI			Jumlah (meter)
	Baik (meter)	Sebagian Rusak (meter)	Rusak (meter)	
Sekunder	7.317	6.284	5.838	19.439
Primer	7.970	2.610	1.696	12.276
Total	15.287	8.894	7.534	31.715

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2021

d. Pengendalian Banjir

Secara topografis, Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian lahan antara 0 meter di atas permukaan laut (dpl) pada wilayah bagian Utara dan 6 meter dpl pada wilayah bagian Selatan. Ditinjau dari kemiringan lahan, kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan lahan rata – rata antara 0 – 5 persen. Kondisi ini secara topografis akan menyulitkan pengaturan Saluran Drainase, karena persentase kemiringan lahan relatif kecil. Akibatnya di beberapa kawasan Kota Pekalongan sering mengalami gangguan genangan banjir, sementara di sisi Utara wilayah Kota Pekalongan, yang berbatasan dengan kawasan pesisir pantai mengalami bencana rob dengan frekuensi dan luasan genangan yang meningkat. Data genangan Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.65 berikut.

Tabel 2.65 Genangan Banjir dan Rob di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Luas Wilayah Kota Pekalongan (Ha)	Luas Genangan (Ha)	Persentase
2016	4.525	1.870	41,33
2017	4.525	1.396	30,85
2018	4.525	1.391	30,75
2019	4.525	1.057	23,35
2020	4.525	1.730	38,23

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2021

Beberapa hal yang mengakibatkan rawan genangan banjir dan rob adalah sebagai berikut :

- Ketinggian Wilayah hanya 0-6 meter di atas permukaan air laut
- Persentase Kemiringan Lahan relatif kecil 0-5 persen
- Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai utara laut jawa

- Berkurangnya kawasan tangkapan air (*catchment area*) karena semakin tingginya kepadatan bangunan sehingga air aliran permukaan akibat hujan (*run off*) yang semakin membesar juga
- Pendangkalan Sungai di wilayah Hilir

Sabuk pantai berupa tanggul-tanggul *revetment* yang telah dibangun juga tidak kuat menahan gelombang air laut. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan berbagai upaya, khususnya untuk mengurangi dampak bencana abrasi. Upaya tersebut antara lain adalah penguatan revetmen pantai yang telah selesai pada tahun 2015 yaitu sepanjang bibir pantai sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.66 berikut.

Tabel 2.66 Pembangunan Revetment di Kota Pekalongan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Revetment (meter)	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
Panjang Bibir pantai (meter)	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150

Sumber : Profil DPUPR Kota Pekalongan, 2021

Khusus terkait bencana rob yang melanda sebagian besar wilayah utara dan barat Kota Pekalongan, saat ini sedang dimulai pembangunan tanggul rob oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Meskipun berdampak sangat positif bagi pengurangan genangan akibat rob, namun keberadaan tanggul ini akan menyisakan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, antara lain :

1. Operasional dan pemeliharaan tanggul, baik untuk operasional pompa ataupun pemeliharaan tanggul itu sendiri.
2. Pembangunan kembali saluran – saluran drainase yang akan terkoneksi dengan *long storage* sebelah selatan tanggul.
3. Perencanaan penggunaan lahan di sebelah selatan tanggul yang kemungkinan akan menjadi kering dan dapat diperuntukkan bagi pembangunan permukiman ataupun pertanian.
4. Penataan kawasan di sebelah utara tanggul, baik untuk drainase dan irigasi tambak ataupun untuk konservasi guna mencegah berkurangnya luas wilayah sebagai akibat hilangnya daratan karena tingginya air laut.
5. Penanganan kawasan di sisi timur Jl. Kunti Utara ataupun sebelah selatan Jl. Samudra. Kawasan ini dapat terancam oleh limpasan air rob karena masih rendahnya Jl. Kunti Utara ataupun parapet pantai di sisi utara sepanjang Jl. Samudra.

e. Penataan Ruang

Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius yaitu: pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang yaitu: manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak (*stakeholder*) secara terpadu dan berdayaguna serta serasi. Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Terkait dengan penataan ruang, Kota Pekalongan telah menyusun Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009–2029. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah terwujudnya kota jasa, industri dan perdagangan batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera. Berdasarkan tujuan penataan ruang tersebut maka kebijakan penataan ruang wilayah yang dilakukan meliputi :

a) Peningkatan peran kota sebagai PKW;
b) Peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota di pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota dan atau dengan pusat pelayanan lingkungan;
c) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana kota;
d) Pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
e) Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan, serta menjamin keamanan dengan memantapkan fungsi pertahanan-keamanan;
f) Pengembangan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan (Kawasan Minapolitan) dan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa terutama untuk industri dan perdagangan batik;
g) Pengembangan KSK untuk kepentingan sosial budaya yang dapat memberdayakan potensi tradisi sosial budaya masyarakat pesisir yang relijius dan mendayagunakan peninggalan sejarah di kota; dan
h) Pengembangan KSK untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan di kota.

Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kota Pekalongan, ada beberapa rencana pola ruang yang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam, kawasan pariwisata. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk dalam kerangka pengendalian pemanfaatan ruang masing-masing pemanfaatan ruang agar tetap sinkron serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, di Kota Pekalongan dibutuhkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hingga tahun 2014 jumlah RDTR yang telah disusun mencapai sebanyak 4 dokumen, yaitu RDTR 4 kecamatan. Rancangan RDTR tersebut telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Pekalongan namun belum dapat ditetapkan menjadi Perda karena belum mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri.

Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase tersedianya luasan RTH publik (persen)	18,40	18,40	18,60	18,60	18,60
2.	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan (persen)	0,2	0,3	0,16	0,17	0,17
3.	Ketaatan terhadap RTRW (persen)	95	96	98	98	98

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2021

Persentase tersedianya luasan RTH publik relatif tidak terlalu banyak perubahan yaitu sekitar 18,6 persen dari total luas wilayah. Rasio bangunan ber-IMB menunjukkan nilai fluktuatif sepanjang tahun 2016-2020 dari 0,2 pada tahun 2016 menjadi 0,17 pada tahun 2020. Ketaatan terhadap RTRW menunjukkan angka yang cenderung meningkat sepanjang 2016-2020. Ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2016 sebesar 95 persen. Namun secara kinerja pada akhir tahun 2018, 2019 dan 2020 membaik menjadi 98 persen.

Selanjutnya untuk kesesuaian pemanfaatan ruang disajikan dalam Tabel 2.68 berikut.

Tabel 2.68 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW

No.	Pola Ruang	Luas Pemanfaatan Ruang sesuai Perda 30/2011 (Ha)	Tidak Sesuai Peruntukan	Sesuai Peruntukan
A	**Kawasan Lindung**			
1.	Jalur Hijau Sepanjang Pantai	39,31	1,07	38,24
2.	Jalur Hijau Sepanjang Sungai	153,95	48,16	105,79
3.	TPU	32,07	1,56	30,50
4.	Taman Kota	28,17	4,54	23,64
B	**Kawasan Budidaya**			
1.	Perkantoran Pemerintah	7,34	0,67	6,66
2.	Perkantoran Swasta	5,51	0	5,51
3.	Peruntukan Industri	103,30	0	103,30
4.	Peruntukan Pariwisata	42,68	17,17	25,51
5.	Perdagangan dan jasa	538,08		538,08
6.	Perikanan Tangkap	82,03	4,55	77,48
7.	Perikanan Budidaya	277,54	11,20	266,34
8.	Pertanian	1116,31	54,41	1061,90
9.	Perumahan Kepadatan Rendah	1033,31	17,26	1016,05
10.	Perumahan Kepadatan Sedang	1020,29	15,55	1004,74
11.	Perumahan Kepadatan Tinggi	8,26	0	8,26
12.	RTNH	37,14	2,15	34,99
	Luas Total (Ha)	**4525,28**	**178,29**	**4346,99**
	Persentase (%)		**3,94**	**96,06**

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah layak huni, salah satu

ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Salah satu indikator pelayanan pada sub urusan perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni. Pada tahun 2016 jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) berdasarkan SPM sebesar 8,68 persen, setara dengan 6.448 unit rumah. Tahun 2016-2020 rasio rumah tidak layak huni semakin menurun, artinya kondisi ini semakin membaik. Pada tahun 2016 sebesar 8,68 persen menjadi 2,57 persen pada tahun 2020. Perkembangan rumah tidak layak huni dan rumah layak huni di Kota Pekalongan pada tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2.69 berikut.

Tabel 2.69 Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Tidak Layak Huni		Rumah Layak Huni	
		Jumlah (unit)	Rasio (persen)	Jumlah (unit)	Rasio (persen)
2016	74.313	6.448	8,68	67.865	91,32
2017	74.970	5.159	6,88	69.811	93,12
2018	75.618	3.428	4,53	72.190	95,47
2019	76.269	2.369	3,11	73.900	96,89
2020	76.603	1.966	2,57	74.637	97,43

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2021

Selain data tentang rumah tidak layak huni dan rumah layak huni, pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman juga perlu mempertimbangkan kebutuhan rumah di Kota Pekalongan. secara lengkap, kebutuhan rumah (*backlog*) disajikan dalam Tabel 2.70 berikut.

Tabel 2.70 Data Kebutuhan Rumah (*Backlog*) di Kota Pekalongan Tahun 2020

Kecamatan	*Backlog* Kepemilikan	*Backlog* Penghunian
Pekalongan Barat	7.271	6.513
Pekalongan Timur	5.281	4.813
Pekalongan Utara	6.267	5.849
Pekalongan Selatan	4.020	3.825

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2021

b. Air Minum

Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman di Kota Pekalongan pada tahun 2016 sebesar 85,89 persen dari jumlah penduduk Kota Pekalongan. Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman terus bertambah dalam tiga tahun terakhir dimana pada akhir tahun 2020 mencapai 88,79 persen dari jumlah penduduk Kota Pekalongan.

Tabel 2.71 Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Bersih (jiwa)	257.002	255.724	265.430	272.090	272.718
Jumlah Penduduk (jiwa)	299.222	301.870	304.477	307.097	307.150
Persentase Penduduk yang Terlayani Air Bersih	85,89	84,71	87,18	88,60	88,79

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan (diolah), 2021

Sementara itu berdasarkan KLHS RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Nilai Daya Dukung Air Kota Pekalongan Tahun 2020 sebesar 0,81 yang berarti daya dukung airnya berada dalam kategori Daya Dukung Air Terlampaui atau Buruk. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk dan jumlah pekerja industri. Sedangkan di sisi lain tidak ada peningkatan jumlah ketersediaan air. Pemanfaatan sumber daya air permukaan (dari air hujan) belum optimal karena masih terbatasnya sarana penampungan sumber daya air (embung, polder, dan bendung) untuk keperluan air baku. Kemungkinan terjadi ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat pencemaran dari kegiatan permukiman maupun industri di perkotaan. Selain itu kemungkinan ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat dari intrusi air laut/payau. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterbatasan sumber daya air di kawasan perkotaan, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan wilayah sekitar (daerah hulu) dalam pemenuhan air bersih terutama untuk air minum.

c. Pengguna Listrik

Pelanggan listrik di Kota Pekalongan dari tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan. Persentase pengguna listrik terus meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 sebesar 112,86 persen, dan angka tersebut terus meningkat menjadi 121,44 persen pada tahun 2019. Namun persentase pengguna listrik menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 113,07 persen. Persentase pengguna listrik yang mencapai di atas 100 persen disebabkan adanya rumah tangga yang memiliki sambungan listrik lebih dari 1 sambungan listrik.

Tabel 2.72 Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Pelanggan	Jumlah RT	Persentase Pengguna Listrik
2016	83.868	74.313	112,86
2017	86.740	74.970	115,70
2018	89.686	75.618	118,60
2019	92.622	76.269	121,44
2020	95.313	84.296	113,07

Sumber : BPS Kota Pekalongan (diolah), 2021

d. Penduduk Bersanitasi

Sanitasi merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan sedemikian rupa sehingga munculnya penyakit dapat dihindari. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanitasi adalah suatu usaha pengendalian faktor-faktor lingkungan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit dan penularannya yang disebabkan oleh faktor lingkungan tersebut, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat optimal.

Perkembangan penduduk bersanitasi di Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam Tabel 2.73 berikut.

Tabel 2.73 Penduduk Bersanitasi di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Bersanitasi (jiwa)	276.810	284.029	297.839	305.009	304.969

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk (jiwa)	299.222	301.870	304.477	307.097	307.150
Rasio Penduduk Bersanitasi (persen)	92,51	94,09	97,82	99,32	99,29

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2021

Cakupan pelayanan sanitasi di Kota Pekalongan terus membaik. Pada tahun 2016 cakupan pelayanan sebesar 92,51 persen dan pada tahun 2020 mencakup 99,29 persen.

e. Kawasan Permukiman Kumuh

Persentase kawasan permukiman kumuh yang dimaksud dalam indikator ini adalah perbandingan antara sisa kawasan kumuh berdasarkan luas kawasan kumuh dalam SK Wali Kota Pekalongan Tahun 2014 (yang kemudian diverifikasi oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2017) dibandingkan dengan luas kota Pekalongan.

Berdasarkan penetapan SK Wali Kota Tahun 2014 dan verifikasi di Tahun 2017, Luas kawasan kumuh adalah sebesar 195,59 hektar. Sejak tahun 2017, Pemerintah Kota Pekalongan melalui berbagai program dan kegiatan telah menangani kekumuhan pada kawasan tersebut. Luas kawasan yang tertangani sampai dengan Tahun 2020 telah mencapai 185,89 hektar.

Merujuk data tersebut, maka sisa luasan kawasan kumuh pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 9,7 hektar. Berikut rincian penanganan kawasan kumuh sejak tahun 2017-2020.

Tabel 2.74 Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2020

No	Nama Kelurahan	Luas Kumuh (persen)	Luas Pengurangan Kumuh (persen)				Total Penanganan Sd 2020 (persen)	Sisa Kumuh Sd 2020 (persen)
			2017	2018	2019	2020		
1	Padukuhan Kraton	30,84	9,95	10,83	5,31	3,93	30,02	0,82
2	Bandengan	23,92	3,32	15,28	2,95	0	21,55	2,37
3	Panjang Baru	40,85	6,27	20,78	11,08	0,52	38,65	2,20
4	Panjang Wetan	13,85	5,52	6,06	1,84	0,28	13,70	0,15
5	Krapyak	11,90	7,55	3,32	0,63	0	11,50	0,40
6	Kandang Panjang	28,22	5,53	18,99	0,56	3,14	28,22	0,00
7	Tirto	3,70	0,47	0,24	2,06	0	2,77	0,93
8	Poncol	9,21	3,05	4,29	1,67	0	9,01	0,20
9	Pasirkratonkramat	22,46	2,83	17,25	0,00	0	20,08	2,38
10	Banyurip	6,78	0,80	5,73	0,00	0	6,53	0,25
11	Klego	2,89	0,29	2,60	0,00	0	2,89	0,00
12	Degayu	0,17	0,00	0,17	0,00	0	0,17	0,00
13	Jenggot	0,80	0,00	0,80	0,00	0	0,80	0,00
	Total	**195,59**	**45,58**	**106,34**	**26,10**	**7,87**	**185,89**	**9,70**

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2021

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Kamtramtibum

Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, salah satunya, ditentukan dengan ketersediaan Polisi Pamong Praja. Selama kurun waktu 2016-2020 rasio Polisi Pamong Praja (PNS) di Kota Pekalongan sempat mengalami fluktuasi yaitu penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2016 dengan rasio sebesar 0,77 atau 23 personel untuk setiap 10.000 penduduk dan mengalami penurunan rasio menjadi 0,76 atau 23 personel untuk setiap 10.000 penduduk pada tahun 2017. Pada tahun 2018 meningkat cukup tajam untuk rasio menjadi 1,31 atau 40 personel untuk setiap 10.000 penduduk dan mengalami penurunan rasio pada tahun 2019 sebesar 0,91 atau 28 personel dan mengalami penurunan rasio kembali di tahun 2020 sebesar 0,88 atau 27 personel untuk setiap 10.000 penduduk.

Bantuan Polisi PP (Banpol Non PNS) sangat membantu peningkatan rasio Polisi PP. Pada tahun 2016 untuk ratio sebesar 3,44 atau 103 personil untuk setiap 10.000 penduduk. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 4,17 atau 126 personil, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3,58 atau 109 personil setiap 10.000 penduduk dikarenakan penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2019 rasio mengalami penurunan kembali menjadi 3,45 atau 106 personil dan pada tahun 2020 rasio mengalami kenaikan menjadi 3,91 atau 120 personil setiap 10.000 penduduk.

Bantuan Polisi PP (Non PNS) sangat membantu peningkatan rasio Polisi PP. Dengan adanya Bantuan Polisi PP (Non PNS), rasio Polisi PP meningkat dari 4,21 per 10.000 penduduk pada tahun 2016 menjadi 4,94 per 10.000 penduduk pada tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlahnya masih sama dengan tahun 2017 yaitu 149 personil. Tetapi rasionya menurun menjadi 4,89 per 10.000 penduduk dikarenakan penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2019 rasio mengalami penurunan menjadi 4,36 personel per 10.000 penduduk dan pada tahun 2020 rasionya mengalami kenaikan menjadi 4,79 personel per 10.000 penduduk.

Berikut adalah tabel rasio jumlah Satpol PP, Banpol dan pelanggaran Perda dalam kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.75 Rasio Jumlah Polisi PP (PNS) dan Jumlah Polisi PP (Banpol Non PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Polisi PP (PNS)	Persentase Jumlah Polisi PP (PNS)	Jumlah Polisi (Banpol Non PNS)	Persentase Jumlah Polisi (Banpol Non PNS)	Jumlah Polisi PP (PNS dan Banpol Non PNS)	Persentase Jumlah Polisi (PNS dan Banpol Non PNS)	Jumlah Penduduk
2016	23	0,77	103	3,44	126	4,21	299.222
2017	23	0,76	126	4,17	149	4,94	301.870
2018	40	1,31	109	3,58	149	4,89	304.477
2019	28	0,91	106	3,45	134	4,36	307.097
2020	27	0,88	120	3,91	147	4,79	307.150

Sumber : Satpol PP Kota Pekalongan, 2021

Pelanggaran Peraturan Daerah dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung naik. Pada tahun 2016 pelanggaran Perda sebanyak 1.337 kasus, dan pada tahun 2017 melonjak menjadi 2.003 kasus. Namun sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah pelanggaran Perda dapat ditekan menjadi 1.382

kasus dan pada tahun 2020 terjadi lonjakan jumlah pelanggar Perda sebanyak 1.782 kasus. Meskipun demikian, Satpol PP Kota Pekalongan terus berusaha melakukan penyelesaian atas pelanggaran Perda yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan persentase penyelesaian atas pelanggaran Perda yang berada diatas 90 persen mulai tahun 2016 sampai dengan 2020.

Tabel 2.76 Penyelesaian Pelanggaran Perda di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase
2016	1.337	1.217	91,02
2017	2.003	1.883	94,01
2018	1.552	1.475	95,04
2019	1.382	1.363	98,63
2020	1.782	1.759	98,71

Sumber : Satpol PP Kota Pekalongan, 2021

b. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos Siskamling. Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk (Ton Inti) menunjukkan rasio yang fluktuatif, dimana rasio pada tahun 2016 adalah 48,36 atau 1.447 personil dan pada tahun 2020 turun menjadi 47,27 atau 1.452 personil.

Untuk jumlah Linmas Kecamatan dan Kelurahan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016 dengan rasio sebesar 1,04 atau 31 personil. Kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan rasio sebesar 1,14 atau 35 personil per 10.000 penduduk.

Tabel 2.77 Rasio Jumlah Linmas (Ton Inti) dan Linmas (Kecamatan dan Kelurahan) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Linmas (Ton Inti)	Rasio	Jumlah Penduduk	Jumlah Linmas (Kec. dan Kel.)	Rasio
2016	1.447	48,36	299.222	31	1,04
2017	1.533	50,78	301.870	35	1,16
2018	1.417	46,54	304.477	35	1,15
2019	1.708	55,62	307.097	35	1,14
2020	1.452	47,27	307.150	35	1,14

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2021, 2021

Sementara itu jumlah pos siskamling bisa dikatakan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 berjumlah 432 pos siskamling, meningkat menjadi 514 pada tahun 2017 dan 2018. Namun pada tahun 2019 dan 2020 berkurang menjadi 441 pos.

Tabel 2.75 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jml Pos Siskamling	Jml Kelurahan	Rasio
2016	432	27	16
2017	514	27	19
2018	514	27	19
2019	441	27	16
2020	441	27	16

Sumber : Satpol PP Kota Pekalongan, 2021

6. Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi.

a. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya dikaitkan dengan panti asuhan. Kepemilikan panti ini dapat oleh pemerintah daerah maupun swasta. Jumlah Panti Asuhan pada tahun 2020 adalah 20 panti, bertambah 12 Panti dibandingkan tahun 2019. Namun untuk jumlah anak yang diasuh juga lebih banyak dibandingkan tahun 2019. Secara lengkap jumlah Panti Asuhan dan jumlah anak yang diasuh selama 5 tahun terakhir (2016-2020) disajikan dalam Tabel 2.78 berikut.

Tabel 2.78 Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Panti Asuhan	Jumlah Anak yang Diasuh
2016	9	260
2017	7	237
2018	7	545
2019	8	354
2020	20	1.052

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2021

b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Pada tahun 2020 jumlah PMKS adalah 27.499 jiwa, dengan jumlah tertinggi adalah fakir miskin sebesar 22.683 jiwa. Data selengkapnya selama 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020) disajikan dalam Tabel 2.79 berikut.

Tabel 2.79 Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Generasi Muda Penyandang Masalah Kesra	-	-	-	-	-
Keluarga Penyandang Sosial Psikologi	-	-	-	-	-
Anak Terlantar/Gelandangan	254	105	12	3	-
Usia Lanjut/Jompo/Terlantar	942	337	21	164	145
Wanita Rawan Sosial	865	361	827	-	8
Keluarga yang Kondisi/ Perumahan, Lingkungan Tidak Layak	4.545	-	-	-	-
Anak Nakal	51	69	50	-	98
Korban Penyalahgunaan Narkoba	74	67	6	2	-
Penyandang Cacat :	966	1.142	343	535	1.354
- Tubuh	297	316	110	357	234
- Netra	170	174	58	103	107
- Mental	328	449	132	-	429
- Ganda	30	56	12	-	484
- Wicara	141	147	31	75	100
Bekas Penyandang Penyakit Kronis	-	542	-	-	-
Gelandangan	-	16	-	-	3
Tuna Susila	-	-	-	-	-
Waria	-	-	-	-	-
Bekas Narapidana	-	87	30	3	1
Bencana Alam	-	-	2.623	-	3107
Fakir Miskin	115.796	75.839	63.829	24.116	22.683
Jumlah	124.459	79.707	67.741	24.823	27.499

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2021

Penanganan PMKS di Kota Pekalongan juga melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Jumlah partisipasi masyarakat dalam bentuk organisasi/yayasan sampai dengan tahun 2020 untuk organisasi sosial berjumlah 20 organisasi, karang taruna berjumlah 32 organisasi, WKKS sebanyak 5 orang dan jumlah PSM sebanyak 63 orang. Selanjutnya disajikan dalam Tabel 2.80 berikut.

Tabel 2.80 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Perintis / Pejuang Kemerdekaan	0	0	9	6	0
Wanita Kader Kepemimpinan Sosial	87	87	5	5	5
Pekerja Sosial Masyarakat	288	288	88	53	63
Karang Taruna	27	32	91	32	32
Organisasi Sosial	8	7	7	9	20

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2021

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh program-program yang tepat inovatif, tetapi juga harus didukung dengan kriteria kemiskinan yang jelas, serta data yang akurat dan *up to date*. Untuk mendapatkan

data yang *up to date* tersebut, perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala sesuai dengan jenis programnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementrian Sosial dengan didukung oleh Pemerintah Daerah mendapatkan mandat untuk merumuskan kebijakan tentang verifikasi, validasi data dan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berbasis teknologi informasi melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan *Social Next Generation* (SIKS-NG). Selanjutnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diverifikasi dan divalidasi tersebut ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat dipergunakan dalam menjalankan program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini memuat informasi status sosial ekonomi rumah tangga 40 persen terendah, keluarga dan individu yang meliputi data demografi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepemilikan aset dan kepesertaan program bantuan sosial/subsidi.

Berikut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pekalongan selama Tahun 2019-2020.

Tabel 2.81 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan DTKS di Kota Pekalongan Tahun 2019-2020

Tahun	Rumah Tangga Sasaran	Anggota Rumah Tangga Sasaran
2019	29.618	112.613
2020	29.282	108.436

Sumber : Dinas Sosial P2KB Kota Pekalongan, 2021

Dari Tabel 2.81 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan Rumah Tangga Sasaran sebanyak 336 RTS jika dibandingkan dengan tahun 2019 menjadi 29.282 RTS dan penurunan Anggota Rumah Tangga Sasaran dari 112.613 jiwa pada tahun 2019 menjadi 108.436 jiwa pada tahun 2020. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya intervensi penanggulangan kemiskinan yaitu melalui program pengurangan beban pengeluaran, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat, pengembangan keberlanjutan UMKM dan adanya sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan lintas program dan lintas sektor.

Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generations* (SIKS-NG), jumlah rumah tangga miskin di Kota Pekalongan tahun 2019 sebanyak 33.282 rumah tangga, terdiri dari desil 1 sebanyak 20.807 rumah tangga, desil 2 sebanyak 6.246 rumah tangga, desil 3 sebanyak 1.583 rumah tangga, desil 4 sebanyak 1.299 rumah tangga, desil 4+ sebanyak 1.335 rumah tangga, dan tanpa desil sebanyak 2.012 rumah tangga.

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke

atas). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan pada kurun waktu 2016 s.d. 2019 menunjukkan kecenderungan peningkatan, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 157.260 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.82 berikut.

Tabel 2.82 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)
1	2016	149.507	67,47
2	2017	157.445	69,28
3	2018	161.502	70,21
4	2019	168.339	72,32
5	2020	157.260	66,45

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2021, 2021

Pada tahun 2016 sampai tahun 2019 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekalongan cenderung meningkat dari 67,47 persen di tahun 2016 menjadi 72,32 persen di tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunnan menjadi 66,45 persen. Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2019 tercatat sekitar 236.675 orang. Persentase angkatan kerja menurun dari 72,32 persen menjadi 66,45 persen atau turun 5,87 poin pada tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa rasio jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 tahun ke atas) menurun.

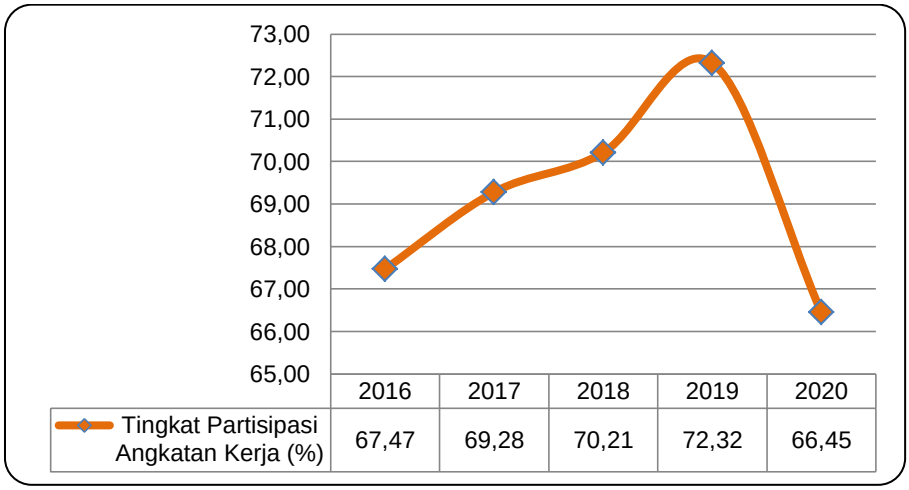

Gambar 2.36 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : jateng.bps.go.id, 2021

b. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Sepanjang lima tahun terakhir mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja tergolong tidak banyak, masih di bawah 30 (tiga puluh) kasus dari sekitar 300 perusahaan. Meskipun jumlah dan persentase sengketa masih berfluktuasi untuk itu persengketaan ini harus tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.83 berikut.

Tabel 2.83 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Sengketa	Jumlah Perusahaan	Persentase Sengketa
2016	11	368	2,99
2017	13	382	3,40
2018	13	365	3,60
2019	11	369	2,98
2020	28	484	5,79

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2021

c. Pencari Kerja yang Ditempatkan (Persentase)

Secara umum, kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana pada tahun 2020 sebesar 66,45 persen. Pencari kerja ada yang ditempatkan melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Sepanjang lima tahun terakhir jumlah AKL dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dan berakhir tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019, begitu juga dengan AKAD dan AKAN memiliki nilai yang berfluktuasi. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.84 berikut.

Tabel 2.84 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Pencari Kerja Yang Ditempatkan		
	Antar Kerja Lokal (AKL)	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
2016	58	3	20
2017	104	33	200
2018	180	21	103
2019	184	4	111
2020	3	0	24

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2021

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan angka persentase jumlah penganggur pada usia kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan tahun 2020 sebesar 7,02 persen atau meningkat 1,25 poin dari tahun 2019, artinya, pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 7 orang yang benar-benar menganggur.

Nilai TPT mengalami kenaikan yang disebabkan terjadinya pandemi *COVID-19* menyebabkan banyak tempat usaha gulung tikar. Sedangkan faktor yang menyebabkan TPT tidak bisa turun signifikan antara lain beberapa musibah seperti kebakaran pasar Banjarsari dan bencana banjir rob yang menggenangi

wilayah industri di Kota Pekalongan yang berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

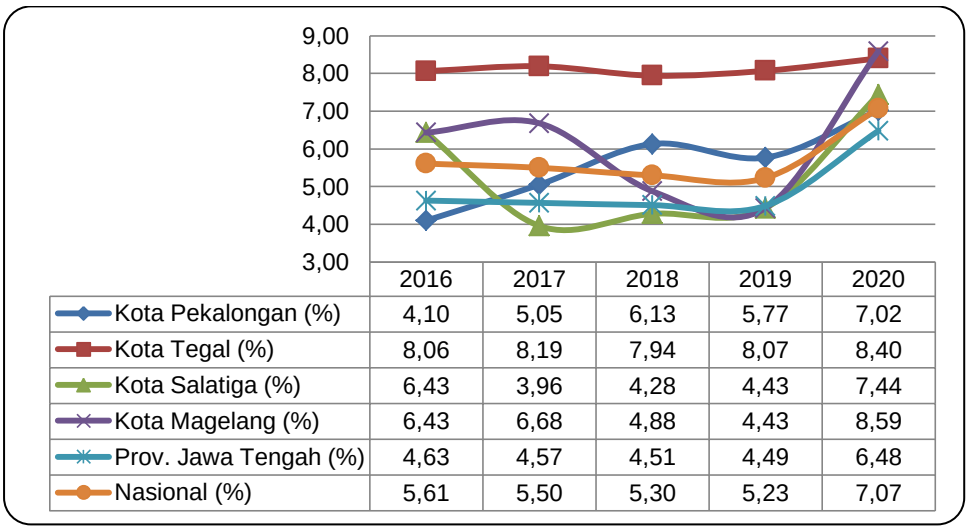

Gambar 2.37 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber : www.bps.go.id (diolah), 2021

Pada tahun 2016, TPT Kota Pekalongan memiliki nilai dibawah TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tetapi pada tahun 2017 melonjak melampaui TPT Provinsi Jawa Tengah bahkan pada tahun 2020 melampaui TPT Jawa Tengah dan Nasional. Artinya, jumlah pengangguran di Kota Pekalongan semakin meningkat. Jika dibandingkan dengan Kota Tegal, TPT Kota Pekalongan masih berada di bawahnya, tetapi lebih tinggi dari Kota Salatiga dan Kota Magelang.

e. Keselamatan dan Perlindungan

Sebagai salah satu alat kepentingan pegawai dan perusahaan, penerapan K3 di lingkungan perusahaan menciptakan budaya kerja dan keselamatan bagi tercapainya kenyamanan bekerja. Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2020 terjadi peningkatan penerapan K3 perusahaan di Kota Pekalongan, mulai dari 300 perusahaan di tahun 2016 hingga meningkat menjadi 410 perusahaan yang menerapkan K3 di tahun 2018, namun sangat menurun di tahun 2019 menjadi 319 perusahaan dan 360 perusahaan di tahun 2020. Jika dilihat dari sisi persentase akan terlihat fluktuatif dan puncaknya pada tahun 2017 sebesar 96,86 persen. Fluktuasi ini dikarenakan jumlah perusahaan yang juga fluktuatif. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.85 berikut.

Tabel 2.85 Persentase Perusahaan Menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Perusahaan Menerapkan K3	Jumlah Perusahaan di Wilayah Kab/kota	Persentase
2016	300	368	81,52
2017	370	382	96,86
2018	410	425	96,47
2019	319	376	84,84
2020	360	416	86,54

Sumber : Diperinaker Kota Pekalongan, 2021

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah

Indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah indikator yang diukur dengan membandingkan jumlah ASN perempuan Pemerintah Kota Pekalongan tahun N dengan seluruh pekerja perempuan (ASN perempuan dan pekerja perempuan di perusahaan formal) Tahun N. Tahun 2019 ASN perempuan di Pemerintah Kota Pekalongan sejumlah 1.616 orang, sedangkan jumlah pekerja perempuan sebanyak 66.690 orang.

Tabel 2.86 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (org)	2.007	1.621	1.540	2.322	1.616
Jumlah pekerja perempuan (org)	56.536	9.799	9.870	45.571	66.690
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (persen)	3,55	16,54	15,60	5,10	2,42

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2021, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah berkurang, semula 2.322 orang pada tahun 2019 menjadi 1.616 orang pada tahun 2020.

b. Partisipasi Perempuan dalam Jabatan Struktural ASN

Partisipasi perempuan dalam jabatan eselon II, III, dan IV di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2016-2020 terus menurun. Pada tahun 2016 pejabat perempuan yang menduduki eselon II, III dan IV dibandingkan seluruh jabatan yang terisi sebesar 208 orang. Jumlah tersebut terus menurun sampai pada jumlah 193 orang di tahun 2020. Data selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.38 berikut.

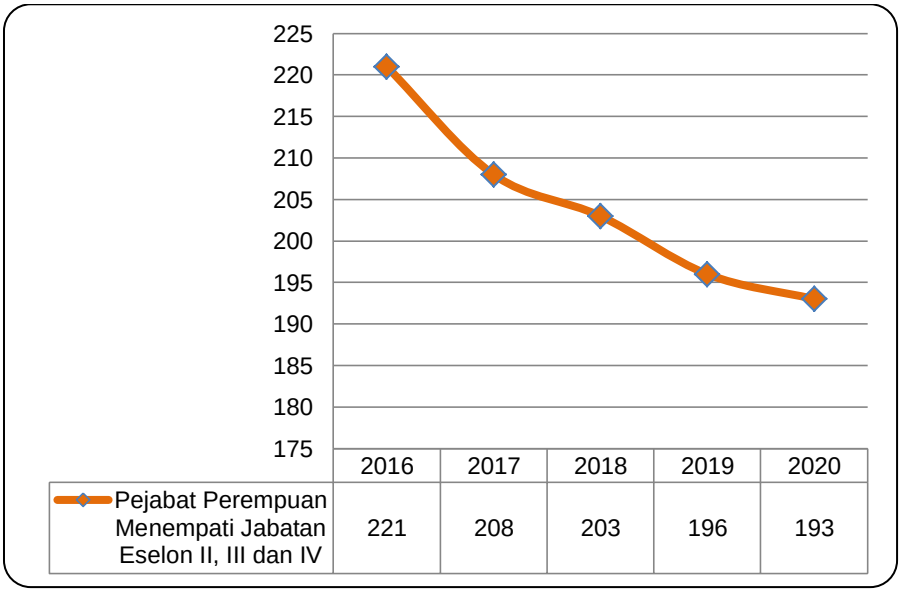

Gambar 2.38 Jumlah Perempuan Dalam Jabatan ASN di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021 (diolah), 2021

c. Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Rasio KDRT menunjukkan persentase kasus KDRT dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Selama kurun waktu 2016-2020 rasio KDRT mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Semakin kecil rasio KRDT menunjukan indikasi yang semakin baik. Rasio KDRT terendah terjadi pada tahun 2019 dengan angka rasio 0,031 persen.

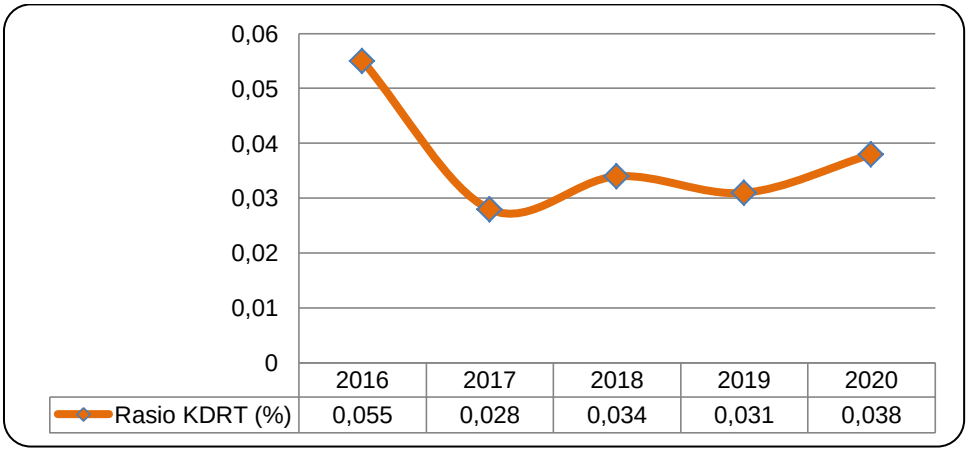

Gambar 2.39 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2021

d. Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Pekalongan telah menunjukkan prestasi yang baik. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 seluruh kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dapat diselesaikan. Salah satu faktor keberhasilan atas prestasi tersebut dikarenakan adanya Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA).

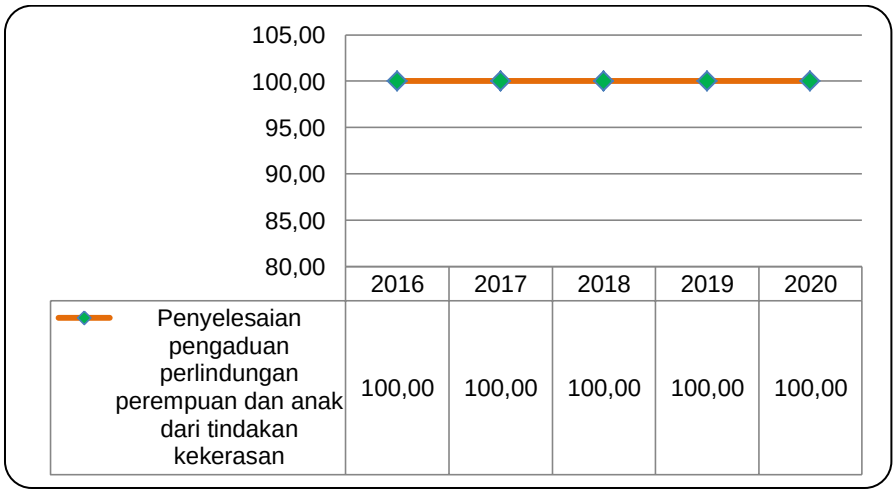

Gambar 2.40 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2021

e. Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) didefnisikan sebagai Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Ada 24 indikator yang mampu mewakili terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat dikatakan menuju kabupaten/kota layak anak yang terdiri dari 5 kluster, yaitu : (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif/pengganti; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; (5) perlindungan khusus.

Pada tahun 2018, Kota Pekalongan meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Pratama dengan nilai 565 dari nilai maksimal 1000. Upaya terus ditingkatkan, salah satunya adalah fokus pada sarana dan prasarana mengenai informasi layak anak seperti baliho, dan sebagainya. Upaya lain juga dilakukan untuk memenuhi indikator dan klaster KLA. Hasilnya, pada tahun 2019 Kota Pekalongan kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Madya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan berupaya serius untuk mengejar peringkat Nindya sebagai Kota Layak Anak (KLA) tingkat nasional. Komitmen ini dibuktikan dengan dibukanya layanan Unit Pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (UP PKSAI) yang akan bertugas melakukan penjangkauan kepada anak-anak rentan di Kota Pekalongan. Dengan berdirinya UP PKSAI ini diharapkan dapat semakin memudahkan pemerintah membangun mekanisme layanan terpadu bagi anak di tingkat masyarakat.

3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu : (a) ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) Konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; serta (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Tabel 2.87 Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Ketersediaan Pangan Utama Per tahun	Jumlah Penduduk	Persentase
2016	6.855.003	299.222	22,91
2017	7.382.286	301.870	24,46
2018	5.860.781	304.477	19,25
2019	5.400.416	307.097	17,59
2020	4.769.190	307.150	15,53

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2021

Ketersediaan pangan pada satu wilayah ditunjukkan dengan rasio ketersediaan pangan utama. Pada Tabel 2.87 dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2016-2017 ketersediaan pangan utama mengalami kecenderungan naik, dari 6.855.003 di tahun 2016 menjadi 7.382.286 di tahun 2017. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi 5.860.781 dan pada tahun 2019 dan 2020 lebih

menurun lagi menjadi 5.400.416 dan 4.769.190. Secara otomatis persentase ketersediaan pangan juga sebanding dengan fluktuasi ketersediaan pangan, yaitu meningkat pada tahun 2016-2017 dan semakin menurun pada tahun 2018-2020.

Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa (Depkes RI, 2005). Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Kota Pekalongan dari aspek konsumsi.

Skor PPH selama lima tahun terakhir terus membaik. Skor PPH Kota Pekalongan menunjukkan perkembangan yang semakin membaik pada tahun 2016-2020. Jika skor PPH tahun 2016 sebesar 88,70 maka pada tahun 2020 semakin naik menjadi 92,01. Capaian skor PPH disajikan dalam Tabel 2.88 berikut.

Tabel 2.88 Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Skor PPH Kota Pekalongan
2016	88,70
2017	89,71
2018	90,42
2019	91,31
2020	92,01

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, menunjukkan bahwa konsumsi beras di Kota Pekalongan menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2020 sebesar 108,7 kg per kapita/tahun. Begitu pula dengan sayur dan buah bisa dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan kelompok pangan lainnya, yaitu 82,2 kg per kapita/tahun pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 70,0 kg per kapita/tahun pada tahun 2020. Di urutan ketiga ditempati kelompok pangan hewani (45 kg/kapita/tahun tahun 2019) dan menurun menjadi 36,8 kg perkapita/tahun pada tahun 2020, selanjutnya diikuti dengan kacang-kacangan, umbi-umbian dan kelompok pangan lainnya. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.89 berikut.

Tabel 2.89 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Padi-padian	Kg/Kap/th	101,5	107,0	98,8	102,0	108,7
Umbi-umbian	Kg/Kap/th	16,0	16,5	16,5	18,8	7,9
Pangan Hewani	Kg/Kap/th	38,3	40,2	47,0	45,0	36,8
Minyak dan Lemak	Kg/Kap/th	17,2	12,2	11,8	5,7	6,6
Buah/biji berminyak	Kg/Kap/th	3,5	2,6	2,8	2,3	0,8
Kacang-kacangan	Kg/Kap/th	13,8	19,0	18,0	23,5	8,4
Gula	Kg/Kap/th	9,5	10,0	9,5	5,9	7,7
Sayur & Buah	Kg/Kap/th	78,4	74,1	73,8	82,2	70,0
lain-lain	Kg/Kap/th	2,8	1,3	1,4	2,3	44,1

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2021

Dari segi konsumsi energi yang diukur dari kilo kalori (kkal) per kapita/tahun, konsumsi beras selalu menempati posisi pertama dengan jumlah 1.006,1 kkal/kapita/tahun pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 1.251,5 kkal/kapita/tahun pada tahun 2020. Urutan berikutnya selalu berubah jenis kelompok pangannya. Pada tahun 2020, di urutan kedua ada pangan hewani sebesar 272,5 kkal/kapita/tahun, diikuti oleh minyak dan lemak sebanyak 160,7 kkal/kapita/tahun. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.90 berikut.

Tabel 2.90 Konsumsi Energi Per Kapita/tahun di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Padi-padian	Kkal/Kg/Kap/th	1.000,8	1.055,0	974,9	1.006,1	1251,5
Umbi-umbian	Kkal/Kg/Kap/th	48,0	49,5	49,6	56,3	24,7
Pangan Hewani	Kkal/Kg/Kap/th	217,2	228,1	266,7	255,4	272,5
Minyak dan Lemak	Kkal/Kg/Kap/th	410,7	289,8	280,1	136,8	160,7
Buah/biji berminyak	Kkal/Kg/Kap/th	60,2	45,3	49,1	40,6	12,7
Kacang-kacangan	Kkal/Kg/Kap/th	124,9	172,1	163,4	213,2	53,8
Gula	Kkal/Kg/Kap/th	94,9	99,8	94,7	58,7	77,5
Sayur dan Buah	Kkal/Kg/Kap/th	111,4	105,3	104,9	116,8	97,3
Lain-lain	Kkal/Kg/Kap/th	22,6	10,3	11,1	18,5	56,1

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2021

4. Pertanahan

Dalam era otonomi daerah saat ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 9 urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota. Kesembilan urusan tersebut adalah Izin Lokasi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pelayanan Umum, Sengketa Tanah Garapan, Ganti Rugi, Penetapan Subyek Obyek Redistribusi tanah, tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan kabupaten/kota hanya meliputi 8 sub urusan yaitu izin lokasi; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; tanah ulayat; tanah kosong; izin membuka tanah; serta penggunaan tanah.

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Perkembangan kepemilikan sertifikat tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Secara lengkap tanah bersertifikat di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.91 berikut.

Tabel 2.91 Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Luas wilayah	4.525	4.525	4.525	4.525	4.642
Luas tanah bersertifikat	3.690,93	3.778,43	4.013,28	4.157,29	4.239,50
Hak Milik	2.939,78	3.013,55	3.192,36	3.320,74	3.360,02
HGB	289,49	293,52	305,94	13,21	322,95
Hak Guna Usaha	5,76	6,76	6,76	6,76	6,76
Hak Pakai	394,95	403,04	444,70	451,53	481,01
Hak Pengelolaan	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
Hak Wakaf	56.96	58,57	60,5396	62,06	63,76
Lahan Bersertifikat (persen)	77,96	79,94	88,69	91,87	91,33

Sumber : BPN Kota Pekalongan (diolah), 2021

Kinerja persertifikatan bidang tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 luas lahan bersertifikat adalah 77,96 persen, dalam kurun waktu tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, semakin meningkatnya persentase tersebut dapat juga menandakan kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat, khususnya terhadap pertanahan. namun pada tahun 2020 jumlah lahan di Kota Pekalongan yang sudah bersertifikat menurun sebanyak 91,33 persen dikarenakan adanya koreksi total luas lahan Kota Pekalongan.

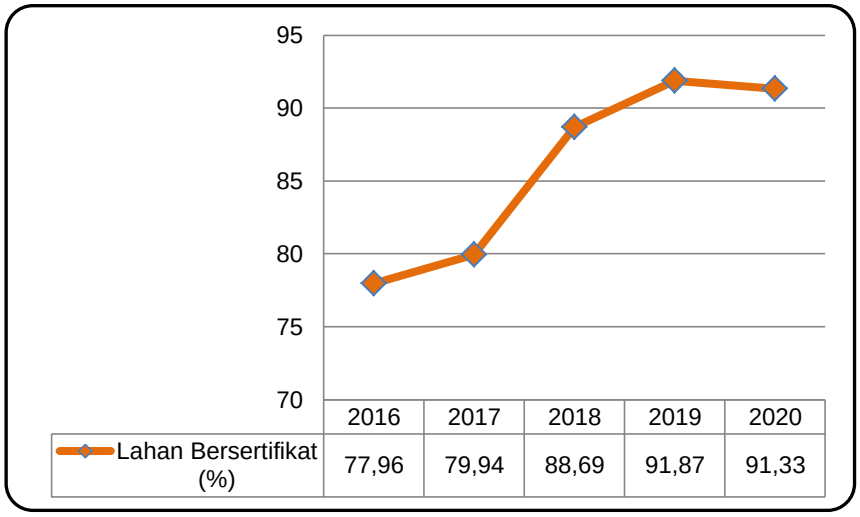

Gambar 2.41 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : BPN Kota Pekalongan (diolah), 2021

5. Lingkungan Hidup

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) merupakan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

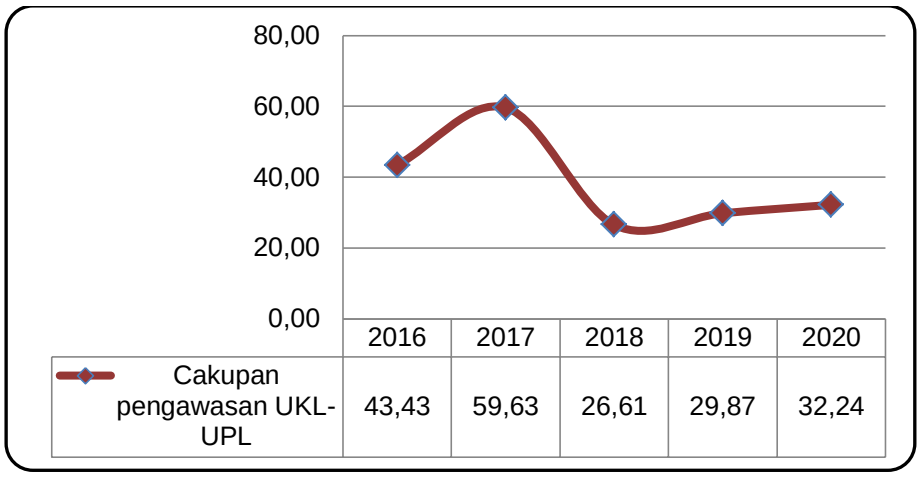

Gambar 2.42 Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2016 – 2020

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2021

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL menunjukkan persentase perusahaan wajib UKL dan UPL yang diawasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib UKL dan UPL. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UPL dan UKL mengalami pasang surut sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.42.

Pada tahun 2016 cakupan pengawasan terhadap UKL-UPL sebesar 43,43 persen. Pada akhir tahun 2017, pengawasan UPL-UKL mengalami kenaikan menjadi 59,63 persen. pada tahun 2018 dan 2019 terus mengalami penurunan masing-masing menjadi 26,61 persen dan 29,87 persen. Dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sebesar 32,24 persen.

Peningkatan jumlah pemilik dokumen lingkungan (UKL/UPL dan amdal) seiring dengan peningkatan jumlah usaha di Kota Pekalongan. Peningkatan ini juga didorong oleh perijinan usaha yang mempersyaratkan disusunnya dokumen pengelolaan lingkungan baik berupa UKL/UPL maupun amdal bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL dan amdal) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tingkat pelaporan monitoring UKL/UPL dan amdal juga cenderung meningkat, hal ini menunjukkan naiknya tingkat kesadaran pengusaha dalam pengelolaan lingkungan. Perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan kesadaran pelaporan diantaranya dengan melakukan pengawasan dan pemberian insentif /disinsentif bagi usaha dan/atau kegiatan yang menaati tertib hukum lingkungan. Persentase tertib hukum lingkungan di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.91 berikut.

Tabel 2.92 Persentase Tertib Hukum Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Usaha yang melaporkan UKL-UPL/AMDAL	4	5	6	8	12
Jumlah UKL-UPL/AMDAL	99	109	124	154	158
Persentase Tertib Hukum Lingkungan	4,04	4,59	4,84	5,19	7,59

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2021

Sebagai salah satu kota pantai dan penghasil batik, Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Komitmen itu antara lain dengan membangun instalasi IPAL baik untuk kebutuhan industri batik, industri tempe maupun industri peternakan. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan industri rumah tangga. Industri yang semakin bertumbuh dari tahun 2016-2020 diikuti dengan volume pengelolaan limbah yang semakin baik.

Tabel 2.93 Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

IPAL	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)
Kauman	29	100	26	100	29	120	20	150	20	125
Jenggot	75	400	75	400	102	700	80	700	80	600
Industri Kecil	83	425	83	426	83	426	83	426	73	426
IPAL Bersama	3	500	3	500	3	500	3	500	2	700
Industri Besar	5	700	5	700	5	700	5	900	3	500
IPAL Biogas Duwet	125	160	28	90	125	120	125	120	30	70
IPAL Biogas Ternak	7	210	7	210	7	210	7	75	-	-
IPAL Pringrejo	-	-	-	-	70	180	20	50	25	60
IPAL Banyurip	-	-	-	-	-	-	69	150	55	125
JUMLAH	327	2.495	227	2.426	424	2.956	412	3.071	288	2.606

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2021

Cakupan pelayanan persampahan merupakan persentase wilayah yang terlayani persampahan dibandingkan dengan luas wilayah Kota Pekalongan. Cakupan pelayanan persampahan Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung turun seperti disajikan dalam Gambar 2.43.

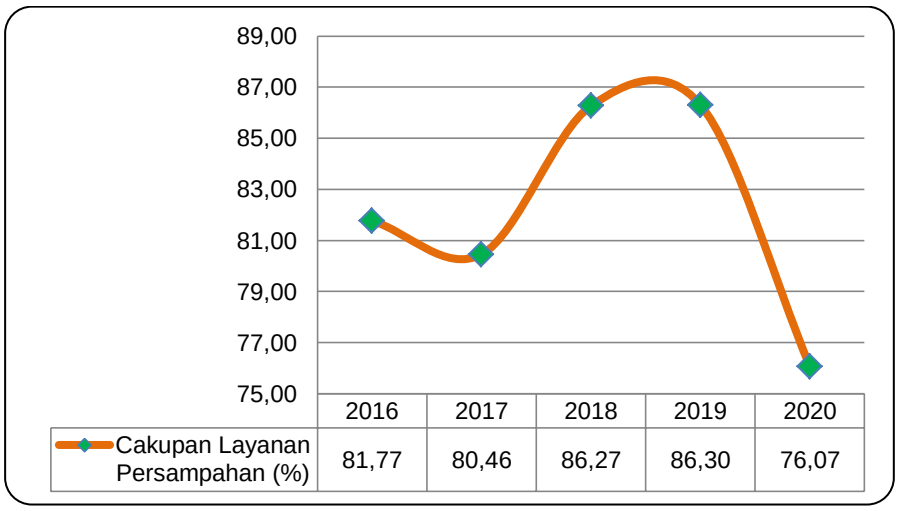

Gambar 2.43 Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2021

Jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2016 - 2020 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk selama tahun 2016-2020. Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R selama tahun 2016-2020 pengelolaannya setiap hari semakin menurun.

Tabel 2.94 Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Data Sampah per Hari	2016		2017		2018		2019		2020	
	(m^3)	%	(m^3)	%	(m^3)	%	(m^3)	%	(m^3)	%
Sampah terangkut ke TPA	650	82,28	530	79,12	271,87	73,30	353,93	91,72	382,19	92,53
Sampah terkelola di TPS3R, bank sampah dan sodaqoh sampah	140	17,72	140	20,88	99	26,70	31,97	8,28	30,87	7,47
Jml Sampah tertangani (m3)	790	95,40	670	100	370,87	54,48	385,91	86,30	413,06	76,07

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2021

TPA di Kota Pekalongan beroperasi pada tahun 1994. Lokasi TPA tersebut berada di Kelurahan Degayu. Luas TPA tersebut adalah 5,8 Ha dengan desain umur TPA 15 tahun. Pengoperasian TPA Degayu tersebut merupakan control *landfill*. Jarak TPA terhadap permukiman adalah 0,3 km. Adapun jarak TPA terhadap pusat Kota adalah 5 km dan jarak ke badan air terdekat adalah 0,1 km.

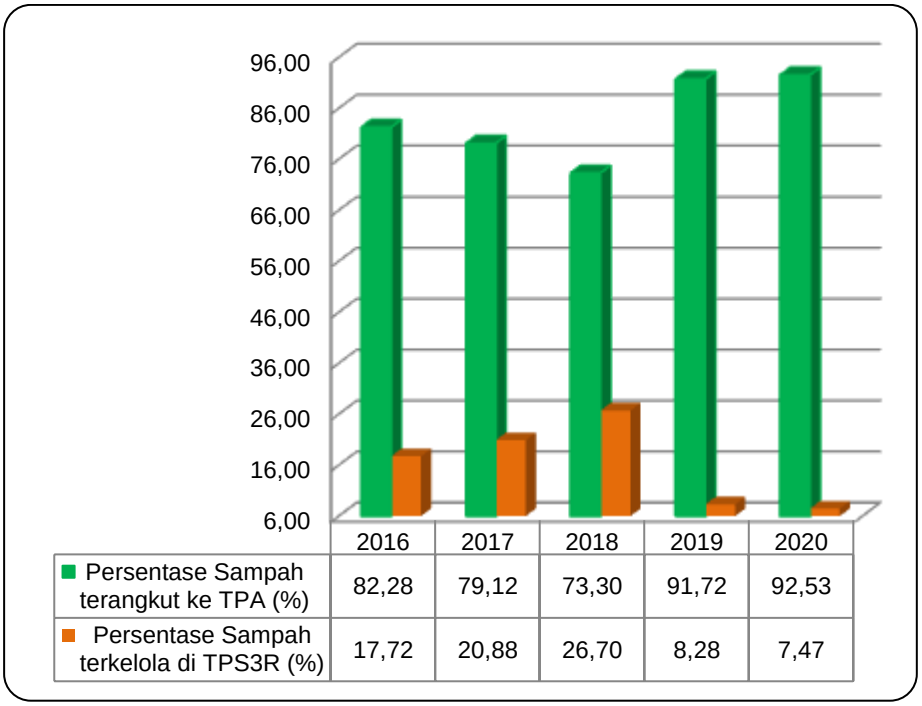

Gambar 2.44 Persentase Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2016–2020 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk selama tahun 2016–2020. Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R, bank sampah dan kegiatan sodaqoh sampah selama tahun 2016–2020 pengelolaannya setiap hari semakin menurun. Hal ini disebabkan menurunnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.

Baik dan buruknya lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan salah satu indikator kinerja dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pekalongan. Dalam melakukan perhitungan IKLH menggunakan

tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL). Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil IKLH Kota Pekalongan pada tahun 2017-2020 yang disajikan dalam Tabel 2.95 berikut.

Tabel 2.95 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2017-2020

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2017	44,67	99,29	23,5	52,59
2018	46,00	98,82	23,5	52,85
2019	46,00	99,05	23,5	52,92
2020	35,33	79,96	23,6	50,84

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2021

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2017-2019 mengalami tren naik 0,165 setiap tahunnya, jika dilihat masing-masing komponen maka IKU merupakan komponen yang berkontribusi baik terhadap IKLH, sementara dua komponen lainnya yaitu IKA dan IKTL nilainya masih sangat rendah. Sedangkan IKLH di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 50,84, kondisi ini dikarenakan terjadinya penurunan pada komposisi IKA dan IKU.

Rendahnya IKA di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa parameter yang melebihi baku mutu air kelas II seperti BOD, COD, DO, dan Fecal Coliform. Parameter tersebut merupakan karakteristik dari limbah cair domestik yang bersumber dari pemukiman berupa grey water yang merupakan hasil dari cucian dapur, cucian pakaian dan kamar mandi, dan sekitar 60-85 persen dari total volume kebutuhan air bersih akan menjadi limbah cair domestik. Karakteristik dari limbah domestik (*grey water*) yaitu mengandung unsur nitrogen, fosfat, dan potasium, unsur tersebut merupakan nutrien bagi tumbuhan yang akan menyebabkan eutrofikasi pada badan air. Tingginya kadar organik dalam perairan akan berdampak pada tingginya konsentrasi BOD, COD dan rendahnya konsentrasi DO. Adanya pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan merupakan salah satu potensi terhadap tingginya pencemaran air di Kota Pekalongan.

Sementara itu Indeks Tutupan Lahan (IKTL) di Kota Pekalongan dari tahun 2017-2019 masih sama dengan nilai IKTL yang sangat kecil. Kondisi ini dikarenakan di wilayah Kota Pekalongan lebih didominasi oleh pemukiman, sedangkan persentase tutupan lahannya masih sangat kurang. Sehingga perlu adanya upaya dalam memperbaiki kondisi tutupan lahan di Kota Pekalongan terutama di kawasan mangrove.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Rasio Penduduk ber KTP

Sebagai salah satu sarana penting identitas nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap penduduk wajib memiliki identitas diri termasuk akta kelahiran dan KTP nasional. Rasio kepemilikan KTP yang dimaksud adalah jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk di atas usia 17 tahun atau telah menikah.

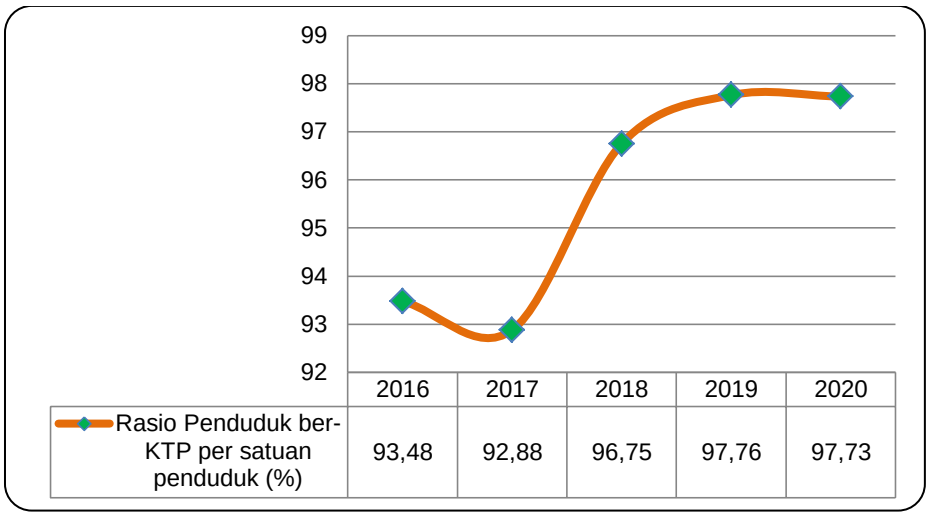

Gambar 2.45 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2021

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga pada tahun 2020 telah melaksanakan perekaman KTP-el mencapai 227.268 jiwa (97,73 persen) dan kepemilikan KTP-el telah mencapai 227.268 jiwa (97,76 persen) dari target wajib KTP-el sebesar 232.540 jiwa.

b. Persentase Penduduk ber-NIK

Sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Dalam lima tahun terakhir (tahun 2016-2020), semua penduduk di Kota Pekalongan telah memiliki NIK sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.96 berikut.

Tabel 2.96 Persentase Penduduk ber-NIK di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Persentase Penduduk ber-NIK
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2021

c. Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran

Sebagai salah satu syarat identitas diri bagi penduduk yang telah dilahirkan, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan akta kelahiran bagi penduduknya. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk ditunjukkan dengan membandingkan jumlah akta kelahiran dan jumlah penduduk dalam seribu penduduk.

Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Kepemilikan akta kelahiran Kota Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Secara lengkap kepemilikan akta kelahiran di Kota Pekalongan tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam Gambar 2.46 berikut.

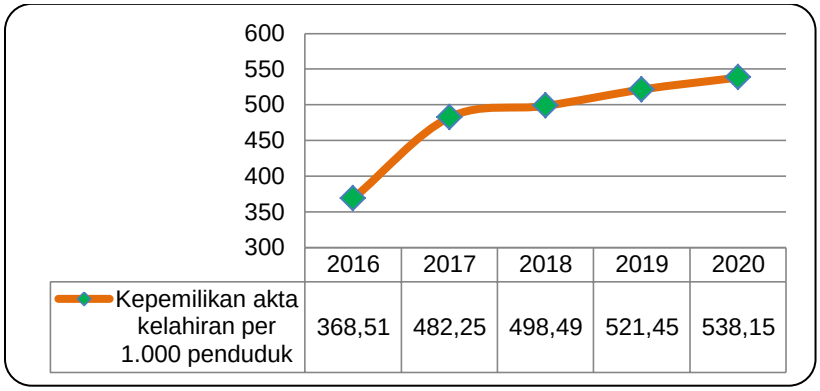

Gambar 2.46 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan (diolah), 2021

d. Penerbitan Akta kematian

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian.

Dalam lima tahun terkahir, penerbitan akta kematian terus meningkat. Pada tahun 2016 telah diterbitkan sebanyak 1.133 akta, pada tahun 2017 diterbitkan sebanyak 1.473 akta. Setiap tahun terus bertambah hingga pada tahun 2020 diterbitkan sebanyak 3.220 akta sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.97 berikut.

Tabel 2.97 Penerbitan Akta Kematian di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Jumlah Akta Kematian
2016	1.133
2017	1.473
2018	2.691
2019	2.797
2020	3.220

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan dalam Angka 2021, 2021

e. Penerbitan Akta Nikah

Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Di Kota Pekalongan, akta nikah hanya diterbitkan bagi penduduk non Islam. Sepanjang lima tahun terakhir, akta nikah yang diterbitkan tidak banyak, sekitar 50-60 lembar per tahunnya.

Tabel 2.98 Penerbitan Akta Nikah di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Jumlah Akta Nikah
2016	62
2017	43
2018	60
2019	46
2020	45

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan dalam Angka 2021, 2021

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Pada tahun 2010 di Kota Pekalongan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Pembentukan lembaga tersebut untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam aspek pelayanan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di kelurahan. LKK meliputi 6 unsur yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK kelurahan, RT/RW, Karang Taruna, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). LPM pada tahun pertama dari periode 2013-2017 sebanyak 47 LPM. Jumlah ini berkurang menjadi 27 LPM pada tahun 2014 sampai sekarang dikarenakan penggabungan kelurahan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Adapun jumlah LPM Kelurahan yang aktif di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.99 berikut.

Tabel 2.99 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah LPM
2016	27
2017	27
2018	27
2019	27
2020	27

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2021

PKK sebagai salah satu penggerak pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya. PKK membantu pemerintah Kota Pekalongan memberdayakan peran ibu-ibu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Jumlah PKK aktif mulai tahun 2016 sebanyak 32 PKK. Hal ini terjadi karena adanya penggabungan kelurahan di Kota Pekalongan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan.

Tabel 2.100 PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah PKK Aktif
2016	32
2017	32
2018	32
2019	32
2020	32

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2021

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu juga berperan dalam membantu lansia untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa tuanya. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat selama kurun waktu Tahun 2016-2020 adalah meningkatkan peran dan fungsi Posyandu sebagai garda terdepan dalam menanggulangi kesehatan masyarakat yang bersifat preventif. Pada tahun 2020 terdapat tambahan 3 Posyandu dari 411 pada tahun 2019 menjadi 414 ditahun 2020. Data posyandu aktif di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.101 berikut.

Tabel 2.101 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Posyandu Aktif
2016	406
2017	407
2018	409
2019	411
2020	414

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan & BPS Kota Pekalongan, 2021

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Kota Pekalongan per 100 pasangan usia subur di Kota Pekalongan dari tahun 2016 - 2017 terus mengalami penurunan. Artinya, jumlah akseptor KB semakin berkurang. Namun pada tahun 2018 hingga 2020 kembali meningkat di diatas 27.000 orang. Perkembangan akseptor KB dari tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2.102 berikut.

Tabel 2.102 Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah PUS	Jumlah Akseptor KB	Rasio
2016	45.805	35.570	77,65
2017	44.965	24.027	53,43
2018	44.851	27.306	60,88
2019	46.652	30.352	65,06
2020	45.836	31.636	69,02

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2021

b. Cakupan Peserta Aktif KB

Cakupan peserta aktif KB menunjukkan persentase jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan subur. Cakupan peserta KB Aktif dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2020 berfluktuatif sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.47 berikut.

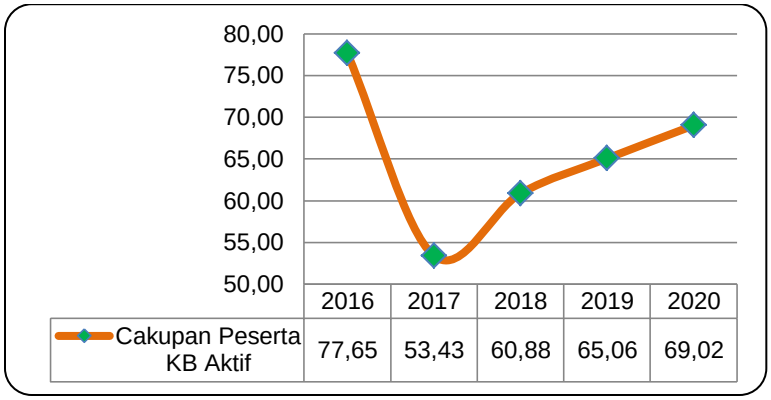

Gambar 2.47 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2021

c. Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Cakupan keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I Kota Pekalongan mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 persentase Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dibandingkan Jumlah Kepala Keluarga adalah 47,70 persen, menurun dari tahun 2019 sebesar 4,29 persen. Perkembangan Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2.103 berikut.

Tabel 2.103 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persentase
1	2016	77.747	55.032	70,78
2	2017	77.575	46.478	59,91
3	2018	77.817	44.487	57,71
4	2019	80.653	41.938	51,99
5	2020	80.840	38.563	47,70

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2021

9. Perhubungan

a. Kepadatan Lalu Lintas

Sebagai kota yang menghubungkan Kota Jakarta dan Kota Surabaya, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur perhubungan. Lokasi yang strategis sebagai tempat istirahat membawa konsekuensi sebagai perlintasan di pantai Utara Pulau Jawa. Perlintasan pantai Utara yang berkembang, membawa konsekuensi semakin berkembangnya moda angkutan darat. Hal ini berdampak pada meningkatnya VC ratio yang semula sebesar 0,87 di tahun 2016, meningkat menjadi 0,88 di tahun 2017. Pada tahun 2018, VC ratio mengalami penurunan menjadi 0,39, dimana salah satu faktor penyebabnya adalah operasional jalan tol trans Jawa. Dengan adanya jalan tol yang pada saat itu masih dalam tahap uji coba dan tidak dikenakan biaya, banyak kendaraan yang lebih memilih menggunakan jalan tol dibandingkan menggunakan jalan kota sehingga VC ratio menurun. Setelah tol trans Jawa secara resmi beroperasi pada tahun 2019 dan dikenakan biaya, sebagian kendaraan yang semula menggunakan jalan tol beralih melewati jalan kota, sehingga VC ratio meningkat menjadi sebesar 0,45.

Pada tahun 2020, pandemi *COVID-19* yang terjadi diseluruh dunia berdampak terhadap hampir semua sendi kehidupan, salah satunya yaitu adanya kebijakan pembatasan mobilitas. Dengan adanya kebijakan ini, arus lalu lintas menurun drastis yang mengakibatkan penurunan VC ratio menjadi 0,36. Meskipun demikian, mobilitas darat tetap dapat dilakukan.

Range nilai VC ratio ditakegorikan ke dalam 6 (enam) tingkat pelayanan jalan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.104 berikut.

Tabel 2.104 Kategori Tingkat Pelayanan Jalan

Tingkat Pelayanan	V/C Rasio
A	0,0 - 0,20
B	0,21 - 0,44
C	0,45 - 0,74
D	0,75 - 0,84
E	0,85 - 1, 00
F	>1, 00

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Dari tabel Tingkat Pelayanan diatas, jalan – jalan yang memiliki tingkat pelayanan A, pada ruas tersebut kendaraan dapat memilih kecepatan yang dikehendaki. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan B, kendaraan dapat memilih kecepatannya namun kecepatan tersebut sedikit terbatas oleh arus lalu lintas. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan C kecepatannya dibatasi oleh arus lalu lintas. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan D arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah, volume lalu lintas mendekati kapasitas ruas jalan yang ada. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan E, kecepatannya rendah volume sudah hampir sama dengan kapasitas yang ada, pada tingkat pelayanan ini ruas jalan bisa dikatan mengalami kemacetan. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan F, arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama.

Peta tingkat pelayanan jalan di Kota Pekalongan disajikan dalam Gambar 2.48 berikut.

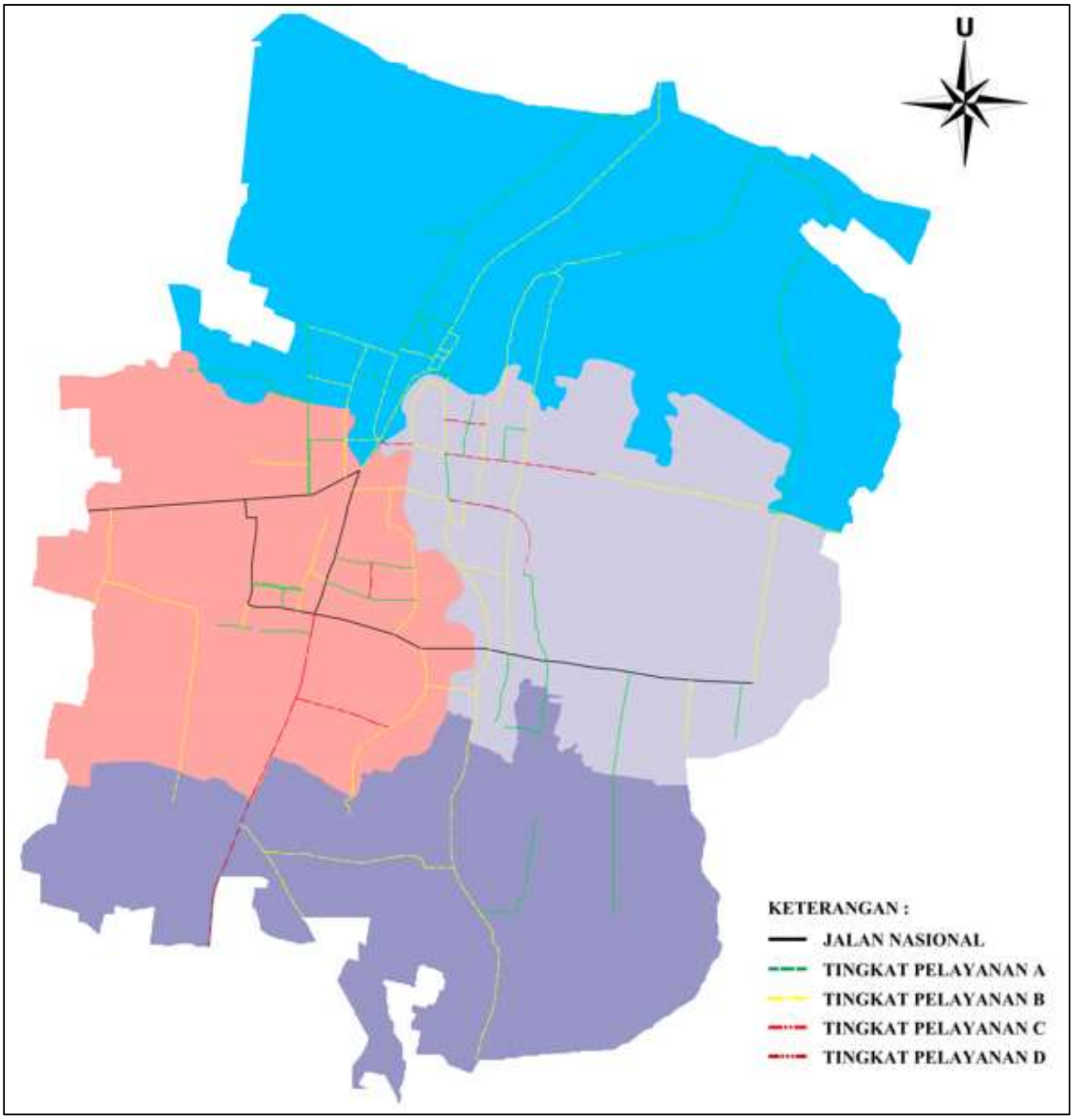

Gambar 2.48 Peta Tingkat Pelayanan Jalan di Kota Pekalongan

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan gambar diatas, kinerja ruas jalan di Kota Pekalongan yang diukur dari tingkat pelayanan disajikan dalam Tabel 2.105 berikut.

Tabel 2.105 Kinerja Ruas Jalan di Kota Pekalongan yang Diukur Dari Tingkat Pelayanan

Tingkat Pelayanan A	Tingkat Pelayanan B	Tingkat Pelayanan C	Tingkat Pelayanan D
Jl. Ahmad Yani	Jl. Angkatan 45	Jl. Bandung	Jl. Dr. Cipto
Jl. Asem Binatur	Jl. Angkatan 66	Jl. Kalimantan	Jl. Gatot Subroto
Jl. Bahagia	Jl. Argopuro	Jl. Karya Bhakti	-

Tingkat Pelayanan A	Tingkat Pelayanan B	Tingkat Pelayanan C	Tingkat Pelayanan D
Jl. Barito	Jl. Belimbing	Jl. Manggis	-
Jl. Cempaka	Jl. Cenderawasih	Jl. Melati	-
Jl. Hasanudin	Jl. Dharma Bhakti	Jl. P. Kemerdekaan	-
Jl. Indragiri	Jl. Diponegoro	Jl. Pintas Sapuro	-
Jl. Interchange Duwet	Jl. Dr. Kusuma Atmaja	Jl. Semarang	-
Jl. Jawa	Jl. Dr. Wahidin	Jl. Seruni	-
Jl. Jeruk	Jl. H. Agus Salim	Jl. Tondano	-
Jl. Kenanga	Jl. Hayam Wuruk	Jl. Urip Sumoharjo	-
Jl. KH. Hasyim Ashari	Jl. HOS Cokroaminoto	-	-
Jl. Ki Hajar Dewantara	Jl. Imam Bonjol	-	-
Jl. Kutilang	Jl. Irian	-	-
Jl. Labuan	Jl. Jetayu	-	-
Jl. Majapahit	Jl. Jlamprang	-	-
Jl. Mataram	Jl. Kemakmuran	-	-
Jl. Merak	Jl. KH. Ahmad Dahlan	-	-
Jl. Otto Iskandar Dinata	Jl. Ki Mangun Sarkoro	-	-
Jl. Pramuka	Jl. Kurinci	-	-
Jl. Raden Saleh	Jl. Letjen Suprapto	-	-
Jl. Samudera Pasai	Jl. Maninjau	-	-
Jl. Sumatera	Jl. Manunggal	-	-
Jl. Surabaya	Jl. Merpati / Parkit	-	-
Jl. Tentara Pelajar	Jl. Nusantara	-	-
Jl. Trikora	Jl. Parang Garuda Raya	-	-
Jl. Tritura	Jl. Patriot	-	-
-	Jl. Pattimura	-	-
-	Jl. Pelita III	-	-
-	Jl. Progo	-	-
-	Jl. R.A Kartini	-	-
-	Jl. Salak	-	-
-	Jl. Sulawesi	-	-
-	Jl. Sultan Agung	-	-
-	Jl. Sunan Ampel	-	-
-	Jl. Supriyadi	-	-
-	Jl. Tembus Hos Cokro -	-	-
-	Jl. Teratai	-	-
-	Jl. Truntum	-	-
-	Jl. Untung Suropati	-	-
-	Jl. Veteran	-	-
-	Jl. Wachid Hasyim	-	-
-	Jl. WR. Supratman	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Hingga saat ini, lalu lintas regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional yang mendominasi adalah kendaraan barang dan penumpang (AKAP maupun AKDP) yang berdimensi besar maupun kendaraan pribadi yang masih memilih melewati jalur jalan nasional dibandingkan jalan tol trans Jawa.

Masih bercampurnya lalu lintas tersebut sangat berimplikasi bagi keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan kota serta tata ruang kota. Dampak yang paling dirasakan adalah keamanan dan kenyamanan warga Kota Pekalongan dalam berlalu lintas karena bercampur dengan lalu lintas regional. Akibat lalu lintas yang bercampur, terutama kendaraan berdimensi besar, sebagian kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa berkembang dengan optimal. Kondisi ini terutama terjadi pada koridor Jl. Jenderal Sudirman yang tidak berkembang. Salah satu sektor andalan Kota Pekalongan adalah perdagangan dan jasa. Dengan terbatasnya luas wilayah serta kawasan perdagangan dan jasa yang terbatas, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki kesulitan dalam pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di lokasi lain. Jika kawasan perdagangan dan jasa tidak bisa berkembang optimal tentunya akan berdampak juga bagi upaya-upaya pengembangan wilayah, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, salah satu upaya sistemik dalam mengatasi bercampurnya lalu lintas regional dan lokal di Kota Pekalongan adalah pembangunan jalan lingkar di Kota Pejalongan. Lebih tepatnya jalan lingkar Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Sesuai dengan Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah, wilayah Petanglong, yang berpusat di Perkotaan Petanglong, merupakan salah satu wilayah Pengembangan di Jawa Tengah. Sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah, perkotaan Petanglong merupakan salah satu kawasan strategis di Jawa Tengah. Jalan lingkar tersebut diharapkan berdampak bagi mengatasi permasalahan kemacetan dan keamanan lalu lintas, kebersihan dan kenyamanan kota, serta yang utama adalah optimalisasi tata ruang, di wilayah Kota Pekalongan khususnya, dan Kawasan Perkotaan Petanglong pada umumnya.

Dalam dimensi yang lain, mencontoh kasus di daerah lain, pembangunan jalan lingkar di Kota Petanglong dan/atau Kawasan Perkotaan Petanglong dapat dilakukan dengan konstruksi yang sekaligus dapat berfungsi sebagai tanggul penahan rob. Jika jalan lingkar tersebut dapat terwujud diharapkan dapat menjadi katalis bagi pengembangan wilayah Kota Pekalongan dan kawasan sekitarnya.

b. Angkutan Umum

Rasio izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan pada tahun 2016 sebesar 0,00028. Hal ini memiliki makna 2,8 izin per 10.000 penduduk. Pada tahun 2017 sebesar 0,00032 mengalami kenaikan atau 3,2 per 10.000 penduduk. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 stagnan di angka 0,00032 atau 3,2 izin per 10.000 penduduk dan di tahun 2020 sedikit menurun di angka 0,00031 atau 3,1 izin per 10.000 penduduk.

Tabel 2.106 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Jumlah penduduk	Rasio
2016	83	299.222	0,00028
2017	97	301.870	0,00032

Tahun	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Jumlah penduduk	Rasio
2018	97	304.477	0,00032
2019	97	307.097	0,00032
2020	95	307.150	0,00031

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta angkutan regional, Kota Pekalongan memiliki 1 (satu) terminal tipe A yaitu Terminal Bus Kota Pekalongan yang berlokasi di Jl. Dr. Sutomo, dimana tahun 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Terminal ini menjadi terminal transit bagi bus yang hendak melanjutkan ke daerah lain maupun menjadi tujuan akhir para penumpang.

Berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat No : SK.687/AJ/DRJD/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur Faktor muat (*Load Factor*) merupakan perbandingan antara kapasitas terjual dan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang dinyatakan dalam persen. Sedangkan standar yang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1993, untuk nilai *Load Factor* antara 70 persen - 110 persen. Jika nilai *Load Factor* lebih dari 110 persen maka penumpang akan merasakan kurang nyaman dalam menggunakan angkutan umum tersebut, jika nilai *Load Factor* kurang dari 70 persen menggambarkan bahwa angkutan umum tersebut kurang optimal dalam melayani pergerakan penumpang. Sedangkan standar nilai *Load Factor* yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. 687 tahun 2002 adalah sebesar 70 persen. Di Kota Pekalongan *Load Factor* angkutan kota yang berkapasitas kurang lebih 12 penumpang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berada dikisaran 30 persen sampai 41 persen. Kurang optimalnya angkutan kota dalam melayani pergerakan penumpang dikarenakan masyarakt sudah beralih menggunakan kendaraan pribadi terlebih lagi adanya angkutan *online*, sehingga load faktor angkutan kota kurang dari 70 persen.

Tabel 2.107 Faktor Muat (*Load Factor*) Angkutan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Faktor Muat (*Load Factor*) (persen)	30	33	35	37	41

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, pembangunan terminal penumpang Tipe C direncanakan akan dibangun secara bertahap mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2029. Adapun lokasi yang akan dibangun terminal penumpang Tipe C berada di Wilayah Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan.

Dari tahun 2017 sampai dengan 2020, jumlah penumpang yang melalui terminal pada tahun 2017 berjumlah 1.912.577 orang dan naik di tahun 2018 menjadi 1.938.614 orang, Pada tahun 2019 turun sebesar 1.876.174 orang dan kembali turun ditahun 2020 menjadi 771.497 orang. Penurunan ini selain karena

banyaknya masyarakat yang memilih bepergian menggunakan kendaraan pribadi, juga adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya pandemi *COVID-19*. Sedangkan otobis AKAP dan AKDP di tahun 2017 berjumlah 377.428 unit dan menurun di tahun 2018 menjadi 339.637 unit. Per tahun 2019, jumlah otobis berjumlah 294.470 unit dan tahun 2020 berjumlah 125.162 unit, sehinga dapat dikatakan bahwa persentase AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan mengalami naik turun, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.108 berikut ini.

Tabel 2.108 Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Otobis AKAP AKDP	600	377.428	339.637	294.470	125.162
Jumlah Penumpang yang melalui terminal	n/a	1.912.577	1.938.614	1.876.174	771.497
Persentase Angkutan Darat	n/a	19,8	17,6	15,7	16,2

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

c. Kendaraan Laik Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. Kendaraan bermotor wajib uji yang selanjutnya disebut kendaraan bermotor adalah kendaraan yang wajib melakukan uji berkala berupa mobil penumpang umum, bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.

Kepemilikan KIR untuk kendaraan umum di Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2020 kembali menurun. Pada tahun 2016, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum sebanyak 743 kendaraan. Tahun 2017 meningkat menjadi 800 kendaraan, namun pada tahun 2018 menurun menjadi 788 kendaraan dan kembali meningkat pada tahun 2019 sebesar 829 kendaraan dan menurun di tahun 2020 sebesar 817 kendaraan.

Tabel 2.109 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum	743	800	788	829	817
Jumlah Kendaraan Wajib Uji yang melakukan Uji Kir	3.785	3.902	4.002	4.166	4.267
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	19,63	20,50	19,69	19,90	19,15

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Kelayakan dalam pengujian kelayakan kendaraan umum penting bagi keselamatan pengemudi dan para penumpang. Agar kelayakan kendaraan umum

dalam berkendaraan ada yang diujikan sehingga kelayakan kendaraan itu baik. Pengujian kendaraan itu antara lain pra uji kendaraan bermotor meliputi pemeriksaan dimensi kendaraan dan kelengkapan kendaraan; uji ketebalan asap (*Smoke Tester*) untuk kendaraan berbahan bakar solar; uji emisi gas buang (Co-Hc) untuk kendaraan berbahan bakar bensin; uji speedometer; pemeriksaan bagian bawah kendaraan dengan *Pit Lift* dan *Play Detector*; uji lampu utama; uji *side slip*; uji *axle load*; untuk kendaraan baru / rubah bentuk dan ganti buku dan uji rem. Selengkapnya mengenai lama uji kelayakan kendaraan umum disajikan dalam Tabel 2.110 berikut.

Tabel 2.110 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Lama Pengujian (Menit)	20	20	30	30	30

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Kota Pekalongan telah memiliki tempat pengujian yang representatif. Terletak di lingkungan Dinas Perhubungan. Sampai saat ini Kota Pekalongan hanya memiliki 1 (satu) tempat pengujian KIR. Adapun biaya pengujian kelayakan angkutan umum selama 2016-2020 tidak ada kenaikan yaitu Rp.40.000.

Tabel 2.111 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Pekalongan 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

d. Perparkiran

Dishub Kota Pekalongan hingga saat ini telah mengelola 424 titik parkir yang tersebar di Kota Pekalongan yang didominasi di Jalan Urip Sumoharjo dimana setiap titik parkir disesuaikan berdasarkan surat tugas oleh juru parkir yang ditunjuk yang difasilitasi dengan perlengkapan seperti rompi petugas, peluit, bendera dan sebagainya. Adapun titik parkir yang berpotensi penarikan retribusi terbesar di Kota Pekalongan yang mampu mendongkrak capaian retribusi parkir diantaranya berada di Jalan Hayam Wuruk, Jalan Hasanudin, Jalan Sultan Agung, Kawasan Sorogenen, serta Alun-Alun yang mampu menyumbang hingga 60 persen. selain mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum (*on street*), Dishub Kota Pekalongan juga melakukan penarikan retribusi parkir *off street* (di luar badan jalan) seperti di Jalan Veteran depan RSUD Kraton dan trayek terminal serta parkir insidentil (biasanya saat digelar sebuah *event* kegiatan). Dalam mencapai target yang ditetapkan, Dishub Kota Pekalongan telah membentuk tim pembinaan dan pengawasan parkir yang terdiri dari unsur Subdenpom, Polres, Kejaksaan, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Data penyelenggaraan parkir di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.112 berikut.

Tabel 2.112 Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin di Kota Pekalongan 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah parkir yang berizin	326	344	361	418	419
Jumlah potensi parkir yang belum berizin	17	15	14	16	15
Jumlah seluruh parkir	343	359	375	434	434
Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin	95,04	95,82	96,27	96,31	96,54

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

e. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas keselamatan lalu lintas ini berguna untuk memastikan keamanan para pengedara maupun para pejalan kaki. Fasilitas yang diperlukan bagi keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail dan marka jalan. Pemenuhan kebutuhan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Kota Pekalongan terakit dengan banyaknya kerusakan fasilitas lalu lintas di lapangan serta banyaknya permintaan dari warga terkait permintaan fasilitas lalu lintas sehingga diperlukan penggantian fasilitas lalu lintas dilaksanakan secara bertahap degan memperhatikan kebutuhan prioritas, kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kasus *COVID-19* yang berdampak pada refocusing anggaran.

Tabel 2.113 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pemasangan Rambu lalu lintas Pada Tahun n	21	95	141	2	33
Jumlah Rambu lalu lintas yang Seharusnya Tersedia	321	300	290	150	100
Persentase Pemasangan Rambu lalu lintas	6,54	31,67	48,62	1,33	33,00
Jumlah Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) Pada Tahun n	0	0	5	0	0
Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) yang Seharusnya Tersedia	20	15	15	10	10
Persentase Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ)	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00
Jumlah Pemasangan Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL) Pada Tahun n	2	1	1	2	0
Jumlah Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang Seharusnya Tersedia	8	6	5	4	2

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pemasangan Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL)	25,00	16,67	20,00	50,00	0,00
Jumlah Pemasangan guardrail Pada Tahun n	0	0	4	0	0
Jumlah guardrail yang Seharusnya Tersedia	14	14	14	10	10
Persentase Pemasangan guardrail	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00
Jumlah Pemasangan marka jalan Pada Tahun n	27 lokasi	20 lokasi	25 lokasi	13 lokasi	12 lokasi
Jumlah marka jalan yang Seharusnya Tersedia	150 ruas jalan	150 ruas jalan	150 ruas jalan	150 ruas jalan	150 ruas jalan
Persentase Pemasangan marka jalan	18,00	13,33	16,67	8,67	8,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

f. Perkeretaapian

Kota Pekalongan memiliki satu stasiun utama. Stasiun Besar Kota Pekalongan terletak di pusat pemerintahan Kota Pekalongan di Kecamatan Pekalongan Barat. Pengguna jasa angkutan darat seperti kereta api, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.114 berfluktuasi dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2019 merupakan jumlah penumpang terbanyak yang menaiki kereta api melalui Stasiun Pekalongan yaitu sejumlah 863.851 penumpang. Perkembangan dari tahun 2016-2019 menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan jasa layanan kereta api, khususnya yang datang maupun pergi dari Kota Pekalongan dan daerah sekitarnya. Namun terjadi penurunan drastis jumlah penumpang yang memanfaatkan jasa layanan kereta api pada tahun 2020 menjadi 271.920 orang, karena pandemi *COVID-19* membuat adanya larangan bepergian ke luar daerah.

Tabel 2.114 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Pekalongan
2016	537.704
2017	585.215
2018	821.085
2019	863.851
2020	271.920

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Kota Pekalongan berada dibawah daerah operasi PT. Kereta Api Indonesia DAOP 4 Semarang. Panjang jalur operasional kereta api DAOP 4 Semarang adalah sepanjang 656 km, dimana jalur kereta sepanjang 6,85 km berada di wilayah Kota Pekalongan, dengan jumlah perlintasan sebindang sebanyak 10 perlintasan.

Tabel 2.115 Jalur Perlintasan Kereta Api di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Rel Kereta Api	6,85 km	6,85 km	6,85 km	6,85 km	6,85 km
Jumlah Perlintasan Rel dengan jalan	10	10	10	10	10
Perlintasan Sebidang	10	10	10	10	10
Perlintasan Tidak Sebidang	-	-	-	-	-
Perlintasan Resmi	9	9	10	10	10
Perlintasan Tidak Resmi	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

g. Keselamatan Lalu Lintas

Angka kecelakaan secara umum menggambarkan kecelakaan total yang terjadi. Di dalam angka kecelakaan terdapat angka kematian yang menggambarkan kecelakaan yang korbannya sampai meninggal dunia. Meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya perkembangan kota, meningkatnya aktivitas masyarakat baik, ekonomi, sosial dan budaya, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya jumlah kendaraan pada sistem lalu lintas jalan tak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Data kecelakaan yang terjadi di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.116 berikut.

Tabel 2.116 Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan	155,44	155,44	155,44	155,44	153,41
Jumlah Kejadian Kecelakaan	121	60	91	122	121
Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun	0,78	0,39	0,59	0,78	0,79

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan tabel diatas frekuensi atau rata-rata kejadian kecelakaan per kilometer di Kota Pekalongan adalah 1 kejadian per tahunnya.

Tabel 2.117 Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Korban Kecelakaan	149	77	116	145	142
Luka-luka	113	54	86	117	134
Meninggal Dunia	36	23	30	28	8
Jumlah Penduduk	299.222	301.870	304.477	307.097	307.150
Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk	12,03	7,62	9,85	9,12	2,60

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

10. Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Aplikasi yang dikembangkan selama ini aplikasi berbasis web. Melalui sistem informasi yang terintegrasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan telah membangun sistem informasi manajemen dalam memajukan pelayanan publik.

Keterbukaan informasi publik Perangkat Daerah menjadi indikator keberhasilan Pemerintah Kota Pekalongan dalam melayani masyarakat. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah di Kota Pekalongan tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.118 berikut.

Tabel 2.118 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pekalongan di Tahun 2020

Peringkat	Badan Publik	Skor	Keterangan
1	BAPPEDA	1000	Informatif
2	BKPPD	995	Informatif
3	DPMPTSP	980	Informatif
4	DINSOS P2KB	976	Informatif
5	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	970	Informatif
6	DINKOMINFO	950	Informatif
7	RSUD BENDAN	940	Menuju Informatif
8	DPMPPA	910	Menuju Informatif
9	KESBANGPOL	910	Menuju Informatif
10	BPBD	849	Menuju Informatif
11	DINPERPA	824	Menuju Informatif
12	DLH	809	Menuju Informatif
13	DPUPR	796	Cukup Informatif
14	DINDAGKOP UKM	769	Cukup Informatif
15	DINPERINAKER	769	Cukup Informatif
16	DINPERKIM	764	Cukup Informatif
17	DINARPUS	755	Cukup Informatif
18	SATPOL PP	682	Cukup Informatif
19	DINDUKCAPIL	677	Cukup Informatif
20	DINKES	664	Cukup Informatif
21	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	642	Cukup Informatif
22	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	610	Cukup Informatif
23	DKP	606	Cukup Informatif
24	INSPEKTORAT	600	Cukup Informatif
25	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	579	Cukup Informatif
26	DINPARBUDPORA	548	Cukup Informatif
27	SETDA	526	Cukup Informatif
28	DINDIK	516	Cukup Informatif
29	SEKRETARIAT DPRD	512	Cukup Informatif
30	BKD	455	Kurang Informatif
31	DINHUB	417	Kurang Informatif

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2021

Untuk menunjang informasi bagi masyarakat, Pemerintah Daerah memiliki web dengan portal http://pekalongankota.go.id. Berbagai Sistem Informasi Manajemen juga dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.119 berikut.

Tabel 2.119 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2016 - 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah SIM	53	55	76	92	107

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2021

Setiap tahun Dinas Kominfo membangun dan mengembangkan SIM/aplikasi, baik yang digunakan untuk internal Pemerintah Kota Pekalongan maupun masyarakat. Salah satu SIM/aplikasi yang dibangun adalah SIM/aplikasi satu data terpadu yang diberi nama PUSAKA (Pusat Data Terpadu Kota Batik) dengan alamat http://pusaka.pekalongankota.go.id. SIM/aplikasi ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan data yang bersifat *single data* sehingga dapat dijadikan pedoman.

Berkaitan dengan pemberdayaan komunitas dalam pemanfaatan teknologi informasi, telah dilakukan pemberdayaan komunitas melalui pelatihan intensif pada komunitas BKR, Wirausaha/Pelaku Usaha, KNPI, BKM, LPM, Guru TIK/BTIK/SMP/MTs, Blogger, Pecinta Internet Hebat, Animator, Vlog Kota PKL, Robotik, Puskomas, Pengelola Web Sekolah, Karang Taruna, Anti Hoax, Film, Himpaudi, Telecenter, MGMP Multipedia, Explore Pekalongan, Relawan TIK, KIM, dan Dewan TIK.

Dalam hal infrastruktur, dibutuhkan jaringan komunikasi sebagai media penyebar luasan data dan informasi. Jaringan komunikasi merupakan kumpulan terimal, tautan, dan titik koneksi yang saling terhubung untuk memungkinkan telekomunikasi di antara pengguna. Semakin banyaknya jumlah pengguna dan penyelenggara jaringan telekomunikasi melahirkan kebutuhan akan sebuah regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi secara benar dan sesuai. Di Indonesia, regulasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi ini merupakan seperangkat aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010. Adapun jaringan telepon genggam antara lain Indihome (Telkom), Sentral Telkom, pabx, voip, CDMA, LAN, 4G. Jumlah menara yang terdaftar sampai akhir tahun 2018 hingga akhir tahun 2020 di Kota Pekalongan sebanyak 80 menara. Rasio jaringan komunikasi Kota pekalongan disajikan dalam Tabel 2.120 berikut.

Tabel 2.120 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jaringan telepon genggam	12	12	12	7	7
Stasioner	84	84	80	80	80
Rasio jaringan komunikasi	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2021

Keterangan : jaringan telepon genggam : Indihome (Telkom), Sentral Telkom, pabx, voip, CDMA, LAN, 4G.

Perkembangan surat kabar cetak di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan. Surat kabar yang terbit setiap pagi hari adalah lembaran tercetak yang

memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Surat kabar nasional yang beredar di Kota Pekalongan yang paling dikenal masyarakat antara lain Kompas, Sindo, Tempo dan Jawa Pos. Surat kabar lokal antara lain Radar, Wawasan, Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat. Perkembangan jumlah surat kabar di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.121 berikut.

Tabel 2.121 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Surat Kabar	10	10	15	15	15

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Penyiaran terbagi dua yakni penyiaran radio dan penyiaran televisi. Penyiaran radio di Kota Pekalongan berasal dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Adapun penyiaran televisi berasal dari Kota Tegal dan Kota Semarang. Perkembangan penyiaran radio dan televisi disajikan dalam Tabel 2.122 berikut.

Tabel 2.122 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyiaran Radio	10	13	14	17	8
Jumlah Penyiaran TV	15	15	16	20	20

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2021

Jaringan tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optik. Layanan jaringan tetap di Indonesia dan di Kota Pekalongan khususnya, dilayani oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Adapun jumlah satuan sambungan telepon sepanjang tahun 2016-2020 semakin menurun. Pada tahun 2016, jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 14.271 orang. Jumlah tersebut terus meningkat sampai tahun 2018 dengan jumlah pelanggan sebanyak 15.096 orang. Namun jumlah tersebut menurun secara signifikan di tahun 2019 menjadi 10.531 orang dan 11.254 orang di tahun 2020. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.123.

Tabel 2.123 Persentase Rumah Tangga Pelanggan Telepon Tetap di Kota Pekalongan 2016-2020

Tahun	Jumlah Pelanggan Telepon Tetap	Jumlah RT	Persentase Pelanggan Telepon Tetap (persen)
2016	14.271	74.313	19,20
2017	14.671	74.970	19,57
2018	15.096	75.618	19,96
2019	10.531	76.269	13,81

Tahun	Jumlah Pelanggan Telepon Tetap	Jumlah RT	Persentase Pelanggan Telepon Tetap (persen)
2020	11.254	84.296	13,35

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2021, 2021

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam penerapan SPBE, diperlukan tata kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, yang meliputi : Rencana Induk SPBE Nasional; Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; rencana dan anggaran SPBE; Proses Bisnis; data dan informasi; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Layanan SPBE.

Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional untuk periode tahun 2020-2024 diselesaikan paling lambat 6 (bulan) setelah RPJMN periode tahun 2020-2024, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Arsitektur SPBE Nasional memuat referensi arsitektur dan domain arsitektur, dimana referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur. Domain arsitektur mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :

a) domain arsitektur Proses Bisnis;
b) domain arsitektur Data dan Informasi;
c) domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
d) domain arsitektur Aplikasi SPBE;
e) domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
f) domain arsitektur Layanan SPBE.

Pada tahun 2019, SPBE Kota Pekalongan telah dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB dengan hasil sebagai berikut :

- Domain Kebijakan SPBE : 2,76
- Domain Tata Kelola : 2,86
- Domain Layanan SPBE : 3,39

Adapun indeks SPBE Kota Pekalongan tahun 2019 yaitu 3,14 dengan predikat “Baik”. Informasi secara lengkap disajikan dalam Gambar 2.49 berikut.

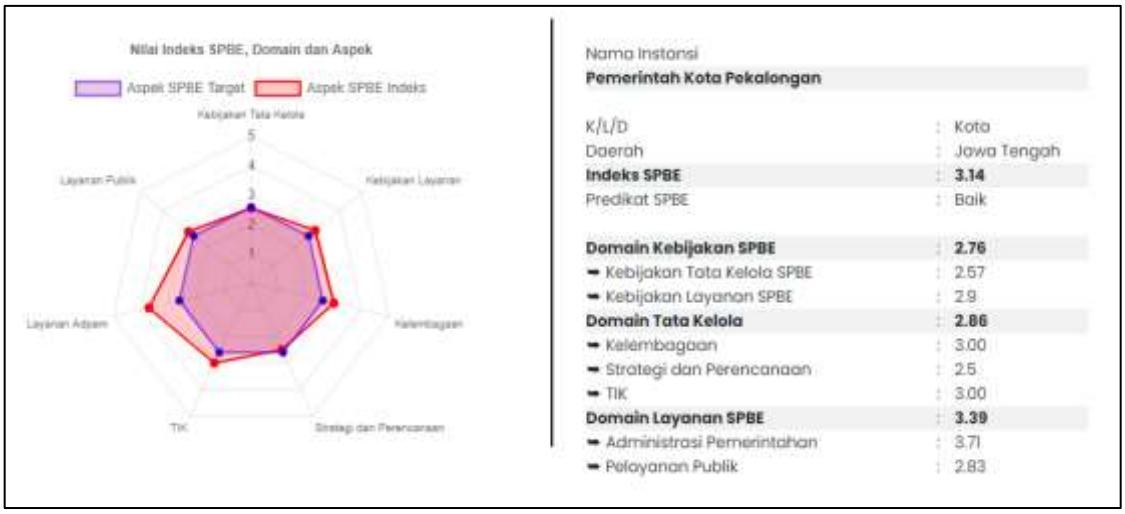

Gambar 2.49 Indeks SPBE Kota Pekalongan Tahun 2019

Sumber : spbe.go.id, 2020

Tahun 2020 Kota Pekalongan tidak menjadi target survey dari Kemenpan, sehingga tidak ada penilaian, namun tahun selanjutnya akan diadakan penilaian mandiri tidak melalui Kemenpan.

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Upaya pemberdayaan Koperasi & UMKM diharapkan untuk mewujudkan Koperasi dan MKM yang tangguh dan mandiri dengan mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia dan lembaga ekonomi kerakyatan.

Jumlah Koperasi aktif di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020. Akan tetapi persentase koperasi aktif di Tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2016, hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah total koperasi yang berasal dari pembentukan dan pendirian koperasi baru, akan tetapi tidak diikuti dengan pengurangan jumlah koperasi yang tidak aktif. Kondisi pada tahun 2018 masih sama dengan tahun 2017, kemudian terus meningkat di tahun 2019 dan 2020 menjadi 89,77 persen.

Tabel 2.124 Persentase Koperasi Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah seluruh Koperasi	Persentase koperasi aktif
2016	238	276	86,23
2017	235	280	83,93
2018	236	281	83,93
2019	237	281	84,34
2020	272	303	89,77

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2021

b. Jumlah UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan terdiri dari sektor industri, perdagangan, dan pedagang pasar-PK5. Jumlah UMKM di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2016-2020 mengalami penurunan. Namun dalam perjalanannya, jumlah IMKM mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai 2020. Pada tahun 2017 berjumlah 19.820 UMKM, menurun cukup drastis dari tahun 2016 yaitu 23.681. Kemudian jumlahnya terus naik menjadi 23.233 UMKM di tahun 2020, namun jumlahnya masih lebih rendah dibandingkan tahun 2016.

Tabel 2.125 Jumlah UMKM di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Komponen UMKM				Jumlah
	Perdagangan (SIUP)	Industri Kecil Menengah	Pedagang Pasar	Pedagang Kaki Lima	
2016	9.722	6.469	6.480	1.010	23.681
2017	7.840	4.570	6.400	1.010	19.820
2018	9.115	5.476	6.400	914	21.905
2019	9.314	6.152	6.600	914	22.980
2020	9.115	6.594	6.610	914	23.233

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2021

12. Penanaman Modal

Kegiatan penanaman modal di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi baik dari jumlah investor, jumlah nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang terserap maupun rasio daya serap tenaga kerja selama lima tahun berturut-turut. Hal ini disajikan dalam Tabel 2.126 berikut.

Tabel 2.126 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Investor (PMA/PMDN)	385	304	202	745	181
Jumlah Nilai Investasi (Rp. Milyar)	460	233	175	3.294,76	196.116
Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan PMA/PMDN	2.825	1.274	1.351	8.377	2.349
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	7,34	4,19	6,68	11,24	12,97

Sumber : DPMPTSP Kota Pekalongan, 2021

Dalam hal penyerapan tenaga kerja yang mampu diserap oleh kegiatan penanaman modal sepanjang 2016-2020, sepanjang lima tahun hanya pada tahun 2019 penyerapan tenaga kerja terbanyak yakni sebanyak 8.377 orang dengan rasio daya serap tenaga kerja terbesar sebesar 11,24. Adapun jumlah tenaga kerja terkecil yang diserap sepanjang lima tahun adalah tahun 2017 dengan jumlah tenaga kerja sebesar 1.274 orang dengan rasio daya serap tenaga kerjanya sebesar 4,19.

Tabel 2.127 Realisasi PMDN di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi PMDN Tahun Evaluasi (Rp. Milyar)	460,727	232,835	175,150	3.294,76	193,116

Sumber : DPMPTSP Kota Pekalongan, 2021

Tabel 2.127 menyajikan realisasi penanaman modal yang dilakukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri sepanjang tahun 2016-2020 atas realisasi PMDN tahun evaluasi, dimana realisasinya cenderung menurun. Pada tahun 2016, realisasi PMDN tahun evaluasi sebesar Rp.460,727 milliar. Tahun 2017 dan 2018 terus menurun menjadi Rp.175,150 miliar di tahun 2018. Kemudian meningkat signifikan di tahun 2019 sebesar Rp.3.294,76 miliar, dan kembali menurun di tahun 2020 sebesar Rp.193,116 miliar.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka meningkatkan pembangunan bidang kepemudaan, pada tahun 2016 telah dilakukan kegiatan kepemudaan sebanyak 8 kegiatan utama yang bertujuan meningkatkan partisipasi pemuda dalam berorganisasi dan bermasyarakat. Pelaksanaan kegiatan kepemudaan tersebut difasilitasi melalui pembentukan organisasi kepemudaan, namun di tahun 2017–2020 kegiatan kepemudaan menjadi 8 kegiatan. Pada tahun 2019 terjadi penambahan organisasi kepemudaan sebanyak 26 organisasi sesuai yang tercatat di Disporapar Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.128 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Kepemudaan	8	9	9	26	24
Jumlah kegiatan Kepemudaan	10	8	8	8	8
Jumlah Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Pada bidang keolahragaan, kinerja pembangunan diwadahi melalui organisasi olahraga dan sampai dengan tahun 2016 telah terbentuk 30 organisasi dalam bentuk Pengurus Cabang Olah Raga. Pada tahun 2019, jumlah organisasi olahraga menjadi 31 organisasi termasuk organisasi utama olahraga yakni KONI. Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 jumlah kegiatan olahraga pada kisaran 5 sampai 8 kegiatan, dan jumlah lapangan olahraga masih tetap dan perlu ditingkatkan.

Tabel 2.129 Perkembangan Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Olahraga	30	30	30	31	31
Jumlah kegiatan Olahraga	5	7	7	8	8
Jumlah Lapangan Olahraga	12	55	55	55	55

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

14. Statistik

Kebutuhan akan menentukan keputusan merupakan hal yang sangat penting dengan harapan sajian data terkumpul, terkelola dan termanfaatkan secara akurat, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mudah terakses dan dibagipakaikan. Akan tetapi kondisi yang ada saat penyajian data sendiri-sendiri sehingga akan menjadi data tidak sempurna dan bias dalam memutuskan karena tidak saling terintegrasi. Mengintegrasikan data-data yang sudah adapun sangat sulit karena penyajiannya yang berbeda menjadi tumpang tindih yang sulit dipadukan dan merasa punya data dan saling menutup sendiri. maka terbitlah Peraturan Presiden Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Yang mendasari perubahan-perubahan dalam pengelolaan penyajian

Perubahan melalui pasal 37 ayat 6 disebutkan bahwa akses data di portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Walidata selaku pengguna data pada instansi pusat dan daerah. Dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data diluar instansi pusat dan daerah.

Di masa transisi saat ini penyelenggaraan urusan statistik Pemerintah Daerah selain rutinitas cetakan masih berkelanjutan menjadi kegiatan tersendiri juga sudah mengelola data terpadu dalam bentuk PDA (Pekalongan Dalam Angka) juga menyajikan data sektoral beralamatkan pusaka.pekalongankota.go.id yang masih proses dengan berpedoman pada pasal 37 ayat 6 tentang Admin data (pejabat pengelola informasi yang bertanggungjawab) dan Walidata selaku pengguna data.

kedepan isian oleh OPD yang menyajikan sebagai admin dan data akan disajikan sesuai kebutuhan.

15. Persandian

Perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak pada perubahan-perubahan yang mendasar pada sebagaimana informasi diproses dan ditransmisikan, sehingga membawa paradigma baru pada persandian. Peran persandian tidak lagi hanya menyangkut kerahasiaan saja, tetapi juga menyangkut keamanan informasi.

Arah perubahan Paradigma penyelenggaraan persandian di Daerah, tidak hanya sekedar kirim berita, tidak hanya melayani Kepala Daerah, tidak hanya terbatas pada informasi rahasia, akan tetapi melaksanakan pengamanan informasi daerah melalui penyelenggaraan persandian, layanan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan dan nir sangkal atas informasi, penyediaan layanan *e-Goverment*, dan secara aktif meningkatkan kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Saat ini penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi Pemerintah Daerah menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah serta layanan keamanan informasi dengan menerapkan sertifikasi elektronik untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik.

16. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Guna mewujudkan ketahanan budaya, dalam kurun waktu 2016-2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan seni dan budaya. Meskipun jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya cenderung tetap, tetapi jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya justru semakin meningkat. Semula berjumlah 42 *event* pada tahun 2018, menjadi 57 *event* di tahun 2019. Hal ini menunjukkan keberhasilan penguatan seni dan budaya serta minat masyarakat terhadap penyelenggaraan even tersebut. Namun di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi *COVID-19* penyelenggaraan festival seni dan budaya hanya ada 6 *event*.

Selain seni dan budaya, hal lain yang patut menjadi perhatian adalah pengelolaan cagar budaya. Meskipun merupakan kewenangan pemerintah pusat namun Pemerintah Kota Pekalongan telah memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya, seperti disajikan dalam Tabel 2.130 berikut.

Tabel 2.130 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	23	29	42	57	6
Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4	4	4	4	4
Jumlah Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	282	282	282	282	282

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Dalam upaya pelestarian budaya dan menjadikan Kota Pekalongan sebagai destinasi wisata, telah dilakukan berbagai upaya penyelenggaraan festival/seni untuk menciptakan *brand image* Kota Pekalongan sebagai *world city of batik* dan salah satu kota kreatif dunia. Di samping itu, seni budaya Pekalongan juga terus dilakukan pembinaan untuk dapat berkembang di masyarakat. Pada tahun 2020, dikarenakan pandemi *COVID-19* Pemerintah Kota Pekalongan hanya menyelenggarakan beberapa even seni dan budaya dengan total 6 *event* sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.131 berikut.

Tabel 2.131 Penyelenggaraan Festival/ Pentas Seni/ *Event* di Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Pekalongan Art Festival	1 – 8 Sept 2020	Kota Pekalongan
2	Festival Bubur Suro	19 – 20 Sept 2020	Kota Pekalongan
3	Kauman Art	10 Okt 2020	Kota Pekalongan
4	Pentas Peringatan Hari Batik	1 Okt 2020	Kota Pekalongan
5	Sadranan	16 Nov 2020	Kota Pekalongan
6	Pentas Wayang Kulit Virtual	11- 13 Nov 2020	Kota Pekalongan

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Dari berbagai festival seni budaya yang diselenggarakan, jika dikelompokkan ada 17 jenis seni budaya sebagaimana tabel berikut. Pemerintah Kota Pekalongan bersama masyarakat berupaya melestarikan semua seni budaya yang ada dengan cara melakukan pembinanan, fasilitasi dan penyelenggaraan *event*. Sehingga pelestarian seni budaya dapat tercapai 100 persen.

Tabel 2.132 Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2018-2020

No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Simtuduror	Simtuduror	Simtuduror
2	Seni Musik	Seni Musik	Seni Musik
3	Sanggar Teater	Sanggar Teater	Sanggar Teater
4	Seni Tari	Seni Tari	Seni Tari
5	Seni Rakyat	Seni Rakyat	Seni Rakyat
6	Seni Karawitan	Seni Karawitan	Seni Karawitan
7	Perfilman	Perfilman	Perfilman
8	Komunitas Musik Rakyat	Komunitas Musik Rakyat	Komunitas Musik Rakyat
9	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)
10	Samroh	Samroh	Samroh
11	Terbang Genjring/Jawan	Terbang Genjring/Jawan	Terbang Genjring/Jawan
12	Musik Keroncong	Musik Keroncong	Musik Keroncong
13	Reklame	Reklame	Reklame
14	Dekorasi	Dekorasi	Dekorasi
15	Seni Lukis	Seni Lukis	Seni Lukis
16	Kerajinan	Kerajinan	Kerajinan
17	Sastra	Sastra	Sastra

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

17. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi masih diminati oleh berbagai kalangan, terutama oleh pelajar. Di Kota Pekalongan, jumlah pengunjung perpustakaan terbilang cukup tinggi meskipun angkanya fluktuatif. Pada tahun 2016 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 87.849 orang, kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 89.682 pengunjung. Pada tahun 2018 jumlahnya menurun lagi menjadi 83.068, tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 90.150. Dikarenakan kondisi pandemi *COVID-19* maka jumlah kunjungan menurun drastis menjadi 39.885. Salah satu penyebab menurunnya jumlah pengunjung tidak lepas dari kemudahan akses informasi dari berbagai media, termasuk media *online* yang saat ini sudah dalam genggaman. Berikut jumlah pengunjung perpustakaan mulai tahun 2016 sampai tahun 2020.

Tabel 2.133 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Kunjungan Selama 1 Tahun	Jumlah Populasi yang Harus Dilayani	Rasio
2016	87.849	299.142	0,29
2017	89.682	268.070	0,33
2018	83.068	261.944	0,32
2019	90.150	261.944	0,34
2020	39.885	258.543	0,16

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2021

Sementara itu jumlah perpustakaan di Kota Pekalongan relatif tetap. Hanya jumlah perpustakaan RW yang berkurang, dari 328 perpustakaan di tahun 2016, berkurang menjadi 105 di tahun 2017, di tahun 2019 dan 2020 kembali berkurang menjadi 94 dan 90. Hal ini dikarenakan banyak perpustakaan RW yang tidak aktif

karena berbagai faktor, diantaranya terkena dampak rob di wilayah utara dan di wilayah lain juga pengelola perpustakaan yang tidak aktif. Perkembangan perpustakaan di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.134 berikut.

Tabel 2.134 Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Uraian Data	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perpustakaan Umum Kota Pekalongan	1	1	1	1	1
Perpustakaan Keliling	3	3	3	3	4
Perpustakaan RW	328	105	105	94	90
Perpustakaan SD/MI	77	77	77	77	77
Perpustakaan SLTP	34	34	34	34	34
Perpustakaan SLTA	23	23	23	23	23
Perpustakaan Perguruan Tinggi	6	6	6	6	6

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2021

18. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah (PD) Kota Pekalongan pada kurun waktu Tahun 2016 - 2020 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma dan standar yang ada namun belum optimal. Pada tahun 2016 sampai tahun 2017 tidak ada penambahan PD yang mengelola arsip secara baku, stagnan di angka 22 OPD. Namun pada tahun 2018 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupaya melakukan percepatan, salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada PD sehingga dapat meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, dari 22 PD menjadi 49 PD seperti disajikan dalam Tabel 2.135 berikut.

Tabel 2.135 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah PD	Jumlah PD yang Mengelola Arsip Secara Baku	Rasio
2016	34	22	64,71
2017	66	22	33,33
2018	66	49	74,24
2019	66	49	74,24
2020	66	49	74,24

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2021

Selain pengelolaan, penyelamatan arsip juga sama pentingnya. Tindakan ini dilakukan untuk menambah khazanah arsip statis di lembaga kearsipan sebagai upaya menyelamatkan arsip dari tindakan penyusutan yang tidak prosedural atau adanya pembiaran arsip dari lembaga pencipta arsip. Jumlah arsip yang dipelihara dan diselamatkan disajikan dalam Gambar 2.50 berikut.

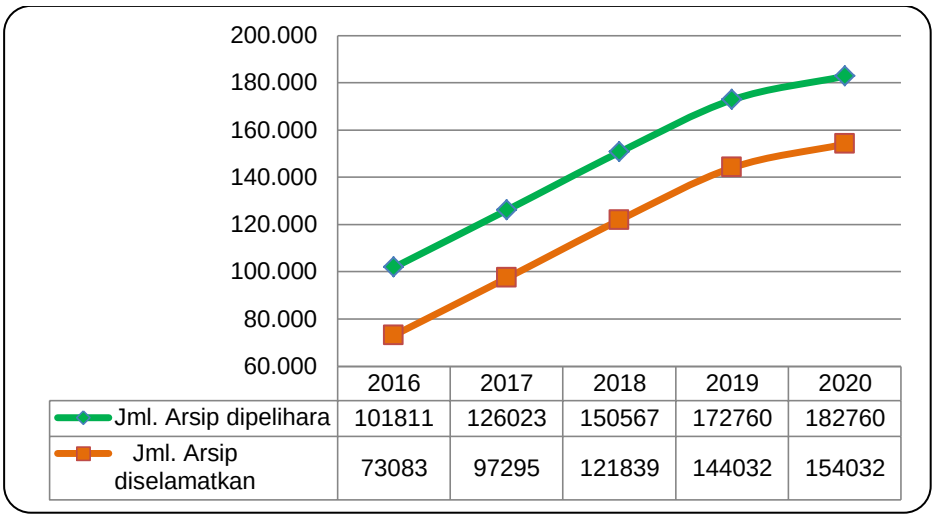

Gambar 2.50 Jumlah Arsip yang Dipeliharan dan Diselamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2021

Adapun pelestarian arsip merupakan tindakan memperpanjang usia simpan arsip di lembaga kearsipan melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pengawetan arsip dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor kimia, fisika, dan biota baik secara manual maupun mekanik. Grafik diatas menunjukkan bahwa arsip yang diselamatkan selama kurun waktu lima tahun terakhir yakni 2016-2020 mengalami peningkatan signifikan. Demikian juga arsip yang dilestarikan selama kurun waktu 2016-2020 terus mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa dokumen penting layak diarsipkan.

Salah satu jenis arsip yang dikelola yaitu arsip statis. Arsip statis merupakan arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari suatu organisasi tetapi arsip tetap harus disimpan dan dikelola berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada dengan mempertimbangkan nilai guna arsip. Tidak banyak orang yang memanfaatkan. Pada tahun 2017, jumlah orang yang memanfaatkan arsip statis sebanyak 23 orang, pada tahun 2018 sebanyak 28 orang, pada tahun 2019 sebanyak 48 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 50 orang.

Tabel 2.136 Pemanfaatan Arsip Statis Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Pengguna Arsip (orang)			Total (Orang)
	Masyarakat	Mahasiswa/Pelajar	Peneliti	
2017	6	16	1	23
2018	7	20	1	28
2019	10	36	2	48
2020	7	42	1	50

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2021

Dalam mengelola arsip, dibutuhkan sumber daya manusia kearsipan yang memiliki nilai kelayakan dan kualitas dalam profesionalisme dan kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku. Seiring dengan peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya meningkatkan jumlah arsiparis untuk mengelola kearsipan. Tercatat di tahun 2017 ada sebanyak 4 orang arsiparis, lalu berkurang menjadi 3 orang di tahun 2018 karena mengundurkan diri, dan bertambah 4 orang sehingga total sampai tahun 2020 adalah 7 orang. Dari ketujuh orang arsiparis tersebut, 1 orang tidak perlu uji kompetensi karena masih menggunakan

aturan lama, 1 orang tidak dapat mengikuti uji kompetensi karena berpendidikan SMA (untuk dapat mengikuti uji kompetensi, minimal berpendidikan D3), dan 5 orang belum memiliki sertifikat.

Tabel 2.137 Sertifikasi Kompetensi Kearsipan Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Arsiparis (orang)	Sertifikasi Kompetensi	Persentase
2017	4	0	0
2018	3	0	0
2019	3	0	0
2020	7	0	0

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2021

2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan masih merupakan potensi yang diandalkan Pemerintah Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Perikanan tangkap Kota Pekalongan memiliki potensi ekonomi strategis karena adanya fasilitas sebagai pusat pendaratan ikan, yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sangat representatif.

Pencapaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 hampir mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 90,76 persen dari target sebesar 15.300 ton, dengan realisasi 13.887 ton. Pencapain Target budidaya ikan payau sebesar 1.200 ton dapat terpenuhi,dengan realisasi 7.173 ton (597,75 persen). Pencapaian produksi ikan air tawar pada tahun 2020 sebesar 91,7 ton dari target sebesar 83 ton, atau hanya tercapai 110,5 persen. Perkembangan produksi budidaya air payau dan budidaya air tawar mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke 2020, namun untuk perikanan tangkap mengalami penurunan atau berkurang.

Secara lengkap Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan selama 5 (lima) tahun (tahun 2016-2020) disajikan dalam Tabel 2.138 berikut.

Tabel 2.138 Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2016- 2020 (kg)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ikan Tangkap					
a. Jumlah Produksi Ikan	15.641	10.475	10.980	14.992	13.887
b. Target Daerah	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
Persentase Produksi	104,27	68,46	71,76	97,99	90,76
Ikan Budidaya Air Payau					
a. Jumlah Produksi Ikan	1.392	1.578,50	1.698,30	1.746,2	7.173
b. Target Daerah	745	1.200	1.200	1.200	1.200
Persentase Produksi	186,85	131,54	141,53	145,51	597,75
Ikan Budidaya Air Tawar					
a. Jumlah Produksi Ikan	110	46,7	46,90	11,3	91,7
b. Target Daerah	83	83	83	83	83
Persentase Produksi	132,53	56,27	56,51	13,61	110,5
Jumlah Produksi (ton)	17.143	12.100	12.725	16.750	21.152
Target Produksi	15.828	16.583	16.583	16.583	16.583

Sumber : DKP Kota Pekalongan, 2021

Konsumsi ikan di Kota Pekalongan perkapita di Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 secara kuantitas per kapita mengalami peningkatan. Dari tahun 2016 sampai tahun 2017 belum bisa mencapai target yang ditentukan yaitu 30 kg/kapita/tahun. Namun pada tahun 2018 sudah dapat melampaui target yaitu 31,60 kg/kapita/tahun dengan persentase 105,33 persen. Sedangkan untuk tahun 2019 jumlah konsumsi ikan mencapai 32,12 kg/kapita/tahun dengan persentase 107,07 persen dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 32,64 kg/kapita/tahun dengan persentase 108,80 persen. Perkembangan konsumsi ikan di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.139 berikut.

Tabel 2.139 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (kg/kapita/tahun)

Tahun	Jumlah Konsumsi Ikan	Target Daerah	Persentase Konsumsi Ikan
2016	25,2	30	84,00
2017	26,7	30	89,00
2018	31,6	30	105,33
2019	32,12	30	107,07
2020	32,64	30	108,80

Sumber : DKP Kota Pekalongan, 2021

Saat ini terdapat 6 (enam) kelompok nelayan yang telah berbadan hukum, yang kemudian pada tahun 2017 ditindaklanjuti dengan pembinaan berupa pemberian bantuan/hibah. Namun demikian pemberian bantuan/hibah harus mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (6), dimana hibah diberikan dengan persyaratan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah Pemerintah Kota Pekalongan tidak bisa memberikan bantuan kepada kelompok nelayan sejak tahun 2017 sampai tahun 2019.

Tabel 2.140 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kelompok Nelayan Mendapatkan Bantuan Pemda	Jumlah Kelompok Nelayan	Persentase Cakupan Bina Nelayan (%)
2016	1	34	2,94
2017	0	34	0,00
2018	0	35	0,00
2019	0	35	0,00
2020	4	36	11,11

Sumber : DKP Kota Pekalongan, 2021

Di sisi produksi perikanan, mulai tahun 2016 hingga tahun 2019 sempat mengalami penurunan, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018, yaitu 14.991 ton (tahun 2018 sebesar 10.980 ton) dan di tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 13.887 ton. Sedangkan jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan mengalami penurunan, dari 471,82 ton di tahun 2016 menjadi 108,83 ton di tahun 2019. Penurunan di tahun 2019 dikarenakan beberapa kapal milik kelompok nelayan, seperti kapal Inka Mina, tidak melakukan operasional penangkapan ikan karena kapal sudah tidak layak jalan/operasional. Selain itu ada rencana untuk mengalihfungsikan kapal menjadi kapal pengangkut.

Secara lengkap data Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2.141 berikut.

Tabel 2.141 Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (ton)

Tahun	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi hasil Kelompok Nelayan	Jumlah Produksi Ikan di Daerah	Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
2016	471,82	15.641	3,02
2017	259,48	10.475	2,48
2018	145,96	10.980	1,33
2019	108,83	14.991	0,73
2020	155,62	13.887	1,12

Sumber : DKP Kota Pekalongan, 2021

Peran Pemerintah Kota Pekalongan meningkatkan persentase perikanan dari kelompok nelayan cukup besar melalui inisiasi Gemar Makan Ikan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi ini harus tetap dipertahankan sehingga akan terdapat kecenderungan yang semakin meningkat.

2. Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan yang handal harus didukung dengan ketersediaan akomodasi yang memadai juga. Hotel sebagai sarana akomodasi utama dan penunjang utama di Kota Pekalongan penting dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai kota jasa di masa depan, terutama pariwisata. Jumlah hotel di wilayah Kota Pekalongan mengalami penurunan jumlahnya dari 31 hotel pada tahun 2016 menjadi 28 hotel pada tahun 2017. Tahun 2018 jumlah hotel di Kota Pekalongan bertambah 2 sehingga menjadi 30 hotel. Kemudian pada tahun 2019 terdapat 2 hotel yang direnovasi sehingga jumlahnya menjadi 28 hotel. Pada tahun 2020, kedua hotel tersebut dibuka kembali sehingga jumlahnya menjadi 30 hotel. Kelas hotel di Kota Pekalongan pun beragam, mulai dari kelas melati, bintang 1 sampai bintang 3.

Sarana akomodasi lainnya yang menunjang pariwisata adalah restoran. Restoran sebagai sarana akomodasi penunjang berperan menarik minat wisatawan untuk menikmati kuliner Kota Pekalongan selain menyediakan kuliner nasional dan internasional yang selama ini telah dikenal oleh wisatawan itu sendiri. Perkembangan jumlah restoran juga dapat menggambarkan perkembangan kepariwisataan dan perekonomian di Kota Pekalongan. Jumlah restoran yang semula hanya 132 di tahun 2016, sekarang telah berkembang menjadi 150 restoran di tahun 2020. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisata sebesar 283.882 pada tahun 2020, turun sekitar 60 persen dari tahun 2019.

Tabel 2.142 Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Restoran dan Rumah Makan	Jumlah Kunjungan Wisata
2016	31	132	363.585
2017	28	137	387.417
2018	30	138	784.254
2019	28	152	720.816
2020	30	150	283.882

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Perkembangan pariwisata juga dapat dilihat dari tingkat okupansi hotel, dimana tahun 2018 dan 2019 tingkat okupansinya tidak siginifikan. Untuk hotel kelas melati berada di angka 22 persen, hotel binang 1 sebesar 18 persen, hotel bintang 2 sebesar 18 persen, dan hotel bintang 3 mengalami kenaikan dari 33 persen di tahun 2018 menjadi 36 persen di tahun 2019. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.143 berikut.

Tabel 2.143 Tingkat Okupansi Hotel di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019

Kelas Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Rata-rata Okupansi (%)	
			2018	2019
Melati	20	445	22	22
Bintang 1	1	65	13	13
Bintang 2	1	47	18	18
Bintang 3	8	739	33	36

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Untuk memajukan pariwisata di Kota Pekalongan, pemerintah beserta masyarakat menyelenggarakan kegiatan budaya dan seni. Tujuannya selain mendongkrak jumlah wisatawan, juga untuk meningkatkan citra wisata Kota Pekalongan sebagai tujuan wisata di pantai Utara Pulau Jawa. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya disajikan dalam Tabel 2.144 berikut.

Tabel 2.144 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyelenggaraan	23	35	42	57	6

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Daya tarik lain yang ditawarkan Kota Pekalongan adalah obyek wisata. Meskipun tidak memiliki banyak obyek wisata, namun cukup banyak pengunjung yang berwisata di Kota Pekalongan, antara lain di pantai Pasir Kencana, pantai Slamaran Indah, Museum Batik, Kampung Batik Kauman, Kampung Wisata Batik Pesindon dan Kampung Canting Landungsari. Obyek-obyek wisata tersebut yang menjadi andalan kepariwisataan di Kota Pekalongan. Bahkan Pemerintah Kota Pekalongan telah membangun Gapura Nusantara serta menata kawasan Alun-alun untuk menambah daya tarik wisata. Jumlah pengunjung wisata bahari mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah abrasi yang merusak kawasan pantai ,adanya rob dan adanya pandemi *COVID-19* di tahun 2020.

Sementara itu kunjungan di Museum Batik walaupun menurun, namun wisatawan dari mancanegara masih ada yang berkunjung. Hal ini menunjukkan bahwa minat wisatawan terhadap budaya batik Pekalongan masih cukup tinggi. Tetapi tidak demikian dengan kolam renang Tirta Sari, sejak tahun 2016 resmi ditutup karena tidak layak operasional.

Tabel 2.145 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Objek Wisata	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasir Kencana					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	0	6	2	0
	2). Wisnus	109.057	105.360	69.184	69.057	7.429
	B. Pendapatan (Rp.)	509.935.500	529.565.500	360.360.250	355.370.750	39.449.750
2	Slamaran Indah					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	0	0	0	0
	2). Wisnus	7.437	9.134	7.641	11.283	10.426
	B. Pendapatan (Rp.)	27.310.000	31.851.500	32.826.750	44.572.750	33.759.750
3	Museum Batik					
	Pengunjung					
	1). Wisman	265	358	454	286	138
	2). Wisnus	21.834	23.044	25.154	28.312	9.982
	B. Pendapatan (Rp.)	70.653.000	84.254.000	96.861.000	100.530.000	31.447.000
4	Kolam Renang Tirta Sari					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	0	0	0	0
	2). Wisnus	40.901	0	0	0	0
	B. Pendapatan (Rp.)	42.042.000	0	0	0	0

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

3. Pertanian

Capaian pembangunan pertanian Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Puncak produktifitas padi terjadi pada tahun 2017 sebesar 7,29 ton per hektar. Kemudian menurun cukup drastis di tahun-tahun berikutnya yaitu sebesar 6,36 ton per hektar di tahun 2018. Tahun 2019 sebesar 3,16 ton per hektar dan tahun 2020 menurun lagi pada posisi 2,92 ton per hektar. Produktivitas padi di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.146 berikut.

Tabel 2.146 Produksi Padi di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi tanaman padi (ton)	11.793,00	12.425,00	10.077,00	5.131,09	4.769,19
Luas areal tanaman padi (Ha)	2.771,00	1.704,00	1.584	1.618,74	1.631,53
Produktifitas padi per hektar (ton/Ha)	4,25	7,29	6,36	3,16	2,92

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Untuk meningkatkan produksi pertanian, salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah melakukan pembinaan kepada kelompok tani. Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan dari Pemkot meningkat di tahun 2018,dari 67 kelompok tani pada tahun 2017 menjadi 80 kelompok tani di tahun 2018 ,87 kelompok tani di tahun 2019 dan 88 kelompok tani di tahun 2020. Kelompok tani ini terdiri dari KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) sebanyak 28 kelompok, kelompok tani sebanyak 28 kelompok dan kelompok ternak sebanyak 24 kelompok.

Tabel 2.147 Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kelompok tani mendapat bantuan Pemda	0	3	28	40	40
Jumlah kelompok tani	66	67	80	87	88
Cakupan bina kelompok petani (persen)	0,00	4,48	35,00	45,98	45,45

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2021

4. Perdagangan

Aktivitas perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan, juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Sektor perdagangan dan koperasi sangat memberikan kontribusi secara agregat yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan produk unggulan Kota Pekalongan diantaranya batik, ikan, tenun, konveksi dan aneka kerajinan lainnya berkembang dengan penuh inovasi dan kreativitas. Upaya Pemerintah dalam memfasilitasi dan menguatkan aktivitas usaha UMKM tersebut memberikan manfaat bagi keberlangsungan dan kepastian usaha UMKM, sehingga aktivitas bisnis UMKM Kota Pekalongan tetap terjaga dan mampu memenuhi pasar lokal, regional, nasional dan internasional.

Di samping didominasi aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Adapun jenis pasar rakyat dan toko modern seperti disajikan dalam Tabel 2.148 berikut.

Tabel 2.148 Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

JenisPasar / Toko	2016	2017	2018	2019	2020
Sentra Perdagangan Batik	3	3	3	3	3
PasarTradisional	11	11	11	11	11
- Toko	247	247	74	74	74
- Kios	1.652	1.685	555	555	555
Toko diluar Pasar Tradisonal	2.726	2.726	2.726	2.726	2.726
Toko Modern :					
- Minimarket	26	41	42	43	53
- Supermarket	2	2	3	3	5
- Department store	4	4	3	3	4
- Hypermarket	2	2	1	1	1
- Perkulakan	0	0	0	0	0

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2021

Aktivitas perdagangan juga mencakup pedagang/usaha informal yang tidak kalah banyak dengan usaha formal. Pada tahun 2020, pedagang/usaha informal sebanyak 1.043 pedagang yang tersebar di titik-titik strategis di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.149 berikut.

Tabel 2.149 Jumlah Pedagang/Usaha Informal di Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Lokasi	Jumlah
1	Jl. Sultan Agung	30
2	Jl. Hasanudin	6
3	Jl. Urip Sumoharjo	57
4	Jl. Gatot Subroto	61
5	Jl. Kurinci	23
6	Jl. Kusuma Bangsa	44
7	Jl. Tentara Pelajar	16
8	Jl. Merak	3
9	Jl. WR. Supratman	13
10	Jl. Progo	10
11	Jl. Merpati	16
12	Jl. Mawar	18
13	Jl. Melati	38
14	Jl. Kepodang	16
15	Jl. Mataram	50
16	Alun-alun timur	22
17	Alun-alun utara	30
18	Alun-alun konveksi	209
19	SKLP	82
20	Tentara Pelajar	18
21	Jl. Veteran	50
22	Jl. Angkatan 45	6
23	Resimen	5
24	Gajahmada	9
25	Jl. Ahmad Dahlan	14
26	JL. HOS cokroaminoto	43
27	Jl. RA Kartini	24
28	Jl. Wahid Hasyim	15
29	Jl. Agus Salim	11
30	Jl. Dr Wahidin	16
31	Jl. Cendrawasih	36
32	JL. Rajawali	52
	Total	1.043

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan (diolah), 2021

Dari sisi perdagangan, kontribusi di sektor perdagangan atas harga berlaku terus meroket dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Pada tahun 2016 sebesar Rp.1,847 triliun dan terus naik sampai di angka Rp.2,370 triliun di tahun 2019. Begitu pula dengan kontribusi sektor perdagangan atas harga konstan yang terus naik, mulai dari Rp.1,407 triliun di tahun 2016 menjadi Rp.1,655 triliun di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 kontribusi sektor perdagangan atas harga berlaku dan atas harga konstan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, masing-masing menjadi sebesar Rp. 2.289 triliun dan Rp. 1.578 triliun. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.150 berikut.

Tabel 2.150 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Keterangan		2016	2017	2018	2019	2020
1	ADHB	PDRB Total (Rp. Juta)	8.507.535,11	9.274.261,81	10.089.284,87	10.873.976,04	10.818.530,64
		PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	1.847.835,00	2.019.945,16	2.195.304,05	2.370.293,83	2.289.121,10
		Kontribusi	21,72	21,78	21,76	21,80	21,16
2	ADHK 2010	PDRB Total	6.367.272,96	6.706.278,70	7.087.915,58	7.477.425,04	7.337.833,89
		PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	1.407.425,41	1.487.771,72	1.570.073,03	1.655.883,36	1.578.463,62
		Kontribusi	22,10	22,18	22,15	22,15	21,51

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Kenaikan kontribusi sektor perdagangan tidak sejalan dengan perkembangan nilai ekspor yang cenderung naik dari tahun 2016 sampai 2020, meskipun sempat menurun di tahun 2017. Nilai ekspor semula 91,081 juta US$ di tahun 2016, turun menjadi 17,683 juta US$ di tahun 2017. Namun setelah itu terus naik menjadi 25,173 juta US$ di tahun 2020. Sementara itu untuk impor terus ditekan, namun dalam perjalannya mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020. Data selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.51 berikut.

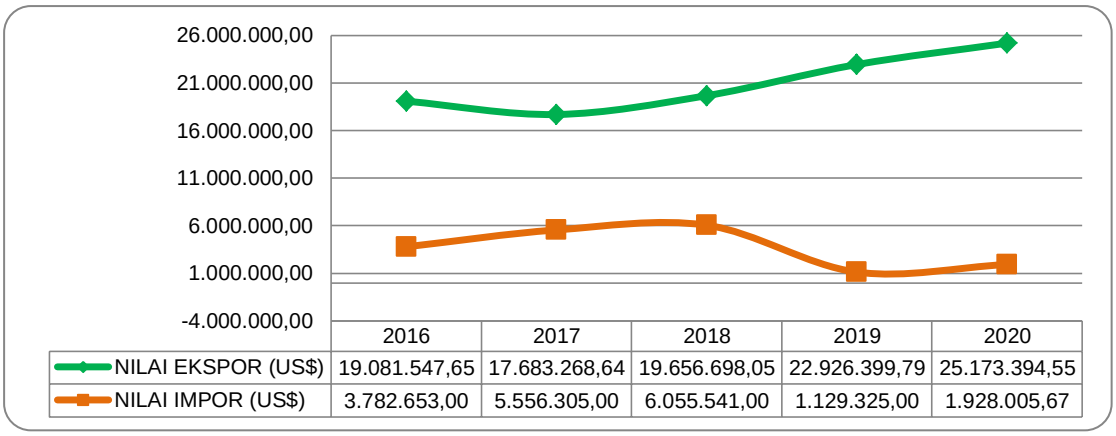

Gambar 2.51 Realisasi Nilai Ekspor dan Impor di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2021

5. Perindustrian

Kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat tergambarkan dari capaian beberapa indikator, seperti kontribusi sektor industri terhadap PDRB; dan pertumbuhan industri.

a. Kondisi Umum Industri

Jumlah industri di Kota Pekalongan sejak Tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2016 terdapat 36 unit industri, tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 20 unit dan di tahun 2018 penurunannya menjadi 14 unit, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 89 unit dan di tahun 2020 menurun kembali menjadi 8 unit. Klasifikasi industri di Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2.151 berikut.

Tabel 2.151 Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

KLASIFIKASI INDUSTRI	JUMLAH UNIT INDUSTRI				
	2016	2017	2018	2019	2020
Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK)	0	0	8	14	4
Industri Aneka (IA)	36	20	6	47	3
Industri Hasil Pertanian (IHP)	0	0	0	6	1
JUMLAH	**36**	**20**	**14**	**89**	**8**

Sumber : DPMPTSP Pekalongan, 2021

Jika dilihat dari nilai investasinya, industri di Kota Pekalongan mengalami perkembangan yang cukup baik seperti disajikan dalam Tabel 2.152 berikut.

Tabel 2.152 Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

KLASIFIKASI INDUSTRI	INVESTASI (Rp Juta)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK)	0	0	933,00	9.412,03	955,00
Industri Aneka (IA)	13.779,40	9.683,00	11.682,00	69.483,30	7.184,00
Industri Hasil Pertanian (IHP)	0	0	0	2.721,41	1.450,00
JUMLAH	13.779,40	9.683,00	12.615	81.616,74	9.589,00

Sumber : DPMPTSP Kota Pekalongan, 2021

b. Industri Unggulan

Produk unggulan Kota Pekalongan adalah industri batik, pengolahan perikanan, teh, pertenunan ATM dan pertenunan ATBM. Dari kelima produk unggulan tersebut, batik, pakaian jadi dari tekstil dan pengolahan ikan merupakan kompetensi inti daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kota Pekalongan. Untuk kegiatan pengolahan ikan sepanjang tahun 2016-2020 jumlah industrinya cenderung stagnan. Berikut ini adalah profil industri unggulan di Kota Pekalongan.

Tabel 2.153 Jumlah IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Jenis industri	2016	2017	2018	2019	2020
Batik	878	760	770	781	1.457
Pakaian jadi dari tekstil	606	913	913	953	941
Pembekuan ikan	6	NA	NA	NA	NA
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	1	1	1	1	1
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	53	22	22	23	26
Penggaraman/Pengeringan Ikan	25	5	5	9	38
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	44	7	7	8	88
Pengolahan Teh dan Kopi	41	8	8	11	31
Pertenunan	151	31	31	34	33

Sumber : Dinperinaker, 2021

Tabel 2.154 Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Jenis industri	2016	2017	2018	2019	2020
Batik	12.937	12.104	5.197	5.278	7.964
Pakaian jadi dari tekstil	6.751	5.630	5.849	6.047	6.600
Pembekuan ikan	50	30	NA	NA	NA
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	396	396	477	477	583
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	175	102	56	59	52
Penggaraman/Pengeringan Ikan	681	390	71	75	190
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	639	380	58	58	227
Pengolahan Teh dan Kopi	1.478	450	1.066	1.174	1.834
Pertenunan	4.055	760	595	595	466

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2021

Tabel 2.155 Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Jenis industri	2016	2017	2018	2019	2020
Batik	49.235	45.760	n/a	n/a	10.041
Pakaian jadi dari tekstil	33.540	25.750	n/a	12.573	2.098
Pembekuan ikan	406	215	n/a	n/a	n/a
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	11.500	11.500	n/a	n/a	n/a
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	278	210	n/a	n/a	14,2
Penggaraman/Pengeringan Ikan	1.218	560	n/a	n/a	135
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	7.542	3.950	n/a	n/a	72.15
Pengolahan Teh dan Kopi	46.530	19.115	n/a	n/a	3.550
Pertenunan	33.533	7.250	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2021

c. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB sepanjang 2016-2020 terus meningkat baik berdasarkan ADHB. Pada tahun 2016 kontribusi sektor perindustrian ADHB sebesar Rp. 1.822.761,68 Juta (21,43 persen dari total PDRB), dan terus mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi Rp. 2.315.321,70 juta (21,40 persen dari total PDRB), meskipun secara persentase berfluktuasi. Peningkatan kinerja sektor perindustrian mampu menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan selain sektor perdagangan. Lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Kota Pekalongan. Perkembangan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB disajikan dalam Tabel 2.156.

Tabel 2.156 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Keterangan		2016	2017	2018	2019	2020
ADHB	PDRB Total (Rp. Juta)	8.507.535,11	9.274.261,81	10.089.284,87	10.873,976,04	10.818.530,64
	PDRB Perindustrian (Rp. Juta)	1.822.761,68	1.959.739,49	2.112.720,60	2.267.013,33	2.315.321,70
	Kontribusi	21,43	21,13	20,94	20,85	21,40
ADHK (2010)	PDRB Total	6.367.272,96	6.706.278,70	7.087.915,58	7.477,425,04	7.337.833,89
	PDRB Perindustrian	1.356.596,75	1.415.641,58	1.478.741,06	1.550.360,71	1.542.947,72
	Kontribusi	21,31	21,11	20,86	20,73	21,03

Sumber : Kota Pekalongan Dalam AngkaTahun 2021, 2021

2.3.4. Unsur Penunjang

1. Sekretariat Daerah

a. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan meliputi kerjasama daerah dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi.

Tabel 2.157 Jumlah Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah	72	118	150	136	93

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda, 2021

b. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus semakin meningkat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Kepegawaian akan sangat terkait dengan reformasi birokrasi. Dalam rangka perwujudan *good governance* telah disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 oleh pemerintah, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Dalam bahasa yang lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan mencakup beberapa area perubahan yaitu :

1) Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD.

2) Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO.
3) Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur, pengadaan CPNS Pemerintah Kota Pekalongan, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dan peningkatan kualitas PNS melalui fasilitasi tugas/izin belajar.
4) Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD.
5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dilakukan melalui penerbitan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7) Penataan peraturan perundang-undangan, dimana produk hukum Pemerintah Kota Pekalongan dapat diakses melalui alamat https://jdih.pekalongankota.go.id.
8) Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan), dilakukan melalui sosialisasi dan diklat TOT pengembangan budaya kerja, penerapan nilai-nilai budaya kerja dan etika PNS, serta pembentukan kelompok budaya kerja pada setiap PD.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah dilakukan peningkatan SMM/sertifikasi ISO pada PD, terutama yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Beberapa PD yang telah memperoleh sertifikasi ISO yaitu : 1) ISO 9001:2008 oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 2) ISO 9001:2008 di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM); 3) ISO 9001:2008 oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu; 4) ISO 9001:2008 oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; 5) ISO 9001:2015 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 6) ISO 9001:2015 oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta; 7) ISO 9001:2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2018 mengalami lompatan 2 peringkat dari CC menjadi BB.

Pada Tahun 2020 hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan memperoleh nilai 73,07 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Rincian penilaian SAKIP disajikan dalam Tabel 2.158 berikut.

Tabel 2.158 Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2016	Nilai 2017	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020
1	Perencanaan Kinerja	**30**	15,05	19,95	24,42	24,53	24,70
2	Pengukuran Kinerja	**25**	9,48	10,39	17,07	17,54	17,92
3	Pelaporan Kinerja	**15**	9,65	8,56	10,46	11,09	11,17

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2016	Nilai 2017	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020
4	Evaluasi Internal	**10**	4,31	5,12	7,24	7,29	7,39
5	Capaian Kinerja	**20**	9,04	11,71	11,69	12,14	11,89
	Nilai SAKIP	**100**	**47,53**	**55,73**	**70,88**	**72,59**	**73,07**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**C**	**CC**	**BB**	**BB**	**BB**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2021

Upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga ditempuh dengan melaksanakan kajian terhadap kepuasan masyarakat terhadap Unit Pelayanan Publik (UPP). Survei Kepuasan Masyarakat adalah penggukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Pada Tahun 2020 Survei Kepuasan Masyarakat Kota Pekalongan mendapat nilai 80,42 dengan kategori Baik. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.159 berikut.

Tabel 2.159 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2020

Nama OPD		Nilai IKM	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	79,24	Baik
2	Dinas Kesehatan	82,18	Baik
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bendan	85,68	Baik
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	77,42	Baik
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	75,76	Kurang Baik
6	Satuan Polisi Pamong Praja	85,59	Baik
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81,99	Baik
8	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	79,98	Baik
9	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan KB	79,48	Baik
10	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	79,53	Baik
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Perlindungan Anak	83,19	Baik
12	Dinas Pertanian Dan Pangan	79,08	Baik
13	Dinas Lingkungan Hidup	75,91	Kurang Baik
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	79,44	Baik
15	Dinas Perhubungan	77,20	Baik
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	80,60	Baik
17	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	75,99	Kurang Baik
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	86,18	Baik
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga	78,75	Baik
20	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	78,51	Baik
21	Dinas Kelautan Dan Perikanan	78,00	Baik
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	83,98	Baik

Nama OPD		Nilai IKM	Keterangan
23	Badan Keuangan Daerah	78,63	Baik
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	81,54	Baik
25	Sekretariat DPRD	78,61	Baik
26	Inspektorat	80,19	Baik
27	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	78,15	Baik
28	Bagian Protokol dan Kompim Setda	84,67	Baik
29	Bagian Organisasi Setda	86,01	Baik
30	Bagian Umum Setda	81,89	Baik
31	Bagian Hukum Setda	84,23	Baik
32	Bagian PBJ dan Minbang Setda	80,38	Baik
33	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	81,94	Baik
34	Bagian Pemerintahan Setda	85,12	Baik
35	Kecamatan Pekalongan Utara	80,80	Baik
36	Kelurahan Kandang Panjang	81,37	Baik
37	Kelurahan Panjang Wetan	79,95	Baik
38	Kelurahan Panjang Baru	81,08	Baik
39	Kelurahan Krapyak	77,32	Baik
40	Kelurahan Padukuhan Kraton	80,66	Baik
41	Kelurahan Degayu	80,88	Baik
42	Kelurahan Bandengan	80,07	Baik
43	Kecamatan Pekalongan Selatan	80,92	Baik
44	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	81,62	Baik
45	Kelurahan Kuripan Yosorejo	87,17	Baik
46	Kelurahan Jenggot	79,13	Baik
47	Kelurahan Buaran Kradenan	77,02	Baik
48	Kelurahan Banyurip	79,52	Baik
49	Kelurahan Soko Duwet	80,53	Baik
50	Kecamatan Pekalongan Barat	79,60	Baik
51	Kelurahan Medono	78,14	Baik
52	Kelurahan Podosugih	80,37	Baik
53	Kelurahan Pasir Kraton Kramat	82,04	Baik
54	Kelurahan Tirto	81,09	Baik
55	Kelurahan Sapuro Kebulen	80,02	Baik
56	Kelurahan Bendan Kergon	79,16	Baik
57	Kelurahan Pringrejo	78,36	Baik
58	Kecamatan Pekalongan Timur	80,97	Baik
59	Kelurahan Kauman	83,22	Baik
60	Kelurahan Poncol	82,64	Baik
61	Kelurahan Klego	79,43	Baik
62	Kelurahan Gamer	78,93	Baik
63	Kelurahan Noyontaansari	80,85	Baik
64	Kelurahan Setono	80,16	Baik
65	Kelurahan Kalibaros	78,21	Baik
	Rata-rata IKM Kota Pekalongan	80,42	Baik

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2021

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Dari hasil penilaian Kemenpan RB tahun 2019, indeks reformasi birokrasi Kota Pekaongan yang dicapai adalah 68,97 dengan predikat "B". Dengan nilai tersebut, Kota Pekalongan berada pada peringkat kedua se-Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Adapun rincian komponen penilaian tersebut disajikan dalam Tabel 2.160 berikut.

Tabel 2.160 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2018-2019

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
I	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,33	2,47
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,46	1,62
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,51	3,47
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,84	2,90
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,11	10,52
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	5,08	5,07
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,15	5,62
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,63	3,65
	Total Komponen pengungkit (A)	**60,00**	**36,11**	**35,32**
II	Komponen Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	7,80	9,92
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,72	4,99
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,16	6,74
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,65	9,00
	Total Komponen Hasil (B)	**40,00**	**30,33**	**33,65**
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	**100,00**	**66,44**	**68,97**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2020

Tabel diatas menggambarkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi telah didukung dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan sehingga mampu mendorong terjadinya perubahan dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, ada perubahan dalam komponen penilaian. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi disajikan dalam Tabel 2.161 berikut.

Tabel 2.161 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A	**Komponen Pengungkit**		
	I. Pemenuhan	20,00	14,41
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,08

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
	III. Reform	30,00	18,88
Total Komponen Pengungkit		**60,00**	**39,37**
B	**Komponen Hasil**		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,08
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,25
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,58
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,63
Total Komponen Hasil		**40,00**	**29,54**
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		**100,00**	**68,91**

Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020, 2021

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang DPRD. Sekretariat DPRD membantu pencapaian kinerja DPRD, dimana yang menjadi indikator kinerja yaitu penetapan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) menjadi Perda (Peraturan Daerah). Usulan Raperda yang masuk ke Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) diupayakan untuk ditetapkan menjadi Perda. Pada tahun 2020, usulan Raperda yang masuk ke Propemperda sebanyak 15 Raperda yang terdiri dari 1 Raperda inisiatif dan 14 Raperda usulan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan pembahasan Raperda, tidak semua usulan Raperda menjadi Perda. Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah Raperda yang berhasil ditetapkan menjadi Perda yaitu sebanyak 7 Perda, terdiri dari 1 Perda inisiatif dan 6 Perda usulan Wali Kota.

2.3.5. Unsur Pendukung

1. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Periode RPJPD Kota Pekalongan yakni tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017. Sementara itu RPJMD tahun 2021-2026 yang saat ini sedang disusun merupakan RPJMD IV atas RPJPD Kota Pekalongan. Selanjutnya, dokumen RKPD sebagai perencanaan pembangunan tahunan disusun berdasarkan RPJMD.

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan, Bappeda Kota Pekalongan selalu berupaya tepat waktu sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahkan selalu berupaya melakukan percepatan-percepatan dari jadwal yang telah ditentukan.

Sebagai bentuk sinergitas dengan kebijakan Pusat dan Provinsi, dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan disusun dengan memperhatikan RPJP, RPJMN, RKP, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RKPD Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

2. Keuangan

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perda Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, Perda Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD. Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, *updating* data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diterima adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat memperoleh Opini WTP pada tahun berikutnya. Upaya ini membuahkan hasil pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dimana secara berturut-turut Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

3. Kepegawaian

Dalam upaya menggerakkan roda pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), ASN (Aparatur Sipil Negara) menduduki peran yang sangat penting. Peran ASN dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi

dengan level mulai dari tingkat pelaksana sampai eselon II (Pemerintah Kab/Kota), serta mempertimbangkan tingkat pendidikan.

Pada tahun 2019, jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sebanyak 3.142 orang, kemudian berkurang menjadi 2.956 orang di tahun 2020. Berkurangnya jumlah ASN dikarenakan adanya ASN yang pension dan beberapa meninggal dunia dikarenakan pandemi *COVID-19*.

Jumlah ASN menurut jabatan dan jenis kelamin disajikan dalam Tabel 2.162 berikut.

Tabel 2.162 Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2020

Jabatan	2019			2020		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Eselon II	22	6	28	23	4	27
Eselon III	69	34	103	70	35	105
Eselon IV	216	156	372	207	154	361
Fungsional Umum	681	406	1.087	627	378	1.005
Fungsional Tertentu	538	1.014	1.552	511	947	1.458
Jumlah Total	**1.526**	**1.616**	**3.142**	**1.438**	**1.518**	**2.956**

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Sedangkan jumlah ASN menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin disajikan dalam Tabel 2.163 berikut.

Tabel 2.163 Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2020

Jabatan	2019			2020		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sarjana/ doktor/ Ph.d	803	1.171	1.974	765	1.080	1.845
Diploma III/ Sarjana Muda	140	218	358	137	222	359
Diploma I, II	24	16	40	22	11	33
SMA/ Sederajat	383	202	858	342	174	516
SLTP/ sederajat	101	8	109	93	7	100
SD	75	1	76	61	0	61
Jumlah Total	**1.526**	**1.616**	**3.142**	**1.438**	**1.518**	**2.956**

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Upaya lain yang nantinya akan dilakukan yaitu dengan pengukuran indeks penerapan Sistem Merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan dari Sistem Merit antara lain :

a. Melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan SDM Aparatur secara berkelanjutan;
b. Memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara;
c. Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien;

d. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja;
e. Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi;
f. Memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin;
g. Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
h. Menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
i. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN;
j. Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi;
k. Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan;
l. Memberikan perlindungan kepada pegawai.

Adapun indikator yang digunakan dalam pengukuran indeks penerapan Sistem Merit menurut Pasal 134 Ayat (2) PP No. 11 tahun 2017 yaitu :

a. Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan;
b. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
c. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
d. Memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
e. Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
f. Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN;
g. Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;
h. Memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
i. Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN.

Pada tahun 2020, Indeks Sistem Merit Kota Pekalongan mencapai nilai 204 dengan metode penilaian mandiri (*self assessment*).

4. Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kapasitas SDM aparatur merupakan upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik, dilaksanakan melalui pengadaan CPNS; diklat formal (pengiriman tugas belajar dan pemberian izin belajar), diklat kader (bintek dan kursus), tes kompetensi (Quasi, PCAP, dan ujian kedinasan), kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan, pemberhentian dan pensiun serta pemutakhiran data.

Pemerintah Kota Pekalongan juga telah memfasilitasi pelaksanaan diklat aparatur. Diklat tersebut meliputi diklat teknis, fungsional, kepemimpinan dan prajabatan. Secara umum terjadi kecenderungan perkembangan jumlah aparatur yang mengikuti diklat. Dengan semakin banyaknya aparatur yang telah mengikuti diklat, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Secara detail disajikan dalam Tabel 2.164 berikut.

Tabel 2.164 Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Diklat	2016	2017	2018	2019	2020
Teknis	250	455	350	366	151
Fungsional	206	231	285	166	75
Kepemimpinan	35	5	52	8	1
Prajabatan	65	2	3	251	0

Sumber : BKPPD Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa untuk pelaksanaan diklat di Kota Pekalongan sangat fluktuatif disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Diklat prajabatan pada tahun 2019 mengalami kenaikan karena adanya pengangkatan CPNS pada tahun 2018 sejumlah 251 orang.

Di samping hal-hal tersebut di atas, dalam rangka pembinaan kepegawaian juga telah dilaksanakan pembinaan kepada aparatur yang akan memasuki masa pensiun/purna tugas. Dengan persiapan pensiun yang sebaik-baiknya diharapkan aparatur keseluruhan dapat bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk pembinaan terhadap aparatur yang akan pensiun tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan aparatur (*general check-up*) serta diklat persiapan pensiun/purna tugas. Hal ini didasarkan pada Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Jumlah ASN yang melakukan *general check-up* dan mengikuti diklat purna tugas terhitung fluktuatif, tergantung dari jumlah ASN yang akan memasuki masa pensiun. ASN yang melakukan *general check-up* tahun 2016 sebanyak 64 orang, tahun 2017 sebanyak 75 orang, tahun 2018 sebanyak 53 orang, tahun 2019 sebanyak 343 orang dan tahun 2020 sebanyak 11 orang. Sementara ASN yang mengikuti diklat purna tugas 2016 sebanyak 26 orang, tahun 2017 sebanyak 45 orang, tahun 2018 sebanyak 90 orang, tahun 2019 dan 2020 sebanyak 60 orang.

Tabel 2.165 Jumlah Aparatur yang Melakukan General Check-up dan Mengikuti Diklat Purna Tugas di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Jenis Pembinaan Memasuki Masa Pensiun	2016	2017	2018	2019	2020
General *Check-Up*	64	75	53	343	11
Diklat Purna Tugas	26	45	90	60	60

Sumber : BKPPD Kota Pekalongan, 2021

5. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memegang peranan penting sebagai problem solving permasalahan yang ada di daerah. Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam proses perumusan kebijakan dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah Riset Unggulan Daerah (RUD) dan fasilitasi Riset Bersama (Risber). RUD merupakan kegiatan fasilitasi pembiayaan riset yang mengarah kepada isu aktual dan strategis Kota Pekalongan, sedangkan fasilitasi Riset Bersama

merupakan salah satu upaya pengambilan keputusan dan kebijakan publik berbasis fakta dan bukti ilmiah yaitu dengan memperluas mitra kerja sama di bidang penelitian dan pengkajian.

RUD dilaksanakan berdasarkan seleksi oleh tim reviewer terhadap proposal yang sudah masuk. Pada tahun 2020, telah ditetapkan 5 pemenang sebagai berikut :

1. Universitas Diponegoro, dengan judul "Studi Potensi dan Penentuan Sumur Resapan Sebagai Upaya Pengendalian Banjir di Kota Pekalongan Berbasis Sistem Informasi Geografis";
2. Universitas Pekalongan, dengan judul "Strategi Mitigasi Pencegahan dan Penanggulangan *COVID-19* : Optimalisasi Peran Pentahelix di Kota Pekalongan Berdasar Pendekatan Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah";
3. STIMIK Widya Pratama Pekalongan "Meningkatkan Peranan Aparatur Pemerintah Tingkat RT dan RW dalam Dashboard Eksekutif untuk Memudahkan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Mengkoordinasi dan Memonitoring";
4. Universitas Selamat Sri, dengan judul "Desain Pendidikan Agama dalam Keluarga Guna Membangun Problem Solving Anak";
5. STIMIK Widya Pratama Pekalongan, dengan judul "Edukasi dan Mitigasi Bencana Banjir untuk Siaga Bencana di Kota Pekalongan".

Riset Bersama dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian melalui penunjukan langsung. Tema yang diusung dalam riset bersama berdasarkan usulan dari OPD atau kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan kebutuhan. Hasil riset bersama tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

1. Tim Peneliti Poltekkes, dengan judul "Megono Kaleng Kuliner Tradisional Kota Pekalongan";
2. CV. Monalisa Art, dengan judul "Studi Konsep Pengembangan Pekalongan Baru";
3. CV. Tunas, dengan judul "Road Map Percepatan Pengembangan Pariwisata Kota Pekalongan";
4. CV. Pijar Mulya Wasesa, dengan judul "Penelitian Analisis Investasi Penyertaan Modal Perumda Tirtayasa".

2.3.6. Unsur Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan meliputi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Tujuan ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan adalah :

(1) Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota;

(2) Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;

(3) Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui Pengawasan umum dan teknis yang dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara komprehensif dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

APIP melakukan penilaian kematangan/maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi itu. Tingkat kematangan SPIP Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai 2020 terus meningkat, diawali dari level 2 sampai level 3 dengan rincian sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.166 berikut.

Tabel 2.166 Tingkat Kematangan SPIP Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tingkat Maturitas SPIP	2016	2017	2018	2019	2020
Level	Level 2 infrastruktur penuh	Level 3 dengan catatan	Level 3 dengan catatan	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh

Sumber : Inspektorat Kota Pekalongan, 2021

2.3.7. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas daerah di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2016 – 2020 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib, meskipun masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain penganiayaan, pencurian, penipuan, dan narkotika. Pada tahun 2020 kasus tindak kejahatan narkotika dan psikotropika mengalami kenaikan. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.167 berikut.

Tabel 2.167 Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tindak Kejahatan	2016	2017	2018	2019	2020
Pembunuhan	0	0	1	0	2
Pemerkosaan	1	0	2	0	0
Penganiayaan	1	1	6	7	3
Pencurian	47	25	45	71	33
Penipuan	18	0	11	19	18
Penadahan	2	2	0	0	0
Narkotika dan Psikotropika	31	3	50	44	64

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2021

Kondusivitas wilayah juga dipengaruhi oleh terjadinya konflik sosial. Berbagai upaya preventif telah dilakukan dalam rangka mencegah potensi kerawanan sosial menjadi konflik sosial. Tabel 2.167 menunjukkan data konflik sosial di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.168 Jumlah Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kasus Konflik Sosial	14	1	2	1	1

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2021

Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka tindakan preventif agar tidak muncul konflik sosial. Pengelolaan potensi konflik sosial dilakukan melalui Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, antara lain dengan kegiatan Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar Dan Mahasiswa, Pembinaan Karakter Dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Bagi Aparatur, Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda, Pengawasan Orang Asing, Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial, dan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah.

2. Politik

Kondisi politik Kota Pekalongan dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Pembinaan politik dilakukan setiap akan diselenggarakan pemilihan umum. Oleh karena itu pada tahun 2016 dan 2017 tidak dilakukan kegiatan pembinaan politik karena pada tahun tersebut tidak ada pemilihan umum di Kota Pekalongan.

Tabel 2.169 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Kegiatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kegiatan pembinaan Politik Daerah	0	0	32	32	38

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2021

Tingkat partisipasi politik ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pamilu, baik Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah (Gubernur dan Wali Kota) dan Pemilu Legislatif. Pada tahun 2020 telah diadakan pemilihan Wlikota dan Wakil Wali Kota Pekalongan dengan tingkat partisipasi di Kota Pekalongan sebesar 79,35 persen.

Tabel 2.170 Tingkat Partisipasi Politik di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

JENIS PEMILIHAN UMUM	2016	2017	2018	2019	2020
Pemilu Kepala Daerah (Wali Kota) (persen)	-	-	-	-	79,35
Pemilu Kepala Daerah (Gubernur) (persen)	-	-	64,00	-	-
Pemilu Presiden (persen)	-	-	-	85,88	-
Pemilu Legislatif (persen)	-	-	-	85,51	-

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2021

3. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Sebagai upaya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2016-2020 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP. Kegiatan tersebut hanya dilaksanakan pada tahun 2016-2020 masing-masing sebanyak 1 kali pada tahun 2016, 2018 dan 2019. Sedangkan di tahun 2017 dilakukan sebanyak 2 kali dan 3 kali di tahun 2020.

Tabel 2.171 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2016 – 2020

Kegiatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	2	1	1	3

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2021

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan derajat daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin meningkat.

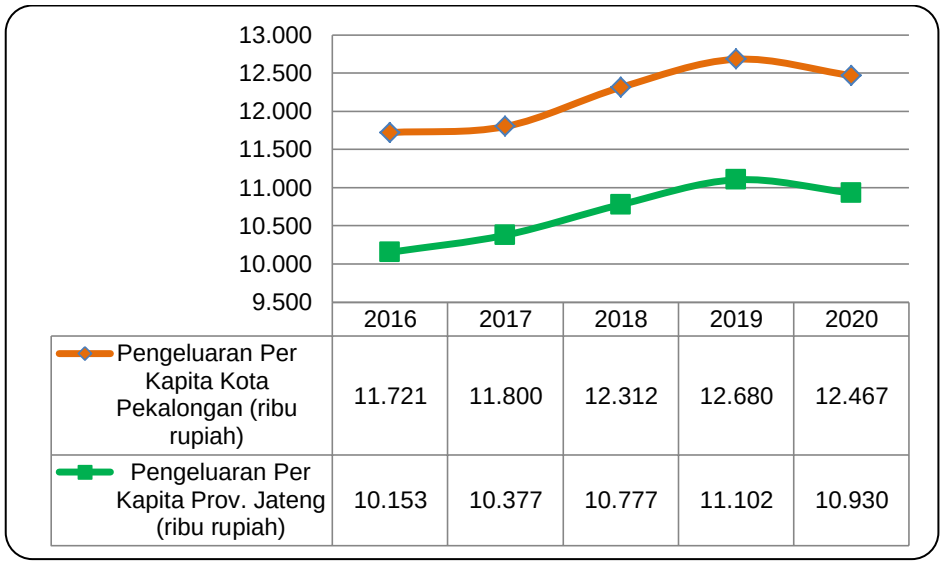

Gambar 2.52 Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2016-2020

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021

Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2016-2020. Hal ini terlihat dari pengeluaran riil per kapita per tahun (disesuaikan) Kota Pekalongan terus meningkat. Pada tahun 2015 pengeluaran per kapita Kota Pekalongan sebesar Rp.11.721.000. Di tahun 2017 berada di angka Rp.11.800.000, dan di tahun 2018 naik hingga Rp.12.312.000. Pada tahun 2019 pengeluaran per kapita Kota Pekalongan mencapai Rp.12.680.000 dan menurun sebesar Rp. 12.467.000 di tahun 2020. Gambar 2.47 menjelaskan pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai tahun 2020.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kendaraan. Di Kota Pekalongan, jumlah kendaraan cukup fluktuatif (baik

kendaraan roda dua, roda tiga, dan roda empat/lebih), dimana sepanjang tahun 2016 sampai 2020 jumlanya naik turun. Adapun penambahan panjang jalan raya baik jalan negara, jalan provinsi dan jalan kota secara agregat tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Namun demikian rasionya tidak berubah signifikan. Kondisi selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.172.

Tabel 2.172 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
2016	155,44	182.944	0,0008
2017	155,44	147.135	0,0008
2018	155,44	157.332	0,0009
2019	155,44	163.989	0,0009
2020	153,41	173.114	0,0009

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan dalam Angka 2021, 2021

2. Jumlah Orang yang Melalui Terminal Per Tahun

Di Kota Pekalongan terdapat terminal tipe A yang dapat dimanfaatkan sebagai terminal untuk bis antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi dan dalam kota. Sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan atas Terminal Type A ada di Pemerintah Pusat. Jumlah orang yang melalui terminal Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2018, yaitu dari 1.912.577 penumpang menjadi 1.938.614 penumpang. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1.876.174 penumpang. Kemudian mengalami penurunan jumlah penumpang yang cukup drastis di tahun 2020 menjadi 771.497 penumpang. Adapun perkembangannya disajikan dalam Gambar 2.53 berikut.

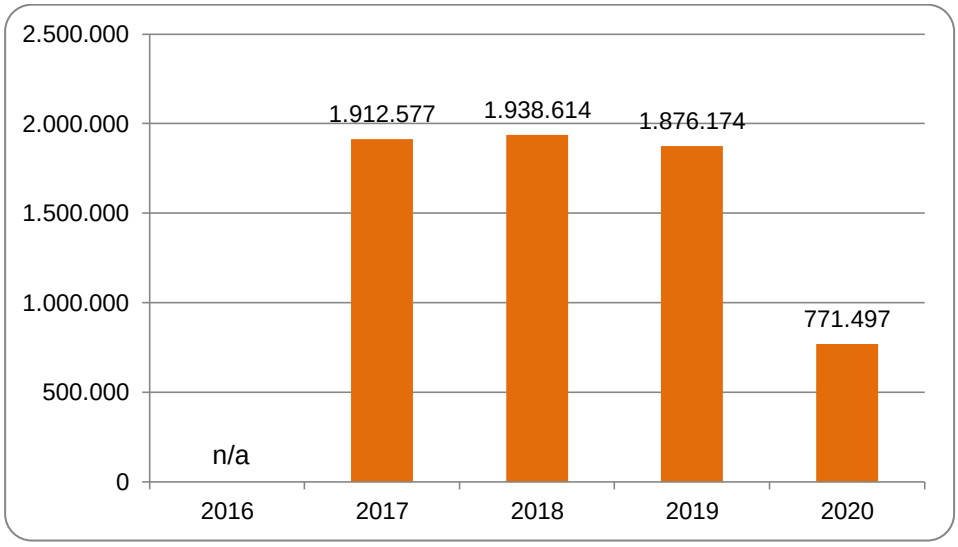

Gambar 2.53 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

3. Jumlah Penumpang yang Naik Melalui Stasiun Kereta Api

Sebagai salah satu kota utama di Jawa Tengah, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomiannya melalui kunjungan yang dilakukan orang luar daerah. Penggunaan moda transportasi darat seperti kereta api menjadi salah satu moda yang paling digemari karena lebih mudah, cepat dan memiliki ketepatan waktu lebih tinggi serta letak Stasiun Besar Pekalongan yang berada di kawasan pusat kota. Di samping itu, fasilitas hotel yang dekat dengan stasiun memudahkan penumpang mencari tempat beristirahat.

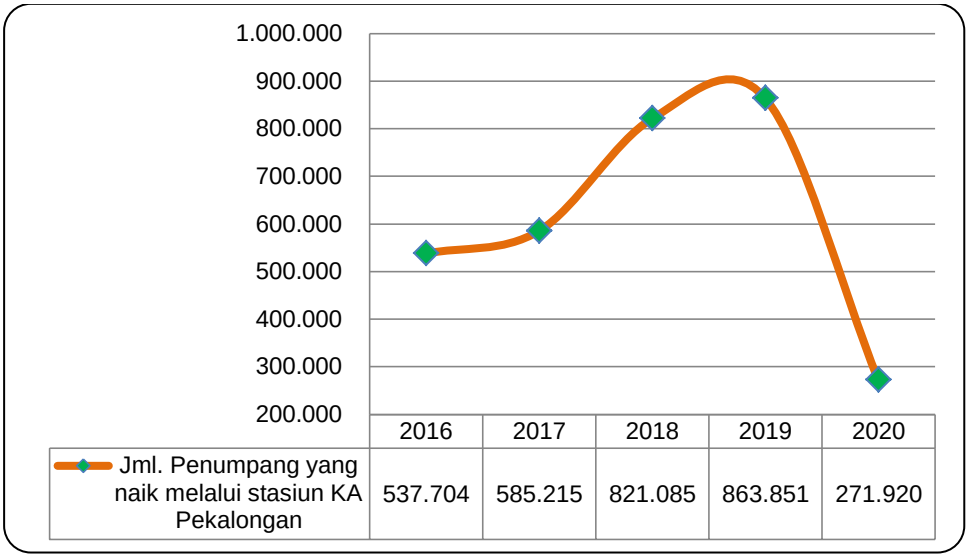

Gambar 2.54 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Jumlah penumpang yang melalui Stasiun Pekalongan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seperi yang disajikan dalam Gambar 2.54. Tahun 2016 jumlah orang yang naik melalui stasiun sebanyak 537.704 penumpang. Dalam kurun waktu 2016-2019 terus mengalami peningkatan sehingga jumlah penumpang yang naik melalui stasiun pada tahun 2019 sebanyak 863.851 penumpang. Namun jumlah penumpang menurun drastis di tahun 2020 sebanyak 271.920 penumpang. Hal ini disebabkan adanya larangan bepergian keluar daerah karena adanya pandemi *COVID-19*.

Kondisi seperti yang diuraikan di atas menggambarkan peranan moda transportasi kereta api yang saat ini lebih menjadi pilihan masyarakat yang menuju/dari Kota Pekalongan, dibandingkan angkutan umum lainnya yaitu yang menggunakan moda transportasi bus. Pengembangan moda transportasi bus agar lebih dapat berkompetisi ke depan, membutuhkan penyediaan prasarana jalan regional dengan kapasitas yang memadai sehingga perjalanan menjadi lancar serta membutuhkan dukungan fasilitas terminal bus, apalagi di Kota Pekalongan terdapat terminal tipe A yang mulai tahun 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

4. Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih

Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan air bersih di Kota Pekalongan. Dari tahun ke tahun rasio rumah tangga yang terlayani kebutuhan air bersih semakin bertambah, meskipun belum 100 persen terlayani. Pada tahun 2016, rumah tangga yang menggunakan air bersih sebanyak 85,89 persen, pada tahun 2017 menurun menjadi 84,17 persen, dan

meningkat dengan kondisi akhir di tahun 2018 sebesar 86,17 persen, 88,60 persen di tahun 2019 dan di tahun 2020 rasionya menjadi 88,79 persen. Data selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.55 berikut.

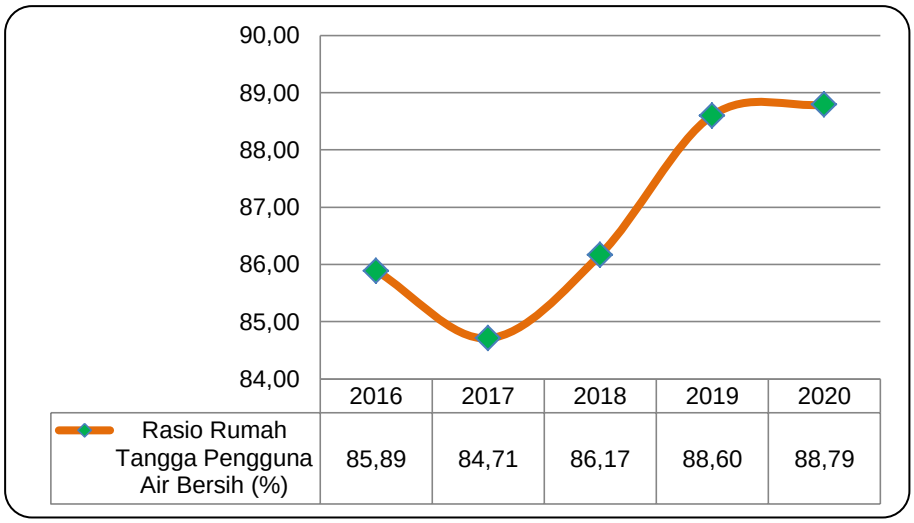

Gambar 2.55 Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2021

Di Kota Pekalongan, layanan air bersih disediakan oleh PDAM dan Pamsimas. Pada tahun 2020, jumlah sambungan rumah (SR) yang menggunakan PDAM dengan air bawah tanah sebanyak 19.120 SR menurun dari 22.160 SR ditahun 2019, sedangkan jumlah sambungan rumah (SR) yang menggunakan Pamsimas dan sumur (Dana Alokasi Khusus) sebanyak 21.663 SR. Dengan demikian total SR yang menggunakan air bawah tanah pada tahun 2020 sebanyak 40.783 SR menurun dibanding tahun 2019 yaitu sebanyak 44.093 SR. Dengan jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2020 sebanyak 307.150 jiwa, jika diasumsikan bahwa 1 SR digunakan untuk 5 orang maka total kebutuhan SR untuk seluruh penduduk yaitu sebanyak 61.430 SR. Sehingga persentase sambungan rumah (SR) yang menggunakan air bawah tanah pada tahun 2020 sebesar 66,39 persen. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.173 berikut.

Tabel 2.173 Penggunaan Air Tanah Untuk Kebutuhan Sambungan Rumah (SR) di Kota Pekalongan Tahun 2019-2020

Tahun	SR dari PDAM	SR dari PAMSIMAS dan Sumur	Jumlah SR pengguna air bawah tanah	Jumlah kebutuhan SR	Persentase penggunaan air tanah untuk kebutuhan sambungan rumah
2019	22.160	21.933	44.093	61.419	71,79
2020	19.120	21.663	40.783	61.430	66,39

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan (diolah), 2021

5. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Listrik di Kota Pekalongan disediakan oleh PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan distribusi listrik di area pelayanan Pekalongan. Kebutuhan yang terus meningkat, meningkatkan konsumsi listrik masyarakat Kota Pekalongan dari tahun ke tahun. Kebutuhan listrik di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun berfluktuasi. Konsumsi listrik selama lima tahun terus meningkat. Apabila tahun 2016 sebesar

261,74 MWh, maka pada akhir tahun 2020 sebesar 276,51 MWh. Berikut gambaran kebutuhan listrik Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020.

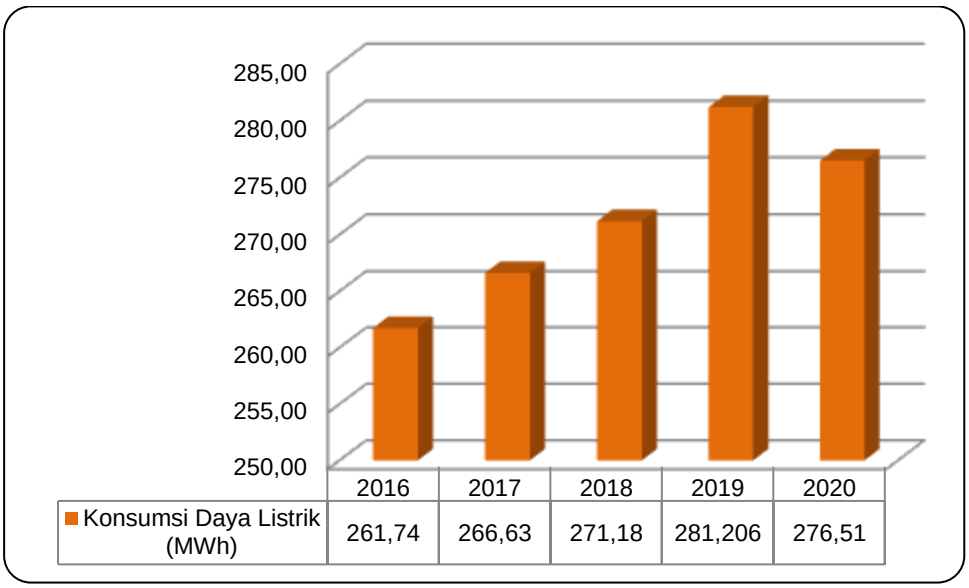

Gambar 2.56 Ketersediaan Listrik di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

6. Persentase Pengguna Listrik

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik bertambah sepanjang tahun 2016-2020 sehingga meningkatkan konsumsi listrik di Kota Pekalongan. Jumlah pengguna listrik berdasarkan data BPS selama lima tahun terakhir menunjukkan bertambahnya jumlah pelanggan PLN, terdiri dari pelanggan rumah tangga dan pelanggan non rumah tangga seperti kantor, badan usaha atau pelanggan lain. Persentase jumlah pelanggan PLN pada tahun 2016 sebesar 112,86 persen. Jumlah tersebut terus naik hingga mencapai 121,44 persen pada tahun 2019. Secara lengkap disajikan dalam Tabel 2.174 berikut.

Tabel 2.174 Persentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Pengguna Listrik	Jumlah RT	Persentase Pengguna Listrik
2016	83.868	74.313	112,86
2017	86.740	74.970	115,70
2018	89.686	75.618	118,60
2019	92.622	76.269	121,44
2020	95.313	84.296	113,07

Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2021

7. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/ Hotel

Jumlah hotel di Kota Pekalongan saat ini cukup memadai. Tingkat okupansi tahun 2019 sebesar 75 persen, sangat memadai sebagai daerah tujuan wisata bagi Kota Pekalongan dan sekitarnya. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017-2020 jumlah hotel berbintang, baik bintang 1, 2,dan 3 sebanyak 10 (sepuluh) hotel. Sedangkan hotel melati berjumlah 20 (dua puluh) hotel. Tersedianya berbagai pilihan hotel maka berpeluang bagi pengembangan kepariwisataan di

wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Karena tantangan kepariwisataan, di samping membutuhkan obyek dan daya tarik wisata maka kebutuhan utama lainnya adalah tersedianya akomodasi yang *representative* salah satunya yakni hotel.

Tabel 2.175 Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Akomodasi	2016	2017	2018	2019	2020
Hotel Berbintang	9	10	10	10	10
Hotel Non Berbintang	22	18	20	20	25

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2021, 2021

2.4.3. Fokus Iklim Investasi

1. Lama Proses Perijinan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2018 Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Penyelenggara PTSP di Kota Pekalongan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang bertujuan untuk : memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) pelayanan pemberian izin dan lama proses permohonan izin, berbeda-beda sesuai dengan jenis izinnya. Sampai dengan tahun 2018, telah dibuka layanan perijinan untuk 83 jenis ijin, dimana lama proses perijinan bervariasi antara rentang waktu 2-12 menit. Dengan adanya SOP lamanya proses perijinan, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya memberikan jaminan kepastian waktu proses perijinan.

2. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Iklim investasi di suatu daerah sangat ditentukan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan investasi/usaha. Kebijakan itu terutama dalam bentuk peraturan daerah yang terkait penciptaan iklim usaha yang kondusif. Paling tidak tercatat 16 Perda yang mendukung penciptaan iklim usaha kondusif di Kota Pekalongan tersebut, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.176 berikut.

Tabel 2.176 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

No	Nomor Perda	Tahun	Tentang
1	3	2009	Bangunan Gedung
2	12	2011	Pajak Reklame
3	30	2011	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029
4	28	2011	Rumah Pemotongan Hewan Dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan
5	10	2011	Pajak Sarang Burung Walet
6	13	2012	Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
7	20	2012	Perizinan Dan Sertifikat Bidang Kesehatan
8	8	2012	Penanaman Modal

No	Nomor Perda	Tahun	Tentang
9	15	2015	Penyelenggaraan Rumah Kos
10	13	2015	Penyelenggaraan Perhubungan
11	16	2015	Penyelenggaraan Usaha Warung Internet
12	11	2017	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
13	13	2018	Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	1	2018	Izin Usaha Industri
15	7	2018	Penyelenggaraan Pendidikan
16	19	2019	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Sumber : DPMPTSP Kota Pekalongan, 2021

3. Nilai Investasi

Pemerintah Kota Pekalongan terus mendukung upaya pencapaian realisasi investasi dari tahun ke tahun melalui berbagai kebijakan dan aturan. Dengan keterbatasan wilayah dan sumber daya alam, Kota Pekalongan juga berusaha menciptakan kondisi daerah yang pro investasi yaitu dengan menguatkan perekonomian di sektor jasa dan perdagangan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kota Pekalongan. Dan berikut disajikan data perkembangan investasi di Kota Pekalongan.

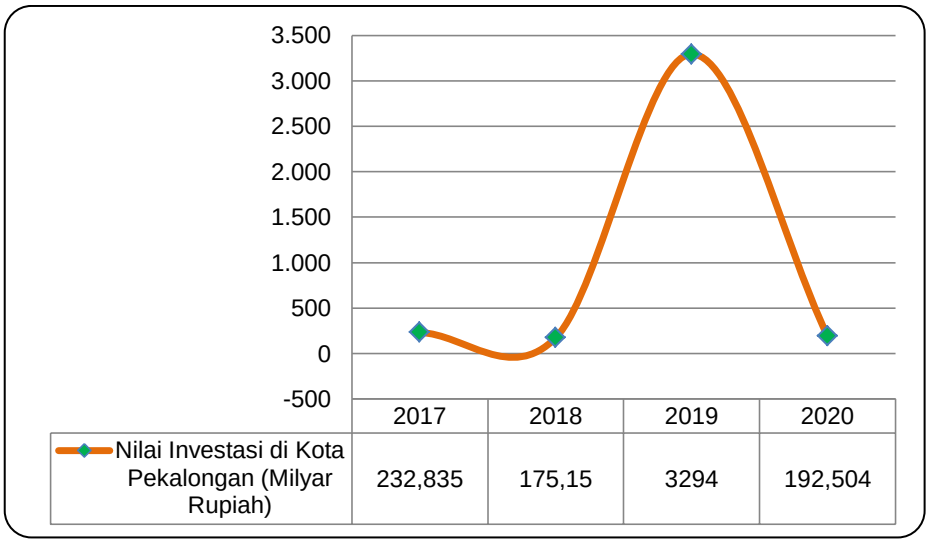

Gambar 2.57 Perkembangan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2017-2020

Sumber : DPMPTSP Kota Pekalongan, 2021

4. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dihitung per 10.000 penduduk, dimana secara garis besar angka kriminalitas di Kota Pekalongan bersifat fluktuatif, mengalami naik turun sepanjang lima tahun terakhir seperti yang disajikan dalam Gambar 2.58 berikut.

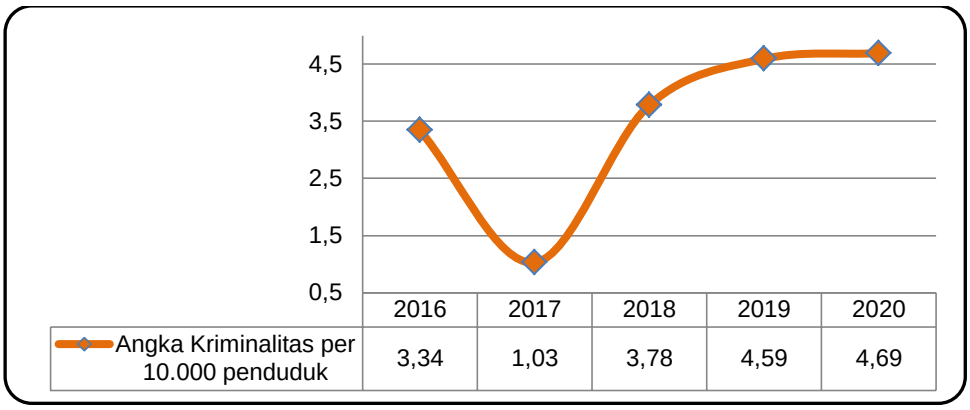

Gambar 2.58 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2021

Meskipun demikian, kondusivitas di Kota Pekalongan masih terkendali sehingga masih menguntungkan bagi kehidupan masyarakat sehingga dapat lebih aman dan nyaman serta berimplikasi bagi pengembangan investasi.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan (persentase) penduduk usia 0-14 dan di atas 65 dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15-64). Dalam kurun waktu 2016 – 2020 rasio ketergantungan Kota Pekalongan terus menurun. Pada tahun 2016 rasio ketergantungan penduduk di Kota Pekalongan sebesar 42,88 dan pada tahun 2020 menjadi 41,25.

Dengan kecenderungan angka yang semakin menurun menandakan beban yang harus ditanggung oleh usia produktif menjadi semakin sedikit. Kondisi ini sebenarnya merupakan fenomena umum yang terjadi secara nasional yaitu adanya bonus demografi. Bonus demografi ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi permasalahan ke depan. Data secara rinci disajikan dalam Gambar 2.59 berikut.

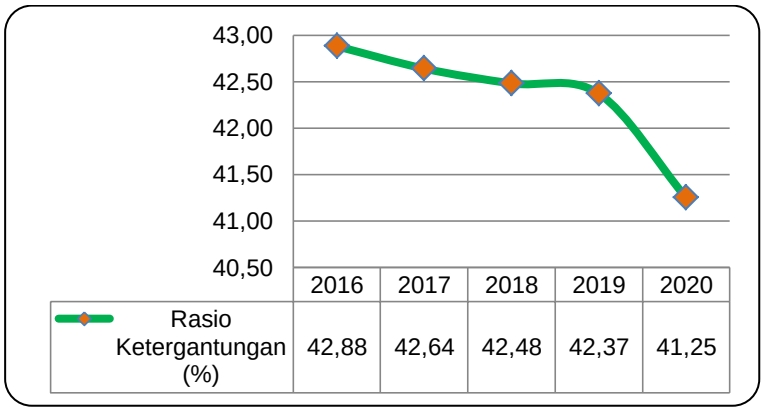

Gambar 2.59 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2021, 2021

2.4.5. Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Sistem Inovasi Daerah merupakan suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan, dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar stakeholders pembangunan daerah. Sistem Inovasi Daerah juga dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong Sistem Inovasi Daerah yang ada di daerahnya, sehingga terbentuk keselarasan dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, yang dimaksud inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan dari Inovasi Daerah tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun bentuk inovasi daerah menurut Peraturan Pemerintah dimaksud yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berikut inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

Dalam hal inovasi tata kelola Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam membangun dan mengembangkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, atau lebih dikenal dengan istilah *e-Government*. Infrastruktur jaringan (disebut Batiknet) serta berbagai aplikasi telah dibangun sejak tahun 2008 dan terus dikembangkan hingga sekarang. Hampir semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkoneksi jaringan Batiknet, baik menggunakan serat optik maupun radio *wireless*. Lebih dari 50 SIM (Sistem Informasi Manajemen)/aplikasi telah dibangun guna mendukung tata kelola yang lebih baik.

Pada tahun 2018, beberapa SIM/aplikasi dibangun/dikembangkan sebagai bentuk inovasi tata kelola, antara lain sebagai berikut :

a. Penambahan fitur peta lokasi pada SIMRAL (SIM Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi). Hal ini bertujuan untuk menentukan lokasi yang akan menjadi objek pembangunan, misalnya lokasi pembangunan jalan. Dengan adanya fitur ini diharapkan dapat meminimalisir penyimpangan antara perencanaan dengan realisasi di lapangan.
b. Penambahan fitur evaluasi pada SIMRAL. Fitur ini berfungsi untuk mendukung SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
c. Pembangunan aplikasi *Pekalongan Smart Creative City*. Aplikasi ini berbasis android, berisikan berbagai macam aplikasi yang telah dibangun sebelumnya (baik aplikasi untuk internal Pemerintah Kota Pekalongan maupun aplikasi untuk layanan publik), serta fitur-fitur baru yang dikembangkan. Dengan aplikasi *Pekalongan Smart Creative City* ini semua informasi yang berkaitan dengan Kota Pekalongan dapat diakses dengan lebih cepat dan lebih mudah.

d. Pembangunan aplikasi PUSAKA. Aplikasi ini merupakan salah satu wujud dari pengelolaan satu data terpadu Kota Pekalongan. Dengan SIM/aplikasi diharapkan dapat menjadi portal pengelolaan satu data terpadu, sehingga tidak ada lagi perbedaan data atas jenis data yang sama. Selain itu, data yang ada nantinya akan dapat diolah dan diintegrasikan.
e. Integrasi data pendidikan. Integrasi ini mencakup data pendidikan Kota, Kemenag, dan data kependudukan. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengelolaan data siswa yang merupakan penduduk Kota Pekalongan, sebagai data dasar untuk perencanaan pembangunan bidang pendidikan, misalnya pemberian beasiswa agar tepat sasaran.

Inovasi tata kelola lainnya adalah pengendalian administrasi kegiatan, yaitu dengan membubuhkan paraf pengendali program (Kepala Bidang) di lembar A2. Hal ini dilakukan sebagai tindaklanjut atas hasil evaluasi tahun sebelumnya, dimana Kepala Bidang tidak melakukan pengecekan terhadap administrasi kegiatan, yang secara otomatis tidak dapat mengendalikan program sepenuhnya. Atas dasar itulah maka mulai tahun 2019 Kepala Bidang sebagai pengendali program harus membubuhkan paraf sebagai bukti telah mengecek administrasi kegiatan.

2. Inovasi Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima dan dituntut untuk terus melahirkan inovasi-inovasi. Begitu halnya dengan Pemerintah Kota Pekalongan yang berupaya membuat inovasi-inovasi untuk pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir, antara lain sebagai berikut :

a. P21 (Puskesmas 21) atau Pusdalu (Puskesmas Buka Sampai Dalu). Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kesehatan telah membuka beberapa Puskesmas sampai jam 21.00 atau jam 9 malam, diantaranya Puskesmas Tirto, Puskesmas Noyontaan, Puskesmas Jenggot dan Puskesmas Dukuh. Layanan ini sudah dimulai tahun 2017 dan masih berlangsung hingga sekarang. Hal ini dilakukan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan pada malam hari.
b. Layanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) dibuka 6 hari (senin-sabtu). Pada dasarnya hari kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya 5 hari kerja (Senin-Jumat). Namun demikian layanan kependudukan dan pencatatan sipil dibuka sampai hari Sabtu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta upaya percepatan untuk mencapai target kinerja Dindukcapil.
c. Aplikasi *Pekalongan Smart Creative City* berbasis android. Aplikasi ini tidak hanya memuat layanan untuk internal Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi juga menyediakan portal layanan informasi publik seperti kesehatan, pendidikan, SPBU, ATM dan Bank, kuliner, property, hotel dsb. Dengan layanan ini masyarakat dimudahkan dengan ketersedian berbagai informasi dalam satu aplikasi.
d. SMS LBA (*Location Based Advertising*). Merupakan metode pengiriman SMS dengan memanfaatkan informasi lokasi keberadaan telepon seluler sesuai cakupan BTS provider. Inovasi ini dilakukan dalam rangka merespon adanya jalan Tol Trans Jawa yang melintasi Kota Pekalongan dimana para pengendara tidak lagi masuk ke Kota Pekalongan. Untuk menarik minat para pengendara tersebut, digunakan SMS LBA berisi berbagai informasi yang disebarkan kepada pengguna ponsel sebelum masuk Kota Pekalongan. Dengan strategi ini diharapkan para pengguna jalan akan transit di Kota Pekalongan untuk menikmati wisata dan berbagai layanan lainnya.

e. Sistem Informasi Kodifikasi Regulasi Perizinan Terpadu (SIKAREP) adalah sebuah sistem informasi penunjang pelayanan publik yang digunakan di DPMPTSP Kota Pekalongan yang bertujuan untuk mempermudah bagi pemohon izin yang ingin mengetahui tentang regulasi-regulasi produk pelayanan perizinan. Sikarep sangat membantu pemohon izin untuk mengetahui regulasi tanpa harus bertanya kepada petugas informasi. karena SIKAREP didesain mudah untuk digunkan oleh user (*user friendly*). Bahkan pemohon izin yang ingin menggunakan SIKAREP tidak harus datang ke kantor DPMPTSP untuk mengoperasikanya karena SIKAREP sudah dapat diakses melalui koneksi internet di alamat berikut :sikarep.pekalongankota.go.id sehingga SIKAREP dapat diakses dimana saja bahkan bisa menggunakan smartphone selama masih terkoneksi dengan internet.

f. PETROC [*PEKALONGAN TRADING ONLINE CREATIVITY*] LAYANAN CYBER UMKM. Perkembangan *Online Marketing* di Indonesia sangat cepat. Perubahan gaya hidup masyarakat, telah menggeser pola jual beli di pasar konvensional. Masyarakat yang semula melakukan transaksi jual beli di pasar Konvensional, kini telah banyak beralih ke pasar dunia maya (*Online*). Beberapa pasar elektronik di Jakarta melakukan penutupan kios-kiosnya. Banyak pasar yang tutup dikarenakan penjualannya menurun. Ada juga butik batik asal Pekalongan yang terpaksa menutup beberapa tokonya di Jakarta. Selama mudik lebaran 2016, penjualan di pasar batik Grosir Setono mengalami penurunan yang sangat drastis. Penjualan menurun hingga 30 persen dibanding tahun sebelumnya. Melihat kemungkinan bertambah buruknya iklim perekonomian di Pekalongan, terutama dari sektor UMKM, Dindagkop Kota Pekalongan berinisiatif membuat layanan khusus UMKM. Layanan tersebut berupa edukasi dan transformasi cara berjualan. Dari yang semula berjualan secara konvensional, dialihkan menjadi berjualan *Online*. Layanan Cyber UMKM ini diberi nama PETROC (Pekalongan *Trading Online* Creativity). Dindagkop Kota Pekalongan membuat tim layanan, yang bertugas memberikan wawasan, pembelajaran tentang Internet Marketing.

g. DAYA LEKAT (swaDAYA LElang masyaraKAT). Pudarnya “Sambatan” atau yang disebut juga gotong-royong merupakan latar belakang munculnya inovasi swadaya lelang masyarakat sebagai wadah untuk melestarikan budaya gotong-royong agar tetap terjaga yang beriringan dengan program pengentasan kemiskinan. Dimana program tetap berjalan dan gotong royong masyarakat dapat dibangkitkan kembali, karena roh dari pemberdayaan ialah gotong royong. *Output* dari pelaksanaan lelang swadaya antara lain; terbangunnya budaya swadaya dimana pelaksana kegiatan ialah lembaga masyarakat yang berhasil mengajukan swadaya tertinggi, karena besarnya nilai swadaya masyarakat merupakan salah satu indikator potensi pembangunan di Kelurahan; terjaganya nilai kebersamaan atau gotong-royong; membangun masyarakat yang lebih sejahtera, mampu, mandiri secara sinergi, partisipatif dan terpadu berdasarkan nilai-nilai religiusitas; pengelolaan pasca kegiatan, karena masyarakat merasa ikut terlibat dalam pembangunan. Sehingga ikut serta dalam merawat atau menjaga hasil pembangunan yang telah dilaksanakan; Efisiensi dana pemerintah dan luasnya jangkauan pembangunan berbasis masyarakat, dengan adanya swadaya masyarakat ikut berperan dalam menambah volume kegiatan.

h. SIMPATIKK adalah Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara *Online* (Jaringan Internet dan Intranet) untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada warga kelurahan yang diintegrasikan dengan pelayanan di kecamatan dan dengan data base kependudukan (E-KTP) di Dindukcapil serta menggunakan teknologi dan tata kelola Tanda Tangan Elektronik. SIMPATIKK

terselenggara bekerjasama dengan Dinkominfo Kota Pekalongan sebagai dinas teknis.

i. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan hak bagi semua masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut untuk mempermudah pemohon informasi tidak harus data dengan mengisi lewat *online* aplikasi ppid.pekalongankota.go.id lalu mengisi Pemohon Informasi. Dalam hal pemohon informasi tidak dibatasi dan proses pelaksanaan sudah diatur dalam Perwal Nomor 555/126 Tahun 2017. Semua permohonan informasi akan diproses asal tanda dukung KTP dalam bentuk scanning sama dengan pemohon. Adapun kemudahan lainnya akan disediakan member yang telah membutuhkan aplikasi ini, agar lebih cepat dan mudah. Selain dari sisi pengguna juga dari sisi penyedia informasi untuk OPD Kota PEkalongan dan jajarannya agar selalu mengisi data informasi yang telah ditetapkan sebagai standar penyedia informasi lewat user dan login pengisian yang telah didaftarkan. Adapun monitoring evaluasi yang dilakukan setiap semester sekali untuk dilakukan evaluasi oleh Lembaga PPID yang terdiri dari Wali Kota (penanggungjawab Dinkominfo), Lembaga Pattiro, Perguruan Tinggi dan LSM. Diadakan desk bagi yang belum mengisi informasi yang harus dipenuhi agar informasi selalu update dan tercukupi. Dari proses kerja penyedia informasi dan pengguna informasi, aplikasi ini terhubung ke tapd.pekalongankota.go.id (merupakan Transparansi Pengelolaan Anggaran) Proses permohonan informasi setiap tahap bisa dilacak sehingga pemohon mengetahui secara langsung surat berjalan. Selain itu sistem juga terhubung dengan twitter @kipprovjateng, twitter @pkl_diskominfo dan twitter @pemkotpkl juga dengan website pekalongankota.go.id.

j. PAPERLESS OFFICE. Istilah kantor berhubungan dengan kertas dan berkas, sehingga di zaman serba elektronik perlu memanfaatkan elektronik sebagai sarana yang tidak harus membutuhkan kertas banyak dan tenaga kurir banyak. Untuk itu disusunlah *e-paperless* sebagai surat sekali klik berjalan sampai ke sasaran lewat media elektronik berbasis android. Tentunya ada surat masuk dan surat keluar. Surat masuk diterima agendaris lalu ke Kepala Unit kemudian di disposisi kembali ke agendaris dan dibagikan ke alamat tujuan. Sedangkan surat keluar membuat surat lalu digandakan/dicopi untuk di cap basah lalu dibuatkan tanda terima dan dikirim sesuai alamat, hal ini bisa memakan berhari-hari apalagi yang jauh alamatnya sehingga proses ini selain memakan waktu banyak juga pemborosan kertas otomatis anggaran (dalam bentuk kertas, tinta disposisi dan biaya transport). Semua itu sudah dirancang sesuai dengan aturan yang sudah berlaku sehingga tidak mempersulit operator yang pemula surat diterima atau belum akan kelihat warna tulisan dan dimanapun berada selaku pimpinan yang mendisposisi surat akan mendistribusikan/memerintahkan kebawahnya untuk menindaklanjuti yang hanya makan waktu hitungan detik sekali klik asal surat sudah terbaca. Demikian Kota Pekalongan sudah menerapkan dan keunggulan lainnya unit kerja dan Kepala atau pejabat dibawahnya sudah *by job* dan *by name* yang terintegrasi langsung dengan database SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) sehingga apabila sudah dilantik sehingga pejabat yang menduduki sudah berganti nama sesuai dengan kondisi pejabat yang baru.

k. iPekalongankota (Perpustakaan Digital Berbasis Media Sosial). Di era globalisasi, informasi telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Pemanfaatannya telah merambah ke seluruh aspek kehidupan tidak terkecuali di bidang perpustakaan yang penyampaiannya telah sedemikian canggihnya sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi. Penerapan aplikasi multimedia pada teknologi informasi memungkinkan pengguna perpustakaan mendapat informasi yang diperlukannya dalam bentuk informasi maya (*virtual*

information) secara mudah dan cepat tanpa batasan ruang serta waktu. iPekalongankota perpustakaan digital berbasis media sosial menjawab kebutuhan masyarakat akan kebutuhan informasi. Diluncurkan pada bulan april tahun 2018 oleh Wali Kota pekalongan sampai dengan saat ini aplikasi sudah sangat berkembang. Beberapa keunggulan iPekalongan adalah :

1. Buku digital gratis;
2. Aplikasi berbasis android & dekstop sehingga *user friendly*;
3. Metode 2 arah penyampaian informasi, karena setiap anggota dapat berinteraksi;
4. Menunjang koleksi perpustakaan sekolah;
5. Penerbitan karya tulis dalam bentuk digital;
6. Menyelamatkan infromasi konten lokal daerah.

l. Aplikasi Pendaftran BeMO (Bendan Mobile). Peningkatan jumlah pengguna jasa kesehatan di RSUD Bendan Kota Pekalongan selalu menunjukan tren kenaikan dari tahun 2009 hingga tahun 2018, hal ini disebabkan oleh tingkat kepuasan pasien rawat jalan yang meningkat setiap tahun. Dengan adanya peningkatan jumlah pasien perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan rawat jalan, hal ini perlu dilakukan untuk memberikan peforma pelayanan yang baik dan memudahkan pelayanan,baik dari pelayanan kesehatan,pelayanan adminisrasi dan pelayanan penunjang lainnya. Sejak awal berdiri pelayann rawat jalan meningkat berbagai kualitas pelayanan,mula dari penambahan dokter speialis, peningkatan kompetensi tenaga medis, peningkatan administrasi dll. Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai masalah dalam pelayanan mulai timbul, sebagai contoh pada pendaftran pasien rawat jalan yang menggunakan nomor antrian konvensional, ternyata menimbulkan banyak permasalahan seperti psien harus antri pada dini hari untukmendapatkan nomer pendaftaran hari berikutnya, adanya calo nomer antrian yang merugikan pasien. Dengan adanya permasalahannya tersebut,pihak menajemen RSUD Bendan menghadirkan inovasi peayanan pendaftran rawat jalan via SMS yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah, seiring perkembangan jalan, sistem SMS dikembangkan menjadi pelayanan berbasis Android, dimana pelayanan ini akan memberikan informasi tambahan yang lengkap, seperti nomor antrian, riwayatperiksa, jadwal dokter yang real time, dan bisa daftar di rumah, pasien cukup melakukan pendaftran dan cetak SEP BPJS Kesehatan, karena semua telah dilakukan secara *online*.

3. Inovasi Daerah Lainnya

Pemerintah Kota Pekalongan tidak hanya dituntut menciptakan inovasi dalam hal tata kelola dan pelayanan publik, tetapi juga harus bisa mendorong masyarakat untuk turut serta dalam menciptakan inovasi-inovasi yang bermanfaat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan lomba Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) yang diadakan setiap tahun. Pada tahun 2020, terdapat 5 (lima) pemenang Krenova sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.177 berikut.

Tabel 2.177 Inovasi Daerah Lainnya

No.	Judul Inovasi	Nama Pengusul	Inovasi yang diusulkan
1.	Kran Air Cuci Tangan Tangkal *COVID-19* (Kran Air Robotic Menggunakan Sistim Sensor Ultrasonik)	Benni Ismail	Inovasi yang diciptakan dalam menghadapi masa pandemi *COVID-19* dengan membuat Kran Air Cuci Tangan tanpa harus menyentuh kran, tetapi cukup menggunakan sistem sensor ultrasonik

No.	Judul Inovasi	Nama Pengusul	Inovasi yang diusulkan
2.	Pertanian Apung sebagai Alternatif Budidaya Pertanian dan Ekowisata Terpadu Pada Lahan Terdampak Banjir dan Rob di Kampung Iklim RW 09 Kelurahan Gamer Kota Pekalongan	Pokja Proklim Gamer	Inovasi yang diciptakan dalam pemanfaatan lahan terdampak banjir untuk Budidaya Pertanian Apung dan Ekowisata terpadu yang dapat menciptakan lokasi wisata baru di Kota Pekalongan
3.	Kaori-dama: Si Penyejuk Mata Bikin Harum Ruangan (sebuah inovasi Florikultura dengan memanfaatkan limbah serbuk kayu)	Fla Gardenia	Inovasi yang diciptakan dalam menggabungkan konsep tanaman hias yang bisa digunakan untuk mengharumkan ruangan dan menggunakan limbah serbuk kayu yang dibentuk pot sebagai tempatnya
4.	"Sablak" Menurunkan Sisa Tembakau Akhir Proses di Area Giling di Kelompok 4	PT. Urip Sugiharto	Inovasi yang diciptakan dalam proses pelintingan rokok untuk mengurangi tembakau yang terbuang
5.	Tas Recycle	Afni Dhia Aqmarina, S.I.Kom	Inovasi yang diciptakan dalam memanfaatkan limbah plastik menjadi tas dengan didahului proses pemanasan plastik untuk menghilangkan bakteri yang menempel

Sumber : jarlitbangnov.pekalongankota.go.id, 2021

4. Daya Dukung Inovasi Daerah

Dalam mengembangkan inovasi daerah, tidak hanya Pemerintah yang berperan, tetapi juga dibutuhkan *stakeholder* lain untuk mendorong percepatan inovasi. Salah satu hal yang paling mendasar lahirnya inovasi daerah adalah kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk itulah dibutuhkan peran perguruan tinggi selaku lembaga pendidikan sekaligus pengembang inovasi.

Di Kota Pekalongan, terdapat perguruan tinggi antara lain Universitas Pekalongan (Unikal), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dengan Program Studi Keperawatan di Pekalongan, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Widya Pratama Pekalongan, Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan dan Akademi Komunitas Negeri Kota Pekalongan dengan total lebih dari 1.000 (seribu) orang yang lulus setiap tahunnya, baik lulusan Diploma, Sarjana maupun Magister.

Tabel 2.178 Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan

No.	Nama Perguruan Tinggi	Periode Wisuda	Jumlah Lulusan (orang)			Jumlah
			D3	S1	S2	
1.	Universitas Pekalongan	September 2020	32	642	-	674
2.	STMIK Widya Pratama	Oktober 2020	66	296	-	362
3.	Akbid Harapan Ibu	November 2020	12	-	-	12
4.	AKN	Oktober 2020	38	-	-	38
5.	IAIN Pekalongan	Desember 2020	12	658	35	705

Sumber : Berbagai sumber (diolah), 2021

Selain berperan menciptakan SDM yang berdaya saing, perguruan tinggi juga didorong untuk menciptakan inovasi. Oleh karena itu beberapa perguruan tinggi di Kota Pekalongan membangun pusat inovasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.179 berikut.

Tabel 2.179 Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan

No	Perguruan Tinggi	Nama Pusat Inovasi
1.	Universitas Pekalongan	Pusat Inovasi dan Teknologi (PIT)
2.	STIMIK Widya Pratama	Tidak Ada
3.	IAIN Pekalongan	Tidak Ada
4.	Poltekkes Semarang Prodi Keperawatan	Tidak Ada
5.	AKBID Harapan Ibu	Tidak Ada

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

2.5. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Tahun 2020

2.5.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Sampai Dengan Tahun 2020

Penyusunan RKPD Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi RPJMD sampai dengan Tahun 2020. Evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD pada tahun 2020 ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program yang terbagi atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RPJMD terdiri dari 4 kategori, yaitu tercapai, akan tercapai, belum tercapai dan belum tersedia data. Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 di tahun 2020 dari 111 indikator, sebanyak :

- 42 indikator tercapai (37,84 persen),
- 25 indikator akan tercapai (22,52 persen),
- 41 indikator belum tercapai (36,93 persen), dan
- 3 indikator belum tersedia data (2,70 persen).

Tabel 2.180 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1	IPM	Indeks	76,90	71,53	74,77	76,12	74,98	74,98	97,50	Akan Tercapai
2	Indeks Gini	Indeks	0,34	0,34	0,305	0,34	0,31	0,31	108,28	Tercapai
3	Inflasi	Persen	3 ± 1	3,46	2,76	3 ± 1	2,36	2,36	118,00	Tercapai
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,00	5,36	5,5	2,65	-1,87	-1,87	-31,17	Belum Tercapai
5	Pertumbuhan PDRB sektor Industri pengolahan	Persen	5,10	3,99	4,84	2,21	-0,48	-0,48	-9,41	Belum Tercapai
6	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	Persen	5,80	3,62	5,72	2,53	-4,37	-4,37	-75,34	Belum Tercapai
7	Harapan Lama Sekolah (expected Years Of Schooling)	Tahun	13,21	11,93	12,83	13,10	12,84	12,84	97,20	Akan Tercapai
8	Angka Kemiskinan	Persen	5,14	8,02	6,6	8,75	7,17	7,17	71,69	Belum Tercapai
9	Konflik Sosial	Kasus	-	34,00	1,00	0,00	1,00	1,00	< target	Belum Tercapai
10	Angka Partisipasi Sekolah	Persen	99,00	-	97,13	98,00	96,99	96,99	97,97	Akan Tercapai
11	Persentase penyelenggaraan pendidikan berakreditasi A	Persen	60,00	-	49,16	49,16	48,64	48,64	81,07	Belum Tercapai
12	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,41	74,09	74,28	74,36	74,38	74,38	99,96	Akan Tercapai
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,50	5,42	5,77	5,00	7,02	7,02	49,86	Belum Tercapai
14	Persentase Penurunan PMKS	Persen	41,68	-	12,83	9,62	14,01	52,56	126,11	Tercapai
15	Persentase luas wilayah genangan banjir dan rob	Persen	9,04	42,43	23,36	9,30	38,23	38,23	23,64	Belum Tercapai
16	Persentase kawasan permukiman kumuh	Persen	0,00	-	0,39	0,39	0,21	0,21	< target	Akan Tercapai
17	Persentase penurunan kasus konflik sosial	Persen	20,00	-	50,00	16,67	0,00	0,00	> target	Belum Tercapai
18	Persentase Implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter	Persen	65,00	-	83,67	60,00	100,00	100,00	153,85	Tercapai
19	Persentase seni budaya yang dilestarikan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
20	persentase peningkatan penyelenggaraan *event*	Persen	100,00	16,00	183,87	0,00	80,65	80,65	80,65	Belum Tercapai
Aspek Pelayanan Umum										
1	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang PAUD/TK	Persen	70,00	-	70,00	67,50	60,28	60,28	86,11	Belum Tercapai
2	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang DIKDAS	Persen	100,00	-	100,00	100,00	102,65	102,65	102,65	Tercapai
3	Persentase Penyelenggaraan PAUD Berakreditasi A	Persen	5,50	-	5,50	9,00	9,09	9,09	165,29	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Berakreditasi A	Persen	85,00	-	85,00	68,45	69,57	69,57	81,84	Belum Tercapai
5	Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah	Persen	30,00	-	30,00	20,00	100,00	100,00	333,33	Tercapai
6	Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7	Angka Kenakalan Pelajar	Per 100 Siswa	2,00	-	n/a	3,00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
8	AKI	Persen	102,00	-	101,30	102,00	152,41	152,41	66,92	Belum Tercapai
9	AKB	Persen	9,60	-	11,99	9,60	8,81	8,81	109,02	Tercapai
10	AKABA	Persen	12,25	12,50	16,04	12,30	10,84	10,84	113,03	Tercapai
11	Tingkat Kemandirian BLUD Rumah Sakit	Persen	71,70	-	79,74	71,50	107,62	107,62	150,10	Tercapai
12	BOR (Bed Occupation Rate)	Persen	80,00	-	57,36	78,00	57,66	57,66	72,08	Belum Tercapai
13	NDR (Net Death Rate)	Persen	≤ 20/1000 pasien	-	18,04	≤ 21/1000 pasien	32,67	32,67	61,22	Belum Tercapai
14	GDR (Gross Death Rate)	Persen	≤ 40/1000 pasien	-	47,36	≤ 41/1000 pasien	54,57	54,57	76,97	Belum Tercapai
15	ALOS	Hari	6-9	-	3,92	6-9	4,14	4,14	> target	Tercapai
16	Ketersediaan Sarpras Pengendali Banjir dan Rob	Persen	43 unit	-	86,96	81,40	88,37	38,00	88,37	Akan Tercapai
17	Persentase kawasan strategis yang tertata (Jetayu, Kampung Pecinan, Kampung Arab, Batas Kota, Pati Unus)	Persen	100,00	14,29	78,57	85,70	92,86	92,86	92,86	Akan Tercapai
18	Persentase ketersediaan drainase lingkungan	Persen	47,46	-	26,79	47,15	30,14	30,14	63,51	Belum Tercapai
19	Rasio akses air minum terhadap jumlah penduduk	Persen	95,99	-	88,60	83,95	88,79	88,79	92,50	Akan Tercapai
20	Cakupan layanan pengelolaan limbah domestik	Persen	97,33	-	99,26	95,99	99,32	99,32	102,04	Tercapai
21	Cakupan jalan lingkungan dalam kondisi mantap	Persen	87,75	-	69,56	75,29	86,86	86,86	98,99	Akan Tercapai
22	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	98,74	-	96,93	97,29	97,30	97,30	98,54	Akan Tercapai
23	Berkurangnya pelanggaran perda	Kasus	500,00	-	1.382	1.000	1782,00	1782,00	28,06	Belum Tercapai
24	Waktu respon penanganan kebakaran	Menit	15,00	-	15,50	15,00	15,00	15,00	100,00	Tercapai
25	Persentase korban bencana yang ditangani	Persen	80,00	-	100,00	80,00	31,95	31,95	39,93	Belum Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Persentase potensi kerawanan sosial yang dibina	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
27	Presentase tingkat partisipasi politik masyarakat	Persen	tingkat partisipasi mengikuti target KPU Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan Pilgub, pilpres, dan pilwalkot	tingkat partisipasi pemilu pada pilwalkot, pilgub, rata2 pilpres dan pilleg pada periode sblmnya	85,88	77,50	79,35	79,35	102,39	Tercapai
28	Persentase PMKS Tertangani	Persen	41,68	-	7,29	6,95	8,56	47,44	113,81	Tercapai
29	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	69,64	-	72,32	69,26	66,45	66,45	95,42	Akan Tercapai
30	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64,58	-	60,95	64,48	58,29	58,29	90,26	Belum Tercapai
31	Predikat Kota Layak Anak	Pratama	Pratama	-	Madya	Pratama	Madya	Madya	> target	Tercapai
32	Konsumsi pangan penduduk sesuai dengan Pola Pangan Harapan	Skor	92,50	-	91,13	76,02	83,00	83,00	89,73	Belum Tercapai
33	Peningkatan produksi tanaman pangan kg (Persen per tahun)	Persen	3,00	-	-8,00	3,00	11,54	11,54	384,54	Tercapai
34	Indeks Kualitas Air	Indeks	43,48	-	46,00	43,47	35,33	35,33	81,26	Belum Tercapai
35	Indeks kualitas Udara	Indeks	99,29	-	99,05	99,29	79,96	79,96	80,53	Belum Tercapai
36	Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	23,90	-	23,50	23,80	23,60	23,60	98,74	Akan Tercapai
37	Cakupan Layanan Persampahan	Persen	93,43	-	65,84	89,74	76,07	76,07	81,42	Akan Tercapai
38	Tertib hukum lingkungan	Persen	30,00	-	20,82	25,00	25,17	25,17	83,89	Belum Tercapai
39	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	87,00	-	79,38	80,13	81,39	81,39	93,55	Akan Tercapai
40	Persentase Swadaya Masyarakatdalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	10,00	-	15,02	10,00	25,27	25,27	252,70	Tercapai
41	Persentase akseptor KB	Persen	66,00	-	65,06	64,00	69,02	69,02	104,58	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Kapasitas Jalan Perkotaan (satuan mobil penumpang per jam)		37,150	-	39.992	37.150	39.992,36	39.992,36	107,65	Tercapai
43	Skor Nilai dalam penghargaan WTN	Skor	> 85	-	>85	> 85	> 85	> 85	>85	Tercapai
44	Persentase teknologi informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh komunitas	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
45	cakupan komunitas yang berdaya dan memanfaatkan teknologi informasi	Kelompok	30,00	-	21,00	23,00	23,00	23,00	76,67	Belum Tercapai
46	Cakupan OPD dengan nilai KIP Kategori "Cukup Informatif/ Baik"	Persen	52,63	-	67,74	42,11	93,55	93,55	177,75	Tercapai
47	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas	Persen	100,00	-	70,00	63,64	100,00	100,00	100.00	Tercapai
48	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi (Rp. Trilyun)	Rp Trilyun	9,43	-	8,79	9,16	7,22	7,22	76,54	Belum Tercapai
49	Persentase UMKM menerima KUP/ KUR	Persen	60,27	-	99,39	56,81	69,82	69,82	115,85	Tercapai
50	Persentase capaian target investasi	Persen	1,95 triliun	-	256,02	88,53	264,18	5,15	264,18	Tercapai
51	Persentase ketersediaan sarana budaya	Persen	2,69	-	2,15	2,15	2,47	2,47	91,79	Akan Tercapai
52	Persentase peningkatan kelompok budaya	Persen	125 kel di thn 2021	83 kel di 2015	129,60	96,00	47,20	59,00	47,20	Belum Tercapai
53	Kenaikan kunjungan Perpustakaan	Persen	2,00	-	7,60	2,00	-46,79	-46,79	-44,79	Belum Tercapai
54	Persentase OPD+Kelurahan yang tertib administrasi kearsipan	Persen	36,36	-	NA	34,85	35,38	35,38	97,31	Akan Tercapai
55	Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1,42	-	0,39	1,42	1,04	1,04	73,51	Belum Tercapai
56	Prestasi olahraga tingkat provinsi (peringkat secara umum semua cabor)	Jumlah	31,00	-	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Tercapai
57	Persentase capaian target pendapatan daerah bersumber dari TPI sebesar Rp. 5,5 Milyar	Persen	5,5 M	4,2 M di tahun 2015	37,73	90,91	96,46	5,30	96,36	Akan Tercapai
58	Kunjungan wisata per tahun	Orang	550.000,00	-	720.816	250.000	281.858,00	281.858,00	51,25	Belum Tercapai
59	Peningkatan ProduksiPangan Hewani kg (Persen per tahun)	Persen	5,00	-	6,96	4,00	-35,98	-35,98	-719,60	Belum Tercapai
60	Pertumbuhan IKM Batik	IKM	800,00	-	780,00	790,00	790,00	790,00	98,75	Akan Tercapai
61	Persentase capaian target 1 pasar sesuaikriteria SNI	Persen	100,00	-	-	0	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
63	Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
64	Persentase peningkatan PAD	Persen	10,00	-	40,17	10,00	50,66	50,66	506,58	Tercapai
65	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Indeks Profesionalitas Pegawai minimal 80	Persen	100,00	-	60,54	60,54	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
66	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Persen	50,00	-	54,55	45,00	80,00	80,00	160,00	Tercapai
67	Kategori evaluasi AKIP	Grade	BB	C	BB	B	BB	BB	100,00	Tercapai
68	Tingkat kematangan implementasi SPIP	Skor	3,50	-	3,02	3,00	3,02	3,02	86,29	Belum Tercapai
69	Opini BPK atas LKD	Opini	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	Tercapai
70	Persentase PD dengan IKM Baik	Persen	100,00	n/a	93,94	96,77	95,38	95,38	95,38	Akan Tercapai
71	Persentase OPD dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik kategori Baik (Informatif)	Persen	100,00	-	67,74	78,95	38,71	38,71	38,71	Belum Tercapai
72	Efektivitas Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan	Persen	98,75	-	NA	98,50	99,37	99,37	100,63	Tercapai
73	Level Kapabiltas APIP	Kategori	4 DC	-	3,00	3,00	3,00	3,00	75,00	Belum Tercapai
74	Tingkat implementasi SPIP Hasil Self Assesment	Skor	4,00	-	3,20	3,50	3,50	3,50	87,50	Belum Tercapai
75	Persentase OPD yang memenuhi kriteria WBK	Persen	64,52	-	35,48	48,39	41,94	41,94	65,00	Belum Tercapai
76	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100,00	-	100	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Aspek Daya Saing										
1	Nilai produksi perikanan tangkap	Rp Milyar	183,33	-	116,63	172,99	176,84	176,84	96,46	Akan Tercapai
2	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp Milyar	24,36	-	21,89	8,41	30,78	30,78	126,37	Tercapai
3	nilai ekspor perdagangan (Juta US $)	Juta US$	19,58	-	22,92	19,19	25,42	25,42	129,83	Tercapai
4	Persentase penurunan Luas Genangan	Persen	78,70	-	24,01	49,82	-63,67	-63,67	-80,90	Belum Tercapai
5	Persentase lingkungan permukiman yang berkualitas	Persen	100,00	-	99,61	99,61	99,79	99,79	99,79	Akan Tercapai
6	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan	Persen	100,00	94,94	96,64	98,61	97,00	97,00	97,00	Akan Tercapai
7	Persentase pemenuhan ruang publik yang ramah lingkungan	Persen	100,00	-	63,64	81,82	81,82	81,82	81,82	Belum Tercapai
8	Persentase jalan kota dalam keadaan mantap	Persen	78,48	-	84,06	77,58	80,03	80,03	101,98	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Rasio Kapasitas Jalan (VC Ratio)	Indeks	0,73	0,87	0,45	0,75	0,36	0,36	202,78	Tercapai
10	Persentase pemenuhan sarana prasrana pada ruang publik kreatif (taman bahagia)	Persen	100,00	-	71,43	80,00	82,86	82,86	82,86	Belum Tercapai
11	Cakupan Layanan Sarpras Permukiman Perkotaan	Persen	93,63	-	88,17	88,17	90,74	90,74	96,92	Akan Tercapai
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	52,76	-	52,92	52,72	50,84	50,84	96,36	Akan Tercapai
13	Persentase sekolah menuju Level 4 Standar Nasional Pendidikan	Persen	54,00	-	93,08	40,00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
14	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	86,00	-	60,54	60,54	50,80	50,80	59,07	Belum Tercapai
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,00	70,88	68,97	78,00	68,91	68,91	81,07	Belum Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

2.5.2. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2020

1. URUSAN PENDIDIKAN

Tabel 2.181 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pendidikan										
1	APS 3-6 tahun	Persen	68,50	-	91,44	68,00	85,28	85,28	124,50	Tercapai
2	APK PAUD	Persen	62,50	-	69,64	62,00	60,28	60,28	96,44	Akan Tercapai
3	APM PAUD	Persen	70,00	-	64,10	65,00	58,37	58,37	83,39	Belum Tercapai
4	APS 5-6 tahun	Persen	80,00	-	99,16	78,00	105,81	105,81	132,26	Tercapai
5	APK TK/RA	Persen	81,00	-	81,16	78,00	71,70	71,70	88,52	Belum Tercapai
6	APM TK/RA	Persen	80,00	-	34,49	77,00	37,26	37,26	46,58	Belum Tercapai
7	APS 7-12 tahun	Persen	100,00	-	98,67	100,00	103,79	103,79	103,79	Tercapai
8	APK SD/MI	Persen	100,00	-	98,32	100,00	101,31	101,31	101,31	Tercapai
9	APM SD/MI	Persen	96,00	-	79,03	95,50	82,93	82,93	86,39	Belum Tercapai
10	APS 13-15 tahun	Persen	100,00	-	97,69	100,00	103,67	103,67	103,67	Tercapai
11	APK SMP/MTs	Persen	100,00	-	106,27	100,00	105,44	105,44	105,44	Tercapai
12	APM SMP/MTs	Persen	77,50	-	61,14	77,00	61,04	61,04	78,76	Belum Tercapai
13	Angka Partisipasi PNF (non PAUD)	Persen	29,00	-	306,69	25,00	0,33	0,33	1,14	Belum Tercapai
14	Angka Partisipasi Kesetaraan	Persen	45,00	-	239,63	40,00	81,78	81,78	181,73	Tercapai
15	Rasio Partisipasi ATS pada Pendidikan Kesetaraan	Persen	95,00	-	3,67	90,00	93,86	93,86	98,80	Akan Tercapai
16	Angka Partisipasi LKP	Persen	30,00	-	NA	25,00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
17	Angka Partisipasi PKBM	Persen	12,00	-	NA	9,00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
18	Angka Melek Huruf	Persen	100,00	-	99,98	99,50	99,98	99,98	99,98	Akan Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Rasio Ketercukupan Guru (sekolah negeri dan swasta) (SD)	Persen	SD : 95 Persen	-	90,81	SD : 90 Persen	91,05	91,05	95,84	Akan Tercapai
20	Rasio Ketercukupan Guru (sekolah negeri dan swasta) (SMP)	Persen	SMP : 100 Persen	-	86,41	SMP : 97,5 Persen	98,15	98,15	98,15	Akan Tercapai
21	Rasio Ketercukupan Guru (sekolah negeri dan swasta) (TK)	Persen	TK : 100 Persen	-	104,97	TK : 100 Persen	109,80	109,80	109,80	Tercapai
22	Rasio Ketercukupan Tenaga Kependidikan (sekolah negeri) (SD)	Persen	SD : 50 Persen	-	3,76	SD : 30 Persen	64,08	64,08	128,17	Tercapai
23	Rasio Ketercukupan Tenaga Kependidikan (sekolah negeri) (SMP)	Persen	SMP : 80 Persen	-	57,35	SMP : 70 Persen	144,12	144,12	180,15	Tercapai
24	Rasio Ketercukupan Tenaga Kependidikan (sekolah negeri) (TK)	Persen	TK : 60 Persen	-	n/a	TK : 40 Persen	100,00	100,00	166,67	Tercapai
25	Persentase pendidik/guru jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs berijazah S1/DIV	Persen	100,00	-	91,20	95,00	91,99	91,99	91,99	Akan Tercapai
26	Persentase pendidik/guru bersertifikat profesi pendidik	Persen	62,00	-	52,71	60,00	50,47	50,47	81,41	Belum Tercapai
27	Rasio kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi	Persen	75,00	-	32,51	50,00	62,14	62,14	82,86	Belum Tercapai
28	Rasio tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi	Persen	75,00	-	71,01	50,00	73,21	73,21	97,61	Akan Tercapai
29	Persentase ketersediaan data dan informasi pendidikan yang dibutuhkan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
30	Persentase satuan pendidikan yang terfasilitasi peningkatan kapasitas manajemen	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
31	Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,03	-	0,12	0,04	0,29	0,29	976,36	Tercapai
32	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	0,08	-	0,46	0,09	0,97	0,97	1213,59	Tercapai
33	Persentase Lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs	Persen	100,00	-	104,78	100,00	102,79	102,79	102,79	Tercapai
34	Persentase Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA	Persen	100,00	-	101,25	100,00	102,44	102,44	102,44	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Rasio Pertumbuhan Daya Tampung Dikdas dan PAUD formal	Persen	100,00	-	870,73	100,00	-69,67	-69,67	-69,67	Tercapai
36	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas TK/RA	Persen	75,00	-	62,77	70,00	71,13	71,13	94,84	Akan Tercapai
37	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas Dikdas	Persen	100,00	-	107,49	100,00	113,72	113,72	113,72	Tercapai
38	Rata-rata Kelengkapan Jumlah sarana dan prasarana pembelajaran dan pendukung	Persen	70,00	-	65,44	67,50	72,83	72,83	104,04	Tercapai
39	Rasio Kondisi sarana dan prasarana layak pakai	Persen	90,00	-	85,86	80,00	99,71	99,71	110,78	Tercapai
40	Angka Lulus Jenjang Dikdas	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
41	Nilai Rata-rata UN SD/MI	Nilai	77,00	-	69,69	0,00	0,00	0,00	100,00	Tercapai
42	Nilai Rata-rata UN SMP/MTs	Nilai	65,00	-	59,02	0,00	0,00	0,00	100,00	Tercapai
43	Persentase Sekolah Jenjang dikdas yang terfasilitasi Penilaian Akreditasi	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
44	Angka sekolah Jenjang Dikdas penyelenggara pendidikan Inklusi	Indeks	3,30	-	2,67	3,30	2,72	2,72	82,35	Belum Tercapai
45	Persentase sekolah Jenjang Dikdas yang terfasilitasi pembinaan oleh pengawas	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
46	Persentase Sekolah Jenjang PAUD yang menerapkan model Pendidikan Keagamaan	Persen	90,00	-	100,00	85,00	100,00	100,00	111,11	Tercapai
47	Persentase Sekolah Jenjang PAUD yang menerapkan model pembentukan karakter yang melibatkan peran aktif wali murid	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
48	Rasio Siswa Jenjang PAUD yang mengikuti pembelajaran di TPQ/madin	Persen	10,00	-	n/a	15,00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
49	Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD yang terfasilitasi dalam Kegiatan Lomba dan Apresiasi	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
50	Persentase Satuan Pendidikan PAUD&PNF yang terfasilitasi penilaian akeditasi	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Persentase satuan pendidikan PAUD & PNF yang terfasilitasi pembinaan oleh Pengawas/penilik	Persen	95,00	-	100,00	94,00	100,00	100,00	105,26	Tercapai
52	Persentase organisasi mitra PAUD & PNF yang terfasilitasi pemberdayaan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
53	Persentase Satuan Pendidikan PAUD & PNF yang terfasilitasi lomba dan apresiasi	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
54	Persentase Siswa Muslim Kelas VI SD yang berijazah BTQ	Persen	100,00	-	71,87	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
55	Persentase Sekolah Jenjang Dikdas yang menerapkan model Pendidikan Keagamaan	Persen	60,00	-	100,00	40,00	100,00	100,00	166,67	Tercapai
56	Persentase Sekolah Jenjang Dikdas yang menerapkan model pembentukan karakter yang melibatkan peran aktif wali murid	Persen	30,00	-	100,00	20,00	100,00	100,00	333,33	Tercapai
57	Rasio Siswa Jenjang Dikdas yang mengikuti pembelajaran di TPQ/Madin	Rasio	70,00	-	n/a	60,00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
58	Persentase Sekolah Jenjang Dikdas yang terfasilitasi dalam kegiatan lomba dan apresiasi bagi siswa	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
59	Rasio siswa jenjang Dikdas yang terfasilitasi kegiatan kepramukaan	Rasio	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Penjelasan pada 9 (sembilan) indikator yang belum tercapai statusnya terhadap capaian akhir RPJMD di tahun 2021

a. Indikator APM PAUD,masih belum tercapai karena masih banyak anak usia jenjang PAUD yang sudah bersekolah di SD dan MI,
b. Indikator APK TK/RA masih belum tercapai karena Dampak Pandemi *COVID-19*.
c. Indikator APM TK/RA disebabkan masih banyak anak usia 5- 6 tahun yang sudah/tidak bersekolah di TK/RA tapi juga sekolah di lembaga lain.
d. Indikator APM SD/MI disebabkan masih banyak siswa SD MI yang berusia kurang dari 7 tahun SD dan MI dan anak usia 12 tahun sdh ada di SMP/MTS.
e. Indikator APM SMP/MTs disebabkan karena masih banyak siswa SD MI yang berusia kurang 13 tahun pada SMP dan MTsdan anak usia 15 tahun yg sudah lulus SMP/MTs di SMA, SMK, MA.
f. Indikator Angka Partisipasi PNF (non PAUD) karena pada masa Pandemi *COVID-19* menyebabkan banyak LKP yang tidak bisa melaksanakan pelatihan.
g. Indikator Persentase pendidik/guru bersertifikat profesi pendidik yang belum tercapai karena kuota peserta sertifikasi dari pusat tidak sebanding dengan jumlah

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pendidik bersertifikasi yang pensiun. h. Indikator Rasio kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi belum mencapai target karena dampak pandemi *COVID-19*. i. Indikator Angka sekolah Jenjang Dikdas penyelenggara pendidikan Inklusi masih belum memenuhi target karena adanya pandemi *COVID-19*, rencana membuka satu satu lagi sekolah yg memberi layanan inklusi batal.									

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

2. URUSAN KESEHATAN

Tabel 2.182 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Kesehatan										
1	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yg memenuhi standar	Persen	95,00	-	88,70	95,00	89,71	89,71	94,43	Akan Tercapai
2	Persentase temuan makanan berbahaya	Persen	3,00	-	4,56	3,50	0,92	0,92	327,00	Tercapai
3	Persentase kasus balita gizi buruk	Persen	0,05	13,00	0,05	0,05	0,07	0,07	75,02	Belum Tercapai
4	Persentase ibu hamil KEK	Persen	< 13,5	22,30	13,33	< 13,6	13,22	13,22	102,12	Tercapai
5	Persentase bayi usia < 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif	Persen	50,00	-	57,20	47,00	53,40	53,40	106,81	Tercapai
6	Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal utama	Persen	100,00	-	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86	Belum Tercapai
7	Persentase RS yang terakreditasi minimal utama	Persen	100,00	-	55,56	55,56	55,56	55,56	55,56	Belum Tercapai
8	Persentase sarana kesehatan lainnya yang terakreditasi	Persen	50,00	n/a	0,00	25,00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk	Indeks	<2	-	1,82	<2	2,71	2,71	73,88	Belum Tercapai
10	Cakupan pelayanan penderita TB (SPM)	Persen	100,00	-	100,00	100,00	78,43	78,43	78,43	Belum Tercapai
11	Cakupan pelayanan penderita HIV AIDS (SPM)	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
12	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi	Persen	99,00	-	93,89	98,00	90,02	90,02	90,93	Akan Tercapai
13	Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi (SPM)	Persen	100,00	-	29,91	100,00	27,10	27,10	27,10	Belum Tercapai
14	Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif (SPM)	Persen	100,00	-	16,69	100,00	28,57	28,57	28,57	Belum Tercapai
15	Cakupan pelayanan kesehatan Diabetes Melitus (SPM)	Persen	100,00	-	96,34	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
16	Cakupan pelayanan Kesehatan Jiwa (SPM)	Persen	100,00	-	69,68	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
17	Tingkat kemandirian BLUD Puskesmas	Persen	50,00	-	103,32	45,00	103,25	103,25	206,50	Tercapai
18	Tingkat kemandirian BLUD BKPM	Persen	30,00	-	97,43	0,00	0,00	0,00	100,00	Tercapai
19	Tingkat kemandirian BLUD PSPJ	Persen	25,00	-	99,29	23,00	72,90	72,90	291,61	Tercapai
20	Cakupan Kelurahan Open Defecation Free (ODF)	Persen	59,26	-	77,78	55,56	77,78	77,78	131,25	Tercapai
21	Persentase kualitas air minum pada penyelenggara air minum	Persen	84,00	-	82,99	81,00	82,21	82,21	97,87	Akan Tercapai
22	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yg memenuhi syarat kesehatan	Persen	98,00	-	92,10	96,00	92,02	92,02	93,90	Akan Tercapai
23	Persentase Pembinaan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal dan informal	Persen	40,00	-	41,37	37,00	41,48	41,48	103,70	Tercapai
24	Persentase pembinaan kesehatan olah raga pada anak SD	Persen	40,00	-	33,33	0,00	0,00	0,00	100,00	Tercapai
25	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	Persen	100,00	98,00	97,73	100,00	98,22	98,22	98,22	Akan Tercapai
26	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin (SPM)	Persen	100,00	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	Persen	100,00	99,10	99,88	100,00	99,59	99,59	99,59	Akan Tercapai
28	Cakupan pelayanan kesehatan balita (SPM)	Persen	100,00	94,50	94,81	100,00	88,39	88,39	88,39	Belum Tercapai
29	Cakupan pelayanan kesehatan pada remaja	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	Tercapai
30	Cakupan pelayanan kesehatan lansia (SPM)	Persen	65,00	58,70	100,00	64,90	70,57	70,57	108,57	Tercapai
31	Cakupan penduduk yg mempunyai jaminan kesehatan	Persen	95,00	-	80,08	81,00	77,15	77,15	81,21	Belum Tercapai
32	Persentase puskesmas yang memenuhi standar puskesmas	Persen	95,00	-	100,00	95,00	100,00	100,00	105,26	Tercapai
33	Persentase ketersediaan obat di Puskesmas dan BKPM	Persen	100,00	-	94,61	100,00	83,91	83,91	83,91	Belum Tercapai
34	Persentase peningkatan jumlah produksi Obat Asli Indonesia	Persen	18,00	-	27,00	16,00	6,88	6,88	38,24	Belum Tercapai
35	Persentase peningkatan jumlah varian produk obat asli Indonesia	Persen	18,00	-	15,56	16,00	5,77	5,77	32,05	Belum Tercapai
36	Cakupan Posyandu strata mandiri	Persen	30,00	-	24,33	24,64	24,40	24,40	81,32	Belum Tercapai
37	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (SPM)	Persen	100,00	-	99,29	100,00	52,54	52,54	52,54	Belum Tercapai
38	Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang dibutuhkan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
39	Persentase satuan kesehatan yang terfasilitasi peningkatan kapasitas manajemen	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
40	Persentase penanganan BBLR 1500 gr - 2500 gr	Persen	100,00	-	93,18	99,00	95,42	95,42	95,42	Akan Tercapai
41	Persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh pendarahan	Persen	≤ 1	-	4,29	≤ 1	4,00	4,00	25,00	Belum Tercapai
42	Persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh pre-ekslampsia	Persen	≤ 30	-	0,45	≤ 30	1,15	1,15	196,17	Tercapai
43	Persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh sepsis	Persen	≤ 0,2	-	0,00	≤ 0,2	0,00	0,00	> target	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan RS	Persen	100,00	-	96,97	98,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
45	Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari sama dengan 30 menit	Menit	30,00	-	28,38	35,00	27,09	27,09	110,74	Tercapai
46	Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat racikan kurang dari sama dengan 60 menit	Menit	50,00	-	48,39	52,00	43,15	43,15	115,89	Tercapai
47	Skor Akreditasi RS	Skor	Terakreditasi	-	Terakreditasi Snars	Reakreditasi	Terakreditasi SNARS	Terakreditasi SNARS	Terakreditasi snars	Belum Tercapai
48	Persentase perawat yang bersertifikasi BTCLS (basic trauma cardlac life saving) dan bidan yang bersertifikasi PPGDON (penanganan penderita gawat darurat obstetric dan neonatus)	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Pada urusan kesehatan ini, 16 dari 48 Indikator capaian masih kurang dari 80 Persen dari target akhir RPJMD, sehingga kemungkinan belum tercapai pada akhir tahun RPJMD di Tahun 2021. Indikator tersebut antara lain :

a. Persentase kasus balita gizi buruk, yang dikarenakan pandemi penyelenggaraan posyandu banyak yang tutup, sehingga pemantauan tumbuh kembang bayi dan gizi menjadi kurang.
b. Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal utama, yang disebabkan belum ada fasilitasi akreditasi untuk fasyankes lainnya dan adanya Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/VI/0885/2020 tentang Pemberitahuan Penangguhan Penyelenggaraan Survei Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama dan Laboratorium.
c. Persentase RS yang terakreditasi minimal utama, yang disebabkan adanya Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/VI/0885/2020 tentang Pemberitahuan Penangguhan Penyelenggaraan Survei Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama dan Laboratorium.
d. Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk karena kondisi/cuaca yang tidak stabil yang mengakibatkan banyak genangan air, sehingga dapat menjadi tempat bertelur nyamuk aides aygipti
e. Cakupan pelayanan penderita TB (SPM), karena dampak pandemi Covid yang menyebabkan penundaan penyuluhan TBC oleh kader TB maupun petugas P2 puskesmas di wilayah kerja kesehatan yang ketat.
f. Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi (SPM) karena adanya perubahan formulasi dari Kementerian dalam penetapan target sasaran, yang semula berdasarkan penetapan data dasar dari data tahun 2019, namun berubah menjadi data riil berdasarkan survey Riskesdas.
g. Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif (SPM) , yang disebabkan pandemi *COVID-19*, penundaan posbindu PTM.

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
h. Cakupan pelayanan kesehatan balita (SPM), yang disebabkan pandemi *COVID-19*, penundaan posbindu PTM.										
i. Cakupan penduduk yg mempunyai jaminan kesehatan, yang disebabkan keikutsertaan jaminan kesehatan penduduk yang berkurang karena kemampuan pembayaran iuran jaminan kesehatan.										
j. Persentase ketersediaan obat di Puskesmas dan BKPM, yang disebabkan karena beberapa item obat tidak diadakan pada tahun 2020, terdapat obat dropping dari provinsi kadaluarsa di tahun 2020, dan sejumlah obat tidak dapat dipenuhi oleh penyedia di pengadaan tahun 2020.										
k. Persentase peningkatan jumlah produksi Obat Asli Indonesia, yang disebabkan dampak pandemi *COVID-19* yang mengakibatkan jumlah permintaan jumlah produksi Jamu berkurang.										
l. Persentase peningkatan jumlah varian produk obat asli Indonesia, yang disebabkan terdapat varian baru masih dalam tahap penelitian formulasi awal.										
m. Cakupan Posyandu strata mandiri, yang belum tercapai namun masih *on track* dalam kerangka target RPJMD.										
n. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (SPM), karena ada anak-anak yang tidak diijinkan berangkat ke sekolah oleh orangtuanya untuk imunisasi karena masih kondisi pandemi sehingga capaianya tidak dapat memenuhi target.										
o. Persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh pendarahan tidak memenuhi target karena Ada 2 pasien bersalin yang meninggal. Keduanya suspek *COVID-19*. Satu dirujuk ke RS Karyadi, tetapi karena di RS Karyadi ruang perawatan *COVID-19* penuh, akhirnya dikembalikan ke RS Bendan, dan 1 orang karena kekurangan ventilator khusus Covid di RS Bendan.										
p. Skor Akreditasi RS, yang belum tercapai disebabkan tidak adanya akreditasi karena pandemi *COVID-19*.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tabel 2.183 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	persentase progres tahapan pembangunan Jalan akses ke jalan tol	Persen	100,00	5,00	91,42	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase sarpas pengendali banjir dalam kondisi baik	Persen	94,74	n/a	90,00	94,44	90,00	90,00	95,00	Akan Tercapai
3	persentase titik lampu yang telah bermeterisasi dan LED	Persen	40,00	n/a	33,23	36,00	43,98	43,98	109,94	Tercapai
4	Komponen ruang publik kreatif (taman bahagia) yang ditingkatkan sarana prasarananya	Persen	100,00	-	71,43	80,00	82,86	82,86	82,86	Belum Tercapai
5	Peningkatan sarpas lokasi makam	Persen	100,00	-	33,33	67,00	67,00	67,00	67,00	Belum Tercapai
6	Persentase peningkatan jumlah bangunan ber-IMB	Persen	16,286 unit	n/a	4,14	4,50	2,18	15125,00	92,87	Akan Tercapai
7	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	92,21	-	89,31	92,21	89,31	89,31	96,86	Akan Tercapai
8	Persentase Trotoir dalam kondisi baik	Persen	12,18	-	12,02	12,02	12,02	12,02	98,69	Akan Tercapai
9	Persentase Saluran Pematus Jalan dalam kondisi baik	Persen	42,62	-	42,37	42,40	42,53	42,53	99,79	Akan Tercapai
10	Fasilitasi perencanaan bangunan gedung	Persen	100,00	-	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Tercapai
11	Fasilitasi pembangunan bangunan gedung	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
12	persentase jaringan irigasi yang dipelihara	Persen	78,26	-	n/a	77,33	78,47	78,47	100,27	Tercapai
13	Persentase drainase primer dalam kondisi baik	Persen	70,14	-	58,90	62,05	62,40	62,40	88,96	Belum Tercapai
Pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdapat 3 indikator yang belum mencapai target akhir RPJMD, antara lain : Komponen ruang publik kreatif (taman bahagia) yang ditingkatkan sarana prasarananya, Peningkatan sarpas lokasi makam, Persentase drainase primer dalam kondisi baik. Namun demikian, ketiga indikator tersebut masih *on the track* mengingat pelaksanaan sisa target direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2021.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4. URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tabel 2.184 Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1	Rasio Rumah Tidak Layak Huni	Persen	1,26	-	3,07	2,71	2,70	2,70	46.71	Belum Tercapai
2	Persentase perumahan MBR yang menyediakan fasum fasos	Persen	100,00	-	62,73	50,00	79,50	79,50	79.50	Belum Tercapai
3	Rasio panjang jalan lingkungan yang terlayani drainase	Persen	87,75	-	72,04	75,29	72,05	72,05	82,11	Belum Tercapai
4	Cakupan jalan dan jembatan permukiman dalam kondisi baik	Persen	47,46	-	69,56	47,15	81,44	81,44	171,59	Tercapai
5	Persentase penduduk yang mengakses air bersih yang terlindungi dengan perpipaan	Persen	95,99	-	83,33	83,95	88,79	88,79	92,50	Akan Tercapai
6	Cakupan akses sanitasi	Persen	97,33	-	99,32	95,99	96,59	96,59	99,24	Akan Tercapai

Pada urusan Perumahan dan Permukiman, terdapat 3 indikator yang belum tercapai, yaitu :

- 2 (dua) diantaranya Persentase perumahan MBR yang menyediakan fasum fasos dan Rasio panjang jalan lingkungan yang terlayani drainase, masih on the track dengan rencana pencapaian target akhir RPJMD karena pelaksanaan sisa target di tahun 2021.
- Namun demikian, untuk target Rasio Rumah Tidak Layak Huni masih cukup jauh dari Target Akhir RPJMD karena pada pelaksanaan tergantung intervensi kebijakan Pusat (DAK) dan pada Tahun 2020 anggaran tersebut terkena refocusing.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS

Tabel 2.185 Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas										
1	Cakupan Kelompok Sasaran Tibum yang dibina	Persen	100,00	-	44,44	29,00	18,52	18,52	18,52	Belum Tercapai
2	persentase pemilih pemula yang terdidik politik	Persen	21,11	-	17,47	17,12	17,21	17,21	81,52	Belum Tercapai
3	Persentase Informasi Barang Cukai Ilegal yang dikoordinasikan untuk ditangani	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4	Persentase Penanganan Kedaruratan Sipil Non Kebakaran	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5	Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6	Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan	Persen	100,00	-	99,35	100,00	98,71	98,71	98,71	Akan Tercapai
7	Persentase Penanganan kerawanan/konflik sosial	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
8	Persentase penurunan kasus narkoba	Persen	23,08	n/a	12,00	23,53	11,76	11,76	50,97	Belum Tercapai
9	persentase korban bencana alam yang ditangani	Persen	75,00	-	100,00	75,00	31,95	31,95	42,60	Belum Tercapai
10	peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana	Persen	33,33	-	83,33	33,33	66,67	66,67	200,02	Tercapai

Pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum , terdapat 4 indikator yang belum tercapai.

- Cakupan Kelompok Sasaran Tibum yang dibina, yang disebabkan pembinaan tibum tranmas terkendala penertiban tibum.
- persentase pemilih pemula yang terdidik politik, yang terhambat penyelenggaraan karena memenuhi prokes *COVID-19* membatasi kerumunan.
- Persentase penurunan kasus narkoba, belum tercapai namun masih *on track* dalam kerangka target RPJMD.
- persentase korban bencana alam yang ditangani belum tercapai karena Korban bencana banjir dan rob yang tidak mau mengungsi tidak dihitung sebagai capaian penanganan korban bencana.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

6. URUSAN SOSIAL

Tabel 2.186 Capaian Indikator Urusan Sosial Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Sosial										
1	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	Persen	1,66	-	1,30	1,50	1,57	1,57	94,63	Akan Tercapai
2	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi , perlindungan dan jaminan sosial	Persen	37,02	-	39,35	30,22	46,72	46,72	126,20	Tercapai
3	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	Persen	75,00	-	75,00	66,67	75,00	75,00	100,00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

7. URUSAN TENAGA KERJA

Tabel 2.187 Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Tenaga Kerja										
1	Cakupan tenaga kerja yang berkompeten	Orang	800,00	-	1200,00	560,00	528,00	528,00	66,00	Belum Tercapai
2	Persentase Wirausaha yang mandiri dan produktif yang masih melanjutkan usaha	Persen	50,00	-	82,93	45,00	87,23	87,23	174,47	Tercapai
3	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	Persen	70,00	-	66,25	51,43	68,00	68,00	97,14	Akan Tercapai
4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	75,00	-	65,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan penjanjian bersama	Persen	55,00	-	75,00	54,00	60,00	60,00	109,09	Tercapai
6	Rasio kenaikan upah minimum	Persen	8,74	-	8,03	8,73	8,66	8,66	99,05	Akan Tercapai
7	Rasio jumlah sarana hubungan industrial LKS Bipartit yang terbentuk di perusahaan	Persen	50,00	-	47,80	43,00	45,83	45,83	91,67	Akan Tercapai
8	Rasio jumlah sarana hubungan industrial peraturan Perusahaan / perjanjian kerja bersama yang dibuat perusahaan	Persen	47,00	-	46,00	42,00	43,56	43,56	92,67	Akan Tercapai
Pada urusan Tenaga Kerja masih terdapat 1 indikator yang belum tercapai terhadap target akhir RPJMD, yakni pada indikator Cakupan tenaga kerja yang berkompeten . Namun demikian pencapaiannya namun masih *on track* dalam kerangka target RPJMD.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tabel 2.188 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	Persen	100,00	-	96,77	77,42	90,32	90,32	90,32	Akan Tercapai
2	Persentase kampung layak anak	Persen	100,00	-	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Belum Tercapai
3	Cakupan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih terdapat 1 indikator yang belum tercapai terhadap target akhir RPJMD, yakni pada indikator presentase kampong layak anak. Namun demikian pencapaiannya namun masih *on track* dalam kerangka target RPJMD.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

9. URUSAN PANGAN

Tabel 2.189 Capaian Indikator Urusan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pangan										
1	Indeks capaian skor pola pangan harapan ketersediaan pangan	Skor	90,20	-	91,31	77,16	92,01	92,01	102,01	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

10. URUSAN PERTANAHAN

Tabel 2.190 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pertanahan										
1	persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot untuk infrastruktur kota	Persen	75,00	55,22	79,60	75,00	71,40	71,40	95,20	Akan Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Tabel 2.191 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Lingkungan Hidup										
1	Persentase sampah terangkut ke TPA	Persen	72,00	69,05	79,15	74,00	92,53	92,53	77,82	Akan Tercapai
2	Persentase sampah terkelola di TPS3R	Persen	43,00	30,95	20,85	26,00	7,47	7,47	17,38	Belum Tercapai
3	Persentase capaian target 801 usaha dan/atau kegiatan terolah limbahnya	Persen	100,00	-	75,00	87,00	43,58	43,58	43,58	Belum Tercapai
4	persentase kenaikan jenis informasi publik tentang Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persen	100,00	-	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5	Persentase peningkatan pemberdayaan komunitas yang dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup	Persen	100,00	-	90,00	92,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6	Persentase peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH)	Persen	0,10	-	n/a	0,10	0,00	0,00	0,00	Belum Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	Persen	18,90	18,30	8,23	18,80	18,70	18,70	98,94	Akan Tercapai
8	Persentase usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis aspek lingkungan	Persen	100,00	-	65,00	80,00	86,21	86,21	86,21	Belum Tercapai
9	Persentase pengaduan masyarakat yang telah terselesaikan	Persen	90,00	-	80,00	85,00	83,33	83,33	92,59	Akan Tercapai
10	Persentase capaian target jumlah ABT yang terawasi	Persen	100 Persen (70 titik ABT)	-	72,00	85,71	285,71	285,71	285,71	Tercapai
11	Persentase target capaian kampung iklim di Tahun 2021	Persen	100 Persen (4 kampung)	-	74,00	75,00	266,67	266,67	266,67	Tercapai
12	Cakupan pemantauan kualitas udara di perumahan, industri dan fasilitas umum	Persen	100 Persen (24 titik)	-	66,67	83,30	83,33	83,33	83,33	Belum Tercapai

Pada urusan lingkungan hidup, terdapat 5 (lima) indikator yang belum tercapai targetnya terhadap target akhir RPJMD, antara lain :

a. Persentase sampah terkelola di TPS3R, disebabkan kesadaran pengelolaan sampah di TPS3R yang masih rendah.
b. Persentase capaian target 801 usaha dan/atau kegiatan terolah limbahnya, disebabkan saat pentargetan RPJMD direncanakan akan dibangun 6 lokasi IPAL komunal dari APBD dan DAK. Namun sampai dengan tahun 2020 hanya terbangun 2 lokasi karena keterbatasan anggaran.
c. Persentase peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH) karena penetapan target terlalu tinggi sehingga pencapaian sangat sulit.
d. Persentase usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis aspek lingkungan, belum tercapai namun masih *on track* dalam kerangka target RPJMD.
e. Cakupan pemantauan kualitas udara di perumahan, industri dan fasilitas umum, Belum tercapai namun masih *on track* dalam kerangka target RPJMD.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tabel 2.192 Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Perangkat Daerah	26,00	-	1,00	13,00	1,00	1,00	3,85	Belum Tercapai
2	Stakeholder yang berkoordinasi dalam pemanfaatan data kependudukan	Pemangku Kepentingan	78,00	-	26,00	26,00	26,00	26,00	33,33	Belum Tercapai
3	Cakupan penerbitan KTP	Persen	95,00	-	97,76	94,00	97,73	97,73	102,88	Tercapai
4	Cakupan penerbitan KK	Persen	98,00	-	91,27	97,50	93,14	93,14	95,04	Akan Tercapai
5	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	Persen	75,00	-	52,14	55,00	53,81	53,81	71,75	Belum Tercapai
6	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	Persen	80,00	-	75,94	75,00	80,87	80,87	101,09	Tercapai

Pada urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil terdapat 3 (tiga) indikator yang statusnya masuk dalam kategori belum tercapai terhadap Target Akhir RPJMD, antara lain :

a. OPD yang memanfaatkan data kependudukan, disebabkan penetapan target awal terlalu tinggi sehingga menemui kesulitan dalam pencapaian target.
b. Stakeholder yang berkoordinasi dalam pemanfaatan data kependudukan, disebabkan pemanfaatan data kependudukan harus seijin Kemendagri sehingga kesulitan dilaksanakan intervensi.
c. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran, kesulitan intervensi penambahan akta kelahiran bagi penduduk dewasa yang belum memiliki akta kelahiran.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tabel 2.193 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1	Persentase kelurahan yang terfasilitasi kegiatan pemberdayaan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat	Persen	100,00	-	33,33	66,67	66,67	66,67	66,67	Belum Tercapai
3	persentase kinerja kelembagaan masyarakat	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih terdapat 1 indikator yang belum tercapai terhadap target akhir RPJMD, yakni pada indikator Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat. Namun demikian pencapaiannya namun masih *on track* dalam kerangka target RPJMD.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tabel 2.194 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
1	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	Persen	66,00	n/a	20,51	22,00	19,30	19,30	29,25	Belum Tercapai
2	Persentase capaian target penurunan kasus perkawinan dibawah umur 20 th menjadi 250 kasus	Persen	100,00	n/a	69,33	88,89	101,11	101,11	101,11	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih terdapat 1 indikator yang belum tercapai terhadap target akhir RPJMD, yakni pada indikator Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia. Hal ini disebabkan adanya pandemi *COVID-19* menyebabkan pembatasan pelayanan MKJP di puskesmas dan di bidan mandiri.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

15. URUSAN PERHUBUNGAN

Tabel 2.195 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Perhubungan										
1	Persentase peningkatan fasilitas LLAJ	Persen	100,00	-	95,41	89,72	97,08	97,08	97,08	Akan Tercapai
2	Ketersediaan angkutan umum	Persen	20,95	-	17,97	18,84	22,69	22,69	108,30	Tercapai
3	Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala	Persen	92,40	-	84,52	92,34	83,21	83,21	90,05	Akan Tercapai
4	Persentase peningkatan kasawan tertib lalulintas (KTL)	Persen	100,00	-	100,00	88,89	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tabel 2.196 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Komunikasi dan Informatika										
1	Persentase OPD, Kelurahan dan Kecamatan dalam layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO)	Persen	100,00	-	93,27	96,67	93,94	93,94	93,94	Akan Tercapai
2	Persentase Cakupan dalam layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Kesehatan (Puskesmas, RS, Pustudll)	Persen	37,78	-	65,91	35,56	88,24	88,24	233,55	Tercapai
3	Persentase Cakupan layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Pendidikan (Sekolah negeri, smp, sd, tk)	Persen	27,84	-	20,00	24,74	24,74	24,74	88,86	Belum Tercapai
4	Persentase OPD yang menjalankan layanannya dengan menggunakan Aplikasi/ Sistem Informasi	Persen	100,00	-	87,10	93,55	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5	Persentase kelompok masyarakat mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi	Persen	100,00	-	41,84	76,67	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6	Persentase OPD / Urusan Pemerintahan/ Sektor Pembangunan yang tercakup dalam layanan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100,00	-	100,00	88,37	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7	Persentase Kelurahan yang memiliki / mengembangkan Sumber Daya Komunikasi Publik Sebagai Jejaring Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik.	Persen	66,67	-	71,43	62,96	74,07	74,07	111,10	Tercapai
8	Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatif/ Baik"	Persen	38,10	-	67,74	28,57	93,55	93,55	245,53	Tercapai
9	Persentase OPD yang melakukan Pengelolaan Pengaduan / Aspirasi Masyarakat	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pada urusan Komunikasi dan Informatika masih terdapat 1 indikator yang belum tercapai terhadap target akhir RPJMD, yakni pada indikator Persentase Cakupan layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Pendidikan (Sekolah negeri, smp, sd, tk). Namun demikian, pencapaiannya namun masih *on track* dalam kerangka target RPJMD										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

17. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tabel 2.197 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
1	UMKM penerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) dan jenis pembiayaan lainnya	UMKM	15.000	570,00	22.653,00	14.000	31.603,00	31.603,00	210,69	Tercapai
2	UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha dan jaringan kemitraan	UMKM	895,00	115,00	150	0	20,00	20,00	47,49	Belum Tercapai
3	Kenaikan jumlah UMKM	UMKM	24.888	22.934,00	22.983	24.642	23.233	23.233,00	93,35	Akan Tercapai
4	Persentase koperasi/unit simpan pinjam/ syariah yang sehat dan cukup sehat	Persen	100,00	81,11	79,29	96,67	73,00	73,00	73,00	Belum Tercapai
5	Persentase koperasi aktif	Persen	99,18	-	84,38	98,76	89,77	89,77	90,51	Akan Tercapai

Pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah terdapat 2 (dua) indikator yang kemungkinan belum memenuhi target akhir RPJMD, yaitu :

a. UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha dan jaringan kemitraan, yang disebabkan pengaruh *COVID-19*
b. Persentase koperasi/unit simpan pinjam/ syariah yang sehat dan cukup sehat, yang disebabkan Berdasarkan peraturan Deputi Bidang PengawasanKemenkop dan UKM RI Nomor : 06/PER/DEP/IV/2016 tentang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan injam, terjadi kenaikan skor pada kelompok cukup sehat, semula skor 60 s/d 80 menjadi 66 s/d 80.jadi yang tadinya kategori koperasi cukup sehat menjadi kategori dalam pengawasan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

18. URUSAN PENANAMAN MODAL

Tabel 2.198 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Penanaman Modal										
1	Kepeminatan (LoI) kerjasama atau kemitraan antara UMK dengan UMB	Buah	85,00	-	68,00	0,00	0,00	0,00	80,00	Belum Tercapai
2	Nilai investasi per tahun (milyar)	Milyar Rupiah	223,70	-	3294,76	200,10	193,10	193,10	86,32	Belum Tercapai
3	Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Standar Pelayanan	Persen	95,00	-	83,45	85,00	97,27	97,27	102,39	Tercapai

Pada urusan Penanaman Modal, terdapat 2 (dua) indikator yang kemungkinan belum memenuhi target pada akhir tahun RPJMD, yakni :

a. Kepeminatan (LoI) kerjasama atau kemitraan antara UMK dengan UMB.
b. Nilai investasi per tahun (milyar).

Hal ini disebabkan dampak pandemi yang sangat kuat terhadap urusan penanaman modal.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

19. URUSAN KEBUDAYAAN

Tabel 2.199 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Kebudayaan										
1	*Event* kesenian dan kebudayaan yang disiapkan skala nasional	*Event*	12,00	-	2,00	2,00	1,00	5,00	41,67	Belum Tercapai
2	*Event* kesenian yang difasilitasi	*Event*	42,00	-	21,00	7,00	6,00	40,00	95,24	Akan Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	Komunitas	30,00	-	100,00	5,00	59,00	165,00	550,00	Tercapai
4	Persentase pengunjung museum batik	Persen	4,86	-	3,96	4,83	6,68	6,68	137,38	Tercapai
Pada urusan kebudayaan masih terdapat 1 indikator yang belum tercapai terhadap target akhir RPJMD, yakni pada indikator *Event* kesenian dan kebudayaan yang disiapkan skala nasional). Hal ini disebabkan karena pengaruh adanya pandemi yang mensyaratkan pemenuhan terhadap protocol kesehatan pencegahan penyebaran virus melalui pengurangan kerumunan.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

20. URUSAN PERPUSTAKAAN

Tabel 2.200 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Perpustakaan										
1	Rasio Pengunjung Perpustakaan per tahun (penduduk usia 5-60 thn)	Indeks	27,00	-	36,21	14,00	15,40	15,40	57,04	Belum Tercapai
2	Persentase perpustakaan kelurahan yang aktif	Persen	25,93	-	11,11	18,52	7,41	7,41	28,57	Belum Tercapai
Kedua indikator pada urusan perpustakaan masih cukup jauh capaiannya terhadap target akhir RPJMD. Hal ini sangat disebabkan pengaruh adanya pandemi yang membatasi kerumunan untuk mengurangi resiko penyebaran *COVID-19* sehingga pengunjung perpustakaan secara fisik jauh berkurang. Namun demikian, telah dilakukan usaha pengadaan perpustakaan secara digital untuk menggantikan sementara perpustakan secara fisik.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

21. URUSAN KEARSIPAN

Tabel 2.201 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Kearsipan										
1	Persentase Pembinaan Kearsipan yang ditindaklanjuti	Persen	69,70	-	33,30	57,58	60,00	60,00	86,08	Belum Tercapai
2	Persentase jumlah OPD yang dilakukan audit	Persen	63,16	-	53,33	34,84	35,38	35,38	56,02	Belum Tercapai
3	Arsip yang dilestarikan (statis)	Arsip	11.000	-	9.296,00	10.000,00	18.496	18.496,00	168,15	Tercapai
2 (dua) dari 3 (tiga) indikator pada urusan Kearsipan belum tercapai. 1 (satu) indikator yakni Persentase Pembinaan Kearsipan yang ditindaklanjuti, masih on the track dengan target akhir RPJMD. Namun demikian, pada indikator Persentase jumlah OPD yang dilakukan audit, capaian terpengaruh dampak pandemi *COVID-19*.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

22. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Tabel 2.202 Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Kepemudaan dan Olahraga										
1	Persentase anggota organisasi kepemudaan yang dibina	Persen	85,71	-	26,67	36,36	106,67	106,67	124,44	Tercapai
2	Prestasi olahraga tingkat provinsi (Medali)	Orang	113,00	-	22,00	0,00	0,00	51,00	45,13	Belum Tercapai
3	Prestasi olahraga tingkat nasional (Medali)	Orang	14,00	-	1,00	0,00	0,00	3,00	21,43	Belum Tercapai
4	Peningkatan *event* olahraga tk Provinsi dan Nasional	*Event*	14,00	-	1,00	0,00	0,00	1,00	7,14	Belum Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Persentase ketersediaan sarpras Olahraga sesuai jenis cabor	Persen	45,00	-	42,86	40,00	46,15	46,15	102,56	Tercapai
Pada urusan Kepemudaan dan Olahraga terdapat 3 (tiga) indikator yang Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMDnya belum tercapai terhadap Target Akhir RPJMD. Penyebab belum tercapai ketiga indikator tersebut adalah terjadinya pandemi yang mengakibatkan penundaan berbagai kejuaran olahraga tingkat kota, provinsi, nasional.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

23. URUSAN STATISTIK

Tabel 2.203 Capaian Indikator Urusan Statistik Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Statistik										
1	Persentase data statistik sektoral yang tersusun	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

24. URUSAN PERSANDIAN

Tabel 2.204 Capaian Indikator Urusan Persandian Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Persandian										
1	Persentase berita daerah yang lancar, aman dan terjaga kerahasiaannya	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

25. URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

Tabel 2.205 Capaian Indikator Urusan Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Perikanan dan Kelautan										
1	Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	Persen	209 M	187 M di Tahun 2015	13,23	1,95	-0,41	176,84	84,61	Akan Tercapai
2	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	Rp. Milyar	5,5 M	4,2 M	13,23	1,95	-0,41	5,30	96,36	Akan Tercapai
3	Nelayan yang dibina	Persen	888 orang	600 orang	11,83	8,00	14,64	963,00	108,45	Tercapai
4	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	1870,00	1382 ton	0,70	0,00	-53,97	809,03	43,26	Belum Tercapai
5	peningkatan konsumsi makan ikan	Persen	28 kg/kpt/tahun	22,3 kg/kpt/tahun	12,73	6,00	8,10	33,64	179,89	Tercapai
6	persentase pembudidaya yang dibina	Persen	644 orang	230 orang	30,00	30,00	29,81	1181,00	183,39	Tercapai
7	Peningkatan tenant dan non tenant	persen	24 tenant	6 tenant	57,00	50,00	50,00	30,00	125,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pada urusan Perikanan dan Kelautan terdapat 1 (satu) indikakator yang Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD terhadap target akhir belum tercapai. Indikaor tersebut adalah peningkatan produksi perikanan yang capaiannya baru mencapai 43,26 Persen dari target akhir RPJMD. Hal ini disebabkan produksi perikanan budidya yang sulit meningkat karena faktor alam (banjir hujan dibulan februari dan rob di bulan mei, juni, oktober, november, desember) serta dampak pembangunan tanggul pada tambak.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

26. URUSAN PARIWISATA

Tabel 2.206 Capaian Indikator Urusan Pariwisata Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pariwisata										
1	persentase destinasi wisata yang berkembang	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase pelaku pariwisata yang terbina	Persen	1,85	100,00	1,55	1,69	0,60	0,60	32,19	Belum Tercapai
3	Persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	Persen	100,00	n/a	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Belum Tercapai
2 (dua) dari 3 (tiga) indikator pada urusan Pariwisata belum mencapai target akhir RPJMD. Penyebab terjadi belum tercapainya indikator tersebut adalah pandemi *COVID-19* yang sangat mempengaruhi usaha di sektor pariwisata.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

27. URUSAN PERTANIAN

Tabel 2.207 Capaian Indikator Urusan Pertanian Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pertanian										
1	Persentase kenaikan nilai produksi peternakan	Persen	4,00	-	6,96	4,00	-2,68	-2,68	-67,07	Belum Tercapai
2	Persentase Peningkatan Layanan Pemotongan Hewan di RPH	Persen	5,00	-	-34,00	3,00	-3,85	-3,85	-77,02	Belum Tercapai
3	Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis	kasus	2.400,00	-	0,00	2.400,00	2.432,00	2.432,00	98,68	Akan Tercapai
4	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	Persen	25,00	-	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Tercapai
5	Persentase peningkatan produksi padi	Persen	10,00	-	-8,00	3,00	11,54	11,54	115,36	Tercapai

Pada urusan pertanian terdapat 3 (tiga) indikator yang belum tercapai, yang antara lain disebabkan :

a. Persentase kenaikan nilai produksi peternakan karena nilai produksi peternakan menurun cukup drastis pada jenis ternak yang bernilai tinggi (daging), sehingga total nilai produksi terlihat menurun signifikan.

b. Persentase Peningkatan Layanan Pemotongan Hewan di RPH karena permintaan pemotongan hewan ternak turun signifikan (daya beli daging turun) pengaruh pandemi covid.

c. Persentase kenaikan kelas kelompok tani, yang disebabkan oleh dampak pandemi *COVID-19*.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

28. URUSAN PERINDUSTRIAN

Tabel 2.208 Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Perindustrian										
1	Pelaku IKM Batik Baru	IKM	10,00	-	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	Tercapai
2	Persentase IKM dalam LIK	Persen	100,00	-	0,00	15,00	80,00	80,00	80,00	Belum Tercapai
3	Produk Hukum Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah	perda	1,00	-	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Tercapai
4	Peningkatan Jumlah IKM Terlatih Peningkatan SDM Teknologi Industri	IKM	255,00	-	75,00	30,00	30,00	205,00	80,39	Belum Tercapai
Pada urusan perindustrian, 2 (dua) indikator belum tercapai yakni Persentase IKM dalam LIK dan Peningkatan Jumlah IKM Terlatih Peningkatan SDM Teknologi Industri, namun demikian capaian tersebut masih on the track dengan target akhir RPJMD.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

29. URUSAN PERDAGANGAN

Tabel 2.209 Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Perdagangan										
1	Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang	Persen	100,00	-	58,19	97,00	68,96	68,96	68,96	Belum Tercapai
2	persentase peningkatan obyek sasaran pengawasan barang beredar	Persen	100,00	-	100,00	94,68	101,06	101,06	101,06	Tercapai
3	Eksportir di Kota Pekalongan	pelaku usaha	18,00	12,00	21,00	17,00	21,00	21,00	116,67	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui even pameran	UMKM	72,00	-	16,00	3,00	3,00	3,00	4,17	Belum Tercapai
5	Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi Pekalongan Batik Night Market	UMKM	300,00	10,00	60,00	0,00	0,00	60,00	20,00	Belum Tercapai
6	Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui E-Marketplace	UMKM	70,00	-	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00	Tercapai
7	Kawasan tertib PK5	kawasan	7,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	Tercapai
8	Persentase pemenuhan persyaratan teknis SNI Pasar Rakyat	Persen	30,77	-	26,57	27,27	27,27	27,27	88,63	Belum Tercapai

Pada urusan perdagangan, terdapat 4 (empat) indikator yang belum tercapai. 3 (tiga) diantaranya disebabkan karena dampak pandemi, yakni:

a. Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang.
b. Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui even pameran.
c. Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi Pekalongan Batik Night Market.

1 (satu) indikator yakni Persentase pemenuhan persyaratan teknis SNI Pasar Rakyat, belum tercapai terhadap target namun masih on the track dalam kerangka pencapaian target akhir RPJMD.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

30. URUSAN PERENCANAAN

Tabel 2.210 Capaian Indikator Urusan Perencanaan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Perencanaan										
1	Persentase pemanfaatan data/informasi dalam perencanaan	Persen	100,00	-	112,72	0,00	0,00	112,72	112,72	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan Tepat Waktu	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Triwulanan Tepat Waktu	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4	persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman	Persen	100,00	-	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Pemsosbud	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

31. URUSAN KEUANGAN

Tabel 2.211 Capaian Indikator Urusan Keuangan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Keuangan										
1	Persentase Peningkatan potensi pendapatan	Persen	4,50	-	4,90	4,00	22,73	22,73	505,15	Tercapai
2	persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot	Persen	64,50	-	62,07	63,00	37,82	37,82	58,63	Belum Tercapai
3	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4	Persentase OPD yang menyesaikan laporan Persediaan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5	Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
8	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak	Persen	100,00	-	108,92	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
9	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Retribusi	Persen	100,00	-	27,71	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
10	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
11	Persentase Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Pada urusan keuangan terdapat 1 (satu) indikator yang kemungkinan pada akhir tahun RPJMD belum mencapai target yang diharapkan. Indikator tersebut adalah persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot. Hal ini disebabkan Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan yang belum bersertifikat sejumlah 1959 bidang akan diselesaikan secara bertahap. Saat ini sudah dilakukan pengukuran tetapi masih proses pembuatan sertifikat.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

32. URUSAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

Tabel 2.212 Capaian Indikator Urusan Kepegawaian dan Diklat Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Kepegawaian dan Diklat										
1	Persentase PNS yang memiliki Kompetensi	Persen	28,00	-	27,95	3,96	11,00	11,00	39,29	Belum Tercapai
2	Persentase PNS tugas belajar dan ijin belajar	Persen	32,53	-	0,62	1,38	1,23	1,23	3,77	Belum Tercapai
3	Tingkat kepuasan PNS terhadap administrasi kepegawaian	Persen	25,00	-	23,00	28,00	40,05	40,05	160,19	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Persentase Ketersediaan data PNS	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,60	100,60	100,60	Tercapai
5	Persentase Kesesuaian Kompetensi dengan Jabatan	Persen	78,00	-	81,05	83,20	72,63	72,63	93,12	Akan Tercapai
6	Persentase PNS berkembang karier	Persen	40,00	-	36,96	13,17	36,00	36,00	90,00	Akan Tercapai

Pada urusan kepegawaian dan diklat, terdapat 2 (dua) indikator yang belum tercapai, yang antara lain disebabkan :

a. Persentase PNS yang memiliki Kompetensi, yang disebabkan dampak Pandemi menyebabkan pelaksanaan diklat kompetensi sulit dilakukan.

b. Persentase PNS tugas belajar dan ijin belajar, yang dikarenakan adanya regulasi yang mensyaratkan PNS untuk meningkatkan pendidikan terutama jabatan fungsional.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

33. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tabel 2.213 Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Penelitian dan Pengembangan										
1	Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD	Persen	60,00	-	82,00	60,00	80,00	80,00	133,33	Tercapai
2	Persentase PD yang difasilitasi dalam inovasi daerah	Persen	95,00	-	100,00	0,00	100,00	100,00	105,26	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

34. URUSAN FUNGSI LAIN

Tabel 2.214 Capaian Indikator Urusan Fungsi Lain Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Fungsi Lain										
1	Persentase penyelesaian kasus-kasus / pengaduan masyarakat pada Wilayah Irbanwil I	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase penyelesaian kasus-kasus / pengaduan masyarakat pada Wilayah Irbanwil II	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	persentase perda inisiatif yang diterbitkan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	Persen	100,00	-	155,56	100,00	111,11	111,11	111,11	Tercapai
5	Ketentuan Cukai yang telah disosialisasikan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6	Rata-rata nilai persepsi kinerja unit pelayanan	Indeks	88,00	-	82,21	85,00	80,42	80,42	91,39	Akan Tercapai
7	Persentase PD yang melaksanakan evaluasi kelembagaan	Persen	25,80	-	87,50	6,50	100,00	100,00	387,60	Tercapai
8	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Evaluasi AKIP Kota	Nilai	15,00	-	11,09	14,00	11,17	11,17	93,08	Akan Tercapai
9	Persentase Capaian Target Pengawasan Internal pada Wilayah Irbanwil I	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,92	100,92	100,92	Tercapai
10	Persentase Capaian Target Pengawasan Internal pada Wilayah Irbanwil II	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,93	100,93	100,93	Tercapai
11	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Barat	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
12	Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Barat	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
13	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Barat	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
14	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Timur	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Timur	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
16	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Timur	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
17	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Selatan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
18	Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Selatan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
19	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Selatan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	85,26	85,26	85,26	Belum Tercapai
20	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Utara	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
21	Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Utara	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
22	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Utara	Persen	100,00	-	100,00	100,00	52,08	52,08	52,08	Belum Tercapai
23	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPIP level berkembang	Persen	100,00	-	61,29	77,42	80,65	80,65	80,65	Belum Tercapai
24	Persentase OPD dengan hasil evaluasi pembangunan ZI minimal B	Persen	80,65	-	54,84	64,52	67,74	67,74	84,00	Belum Tercapai
25	Persentase pengaduan masyarakat bidang hukum yang tertangani	Persen	80,00	-	100,00	72,00	100,00	100,00	125,00	Tercapai
26	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealiasi	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
27	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan		7,00	-	2,00	1,00	6,00	6,00	85,71	Belum Tercapai
28	Persentase kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, Perusda, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan pelaksanaannya	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Persentase medical general check up	Persen	100,00	-	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Belum Tercapai
30	Nilai LPPD	indeks	3,23	-	3,23	3,05	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
31	Persentase efektivitas kerjasama daerah	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
32	Persentase realisasi patok batas wilayah	Persen	100,00	-	51,40	67,00	92,52	92,52	92,52	Akan Tercapai
33	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	Persen	100,00	-	99,57	100,00	99,37	99,37	99,37	Akan Tercapai
34	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	100,00	-	95,29	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
35	Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
36	Persentase penyelenggara pendidikan keagamaan yang mendapatkan sertifikat/ syahadah	Persen	100,00	-	99,07	95,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
37	Persentase capaian fasilitasi lembaga sosial kemasyarakatan	Persen	100,00	-	100,00	95,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
38	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persen	95,00	-	100,00	90,00	100,00	100,00	105,26	Tercapai
39	Persentase kerjasama informasi dengan mas media yang efektif	Persen	100,00	-	94,84	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
40	Persentase pelayanan keprotokoleran dan kehumasan	Persen	100,00	-	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
41	Persentase Capaian target pemenuhan infrastruktur KPA-Kapabilatas APIP	Persen	80,00	-	64,24	70,00	70,00	70,00	87,50	Belum Tercapai
42	Persentase penyelesaian TLHP APF	Persen	85,00	-	89,61	85,00	90,02	90,02	105,91	Tercapai
43	Persentase Perda yang ditetapkan	Persen	100,00	-	27,00	100,00	46,67	46,67	46,67	Belum Tercapai

Pada urusan Fungsi lain, terdapat 8 (delapan) indikator yang belum tercapai, antara lain

a. Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Selatan, karena Pandemi kegiatan senam tidak dilaksanakan dikarenakan akan menimbulkan kerumunan.
b. Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Utara, yang disebabkan Pandemi kegiatan senam tidak dilaksanakan dikarenakan akan menimbulkan kerumunan.
c. Persentase OPD yang menyelenggarakan SPIP level berkembang, belum tercapai namun masih *on track* dalam kerangka target RPJMD.

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
d. Persentase OPD dengan hasil evaluasi pembangunan ZI minimal B, belum tercapai namun masih on track dalam kerangka target RPJMD. e. Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan, belum tercapai namun masih on track dalam kerangka target RPJMD f. Persentase medical general check up, beberapa penyakit yang memerlukan perawatan medis tertentu telah ditanggung oleh BPJS sehingga anggaran tidak terealisasi g. Persentase Capaian target pemenuhan infrastruktur KPA-Kapabilatas APIP, belum tercapai namun masih on track dalam kerangka target RPJMD h. Persentase Perda yang ditetapkan, yang disebabkan dampak pandemi *COVID-19*.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

35. URUSAN RUTIN

Tabel 2.215 Capaian Indikator Urusan Rutin Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Rutin										
1	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	Persen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase pelaksanaan pemiliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	Persen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Persentase kehadiran aparatur	Persen	100,00	0,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5	Persentase capaian aparatur berkompeten	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Pengaduan yang diterima	kasus	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	100,00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

2.5.3. Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020

2.5.3.1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota meliputi :

1. Pendidikan Dasar;
2. Pendidikan Kesetaraan; dan
3. Pendidikan Anak Usia Dini.

Pada tahun 2020, ketiga indikator SPM Bidang Pendidikan tidak tercapai. Hal ini dikarenakan :

1. Pada Pendidikan Dasar, jumlah penduduk kota Pekalongan usia 7 – 15 tahun mendapatkan layanan Pendidikan Dasar (Dikdas) yaitu sebanyak 41.886 orang dari target yang seharusnya 43.648 orang atau sebesar 89,79 persen. Karena banyak orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di sekolah luar kota dan juga tidak sedikit penduduk Kota Pekalongan yang berdomisili di luar kota dan menyekolahkan anaknya di luar kota juga;
2. Pada Pendidikan Kesetaraan, Jumlah penduduk kota Pekalongan usia 7 – 18 tahun yang belum mendapatkan pendidikan formal dan mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan yaitu sebanyak 1.678 orang dari target yang seharusnya 6.582 orang atau sebesar 25,49 persen. Disebabkan belum adanya pendampingan khusus bagi Anak Tidak Sekolah (ATS) sehingga mempunyai motivasi untuk bersekolah, dan juga tidak adanya proses pembelajaran tatap muka;
3. Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pada tahun 2020 jumlah penduduk kota Pekalongan usia 5 – 6 tahun mendapatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu sebanyak 10.045 orang dari target yang seharusnya 10.439 orang atau sebesar 96,23 persen. Karena banyak orang tua utamanya yang tidak mampu tidak menyekolahkan anaknya di PAUD.

Hasil pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.216 berikut.

Tabel 2.216 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/ MTs)	100 persen	89,79 persen	Tidak Tercapai
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 persen	25,49 persen	Tidak Tercapai
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 persen	96,23 persen	Tidak Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020, 2021

2.5.3.2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar urusan kesehatan meliputi :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiancy Virus*).

Hasil capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.217 berikut.

Tabel 2.217 Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase pelayanan ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	98,22 persen	Tidak Tercapai
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase pelayanan ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan	100 persen	100 persen	Tercapai
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase pelayanan bayi baru lahir mendapat pelayanan bayi baru lahir	100 persen	99,59 persen	Tidak Tercapai
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standard	100 persen	88,39 persen	Tidak Tercapai
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	100 persen	52,54 persen	Tidak Tercapai
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standard	100 persen	28,57 persen	Tidak Tercapai
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100 persen	70,57 persen	Tidak Tercapai
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	100 persen	27,1 persen	Tidak Tercapai
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	100 persen	100 persen	Tercapai

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
10	Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Ganguan Jiwa Berat	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard	100 persen	100 persen	Tercapai
11	Pelayanan Kesehatan pada Orang terduga Tubercolusis (Tb)	Persentase Orang terduga TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai standard	100 persen	78,43 persen	Tidak Tercapai
12	Pelayanan Kesehatan pada Orang terinveksi virus HIV/AIDS	Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard	100 persen	100 persen	Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020, 2021

Dari ke 12 indikator tersebut, sebanyak 4 indikator mencapai target, dan sebanyak 8 indikator tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan :

1. Pada pelayanan kesehatan ibu hamil, Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 6.122 orang atau sebesar 98,22 persen. Belum tercapai dikarenakan adanya kasus kematian pada ibu hamil dan ada beberapa ibu hamil yang pindah tempat tinggal;
2. Pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 5.881 orang atau sebesar 99,59 persen dikarenakan adanya kasus kematian pada bayi;
3. Pada pelayanan kesehatan Balita, jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 22.614 orang atau sebesar 88,39 persen. Hal ini dikarenakan selama masa pandemi *COVID-19* Posyandu banyak yang tutup sehingga banyak balita yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan balita;
4. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah warga negara pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 23.280 orang atau sebesar 52,54 persen. Hal ini disebabkan karena sekolah libur selama pandemi sehingga tidak semua siswa hadir atau diijinkan hadir saat pemeriksaan;
5. Pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah warga negara pada usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 59.357 orang atau sebesar 28,57 persen. Ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya :
   a. Pelayanan kesehatan usia produktif di masa pandemi, Posbindu PTM baru diijinkan mulai akhir Juli 2020, bulan September dihentikan lagi dan baru dimulai akhir bulan Oktober 2020 dan tidak semua Posbindu tetapi hanya Posbindu yang mampu menerapkan protokol kesehatan yang diijinkan melaksanakan kegiatan;
   b. Target sasaran untuk pelayanan kesehatan/skrining kesehatan usia produktif terlalu tinggi;
   c. Bahan pemeriksaan untuk usia produktif untuk gula darah belum mencukupi.
6. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah warga negara pada usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 19.563 orang atau sebesar 70,57 persen. Hal ini dikarenakan masa Pandemi poksila tidak dibuka;
7. Pada pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 20.834 orang atau sebesar 27,10 persen. Hal ini dikarenakan adanya perubahan definisi operasional dari sasaran pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang semula 6 persen dikalikan jumlah penduduk ≥ 15 tahun menjadi 32,2 persen dikalikan jumlah penduduk ≥ 15 tahun sehingga menyebabkan sasarannya terlalu tinggi. Selain itu kegiatan Posbindu PTM

untuk deteksi dini faktor resiko penyakit hipertensi, baru diijinkan mulai/buka akhir Juli 2020, dihentikan lagi pada September dan Oktober 2020 mulai kembali akhir Oktober 2020. Tidak semua Posbindu PTM mulai kegiatan, tetapi hanya Posbindu PTM yang mampu menerapkan protokol kesehatan yang diijinkan mulai kegiatan;

8. Pada pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis, jumlah warga negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 4.228 orang atau sebesar 78,43 persen. Hal ini dikarenakan kader kesehatan tidak dapat bekerja secara optimal dan penyuluhan kesehatan terkait tuberkolosis terhentisaat adanya pandemi *COVID-19*.

2.5.5.3. Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota meliputi :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.218 berikut.

Tabel 2.218 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Pekalongan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 persen	100 persen	Tercapai
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 persen	100 persen	Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020, 2021

Kedua indikator tersebut dapat mencapai target yang ditentukan yaitu sejumlah 31.321 KK untuk Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan sejumlah 60.627 KK untuk Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik air minum.

2.5.5.4. Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota meliputi :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masayarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.219 berikut.

Tabel 2.219 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Pekalongan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 persen	100 persen	Tercapai
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masayarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memeproleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 persen	100 persen	Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020, 2021

Kedua indikator tersebut mencapai target karena untuk Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban Bencana Kab/Kota dapat dipenuhi yaitu sejumlah 66 orang, dan untuk fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Dearah Kab/Kota sejumlah 16 orang juga terpenuhi (relokasi warga yang berada di bantaran sungai di Kelurahan Krapyak).

2.5.5.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota meliputi :

1. Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.220 berikut.

Tabel 2.220 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Pencapai an	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 persen	100 persen	Tercapai
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 persen	100 persen	Tercapai

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Pencapai an	Tercapai/ Tidak Tercapai
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 persen	8,43 persen	Tidak Tercapai
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen	2,69 persen	Tidak Tercapai
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	100 persen	Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020, 2021

Dari kelima indikator tersebut, 3 indikator mencapai target dan 2 indikator tidak mencapai target, dikarenakan :

1. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (jumlah warga negara yang menjadi korban bencana daerah kabupaten/kota) sebanyak 26.306 orang atau sebesar 8,43 persen, terdiri dari :
   a. Korban/terdampak banjir sebanyak 15.054 orang;
   b. Korban/terdampak gelombang pasang/ abrasi sebanyak 9.158 orang;
   c. Korban/terdampak angin puting beliung/ angin kencang/ cuaca ekstrem sebanyak 2.094 orang.
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tingkat kab/kota), hanya sebanyak 8.404 orang yang bersedia untuk dievakuasi dan diungsikan ke posko pengungsian orang atau sebesar 2,69 persen.

2.5.5.6. Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Sosial Kabupaten/Kota meliputi:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Sosial Tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.221 berikut.

Tabel 2.221 Capaian SPM Bidang Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Pencapaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 persen	100 persen	Tercapai
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 persen	100 persen	Tercapai
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 persen	100 persen	Tercapai
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 persen	100 persen	Tercapai
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korbanbencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	100 persen	Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020, 2021

Dari kelima indikator tersebut, semua dapat tercapai sesuai target 100 persen.

2.5.4. Hasil Evaluasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) Tahun 2020

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Di Indonesia, SDG's ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen Metadata Indikator TPB/SDG's Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu : Pilar Pembangunan Sosial; Pilar Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan; dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

2.5.4.1. Pilar Pembangunan Sosial

Pada Pilar Pembangunan Sosial, terdiri dari 5 *goals* 47 target dan 77 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan adalah sebanyak 65 indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.222 berikut.

Tabel 2.222 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2020

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN								
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Angka Kemiskinan	BPS	persen	5,70	7,17	Tidak Tercapai
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	Cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	DINKES	persen	85	77,15	Tidak Tercapai
1.3.1 (b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	DINPER INAKER	persen		NA	Untuk indikator tersebut belum bisa disajikan karena harus dikonfirmasikan ke BPJS Ketenagakerjaan dulu, sedangkan BPJS mulai tahun 2018 pendataan peseta Jamsostek digabung dengan pendataan peserta yang non tenaga kerja sehingga kesulitan untuk memilah-milah
1.3.2 (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persentase penyandang disabilitas miskin	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	DINSOS P2KB	persen	PM	0,18	Tidak ada target tetapi data tersedia
1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Prgram Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Prgram Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Prgram Keluarga Harapan	DINSOS P2KB	KPM	PM	10.695	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49	Cakupan persalinan di fasilitas	DINKES	persen	100	100	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	pelayanan kesehatan					
1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Cakupan imunisasi dasar lengkap	DINKES	persen	100 persen	90,02	Tidak Tercapai
1.4.1 (c)	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	CPR/ Peserta KB Aktif	DINSOS P2KB	persen	64	67,35	Tercapai
1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	DINPER KIM	persen	93,99	97,09	Tercapai
1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Cakupan Pelayanan Sanitasi	DINPER KIM	persen	95,99	91,72	Tidak Tercapai
1.4.1 (f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase kawasan permukinan kumuh yang tertangani	DINPER KIM	persen	1,77	3,79	Tercapai
1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat	DINDIK	persen	95,5	82,93	Tidak Tercapai
1.4.1 (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat	DINDIK	persen	77,5	60,89	Tidak Tercapai
1.4.1 (i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/ sederajat	BPS	persen	PM	55,58	Tidak ada target tetapi data tersedia
1.4.1 (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	DINDUK CAPIL	persen	55	53,81	Tidak Tercapai
1.4.1 (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.								
1.5.1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	DINSOS P2KB	persen	PM	9	Tidak ada target tetapi data tersedia
1.5.2 (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	BPBD	Rupiah	PM	12.037.798.900	Tidak ada target tetapi data tersedia
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat provinsi	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat kota	BPBD	Dokumen	1	0	Tidak Tercapai
TUJUAN 2: MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN								
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishmen)*	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	Skor Pola Pangan Harapan	DINPERPA	skor	77,16	92,01	Tercapai
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	DINPERPA	persen	NA	NA	Data tidak tersedia (tidak termasuk indikator kinerja dalam RPJMD maupun Renstra)
2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/ hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/ hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/ hari	DINKES	persen	2,1	9,10	Tercapai
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita	DINKES	persen	< 12 persen	9,42	Tercapai
2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada	DINKES	persen	6,85	5,82	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	baduta	baduta	anak di bawah dua tahun/ baduta					
2.2.2*	Prevalensi Malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe)	Prevalensi Gizi Buruk	Prevalensi Gizi Buruk	DINKES	persen	<0,5	0,16	Tercapai
2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Jumlah kasus anemia pada ibu hamil	DINKES	kasus	9,02	8,33	Tercapai
2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Cakupan ASI eksklusif	Cakupan ASI eksklusif	DINKES	persen	47 persen	53,4	Tercapai
2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	DINPERPA	skor	76,02	77,16	Tercapai
TUJUAN 3: MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA								
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINKES	Per 100.000 KH	102	152,41	Tidak Tercapai
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan	Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan	DINKES	persen	100	100	Tercapai
3.1.2 (a)	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	DINKES	persen	100	100	Tercapai
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	12,30	10,84	Tercapai
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Cakupan neonatal komplikasi yang ditangani	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	6,7	4,91	Tidak Tercapai
3.2.2 (a)	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	9,6	8,81	Tercapai
3.2.2 (b)	Persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	Cakupan UCI desa	Cakupan UCI desa	DINKES	persen	100	100	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Prevalensi HIV-AIDS	Jumlah kasus HIV/ AIDS	DINKES	orang	100	Jumlah kasus HIV umur 15-49 tahun = 99	Tercapai
3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Jumlah Insiden TB	Jumlah kasus TB Paru BTA (+)	DINKES	kasus	-	172,31	Tidak Tercapai
3.3.3 (a)	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi Malaria.	Angka Kesakitan Malaria	Angka Kesakitan Malaria	DINKES	per 1.000 penduduk beresiko	-	NA	Data tidak tersedia (tidak ada kasus malaria)
3.3.4. (a)	Persentase Kab/ Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Persentase Kab/ Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Jumlah kasus hepatitis B	DINKES	kasus	PM	Jumlah kasus Hepatitis B = 45 kasus	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.3.5*	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filiariasis dan Kusta)	Angka penemuan kasus baru kusta	Angka penemuan kasus baru kusta	DINKES	per 100.000 penduduk	<10	70,83	Tidak Tercapai
3.3.5 (b)	Jumlah kab/ kota dengan eliminasi filarissis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap 1)	Angka kasus filaria yang ditangani	Angka kasus filaria yang ditangani	DINKES	per 100.000 penduduk	<1	Angka kasus filaria yang ditangani= 2 kasus	Tidak Tercapai
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Proporsi kasus hipertensi di fasyankes	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	DINKES	persen	100	27,10	Tidak Tercapai
3.4.1 (c)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	Deteksi dini obesitas pada penduduk usia 15+ tahun di fasyankes	DINKES	persen	18	3,77	Tercapai
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.								
3.5.1 (a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahguna an narkoba	KESBANGPOL	orang	PM	11	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	KESBANGPOL	orang		NA	Data tidak tersedia (indikator provinsi)
3.5.1 (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Jumlah korban penyalahguna an NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam	KESBANGPOL	orang	PM	22	Tidak ada target tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			panti sesuai standar pelayanan					
3.5.1 (d)	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan / dibantu	KESBANGPOL	Rumah sakit	PM	2	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.5.1 (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	BNN/ Kesbangpol	Persen		NA	Data tidak tersedia (tidak termasuk indikator kinerja dalam RPJMD maupun Renstra)
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								
3.7.1 (a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	CPR/ Peserta KB Aktif	CPR/ Peserta KB Aktif	DINSOS P2KB		PM	67,35	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	DINSOS P2KB	persen	2,252	2,166	Tercapai
3.7.2 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MJKP) cara modern	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	DINSOS P2KB		24,00	19,63	Tidak Tercapai
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	DINSOS P2KB			NA	Data tidak tersedia (tidak termasuk indikator kinerja dalam RPJMD maupun Renstra)
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								
3.8.1 (a)	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	Unmeet Need	Unmeet Need KB	DINSOS P2KB	persen	12,00	18,18	Tidak Tercapai
3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah	Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah	DINKES	persen	85	77,15	Tidak Tercapai
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.								
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	BPS	persen	PM	24,48 persen	Tidak ada target tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 4: MENJAMIN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MEMPROMOSIKAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT								
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
4.1.1 (a)	Persentase SD/ MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/ MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/ MI berakreditasi A	DINDIK	persen	PM	69,86	Tidak ada target tetapi data tersedia
4.1.1 (b)	Persentase SMP/ MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/ MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/ MTs berakreditasi A	DINDIK	persen	PM	68,42	Tidak ada target tetapi data tersedia
4.1.1 (c)	Persentase SMA/ MA berakreditasi minimal B	Persentase SMA/ MA berakreditasi minimal B		DINDIK			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat	DINDIK	persen	100	101,31	Tercapai
4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat	DINDIK	persen	100	105,44	Tercapai
4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ sederajat	BPS	persen	PM	60,28	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								
4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINDIK	persen	62,5	60,28	Tidak Tercapai
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.								
4.3.1 (a)	Persentase APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat	Persentase APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat	Persentase APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat	BPS	persen	PM	78,66	Tidak ada target tetapi data tersedia
4.3.1 (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.								
4.5.1 *	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/ MI/ sederajat; (2) SMP/ MTs/ sederajat; (3) SMA/ SMK/ MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/ laki-laki di PT	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/ MI/ sederajat; (2) SMP/ MTs/ sederajat; (3) SMA/ SMK/ MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/ laki-laki di PT	1) APM SD/ MI/ sederajat 2) APM SMP/ MTs/ Sederajat (2018)	DINDIK		1) 96 2) 77,5	1) 82,93 2) 60,89	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Angka melek huruf	Angka melek huruf	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia (BPS tidak melakukan survei)
Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.								
4.a.1	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	persen Ruang kelas SMA/ MA/ SMK sesuai standar nasional pendidikan	Persentase Ruang kelas SD/ MI dan SMP/ MTs sesuai standar nasional pendidikan	Dindik	persen	PM	99,7	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.								
4.c.1	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	Persentase pendidik SMA/ SMALB/ MA/ SMK bersertifikat pendidik	Persentase pendidik TK-SD-SMP bersertifikat pendidik	Dindik	persen	52,71	50,47	Tidak Tercapai
TUJUAN 5: MENCAPAI KESETERAAN GENDER DAN MEMPERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN								
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Rasio kabupaten/ kota yang menerapkan kebijakan responisf gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	DPMPPPA		PM	SK (Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 463/ 806 Tahun 2020 tentang Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pekalongan, Keputusan Wali Kota Nomor 463/ 807 thn 2020 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga, Perwal Nomor 65 B	Tidak ada target tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Thn 2020 tentang LPPAR = 3	
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	DPMPPA	persen	PM	perempuan dewasa = 27/ 110,241*100= 0,02449	Tidak ada target tetapi data tersedia
5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	DPMPPA	persen	PM	anak perempuan = 6/ 12,177= 0,04927	Tidak ada target tetapi data tersedia
5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan terlayani	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan terlayani	DPMPPA	persen	100	=(27 perempuan+16 anak)*100 = 100	Tercapai
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur(PUS) kurang dari 20 tahun	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur(PUS) kurang dari 20 tahun	DINSOS P2KB	Kasus	250	245	Tercapai
5.3.1 (c)	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/ SMK/ MA sederajat	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/ SMK/ MA sederajat	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/ SMK/ MA sederajat	BPS	persen	PM	78,66	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
5.5.1 *	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Setwan	persen	PM	8,82	Tidak ada target tetapi data tersedia
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	BKPPD	persen	PM	36,07	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensikonferensi tersebut.								
5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/ KB yang	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga	Unmet need KB	DINSOS P2KB	persen	12	18,18	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	tidak terpenuhi)	Berencana/ KB yang tidak terpenuhi).						
5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	DINSOS P2KB		64	67,35	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

2.5.4.2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pada Pilar Pembangunan Sosial, terdiri dari 5 *goals* 54 target dan 72 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan adalah sebanyak 18 indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.223 berikut.

Tabel 2.223 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2020

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 7 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA								
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern								
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	PLN-ESDM-BPS	persen		NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita	PLN-ESDM-BPS	Kwh/ Kapita		NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
7.1.2 (a)	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	BPS			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
7.1.2 (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS		PM	95,7	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.								
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Bauran energi terbarukan	Bauran energi terbarukan	BPS			NA	Data tidak tersedia (belum ada bauran energi terbarukan di Kota Pekalongan)
TUJUAN 8 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG INSKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF & MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YG LAYAK UNTUK SEMUA								
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB perkapita	Laju pertumbuhan PDRB	Laju pertumbuhan PDRB	BPS / Bappeda	persen	5.70	-1,87	Tidak tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.1.1. (a)	PDRB per kapita	PDRB per kapita	PDRB per kapita	BPS	juta rupiah	PM	35,22	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya								
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasukmelalui akses terhadap jasa keuangan								
8.3.1*	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	BPS			NA	data estimasi dari Sakernas kurang cakupan untuk angka Kabupaten/ Kota
8.3.1. (a)	Presentase Tenaga kerja formal	Presentase Tenaga kerja formal	Persentase Tenaga kerja formal	BPS	persen		NA	data estimasi Sakernas belum dihitung
8.3.1. (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS	persen		NA	data estimasi dari Sakernas kurang cakupan untuk angka Kabupaten/ Kota
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah Minimum Kota	Dinperinaker	Rupiah	PM	2.139.754,00	Tidak ada target tetapi data tersedia
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	persen	3,60	7,02	Tidak Tercapai
8.5.2 (a)	Tingkat setengah pengguran	Tingkat setengah pengguran	Tingkat setengah pengguran	BPS			NA	data estimasi Sakernas belum dihitung
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan								
8.6.1*	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Jumlah pelatihan untuk pemuda	DINPERINAKER	orang	560	528	Tidak Tercapai
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1. (a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinparbudpora	orang	600	224	Tidak tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinparbudpora	orang	534.400	283.658	Tidak tercapai
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestic untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua								
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	DPMPTSP			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	DPMPTSP			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)
TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI								
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua								
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	Kondisi jalan baik	Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang)	DPU PR	persen	77,58	80,03	Tercapai
9.1.2(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinhub	dermaga		NA	Data tidak tersedia
9.1.2(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Jumlah pelabuhan strategis	Jumlah pelabuhan strategis	Dinhub	pelabuhan		NA	Data tidak tersedia
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industry dalam lapangan kerja dan produk domestic bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.								
9.4.1*.	Rasio Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Rasio Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Rasio Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
9.4.1.(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negaranegara kurang berkembang pada tahun 2020.								
9.C.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	DINKOMINFO	Persen		NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)
9.C.1. (a)	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	BPS	Persen		NA	Data tidak tersedia (BPS tidak melakukan survei)
9.c.1. (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	BPS	Persen		NA	Data tidak tersedia (BPS tidak melakukan survei)
TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA								
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional								
10.1.1 *	Pertumbuhan pengeluaran atau pendapatan per kapita diantara penduduk yang berada di bawah 40 persen dan terhadap total penduduk	Koefisien Gini	Koefisien Gini	BPS / Bappeda	-	0,34	0,314	Tercapai
10.1.1. (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	BPS / Bappeda	persen	5,70	7,17	Tidak tercapai
10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut								
10.3.1. (a)	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	BPS			NA	Data tidak tersedia
10.3.1. (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
10.3.1. (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar								
10.4.1. (b)	Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan	DINPERINAKER			NA	Untuk indikator tersebut belum bisa disajikan karena harus dikonfirmasikan ke BPJS Ketenagakerjaan dulu, sedangkan BPJS mulai tahun 2018 pendataan peseta Jamsostek digabung dengan pendataan peserta yang non tenaga kerja sehingga kesulitan untuk memilah-milah
Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik								
10.7.2. (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupansi	DINPERINAKER	kegiatan		NA	Tidak ada kegiatan karena pandemi *COVID-19*
TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.								
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada Negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya								
17.1.1 *	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDM menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	BKD/ BPS		981.361.482.000	485.317.842.324,61	Tidak tercapai
17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	BKD		218.020.320.000	NA	Data di BKD hanya target dan realisasi Pendapatan dan penerimaan pajak sedangkan data PDP ada di BPS
Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
17.6.2 (c)	Proporsi penduduk terlayani *mobile*	Proporsi penduduk terlayani *mobile*	Proporsi penduduk terlayani	DINKOMINFO			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	broadband	*broadband*	*mobile broadband*					indikator kinerja RPJMD dan Renstra)
Target 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk Negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi								
17.8.1 *	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	BPS			NA	Data Susenas BPS
Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi Negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020								
17.11.1 (a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Jumlah ekspor non migas	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS			NA	data tersedia sampai level provinsi, untuk kabupaten/ kota susah diperoleh(pelabuhan sebagai titik ekspor impor)
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama								
17.17.1 (a)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	BAPPEDA			NA	Data tidak tersedia (tidak ada KPBU)
17.17.1 (b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha	BAPPEDA			NA	Data tidak tersedia (tidak ada KPBU)
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional								
17.18.1 (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia
17.18.1 (d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Jumlah indikator SDGs Kota	Bappeda	indikator	222	195	Tidak tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

2.5.4.3. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pada Pilar Pembangunan Sosial, terdiri dari 6 *goals* 56 target dan 69 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan adalah sebanyak 19 indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.224 berikut.

Tabel 2.224 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2020

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA								
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	DINPERKIM	Persen	93,99	97,09	Tercapai
6.1.1. (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga,perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Kapasitas Prasarana air baku	Kapasitas Prasarana air baku	DINPERKIM	m3	PM	12.196.014	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Cakupan pelayanan sanitasi	Cakupan pelayanan sanitasi	DINPERKIM	Persen	95,99	91,72	Tidak tercapai
6.2.1. (c)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	DINPERKIM	Kelurahan	27	27	Tercapai
6.2.1. (d)	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	DINKES	Kelurahan	15	21	Tercapai
6.2.1 (e)	Jumlah kabupaten/ kota yang terbangun infrastruktur airlimbah dengan sistem terpusatskala kota, kawasan dan komunal	Jumlah kabupaten/ kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Jumlah IPAL yang terbangun dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal	DLH	Persen	NA	NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.3.1 (a)	Jumlah Kabupaten/ kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kabupaten/ kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kabupaten/ kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	DLH		NA	NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.								
6.4.1. (a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	DLH		50	50	Tercapai
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.								
6.5.1. (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
6.5.1 (b)	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
6.5.1. (C)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
6.5.1. (e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
6.5.1. (h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan					kota)
6.5.1. (i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.								
6.6.1. (d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
6.6.1. (e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN								
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.								
11.1.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memilki hunian yang layak dan terjangkau	Rasio rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	DINPERKIM	Persen	97,35	97,30	Tidak tercapai
Target 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.								
11.2 .1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	DINHUB			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.								
11.4.1. (a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	DPUPR			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orangorang dalam situasi rentan.								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.5.1 *	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang	PM	1000,9	Tidak ada target tetapi data tersedia
11.5.1. (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	BPBD			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
11.5.1. (b)	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	DINSOS P2KB			NA	Data tidak tersedia
11.5.1. (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	BPBD			NA	Data tidak tersedia (Kota Pekalongan belum memiliki sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan)
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	DLH	Persen	89,74	87,98	Tidak ada target tetapi data tersedia
11.6.1. (b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Jumlah bank sampah skala kota dan kelurahan	DLH		PM	1	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.								
11.7.1. (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau	DLH	Persen	18,8	8,23	Tidak tercapai
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.								
11.b.1 *	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	BPBD	dokumen	1	0	Tidak tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.b.2 *	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	dokumen	1	0	Tidak tercapai
TUJUAN 12: MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKENAJUTAN								
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
12.4.1. (a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	DLH	buah		NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH	Ton/ tahun	PM	4.416	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.								
12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	DLH	persen	26	26	Tercapai
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.								
12.6.1. (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DLH			NA	Data tidak tersedia (tidak ada perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001)
TUJUAN 13: MENGATASI LANGKAH SEGERA UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA								
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara								
13.1.1 *	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	BPBD	Dokumen	1	0	Tidak tercapai
13.1.2 *	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	orang	PM	1000,9	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional								
13.2.1. (a)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
TUJUAN 14: MELAKUKAN KONSERVASI DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT, SAMUDERA DAN MARITIM UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia								
14.5.1 *	Cakupan kawasan konservasi laut	Cakupan kawasan konservasi laut	Cakupan kawasan konservasi laut	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)								
14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Persentase kepatuhan pelaku usaha		-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar								
14.b.1 (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Jumlah nelayan yang terlindungi	Jumlah nelayan yang terlindungi (asuransi)	DKP		100	190	Tercapai
TUJUAN 15: PELESTARIKAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN								
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
15.1.1. (a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	DLH			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.								
15.2.1. (a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
15.2.1. (b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
15.2.1. (d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi								
15.3.1 (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhablitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi luas lahan kritis yang direhablitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi luas lahan kritis yang direhablitasi terhadap luas lahan keseluruhan	DLH			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

2.5.4.4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pada Pilar Pembangunan Sosial, terdiri dari 1 *goals* 12 target dan 23 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan adalah sebanyak 13 indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.225 berikut.

Tabel 2.225 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2020

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target Dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 16: PERDAMIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KOKOH								
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun								
16.1.1. (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	POLRES	kasus		NA	Data tidak tersedia (data di luar kewenangan Pemkot)
16.1.2. (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	POLRES			NA	Data tidak tersedia (data di luar kewenangan Pemkot)
16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	POLRES			NA	Data tidak tersedia (data di luar kewenangan Pemkot)
16.1.4 *	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	BPS			NA	Data tidak tersedia (tidak melakukan survei)
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak								
16.2.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	BPS			NA	Data tidak tersedia (tidak melakukan survei)
16.2.1. (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	Rasio korban kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan	Rasio korban kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan	DPMPPA		PM	anak L = 5/13,095*100= 0,0382 , anak P = 6/12,177*100=0,0493	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua								
16.3.1. (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	POLRES	persen		NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target Dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu	Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu	Bagian Hukum	Perkara	5	5	Tercapai
16.3.1.(c)	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum				NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya								
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	BPS			NA	Data tersedia pada level nasional
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat								
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Realisasi APBD Pemerintah Kota	BKD		1.012.737.890.000	944.840.460.674	Serapan Anggaran sebesar : 93,30 persen
16.6.1(a)	Prosentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan daerah dengan opini WTP	Jumlah laporan keuangan daerah dengan opini WTP	BKD	WTP	WTP	WTP	Tercapai
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	BAGIAN ORGANISASI		B	BB	Tercapai
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan (SIRUP)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	persen	100	92	Tidak Tercapai
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	IKM	BAGIAN ORGANISASI		83	80,42	Tidak Tercapai
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan								
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota	SETWAN	Persen	PM	8,82	Tidak ada target tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target Dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	BKPPD	Persen	PM	36.07	Tidak ada target tetapi data tersedia
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indeks Lembaga Demokrasi.	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	Indeks Hak-hak Politik.	Indeks Hak-hak Politik.	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
16.9.1.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	DINDUKCAPIL	persen	PM	99,43	Tidak ada target tetapi data tersedia
16.9.1(a)	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40 persen berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40 persen berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40 persen berpendapatan bawah	DINDUKCAPIL			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	DINDUKCAPIL	Persen	PM	93,46	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 16.10 Menjamin akses public terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional								
16.10.1.(a)	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	DPMPPA		PM	27 pengaduan	Tidak ada target tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target Dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, stautori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi	Persentase SKPD yang mengembangkan Teknologi Informasi	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas	DINKOMINFO	Persen	PM	92,86	Tidak ada target tetapi data tersedia
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah badan publik telah menyusun peraturan layanan informasi publik di Provinsi	Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatif/ Baik"	DINKOMINFO	Persen		NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
16.10.2. (b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melaui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melaui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melaui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.6.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan mendasarkan pada hasil evaluasi Indikator kinerja program RKPD Tahun 2020. Hasil proses identifikasi permasalahan ini kemudian dikelompokkan ke dalam kelompok permasalahan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.226 berikut.

Tabel 2.226 Permasalahan Pembangunan Daerah

INDIKATOR YANG BELUM TERCAPAI DAN ISU GLOBAL	SUMBER DATA	PERMASALAHAN
Persentase penurunan kasus narkoba	Indikator Program	Implementasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter
Konflik Sosial	Indikator Tujuan Kota	
Persentase penurunan kasus konflik sosial	IKU Kota	
AKI (Angka Kematian Ibu)	IKU Renstra/ SDG's	Angka Harapan Hidup, AKI, AKB, AKABA, dan Angka Kesakitan, Tingginya penyebaran *COVID-19*
BOR (*Bed Occupation Rate*)	IKU Renstra	
NDR (*Net Death Rate*)	IKU Renstra	
GDR (*Gross Death Rate*)	IKU Renstra	
Persentase kasus balita gizi buruk	Indikator Program	
Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal utama	Indikator Program	
Persentase RS yang terakreditasi minimal utama	Indikator Program	
Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk	Indikator Program	

INDIKATOR YANG BELUM TERCAPAI DAN ISU GLOBAL	SUMBER DATA	PERMASALAHAN
Cakupan pelayanan penderita TB (SPM)	Indikator Program/ SPM	
Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi (SPM)	Indikator Program/ SPM/SDG's	
Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif (SPM)	Indikator Program/ SPM	
Cakupan pelayanan kesehatan balita (SPM)	Indikator Program/ SPM	
Cakupan penduduk yg mempunyai jaminan kesehatan	Indikator Program/SDG's	
Persentase ketersediaan obat di Puskesmas dan BKPM	Indikator Program	
Persentase peningkatan jumlah produksi Obat Asli Indonesia	Indikator Program	
Persentase peningkatan jumlah varian produk obat asli Indonesia	Indikator Program	
Cakupan Posyandu strata mandiri	Indikator Program	
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (SPM)	Indikator Program/ SPM	
Persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh pendarahan	Indikator Program	
Skor Akreditasi RS	Indikator Program	
Konsumsi pangan penduduk sesuai dengan Pola Pangan Harapan	IKU Renstra	
Cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	Indikator SDG's	
Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Indikator SDG's	
Jumlah kasus TB Paru BTA (+)	Indikator SDG's	
Angka penemuan kasus baru kusta	Indikator SDG's	
Angka kasus filaria yang ditangani	Indikator SDG's	
Cakupan imunisasi dasar lengkap	Indikator SDG's	
Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah	Indikator SDG's	
Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Indikator SDG's	
Kurangnya sarpras, alkes dan tenaga kesehatan untuk menangani penyakit menular *COVID-19*	Isu global	
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan	Isu global	
Angka Kemiskinan	Indikator Tujuan Kota/ SDG's	Dampak sosial ekonomi pasca wabah *COVID-19*
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	IKU Kota/ SDG's	
Cakupan tenaga kerja yang berkompeten	Indikator Program	
Laju pertumbuhan PDRB	Indikator SDG's	
Jumlah pelatihan untuk pemuda	Indikator SDG's	
Persentase penyelenggaraan pendidikan berakreditasi A	IKU Kota	Akses dan Mutu Pendidikan dan Kurangnya kesiapan penerapan pembelajaran dengan metode daring
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang PAUD/TK	IKU Renstra	

INDIKATOR YANG BELUM TERCAPAI DAN ISU GLOBAL	SUMBER DATA	PERMASALAHAN
Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Berakreditasi A	IKU Renstra	
APM PAUD	Indikator Program	
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Indikator SDG's	
APK TK/RA	Indikator Program	
APM TK/RA	Indikator Program	
APM SD/MI	Indikator Program/SDG's	
APM SMP/MTs	Indikator Program/ SDG's	
Angka Partisipasi PNF (non PAUD)	Indikator Program	
Persentase pendidik/guru bersertifikat profesi pendidik	Indikator Program	
Persentase pendidik TK-SD-SMP bersertifikat pendidik	Indikator SDG's	
Rasio kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi	Indikator Program	
Angka sekolah Jenjang Dikdas penyelenggara pendidikan Inklusi	Indikator Program	
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/ MTs)	Indikator SPM	
Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Indikator SPM	
Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	IKU Renstra	
Prestasi olahraga tingkat provinsi (peringkat secara umum semua cabor)	IKU Renstra	
Prestasi olahraga tingkat provinsi (Medali)	Indikator Program	
Prestasi olahraga tingkat nasional (Medali)	Indikator Program	
Peningkatan *event* olahraga tk Provinsi dan Nasional	Indikator Program	
Kurangnya penyiapan materi pembelajaran dengan metode daring.	Isu global	
Kurangnya kesiapan pendidik untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan metode daring.	Isu global	
Kurang tersedianya sarpras pendukung penyelenggaraan KBM dengan metode daring.	Isu global	
Ketidaksiapan orang tua untuk mendampingi anak dalam pembelajaran dengan metode daring	Isu global	
OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Indikator Program	Smart Governance dan Implementasi IT belum optimal
Stakeholder yang berkoordinasi dalam pemanfaatan data kependudukan	Indikator Program	

INDIKATOR YANG BELUM TERCAPAI DAN ISU GLOBAL	SUMBER DATA	PERMASALAHAN
Persentase Cakupan layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Pendidikan (Sekolah negeri, SMP, SD, TK)	Indikator Program	
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan (SIRUP)	Indikator SDG's	
Implementasi *social distancing* dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mengurangi presensi harian pegawai dan efektivitas koordinasi, sehingga sangat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Isu global	Pembatasan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan selama wabah *COVID-19*
Berkurangnya pelanggaran perda	IKU Renstra	Pelayanan publik, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang responsif dan fleksibel perlu ditingkatkan
Persentase korban bencana yang ditangani	IKU Renstra	
Persentase pemilih pemula yang terdidik politik	Indikator Program	
Persentase korban bencana alam yang ditangani	Indikator Program	
Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	Indikator Program/ SDG's	
Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	Indikator Program/ SDG's	
Kenaikan kunjungan Perpustakaan	IKU Renstra	
Rasio Pengunjung Perpustakaan per tahun (penduduk usia 5-60 thn)	Indikator Program	
Persentase perpustakaan kelurahan yang aktif	Indikator Program	
Persentase Pembinaan Kearsipan yang ditindaklanjuti	Indikator Program	
Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang	Indikator Program	
Persentase pemenuhan persyaratan teknis SNI Pasar Rakyat	Indikator Program	
Persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot	Indikator Program	
Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Selatan	Indikator Program	
Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Utara	Indikator Program	
Persentase Perda yang ditetapkan	Indikator Program	
Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indikator SPM	
Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Indikator SPM	
Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Indikator SDG's	
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Indikator SDG's	

INDIKATOR YANG BELUM TERCAPAI DAN ISU GLOBAL	SUMBER DATA	PERMASALAHAN
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat kota	Indikator SDG's	
Unmeet Need KB	Indikator SDG's	
Persentase OPD dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik kategori Baik (Informatif)	IKU Kota	
Cakupan Kelompok Sasaran Tibum yang dibina	Indikator Program	
Persentase PNS yang memiliki Kompetensi	Indikator Program	
Persentase PNS tugas belajar dan ijin belajar	Indikator Program	
Persentase medical general check up	Indikator Program	
Indeks Profesionalitas ASN	IKU Kota	
IKM	Indikator SDG's	
Persentase jumlah OPD yang dilakukan audit	Indikator Program	
Level Kapabiltas APIP	IKU Renstra	
Tingkat implementasi SPIP Hasil Self Assesment	IKU Renstra	
Persentase OPD yang memenuhi kriteria WBK	IKU Renstra	
Persentase OPD yang menyelenggarakan SPIP level berkembang	Indikator Program	
Persentase Capaian target pemenuhan infrastruktur KPA-Kapabilatas APIP	Indikator Program	
Indeks Reformasi Birokrasi	Indikator Tujuan Kota	
Tingkat kematangan implementasi SPIP	IKU Kota	
Persentase OPD dengan hasil evaluasi pembangunan ZI minimal B	Indikator Program	
Persentase kampung layak anak	Indikator Program	
Cakupan komunitas yang berdaya dan memanfaatkan teknologi informasi	IKU Kota	Pemanfaatan IT komunitas dalam pengembangan ekonomi belum optimal
Pertumbuhan Ekonomi	IKU Kota/ SDG's	Kuatnya pengaruh negatif *COVID-19* terhadap pengembangan potensi ekonomi kreatif dan pariwisata yang belum optimal, serta kelembagaan ekonomi kreatif perlu diperkuat
Pertumbuhan PDRB sektor Industri pengolahan	IKU Kota	
Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	IKU Kota	
Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat	Indikator Program	
Nilai modal usaha UMKM dari koperasi (Rp. Trilyun)	IKU Renstra	
UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha dan jaringan kemitraan	Indikator Program	
Persentase koperasi/unit simpan pinjam/ syariah yang sehat dan cukup sehat	Indikator Program	
Kepeminatan (LoI) kerjasama atau kemitraan antara UMK dengan UMB	Indikator Program	

INDIKATOR YANG BELUM TERCAPAI DAN ISU GLOBAL	SUMBER DATA	PERMASALAHAN
Nilai investasi per tahun (milyar)	Indikator Program	
Peningkatan produksi perikanan budidaya	Indikator Program	
Kunjungan wisata per tahun	IKU Renstra	
Persentase pelaku pariwisata yang terbina	Indikator Program	
Persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	Indikator Program	
Peningkatan Produksi Pangan Hewani kg (persen per tahun)	IKU Renstra	
Persentase kenaikan nilai produksi peternakan	Indikator Program	
Persentase Peningkatan Layanan Pemotongan Hewan di RPH	Indikator Program	
Persentase kenaikan kelas kelompok tani	Indikator Program	
Persentase IKM dalam LIK	Indikator Program	
Peningkatan Jumlah IKM Terlatih Peningkatan SDM Teknologi Industri	Indikator Program	
Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui *event* pameran	Indikator Program	
Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi Pekalongan Batik Night Market	Indikator Program	
Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Indikator Program	
Jumlah wisatawan mancanegara	Indikator SDG's	
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Indikator SDG's	
persentase peningkatan penyelenggaraan *event*	IKU Kota	
Persentase peningkatan kelompok budaya	IKU Renstra	
Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan skala nasional	Indikator Program	
Sektor jasa dan perdagangan, serta *basic* ekonomi kreatif yang merupakan lokomotif utama di Kota Pekalongan sangat terpengaruh secara negatif dari mewabahnya *COVID-19*.	Isu global	
Indeks Kualitas Air	IKU Renstra	Kualitas Lingkungan Hidup, Keterbatasan RTH
Persentase capaian target 801 usaha dan/atau kegiatan terolah limbahnya	Indikator Program	
Indeks kualitas Udara	IKU Renstra	
Persentase peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH)	Indikator Program	
Cakupan pemantauan kualitas udara di perumahan, industri dan fasilitas umum	Indikator Program	
Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau	Indikator SDG's	
Tertib hukum lingkungan	IKU Renstra	
Persentase usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis aspek lingkungan	Indikator Program	
Cakupan pelayanan sanitasi	Indikator SDG's	

INDIKATOR YANG BELUM TERCAPAI DAN ISU GLOBAL	SUMBER DATA	PERMASALAHAN
Persentase luas wilayah genangan banjir dan rob	IKU Kota	Banjir, Rob, Konektivitas, kawasan strategis perkotaan
Persentase penurunan Luas Genangan	Indikator Tujuan Kota	
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat kota	Indikator SDG's	
Persentase drainase primer dalam kondisi baik	Indikator Program	Sarpras Perkotaan
Persentase ketersediaan drainase lingkungan	IKU Renstra	
Rasio panjang jalan lingkungan yang terlayani drainase	Indikator Program	
Peningkatan sarpas lokasi makam	Indikator Program	
Persentase sampah terkelola di TPS3R	Indikator Program	
Rasio rumah layak huni	Indikator SDG's	
Rasio Rumah Tidak Layak Huni	Indikator Program	
Persentase perumahan MBR yang menyediakan fasum fasos	Indikator Program	
Komponen ruang publik kreatif (taman bahagia) yang ditingkatkan sarana prasarananya	Indikator Program	
Persentase pemenuhan ruang publik yang ramah lingkungan	Indikator Tujuan Kota	
Persentase pemenuhan sarana prasrana pada ruang publik kreatif (taman bahagia)	IKU Kota	

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

2.6.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah juga dapat diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dimana permasalahan urusan merupakan penjabaran dari akar masalah di tingkat Kota. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 2.227 berikut.

Tabel 2.227 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Belum optimalnya capaian SPM pendidikan
	Belum optimalnya kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas
	Belum optimalnya ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Belum optimalnya Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
	Belum optimalnya RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi
	Belum optimalnya ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek
	Belum optimalnya sarana farmasi yang memenuhi standar
	Belum optimalnya Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran
	Belum optimalnya Rumah Tangga Sehat
	Belum optimalnya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat
	Belum optimalnya ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar
	Belum optimalnya Tenaga Kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum optimalnya tingkat Kemantapan Jalan kota
	Belum optimalnya Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan Kota
	Belum optimalnya drainase dalam kondisi baik
	Belum optimalnya Cakupan jalan dan jembatan permukiman dalam kondisi baik
	Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (IKK *Outcome*)
	Belum optimalnya Rasio Persetujuan Bangunan Gedung
	Belum optimalnya Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi
	Belum optimalnya Penetapan Rencana Tata Ruang kota
	Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
	Belum optimalnya Ketersediaan Sarana Persampahan Regional
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum optimalnya Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Warga
	Belum optimalnya Luas kawasan permukiman kumuh
	Belum optimalnya Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
	Belum optimalnya penanganan kumuh
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Belum optimalnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM
	Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
	Belum optimalnya penanganan korban bencana alam
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
	Belum optimalnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
	Belum optimalnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
	Belum optimalnya keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Belum optimalnya pemenuhan tenaga kerja bersertifikat kompetensi
	Belum optimalnya Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota
	Belum optimalnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Belum optimalnya kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender
	Belum optimalnya penanganan kekerasan terhadap perempuan
	Belum optimalnya kelurahan dan atau kecamatan yang mengikuti evaluasi GSIB
	Belum optimalnya Dekela (desa/kelurahan layak anak)
	Belum optimalnya anak korban kekerasan yang ditangani (IKK *Outcome*)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Belum optimalnya Skor pola pangan harapan ketersediaan
	Belum optimalnya implementasi kelurahan tahan pangan di Kota Pekalongan
	Belum optimalnya penerapan pangan segar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Belum optimalnya pembebasan bidang tanah untuk pembangunan insfrastruktur kota
	Belum optimalnya pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup
	Belum optimalnya jumlah limbah yang diolah
	Belum optimalnya Ruang Terbuka Hijau
	Belum optimalnya pengelolaan sampah
	Belum optimalnya usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH
	Belum optimalnya perolehan penghargaan bidang LH
	Belum optimalnya persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan
	Belum optimalnya pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti
	Belum optimalnya masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Belum optimalnya ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk
	Belum optimalnya ketercapaian pelayanan pencatatan sipil
	Belum optimalnya OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK *Outcome*)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Belum optimalnya ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan
	Belum optimalnya kelurahan dengan kriteria (cepat berkembang)
	Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum optimalnya pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*)
	Belum optimalnya Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun
	Belum optimalnya penurunan angka Unmeet need KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Belum optimalnya ketersediaan fasilitas LLAJ
	Belum optimalnya Kinerja Lalu lintas kota
	Belum optimalnya kepatuhan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala
	Belum optimalnya Rasio konektivitas kota
	Belum optimalnya penyelenggaraan parkir yang berizin
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belum optimalnya Pelayanan Informasi Publik
	Belum optimalnya pencapaian Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Belum optimalnya Koperasi yang berkualitas
	Belum optimalnya koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan KSPPS/USPPS yang sehat dan cukup sehat
	Belum optimalnya koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota
	Belum optimalnya koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota
	Belum optimalnya jumlah usaha mikro yang dilakukan updating pendataan
	Belum optimalnya peningkatan usaha Mikro yang menjadi wira usaha
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Belum optimalnya penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
	Belum optimalnya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
	Belum optimalnya Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal
	Belum optimalnya peningkatan Invetasi baru

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan
	Belum optimalnya Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor
	Belum optimalnya Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Belum optimalnya sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan (*penetration testing*)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Belum optimalnya *Event* kesenian dan kebudayaan yang disiapkan
	Belum optimalnya Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi
	Belum optimalnya pelestarian Cagar Budaya
	Belum optimalnya pengunjung museum batik
	Belum optimalnya pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Belum optimalnya Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)
	Belum optimalnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Belum optimalnya nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik
	Belum optimalnya Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional
	Belum optimalnya Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
	Belum optimalnya kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan Tangkap bersumber dari TPI
	Belum optimalnya Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan
	Belum optimalnya Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
	Belum optimalnya Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI
	Belum optimalnya Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Belum optimalnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
	Belum optimalnya pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan
	Belum optimalnya pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar
	Belum optimalnya pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Belum optimalnya Produktivitas pertanian per hektar per tahun
	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian
	Belum optimalnya kenaikan kelas kelompok tani
	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	Belum optimalnya penanganan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
	Belum optimalnya kenaikan nilai produk peternakan
	Belum optimalnya usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
	Belum optimalnya pemantauan obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga
	Belum optimalnya peningkatan volume ekspor
	Belum optimalnya alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
	Belum optimalnya jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
	Belum optimalnya pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK *Outcome*)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Belum optimalnya pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
	Belum optimalnya jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
	Belum optimalnya penyedaan informasi industri secara lengkap dan terkini
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	Belum optimalnya pelayanan hukum dalam penetapan Perda
	Belum optimalnyakoordinasi kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan
	Belum optimalnya deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
	Belum optimalnya Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa
	Belum optimalnya capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat
SEKRETARIAT DPRD	Belum optimalnya pembahasan dokumen penganggaran yang tepat waktu
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
PERENCANAAN	Belum optimalnya ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu
	Belum optimalnya penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan tepat waktu
	Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud
	Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian
	Belum optimalnya penyediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah
KEUANGAN	Belum optimalnya Indeks Pengelolaan Aset Baik (ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan)
	Belum optimalnya Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD
	Belum optimalnya Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
KEPEGAWAIAN	Belum optimalnya pengembangan karier PNS
	Belum optimalnya Tingkat Pelaporan Kinerja ASN
	Belum optimalnya Keterisian Jabatan
	Belum optimalnya Keterpenuhan Formasi ASN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Belum optimalnya PNS berkembang kompetensinya (Latsar)
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Belum optimalnya Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD
	Belum optimalnya Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)
	Belum optimalnya Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
INSPEKTORAT DAERAH	Belum optimalnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
	Belum optimalnya Level Kapabilitas APIP
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	Belum optimalnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Belum optimalnya Tingkat Kinerja Trantibum
	Belum optimalnya Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan
	Belum optimalnya Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum
	Belum optimalnya ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Belum optimalnya pemahaman etnis/suku/agama/ormas dan LSM terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan
	Belum optimalnya pemahaman etnis/suku/agama/ormas dan LSM terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Belum optimalnya penanganan konflik ormas
	Belum optimalnya penanganan kejadian terkait konflik sosial
	Belum optimalnya pendidikan politik bagi parpol dan lembaga pendidikan

URUSAN	PERMASALAHAN
Non Urusan	
Non Urusan	Belum optimalnya ketersediaan laporan capaian kinerja
	Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
	Belum optimalnya pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah
	Belum optimalnya ketersediaan layanan BLUD
	Belum optimalnya proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	Belum optimalnya ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah
	Belum optimalnya ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Belum optimalnya ketercapaian administrasi umum perangkat daerah
	Belum optimalnya ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi
	Belum optimalnya pelayanan keprotokoleran
	Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

2.7. Isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kota Pekalongan sebagaimana dijelaskan pada sub bab 2.5, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.228 berikut.

Tabel 2.228 Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal (Smart Governance)	Tata kelola pemerintahan
Belum optimalnya kualitas layanan publik (*Smart Governance*)	
Belum optimalnya implementasi manajemen ASN	
Akuntabilitas kinerja dan keuangan masih perlu ditingkatkan	
Belum optimalnya penerapan zona integritas	
Penataan sistem drainase yang belum optimal	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup
Tingginya tingkat pencemaran air	
Belum optimalnya tutupan hutan	
Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	
Belum optimalnya cakupan layanan sampahan perkotaan	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan infrastruktur Lingkungan Permukiman
Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan serta masih tingginya kawasan permukiman kumuh	

Permasalahan	Isu Strategis
Belum optimalnya layanan transportasi perkotaan	
Belum optimalnya capaian keluarga sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan (Masa Pandemi *COVID-19*)
Belum optimalnya penanganan kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran
Masih tingginya angka pengangguran terbuka	
Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter dan keagamaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan	
Belum optimalnya pengarusutamaan hak anak	
Pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi sebagai akibat pandemi *COVID-19* serta masih rendahnya kontribusi sektor-sektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi
Terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan	Pelestarian Budaya Lokal
Belum optimalnya pengelolaan potensi konflik sosial	Kondusivitas Wilayah

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

Selanjutnya isu strategis dijelaskan sebagai berikut :

2.7.1. Tata Kelola Pemerintahan

Isu strategis tata kelola pemerintahan adalah upaya peningkatan secara kontinyu sehingga dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu tata kelola pemerintahan yang melayani untuk kepentingan masyarakat, serta memenuhi beberapa kriteria pokok yaitu : transparan, partisipasif, akuntabel dan koordinatif. Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Pusat telah menetapkan indikator berupa Indeks Reformasi Birokrasi. Hingga tahun 2019, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan sebesar 68,97 dan pada tahun 2020 sebesar 68,91. Upaya untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan tersebut, disebabkan beberapa aspek terkait masih terjadi permasalahan dan harus segera dioptimalkan. Beberapa permasalahan tersebut, yaitu: a) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal, karena indeks SPBE masih sebesar 3,14. Pemerintah Kota Pekalongan selama ini telah membangun sistem tersebut dan akan terus diperkuat; b) Layanan publik belum dikelola dengan optimal, karena persentase OPD dengan IKM Baik masih sebesar 93,94 persen; c) Keterbatasan ASN, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dikarenakan Indeks Profesionalitas ASN masih sebesar 50,80; d) Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan karena nilai SAKIP BB. Meskipun nilai SAKIP telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun tetapi harus terus ditingkatkan agar optimal; e) Akuntabilitas keuangan masih perlu ditingkatkan terus, meskipun dalam beberapa tahun terakhir telah memperoleh WTP; f) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena maturitas SPIP bernilai 3.022; g) Belum optimalnya penataan dan kompetensi ASN karena belum terwujudnya merit system secara penuh; dan h) Belum optimalnya tingkat kapabilitas APIP karena kapabilitas APIP masih pada level 3.

Upaya untuk selalu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, secara kontinyu telah dan akan terus dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dan didukung pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Dengan integrasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tata kelola pemerintahan selalu meningkat dan dimanfaatkan bagi terwujudnya pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat secara optimal. Tata kelola pemerintahan yang baik, akan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Selama ini, peran masyarakat dirasakan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat sehingga pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berhasil. Secara hakiki, tata kelola pemerintahan yang baik ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Tata Kelola Pemerintahan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan harus terus dioptimalkan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat.

2.7.2. Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan Kota Pekalongan yang sering terjadi dan dapat dengan mudah diidentifikasi adalah banjir dan rob serta kualitas lingkungan yang belum optimal. Banjir, rob dan kualitas lingkungan sangat berdampak bagi kegiatan sosial ekonomi dan kenyamanan kehidupan masyarakat maupun kunjungan wisatawan maupun pendatang. Isu strategisnya adalah banjir, rob dan kualitas lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan kenyamanan lingkungan. Dalam arti luas, banjir, rob dan kualitas lingkungan yang tidak optimal sangat berdampak bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, banjir dan rob harus dikendalikan serta kualitas lingkungan hidup dioptimalkan agar berdampak bagi peningkatan kondisi sosial ekonomi dan kenyamanan lingkungan.

Secara topografi, wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Laut Jawa dan memiliki ketinggian 0-6 m dpl. Beberapa kawasan di Kota Pekalongan telah memiliki ketinggian di bawah permukaan laut. Fenomena ketinggian di bawah permukaan laut tersebut, tidak terlepas dari kondisi permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan yang mengalami penurunan (*land subsidence*). Secara morfologi, wilayah Kota Pekalongan pun juga sangat datar karena memiliki kelerengan yang sangat rendah. Oleh karena itu, secara alamiah, wilayah Kota Pekalongan sangat rentan dan memiliki risiko tinggi bencana banjir dan/atau rob. Tantangan penanganan banjir dan rob semakin besar karena adanya fenomena pemanasan global yang berdampak peningkatan permukaan air laut. Banjir dan rob sangat berdampak bagi masyarakat, oleh karena itu, banjir dan rob harus mendapatkan penanganan yang optimal sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dan berkembang.

Upaya penanganan banjir dan rob telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan serta didukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terakhir telah dilakukan adalah dengan pembangunan tanggul raksasa di kawasan pesisir dan peninggian tanggul yang dilakukan setiap tahun. Namun demikian, hingga saat ini, luas genangan masih sebesar 38,23 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan. Beberapa hal yang menyebabkan masih tingginya luasan kawasan banjir dan rob, meliputi: a) Drainase perkotaan belum optimal, persentase drainase dalam kondisi baik masih rendah yaitu 58,9 persen; b) Tingginya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), sekitar 3-4 cm per tahun; dan c) Ketimpangan kualitas lingkungan permukiman, yaitu persentase luasan kawasan kumuh masih sekitar 0,69 persen.

Kendala utama pengembangan drainase adalah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang relatif sangat datar, dengan ketinggian 0 – 6 meter dpl dan di beberapa kawasan justeru telah memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut. Oleh karena itu, penataan drainase secara bertahap perlu diarahkan pada sistem polder dengan penambahan secara terus menerus atas penyediaan kolam-kolam retensi (ruang air) ataupun *water storage* guna memaksimalkan upaya pengurangan genangan di lingkungan permukiman

Kendala penataan sistem drainase semakin bertambah dengan adanya permasalahan yang sedang terjadi yaitu penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Penelitian sedang memastikan apakah penurunan tanah disebabkan oleh ekploitasi air tanah dalam yang melebihi daya dukungnya atau karena fenomena alamiah karena wilayah Kota Pekalongan terbentuk karena proses sedimentasi sehingga terjadi proses pemampatan lapisan tanah. Namun kebijakan yang paling tepat dilakukan adalah membatasi ekploitasi air tanah tanpa melebihi daya dukungnya.

Isu yang lain adalah isu Kualitas Lingkungan Hidup, khususnya terkait kualitas tutupan lahan. Dengan menggunakan alat penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, seseorang dapat mengidentifikasi bahwa Kota Pekalongan memiliki kualitas tutupan lahan yang cukup mengkhawatirkan. Secara fisik dengan mengamati kondisi di wilayah Kota Pekalongan pun seseorang dapat mengidentifikasi bahwa wilayah Kota Pekalongan terkesan panas karena masih minimnya tutupan lahan atau vegetasi. Melalui pengukuran di lapangan pun, sudah diidentifikasi bahwa beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kota Pekalongan telah tercemar, yaitu telah terlampauinya beberapa indikator pencemar terhadap baku mutu yang ditentukan.

Kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekalongan pada tahun 2019 sebesar 52,92 dan pada tahun 2020 turun menjadi 50,84. IKLH yang belum baik tersebut ditandai dengan masih rendahnya kenyamanan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat maupun pengunjung atau wisatawan yang datang ke Kota Pekalongan. Padahal, kualitas lingkungan merupakan unsur penting pendukung bagi pengembangan sektor lainnya, misalkan pariwisata. Kualitas lingkungan hidup yang baik akan mendorong seseorang untuk mempromosikan hal-hal baik sehingga dapat menarik orang yang semakin banyak untuk datang ke Kota Pekalongan.

Indeks kualitas tutupan lahan sangat dipengaruhi luasan Ruang Terbuka Hijau. Terbatasnya RTH di Kota Pekalongan karena upaya untuk pengembangan RTH belum dilaksanakan secara kontinyu dan belum terbangunnya kesadaran bahwa pengembangan RTH dapat membantu proses-proses alamiah lingkungan hidup, seperti terjaminnya ketersediaan kawasan resapan air dan siklus alamiah air. Padahal sesuai ketentuan, seharusnya RTH publik dan privat harus mencapai minimal 30 persen dari luas wilayah. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan pun sangat identik dengan sungai kotor dan tercemar. Tingginya pencemaran air disebabkan buangan limbah industri dan limbah domestik. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan lingkungan hidup, agar pencemaran air dapat dikendalikan. Belum optimalnya kualitas tutupan lahan, kongruen dengan masih terbatasnya RTH. Upaya peningkatan kualitas tutupan lahan harus dilakukan secara kontinyu, melalui peningkatan kesadaran bahwa vegetasi sangat dibutuhkan dan pemanfaatan kawasan sempadan dan kawasan lindung untuk pengembangan vegetasi, penegakan hukum serta melanjutkan pembangunan RTH.

Isu penanganan banjir dan rob serta pengendalian kualitas lingkungan hidup juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; serta melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Isu ini juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi khususnya terkait lingkungan hidup dan bencana serta keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, yang

dibuktikan dengan penempatan proyek prioritas strategis RPJMN di Kota Pekalongan yaitu penanganan banjir/rob (Rancangan RPJMN Tahun 2020-2024).

Upaya penanganan banjir rob secara terintegrasi juga menjadi agenda percepatan ekonomi kawasan sebagaimana dijabarkan dalam Perpres 19 Tahun 2019, antara lain : Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Milyar dari APBN), Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Milyar dari APBN), Pengendalian Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN), serta penyempurnaan sistem banjir dan rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN).

2.7.3. Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman

Kota Pekalongan memiliki peran penting bagi wilayah sekitarnya. Peran penting tersebut, terutama disebabkan potensi ekonomi dan posisi strategis yang dimilikinya. Oleh karena itu, sesuai dengan RTRWN, Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Sesuai dengan RTRWP Jawa Tengah, Kota Pekalongan juga berperan sebagai pusat dari kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan).

Oleh karena itu, Kota Pekalongan selalu berkembang, secara ekonomi ditandai dengan pergeseran peran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta secara fisik, ditandai dengan semakin berkembangnya perkotaan, yaitu semakin meluasnya kawasan terbangun (*built up area*), terutama untuk perumahan dan kawasan permukiman, kegiatan industri serta perdagangan jasa. Perkembangan kegiatan perkotaan yang dinamis tersebut dan pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan, termasuk perumahan dan kawasan permukiman.

Namun demikian, peningkatan kebutuhan tersebut, belum diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan secara optimal. Infrastruktur dasar perkotaan yang harus terus ditingkatkan layanannya, terutama adalah air bersih dan persampahan perkotaan karena cakupan pelayanannya yang belum optimal, serta sanitasi yang cakupannya harus mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat. Infrastruktur dasar perkotaan yang cakupannya optimal akan mendukung perkembangan perkotaan yang optimal, dalam rangka menuju kota yang berketahanan (*resilience city*), yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Cakupan layanan air bersih perpipaan di Kota Pekalongan tahun 2019 adalah sebesar 88,60 persen dan pada tahun 2020 menjadi 88,79 persen. Cakupan layanan ini harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah Kota Pekalongan. Tantangan pengembangan cakupan layanan air bersih sangat besar karena terbatasnya sumber air baku bagi air bersih di wilayah Kota Pekalongan dan kebutuhan jaringan SPAM yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Air permukaan di wilayah Kota Pekalongan, belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku karena kualitasnya yang sangat rendah. Selama ini, sumber air baku tersebut, di samping bersumber dari air tanah di wilayah Kota Pekalongan, karena keterbatasan potensi air tanah di Kota Pekalongan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan jika dieksploitasi melebihi daya dukungnya, juga sangat bergantung dari sumber air baku dari daerah tetangga, yaitu wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Cakupan pelayanan persampahan pun juga belum optimal, persentase layanan persampahan tahun 2019 sebesar 86,30 persen dan pada tahun 2020 menjadi 87,98 persen. Cakupan pelayanan persampahan harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah. Tantangan pengelolaan persampahan terutama disebabkan keterbatasan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terutama kapasitas TPA Degayu yang semakin terbatas dan membutuhkan segera penggantian. Di samping itu, tantangan pengelolaan persampahan, terutama terkait dengan perilaku masyarakat yang belum mendukung pengelolaan persampahan, misalnya masih adanya sebagian masyarakat yang menjadikan badan air sebagai tempat sampah dan proses pemilahan sampah yang belum berjalan secara optimal.

Kondisi jalan kota pun juga harus terus ditingkatkan, agar dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan perekonomian kota. Hingga tahun 2020, jalan kota kondisi mantap sebesar 80,16 persen. Di samping itu, pengembangan perekonomian harus didukung kondisi lalu lintas yang lancar dan aman. Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul wilayah di Jawa Tengah dan Kawasan Petanglong, sehingga masih bercampurnya lalu lintas regional dan lalu lintas lokal. Meskipun V/C Ratio secara rata-rata atas jalan kota masih rendah (0,36), namun untuk Jalan Pantura ruas Kota Pekalongan, khususnya pada persimpangan sebidang kereta api masih sering terjadi kemacetan. Potensi kemacetan ini diperkirakan akan muncul kembali sebagaimana pernah terjadi pada saat sebelum pandemi *COVID-19* dan pasca uji coba penggunaan jalan tol dimana kendaraan berat seperti truck kembali ke jalan pantura.

Penyediaan infrastruktur dasar tersebut, karena peran Kota Pekalongan terhadap daerah sekitarnya, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan semata, tetapi harus mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Salah satu sumber air baku untuk air minum, merupakan hasil dari pengelolaan SPAM Petanglong. Diharapkan debit yang diberikan untuk Kota Pekalongan dapat segera meningkat sehingga dapat meningkatkan cakupan air bersih yang lebih optimal. Di bidang persampahan pun, TPA Regional Petanglong diharapkan dapat segera diwujudkan karena keterbatasan lahan di wilayah Kota Pekalongan dan ketentuan teknis yang tidak memungkinkan pengembangan TPA di wilayah Kota Pekalongan.

Isu Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Kualitas infrastruktur lingkungan permukiman sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah maupun kondisi sosial ekonomi masarakat. Wilayah Kota Pekalongan sangat rentan terjadinya bencana banjir dan rob, sehingga sangat berdampak terhadap kualitas infrastruktur lingkungan permukiman. Beberapa perumahan dan kawasan permukiman yang telah terendam rob dalam beberapa tahun terakhir, menjadi kawasan yang ditinggalkan penghuninya. Sementara kawasan lainnya pun juga selalu terendam banjir dan rob, tetapi masih tetap ditinggali pemiliknya karena tidak adanya pilihan tempat tinggal. Kawasan rentan tersebut merupakan kawasan yang akan menurun infrastruktur lingkungan permukimannya.

Hingga tahun 2020, berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan terbaru , luas kawasan kumuh mencapai 10,74 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan. Persentase tersebut merupakan luasan yang cukup signifikan, terutama kawasan tersebut berada pada kawasan yang memiliki kepadatan penduduk relatif tinggi.

Kondisi infrastruktur lingkungan permukiman yang rendah sangat mempengaruhi terhadap kondisi sosial ekonomi, kesehatan maupun kenyamanan warganya. Oleh karena itu, salah satu tantangan ke depan Pemerintah Kota Pekalongan adalah peningkatan

infrastruktur lingkungan permukiman. Keberhasilan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman harus didukung dengan keberhasilan pengendalian banjir dan rob.

2.7.4. Peningkatan Derajat Kesehatan (Masa Pandemi *COVID-19*)

Kesehatan menjadi prasyarat manusia untuk tumbuh, berkembang dan berperan dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Apalagi, pada saat ini sedang terjadi pandemi *COVID-19* sehingga tantangan untuk meningkatkan derajat kesehatan semakin berat. Pada saat pandemi ini, seluruh sumber daya kesehatan difokuskan pada penanganan pandemi, dan disisi lain muncul kekhawatiran masyarakat terhadap berkurangnya upaya promotif dan preventif serta kurangnya optimalisasi penanganan pada penderita penyakit kronis baik penderita penyakit menular/penyakit tidak menular yang dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap penurunan derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan bidang kesehatan, tidak hanya berfokus terhadap pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk tujuan kuratif semata, tetapi juga yang sifatnya preventif dan promotif. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan upaya tersebut namun peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal. Upaya preventif dan promotif yang telah dilakukan diantaranya pemberian makanan tambahan terutama kepada bayi dan balita gizi kurang dan gizi buruk, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang maupun penerapan pola hidup bersih dan sehat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan ini, ditunjukkan dengan : a) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), tahun 2019 AKI masih bernilai 101,30 per 100.000 kelahiran hidup; b) Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), tahun 2019 AKB masih bernilai 11,99 per 1.000 kelahiran hidup; c). Masih tingginya angka kematian balita (AKABA), tahun 2019 AKABA masih bernilai 9,63 per 1.000 KH; d). Masih tingginya angka kesakitan dengan nilai 12,89 persen; e) masih ditemukan Balita Gizi Buruk sebesar 0,05 persen pada tahun 2019 dan Balita Stunting sebanyak 6,87 persen , f) masih rendahnya sistem ketahanan pangan, ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 91,31 persen serta g) masih tingginya Angka Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, pada tahun 2019 mencapai sebesar 22,29 persen.

Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2019 sebesar 74,28 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 74,38 masih berada pada posisi terbawah jika dibandingkan dengan kota-kota setara di Jawa Tengah. Sehingga UHH tersebut masih terus untuk ditingkatkan secara optimal, melalui pembangunan bidang kesehatan secara terintegrasi, baik dari sisi preventif promotif maupun kuratif serta didukung peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Masih tingginya AKI Kota Pekalongan disebabkan masih belum optimalnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga ibu hamil akan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, terutama ibu hamil yang memiliki risiko tinggi. Prasarana sarana kesehatan, khususnya persalinan, harus terus ditingkatkan dan diupayakan merata, sehingga pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan ibu melahirkan, dapat diandalkan serta memiliki akses yang mudah dijangkau. Kongruen dengan AKI, tingginya AKB dan AKABA menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat serta penyediaan prasarana sarana kesehatan, terutama bagi bayi dan balita, harus terus ditingkatkan ketersediaannya sehingga mudah diakses. Angka kesakitan juga masih cukup tinggi yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular. Angka ini akan semakin tinggi dengan adanya pandemi *COVID-19*.

Peningkatan derajat kesehatan menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu ; menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia serta menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Kesehatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, sehingga beberapa prioritas pembangunan nasional dan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak dengan Rencana investasi sebesar Rp. 430 Milyar dari KPBU (Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

2.7.5. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun dan pada tahun 2019 sebesar 6,60 persen. Namun akibat dampak pandemi *COVID-19*, angka kemiskinan Kota Pekalongan tahun 2020 meningkat menjadi 7,17 persen. Dengan indikator tersebut, masih dirasakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan yang belum optimal. Penanganan angka kemiskinan di Kota Pekalongan masih menjadi isu strategis karena sasaran pengentasan kemiskinan sudah menyentuh kemiskinan struktural, sehingga upaya pengentasan kemiskinan semakin berat. Hal ini merupakan fenomena yang sering dihadapi di berbagai daerah ketika angka kemiskinan semakin rendahsehingga dibutuhkan upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi untuk lebih mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bila dicermati lebih detail berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah warga miskin di Kota Pekalongan pun masih sangat tinggi. Apalagi, sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, terjadi pandemi *COVID-19* yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga hampir seluruh sektor kehidupan, yang pada akhirnya berimplikasi semakin meningkatnya jumlah warga miskin, akibat terjadinya kontraksi ekonomi. Jumlah warga miskin (DTKS) tahun 2020 sebanyak 121.889 jiwa dari semula 112.613 jiwa pada tahun 2019, atau kenaikan sebanyak 9.276 jiwa.Oleh karena itu, menjadi tantangan bersama ke depan, agar kebijakan pembangunan dapat lebih terintegrasi dan konvergen dalam penanganan upaya pengentasan kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan yang optimal harus mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Sumber daya yang dimiliki baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun perguruan tinggi dan seluruh elemen masyarakat harus didayagunakan secara terpadu dan sinergis, guna menurunkan angka kemiskinan ini. Masing-masing elemen dapat memiliki peran sesuai sumber daya yang dimilikinya.

Isu kemiskinan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana menjadi tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SGD's) yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; serta menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, Tingkat Pengangguran Terbuka cenderung mengalami penurunan, terutama akibat adanya pandemi *COVID-19*. Angka pengangguran di Kota Pekalongan belum menunjukkan penurunan yang optimal dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi isu strategis karena pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan nasional maupun daerah. Tujuan pemerintahan daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga penurunan angka pengangguran menjadi salah satu sasaran pembangunan yang harus diwujudkan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pekalongan masih cukup tinggi. TPT masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2019 sebesar 5,77 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 7,02 persen. Menyikapi hal ini, perlu adanya upaya dengan berbagai kebijakan yang tepat sasaran dan terarah. Upaya sistemik dan sinergis harus terus dilakukan untuk peningkatan kualitas dan kompetensi pencari kerja, perluasan kesempatan kerja, link and match dunia pendidikan/pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri, penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan usaha serta peningkatan investasi, sehinga pada gilirannya dapat menurunkan angka pengangguran di Kota Pekalongan.

2.7.6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan karena menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Bonus demografi yang terjadi seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebagai peluang pembangunan. Mayoritas usia produktif merupakan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menambah kemiskinan dan pengangguran karena kualitas sumberdaya manusia yang tidak optimal . Namun demikian, kualitas sumber daya manusia di Kota Pekalongan belum optimal, sehingga harus ditingkatkan secara kontinyu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan tahun 2019 adalah 74,77 dan tahun 2020 meningkat menjadi 74,98. Meskipun IPM Kota Pekalongan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, tetapi IPM tersebut menunjukkan angka terendah dibandingkan kota-kota yang ada Jawa Tengah. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

a. Harapan lama sekolah yang belum optimal. Pada tahun 2020, harapan lama sekolah sebesar 12,84 tahun. Artinya harapan lama sekolah penduduk adalah 12,84 tahun atau penduduk diharapkan menamatkan pendidikan sampai SMA/SMK (12 tahun) dan kuliah sampai semester 1 atau 8 bulan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki tersebut sudah dapat masuk ke pasar kerja. Implikasinya adalah harapan lama sekolah di Kota Pekalongan belum optimal.

b. Rata-rata lama sekolah belum optimal. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 adalah 8,96 tahun. Artinya penduduk Kota Pekalongan memiliki rata-rata lama sekolah 8,96 tahun atau rata-rata penduduk telah menamatkan pendidikan jenjang SMP kelas 8 belum sampai kelas 9 SMP atau belum sampai lulus SMP. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk Kota Pekalongan tersebut diakibatkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan. Oleh karena itu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan harus terus dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan kebijakan membuka dan mempermudah kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat usia sekolah untuk bersekolah tetapi hal tersebut harus secara kontinyu dilanjutkan.

c. Belum optimalnya pengarusutamaan gender. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2019 sebesar 60,95. Pada dasarnya peran perempuan dalam kegiatan ekonomi kehidupan sehari-hari sangat tinggi, tetapi seringkali hal ini belum diperhitungkan secara baik dan terbuka sehingga berimplikasi terhadap belum optimalnya IDG. Peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik harus terus ditingkatkan untuk mendukung tercapainya pengarusutamaan gender secara optimal. Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan terhadap pemberdayaan gender pun juga telah berlangsung lama, namun peran aktif perempuan belum dapat optimal, baik dalam ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, upaya peningkatan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik harus secara kontinyu ditingkatkan, sehingga dapat lebih optimal.

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu : menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

2.7.7. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

Kota Pekalongan memiliki posisi strategis terhadap wilayah sekitarnya dan dalam konteks lalu lintas pantai Utara Pulau Jawa, oleh karena itu Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pusat dari Kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan). Kota Pekalongan pun telah berkembang dengan industri TPT (tekstil produk tekstil), khususnya batik dan industri kreatif lainnya. Kota Pekalongan pun juga berkembang budayanya yang khas, dengan akulturasi budaya Jawa pesisir, Arab dan China. Budaya khas tersebut menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dimiliki Kota Pekalongan dan menjadi keuntungan perbandingan (*comparative advantage*). Dengan keunggulan yang dimiliki tersebut, seharusnya Kota Pekalongan berkembang pesat, namun yang terjadi adalah daya saingnya belum optimal berkembang.

Beberapa hal yang membuktikan bahwa daya saing Kota Pekalongan belum optimal berkembang, yaitu: a) Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,50 persen dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen; b) Pendapatan perkapita belum optimal, dimana PDRB perkapita tahun 2020 sebesar Rp 35,22 juta per tahun; c) Pemerataan pendapatan yang belum optimal, yang ditunjukkan dengan Gini Ratio yang belum mengalami penurunan atau perbaikan; dan d) Belum terkelolanya budaya dengan baik, yaitu persentase seni budaya yang dilestarikan masih terbatas.

Dengan potensi (keunggulan komparatif) yang dimiliki Kota Pekalongan, seharusnya perekonomian dapat berkembang optimal, dengan memanfaatkan pergeseran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, terutama dengan mengembangkan pariwisata, industri pengolahan, industri kreatif, dan perdagangan jasa. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya daya saing, dilihat dari berbagai aspek penyebab, meliputi: a) Tingkat kunjungan wisatawan masih belum optimal dan semakin rendah ketika pandemi covid, jumlah kunjungan wisatawan tahun 2019 sebesar 720.000 orang dan pada tahun 2020 turun menjadi 283.882 orang; b) Pertumbuhan investasi belum optimal, nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp 3,29 Triliun dan tahun 2020 sebesar Rp. 196,11 Milyar; c) Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal, pertumbuhan ekonomi kreatif tahun 2019 masih terbatas; d) Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor industri tahun 2019 sebesar 4,84, persen dan tahun 2020 berkontraksi sebesar minus 0,48 persen; e) Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa tahun 2019 sebesar 5,72 persen dan tahun 2020 berkontraksi sebesar -4,37 persen; dan f) Masih terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, penyelenggaraan *event* budaya tahun 2020 masih sangat terbatas dan belum berskala besar.

Tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Pekalongan belum optimal, apalagi dengan adanya pandemi *COVID-19*, sektor pariwisata mengalami dampak yang sangat signifikan. Upaya pembangunan sektor pariwisata telah berjalan, terutama dengan pengembangan destinasi wisata dan prasarana sarana pendukung pariwisata, namun upaya tersebut harus terus dilakukan. Memperbesar aksesibilitas masuk dan keluar Kota Pekalongan melalui berbagai moda transportasi telah dilakukan. Upaya pengembangan sektor pariwisata harus terus dilakukan, terutama dengan mengembangkan kolaborasi antar pemangku

kepentingan maupun antar daerah. Upaya lain yang telah dilakukan dan akan dilanjutkan adalah pengembangan daya tarik Kota Pekalongan melalui revitalisasi obyek dan atraksi wisata serta pembangunan Kawasan Pekalongan Baru dan TOD (*Transit Oriented Development*) Stasiun Pekalongan. Tingkat kunjungan wisata juga dipengaruhi oleh belum optimalnya penanganan kemacetan karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional, dan disisi lain kapasitas jalan tidak bertambah. Tentunya hal ini berimplikasi terhadap VCR yang cenderung tinggi. Upaya penanganan yang selama ini dilakukan, terutama terbatas terkait dengan pengendalian dan rekayasa lalu lintas, padahal upaya mendasar yang seharusnya dilakukan adalah dengan memisahkan lalu lintas lokal dan regional. Dengan pemisahan lalu lintas lokal dan regional, pada gilirannya dapat merevitalisasi beberapa kawasan perdagangan jasa. Selama ini, kegiatan perdagangan jasa tidak dapat berkembang optimal karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional. Dengan terpisahanya lalu lintas tersebut maka diharapkan kawasan perdagangan jasa dapat berkembang optimal.

Pertumbuhan investasi di Kota Pekalongan belum optimal, lebih disebabkan faktor alamiah suatu kota, yaitu keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan. Padahal dari sisi perizinan investasi, Kota Pekalongan telah memiliki SOP perizinan yang handal. Dengan telah selesainya revisi Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat lebih optimal.

Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal di Kota Pekalongan. Hal ini membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, sehingga potensi yang telah tumbuh dan berkembang di Kota Pekalongan dapat disinergikan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal disebabkan ketersediaan lahan yang terbatas di wilayah Kota Pekalongan sehingga industri tidak dapat berkembang serta nilai produksi dari sektor industri yang belum meningkat signifikan akibat masih terbatasnya permintaan. Demikian juga pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan jasa belum optimal karena kegiatan perdagangan jasa mengalami kendala karena terbatasnya prasarana sarana perdagangan, seperti terbakarnya Pasar Banjarsari yang merupakan pasar terbesar di Kota Pekalongan. Upaya untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan sektor industri maupun sektor perdagangan jasa adalah dengan penyediaan dan pengembangan prasarana sarana yang memadai, termasuk dukungan tersedianya lahan yang memadai.

Daya saing ekonomi juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; serta menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Daya saing ekonomi juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, khususnya terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, Investasi dan perdagangan. Program Nasional dengan lokus di Kota Pekalongan sesuai dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 adalah Pembangunan TOD (*Transit Oriented Development*) Stasiun Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 200 Milyar dari BUMN. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis provinsi, sehingga program prioritas pembangunan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu pengembangan Minabatik (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

Peningkatan daya tarik pariwisata menjadi fokus program kewilayahan Jateng dengan lokus di Kota Pekalongan yaitu pengembangan potensi masyarakat destinasi

pariwisata di Kabupaten Pemalang, Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

2.7.8. Pelestarian Budaya Lokal

Pemerintah Kota Pekolongan akan terus memperkuat dan mengembangkan budaya lokal menjadi salah satu kekayaan yang harus diwariskan ke generasi berikutnya. Masih terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, dikarenakan belum optimalnya peran pemerintah dalam pembinaan di satu sisi, dan di sisi lainnya, dukungan para budayawan dan seniman yang belum optimal, menjadi isu strategis dalam pelestarian budaya lokal.

Urgensi pelestarian budaya lokal adalah Kota Pekalongan harus memperkuat jati dirinya karena budaya yang berkembang selama ini telah memberikan dampak bagi perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan. Batik sebagai salah satu warisan dunia, telah memperkuat budaya Kota Pekalongan dan telah menghantarkan Kota Pekalongan menjadi kota kreatif dunia. Sebagian besar masyarakat Kota Pekalongan terkait dengan rantai ekonomi industri batik, sehingga pelestarian budaya menjadi salah satu kunci penting bagi pengembangan Kota Pekalongan ke depan. Di sektor lainnya, budaya yang telah berkembang di Kota Pekalongan menjadi salah satu atraksi wisata, yang mampu menarik wisatawan. Oleh karena itu, pelestarian budaya menjadi hal yang sangat penting.

Para pemangku budaya dan seni harus bersinergi agar kekayaan budaya khas Pekalongan dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kota Pekalongan, khususnya dengan sektor pariwisata. Dengan penguatan seni budaya serta dikolaborasikan dengan sektor lainnya maka dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.7.9. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas wilayah yang baik, menjadi isu strategis, merupakan salah satu prasyarat penting bagi perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat. Dengan kondusivitas yang terjaga maka rantai ekonomi dan kondisi perikehidupan masyarakat dapat berjalan dengan normal. Dengan kondisivitas yang baik tersebut maka perekonomian dapat berkembang optimal dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konflik sosial di wilayah Kota Pekalongan tahun 2019 berjumlah satu kasus dan pada tahun 2020 juga berjumlah satu kasus. Kondusivitas wilayah Kota Pekalongan masih menjadi permasalahan karena masih tingginya angka kriminalitas serta masih tingginya penyalahgunaan NAPZA. Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk menunjukkan kecenderungan yang menurun dan pada tahun 2019 sebesar 4,59 (per 10.000 penduduk), namun angka tersebut harus terus dioptimalkan. Kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang tertangani pada tahun 2019 adalah sebesar 44 kasus. Angka tersebut masih cukup tinggi dan Kota Pekalongan merupakan salah satu kabupatan/kota yang memiliki risiko tinggi penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Jawa Tengah. Angka kriminalitas maupun kasus penyalahgunaan NAPZA harus diturunkan, untuk dapat mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pandemi *COVID-19* menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran *COVID-19* saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif *COVID-19* menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Dari sisi ekonomi, *COVID-19* memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Berbeda dengan pengalaman saat SARS dan MERS yang dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara (membentuk pola pemulihan berbentuk huruf V), dampak *COVID-19* diperkirakan akan lebih besar dan lama, membentuk huruf U bahkan huruf L atau M. Per tanggal 26 Desember 2020 ada tambahan 6.740 kasus baru yang terinfeksi *corona* di Indonesia, sehingga total menjadi 706.837 kasus positif *corona*.

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif *COVID-19*. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya *non performing loan* (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan.

Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga.

Pada bulan September 2020, Bank Dunia (*World Bank*) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 minus 1,6 persen. Namun pada bulan Desember 2020 Bank Dunia kembali mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi minus 2,2 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya. Sementara untuk proyeksi tahun 2021, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia positif 3,1 persen. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan perkiraan

sebelumnya yakni 4,7 persen. Koreksi ini mencerminkan pemulihan yang lebih lambat dari perkirakan untuk kuartal III dan sebagian kuartal keempat akibat pembatasan sosial dan meningkatnya kasus *COVID-19*.

Meski demikian, Bank Dunia mencatatkan ekonomi Indonesia 2021 akan membaik dan perlahan menguat pada 2022. Hal ini didasarkan pada pembukaan ekonomi tahun depan yang diikuti pembukaan lebih lanjut serta dilonggarkannya aturan pembatasan sosial sepanjang 2022. Bank Dunia memperkirakan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 akan berada di angka 4,4 persen yang secara umum didorong oleh pemulihan konsumsi swasta, seiring dengan longgarnya pembatasan sosial. Perkiraan tersebut juga mengasumsikan bahwa kepercayaan konsumen meningkat. Di sisi lain, hilangnya pendapatan rumah tangga tetap rendah akibat hasil pasar tenaga kerja yang lebih baik dan bantuan sosial yang memadai.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara makro pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh tinggi, didorong oleh menguatnya konsumsi, investasi dan meningkatnya kepercayaan dengan syarat tersedianya vaksin yang efektif dan aman. Di sisi lain, menurut Bank Dunia proyeksi acuan dasar ini akan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang sangat tinggi terkait dinamika pandemi di Indonesia dan di negara-negara lain.

Bank Dunia mencatat adanya potensi pertumbuhan Indonesia merosot menjadi 3,1 persen pada 2021 dan 3,8 persen pada 2022. Lebih rendah dari skenario terburuk akibat pengetatan PSBB, pertumbuhan global yang lebih lemah dan harga komoditas. Oleh sebab itu, kinerja pertumbuhan jangka menengah Indonesia sangat bergantung pada penanggulangan potensi dampak negatif krisis terhadap investasi, produktivitas dan modal manusia.

Menurut *Asian Development Bank* (ADB), pemulihan ekonomi Indonesia nantinya akan didorong oleh prospek pemulihan konsumsi swasta, juga disokong oleh keyakinan konsumen yang akan kembali pada zona optimistis. Pemulihan juga akan didorong oleh membaiknya sentimen bisnis yang merupakan hasil dari reformasi iklim investasi, termasuk dengan perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Lalu, pemulihan juga akan dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang bisa semakin membaik. Hal ini juga seiring dengan prospek pemulihan yang akan terus terjadi pada negara-negara mitra dagang utama Indonesia dan meningkatnya harga komoditas internasional. Terus ke depan, permintaan domestik diperkirakan baru akan bisa pulih sepenuhnya di tahun 2022. Hal ini yang nantinya bisa mengembalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level sebelum pandemi *COVID-19*.

Potensi pertumbuhan ekonomi bisa terwujud apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dimaksimalkan. Perkiraan pertumbuhan tersebut dilandasi oleh terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi dan eskpor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional. Konsumsi akan dijaga melalui inflasi pada tingkat yang rendah dan terkendali guna menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, program bantuan sosial akan digunakan untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Di sisi lain, investasi perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi, dan pemberian fasilitas investasi dan promosi investasi. Hal ini agar pemerintah lebih pro-aktif dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia. Namun, Indonesia juga perlu mewaspadai gejolak arus modal global seperti yang terjadi pada 2018 yang berpotensi melemahkan investasi. Karena itu, peningkatan pertumbuhan ekspor akan diupayakan melalui kerja sama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Meningkatkan peran UMKM dalam aktivitas ekspor dan investasi, baik melalui insentif fiskal maupun moneter wajib dilakukan. Investasi juga dapat diarahkan kepada UMKM, terutama UMKM yang berorientasi ekspor, hal ini dilakukan

untuk mendorong program UMKM tumbuh dan naik kelas secara intensif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Adapun untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi perlu adanya upaya keras dan sinergi lintas sektoral. Untuk itu, pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang, serta perbaikan sistem pendidikan akan diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan secara masif akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan *e-commerce*.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan. Sebab, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi, namun meningkat dari 5,36 persen di tahun 2016 menjadi 5,50 persen di tahun 2019. Di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam bahkan minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu *COVID-19* yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak pada munculnya kebijakan *lockdown*. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global.

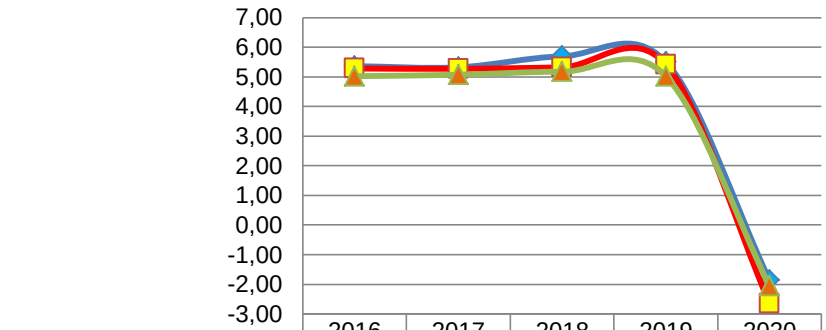

	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Pekalongan (%)	5,36	5,32	5,69	5,50	-1,87
Prov. Jawa Tengah (%)	5,28	5,27	5,32	5,41	-2,65
Nasional (%)	5,02	5,07	5,17	5,02	-2,07

Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021 (diolah), 2021

Meskipun demikian, persentase pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sepanjang lima tahun terakhir selalu di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Begitu juga

jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selalu di atas pertumbuhan ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada pada posisi tertinggi di tahun 2018 yaitu sebesar 5,69 persen, dan posisi terendah pada tahun 2020 yaitu -1,87 persen.

Jika dibandingkan dengan Daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum berada di posisi tengah diantara ketiga Daerah tersebut. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Tegal, diatas Kota Salatiga dan Kota Magelang. Tahun 2017 berada dibawah ketiga Kota tersebut, pada tahun 2018 dan 2019 berada diatas Kota Magelang, dibawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Sementara itu di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Salatiga, diatas Kota Tegal dan Kota Magelang. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 3.2 berikut.

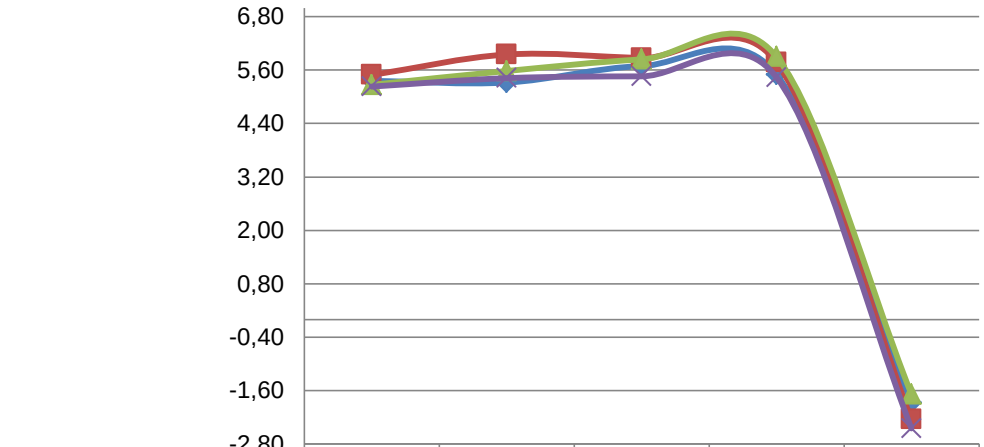

	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Pekalongan (%)	5,36	5,32	5,69	5,50	-1,87
Kota Tegal (%)	5,49	5,95	5,87	5,77	-2,25
Kota Salatiga (%)	5,27	5,58	5,84	5,90	-1,68
Kota Magelang (%)	5,23	5,42	5,46	5,44	-2,45

Gambar 3.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2016 – 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pengolahan dan konstruksi yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama lima tahun. Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2020 adalah pada lapangan usaha Industri Pengolahan yakni 21,40 persen dan ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yakni 20,85 persen, kemudian diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,16 persen dan ini turun dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar 21,80 persen dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,60 persen dan ini turun dibandingkan tahun 2019 yakni 14,64 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 6 persen. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku disajikan dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (persen)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,26	4,74	4,67	4,66	5,10
B	Pertambangan dan Penggalian	–	–	-	-	-
C	Industri Pengolahan	21,43	21,13	20,94	20,85	21,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,10	0,12
F	Konstruksi	14,36	14,39	14,60	14,64	14,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,72	21,78	21,76	21,80	21,16
H	Transportasi dan Pergudangan	6,05	6,32	6,28	6,40	5,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,42	5,39	5,42	5,44	5,32
J	Informasi dan Komunikasi	3,88	4,15	4,21	4,36	5,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,14	6,26	6,27	6,13	6,22
L	Real Estat	2,68	2,68	2,71	2,71	2,74
M,N	Jasa Perusahaan	0,40	0,41	0,42	0,44	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,75	4,72	4,58	4,47	4,50
P	Jasa Pendidikan	4,58	4,67	4,75	4,65	4,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,25	1,26	1,29	1,44
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,82	1,84	1,87	1,90	1,91
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 28,43 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 35,41 juta rupiah. Namun mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 35,22 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar Rp. 35,22 juta menurun sebesar 0,53 persen dibanding PDRB per kapita tahun 2019 sebesar Rp.35,41 juta.

Tabel 3.2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	8.507,54	9.274,26	10.089,25	10.873,98	10.818,53
- ADHK (Miliar Rp)	6.367,27	6.706,27	7.087,92	7.477,43	7.337,83
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	28,43	30,72	33,14	35,41	35,22
- ADHK (Juta Rp)	21,28	22,22	23,28	24,35	23,89
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (Persen)	8,39	8,06	7,86	6,86	-0,53
- ADHK (Persen)	4,42	4,40	4,79	4,60	-1,88

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

c. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2016 – 2020, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 2,36 persen sampai 3,61 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2020 lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Gambar 3.3 berikut.

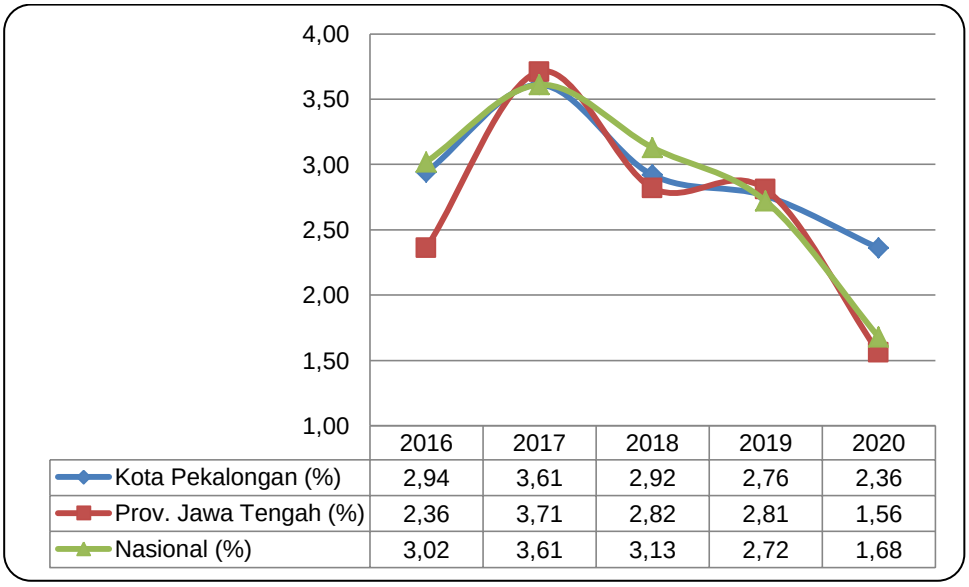

Gambar 3.3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2020

Sumber : www.bps.go.id, 2021

Penyumbang inflasi terbesar di Kota Pekalongan adalah kelompok Bahan Makanan, kesehatan, pendidikan, sandang, kemudian kelompok umum, makanan jadi, perumahan dan transport, disajikan dalam Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Kelompok Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Umum	2,94	3,61	2,92	2,76	-
Bahan Makanan	6,03	4,63	3,66	8,00	-
Makanan Jadi	5,85	2,46	3,05	1,60	-
Perumahan	0,88	4,02	3,47	0,40	0,33
Sandang	5,01	5,40	2,51	3,31	4,01
Kesehatan	1,99	1,15	0,54	4,75	2,89
Pendidikan	2,84	3,26	1,33	3,74	-2,71
Transport	-3,07	3,96	2,43	0,31	1,33
Perlengkapan	-	-	-	-	2,70
Infokom	-	-	-	-	1,20
Rekreasi	-	-	-	-	6,27
Restoran	-	-	-	-	1,76
Perawatan Pribadi	-	-	-	-	4,20

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kota Pekalongan Tahun 2022 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 akan tumbuh tinggi.

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara lain :

1) Per tanggal 5 Juni 2021 ada tambahan 6.594 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 1.856.038 kasus positif corona. Jika wabah *COVID-19* dapat ditangani pada tahun 2021, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 berpotensi tumbuh tinggi.
2) Pemerintah Pusat berupaya melakukan percepatan implementasi vaksinasi *COVID-19* yang diharapkan dapat mendukung *new normal*, menekan penyebaran *COVID-19* sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Kota Pekalongan;
3) Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui *rediscount* kredit.
4) Bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antarnegara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah *COVID-19*.

5) Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kota Pekalongan, antara lain rencana pembangunan *Transit Oriented Development* (TOD), wisata air terbesar, dan penanganan rob di wilayah utara Kota Pekalongan akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga;
6) Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu :

a. Dengan meningkatnya kasus *COVID-19*, penyelesaian dan dampak wabah ini semakin tidak dapat dipastikan, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional.
b. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBP SDA Nonmigas.
c. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
d. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
e. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi *COVID-19*, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan tranformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
f. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi *COVID-19*. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.
g. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum *COVID-19* terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi *COVID-19*.
h. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kota Pekalongan masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar.
i. Melemahnya daya saing Kota Pekalongan seiring dengan belum berkelanjutannya produk unggulan daerah terutama pada produk unggulan Batik yang masih berupa bahan komoditi pemenuhan kebutuhan pasar semata namun untuk Batik Pekalongan sendiri belum memiliki *brand* produk yang original dan kuat di pasaran dan masih sebatas sebagai tempat memproduksi saja.
j. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kota Pekalongan dengan pembangunan technopark perikanan dan pengembangan pusat inovasi dan budaya batik.
k. Meski letak Kota Pekalongan yang strategis sebagai pusat pelayanan kegiatan wilayah regional Petanglong namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan

jasa dan perdagangan dimana selama dua tahun terakhir tidak terlalu signifikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

a. Upaya pemulihan ekonomi pasca *COVID-19* diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.
b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
f. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program *CSR*) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).
g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pembangunan di Kota Pekalongan dapat tumbuh sebagaimana digambarkan melalui indikator makro berikut :

a. Pertumbuhuan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 diharapkan dapat tumbuh dibandingkan dengan tahun 2020 meskipun masih dalam kondisi pandemi *COVID-19* yang kasusnya terus meningkat. Perekonomian harus terus berjalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96 persen (q-to-q). sedangkan perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan I tahun 2021 masih mengalami kontraksi sebesar -0,87 persen (y on y), akan tetapi kondisinya lebih baik dibandingkan Triwulan II-IV tahun 2020 yang terkontraksi lebih dalam pada kisaran -3 hingga -5 persen (y-on-y). Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 di kisaran angka 2,28-2,84 persen, dan untuk tahun 2022 diproyeksikan di kisaran angka 2,28-2,84 persen Selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2020	Target 2021	Proyeksi 2022
Pertumbuhan Ekonomi	-1,87 persen	2,28-2,84 persen	2,28-2,84 persen

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kota Pekalongan tahun 2020 belum sesuai dengan yang diharapkan, dimana dari target IPM sebesar 76,12 hanya tercapai 74,98. Hal ini tidak terlepas dari dampak pandemi *COVID-19* yang sampai saat ini masih berlangsung. Meskipun demikian, tahun 2021 masih optimis bahwa IPM dapat terus naik dan ditargetkan sebesar 75,10. Selanjutnya, pada tahun 2022 dengan upaya pemulihan ekonomi dan adaptasi terhadap pandemi *COVID-19*, IPM ditargetkan sebesar 75,32. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2020	Target 2021	Proyeksi 2022
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,98	75,10	75,32

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

c. Innndeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yakni sebesar 58,29 di tahun 2020. Angka tersebut belum mencapai target yang diharapkan yaitu 64,48. Melihat kondisi demikian, target IDG tahun 2021 disesuaikan menjadi 58,43 dan tahun 2022 diproyeksikan sebesar 58,78 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2020	Target 2021	Proyeksi 2022
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58,29	58,43	58,78

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

d. Tingkat Kemiskinan

Pandemi *COVID-19* di tahun 2020 telah menghantam berbagai sendi kehidupan. Hal yang paling dirasakan masyarakat yaitu dampak terhadap kondisi sosial ekonomi. Bertambahnya jumlah warga miskin akibat *lockdown* dan PHK (pemutusan hubungan kerja) menjadi catatan tersendiri di tahun 2020. Tingkat kemiskinan melonjak cukup drastis di angka 7,17 persen, jauh dari yang ditargetkan yaitu 5,70 persen pada saat penepatan tahun 2020, meskipun di perubahan diusulkan penyesuaian target menjadi 8,75 persen. Harapan positif bahwa pendemi akan berakhir di tahun 2021 ternyata belum bisa terwujud, bahkan pada bulan Juni 2021 kasus *COVID-19* melonjak tajam di tengah-tengah gencarnya Pemerintah melakukan vaksinasi. Kondisi inilah yang membuat Pemerintah Kota Pekalongan tidak berani menargetkan penurunan tingkat kemiskinan terlalu jauh dari realisasi tahun 2020. Di tahun 2021, tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 6,94 persen, sedangkan untuk tahun 2022 diproyeksikan sebesar 6,71 persen.

Tabel 3.7 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2020	Target 2021	Proyeksi 2022
Tingkat kemiskinan (persen)	7,17	6,94	6,71

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Senada dengan tingkat kemiskinan, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga terpaut cukup jauh dengan target yang ditetapkan, yaitu capaian sebesar 7,02 persen dari target 3,60 persen pada penetapan 2020 dan 5,00 persen pada perubahan 2020. Hal tersebut membuat Pemerintah Kota Pekalongan harus menyesuaikan target penurunan TPT untuk tahun 2021 yaitu menjadi 6,84 persen dan ptoyeksi di tahun 2022 adalah 6,66 persen. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2020	Target 2021	Proyeksi 2022
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	7,02	6,84	6,66

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

f. Inflasi

Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di Kota Pekalongan masih relatif terkendali. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebesar 3±1 persen atau berada pada angka 2-4 persen. Inflasi tahun 2020 masih berada pada range tersebut yaitu 2,36 persen. Sementara untuk tahun 2021 dan 2022 ditargetkan 3±1 persen sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2020	Target 2021	Proyeksi 2022
Inflasi (persen)	2,36	3±1	3±1

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Resposibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pada tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *COVID-19* dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*. Pelaksanaan PSBB sebagai upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* berdampak cukup parah pada sektor pariwisata, perdagangan, dan transportasi. Sehubungan hal tersebut dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah masih mempertimbangkan dampak atas *COVID-19*. Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah.

Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, PD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Pekalongan.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pekalongan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Dalam penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2022, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah dihitung berdasarkan :
   a. perkiraan potensi yang ada dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
   b. kemungkinan realisasi penagihan piutang;
   c. mempertimbangkan realisasi pendapatan selama 2 tahun.
2. Proyeksi Hasil Retribusi Daerah dihitung berdasarkan :
   a. perkiraan potensi yang ada dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
   b. kemungkinan realisasi penagihan piutang;
   c. mempertimbangkan realisasi pendapatan selama 2 tahun.
3. Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dihitung berdasarkan estimasi perolehan laba dari BUMD.
4. Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah dihitung berdasarkan :
   a. dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah selama 2 tahun terakhir;
   b. perkiraan suku Bungan BI;

c. potensi aset yang disewakan;
d. estimasi perhitungan aset yang akan dilelang;
e. estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.

5. Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sama dengan APBD Tahun 2021.
6. Dana Insentif Daerah diasumsikan naik dengan upaya perbaikan kinerja yang menjadi indikator dasar perolehan DID.
7. Asumsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah selain DID disusun berdasarkan pagu indikatif Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 133 Tahun 2020.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota pekalongan Tahun 2022 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

1) *E-monitoring* pajak daerah yang merupakan monitoring secara elentronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti *tapping box* dan sejenisnya.Tujuan dari e-Monitoring Pajak Daerah antara lain :
   - Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak
   - Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
   - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
   - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
   - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
   - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
2) Pemberian *Reward* dan *Punishment*, antara lain :
   a) *Reward* :
      - Penganugerahan Wali Kota Pekalongan Regional *Tax Award* setiap tahunnya diberikan kepada WP pembayar pajak daerah tertaat, terbesar, kooperatif didalam pemeriksaan pajak daerah dll.
      - Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum Jatuh Tempo Pembayaran.
      - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan.
      - Pemberian doorprize/souvenir untuk Wajib Pajak yang taat pada *event-event* yang digelar oleh Pemkot Pekalongan, seperti Pameran Keterbukaan Informasi Publik dan Pekan Inovasi Daerah.

b) *Punishment* :

- Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat bayar.
- Penerapan sanksi Pidana, hal ini akan dilakukan/diterapkan kepada WP yang membandel setelah dilakukan upaya-upaya persuasif.

3) Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
4) Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
5) Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
6) Implementasi secara bertahap transasksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah.
7) Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Simpatda) dan pemasangan alat perekam data transaksi para wajib pajak (tapping box atau sejenisnya).
8) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun *online*.
9) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah.
10) Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah.
11) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verfikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
12) Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah.
13) Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah / simpatda untuk semua objek pajak daerah.
14) Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data simpatda di BKD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
15) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien.
16) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah.
17) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image.
18) Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito.
19) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah.
20) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Pekalongan tahun 2018-2023 disajikan dalam Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2023

URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020 (Audited)	APBD 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
PENDAPATAN	**905.231.572.568**	**971.624.464.121**	**953.155.394.615**	**937.933.186.000**	**946.520.238.000**	**958.646.537.000**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**179.224.408.698**	**212.777.435.294**	**229.867.935.361**	**203.812.400.000**	**220.966.005.000**	**230.163.583.000**
Pendapatan Pajak Daerah	70.561.333.701	87.578.474.262	76.255.221.742	82.600.000.000	87.150.000.000	92.400.000.000
Hasil Retribusi Daerah	15.985.706.343	16.667.656.492	14.870.124.919	15.809.000.000	17.309.414.000	18.132.193.000
Hasil Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.920.239.113	6.101.173.105	5.821.083.050	5.632.000.000	5.951.841.000	6.473.378.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	86.757.129.541	102.430.131.435	132.921.505.650	99.771.400.000	110.554.750.000	113.158.012.000
PENDAPATAN TRANSFER	**702.228.404.048**	**734.897.351.238**	**700.838.013.854**	**711.742.146.000**	**692.787.233.000**	**706.104.314.000**
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**619.629.794.858**	**643.593.762.948**	**625.666.101.409**	**621.781.929.000**	**603.132.016.000**	616.144.097.000
Bagi Hasil Pajak	25.352.861.062	17.751.480.700	27.182.869.066	23.583.183.000	24.270.118.000	23.583.183.000
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.340.170.369	1.275.750.200	1.780.895.008	1.504.841.000	2.543.489.000	1.504.841.000
Dana Alokasi Umum	449.055.738.000	475.842.089.000	433.354.907.000	440.508.045.000	426.399.738.000	426.399.738.000
Dana Alokasi Khusus	110.631.025.427	115.463.501.048	104.991.517.335	134.656.335.000	145.222.411.000	134.656.335.000
Dana Insentif Daerah	33.250.000.000	33.260.942.000	58.355.913.000	21.529.525.000	4.696.260.000	30.000.000.000
Transfer Pemerintah Provinsi	**82.598.609.190**	**91.303.588.290**	**75.171.912.445**	**89.960.217.000**	**89.655.217.000**	89.960.217.000
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	75.273.768.190	72.167.436.245	63.377.912.445	78.202.217.000	78.202.217.000	78.202.217.000
Bantuan Keuangan Provinsi	7.324.841.000	19.136.152.045	11.794.000.000	11.758.000.000	11.453.000.000	11.758.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**23.778.759.822**	**23.949.677.589**	**22.449.445.400**	**22.378.640.000**	**32.767.000.000**	**22.378.640.000**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.778.759.822	23.949.677.589	22.449.445.400	22.378.640.000	32.767.000.000	22.378.640.000
Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2021

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada tahun 2022 dihitung dengan berdasar proyeksi pada RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

a. Proyeksi belanja daerah diasumsikan turun sebesar 3,69 persen dibandingkan penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021;
b. Perhitungan gaji pegawai diasumsikan turun sebesar 1,28 persen dibandingkan dengan tahun 2021.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
b. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman;
c. Upaya penanganan rob secara berkelanjutan dengan menjaga sinkronisasi program pembangunan tanggul yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta upaya untuk menekan pencemaran guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
d. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dalam masa pandemi *COVID-19* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
e. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Pekalongan melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan *COVID-19*;
f. Peningkatan *skills* calon tenaga kerja dan calon wira usaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
g. Mendorong pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan daerah dengan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*).

Adapun realiasi dan proyeksi belanja daerah Kota Pekalongan tahun 2018-2022 disajikan dalam Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020 (Audited)	APBD 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023
BELANJA	**883.184.894.707**	**954.397.012.827**	**863.280.127.422**	**1.024.407.353.000**	**986.520.238.000**	**1.040.255.723.000**
BELANJA OPERASI	**734.880.485.431**	**771.512.589.320**	**678.982.771.474**	**849.176.306.227**	**813.299.519.800**	**846.781.289.000**
Belanja Pegawai	352.531.365.055	390.898.339.975	312.861.230.596	435.187.544.938	429.578.291.917	**475.612.262.000**
Belanja Barang dan Jasa	317.053.705.432	336.953.793.745	327.664.407.878	369.445.039.289	354.594.559.883	**336.368.844.000**
Belanja Hibah	53.429.595.944	30.031.913.000	36.250.151.000	37.926.322.000	25.844.160.000	**33.511.387.000**
Belanja Bantuan Sosial	11.865.819.000	13.621.739.100	2.206.982.000	6.617.400.000	3.282.508.000	**1.288.796.000**
BELANJA MODAL	**146.382.593.476**	**182.153.984.579**	**126.926.093.953**	**170.053.823.773**	**167.283.718.200**	**188.474.434.000**
Belanja Modal Tanah	19.140.412.917	3.912.172.520	13.144.232.065	5.300.000.000	876.000.000	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.284.354.560	34.699.453.221	29.045.998.699	34.964.908.585	52.318.454.200	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.081.582.337	71.367.203.715	33.911.226.174	58.775.988.000	33.980.665.000	-
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.704.725.930	68.876.027.946	50.106.236.575	65.782.123.000	72.681.144.000	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.171.517.732	3.299.127.177	644.610.440	5.230.804.188	7.427.455.000	-
Belanja Aset Lainnya	0	0	73.790.000,00	0	0	0
BELANJA TAK TERDUGA	**1.921.815.800**	**730.438.928**	**57.371.261.995**	**5.177.223.000**	**5.937.000.000**	**5.000.000.000**
Belanja Tak Terduga	1.921.815.800	730.438.928	57.371.261.995	5.177.223.000	5.937.000.000	5.000.000.000

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2021

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan berasal dari pencairan dana cadangan dan SiLPA. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2022 di Kota Pekalongan antara lain diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian, dan pembentukan dana cadangan.

Rincian pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020 (Audited)	APBD 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023
PEMBIAYAAN	**65.881.529.315**	**77.874.259.018**	**104.227.367.651**	**86.474.167.000**	**40.000.000.000**	**81.609.186.000**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**78.606.608.989**	**92.028.388.994**	**108.747.997.651**	**92.724.167.000**	**46.000.000.000**	**93.209.186.000**
Penggunaan SiLPA	78.568.368.646	87.928.207.176	95.101.710.312	92.724.167.000	46.000.000.000	93.209.186.000
Pencairan Dana Cadangan	0	300.000.000	12.704.351.488	0	0	0
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	0	0	941.935.851	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**12.725.079.674**	**14.154.129.976**	**4.520.630.000**	**6.250.000.000**	**6.000.000.000**	**11.600.000.000**
Pembentukan Dana Cadangan	4.302.387.924	4.607.388.226	0	2.000.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	8.400.000.000	7.742.000.000	4.518.000.000	4.250.000.000	3.000.000.000	5.600.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	22.691.750	1.804.741.750	2.630.000	0	0	0

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2021

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode tahun 2021-2026, maka visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah :

"Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

Visi tersebut dibangun dengan ruh perwujudan ***Tahta Untuk Rakyat*** sebagaimana falsafah pemerintahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam kerangka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, falsafah Tahta Untuk Rakyat ini mengandung makna bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh rakyat Kota Pekalongan.

Untuk mengetahui gambaran Visi tersebut, maka perlu diberikan gambaran pemaknaan atas uraian visi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih jelas atas kondisi atau gambaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD.

4.1.1. Gambaran Kota Pekalongan dalam visi tahun 2021-2026

Gambaran Kota Pekalongan yang telah diuraikan pada periode RPJMD Tahun 2016–2021 adalah Kota Pekalongan yang meletakkan dinamika pembangunan sosial ekonomi, dan masyarakatnya pada dua potensi unggulan, yaitu batik dan perikanan. Kondisi ini terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan geografi, demografi, ataupun lingkungan strategis lainnya.

Dalam memetakan kontribusi batik sebagai produk unggulan yang diandalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak dapat lagi hanya memandang dari satu sisi saja yaitu *brand image* yang tidak diragukan lagi oleh Daerah-daerah lain di Indonesia. Namun lebih dari itu, Kota Pekalongan juga dihadapkan pada permasalahan daya saing dengan Daerah lainnya. Disamping itu, perkembangan industri di era 4.0 ini juga harus disikapi dengan berbagai inovasi yang sifatnya dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan konsumen. Pola-pola produksi dan pemasaran harus dikolaborasikan antara pendekatan tradisional dengan pendekatan modern yang identik dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada waktu – waktu yang akan datang, industri batik juga dihadapkan pada isu-isu lingkungan hidup yang akan sangat mempengaruhi keberlanjutan industri batik itu sendiri. Sumber daya air menjadi salah satu isu penting yang saling terkait. Industri batik, merupakan salah satu industri yang cukup tinggi membutuhkan ketersediaan air bersih. Aktivitasnya sangat rentan terdorong untuk mengekploitasi sumber air yang ada di Kota Pekalongan dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, sumber-sumber air bersih yang

ada di permukaan seperti sumur dangkal dan juga sungai, seringkali menjadi tempat pembuangan limbah. Akibatnya sumber-sumber air tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, perlu langkah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mulai memberikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air ini, sehingga akan memberikan dampak positif kembali pada keberlanjutan industri batik itu sendiri.

Industri batik juga akan dihadapkan pada kondisi perubahan iklim dan penurunan lahan (*land subsidence*). Kedua fenomena alam ini telah terbukti mengganggu aktivitas produksi, khususnya pada wilayah-wilayah yang sangat terdampak seperti di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, serta sebagian besar di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Oleh karena itu, perlu keterpaduan program, kegiatan, dan aktivitas-aktivitas pekerjaan antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyikapinya. Arah kebijakan dan strategi pembangunan harus dapat dijabarkan sampai dengan pembagian tugas atas ranah mana yang akan dikerjakan oleh Pemerintah dan mana yang akan dikerjakan oleh masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi lingkungan alam dengan segala dinamika kegiatan masyarakat yang ada di Kota Pekalongan akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Pekalongan itu sendiri.

Potensi unggulan lainnya yang dimiliki oleh Kota Pekalongan adalah perikanan. Meskipun pernah mengalami kejayaan, namun dalam kurun waktu 5 – 10 tahun terakhir memiliki kecenderungan penurunan produksi. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlu dilakukan kajian dan analisis secara menyeluruh, baik berkaitan dengan tata kelola, kemampuan SDM, kondisi sarana dan prasarana, ataupun koordinasi dan komunikasi antar berbagai pelaku dan pengusaha perikanan.

Saat ini Kota Pekalongan akan membangun optimisme dengan mendorong terwujudnya Pelabuhan *Onshore*. Komunikasi dan koordinasi akan dilakukan secara lebih intens dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu, kesiapan fasilitas pendukung seperti jalan akses, ketersediaan pasokan air bersih, dan juga listrik akan menjadi perhatian yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Optimisme ini diharapkan akan terwujud menjelang akhir periode tahun 2025, yang artinya akan sejalan dengan perwujudan masyarakat Kota Pekalongan yang lebih sejahtera.

Selain hal-hal di atas, Kota Pekalongan yang selama ini terus dihadapkan pada permasalahan banjir dan rob, diharapkan juga akan terkurangi secara bertahap dan signifikan mulai medio periode RPJMD atau sekitar tahun 2023. Hal ini sesuai dengan target penyelesaian infrastruktur pengendali banjir dan rob skala besar yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat melalui BBWS Pemali Juana, serta pentahapan peningkatan kualitas sistem drainase perkotaan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Selain itu, terdapat juga peran masyarakat untuk menjaga lingkungan dari sampah. Hal ini sangat penting, karena buruknya lingkungan atas sampah akan sangat berpengaruh bagi operasionalisasi sistem polder yang mengandalkan pompa bagi optimalnya fungsi drainase di lingkungan permukiman dan perkotaan.

Andalan lain yang nantinya diharapkan akan terwujud pada periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah pengembangan wisata yang didukung oleh operasionalisasi Transit Oriented Development (TOD). Pasca konstruksi Obyek Wisata Air Pasir Kencana di akhir tahun 2021 ini, Kota Pekalongan akan mempunyai wahana wisata baru yang akan sangat menarik kunjungan wisata. Hal ini akan menjadi pendorong bagi berkembangnya industri ikutan, seperti jasa perhotelan, transportasi, dan juga kuliner.

Pada awal periode RPJMD ini, Pemerintah Kota Pekalongan juga terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait upaya mewujudkan Pengembangan TOD yang telah masuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional di dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. TOD ini akan menjadi penghubung mobilitas pengunjung

di titik-titik strategis daya tarik wisata Kota Pekalongan. Dengan demikian, akan sangat mendorong penyebaran keramaian kota secara lebih merata.

Upaya – upaya dan juga gambaran masa depan sampai dengan tahun 2026 sebagaimana tersebut di atas, akan dilakukan sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar khususnya bagi masyarakat tidak mampu, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan Perumahan, air bersih, ataupun juga fasilitas-fasilitas (sarana prasarana, ekonomi, dan juga budaya) yang bertujuan membangun kemandirian bagi warga masyarakat.

Kemudian dari sisi tata kelola pemerintahan, gambaran di akhir periode tahun 2026, Kota Pekalongan akan memiliki sistem pemerintahan yang efektif dan efisien yang berpegang pada prinsip good governance and clean government. Kualitas SDM Aparatur akan ditingkatkan, baik dari aspek teknis ataupun manajerial, guna mewujudkan ASN yang profesional. Selain itu, ASN juga akan menjadi bagian dari upaya mengajak kolaborasi stakeholder-stakeholder atau pihak-pihak yang selama ini memberikan perhatian atau berpotensi memberikan perhatian terhadap pembangunan di Kota Pekalongan. Berbagai kesepakatan atas peran serta dari para stakeholder ini ditargetkan akan terwujud guna ikut serta menyelesaikan permasalahan fisik dan juga permasalahan sosial.

Hal ini mendasari bahwa sesungguhnya penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat dan Kota Pekalongan tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sendiri. Tetapi, harus melibatkan peran serta banyak pihak. Oleh karena itu, misi ke delapan sebagaimana terdokumentasikan dalam tahapan-tahapan kontestasi Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan berubah penempatannya, yaitu semula merupakan misi, berubah menjadi bagian dari pengertian atas visi.

Hal ini didasari atas pemikiran bahwa misi kedelapan, yaitu Mewujudkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat, pada hakikatnya merupakan ruh metode yang menjadi pengikat dan sekaligus menjiwai dalam menjalankan tujuh misi lainnya. Selanjutnya, dalam praktik perencanaan nantinya akan terwadahi dalam struktur program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

1. Lebih Sejahtera

RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 ini merupakan akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Oleh karena itu, makna sejahtera yang telah diuraikan dalam RPJPD tahun 2005-2025 menjadi penting untuk diperhatikan.

Kota Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipsi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

Dengan mengacu pada definisi di atas, maka kondisi akhir periode RPJMD tahun 2026 akan diukur dari indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi

Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

2. Lebih Mandiri

Sejalan dengan pemahaman kondisi kesejahteraan dari akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD diatas, maka kondisi kemandirian Kota Pekalongan juga akan diambil dari definisi yang ada dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Di dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya. Gambaran ini merangkum sebuah kondisi kemandirian pada segala aspek kehidupan.

Dengan melihat definisi Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka kondisi Lebih Mandiri pada akhir periode RPJMD Tahun 2026 akan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai investasi, dan Persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD. Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

3. Lebih Religius

Kondisi religius tidak menjadi gambaran akhir visi periode RPJP-D Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Namun, upaya untuk mewujudkan kehidupan yang religious ini tercermin dari Misi kesatu RPJP-D yaitu Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang **agamis**, berbudaya, bersih,aman,tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam uraian penjabarannya disebutkan bahwa Agama menjadi landasan utama dalam semua perikehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. penghargaan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepatuhan terhadap nilai budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan, pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal.

Sejalan dengan gambaran di atas, maka kondisi lebih religius dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan kota. Selanjutnya, secara terukur kemandirian ini akan digambarkan sebagai suatu kondisi tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang berakhlaqul karimah, hidup rukun, dan berkarakter.

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Perumusan tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal- hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pekalongan 2021-2026 yaitu "***Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius***", uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

4.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, RPJMD ini merumuskan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mencapai Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, maka salah satu hal yang harus diupayakan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian Ibu, Bayi dan Balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan akan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan, baik dari aspek jangkauan pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, alat-alat kesehatan dan obat-obatan, kualitas dan ketercukupan tenaga kesehatan, ataupun kapasitas dan kualitas lembaga pelayanan kesehatan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Perangkat Daerah terkait, mengajak dan memberikan ruang partisipasi yang luas dengan tetap memegang prinsip dan ketentuan yang berlaku untuk dapat berperan active dalam pelayanan di bidang kesehatan.

Selain peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan, upaya mewujudkan visi Kota Pekalongan yang lebih sejahtera juga dilakukan melalui pelayanan di bidang kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan mulai dari meningkatkan kualitas data sasaran yang terintegrasi dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sinkronisasi program dan kegiatan, baik dengan Pemerintah Pusat ataupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga akan mendorong peran swasta dan masyarakat, baik yang tergabung secara kelembagaan ataupun secara individu, untuk dapat bersama-sama menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Indeks Keluarga sehat dan Meningkatnya Penanganan Kemiskinan.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan bersama dengan masyarakat perlu membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan SDM yang berkarakter dan religius.

Misi ini ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dan agama, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta. Keberhasilan melaksanakan misi kedua ini akan memberikan dampak positif bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemandirian, serta peningkatan implementasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten, dan produktif. Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan, Meningkatnya akses pendidikan, Optimalnya pengarusutamaan gender, Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak, dan Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif.

3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman

Lingkungan permukiman yang diimpikan oleh hampir semua masyarakat adalah lingkungan yang sehat dan nyaman untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, beribadah, ataupun mencari nafkah dan mata pencaharian.

Kondisi ini berbeda sekali dibandingkan dengan kondisi riil yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Kota Pekalongan, khususnya yang tinggal di wilayah-wilayah terdampak rob seperti sebagian Kecamatan Pekalongan Barat, hampir seluruh Kecamatan Pekalongan Utara, dan sebagian wilayan Kecamatan Pekalongan Timur. Hampir sebagian besar mengalami permasalahan rumah yang tidak layak huni serta terbatas dalam pemenuhan kebutuhan pengelolaan limbah ataupun jalan dan drainase lingkungan yang memadahi.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat mengemban misi ini sesuai dengan porsi kewenangan, dan kemampuan anggarannya masing-masing. Upaya ini tidak hanya dilakukan di kawasan-kawasan yang masuk area kumuh, tetapi juga pada area lain di luar area kumuh.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman, dengan sasaran Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh.

4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan

Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan, saat ini dihadapkan pada kondisi tanah yang terus mengalami penurunan atau *land subsidence*. Intensitas kejadian banjir dan rob akan semakin sering terjadi jika tidak dilakukan penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob melalui sinergi sumber daya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, dan juga masyarakat. Pembangunan – pembangunan pengendali banjir dan rob berskala besar yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, harus dibarengi dengan penataan sistem drainase kota dan kebijakan untuk menahan laju

penurunan tanah oleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Adapun sasarannya yaitu Optimalnya penanganan banjir dan rob.

Selain itu, misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan sasaran meliputi : menurunnya tingkat pencemaran air, optimalnya tutupan hutan/RTH, dan Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang. Kemudian terkait dengan infrastruktur dasar perkotaan yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah, maka misi ini membawa juga tujuan untuk Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Dasar, dengan sasaran meliputi : Optimalnya layanan air minum, Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan, dan Meningkatnya Layanan Transportasi Perkotaan.

5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.

Kota Pekalongan adalah kota pertama di Indonesia yang masuk jejaring kota kreatif dunia UNESCO. Selain itu, sekarang ini juga menjadi anggota jejaring kota kreatif di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang masuk sektor-sektor ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep pondasinya pada potensi lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Pekalongan. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan industri, peningkatan nilai ekspor perdagangan, peningkatan nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata.

6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah.

Kota Pekalongan terkenal dengan nuansa religiusnya dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Di Kota Pekalongan terdapat adat dan tradisi lainnya seperti Sya’banan (khol/ruwah), Syawalan, sedekah bumi, dan sedekah laut. Sya'banan (khol) adalah upacara keagamaan / kebudayaan yang diselenggarakan setiap tanggal 14 sya'ban (ruwah) setahun sekali di selenggarakan di Makam Sapuro. Syawalan adalah upacara adat bagi umat Islam yang diselenggarakan di Kelurahan Krapyak dengan pemotongan lopis raksasa. Tradisi Sedekah Laut (Nyadran), yaitu upacara melarung sesaji berupa kepala kerbau dan jajan pasar lengkap serta tabur bunga yang dilaksanakan setiap bulan Syuro (Muharam). Tradisi Pek-Chun yang hampir sama dengan tradisi sedekah laut, tradisi ini diselenggarakan oleh warga Tionghoa menurut kalender China pada perayaan tahun baru China atau Imlek.

Kota Pekalongan juga memiliki jenis kesenian yang beragam, antara lain Simtudh Duror dan Samproh, yaitu seni musik bernafaskan islam biasanya menyanyikan puji-pujian, shalawat dan lagu-lagu Islami. Jenis kesenian lainnya adalah Marawis, yaitu jenis "band tepuk" dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Orkes Gambus dengan alat musik petik seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah.

Dengan melihat keragaman budaya dan kearifan lokal di atas, maka Pemerintah bersama Masyarakat Kota Pekalongan mengemban misi untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal tersebut. Dalam praktiknya misi ini akan mewujud melalui upaya mendorong peningkatan intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, baik oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat.

Kemudian untuk misi mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah nantinya akan diimplementasikan guna untuk mencapai tujuan berupa mewujudkan

kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan. Adapun sasarannya adalah manajemen atau pengelolaan potensi-potensi konflik sosial yang ada di masyarakat.

7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat akan dapat dilihat dari optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas layanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan meningkatnya kualitas pengawasan.

Sebagai gambaran atas uraian visi dan misi selanjutnya dapat dilihat dalam ilustrasi berikut.

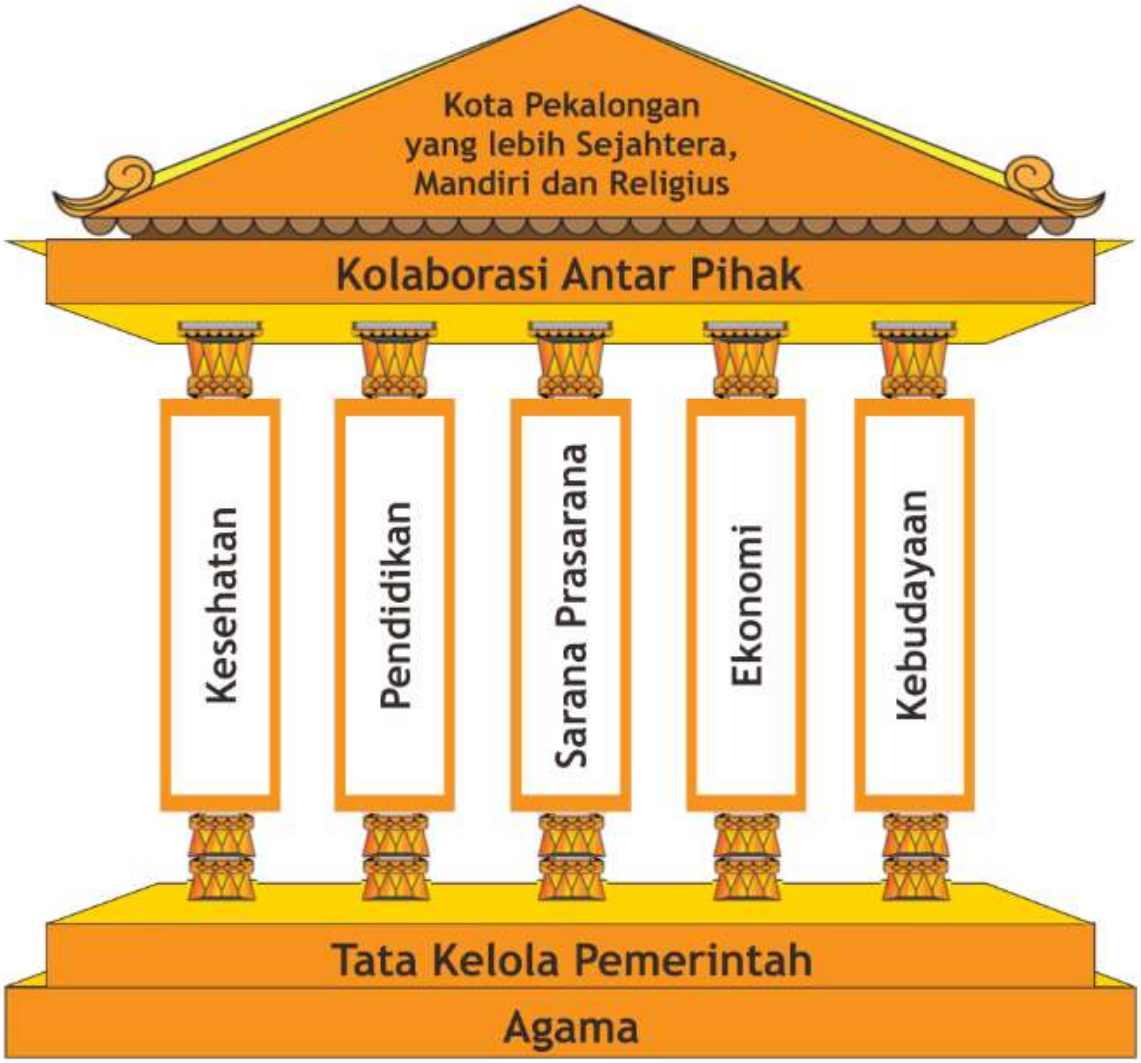

Gambar 4.1 Ilustrasi Visi dan Misi

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4.1.3. Tujuan Dan Sasaran

4.1.3.1. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

TUJUAN

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

SASARAN

a. Meningkatnya indeks keluarga sehat
b. Meningkatnya penanganan kemiskinan

4.1.3.2. Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

TUJUAN

a. Meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompetitif dan produktif

SASARAN

a. Meningkatnya akses pendidikan
b. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan
c. Optimalnya pengarusutamaan gender
d. Optimalnya pengarusutamaan hak anak
e. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif

4.1.3.3. Misi 3 : Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Nyaman

TUJUAN

a. Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman

SASARAN

a. Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh

4.1.3.4. Misi 4 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan

TUJUAN

a. Menurunkan luas genangan banjir dan rob
b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
c. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar

SASARAN

a. Optimalnya penanganan banjir dan rob
b. Menurunnya tingkat pencemaran air
c. Optimalnya kualitas lahan
d. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang
e. Optimalnya layanan air minum
f. Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan
g. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan

4.1.3.5. Misi 5 : Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

TUJUAN

a. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat

SASARAN

a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

4.1.3.6. Misi 6 : Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah

TUJUAN

a. Melestarikan Seni Budaya
b. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan

SASARAN

a. Meningkatnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan
b. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial

4.1.3.7. Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

TUJUAN

a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

SASARAN

a. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)
b. Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)
c. Meningkatnya kualitas manajemen ASN
d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
e. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan
f. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Penjabaran visi misi Wali Kota Pekalongan, tujuan dan sasaran seperti yang diuraikan di atas disusun juga dengan kaitan untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMN tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021– 2026
Visi : "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat												
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup			Tahun	74,38	74,43	74,47	74,52	74,57	74,62	74,66	74,66
		1. Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,17	0,22	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,50
			Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	152,41	140,34	128,28	116,21	104,14	92,08	80,01	80,01
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	8,81	8,51	8,21	7,91	7,60	7,30	7,00	7,00
			Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	10,84	10,53	10,23	9,92	9,61	9,31	9,00	9,00
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan			persen	7,17	6,94	6,71	6,50	6,29	6,09	5,89	5,89
		2. Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	n/a	1,00	1,00	2,00	2,50	3,00	3,00	11,89
Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan												
1. Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia			indeks	74,98	75,10	75,32	75,52	75,71	75,88	76,03	76,03
		1. Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,96	9,11	9,27	9,43	9,59	9,75	9,92	9,92
		2. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		3. Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	58,29	58,43	58,78	59,14	59,59	60,28	61,00	61,00
		4. Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
	Tingkat Pengangguran Terbuka			persen	7,02	6,84	6,66	6,48	6,31	6,15	5,99	5,99
		1. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	66,45	70,01	70,28	70,54	70,81	71,08	71,34	71,34
Misi 3 : Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman												
1. Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen			persen	55,56	55,56	62,96	74,07	77,78	88,89	100,00	100,00
		1. Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	89,26 (SK Baru)	89,26	90,96	93,72	96,24	98,44	100,00	100,00
Misi 4 : Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan												
1. Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob			persen	37,27	33,11	26,50	22,12	19,58	17,02	12,17	12,17
		1. Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1730,00	1537,00	1230,00	1027,00	909,00	790,00	565,00	565,00
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			indeks	50,84	50,85	50,86	50,87	50,88	50,89	50,90	50,90
		1. Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	indeks	35,33	35,34	35,35	35,36	35,37	35,38	35,39	35,39
		2. Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	23,61	23,61	23,61
		3. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	4,00	4,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3. Menjamin Ketersediaan infrastruktur dasar	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar			persen	88,11	88,44	88,77	89,11	90,37	90,71	91,04	91,04
		1. Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2. Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	persen	67,12	68,12	69,12	70,12	71,12	72,12	73,12	73,12
		3. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*)	kategori	B	B	B	B	B	B	B	B
			Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20	97,20	97,20	97,20	100,00	100,00	100,00	100,00
Misi 5 : Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal												
1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita			Rp. Juta/jiwa/ tahun	35,22	35,47 - 35,51	35,97 - 36,21	36,56 - 36,92	37,16 - 37,82	39,21	40,65	40,65
		1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	persen	-1,87	1,86 - 1,97	2,28 - 2,84	2,48 - 2,83	2,53 - 3,32	4,55	4,55	4,55
Misi 6 : Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah												
1. Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan			persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		1. Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	68,89	86,67	88,89	91,11	93,33	97,78	100,00	100,00
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial			kasus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government												
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi			indeks	n/a	70,69	71,69	72,69	73,69	74,69	75,69	75,69
		1. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)	Indeks SPBE	indeks	3,19	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,25
		2. Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)	IKM Kota	persen	83,19	83,34	83,49	83,64	83,79	83,94	84,09	84,09
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	91,00	93,00	95,00	96,00	97,00	97,20	97,50	97,50
		3. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	indeks	200,00	215,00	225,00	240,00	250,00	255,00	260,00	260,00
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	skor	73,07	73,57	74,07	74,57	75,07	75,57	76,07	76,07
		5. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Maturitas SPIP	nilai	3,02	3,10	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00
			Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah sasaran dipisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota tetapi secara langsung mencapai prioritas perangkat daerahnya tersebut. Selanjutnya sasaran secara spesifik pembangunan daerah terrangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja '*impac*t' yang saling terhubung. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Wali Kota Pekalongan pada tahun 2021. Berikut ini disajikan tabel keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kota Pekalongan.

Tabel 4.2 Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat					
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	1. Indeks Keluarga Sehat 2. AKI 3. AKB 4. AKABA	Persentase capaian SPM Kesehatan	Kesehatan
				Skor PPH konsumsi	Pangan
				Total Fertility Rate	Keluarga Berencana
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Sosial
Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan					
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan
		Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Pendidikan
				Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Perpustakaan
		Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	Tenaga Kerja
Misi 3 : Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman					
Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Persentase kelurahan dengan kawasan	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang	Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang	Persentase rumah layak huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
	kumuh kurang dari 10 persen	tidak kumuh	tidak kumuh	Cakupan layanan pengelolaan limbah domestik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Cakupan jalan dan jembatan lingkungan kondisi mantap	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 4 : Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan					
Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas Genangan Banjir dan Rob	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	Persentase tingkat pencemaran air	Lingkungan Hidup
		Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas lahan	Persentase Kenaikan Luasan RTH	Lingkungan Hidup
		Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Persentase kesesuaian penataan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Pertanahan
Menjamin layanan infrastruktur dasar	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Lingkungan Hidup
				Pengembangan Sarana Persampahan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Kapasitas Jalan Perkotaan	Perhubungan
			Persentase keterhubungan jalan	Persentase jalan kota dalam keadaan Mantap	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 5 : Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal					
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Penanaman Modal
				Pertumbuhan Industri	Perindustrian
				Nilai ekspor perdagangan	Perdagangan
				Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Koperasi-UKM
				Nilai produksi tanaman pangan, holtikultura dan peternakan	Pertanian

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
				Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota (IKK *Outcome*)	Kelautan dan Perikanan
				Tingkat Kunjungan Wisata	Pariwisata
Misi 6 : Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah					
Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Persentase peningkatan kelompok budaya	Kebudayaan
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	Kesbangpol
				Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	Kesbangpol
				Tingkat ketenteraman dan ketertiban umum	Trantibum
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government					
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	Komunikasi dan Informatika
				Tingkat kematangan layanan data terbuka pada satu data terpadu daerah	Statistik
				Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Persandian
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	IKM Kota	Nilai indeks kepuasan masyarakat OPD	Semua Urusan
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	Indeks Profesionalitas ASN	Kepegawaian
				Indeks Profesionalitas ASN	Pendidikan dan Pelatihan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan
				Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Perencanaan
				Persentase capaian kinerja pembangunan	Sekretariat Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Keuangan
				Rasio PAD	Keuangan
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Maturitas SPIP	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Pengawasan
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	Pengawasan

Sumber : RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 2021

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Visi : "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

MISI / TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat		
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Peningkatan kualitas keluarga sehat
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin dan mencegah munculnya miskin kembali bagi warga rentan dan hampir miskin
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan		
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Meningkatnya akses pendidikan	Pengurangan angka pengangguran dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	
	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Peningkatan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja
	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait
	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	
Misi 3 : Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman		
Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualtas jalan lingkungan
Misi 4 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan		
Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Optimalnya penanganan banjir dan rob	Penurunan luas genangan banjir/rob melalui penataan sistem drainase, pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air	
	Optimalnya kualitas lahan	

MISI / TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Terwujudnya rumusan dan pelasanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang	
Menjamin Ketersediaan infrastruktur dasar	optimalnya layanan air minum	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
	optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	
	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	
Misi 5 : Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal		
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Misi 6 : Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah		
Melestarikan Seni Budaya	Meningkatnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan	Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan *event* budaya dengan pemberdayaan berbasis komunitas
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Pengendalian potensi konflik sosial melalui upaya preventif dengan pendekatan kepada tokoh agama dan toko masyarakat serta penyelesaian jalur non litigasi
Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan
	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2022 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2022 juga disusun dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah "***Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022 yaitu "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural", pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi :

1. Industri.
2. Pariwisata.
3. Ketahanan Pangan.
4. UMKM.
5. Infrastruktur.
6. Transformasi Digital.
7. Pembangunan Rendah Karbon.
8. Reformasi Perlindungan Sosial.
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan.
10. Reformasi Kesehatan.

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5 persen;
   b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99 persen;
   c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5 T .
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk pempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan;
   b. Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36-39.
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian :
   c. Skor Pola Pangan Harapan 92,8;
   d. Nilai Tukar Petani 102-104;
   e. Nilai Tukar Nelayan 102-105;
   f. Ketersediaan Beras 44 juta ton;
   g. Ketersediaan Protein Hewani 2,7 juta ton;

h. Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn.

4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Pertumbuhan Wirausaha 3 persen;
   b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63 persen;
   c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9 persen.
5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit;
   b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi;
   c. Panjang Jalan Tol Baru: 400 km;
   d. Penambahan Debit Air Baku 5 m3/s;
   e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR;
   f. Pembangunan Akses Sanitasi Aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR;
   g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha;
   h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh.
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Masyarakat pengguna internet 79,20 persen;
   b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik;
   c. kumulatif 42,85 persen;
   d. 72.500 SDM talenta digital;
   e. 12,4 juta local champion literasi digital;
   f. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi;
   g. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber.
7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Penurunan Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87 persen;
   b. Penurunan Intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54 persen;
   c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7 persen;
   d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW.
8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Tingkat Kemiskinan 8,5-9 persen;
   b. Penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial 87 persen;
   c. Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial 60 persen;
   d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk.
9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55 persen;
   b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6 persen;

c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62 persen;
d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasias Teknologi (PPBT);
e. 900 Paten Domestik.

10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan *COVID-19* dengan meneruskan Vaksinasi *COVID-19*, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian :
    a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4 persen;
    b. Insidensi TB 231/100.000 Penduduk;
    c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91 persen;
    d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71 persen;
    e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59 persen;
    f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80 persen;
    g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80 persen & RS 90 persen;
    h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022, antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 persen;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 persen;
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48;
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 persen;
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104;
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105;
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 persen.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

   Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

   a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

   b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

   a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu :

      1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;

      2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;

      3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;

      4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan

      5) Pengembangan industri pendukung EBT.

   b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

      1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);

      2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;

      3) Penyediaan air untuk pertanian;

      4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;

      5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air

      6) dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan

      7) infrastruktur hijau; dan

      8) Pengembangan waduk multiguna.

   c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

      1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;

      2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;

      3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;

      4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan

      5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

   d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
5) Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.

e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.

f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
6) Pengembangan industri halal.

g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;
2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
3) Pengelolaan Impor;
4) Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
5) Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;
6) Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif; dan

7) Peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

1) Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;
3) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;
4) Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri
5) Pengolahan dan Pariwisata; dan
6) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi
7) Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman,
8) Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
d) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f) Pengentasan kemiskinan; dan
g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu :

1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
3) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.

b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Sistem jaminan sosial nasional;
2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
3) Kesejahteraan Sosial.

c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
3) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.

e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
2) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
3) Kualitas Pemuda.

f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
3) Reforma Agraria; dan
4) Perhutanan Sosial.

g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;
2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;

3) Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi; dan

4) Prestasi Olahraga.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada :

a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;

b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan

c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan

d) meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

a) Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;

2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;

3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;

4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;

5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan

6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.

b) Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;

2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;

3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;

4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan

5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;

2) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;

3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;

4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan

5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.

d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

1) Peningkatan Budaya Literasi;

2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;

3) Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan

4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;

b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;

c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;

d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan

e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;

2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;

3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;

4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;

5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan

6) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.

b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Konektivitas Jalan;

2) Konektivitas Kereta Api;

3) Konektivitas Laut;
4) Konektivitas Udara; dan
5) Konektivitas Darat.

c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Transportasi Perkotaan; dan
2) Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan.

d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.

e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Penuntasan Infrastruktur TIK;
2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan
3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
c) Pembangunan Rendah Karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Penanggulangan Bencana; dan
2) Peningkatan Ketahanan Iklim.

c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1) Pembangunan Energi Berkelanjutan;

2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan

3) Pengembangan Industri Hijau.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;

b) Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;

c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;

d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan

e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;

2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan

3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.

b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

1) Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan

2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.

c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;

2) Transformasi pelayanan publik;

3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan

4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.

d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

1) Penguatan Keamanan Dalam Negeri;

2) Penguatan Keamanan Laut; dan

3) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2021 masih mempertimbangkan keberlanjutan pemulihan dampak *COVID-19* yang lebih mengarah pada upaya peningkatan perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing sumberdaya manusia, dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022.

Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan pada "***Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung***

Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM" yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2022 dengan fokus sebagai berikut :

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana

   Upaya penguatan terhadap perekonomian daerah akan terus dilakukan di tahun 2022 dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Kejadian pandemi *COVID-19* di tahun 2020 memberikan goncangan cukup berat pada sektor perekonomian sehingga diperkirakan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk pemulihan. Untuk itu di kebijakan pembangunan daerah di tahun 2022 didorong untuk penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana yang difokuskan pada :

   a) Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, serta kualitas produk pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani; perwujudan korporasi petani; peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan; perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan; peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah; mendorong tumbuh kembang iklim inovasi kondusif di masyarakat; peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah; pengembangan daya tarik wisata untuk mendukung koridor pariwisata Jawa Tengah khususnya pada kawasan yang memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi; perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif; didukung dengan peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan, serta peningkatan kapasitan tampungan air baku melalui pembangunan waduk, embung, dan longstorage yang didukung dengan perkuatan pengelolaan irigasi berbasis masyarakat;

   b) Penguatan keberlanjutan lingkungan hidup melalui rehabilitasi DAS kritis dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung, serta keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan; konservasi lingkungan, pengendalian pencemaran air sungai, peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah dan limbah, serta pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan;

   c) Pemantapan ketahanan bencana melalui peningkatan sarana prasarana penanggulangan banjir, rob, dan tanah longsor; integrasi dokumen perencanaan kebencanaan dengan perencanaan pembangunan; sinergitas program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan literasi kebencanaan; penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan.

2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

   Kebijakan pengurangan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan pemenuhan basic need access untuk mengurangi beban pengeluaran, sustainable livelihood untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan penguatan tata kelola. Sasaran kebijakan ini terutama untuk penduduk miskin dan rentan miskin khususnya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM dan kelompok rentan lainnya termasuk kelompok penduduk terdampak *COVID-19* baik secara sosial maupun ekonomi. Sedangkan kebijakan penurunan pengangguran diarahkan pada perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja, serta pengawasan tenaga kerja dengan fokus pada :

a) Penyediaan *basic need access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan kelompok rentan lainnya yang bersifat langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, melalui antara lain peningkatan akses pendidikan berupa beasiswa siswa miskin, penyelenggaraan SMK Negeri Boarding dan asrama semi boarding di kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi, fasilitasi uji kompetensi, vokasi bidik miskin; peningkatan cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, pola hidup bersih dan sehat; bantuan stimulan pangan; bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni dan rumah baru sederhana sehat, termasuk penyediaan air bersih, sanitasi, dan listrik; pemberian Kartu Jateng Sejahtera, pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemberian bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin tidak produktif, perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial, peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial; fasilitasi kepemilikan dan kemudahan perolehan dokumen administrasi kependudukan; serta peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);

b) Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) yang bersifat langsung maupun tidak langsung dan kolektif untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan serta meningkatan daya tahan usaha mikro dan kecil antara lain melalui keperantaraan akses masyarakat terhadap modal, informasi dan fasilitasi pembiayaan/kredit, teknologi, pasar, manajemen usaha, linkage usaha mikro kecil dengan off taker (penjamin); pengembangan startup wirausaha baru; peningkatan peran dan produktivitas BUMDesa/BUMDesa Bersama; pemanfaatan teknologi informasi digitalisasi dalam rangka edukasi dan literasi pengetahuan, manajemen usaha, pola pembiayaan, maupun pola pemasaran dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0; peningkatan peran dan keaktifan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Tri Bina;

c) Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi TKPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan antar pemangku kepentingan, penguatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), fasilitasi pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas dengan pendampingan yang kontinyu, peningkatan sumber pembiayaan alternatif diantaranya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Baznas;

d) Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; penciptaan atau perluasan kesempatan kerja dengan juga memberikan akses kepada kelompok disabilitas; perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, kesejahteraan pekerja, pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan; peningkatan kepatuhan dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan, penanganan kasus ketenagakerjaan, dan pelayanan pengawasan tenaga kerja.

3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan, serta peningkatan kualitas pembangunan perempuan dan anak yang difokuskan pada :

a) Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah

dengan program bantuan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta; peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan terutama yang memenuhi standar protokol kesehatan, serta mendukung akses teknologi informasi; peningkatan kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude dan learning culture; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; penguatan pendidikan karakter; penguatan literasi masyarakat; dan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat;

b) Pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan daerah meliputi pengendalian penyakit, penguatan ketahanan kesehatan, penguatan puskesmas dan pelayanan rumah sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat; serta pembudayaan/permassalan olahraga kepada masyarakat;

c) Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak melalui pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; pengurangan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak; penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan dasar.

4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Kebijakan tata kelola pemerintahan diarahkan pada penguatan kapasitas, pola kerja birokrasi, dan reformasi birokrasi yang lebih adaptif terhadap segala dinamika yang terjadi. Kebijakan kondusivitas wilayah diarahkan pada penguatan toleransi, kebersamaan, dan gotong royong untuk menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat. Sedangkan kebijakan peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah dengan pemanfaatan aset agar lebih produktif, serta peningkatan pemanfaatan sumber pembiayaan dari non pemerintah. Prioritas daerah ini di tahun 2022 difokuskan pada :

a) Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services), serta membangun pemerintahan yang terbuka (open government) melalui perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik, pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (e-government), dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaannya; serta meningkatkan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;

b) Peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; pengendalian produk hukum dan penegakkan perda;

c) Peningkatan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui perwujudan manajemen ASN berbasis sistem merit secara transparan, obyektif, dan akuntabel; pengembangan sistem penilaian kinerja; penataan ASN dengan pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN; pengembangan jabatan fungsional tertentu; peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN dengan menerapkan human capital management; perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja dengan penerapan sistem penilaian kinerja organisasi dan individu yang lebih terukur dan obyektif; perbaikan tata laksana

organisasi berbasis digital; serta meningkatkan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;

d) Penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah dengan pemanfaatan aset agar lebih produktif dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD lainnya, serta peningkatan pemanfaatan sumber pembiayaan dari non pemerintah;

e) Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganergaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat;

f) Peningkatan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pencegahan ekstrimisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2022 yaitu :

1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 79,00;
3. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 persen;
4. Indeks Gini sebesar 0,32;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,96 – 5,88 persen;
6. Pertumbuhan Ekonomi antara 3,93 – 5,20 persen;
7. Inflasi pada angka 3,0 ± 1 persen;
8. PDRB per kapita sebesar 39,24 juta rupiah;
9. Indeks Williamson sebesar 0,57;
10. Nilai Tukar Petani 103,56;
11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,43;
12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,18; dan
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,52.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan

Berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis, maka pembangunan Kota Pekalongan tahun 2022 mengusung tema "***Sinergi Program Dan Kegiatan Pembangunan Dengan Pemerintah Pusat Dan Provinsi Dalam Rangka Penataan Lingkungan Yang Nyaman Bagi Akitivitas Sosial Ekonomi Masyarakat dengan Berlandaskan Nilai-Nilai Religiusitas***", dengan arah kebijakan :

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang ada, dengan fokus pada Penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi balita pendek (stunting), dan penanggulangan penyakit menular.
2. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan, dengan fokus pada optimalisasi DTKS hasil verifikasi dan validasi dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan.

3. Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menemukenali anak tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal, nonformal, ataupun lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga, dengan fokus pada :
   a. Penanganan anak tidak sekolah dengan mengutamakan program retrival serta menekankan kepada lembaga pendidikan untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya siswa *drop out*;
   b. Penguatan kurikulum pendidikan karakter serta implementasi praktik pendidikan keagamaan.
4. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja, dengan fokus pada Penguatan komunikasi dengan penyelenggara pendidikan berbasis vokasi (ketrampilan) formal ataupun non formal, dengan tujuan memperkuat *link and match* terhadap kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
5. Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak, dengan fokus pada :
   a. Penguatan perencanaan dan penganggaran serta evaluasi program/kegiatan berperspektif gender;
   b. Penanganan anak punk, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak kekerasan.
6. Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada identifikasi, verifikasi dan validasi data, serta konsolidasi dan sinergi program kegiatan penanganan kawasan kumuh dari berbagai sumber pembiayaan.
7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun, dengan fokus pada :
   a. Sinkronisasi program dan kegiatan di wilayah-wilayah rawan genangan dan banjir, khususnya wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur;
   b. Optimalisasi pemanfaatan IPAL terbangun dengan mendorong pengusaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan limbah cair;
   c. Peningkatan pemanfaatan peruntukan lahan Ruang Terbuka Hijau sesuai RTRW Kota Pekalongan serta pengendalian pemanfaatan ruang dengan menjaga pemenuhan penyediaan RTH dari sektor privat;
   d. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam proses perijinan dengan terus melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun, dengan fokus pada :
   a. Penguatan koordinasi untuk peningkatan suplai air baku dari SPAM Regional dengan tetap mencari alternatif pengolahan air baku permukaan;
   b. Peningkatan upaya mengurangi jumlah sampah yang akan dibawa dan dikelola di TPA Degayu serta pemanfaatan *incinerator* guna menambah daya kelola TPA;
   c. Optimalisasi penyelenggaraan layanan lalu lintas dan angkutan jalan raya untuk mendukung pembangunan pariwisata.

9. Peningkatan promosi, pemberdayaan dan pengelolaan pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, dengan lebih mendorong peran berbagai pihak, baik swasta, komunitas, ataupun masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, dengan fokus pada penguatan promosi obyek wisata air sebagai lokomotif baru guna menambah daya dukung bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan Kota Pekalongan.
10. Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan *event* seni dan budaya, dengan fokus pada pemulihan penyelenggaraan *event* budaya melalui koordinasi penataan agenda *event* tahunan.
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada penguatan wawasan kebangsaan melalui pendekatan kepada kelompok masyarakat guna mengelola dan menekan potensi konflik sosial.
12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota, dengan fokus pada :
    a. Penerapan SPBE sebagai pendorong perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
    b. Peningkatan pelayanan publik, penguatan keterbukaan informasi publik, serta kinerja pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
    c. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah melalui manajemen ASN yang baik berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi;
    d. Penguatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan penguatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Memperhatikan kondisi global, nasional, tantangan dan upaya penanganan dan pemulihan pasca pandemi *COVID-19*, serta berdasarkan target capaian RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 khususnya tahun 2021, target indikator makro pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,28 - 2,84 persen;
b) Laju inflasi sebesar 3 ± 1 persen;
c) Tingkat kemiskinan sebesar 6,71 persen;
d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,32;
e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,66 persen.

Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2022 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan tahun 2022. Keterkaitan antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2022

Permasalahan	Isu Strategis		Prioritas Tahun 2022
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal (Smart Governance)	Tata kelola pemerintahan	12	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi
Belum optimalnya kualitas layanan publik (*Smart Governance*)			
Belum optimalnya implementasi manajemen ASN			

Permasalahan	Isu Strategis		Prioritas Tahun 2022
Akuntabilitas kinerja dan keuangan masih perlu ditingkatkan			penerapan MRI di tingkat Kota
Belum optimalnya penerapan zona integritas			
Penataan sistem drainase yang belum optimal	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	7	Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun
Tingginya tingkat pencemaran air			
Belum optimalnya tutupan hutan			
Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang			
Belum optimalnya cakupan layanan sampahan perkotaan	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan infrastruktur Lingkungan Permukiman	8	Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun
Belum optimalnya layanan transportasi perkotaan			
Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan serta masih tingginya kawasan permukiman kumuh		6	Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Belum optimalnya capaian keluarga sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan (Masa Pandemi *COVID-19*)	1	Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang ada
Belum optimalnya penanganan kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran	2	Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial de ngan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan
Masih tingginya angka pengangguran terbuka		4	Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja
Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter dan keagamaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	3	Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat
Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan			

Permasalahan	Isu Strategis		Prioritas Tahun 2022
			melalui literasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menemukenali anak tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal, nonformal, ataupun lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga
Belum optimalnya pengarusutamaan hak anak		5	Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak
Pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi sebagai akibat pandemi *COVID-19* serta masih rendahnya kontribusi sektor-sektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi	9	Peningkatan promosi, pemberdayaan dan pengelolaan pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, dengan lebih mendorong peran berbagai pihak, baik swasta, komunitas, ataupun masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal
Terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan	Pelestarian Budaya Lokal	10	Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan *event* seni dan budaya
Belum optimalnya pengelolaan potensi konflik sosial	Kondusivitas Wilayah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan Tahun 2022, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2022 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2022		
1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang ada				
Penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi balita pendek (stunting), dan penanggulangan penyakit menular	1. AKI (Angka Kematian Ibu)	1. 128,28	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
	2. AKB (Angka Kematian Bayi)	2. 8,21	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	3. AKABA (Angka Kematian Balita)	3. 10,23	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
	4. Indeks Keluarga Sehat	4. 0,25	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinperpa
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Program Pengendalian Penduduk	Dinsos P2KB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
2. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan				

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2022		
Optimalisasi DTKS hasil verifikasi dan validasi dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS) Desil 1	1,00%	Program Pemberdayaan Sosial	Dinsos P2KB
			Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			Program Penanganan Bencana	
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
3. Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menemukenali anak tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal, nonformal, ataupun lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga				
a) Penanganan anak tidak sekolah dengan mengutamakan program retrival serta menekankan kepada lembaga pendidikan untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya siswa drop out;	1. Rata-Rata Lama Sekolah	9,27 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
b) Penguatan kurikulum pendidikan karakter serta implementasi praktik pendidikan keagamaan	2. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	100,00%	Program Pengembangan Kurikulum	Dindik
4. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja				
Penguatan komunikasi dengan penyelenggara pendidikan berbasis vokasi (ketrampilan) formal ataupun non formal, dengan tujuan memperkuat *link and match* terhadap kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,28%	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Hubungan Industrial	
5. Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak				

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2022		
a) Penguatan perencanaan dan penganggaran serta evaluasi program/kegiatan berperspektif gender	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58,78	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPMPPA
			Program Perlindungan Perempuan	
b) Penanganan anak punk, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak kekerasan	2. Kategori Kota Layak Anak	Madya	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPMPPA
			Program Perlindungan Khusus Anak	
6. Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh				
Identifikasi, verifikasi dan validasi data, serta konsolidasi dan sinergi program kegiatan penanganan kawasan kumuh dari berbagai sumber pembiayaan	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	90,96%	Program Pengembangan Perumahan	Dinperkim
			Program Kawasan Permukiman	
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun				
a) Sinkronisasi program dan kegiatan di wilayah-wilayah rawan genangan dan banjir, khususnya wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur	1. Luas Genangan Banjir dan Rob	1.230,00 Ha	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
b) Optimalisasi pemanfaatan IPAL terbangun dengan mendorong pengusaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan limbah cair	2. Indeks Kualitas Air	35,35	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2022		
c) Peningkatan pemanfaatan peruntukan lahan Ruang Terbuka Hijau sesuai RTRW Kota Pekalongan serta pengendalian pemanfaatan ruang dengan menjaga pemenuhan penyediaan RTH dari sektor privat	3. Indeks Kualitas Lahan	23,602%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH
d) Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam proses perijinan dengan terus melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan ruang	4. Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	6 regulasi	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	
			Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	
8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun				
a) Penguatan koordinasi untuk peningkatan suplai air baku dari SPAM Regional dengan tetap mencari alternatif pengolahan air baku permukaan	1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	100,00%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
b) Peningkatan upaya mengurangi jumlah sampah yang akan dibawa dan dikelola di TPA Degayu serta pemanfaatan incinerator guna menambah daya kelola TPA	2. Persentase pelayanan sampah	69,12%	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
c) Optimalisasi penyelenggaraan layanan lalu lintas dan angkutan jalan raya untuk mendukung pembangunan	3. Tingkat pelayanan jalan (*Level Of*	B	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2022		
pariwisata	*Service*)			
	4. Persentase keterhubungan jalan	97,20%	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
9. Peningkatan promosi, pemberdayaan dan pengelolaan pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, dengan lebih mendorong peran berbagai pihak, baik swasta, komunitas, ataupun masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal				
Penguatan promosi obyek wisata air sebagai lokomotif baru guna menambah daya dukung bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan Kota Pekalongan	Pertumbuhan ekonomi	2,28 - 2,84 %	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dindagkop UKM
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
			Program Pengembangan Ekspor	
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2022		
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
			Program Pengembangan UMKM	
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparbudpora
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinperpa
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2022		
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	
10. Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan *event* seni dan budaya				
Pemulihan penyelenggaraan *event* budaya melalui koordinasi penataan agenda *event* tahunan	Persentase Penyelenggaraan *Event* Budaya	88,89%	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinparbudpora
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Program Pembinaan Sejarah	
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			Program Pengelolaan Permuseuman	
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah				
Penguatan wawasan kebangsaan melalui pendekatan kepada kelompok masyarakat guna mengelola dan menekan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	100,00%	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2022		
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
a) Penerapan SPBE sebagai pendorong perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	1. Indeks SPBE	2,85	Program Aplikasi Informatika	Dinkominfo
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinkominfo
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinkominfo
b) Peningkatan pelayanan publik, penguatan keterbukaan informasi publik, serta kinerja pemerintahan yang akuntabel dan transparan	2. IKM Kota	83,49	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
			Program Perizinan Penggunaan Arsip	
			Program Pembinaan Perpustakaan	
			Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil
			Program Pencatatan Sipil	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinparbudpora

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2022		
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	DPMPPA
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2022		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	3. KIP Tingkat Kota	95,00	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
	4. Nilai SAKIP Kota	74,07	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
			Program Perekonomian dan Pembangunan	
	5. Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2022		
c) Peningkatan kualitas aparatur pemerintah melalui manajemen ASN yang baik berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	Indeks Merit System	225,00	Program Kepegawaian Daerah	BKPPD
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
d) Penguatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan penguatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Maturitas SPIP	3,20	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4.2.4. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan Kota Pekalongan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan, serta memperhatikan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan arah kebijakan nasional Tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	9	Peningkatan promosi, pemberdayaan dan pengelolaan pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, dengan lebih mendorong peran berbagai pihak, baik swasta, komunitas, ataupun masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim			7	Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2	Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	2	Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			6	Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
				8	Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	3	Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing	1	Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang ada

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
				3	Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menemukenali anak tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal, nonformal, ataupun lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga
				5	Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak
				4	Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			10	Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan *event* seni dan budaya
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
				12	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

Keterkaitan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Pekalongan juga diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Kawasan Purwomanggung dan Kawasan Bregasmalang, dimana terdapat 6 Program/Proyek di Kota Pekalongan yaitu :

a. Pengendalian Banjir Sistem S. Loji/ Pekalongan/Kupang, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan;
b. Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sengkarang, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan;
c. Pengendalian Banjir dan Rob, Kota Pekalongan dan Kab. Batang;
d. Penyempurnaan Sistem Banjir dan Rob, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan;
e. Pengembangan TOD (Transit Oriented Development) Stasiun Pekalongan, Kota Pekalongan;
f. Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak.

4.2.5. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil pelaksanan Reses menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan daerah Kota Pekalongan. Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Pekalongan untuk RKPD Tahun 2022 meliputi :

1. Bidang Pendidikan
   a. Peningkatan kualitas pendidikan berkarakter.
   b. Pengembangan pendidikan yang mengarah pada isu isu global.
   c. Peningkatan sarana prasarana sekolah khususnya bagi wilayah yang terkena dampak rob.
   d. Penyesuaian sistem pendidikan dan pelaksanaan pendidikan pasca *COVID-19*.
2. Bidang Kesehatan
   a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.
   b. Peningkatan pelayanan RSUD Bendan.
   c. Peningkatan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
   d. Menekan jumlah bayi terkena gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi/balita.
   e. Meningkatkan kewaspadaan penyakit-penyakit menular.
3. Bidang Sosial Ekonomi
   a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan workshop berbasis IT.
   b. Penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial.
   c. Peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat melalui perluasan dan pengembangan sektor sektor ekonomi kreatif.
   d. Menyediakan kesempatan kerja sebanyak banyaknya melalui kerjasama dengan perusahaan perusahaan di pekalongan maupun luar daerah.
   e. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan workshop berbasis IT.
   f. Penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial.
   g. Peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat melalui perluasan dan pengembangan sektor sektor ekonomi kreatif.
   h. Menyediakan kesempatan kerja sebanyak banyaknya melalui kerjasama dengan perusahaan perusahaan di pekalongan maupun luar daerah.
4. Bidang Infrastruktur
   a. Peningkatan keamanan akses jalan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan.
   b. Percepatan penyelesaian pembangunan Pasar Banjarsari.
   c. Peningkatan pembangunan drainase, normalisasi sungai untuk meminimalisir banjir dan rob.
   d. Meningkatkan fungsi infrastruktur lingkungan permukiman.
5. Bidang Ketertiban Umum dan Penegakan Hukum
   a. Meningkatkan penataan perparkiran terutama di lokasi-lokasi padat lalu lintas.
   b. Penataan pedagang K5 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan peruntukannya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

c. Penertiban praktek judi seperti togel, *online* dan yang lainnya yang kian marak dan meresahkan masyarakat
d. Menertibkan tiap-tiap persimpangan jalan raya (lampu lalu lintas/traffic light) dari para peminta-minta, pengamen, dll. yang dapat mengganggu dan membahayakan.

6. Bidang Permukiman
   a. Meningkatkan program peningkatan permukiman baik perumahan / hunian maupun lingkungan.
7. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah
   a. Proses penyusunan APBD akan berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu hendaknya dalam penyusunan APBD dilakukan dengan tepat waktu.
   b. Peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan dan latihan yang memadai serta perbaikan kinerja OPD dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

4.2.6. Inovasi Kebijakan Pembangunan

Inovasi daerah, sebagai ide dan gagasan baru yang didukung oleh ilmu pengetahuan serta kebijakan Daerah, menjadi hal penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Hal-hal baru yang dapat diangkat menjadi inovasi dalam pelayanan publik tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi daerah secara kontinyu. Hal ini dibuktikan dengan adanya inovasi daerah sebagai salah satu komponen dalam penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Bappenas, dan salah satu kategori kinerja dalam pemberian Dana Insentif Daerah (DID).

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya mendorong Perangkat Daerah untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Adapun inovasi yang sedang dan akan dikembangkan sebagai berikut :

1. SIM Filariasis

SIM Filariasis merupakan hasil penelitian dari fasilitasi Riset Bersama dengan judul Pengembangan *Dashboard* Eksekutif untuk Sistem Monitoring Penanganan Filariasis Kota Pekalongan. Latar belakang diciptakannya inovasi ini adalah fakta bahwa Kota Pekalongan menjadi salah satu kota di Jawa Tengah yang masih endemi penyakit kaki gajah. Dengan demikian Kota Pekalongan masih memiliki resiko penularan filariasis yang tinggi dan menyebabkan pemerintah harus terus melakukan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis.

Sejak tahun 2011 pemerintah telah memberikan obat massal pencegahan filariasis, namun tingkat kepatuhan minum obat masih rendah sehingga masih ditemukan beberapa kasus endemi filariasis. Pemberian obat filariasis kepada masyarakat saat ini dilakukan dengan cara membagikan kepada masyarakat, akan tetapi petugas tidak mengetahui apakah obat tersebut benar-benar dikonsumsi setelah dibagikan. Proses monitoring harus dilakukan dengan ketat agar masyarakat meminum obat filariasis yang telah dibagikan.

Berdasarkan permasalan tersebut di atas, salah satu upaya yang diberikan adalah dengan membangun sistem monitoring tingkat kepatuhan masyarakat dalam meminum obat filariasis. Aplikasi dapat mencatat dan menampilkan profil masyarakat sasaran dan status pemberian obat. Data yang didapatkan dalam monitoring dapat digunakan oleh pemerintah dalam untuk menentukan kebijakan akan diambil dalam rangka penanganan penyakit filariasis di Kota Pekalongan.

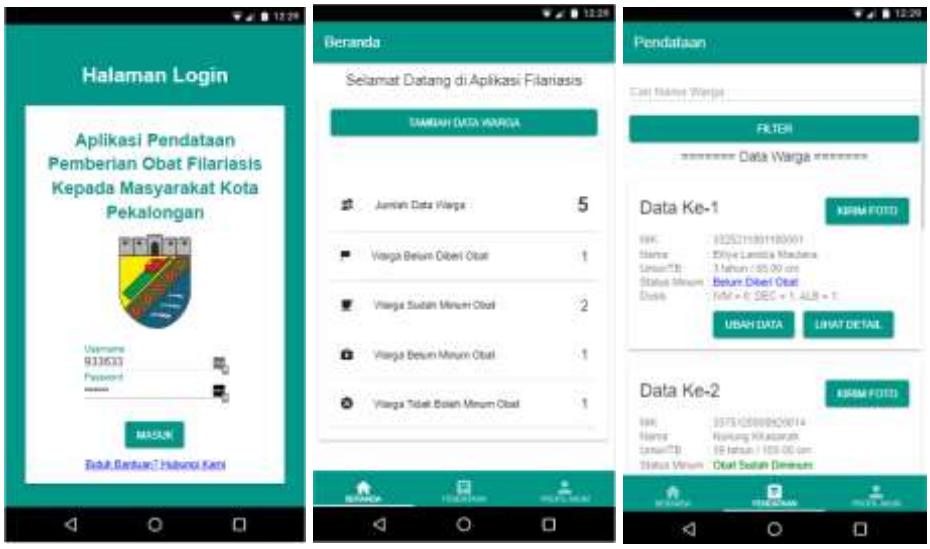

Gambar 4.2 SIM Filariasis

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

2. SIM Pendataan Lengkap Rumah

Kota Pekalongan saat ini sedang mengembangkan Aplikasi Pendataan Rumah Berbasis Android yang akan digunakan untuk melakukan pendataan rumah se-Kota Pekalongan. Pengembangan SIM Pendataan Rumah Lengkap ini merupakan pengembangan atas program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yang semula bernama “Membangun sistem database infrastruktur permukiman dalam rangka penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh”. Perluasan program unggulan ini diperlukan untuk mendukung pemenuhan data rumah lintas sektoral lainnya yang penting dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, antara lain pemenuhan data Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyediaan infrastruktur perumahan dan permukiman, pendataan akses sanitasi dan air minum, dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

Merujuk pada urgensitas data, data rumah akan menjadi data prioritas yang harus disediakan dalam penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah pada Tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi intensif antara BPS selaku Pembina Data, Bappeda selaku Koordinator Forum Data, Kominfo selaku Walidata, OPD terkait selaku Produsen Data, dan beberapa OPD lain sebagai calon penerima manfaat pendataan.

Proses yang dilakukan antara lain koordinasi intensif dalam rangka penentuan variable pendataan dan baseline data awal lintas stakeholder produsen dan pemanfaat data, pengajuan rekomendasi kegiatan statistic oleh produsen data, pendampingan intensif oleh Pembina data dan walidata, dan pengembangan aplikasi oleh pihak ketiga yang kompeten. Aplikasi ini disusun menggunakan basis data Nomer Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan basis data DTKS RTLH dari Dispertarum Provinsi Jawa Tengah. Proses identifikasi awal dilakukan melalui NOP PBB, yang selanjutnya dipilah kembali berdasarkan NIK kepala keluarga dari DTKS RLTH tersebut. Dengan basis data tersebut, petugas pendata akan melakukan pendataan sekaligus verifikasi data dalam baseline.

Sesuai dengan timeline yang rencananya akan disahkan dalam forum data, SIM Pendataan Rumah Lengkap ini akan digunakan dalam pendataan rumah se-Kota Pekalongan beserta tanah dan bangunan disekelilingnya pada Februari 2022 dan dilakukan update setiap 6 bulan sekali. Pendataan akan melibatkan pengurus RT dan RW se Kota Pekalongan dengan pendampingan fasilitator kelurahan. Selanjutnya,

dengan data jumlah rumah yang sudah menggunakan prinsip satu data, OPD terkait lainnya dapat menambahkan variable yang dibutuhkan lainnya saat updating data.

Diharapkan dengan pengembangan aplikasi pendataan lengkap lintas stakeholder, hasil pendataan dapat memenuhi prinsip satu data, antara lain memenuhi standar data, metadata, data referensi, dan dapat dibagi-pakaikan. Setiap tahun, Forum data akan menetapkan data yang menjadi prioritas menjadi Data berprinsip satu data sehingga secara bertahap pada jangka menengah akan terbentuk Satu Data Terpadu Daerah yang dapat digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk Pemerintah dan Masyarakat Pekalongan.

3. SIM Cascading

Tahun 2021 merupakan tahun yang cukup menantang dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Pekalongan menyusun RKPD tahun 2022 sekaligus RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai tindaklanjut atas dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tanggal terpilih pada tanggal 26 Februari 2021. RKPD tahun 2022 dan RPJMD Tahun 2021-2026 disusun secara paralel mengingat penjadwalan sudah ditentukan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan indikator sebagai tolok ukur kinerja disusun secara hati-hati dengan memperhatikan tingkatan (*leveling*) indikator, dimulai dari visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, tujuan OPD, indikator tujuan OPD, sasaran OPD, indikator sasaran OPD (IKU Renstra), program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, sub kegiatan, indikator sub kegiatan. Pagu indikatif disusun berdasarkan *output* sub kegiatan yang secara otomatis terakumulasi menjadi pagu sub kegiatan, pagu kegiatan dan pagu program. Target kinerja dan proyeksi anggaran disusun selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan periode RPJMD.

Kompleksitas dalam penyusunan indikator, target kinerja dan pagu indikatif tersebut mustahil dilakukan secara manual karena akan berisiko dalam akurasi datanya serta membutuhkan waktu yang lebih lama. Tuntuan penyelesaian dokumen diantara padatnya waktu penjadwalan menjadi tantangan tersendiri bagi tim penyusun. Berangkat dari pemikiran inilah maka tim penyusun mencoba berinovasi dengan membangun aplikasi sederhana yang disebut dengan SIM Cascading. Keunggulan aplikasi ini yaitu adanya kombinasi antara input data indikator, target kinerja dan pagu indikatif, yang kemudian disajikan ke dalam pohon kinerja RPJMD dan Renstra. Pohon kinerja ini menggambarkan alur kinerja indikator pembangunan secara berjenjang mulai dari indikator sub kegiatan sampai ke Visi Kepala Daerah. Dengan demikian, kompleksitas seperti yang telah diuraikan di atas dapat dipahami dengan mudah, dan tentunya mempercapat dalam penyusunan RKPD dan RPJMD.

Gambar 4.3 SIM Cascading

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4. E-RM (Rekam Medis)

RSUD Bendan sebagai satu-satunya rumah sakit milik Pemerintah Kota Pekalongan berupaya memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Digitalisasi dan sistem terkomputerisasi menjadi salah satu upaya percepatan dalam memberikan pelayanan. Salah satunya yaitu Rekam Medis Elektronik (RME) yang merupakan sistem informasi kesehatan yang berisi data sosial dan data medis pasien, serta dapat dilengkapi dengan sistem pendukung keputusan yang digunakan di RSUD Bendan.

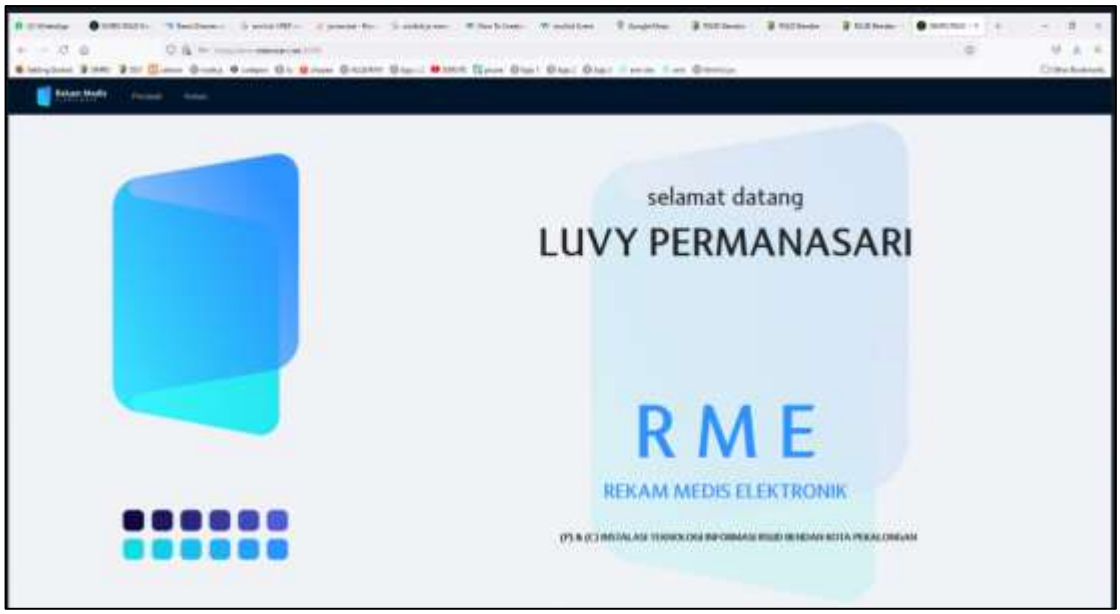

Gambar 4.4 Rekam Medis Elektronik (RME)

Sumber : RSUD Kota Pekalongan, 2021

5. Megono (Manajemen Go Online)

Aplikasi Manajemen Go Online (Megono) adalah aplikasi untuk manajemen RSUD Bendan yang memiliki fungsi *excecutive information system* (EIS).

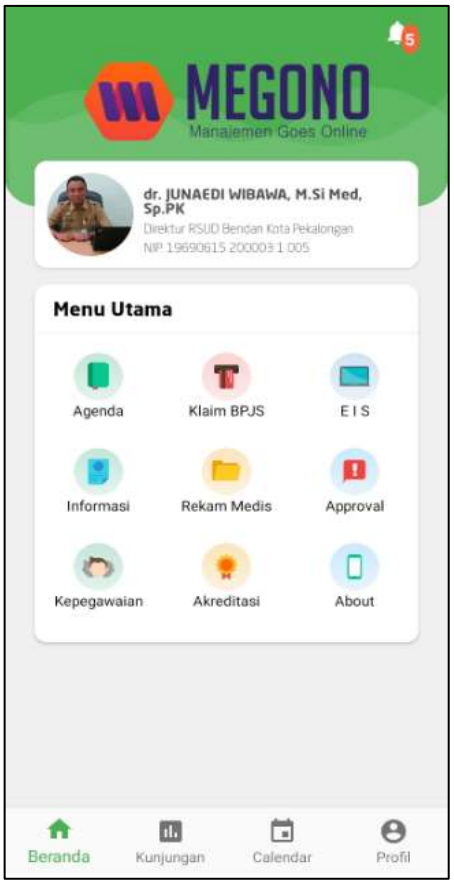

Gambar 4.5 Aplikasi Manajemen Go Online (Megono)

Sumber : RSUD Kota Pekalongan, 2021

6. Makaryo (Aplikasi Kepegawaian)

Aplikasi Manajemen Karyawan *Online* (Makaryo) adalah aplikasi untuk karyawan RSUD Bendan yang memiliki berbagai fungsi antara lain *update* data kepegawaian, pengajuan cuti *online*, presensi kehadiran dll.

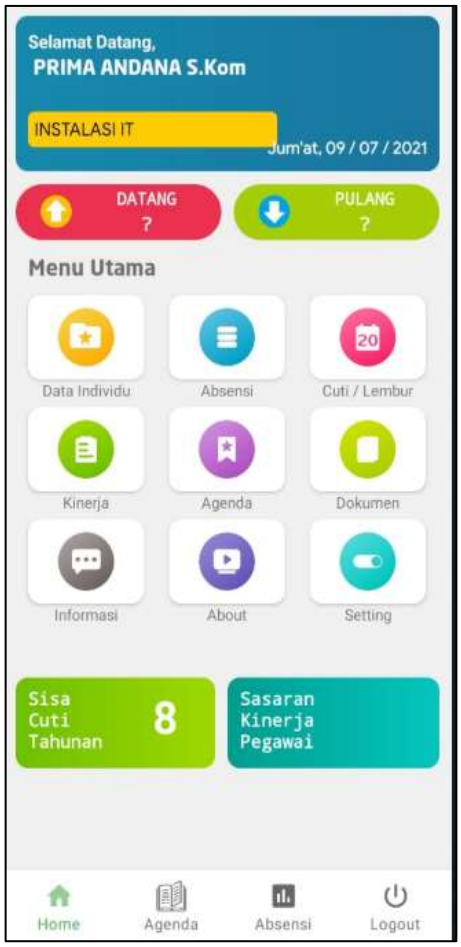

Gambar 4.6 Aplikasi Manajemen Karyawan *Online* (Makaryo)

Sumber : RSUD Kota Pekalongan, 2021

7. WhatsApp Auto

Sebuah layanan administrasi kependudukan yang dilakukan secara daring (*online*) dengan memanfaatkan aplikasi perpesanan otomatis *WhatsApp*. Layanan yang diberikan antara lain informasi waktu dan persyaratan layanan, lapor pindah atau datang, pembuatan KIA, penambahan anggota keluarga, dan perekamanan e-KTP.

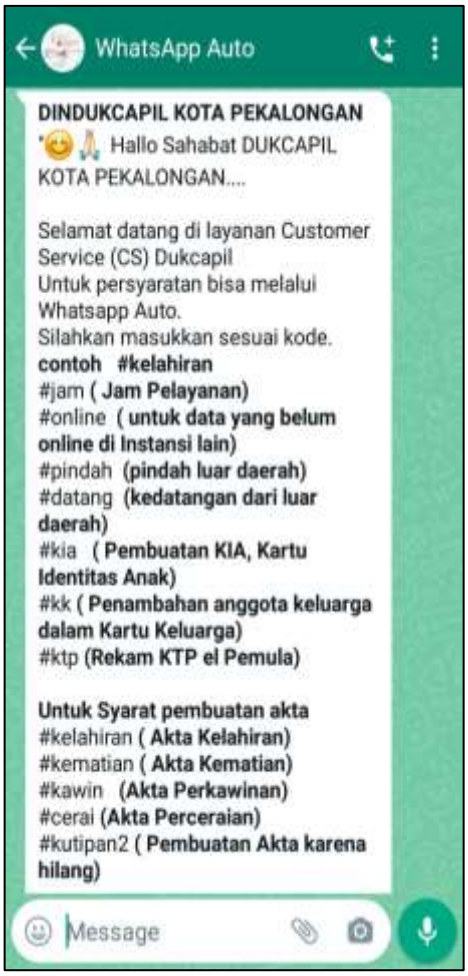

Gambar 4.7 WhatsApp Auto

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2021

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Indikasi rencana program Tahun 2022 berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun 2022, yang mempertimbangkan prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 guna mendukung pembangunan secara menyeluruh dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 2 (dua) Unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan.

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2022

5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

5.1.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Fokus program adalah peningkatan sarpras pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase capaian SPM pendidikan sebesar 80,17 persen.

2. Program Pengembangan Kurikulum

Fokus program adalah peningkatan budaya literasi dan penyediaan kurikulum muatan lokal. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas sebesar 100 persen.

3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Fokus program adalah pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan penataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 100 persen.

5.1.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Fokus program adalah peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan jaminan kesehatan masyarakat, dan peningkatan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD dan penyediaan layanan kesehatan masyarakat di puskesmas. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota sebesar 89 Persen, Presentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK *Outcome*) sebesar 100

Persen, dan Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar sebesar 75 Persen, Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar sebesar 62,50%, Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/Kota sebesar 100 persen.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pemenuhan kebutihan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek sebesar 93,5 Persen dan Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sebesar 40 persen.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Fokus program adalah Pengendalian, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan terhadap sarana farmasi dan tempat pengelolaan makanan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar sebesar 100 Persen, Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran sebesar 94 Persen, dan Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat sebesar 95 Persen.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Fokus program adalah Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan lintas sektor. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Rumah Tangga Sehat sebesar 91 Persen.

5.1.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Fokus program adalah pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dalam rangka pengendalian banjir dan rob, serta pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik sebesar 93,10 persen.

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Fokus program adalah penguatan koordinasi pengelolaan dan pengembangan Sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah sebesar 87,09 Persen.

3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Fokus program adalah Penyediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota, dan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional sebesar 20 persen.

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Fokus program adalah Pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan dan rehabilitasi Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK *Outcome*) sebesar 10,47 persen.

5. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**

Fokus program adalah pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase perkotaan dan drainase lingkungan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 67,46 persen.

6. **Program Penataan Bangunan Gedung**

Fokus program adalah Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota sebesar 17,54 persen.

7. **Program Penyelenggaraan Jalan**

Fokus program adalah rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK *Outcome*) sebesar 82,21 persen.

8. **Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Fokus program adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi dan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten/Kota, serta penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 10,53 persen.

9. **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Fokus program adalah penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) kab/kota dan pembangunan aplikasi sistem informasi penataan ruang. Indikator yang akan dicapai yaitu yaitu Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota sebesar 100 persen.

5.1.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan Perumahan**

Fokus program adalah penyediaan rumah layak huni bagai warga, pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana, dan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni sebesar 91,02 persen.

2. **Program Kawasan Permukiman**

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, peningkatan kualitas rtlh dan pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh. Indikator yang akan dicapai yaitu Luas kawasan permukiman kumuh sebesar 419,47 hektar.

3. **Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh**

Fokus program adalah perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. Indikator yang akan dicapai yaitu Luas kawasan permukiman tidak kumuh sebesar 1.728,41 hektar.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Fokus program adalah Penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum). Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK *Outcome*) sebesar 14,46 persen.

5.1.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah optimalisasi penanganan gangguan trantibum. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK *Outcome*) sebesar 62,00 persen.

2. Program Penanggulangan Bencana

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase korban bencana alam yang ditangani sebesar 100 persen.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Fokus program adalah optimalisasi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen.

5.1.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial

Fokus program adalah Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Indikator yang akan dicapai Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan sebesar 50 Persen.

2. Program Rehabilitasi Sosial

Fokus program adalah peningkatan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen.

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Fokus program adalah Peningkatan perlindungan dan layanan jaminan sosial bagi keluarga miskin. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial sebesar 58,46 Persen.

4. Program Penanganan Bencana

Fokus program adalah fasilitasi kegiatan bantuan untuk korban bencana alam dan fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM) sebesar 100 Persen.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Fokus program adalah rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebesar 100 Persen.

5.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

5.1.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Fokus program adalah peningkatan pelatihan kerja bagi buruh rokok dan penganggur dan perawatan alat-alat pelatihan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK *Outcome*) sebesar 0,37 persen.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Fokus program adalah perluasan kesempatan kerja dan pengelolaan informasi pasar kerja. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK *Outcome*) sebesar 21,93 persen.

3. Program Hubungan Industrial

Fokus program adalah penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK *Outcome*) sebesar 46,05 persen.

5.1.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pug kewenangan Kabupaten/Kota, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota, serta penguatan, pengembangan, dan peningkatan sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender sebesar 3,7 Persen.

2. Program Perlindungan Perempuan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK *Outcome*) sebesar 23,99 Persen.

3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Fokus program adalah advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) sebesar 29,63 Persen.

4. Program Perlindungan Khusus Anak

Fokus program adalah pencegahan kekerasan terhadap anak. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani sebesar 100 Persen.

5.1.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Fokus program adalah penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya dan penyediaan cadangan pangan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase cadangan pangan daerah sebesar 4,30 Persen.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Fokus program adalah penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan sebesar 100 persen.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Fokus program adalah ketersediaan pangan segar dan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan sebesar 81,6 persen.

5.1.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani sebesar 100 Persen.

2. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Fokus program adalah koordinasi dan tindaklanjut ganti kerugian program tanah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee sebesar 50 persen.

5.1.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebesar 80 persen.

2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah limbah yang diolah sebesar 39,29 persen.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ruang Terbuka Hijau sebesar 2,91 persen.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Fokus program adalah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan sebesar 31,11 persen.

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Fokus program adalah Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pengawasan dan penerapan sanksi terkait izin lingkungan dan/atau izin PPLH. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH sebesar 16,67 persen.

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Fokus program adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup sebesar 50 persen.

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Fokus program adalah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase perolehan penghargaan bidang LH sebesar 75 persen.

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah pengelolaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen.

9. Program Pengelolaan Persampahan

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan dan penanganan sampah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengelolaan sampah sebesar 0,27 persen.

5.1.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1, Program Pendaftaran Penduduk

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk (KTP elektronik dan Kartu Keluarga). Indikator yang akan dicapai yaitu Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk sebesar 81,77 persen.

2. Program Pencatatan Sipil

Fokus program adalah peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil (akta kelahiran anak, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian). Indikator yang akan dicapai yaitu Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil sebesar 93,4 persen.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK *Outcome*) sebanyak 7 OPD.

5.1.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Fokus program adalah peningkatan kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan sebesar 33,33 Persen.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kelurahan dengan kriteria (cepat berkembang) sebesar 55,56 Persen.

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Fokus program adalah pemanfaatan teknologi tepat guna di kelurahan, peningkatan kapasitas fasilitator, fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat dan tim penggerak PKK. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat sebesar 96,16 Persen.

5.1.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk

Fokus program adalah penyediaan data dan informasi keluarga, serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga sebesar 100 Persen.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Fokus program adalah pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta promosi pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal dan juga penyediaan sarana penunjang pelayanan KB. Indikator yang akan dicapai yaitu Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun sebesar 8 Persen.

3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Fokus program adalah pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga dan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya. Indikator yang akan dicapai yaitu *Unmeet Need* KB sebesar 16 Persen.

5.1.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Fokus program adalah penyediaan fasilitas LLAJ, pelaksanaan kegiatan managemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin), pelaksanaan pelayanan uji berkala, pengelolaan terminal penumpang tipe c, dan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ sebesar 89 persen, Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK *Outcome*) dengan ratio sebesar 0,4, Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala sebesar 0,76 persen.

5.1.2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Fokus program adalah pengelolaan informasi dan komunikasi publik, layanan pengaduan, serta penyelenggaraan hubungan media dan masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penyelesaian permohonan informasi publik sebesar 100 Persen.

2. Program Aplikasi Informatika

Fokus program adalah implementasi SPBE, penguatan sistem jaringan intra pemerinatah, pengelolaan aplikasi dan pusat data. Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan indeks sebesar 2,90.

5.1.2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Fokus program adalah pengawasan dan pemeriksaan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi juga keanggotaannya yang berada di wilayah Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase koperasi yang berkualitas (IKK *Outcome*) sebesar 29,41 persen.

2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Fokus program adalah peningkatan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan guna peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi anggota koperasi yang wilayah keanggotaannya di Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota sebesar 57,84 persen

3. Program Pengembangan UMKM

Fokus program adalah pengembangan umkm yang naik kelas dengan cara kemudahan izin, fasilitasi penguatan modal, pengembangan rantai pasokan usaha mikro serta skema jaringan pemasaran. Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK *Outcome*) sebesar 11,95 persen.

5.1.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Fokus program adalah penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal serta penyusunan rencana umum penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 1 Dokumen.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Fokus program adalah penyelenggaraan promosi penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100 persen.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Fokus program adalah pelayanan serta pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai yaitu Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebesar 2500 dokumen.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Fokus program adalah pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu Nilai Invetasi Baru pertahun sebesar Rp.6.553.479.600.

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Fokus program adalah pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100 persen.

5.1.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Fokus program adalah peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina sebesar 92,93 Persen.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Fokus program adalah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan kejuaraan, partisipasi dan keikutsertaan dalam pekan olahraga. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor sebesar 28,57 persen.

5.1.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan SDTD (Satu Data Terpadu Daerah). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral sebesar 100 Persen.

5.1.2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Fokus program adalah fasilitasi penilaian mandiri Indeks keamanan informasi dan lisensi sertifikat TLS. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan (*penetration testing*) sebesar 1,87 Persen.

5.1.2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Fokus program adalah pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan tradisi budaya. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase *event* kesenian dan kebudayaan yang disiapkan sebesar 100 persen.

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Fokus program adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional dan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi sebesar 100 persen.

3. Program Pembinaan Sejarah

Fokus program adalah peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya sebesar 100 Persen.

4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Fokus program adalah inventarisasi benda cagar budaya. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK *Outcome*) sebesar 90,43 Persen.

5. Program Pengelolaan Permuseuman

Fokus program adalah pelindungan, pengembangan, dan pemanfataan koleksi secara terpadu, peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum dan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengunjung museum batik sebesar 4,6 Persen.

5.1.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Fokus program adalah pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, pembinaan perpustakaan dan sosialisasi budaya baca serta literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan

khusus serta masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun) dengan indeks sebesar 15,93.

5.1.2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Arsip

Fokus program adalah pemeliharaan, penyusutan dan pengawasan arsip dinamis, akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis serta pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik sebesar 40 Persen dan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK *Outcome*) dengan indeks sebesar 42,5.

2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Fokus program adalah penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan kelurahan serta penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen.

3. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Fokus program adalah penyusunan dan penetapan sop penggunaan arsip yang bersifat tertutup. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK sebesar 100 persen.

5.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

5.1.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Fokus program adalah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta Pemberdayaan Nelayan Kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI sebesar 1 persen dan Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI sebesar 1 persen.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Fokus program adalah pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil, serta penyediaan sarana prasarana pembudidayaan ikan. Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya sebesar 1 persen.

3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Fokus program adalah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan sebesar 12,2 persen dan Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) sebanyak 2 pelaku usaha.

5.1.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Fokus program adalah pengelolaan destinasi, serta pengembangan daya tarik wisata. Indikator yang akan dicapai yaitu Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK *Outcome*) sebesar 10,5 Persen.

2. Program Pemasaran Pariwisata

Fokus program adalah penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya, serta peningkatan kerjasama kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK *Outcome*) sebesar 26,98 Persen.

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Fokus program adalah pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi sebesar 16,67 persen.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar sebesar 20 persen.

5.1.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Fokus program adalah pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana dan sarana pendukung pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Nilai produksi pertanian pertahun sebesar Rp. 55.671.720.000 dan Nilai produksi peternakan pertahun sebesar Rp. 188.146.000.000.

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Fokus program adalah pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian sebesar 100 persen.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Fokus program adalah operasional RPH, pemantauan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 5 persen.

4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota sebesar 100 persen.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Fokus program adalah fasilitasi atau rekomendasi izin usaha pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin sebesar 20 persen.

6. Program Penyuluhan Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun sebesar 5 persen.

5.1.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Fokus program adalah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK *Outcome*) sebesar 74,67 persen.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Fokus program adalah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya sebesar 75 persen.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Fokus program adalah pengendalian dan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya sebesar 84 persen.

4. Program Pengembangan Ekspor

Fokus program adalah pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase peningkatan volume ekspor sebesar 7,42 persen.

5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Fokus program adalah pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK *Outcome*) sebesar 75,99 persen.

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Fokus program adalah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output) sebesar 3,17 persen.

5.1.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pemberdayaan Industri Kecil Menengah

(IKM). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK *Outcome*) sebesar 20,41 persen.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Fokus program adalah fasilitasi pengawasan perijinan bidang industri. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK *Outcome*) sebesar 24 persen.

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Indikator yang akan dicapai yaitu Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (IKK *Outcome*) sebesar 100 persen.

5.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

5.1.4.1. Sekretariat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Fokus program adalah penataan administrasi pemerintahan, fasilitasi pengeloaan bina mental spiritual, fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dan pengelolaan informasi hukum. Indikator yang akan dicapai yaitu Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu sebesar 100 persen, Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif sebesar 100 persen, dan Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat sebesar 100 persen.

2. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu Presentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan sebesar 100 Persen, Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK *Outcome*) sebesar 7 persen, dan Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa sebesar 100 persen.

5.1.4.2. Sekretariat DPRD

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan perda dan pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu, peningkatan kapasitasi anggota legislative dan fasilitasi penjaringan aspirasi (reses). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perda yang ditetapkan sebesar 100 persen dan Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu sebesar 100 persen.

5.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

5.1.5.1. Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. **Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu serta penyediaan data perencanaan pembangunan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu sebesar 100 Persen, Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu sebesar 100 Persen, dan Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu sebesar 100 Persen.

2. **Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya, penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud sebesar 100 Persen, Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian sebesar 100 persen, dan Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah sebesar 100 persen.

5.1.5.2. Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Fokus program adalah koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, KUA dan PPAS, perubahan KUA dan perubahan PPAS, koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD, koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, kas daerah, koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, pengelolaan kas daerah, koordinasi, pelaksanaan dan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd bulanan, triwulanan dan semesteran, konsolidasi laporan keuangan skpd, blud dan laporan keuangan pemerintah daerah, koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd provinsi, Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK *Outcome*) sebesar 8,33 Persen.

2. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Fokus program adalah optimalisasi pengeloaan barang milik daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks pengelolaan aset baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen.

3. **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK *Outcome*) sebesar 0,05 Persen.

5.1.5.3. Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Kepegawaian Daerah

Fokus program adalah pengembangan kompetensi ASN, pengelolaan *Assesment Center*, pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN, dan monitoring evaluasi kinerja ASN. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase PNS berkembang karier sebesar 50 persen, Tingkat Pelaporan Kinerja ASN sebesar 100 persen, Persentase Keterisian Jabatan sebesar 90 persen, dan Persentase Keterpenuhan Formasi ASN sebesar 80 Persen.

5.1.5.4. Pendidikan Dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Fokus program adalah fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase PNS berkembang kompetensinya sebesar 100 persen.

5.1.5.5. Penelitian Dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Fokus program adalah pelaksanaan riset unggulan daerah serta pengelolaan jurnal dan website kelitbangan, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah, dan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD sebesar 100 persen, Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA) sebesar 72 persen, dan Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan sebesar 100 persen.

5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

5.1.6.1. Inspektorat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Fokus program adalah penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah kinerja pemerintah daerah, keuangan pemerintah daerah dan monitoring evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sebesar 85 persen.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, fasilitasi asistensi dan penilaian reformasi birokrasi, dan monitoring evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indikator yang akan dicapai yaitu Level Kapabilitas APIP dengan nilai sebesar 3.

5.1.7. Unsur Kewilayahan

5.1.7.1. Kecamatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Fokus program adalah koordinasi pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Utara sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Selatan sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Barat sebesar 100 Persen, dan Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Timur sebesar 100 Persen.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Fokus program adalah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di kecamatan. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat sebesar 100 Persen, dan Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur sebesar 100 Persen, serta Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar 100 persen.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat sebesar 100 Persen, dan Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Timur sebesar 100 Persen.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan Forkopimca (Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan). Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Utara sebesar 100 persen, Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Selatan sebesar 100 persen, Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Barat sebesar 100 persen, dan Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Timur sebesar 100 persen.

5.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

5.1.8.1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Fokus program adalah pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, penguatan ideologi dan bela negara. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan sebesar 100 persen.

2. **Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

   Fokus program adalah pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik. Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik sebesar 16 lembaga.

3. **Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

   Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat, serta penanganan konflik ormas. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan sebesar 100 persen.

4. **Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**

   Fokus program adalah koordinasi, pembinaan bidang Ketahanan Ekonomi dan sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebesar 100 persen.

5. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

   Fokus program adalah optimalisasi penanganan kejadian terkait konflik sosial dan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial sebesar 100 persen.

5.1.9. Non Urusan

5.1.9.1. Non Urusan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Fokus program adalah Penyediaan laporan capaian kinerja, layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan layanan BLUD. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja sebesar 100 Persen, Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100 Persen, Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100 Persen, dan Persentase ketersediaan layanan BLUD sebesar 100 Persen.

Secara lengkap rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2022 disajikan dalam Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**253.096.427.000**							**247.727.207.200**	
1.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**164.312.417.000**						100 persen	**166.301.608.000**	
1.1.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**87.350.000**						100 persen	**199.750.000**	
1.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinas Pendidikan	2 dokumen	11.750.000	Dindik
1.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinas Pendidikan	2 dokumen	3.750.000	Dindik
1.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah (triwulanan)				12 bulan	83.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinas Pendidikan	12 bulan	184.250.000	Dindik
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen Perhitungan Capaian SPM Pendidikan yang tersusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauanRTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**162.700.866.000**						100 persen	**164.533.140.000**	
1.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	162.164.416.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinas Pendidikan	12 bulan	164.000.390.000	Dindik
1.1.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	534.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinas Pendidikan	12 bulan	529.000.000	Dindik
1.1.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinas Pendidikan	1 dokumen	3.750.000	Dindik
1.1.1.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan	100 persen		100 persen	100 persen	**81.080.000**						100 persen	**95.000.000**	
1.1.1.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kertas aset yang dihasilkan				93 laporan	81.080.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinas Pendidikan	93 laporan	95.000.000	Dindik
1.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**9.500.000**	
1.1.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlahkeikutsertaan dalam event tingkat kota				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinas Pendidikan	2 kali	9.500.000	Dindik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**567.253.000**						100 persen	**621.750.000**	
1.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan kompenen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinas Pendidikan	12 bulan	10.000.000	Dindik
1.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	125.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinas Pendidikan	12 bulan	100.500.000	Dindik
		Jumlah TK yang difasilitasi pengadaan AC				1 lokasi							1 lokasi		
1.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	11.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinas Pendidikan	12 bulan	11.000.000	Dindik
1.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	72.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinas Pendidikan	11 bulan	72.000.000	Dindik
1.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	17.973.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinas Pendidikan	12 bulan	18.000.000	Dindik
1.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan suratkabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	3.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinas Pendidikan	12 bulan	3.250.000	Dindik
1.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar				12 bulan	150.000.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,	Dinas Pendidikan	12 bulan	150.000.000	Dindik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Konsultasi SKPD	daerah						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
1.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah fasilitasi dukungan SPBE yang dilaksanakan				12 bulan	177.530.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinas Pendidikan	12 bulan	257.000.000	Dindik
1.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penujang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**655.650.000**						100 persen	**614.250.000**	
1.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinas Pendidikan	12 bulan	12.000.000	Dindik
1.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	323.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinas Pendidikan	12 bulan	323.950.000	Dindik
1.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	319.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinas Pendidikan	12 bulan	278.300.000	Dindik
1.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**210.718.000**						100 persen	**228.218.000**	
1.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				40 unit	58.218.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinas Pendidikan	40 unit	58.218.000	Dindik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara				1 unit	102.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinas Pendidikan	1 unit	85.000.000	Dindik
1.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinas Pendidikan	12 bulan	85.000.000	Dindik
1.1.2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase capaian SPM pendidikan	100 persen		76,37 persen	80,17 persen	**76.316.444.000**						80,17 persen	**64.623.134.200**	
1.1.2.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK Outcome / SPM)	100 persen		94,50 persen	96 persen	**36.460.883.000**						96 persen	**33.234.937.200**	
1.1.2.2.01.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah lembaga pendidikan yang difasilitasi ruang kelas baru				1 lembaga	250.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	1 lembaga	-	Dindik
1.1.2.2.01.6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang dibangun				2 pekerjaan	640.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	2 pekerjaan	1.500.000.000	Dindik
		Jumlah Km/WC yang dibangun				4 pekerjaan			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				4 pekerjaan		
		Jumlah Lapangan Olahraga yang dibangun				2 pekerjaan							2 pekerjaan		
		Jumlah Mushola yang dibangun				1 pekerjaan							1 pekerjaan		
		Jumlah pembangunan pagar sekolah				2 pekerjaan							2 pekerjaan		
		Jumlah peninggian halaman sekolah				2 pekerjaan							2 pekerjaan		
		Jumlah tempat parkir MI yang dibangun				1 lokasi							1 lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah tempat parkir yang dibangun				2 pekerjaan							2 pekerjaan		
1.1.2.2.01.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah lembaga/ormas yang difasilitasi hibah				1 pekerjaan	2.753.690.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	1 pekerjaan	3.000.000.000	Dindik
		Jumlah ruang kelas SD/MI yang direhab				61 pekerjaan			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				61 pekerjaan		
1.1.2.2.01.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang direhab				2 ruang	128.461.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	2 ruang	500.000.000	Dindik
		Jumlah ruang kepala sekolah yang direhab				2 ruang							2 ruang		
		Jumlah ruang TU yang direhab				1 ruang							1 ruang		
1.1.2.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan yang direhab				4 ruang	245.276.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	4 ruang	400.000.000	Dindik
1.1.2.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah KM/WC yang direhab				5 unit	741.592.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	5 unit	1.500.000.000	Dindik
		Jumlah lapangan olahraga yang direhab				1 unit			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				1 unit		
		Jumlah Mushola yang direhab				1 unit							1 unit		
		Jumlah pagar sekolah yang direhab				5 unit							5 unit		
		Jumlah SD/MI yang direhab				5 lokasi							5 lokasi		
		Jumlah tempat parkir yang direhab				1 unit							1 unit		
1.1.2.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeleir SD/MI yang diadakan				30 set	60.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr	SD/MI	30 set	1.050.000.000	Dindik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg				
1.1.2.2.01.15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah SD penerima alat rumah tangga sekolah				20 SD	88.750.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	20 SD	88.755.000	Dindik
1.1.2.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah SD penerima pengadaan perlengkapan sekolah				20 SD	143.650.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	20 SD	143.650.000	Dindik
1.1.2.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan dasar siswa yang diadakan				1500 set	162.175.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	1500 set	162.175.000	Dindik
1.1.2.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah SD penerima pemeliharaan rutin bangunan gedung sekolah				71 SD	710.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	71 SD	710.000.000	Dindik
1.1.2.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SD penerima pemeliharaan rutin sarana prasarana utilitas sekolah				10 SD	50.675.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	10 SD	50.675.000	Dindik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.2.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah perserta didik yang difasilitasi biaya personil jenjang SD				1500 siswa	150.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	1500 siswa	1.500.000.000	Dindik
1.1.2.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan				71 paket	8.245.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	71 paket	2.156.305.000	Dindik
		Jumlah laptop yang diadakan				4 unit			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				4 unit		
1.1.2.2.01.23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SD/MI penyelenggara AKM yang difasilitasi				146 sekolah	322.850.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	146 sekolah	322.850.000	Dindik
		Jumlah SD penyelenggara UAS yang difasilitasi				101 mapel							101 mapel		
		Jumlah SD yang difasilitasi penyelenggaraan survey karakter				103 sekolah							103 sekolah		
1.1.2.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah SD yang terfasilitasi penyusunan EDS				71 SD	142.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	71 SD	142.000.000	Dindik
		Jumlah SD yang terfasilitasi penyusunan RAPBS				71 SD							71 SD		
1.1.2.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah ajang apresiasi minat, bakat dan kreatifitas siswa yang diselenggarakan				6 kegiatan	580.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	6 kegiatan	580.000.000	Dindik
		Jumlah jenis kompetisi jenjang SD Tk. Kota yang difasilitasi				5 kegiatan							5 kegiatan		
		Jumlah Lomba yang dilaksanakan dalam pesta siaga tingkat kecamatan				7 lomba							7 lomba		
		Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam pesta siaga tingkat kota				7 lomba							7 lomba		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah PTK yang difasilitasi pelatihan khusus pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa				15 PTK							15 PTK		
		Jumlah siswa berprestasi yang difasilitasi apresiasi				50 siswa							50 siswa		
		Jumlah siswa yang difailitasi pelatihan khusus, minat, bakat dan kreatifitas				30 siswa							30 siswa		
1.1.2.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah GTT/PTT SDN yang menerima honor jasa pendidik/kependidikan				71 orang	2.356.350.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	71 orang	6.044.800.000	Dindik
		Jumlah guru pendamping inklusi yang menerima honor jasa pendidik				4 orang							4 orang		
		Jumlah pendidik BTQ SD/MI yang menerima bantuan transport				1037 orang							1037 orang		
1.1.2.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah kepala sekolah yang mengikuti workshop				102 orang	7.100.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	102 orang	7.100.000	Dindik
		Jumlah PTK berprestasi tingkat propinsi				7 orang							7 orang		
		Jumlah PTK yang difasilitasi diklat PPG dalam jabatan				19 orang							19 orang		
		Jumlah sekolah yang terfasilitasi pencermatan dokumen pola pengembangan karir Pendidik /PTK-nya				71 SD							71 SD		
1.1.2.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Bimtek/sosialisasi Dapodik yang diselenggarakan				3 kegiatan	255.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	3 kegiatan	396.000.000	Dindik
		Jumlah SD yang difasilitasi pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah				103 SD							103 SD		
		Jumlah SD yang terfasilitasi survei lingkungan belajar				103 SD							103 SD		
1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD Negeri yang mendapatkan BOS				71 sekolah	18.370.314.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr	SD/MI	71 sekolah	12.922.627.200	Dindik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg				
1.1.2.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD yang difasilitasi penyusunan laporan BOS Jumlah SD yang mengikuti sosialisasi BOS				103 sekolah 103 sekolah	58.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	103 sekolah 103 sekolah	58.000.000	Dindik
1.1.2.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK Outcome / SPM)	100 persen		84,00 persen	87 persen	**24.352.074.000**						87 persen	**15.542.797.000**	
1.1.2.2.02.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas SMP/Mts yang dibangun				1 lokasi	250.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SMP/MTs	1 lokasi	-	Dindik
1.1.2.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi pengadaan pompa air				1 lokasi	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SMP/MTs	1 lokasi	-	Dindik
1.1.2.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	jumlah Gedung Sekolah yang direhab				1 Unit	109.014.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SMP/MTs	1 Unit	-	Dindik
1.1.2.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	jumlah Ruang Kelas yang direhab				27 ruang	4.382.080.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk	SMP/MTs	27 ruang	-	Dindik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan	Fisik	Saing	prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg				
1.1.2.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	jumlah Ruang Guru yang direhab				1 ruang	276.379.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SMP/MTs	1 ruang	-	Dindik
1.1.2.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	jumlah Ruang Perpustakaan yang direhab				2 ruang	552.758.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SMP/MTs	2 ruang	-	Dindik
1.1.2.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	jumlah Ruang Laboratorium yang direhab				8 ruang	310.923.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SMP/MTs	8 ruang	-	Dindik
1.1.2.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah Pagar Sekolah, Peninggian Halaman Sekolah, Ruang Ibadah, Lapangan Olahraga/Upacara, KM/WC, Pembangunan Ruang Konseling. Ruang Organisasi Kesiswaan, Ruang TU, Ruang Kepala Sekolah yang direhab				5 Ruang/Pekerjaan	1.054.014.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SMP/MTs	5 Ruang/Pekerjaan	-	Dindik
1.1.2.2.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah peralatan rumah tangga sekolah yang diadakan				17 Set	38.105.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr	SMP/MTs	17 Set	170.000.000	Dindik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg				
1.1.2.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan				51 Unit	285.063.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SMP/MTs	51 Unit	425.000.000	Dindik
1.1.2.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah SMP penerima pemeliharaan bangunan gedung dan ruangan				17 Sekolah	135.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SMP/MTs	17 Sekolah	850.000.000	Dindik
1.1.2.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMP penerima pemeliharaan rutin sarana prasarana utilitas sekolah				17 Sekolah	53.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SMP/MTs	17 Sekolah	170.000.000	Dindik
1.1.2.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik jenjang SMP yang difasilitasi biaya personil peserta didik				500 Siswa	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SMP/MTs	500 Siswa	150.000.000	Dindik
1.1.2.2.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah				1250 Siswa	343.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SMP/MTs	1250 Siswa	343.750.000	Dindik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.2.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				32 Paket	820.960.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SMP/MTs	32 Paket	-	Dindik
1.1.2.2.02.36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah mapel SMP yang difasilitasi penyusunan instrumen evaluasinya				28 Sekolah	133.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SMP/MTs	28 Sekolah	133.650.000	Dindik
		Jumlah SMP yang difasilitasi penyelenggaraan AKM				28 Sekolah							28 Sekolah		
		Jumlah SMP yang difasilitasi penyelenggaraan survei karakter				28 Sekolah							28 Sekolah		
1.1.2.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP yang terfasilitasi penyusunan EDS				17 Sekolah	51.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SMP/MTs	17 Sekolah	51.000.000	Dindik
		Jumlah SMP yang terfasilitasi penyusunan RAPBS				17 Sekolah							17 Sekolah		
1.1.2.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah ajang apresiasi minat, bakat dan kreatifitas siswa yang diselenggarakan				5 Kegiatan	544.550.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SMP/MTs	5 Kegiatan	544.550.000	Dindik
		Jumlah Festival Ketrampilan Pramuka Pengalang Tingkat SMP/MTs				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah siswa berprestasi yang memndapat apresisiasi				50 Siswa							50 Siswa		
		Jumlah siswa yang mendapat pelatihan khusus minat,bakat dan kreatifitas				30 Siswa							30 Siswa		
1.1.2.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru pendamping inklusi yang menerima honor jasa pendidik				1 orang	232.625.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SMP/MTs	1 orang	2.051.200.000	Dindik
		Jumlah pendidik BTQ SMP yang menerima bantuan transport				93 orang							93 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.2.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang terfasilitasi pencermatan dokumen pola pengembangan karir Pendidik /PTK-nya				17 Sekolah	7.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SMP/MTs	17 Sekolah	7.100.000	Dindik
1.1.2.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jenjang sekolah peserta PPDB Online SMP				17 Sekolah	151.442.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SMP/MTs	17 Sekolah	496.000.000	Dindik
		Jumlah aplikasi penerapan sistem informasi manajemen pendidikan yang dikembangkan (Aplikasi PPDB Online)				1 Aplikasi							1 Aplikasi		
		Jumlah Bimtek/sosialisasi Dapodik yang diselenggarakan				3 Kegiatan							3 Kegiatan		
		Jumlah SMP yang difasilitasi pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah				28 Sekolah							28 Sekolah		
1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP Negeri penerima dana BOS				17 Sekolah	14.396.686.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SMP/MTs	17 Sekolah	10.127.372.000	Dindik
1.1.2.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP yang mengikuti sosialisasi BOS				28 Sekolah	23.175.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SMP/MTs	28 Sekolah	23.175.000	Dindik
1.1.2.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK Outcome / SPM)	100 persen		97,00 persen	97.7 persen	**11.241.832.000**						97.7 persen	**11.984.000.000**	
1.1.2.2.03.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung PAUD yang dibangun				1 gedung	200.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali	PAUD/TK/ RA	1 gedung	650.000.000	Dindik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan			ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg				
1.1.2.2.03.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah ruang UKS yang dibangun Jumlah TK/PAUD yang dibangun sarprasnya Jumlah WC yang dibangun				1 ruang 2 lokasi 2 ruang	1.073.182.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	PAUD/TK/RA	1 ruang 2 lokasi 2 ruang	350.000.000	Dindik
1.1.2.2.03.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah TK/PAUD yang direhab				2 lokasi	861.360.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	PAUD/TK/RA	2 lokasi	600.000.000	Dindik
1.1.2.2.03.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah ruang bermain anak yang direhab Jumlah ruang kepala PAUD /TK yang direhab Jumlah TK yang direhab Jumlah WC yang direhab				3 ruang 1 ruang 2 lokasi 3 unit	125.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	PAUD/TK/RA	3 ruang 1 ruang 2 lokasi 3 unit	700.000.000	Dindik
1.1.2.2.03.5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah TK Negeri yang difasilitasi bantuan pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD				4 TK	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	PAUD/TK/RA	4 TK	40.000.000	Dindik
1.1.2.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah siswa penerima perlengkapan dasar sekolah				750 siswa	45.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr	PAUD/TK/RA	750 siswa	112.500.000	Dindik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan			frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg				
1.1.2.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Siswa penerima Biaya Personil PD PAUD/TK				750 siswa	181.440.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	PAUD/TK/RA	750 siswa	450.000.000	Dindik
1.1.2.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah APE PAUD/TK yang diadakan				4 paket	582.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	PAUD/TK/RA	4 paket	80.000.000	Dindik
		Jumlah PAUD/TK yang difasilitasi sarprasnya				2 lembaga							2 lembaga		
1.1.2.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah PAUD yang terfasilitasi penyelenggaraan Survai tingkat perkembangan anak				250 TK	125.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	PAUD/TK/RA	250 TK	125.000.000	Dindik
1.1.2.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang difasilitasi penyusunan EDS				250 TK	68.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	PAUD/TK/RA	250 TK	125.000.000	Dindik
1.1.2.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah GTT/PTT TK-N yang menerima honor jasa pendidik/kependidikan				8 orang	48.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	PAUD/TK/RA	8 orang	240.000.000	Dindik
		Jumlah guru pendamping inklusi yang menerima honor jasa pendidik				2 orang							2 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.2.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah TK-N yang difasilitasi pencermatan dokumen pola pengembangan karir Pendidik /PTK-nya				4 TK	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	PAUD/TK/ RA	4 TK	2.000.000	Dindik
1.1.2.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah bimtek kelembagaan dan manajemen PAUD yang diselenggarakan				4 kegiatan	561.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	PAUD/TK/ RA	4 kegiatan	780.000.000	Dindik
		Jumlah Bimtek/sosialisasi Dapodik yang diselenggarakan				3 kegiatan							3 kegiatan		
		Jumlah lembaga / organisasi mitra PAUD yang terfasilitasi kegiatannya				4 lembaga							4 lembaga		
		Jumlah PAUD yang difasilitasi pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah				2 lembaga							2 lembaga		
		Jumlah PAUD yang terfasilitasi Survai Lingkungan Belajar				250 lembaga							250 lembaga		
		Jumlah Rakor/Raker Pengawas/Penilik PAUD yang terfasiitasi pelaksanaannya				2 kegiatan							2 kegiatan		
1.1.2.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang difasilitasi BOP PAUD				4 lembaga	7.200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	PAUD/TK/ RA	4 lembaga	7.600.000.000	Dindik
		Jumlah PAUD yang difasilitasi dana hibah BOP PAUD				261 lembaga			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				261 lembaga		
1.1.2.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang difasilitasi penyusunan laporan BOP				265 lembaga	129.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	PAUD/TK/ RA	265 lembaga	129.500.000	Dindik
		Jumlah PAUD yang mengikuti sosialisasi BOP				265 lembaga							265 lembaga		
1.1.2.2.04	**Pengelolaan Pendidikan**	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang	100 persen		30,00 persen	40 persen	**4.261.655.000**						40 persen	**3.861.400.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Nonformal/ Kesetaraan	belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK Outcome / SPM)													
1.1.2.2.04.7	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah mebeleir yang diadakan				3 set	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	3 set	105.000.000	Dindik
1.1.2.2.04.8	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah set peraalatan rumah tangga SKB yang diadakan				1 set	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	1 set	20.000.000	Dindik
1.1.2.2.04.9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan pendidikan nonformal/kesetaraan yang diadakan				15 unit	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	15 unit	150.000.000	Dindik
1.1.2.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penerima biaya personal peserta didik kesetaraan/nonformal				150 siswa	84.125.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	150 siswa	100.000.000	Dindik
1.1.2.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengadaan alat praktikk dan peraga siswa kesetaraan/nonformal				20 unit	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn	SD/MI	20 unit	40.000.000	Dindik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg				
1.1.2.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mapel Kesetaraan yang terfasilitasi penyusunan instrumen evaluasinya Jumlah PNF yang terfasilitasi penyelenggaraan Survai Karakter Jumlah PNF yang terfasilitasi penyelenggaran AKM				24 mapel 13 lembaga 13 lembaga	440.620.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	24 mapel 13 lembaga 13 lembaga	395.000.000	Dindik
1.1.2.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PNF yang terfasilitasi penyusunan EDS Jumlah PNF yang terfasilitasi penyusunan RAPBS				13 lembaga 13 lembaga	19.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	13 lembaga 13 lembaga	19.500.000	Dindik
1.1.2.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah GTT/PTT PNF/SKB-N yang menerima honor jasa pendidik/kependidikan Jumlah guru pendamping inklusi PNF yang menerima honor jasa pendidik				8 orang 2 orang	242.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	8 orang 2 orang	240.000.000	Dindik
1.1.2.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PNF-N /SKB yang terfasilitasi pencermatan dokumen pola pengembangan karir Pendidik /PTK-nya				1 lembaga	1.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	1 lembaga	1.000.000	Dindik
1.1.2.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah bimtek kelembagaan dan manajemen PNF yang diselenggarakan Jumlah Bimtek/sosialisasi Dapodik yang diselenggarakan Jumlah PNF yang difasilitasi pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah				4 kegiatan 3 kegiatan 15 lembaga	443.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	4 kegiatan 3 kegiatan 15 lembaga	170.500.000	Dindik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah PNF yang terfasilitasi Survai Lingkungan Belajar				14 lembaga							14 lembaga		
		Jumlah Rakor/Raker Penilik PNF yang terfasiitasi pelaksanaannya				2 kegiatan							2 kegiatan		
1.1.2.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah saatuan PNF yang menerima dana hibah BOP				14 lembaga	2.600.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	14 lembaga	2.600.000.000	Dindik
1.1.2.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah satuan PNF yang difasilitasi penyusunan laporan BOP				14 lembaga	20.310.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI	14 lembaga	20.400.000	Dindik
		Jumlah satuan PNF yang mengikuti sosialisasi BOP				14 lembaga							14 lembaga		
1.1.3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100 persen		100,00 persen	100 persen	**202.240.000**						100 persen	**263.490.000**	
1.1.3.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD/PNF	100 persen		100,00 persen	100 persen	**130.390.000**						100 persen	**143.490.000**	
1.1.3.2.01.1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Dasar yang disusun (Perwal /SK Kadin)				2 dokumen	21.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI, SMP/MTs	2 dokumen	21.700.000	Dindik
1.1.3.2.01.2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah silabus muatan lokal Pendidikan Dasar yang disusun (SK Kadin)				2 dokumen	12.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI, SMP/MTs	2 dokumen	12.350.000	Dindik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.3. 2.01.3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Dasar yang disusun Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal yang diadakan				2 buku 1000 set	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI, SMP/MTs	2 buku 1000 set	60.000.000	Dindik
1.1.3. 2.01.4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah guru/pengawas peserta workshop penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar				102 orang	36.340.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	SD/MI, SMP/MTs	102 orang	49.440.000	Dindik
1.1.3. 2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	100 persen		100 persen	100 persen	**71.850.000**						100 persen	**120.000.000**	
1.1.3. 2.02.1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah dokumen kurikulum kompetensi dasar muatan lokal PAUD dan PNF yang disusun (Perwal /SK Kadin)				2 dokumen	11.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	Dinas Pendidikan	2 dokumen	60.000.000	Dindik
1.1.3. 2.02.3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah buku teks kompetensi dasar muatan lokal PAUD dan PNF yang disusun Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal yang diadakan				2 buku 500 set	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	Dinas Pendidikan	2 buku 500 set	60.000.000	Dindik
1.1.4	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100 persen		100,00 persen	100 persen	**12.265.326.000**						100 persen	**16.538.975.000**	
1.1.4. 2.01	**Pemerataan Kuantitas dan**	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga	100 persen		56,75 persen	66.75 persen	**12.265.326.000**						66.75 persen	**16.538.975.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan PAUD/PNF													
1.1.4.2.01.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah bakal calon pengawas sekolah yang difasilitasi mengikuti diklat calon pengawas sekolah				3 orang	1.017.480.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3 orang	917.480.000	Dindik
		Jumlah calon kepala sekolah yang difasilitasi diklat calon kepala sekolah				12 orang							12 orang		
		Jumlah dokumen bezzeting pengawas yang disusun				3 dokumen							3 dokumen		
		Jumlah dokumen bezzeting PTK PAUD yang disusun				4 dok							4 dok		
		Jumlah dokumen bezzeting PTK SD yang disusun				71 dokumen							71 dokumen		
		Jumlah dokumen bezzeting PTK SMP yang disusun				17 DOK							17 DOK		
		Jumlah guru/kepsek yang difasilitasi mengikuti seleksi calon pengawas				4 orang							4 orang		
		Jumlah guru paud yang difasilitai diklat guru berjenjang (dasar dan lanjut)				250 orang							250 orang		
		Jumlah guru/PTK yang difasilitasi mengikuti seleksi guru/PTK berprestai				50 orang							50 orang		
		Jumlah guru yang difasilitasi KMD				92 orang							92 orang		
		Jumlah guru yang difasilitasi KML				92 orang							92 orang		
		Jumlah guru yang difasilitasi seleksi calon kepala sekolah				16 orang							16 orang		
		Jumlah lembaga yang difasilitasi hibah				1 lembaga							1 lembaga		
		Jumlah pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah				1 kegiatan							1 kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah PTK yang difasilitasi guru Induksi				55 orang							55 orang		
		Jumlah PTK yang difasilitasi kegiatan peningkatan kompeteni				200 orang							200 orang		
		Jumlah PTK yang difasilitasi PPG				4 orang							4 orang		
1.1.4. 2.01.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru terfasilitasi PAK tahunanya				1200 orang	11.247.846.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1200 orang	15.621.495.000	Dindik
		Jumlah pengawai/penilik yang terfasilitai PAK nya				30 orang							30 orang		
		Jumlah PTK penerima bantuan S1/S2				10 orang							10 orang		
		Jumlah PTK penerima harlindung				1851 orang							1851 orang		
		Jumlah rapat koordinai penyelesaian kasus disiplin PTK				6 orang							6 orang		
		Jumlah sekolah swasta penerima jasa kinerja				99 sekolah							99 sekolah		
		Penerbiatan dokumen kepegawaian (SK gaji berkala, kenaikan pangkat,mutasi, dll				1200 orang							1200 orang		
		Penerbitan jurnal				50 buku							50 buku		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**100.593.250.000**							**106.420.609.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**59.808.913.000**						100 persen	**47.419.661.000**	
1.2.1. 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**12.857.000**						100 persen	**34.550.000**	
1.2.1. 2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkes	2 Dokumen	11.250.000	Dinkes

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkes	2 Dokumen	1.750.000	Dinkes
1.2.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPIP yang disusun				5 Dokumen	8.857.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkes	5 Dokumen	21.550.000	Dinkes
1.2.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**57.458.645.000**						100 persen	**44.396.737.000**	
1.2.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 Bulan	57.378.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkes	12 Bulan	44.303.487.000	Dinkes
1.2.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	78.595.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkes	12 Bulan	91.500.000	Dinkes
1.2.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkes	1 Dokumen	1.750.000	Dinkes
1.2.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**10.300.000**	
1.2.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran, Hakteknas dan Karnaval batik				2 Kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	Dinkes	2 Kali	10.300.000	Dinkes

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
1.2.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan		12 bulan	12 bulan	**373.028.000**						12 bulan	**451.313.000**	
1.2.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkes	12 Bulan	7.900.000	Dinkes
1.2.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan materai Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				12 Bulan 12 Unit	132.067.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkes	12 Bulan 12 Unit	132.702.000	Dinkes
1.2.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkes	12 Bulan	8.852.000	Dinkes
1.2.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	90.809.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkes	11 Bulan	99.627.000	Dinkes
1.2.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkes	12 Bulan	35.020.000	Dinkes
1.2.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	2.730.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	Dinkes	12 Bulan	2.812.000	Dinkes

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
1.2.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				70 Kali	114.922.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkes	70 Kali	164.400.000	Dinkes
1.2.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**1.206.650.000**						100 persen	**1.228.449.000**	
1.2.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	600	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkes	12 Bulan	600	Dinkes
1.2.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	810.383.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkes	12 Bulan	872.307.000	Dinkes
1.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				13 Bulan	395.667.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkes	13 Bulan	355.542.000	Dinkes
1.2.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**506.233.000**						100 persen	**1.032.112.000**	
1.2.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				102 Unit	360.359.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkes	102 Unit	420.343.000	Dinkes
1.2.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				3 Unit	80.874.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	Dinkes	3 Unit	270.375.000	Dinkes

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
1.2.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 Bulan	65.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkes	12 Bulan	341.394.000	Dinkes
1.2.1.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**242.000.000**						100 persen	**266.200.000**	
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 bulan	242.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Dinkes	12 bulan	266.200.000	Dinkes
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	72,50 persen		60 persen	62,5 persen	**39.791.402.000**						62,5 persen	**57.830.723.000**	
1.2.2.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD)	100 persen		100 persen	100 persen	**11.048.176.000**						100 persen	**13.380.196.000**	
1.2.2.2.01.2	Pembangunan Puskesmas	jumlah lokasi pembangunan puskesmas				1 lokasi	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	fasilitas pelayanan kesehatan	1 lokasi	-	Dinkes
1.2.2.2.01.6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dilakukan pengembangan				2 puskesmas	3.000.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	fasilitas pelayanan kesehatan	2 puskesmas	3.000.000.000	Dinkes
1.2.2.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan	Jumlah pengadaan alat antropometri (DAK)				1 paket	530.064.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa	fasilitas pelayanan kesehatan	1 paket	-	Dinkes

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kesehatan	Jumlah pengadaan IPAL (DAK)				1 Unit		Kecamatan, Semua Kelurahan	Fisik	Saing	meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada		1 Unit		
1.2.2.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat-alat telekonsultasi yang diadakan (DAK)				1 Paket	2.401.893.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	fasilitas pelayanan kesehatan	1 Paket	2.383.205.000	Dinkes
		Jumlah Alat Kesehatan Labkesda yang diadakan (DAK)				1 Paket							1 Paket		
		Jumlah Alat Kesehatan Puskesmas yang diadakan (DAK)				1 Paket							1 Paket		
1.2.2.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah pengadaan obat(DAK)				1 Paket	1.602.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	fasilitas pelayanan kesehatan	1 Paket	3.400.000.000	Dinkes
		Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan (DAU)				2 Paket			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				2 Paket		
1.2.2.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	jumlah bahan habis pakai yang diadakan				1 paket	2.595.491.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	fasilitas pelayanan kesehatan	1 paket	2.595.491.000	Dinkes
1.2.2.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah rehabilitasi puskesmas/pustu				3 Lokasi	653.802.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	fasilitas pelayanan kesehatan	3 Lokasi	1.596.500.000	Dinkes
1.2.2.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan (Puskesmas, Labkesda, Dinkes) yang dikalibrasi				1 Paket	164.926.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	fasilitas pelayanan kesehatan	1 Paket	405.000.000	Dinkes
		Jumlah alat kesehatan (Puskesmas, Labkesda) yang diservice				1 Paket							1 Paket		
1.2.2.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen		100 persen	100 persen	**28.655.474.000**						100 persen	**44.289.367.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.2.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				6513 Orang	70.020.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	warga Kota Pekalongan	6513 Orang	175.000.000	Dinkes
		Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K1/K4 sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu				6513 Orang							6513 Orang		
		Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas				7 Orang							7 Orang		
		Jumlah kasus anemia pada ibu hamil				512 Orang							512 Orang		
		Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)				112 Orang							112 Orang		
		Jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan				6220 Orang							6220 Orang		
1.2.2.2.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				5932 Bayi	117.043.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	warga Kota Pekalongan	5932 Bayi	1.500.000.000	Dinkes
		Jumlah ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				6220 Orang							6220 Orang		
1.2.2.2.02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				31622 Anak	146.054.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	warga Kota Pekalongan	31622 Anak	185.300.000	Dinkes
		Jumlah balita usia sampai 59 bulan (bayi+anak balita) yang meninggal				73 Anak							73 Anak		
		Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal				50 Anak							50 Anak		
		Jumlah bayi usia sampai 28 hari yang meninggal				27 Anak							27 Anak		
		Penurunan Angka Stunting di Kota Pekalongan				12 Persen							12 Persen		
1.2.2.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				28186 Anak	54.666.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	warga Kota Pekalongan	28186 Anak	129.600.000	Dinkes

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.2.2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				32468 Orang	17.209.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	warga Kota Pekalongan	32468 Orang	41.100.000	Dinkes
1.2.2.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita gizi buruk				32 Anak	238.848.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	warga Kota Pekalongan	32 Anak	567.750.000	Dinkes
		Jumlah bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif				2624 Anak							2624 Anak		
		Jumlah bumil KEK yang mendapatkan suplemen gizi				290 Orang							290 Orang		
		Jumlah penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal				171 Orang							171 Orang		
		Jumlah stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta				1343 Anak							1343 Anak		
1.2.2.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan kesehatan kerja yang dilaksanakan				1 Kegiatan	31.213.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	warga Kota Pekalongan	1 Kegiatan	76.650.000	Dinkes
		Jumlah kegiatan kesehatan olahraga yang dilaksanakan				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah pertemuan fasilitasi Pos UKK yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah pertemuan pelaksanaan GP2SP perusahaan yang dilaksanakan K				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah peserta tes kebugaran jasmani (rockport) Dinkes				60 Orang							60 Orang		
1.2.2.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)				23 lokasi	70.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	warga Kota Pekalongan	23 lokasi	176.800.000	Dinkes
		Jumlah fasilitasi Fasyankes Ramah Lingkungan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan hygiene sanitasi TUPM				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan pengendalian lalat di TPA yang dilaksanakan				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah pertemuan Pengawasan Kualitas Air Minum yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah pertemuan penggerakan implementasi STBM yang dilaksanakan				5 Kali							5 Kali		
1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kegiatan akselerasi program PIS PK yang dilaksanakan				3 Kegiatan	830.265.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	warga Kota Pekalongan	3 Kegiatan	1.413.595.000	Dinkes
		Jumlah kegiatan deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang diilaksanakan				6 Kegiatan							6 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang dilaksanakan				10 Kegiatan							10 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan penurunan AKi AKB yang dilaksanakan				7 Kegiatan							7 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan perbaikan gizi masyarakat yang dilaksanakan				5 Kegiatan							5 Kegiatan		
1.2.2.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di PSPJ				12 Bulan	149.113.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	warga Kota Pekalongan	12 Bulan	955.049.000	Dinkes
1.2.2.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) HIV dan Sipillis yang diadakan (DAK)				1 Pekerjaan	752.808.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	warga Kota Pekalongan	1 Pekerjaan	3.016.483.000	Dinkes
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV (IKK Output)				178 Unit			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				178 Unit		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar bagi ODGJ berat (IKK Output)				160 Set							160 Set		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM (IKK Output)				160 Set							160 Set		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan TBC sesuai standar				160 Set							160 Set		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		bagi orang terduga TBC (IKK Output)													
		Jumlah dukungan logistik yang tersedia untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi (IKK Output)				37 Set							37 Set		
		Jumlah dukungan logistik yang tersedia untuk skrining kesehatan sesuai standar bagi orang usia 15-29 tahun (IKK Output)				23 Set							23 Set		
		Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan				52 Kasus							52 Kasus		
		Jumlah kasus Hepatitis B				45 Kasus							45 Kasus		
		Jumlah kasus HIV/AIDS				100 Orang							100 Orang		
		Jumlah kasus obesitas pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Fasyankes				59380 Orang							59380 Orang		
		Jumlah kasus TB Paru BTA (+)				889 Kasus							889 Kasus		
		Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Menular yang dilaksanakan				14 Lokasi							14 Lokasi		
		Jumlah kegiatan penyemprotan Fogging Focus di wilayah Kota Pekalongan				100 Kali							100 Kali		
		Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				12563 Orang							12563 Orang		
		Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				12653 Orang							12653 Orang		
		Jumlah orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				5391 orang							5391 orang		
		Jumlah penderita DM mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				6446 Orang							6446 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				76872 Orang							76872 Orang		
		Jumlah penderita ODGJ mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				785 Orang							785 Orang		
		Jumlah penduduk umur > atau = 18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg				76872 Orang							76872 Orang		
		Jumlah penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				207789 Orang							207789 Orang		
		Jumlah pertemuan program penyakit tidak menular yang dilaksanakan				11 Kali							11 Kali		
		Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI sederajat yang dilaksanakan Bias MR				213 Kelas							213 Kelas		
		Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI Sederajat yang dilaksanakan Bias Td				255 Kelas							255 Kelas		
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV (IKK Output)				178 Orang							178 Orang		
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar bagi penderita ODGJ berat (IKK Output)				160 Orang							160 Orang		
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM (IKK Output)				160 Orang							160 Orang		
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi (IKK Output)				160 Orang							160 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC (IKK Output)				160 Orang							160 Orang		
		Jumlah SDM Kesehatan untuk skrining kesehatan sesuai standar bagi orang usia 15-29 tahun (IKK Output)				271 Orang							271 Orang		
1.2.2.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin penerima bantuan biaya rawat inap dan rawat jalan di Puskesmas dan Rumah Sakit				1511 Orang	24.000.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	warga Kota Pekalongan	1511 Orang	33.022.521.000	Dinkes
		Jumlah masyarakat miskin penerima bantuan biaya transport rujukan dan living cost				284 Orang			DBH CHT				284 Orang		
		Jumlah masyarakat penerima bantuan premi asuransi BPJS PD dan PBPU Kelas 3				55028 Orang							55028 Orang		
		Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan ke Puskesmas dan Rumah Sakit				46 Kali							46 Kali		
		Jumlah pertemuan koordinasi pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat				3 Kali							3 Kali		
1.2.2.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah penyediaan biaya operasional untuk kegiatan FKS				12 Bulan	33.019.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	warga Kota Pekalongan	12 Bulan	80.560.000	Dinkes
1.2.2.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah bulan penyediaan belanja operasional Labkesda				12 Bulan	1.306.365.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	warga Kota Pekalongan	12 Bulan	2.059.544.000	Dinkes
1.2.2.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan & Penilaian Mutu Eksternal (PPME)				14 Puskesmas	806.132.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	warga Kota Pekalongan	14 Puskesmas	815.095.000	Dinkes

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.2.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kunjungan surveilans epidemiologi ke rumah sakit				52 Kali	32.719.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	warga Kota Pekalongan	52 Kali	74.320.000	Dinkes
1.2.2.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	Terlaksananya pemeliharaan sarana komunikasi data dan informasi	100 persen		100,00 persen	100 persen	**29.543.000**						100 persen	**72.120.000**	
1.2.2.2.03.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah bulan pemeliharaan jaringan SIMKES				12 Bulan	29.543.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Dinas Kesehatan	12 Bulan	72.120.000	Dinkes
1.2.2.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Fasyankes yang diberikan rekomendasi tepat waktu	100 persen		100,00 persen	100 persen	**58.209.000**						100 persen	**89.040.000**	
1.2.2.2.04.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah pelaksanaan visitasi perijinan fasyankes				10 Kali	58.209.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Fasyankes	10 Kali	89.040.000	Dinkes
		Jumlah pembinaan fasyankes baik milik pemerintah maupun swasta				50 Kali							50 Kali		
1.2.3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	95,50 persen		93,00 persen	93,5 persen	**318.051.000**						93,5 persen	**95.600.000**	
1.2.3.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase penerbitan rekomendasi Surat Ijin Praktek tenaga kesehatan tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	**318.051.000**						100 persen	**95.600.000**	
1.2.3.2.02.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen SDMK yang disusun (Profil SDM Kesehatan dan Renbut)				2 Dokumen	318.051.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta	SDM Kesehatan	2 Dokumen	95.600.000	Dinkes

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pengawasan perijinan tenaga kesehatan				48 Kali		Semua Kelurahan			mensinergikan FKTP yang ada		48 Kali		
		Jumlah penerbitan rekomendasi ijin tenaga kesehatan tepat waktu (sesuai SOP)				525 Orang							525 Orang		
		Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan				12 Orang							12 Orang		
1.2.4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100 persen		100,00 persen	100 persen	**506.876.000**						100 persen	**604.725.000**	
1.2.4.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Persentase apotek, toko obat dan toko alat kesehatan yang dilakukan pengawasan	100 persen		100 persen	100 persen	**100.000.000**						100 persen	**123.702.000**	
1.2.4.2.01.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana pelayanan kesehatan dilakukan pembinaan (DAU)				36 Lokasi	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Warga Kota Pekalongan	36 Lokasi	123.702.000	Dinkes
1.2.4.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan	100 persen		100 persen	100 persen	**406.876.000**						100 persen	**481.023.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.4.2.03.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP yang dilakukan pengawasan dalam rangka penerbitan SPP-IRT				160 Lokasi	406.876.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Warga Kota Pekalongan	160 Lokasi	481.023.000	Dinkes
		Jumlah IRTP yang dilakukan pengawasan post market				100 Lokasi							100 Lokasi		
		Jumlah IRTP yang telah mengikuti Bimtek Keamanan Pangan				160 Orang							160 Orang		
		Jumlah peserta KIE Keamanan Pangan				500 Orang							500 Orang		
		Jumlah sampling dan pengujian PIRT				30 Sampel							30 Sampel		
1.2.5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Rumah Tangga Sehat	95,00 persen		90,00 persen	91 persen	**168.008.000**						91 persen	**469.900.000**	
1.2.5.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Posyandu dengan Strata Mandiri	35 persen		30 persen	31 persen	**120.000.000**						31 persen	**349.800.000**	
1.2.5.2.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah belanja cetak pemberdayaan kesehatan yang dilaksanakan				5 Pekerjaan	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Warga Kota Pekalongan	5 Pekerjaan	349.800.000	Dinkes
		Jumlah kegiatan kesehatan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan				4 Kegiatan							4 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan pemberdayaan Saka Bhakti Husada (SBH) yang dilaksanakan				10 Kali							10 Kali		
		Jumlah kegiatan pembinaan Program Pemberdayaan Kesehatan yang dilaksanakan				8 Kali							8 Kali		
		Jumlah kegiatan penguatan 5 tujuan gerakan masyarakat hidup sehat yang dilaksanakan				3 Kegiatan							3 Kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi ke masyarakat yang dilaksanakan				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan refreshing Pokjanal Posyandu yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah pemberdayaan Pondok Pesantren yang dilaksanakan				2 Kegiatan							2 Kegiatan		
		Jumlah posyandu yang direhab				1 lokasi							1 lokasi		
1.2.5.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**48.008.000**						100 persen	**120.100.000**	
1.2.5.2.02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kegiatan cetak promosi kesehatan				2 Pekerjaan	48.008.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Warga Kota Pekalongan	2 Pekerjaan	120.100.000	Dinkes
		Jumlah Kegiatan Dokumentasi dan Dekorasi Publik				5 Pekerjaan							5 Pekerjaan		
		Jumlah Lomba PHBS Tingkat Kota yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah pertemuan lintas program dan lintas sektor yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**95.371.281.000**							**93.127.281.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen		persen	100 persen	**83.138.460.000**						100 persen	**83.138.460.000**	
1.2.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	persen		persen	100 persen	**12.000.000**						100 persen	**12.000.000**	
1.2.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	RSUD Bendan	2 dokumen	2.500.000	Dinkes

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA yang disusun				4 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	RSUD Bendan	4 dokumen	1.500.000	Dinkes
1.2.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	8.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	RSUD Bendan	12 bulan	8.000.000	Dinkes
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
1.2.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan	persen		persen	100 persen	**56.200.000**						100 persen	**56.200.000**	
1.2.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	54.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	RSUD Bendan	12 bulan	54.700.000	Dinkes
1.2.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	RSUD Bendan	1 dokumen	1.500.000	Dinkes
1.2.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan	persen		persen	100 persen	**70.260.000**						100 persen	**70.260.000**	
1.2.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				70 orang/kali	70.260.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	RSUD Bendan	70 orang/kali	70.260.000	Dinkes

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.1.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase kegiatan penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	persen		persen	100 persen	**83.000.000.000**						100 persen	**83.000.000.000**	
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD Rumah sakit				12 bulan	83.000.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	RSUD Bendan	12 bulan	83.000.000.000	Dinkes
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	persen		persen	100 persen	**12.164.750.000**						100 persen	**9.920.750.000**	
1.2.2.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit tipe C	persen		persen	100 persen	**12.011.000.000**						100 persen	**9.767.000.000**	
1.2.2.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah genset yang diadakan				1 unit	3.000.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	RSUD Bendan	1 unit	3.000.000.000	Dinkes
1.2.2.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan				13 unit	9.011.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	RSUD Bendan	13 unit	6.767.000.000	Dinkes
		Jumlah kegiatan DAK yang dikelola				1 kegiatan			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				1 kegiatan		
1.2.2.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit tipe C	persen		persen	100 persen	**43.750.000**						100 persen	**43.750.000**	
		presentase layanan kesehatan rumah sakit tipe C	persen		persen	100 persen							100 persen		
1.2.2.2.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah laporan audit maternal yang disusun				1 laporan	43.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	RSUD Bendan	1 laporan	43.750.000	Dinkes

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.2.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kepuasan pelaggan	persen		persen	100 persen	**110.000.000**						100 persen	**110.000.000**	
1.2.2.2.04.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun				1 dokumen	110.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	RSUD bendan	1 dokumen	110.000.000	Dinkes
1.2.3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase perawat yang bersertifikat BTCLS (basic trauma cardlac life saving) dan bidan yang bersertifikasi PPGDON (penanganan penderita gawat darurat obstetric dan neonatus)	persen		persen	100 persen	**68.071.000**						100 persen	**68.071.000**	
1.2.3.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan	persen		persen	100 persen	**50.746.000**						100 persen	**50.746.000**	
1.2.3.2.02.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota				13 orang/bulan	33.471.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	SDM kesehatan	13 orang/bulan	33.471.000	Dinkes
1.2.3.2.02.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah perawat dan bidan yang mengikuti kredensial/rekredensial				20 orang	17.275.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	SDM kesehatan	20 orang	17.275.000	Dinkes
1.2.3.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	persen		persen	100 persen	**17.325.000**						100 persen	**17.325.000**	
1.2.3.2.03.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Jumlah perawat dan bidan yang mengikuti diklat/ pelatihan/ seminar/ workshop/ IHT pengembangan				20 orang	17.325.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta	SDM Kesehatan	20 orang	17.325.000	Dinkes

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kompetensi						Kergon			mensinergikan FKTP yang ada				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.473.900.000**							**3.275.718.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**2.697.800.000**						100 persen	**2.765.245.000**	
1.2.1.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**2.697.800.000**						100 persen	**2.765.245.000**	
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	2.697.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Bendan	12 Bulan	2.765.245.000	Dinkes
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	89 persen	**776.100.000**						89 persen	**510.473.000**	
1.2.2.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**776.100.000**						100 persen	**510.473.000**	
1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayah kerja yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respon penyakit yang dilaksanakan				55 Kegiatan 6 Kegiatan 34 Kegiatan	776.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Bendan	55 Kegiatan 6 Kegiatan 34 Kegiatan	510.473.000	Dinkes

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				2 Orang							2 Orang		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.433.550.000**							**1.271.682.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**805.650.000**						100 persen	**825.791.000**	
1.2.1.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**805.650.000**						100 persen	**825.791.000**	
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	805.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Kramatsari	12 Bulan	825.791.000	Dinkes
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88 persen	89 persen	**627.900.000**						89 persen	**445.891.000**	
1.2.2.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**627.900.000**						100 persen	**445.891.000**	
1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				39 Kegiatan	627.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Kramatsari	39 Kegiatan	445.891.000	Dinkes
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan				5 Kegiatan							5 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit yang dilaksanakan				62 Kegiatan							62 Kegiatan		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				3 Orang							3 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.853.550.000**							**1.633.806.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**1.010.650.000**						100 persen	**1.035.916.000**	
1.2.1.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**1.010.650.000**						100 persen	**1.035.916.000**	
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	1.010.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirto	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Tirto	12 Bulan	1.035.916.000	Dinkes
								Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo							
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	89 persen	**842.900.000**						89 persen	**597.890.000**	
1.2.2.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**842.900.000**						100 persen	**597.890.000**	
1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				58 Kegiatan	842.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirto	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Tirto	58 Kegiatan	597.890.000	Dinkes
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan				6 Kegiatan		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo					6 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit yang dilaksanakan				37 Kegiatan							37 Kegiatan		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				2 Orang							2 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.400.832.000**							**1.183.234.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**600.650.000**						100 persen	**615.666.000**	
1.2.1.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**600.650.000**						100 persen	**615.666.000**	
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	600.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Medono	12 Bulan	615.666.000	Dinkes
								Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen							
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	89 persen	**800.182.000**						89 persen	**567.568.000**	
1.2.2.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**800.182.000**						100 persen	**567.568.000**	
1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				56 Kegiatan	800.182.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Medono	56 Kegiatan	567.568.000	Dinkes
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan				6 Kegiatan		Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen					6 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit yang dilaksanakan				38 Kegiatan							38 Kegiatan		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				2 Orang							2 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.533.850.000**							**1.374.689.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**908.150.000**						100 persen	**930.854.000**	
1.2.1.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**908.150.000**						100 persen	**930.854.000**	
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	908.150.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Noyontaan	12 Bulan	930.854.000	Dinkes
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	89 persen	**625.700.000**						89 persen	**443.835.000**	
1.2.2.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**625.700.000**						100 persen	**443.835.000**	
1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				61 Kegiatan	625.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Noyontaan	61 Kegiatan	443.835.000	Dinkes
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan				7 Kegiatan							7 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit yang dilaksanakan				36 Kegiatan							36 Kegiatan		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				2 Orang							2 Orang		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.497.300.000**							**1.332.592.500**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**856.900.000**						100 persen	**878.322.500**	
1.2.1.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**856.900.000**						100 persen	**878.322.500**	
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	umlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	856.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Tondano	12 Bulan	878.322.500	Dinkes
								Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer							
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	89 persen	**640.400.000**						89 persen	**454.270.000**	
1.2.2.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**640.400.000**						100 persen	**454.270.000**	
1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				55 Kegiatan	640.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Tondano	55 Kegiatan	454.270.000	Dinkes
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan				6 Kegiatan		Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer					6 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit yang dilaksanakan				34 Kegiatan							34 Kegiatan		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				2 Orang							2 Orang		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.645.400.000**							**1.437.596.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**856.900.000**						100 persen	**878.323.000**	
1.2.1.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**856.900.000**						100 persen	**878.323.000**	
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	856.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Klego	12 Bulan	878.323.000	Dinkes
								Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego							
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	89 persen	**788.500.000**						89 persen	**559.273.000**	
1.2.2.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**788.500.000**						100 persen	**559.273.000**	
1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				62 Kegiatan	788.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Klego	62 Kegiatan	559.273.000	Dinkes
		Jumlah kegiatan pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan				6 Kegiatan		Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego					6 Kegiatan		
		Jumlah Kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respon penyakit yang dilaksanakan				34 Kegiatan							34 Kegiatan		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				2 Orang							2 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.885.250.000**							**1.721.001.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**1.215.650.000**						100 persen	**1.246.041.000**	
1.2.1.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**1.215.650.000**						100 persen	**1.246.041.000**	
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	1.215.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Sokorejo	12 Bulan	1.246.041.000	Dinkes
								Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet							
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	89 persen	**669.600.000**						89 persen	**474.960.000**	
1.2.2.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**669.600.000**						100 persen	**474.960.000**	
1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				49 Kegiatan	669.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Sokorejo	49 Kegiatan	474.960.000	Dinkes
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan				6 Kegiatan		Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet					6 Kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit yang dilaksanakan				33 Kegiatan							33 Kegiatan		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				2 Orang							2 Orang		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.656.400.000**							**1.477.830.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**959.400.000**						100 persen	**983.385.000**	
1.2.1.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**959.400.000**						100 persen	**983.385.000**	
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	959.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Dukuh	12 Bulan	983.385.000	Dinkes
								Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan							
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88 persen	89 persen	**697.000.000**						89 persen	**494.445.000**	
1.2.2.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**697.000.000**						100 persen	**494.445.000**	
1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				57 Kegiatan	697.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Dukuh	57 Kegiatan	494.445.000	Dinkes

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan				6 Kegiatan		Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan					6 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit yang dilaksanakan				36 Kegiatan							36 Kegiatan		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				4 Orang							4 Orang		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.876.870.000**							**1.682.698.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**1.113.150.000**						100 persen	**1.140.979.000**	
1.2.1.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**1.113.150.000**						100 persen	**1.140.979.000**	
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	1.113.150.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Krapyak Kidul	12 Bulan	1.140.979.000	Dinkes
								Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu							
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	89 persen	**763.720.000**						89 persen	**541.719.000**	
1.2.2.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**763.720.000**						100 persen	**541.719.000**	
1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				57 Kegiatan	763.720.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta	Puskesmas Krapyak Kidul	57 Kegiatan	541.719.000	Dinkes

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan				5 Kegiatan		Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu			mensinergikan FKTP yang ada		5 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit yang dilaksanakan				30 Kegiatan							30 Kegiatan		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				2 Orang							2 Orang		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.950.330.000**							**2.735.333.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**2.035.650.000**						100 persen	**2.086.541.000**	
1.2.1.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**2.035.650.000**						100 persen	**2.086.541.000**	
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	2.035.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Kusuma Bangsa	12 Bulan	2.086.541.000	Dinkes
								Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan							
								Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru							
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	89 persen	**914.680.000**						89 persen	**648.792.000**	
1.2.2.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**914.680.000**						100 persen	**648.792.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				55 Kegiatan	914.680.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Kusuma Bangsa	55 Kegiatan	648.792.000	Dinkes
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan				6 Kegiatan		Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan					6 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit yang dilaksanakan				37 Kegiatan		Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru					37 Kegiatan		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				2 Orang							2 Orang		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.946.350.000**							**1.829.333.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**1.420.650.000**						100 persen	**1.456.166.000**	
1.2.1.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**1.420.650.000**						100 persen	**1.456.166.000**	
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	1.420.650.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Jenggot	12 Bulan	1.456.166.000	Dinkes
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	89 persen	**525.700.000**						89 persen	**373.167.000**	
1.2.2.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**525.700.000**						100 persen	**373.167.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				61 Kegiatan	525.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Jenggot	61 Kegiatan	373.167.000	Dinkes
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan				6 Kegiatan							6 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit yang dilaksanakan				31 Kegiatan							31 Kegiatan		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				2 Orang							2 Orang		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.717.650.000**							**2.505.546.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**1.830.650.000**						100 persen	**1.876.416.000**	
1.2.1.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**1.830.650.000**						100 persen	**1.876.416.000**	
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	1.830.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Pekalongan Selatan	12 Bulan	1.876.416.000	Dinkes
								Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo							
								Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	89 persen	**887.000.000**						89 persen	**629.130.000**	
1.2.2.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**887.000.000**						100 persen	**629.130.000**	
1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				58 Kegiatan	887.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Pekalongan Selatan	58 Kegiatan	629.130.000	Dinkes
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan				6 Kegiatan		Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo					6 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit yang dilaksanakan				31 Kegiatan		Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet					31 Kegiatan		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				4 Orang							4 Orang		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.317.750.000**							**1.124.256.000**	
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**600.650.000**						100 persen	**615.666.000**	
1.2.1.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	**600.650.000**						100 persen	**615.666.000**	
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	600.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa	Puskesmas Buaran	12 Bulan	615.666.000	Dinkes

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Selatan, Banyurip		Saing	meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada				
								Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan							
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	89 persen	**717.100.000**						89 persen	**508.590.000**	
1.2.2.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	**717.100.000**						100 persen	**508.590.000**	
1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				58 Kegiatan	717.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Puskesmas Buaran	58 Kegiatan	508.590.000	Dinkes
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan				6 Kegiatan		Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan					6 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit yang dilaksanakan				32 Kegiatan							32 Kegiatan		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				2 Orang							2 Orang		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**87.728.393.000**							**113.553.332.300**	
1.3.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**15.461.278.000**						100 persen	**16.687.252.300**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.3.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**18.650.000**						100 Persen	**40.722.000**	
1.3.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja Yang Disusun				2 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	2 Dokumen	16.379.000	DPUPR
		Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah Yang Disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
1.3.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan Perubahan RKA yang Disusun				2 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	2 Dokumen	3.718.000	DPUPR
1.3.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	14.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	12 Bulan	20.625.000	DPUPR
		Jumlah Dokumen Evaluasi Renja yang disusun				4 Dokumen							4 Dokumen		
		Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah Dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen							5 Dokumen		
1.3.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**7.952.369.000**						100 Persen	**8.665.854.500**	
1.3.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	7.852.069.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	12 bulan	8.541.823.000	DPUPR
1.3.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	95.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	12 bulan	102.752.000	DPUPR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.3.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	1 dokumen	3.718.000	DPUPR
1.3.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah bulan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD				12 Bulan	3.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	12 Bulan	17.561.500	DPUPR
1.3.1.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**65.000.000**						100 Persen	**69.630.000**	
1.3.1.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kertas aset yang dihasilkan				2 laporan	65.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	2 laporan	69.630.000	DPUPR
1.3.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**23.300.000**						100 persen	**26.950.000**	
1.3.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari jadi dan Pekan Batik				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	2 kali	10.450.000	DPUPR
1.3.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan				2 Kali	13.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	2 Kali	16.500.000	DPUPR
1.3.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**607.500.000**						100 persen	**761.184.600**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.3.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	3.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	12 bulan	5.500.000	DPUPR
1.3.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	12 bulan	189.074.600	DPUPR
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				8 unit							8 unit		
1.3.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	12 bulan	6.985.000	DPUPR
1.3.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	110.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	11 bulan	126.500.000	DPUPR
1.3.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	12 bulan	33.000.000	DPUPR
1.3.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	12 bulan	2.750.000	DPUPR
1.3.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				150 kali	300.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	DPU-PR	150 kali	385.000.000	DPUPR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
1.3.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Bulan	6.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	12 Bulan	12.375.000	DPUPR
1.3.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**2.739.173.000**						100 persen	**2.000.000.000**	
1.3.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional / lapangan yang diadakan				3 unit	500.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	3 unit	500.000.000	DPUPR
1.3.1.2.07.3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yg dibangun				1 unit	2.239.173.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	1 unit	1.500.000.000	DPUPR
1.3.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**3.324.400.000**						100 persen	**3.922.576.900**	
1.3.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	12 Bulan	3.300.000	DPUPR
1.3.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	3.082.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	12 Bulan	3.025.000.000	DPUPR
1.3.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor				12 Bulan	239.400.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	DPU-PR	12 Bulan	894.276.900	DPUPR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
1.3.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**730.886.000**						100 persen	**1.200.334.300**	
1.3.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				22 unit	498.686.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	22 unit	782.252.900	DPUPR
1.3.1.2.09.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang terpelihara secara rutin/berkala				6 unit	70.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	6 unit	200.200.000	DPUPR
1.3.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	112.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	1 unit	150.781.400	DPUPR
1.3.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor				12 bulan	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPU-PR	12 bulan	67.100.000	DPUPR
1.3.2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	93,10 persen		82,76 persen	93,10 persen	**16.960.000.000**						93,10 persen	**29.355.000.000**	
1.3.2.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik	27 unit		18 unit	24 unit	**14.660.000.000**						24 unit	**25.450.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.3.2.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing yang Terbagun				4 Pekerjaan	2.010.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	sarpras pengendali banjir	4 Pekerjaan	700.000.000	DPUPR
1.3.2.2.01.13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah lokasi stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun				2 lokasi	6.750.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	sarpras pengendali banjir		12.100.000.000	DPUPR
1.3.2.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah bulan pemeliharaan turap/talud/bronjong				12 bulan	1.400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	sarpras pengendali banjir		4.950.000.000	DPUPR
		Jumlah lokasi tanggul yang dilakukan pemeliharaan				3 lokasi									
1.3.2.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir						4.500.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	sarpras pengendali banjir		7.700.000.000	DPUPR
1.3.2.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1**	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (IKK Output)	85.03 persen		78.74 persen	81.75 persen	**2.300.000.000**						81.75 persen	**3.905.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	(satu) Daerah Kabupaten/Kota														
1.3.2.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi				12 bulan	2.300.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	jaringan irigasi		3.905.000.000	DPUPR
		Jumlah lokasi rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi				3 lokasi									
1.3.3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	92,11 persen		85,77 persen	87,09 persen	**4.180.531.000**						87,09 persen	**5.000.000.000**	
1.3.3.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) didaerah kab/kota dilaksanakan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**4.180.531.000**						100 Persen	**5.000.000.000**	
1.3.3.2.01.7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah PAMSIMAS yang dilakukan pemeliharaan				1 lokasi	4.180.531.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	jaringan perpipaan	1 lokasi	5.000.000.000	DPUPR
		Jumlah pompa PAMSIMAS yang diadakan				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah SR yang terlayani jaringan perpipaan				320 SR							320 SR		
1.3.5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	12,87 persen		9,87 persen	10,47 persen	**808.000.000**						10,47 persen	**400.000.000**	
1.3.5.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T (IKK Output)	60051 unit		59551 unit	59651 unit	**808.000.000**						59651 unit	**400.000.000**	
1.3.5.2.01.5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah IPAL komunal yang direhab				1 lokasi	808.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan	sarpras sanitasi	1 lokasi	400.000.000	DPUPR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Terpusat Skala Permukiman							Semua Kelurahan			permukiman kumuh				
		Jumlah lokasi yang dibangun jamban dan sumur gali				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah MCK komunal yang direhab				4 lokasi							4 lokasi		
1.3.6	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase drainase dalam kondisi baik	71,49 persen		66,45 persen	67.46 persen	**12.366.700.000**						67.46 persen	**32.725.000.000**	
1.3.6.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	177142.18 meter		164642.18 meter	167142.18 meter	**12.366.700.000**						167142.18 meter	**32.725.000.000**	
1.3.6.2.01.5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase yang dibangun/ditingkatkan				1000 meter	1.400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	drainase perkotaan dan lingkungan	1000 meter	2.640.000.000	DPUPR
1.3.6.2.01.7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Bulan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Drainase Primer				12 bulan	5.884.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	drainase perkotaan dan lingkungan		30.085.000.000	DPUPR
		Jumlah Saluran Air Yang Dibangun				7 lokasi									
1.3.6.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah lokasi pembangunan sistem drainase lingkungan				7 lokasi	1.142.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	drainase perkotaan dan lingkungan	7 lokasi	-	DPUPR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.3.6.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Jumlah lokasi rehabilitasi saluran drainase lingkungan				44 lokasi	3.940.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	drainase perkotaan dan lingkungan	44 lokasi	-	DPUPR
1.3.8	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,74 persen		17,24 persen	17,54 persen	**2.214.000.000**						17,54 persen	**1.409.880.000**	
1.3.8.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Jumlah PBG yang diberikan oleh pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting (IKK Output)	1950 dokumen		300 dokumen	310 dokumen	**2.214.000.000**						310 dokumen	**1.409.880.000**	
1.3.8.2.01.1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah bulan pendataan				12 Bulan	227.525.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	Warga Kota Pekalongan	12 Bulan	99.880.000	DPUPR
		Jumlah PBG yang diterbitkan				105 Dokumen IMB							105 Dokumen IMB		
		Jumlah SLF yang diterbitkan				12 SLF							12 SLF		
1.3.8.2.01.2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan bangunan gedung yang tersusun				4 Dokumen IMB	1.986.475.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	Warga Kota Pekalongan	4 Dokumen IMB	1.310.000.000	DPUPR
		Jumlah Gedung yang terbangun				3 Bangunan							3 Bangunan		
1.3.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	86,57 persen		81,12 persen	82,21 persen	**33.987.884.000**						82,21 persen	**26.359.200.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.3.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	132.809 KM		124.448 KM	126.12 KM	**33.987.884.000**						126.12 KM	**26.359.200.000**	
1.3.10.2.01.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen Perencanaan (DED) yang Tersusun				1 Dokumen	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	jalan dan jembatan perkotaan	1 Dokumen	64.500.000	DPUPR
1.3.10.2.01.8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan				8.5 km	27.537.884.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	jalan dan jembatan perkotaan	8.5 km	16.316.800.000	DPUPR
		Panjang Saluran yang dibangun				1 km			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				1 km		
									Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi						
1.3.10.2.01.9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi				1 km	1.700.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	jalan dan jembatan perkotaan	1 km	2.885.900.000	DPUPR
1.3.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara				153412 km	4.000.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	jalan dan jembatan perkotaan	153412 km	6.546.000.000	DPUPR
		Panjang Saluran dan Trotoar yang dipelihara				306824 km			Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				306824 km		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.3.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang dipelihara				1384.6 m	700.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	jalan dan jembatan perkotaan	1384.6 m	546.000.000	DPUPR
1.3.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	21,20 persen		7,87 persen	10,53 persen	**250.000.000**						10,53 persen	**242.000.000**	
1.3.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	5 kali		1 kali	1 kali	**200.000.000**						1 kali	**192.500.000**	
1.3.11.2.01.4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				1 Kali	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	lembaga / tenaga konstruksi	1 Kali	82.500.000	DPUPR
1.3.11.2.01.7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi				80 Peserta	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	lembaga / tenaga konstruksi	80 Peserta	110.000.000	DPUPR
1.3.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase informasi jasa konstruksi yang tersedia	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**50.000.000**						100 Persen	**49.500.000**	
1.3.11.2.02.9	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah dokumen Analisa Standar Belanja Bangunan				2 buku	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	DPU-PR	2 buku	49.500.000	DPUPR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.3.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**1.500.000.000**							**1.375.000.000**	
1.3.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Jumlah RTR Kab/Kota yang ditetapkan Tahun N				1 dokumen	**100.000.000**						0 dokumen	**-**	
1.3.12.2.01.3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen kajian land subsidance yang disusun				1 dokumen	100.000.000						1 dokumen	-	DPUPR
1.3.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan	12 Kali		0 Kali	12 Kali	**1.148.500.000**						12 Kali	**-**	
1.3.12.2.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Tersusunnya RDTR Kota Pekalongan				4 dokumen	1.148.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	penataan ruang	4 dokumen	-	DPUPR
1.3.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan	72 kali		12 kali	12 kali	**101.500.000**						12 kali	**1.320.000.000**	
1.3.12.2.03.2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah pelaksanaan up dating sistem informasi tata ruang				1 pekerjaan	101.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	penataan ruang	1 pekerjaan	1.320.000.000	DPUPR
1.3.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian**	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang yang	72 kali		12 kali	12 kali	**150.000.000**						12 kali	**55.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	dilaksanakan													
1.3.12.2.04.4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya Pertemuan Forum Penataan Ruang				12 kali	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	penataan ruang	12 kali	55.000.000	DPUPR
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan terkait Pemanfaatan Ruang Kota Pekalongan				1 kali							1 kali		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**500.000.000**							**14.403.895.000**	
2.10.5	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 persen		0 persen	100 persen	**500.000.000**						100 persen	**14.403.895.000**	
2.10.5.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase luasan bidang tanah yang terselesaikan ganti ruginya	73.35 persen		73.35 persen	73.35 persen	**500.000.000**						73.35 persen	**14.403.895.000**	
2.10.5.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengadaan tanah				2 Dokumen	500.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	Warga Kota Pekalongan	2 Dokumen	14.403.895.000	DPUPR
		Jumlah dokumen proses legalisasi pengadaan tanah				2 Peta Bidang							2 Peta Bidang		
		Jumlah lokasi pengadaan tanah				2 Lokasi							2 Lokasi		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**29.771.778.000**							**7.037.118.000**	
1.4.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**5.093.723.000**						100 persen	**4.795.503.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.4.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**16.950.000**						100 persen	**25.857.000**	
1.4.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun				2 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperkim	2 Dokumen	10.965.000	Dinperkim
		Jumlah dokumen Renstra perangkat daerah yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
1.4.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperkim	2 Dokumen	1.683.000	Dinperkim
1.4.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	12.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperkim	12 Bulan	13.209.000	Dinperkim
		Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusu				4 Dokumen							4 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 lap Pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen							5 Dokumen		
1.4.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**3.474.345.000**						100 persen	**3.132.366.000**	
1.4.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 Bulan	3.407.845.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperkim	12 Bulan	3.064.383.000	Dinperkim
1.4.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	65.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	Dinperkim	12 Bulan	66.300.000	Dinperkim

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
1.4.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperkim	1 Dokumen	1.683.000	Dinperkim
1.4.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**12.495.000**	
1.4.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik				2 Kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperkim	2 Kali	12.495.000	Dinperkim
1.4.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**330.806.000**						100 persen	**337.422.000**	
1.4.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperkim	12 Bulan	5.100.000	Dinperkim
1.4.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	70.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperkim	12 Bulan	71.910.000	Dinperkim
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				35 Unit							35 Unit		
1.4.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperkim	12 Bulan	2.040.000	Dinperkim
1.4.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	85.806.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis	Dinperkim	11 Bulan	87.522.000	Dinperkim

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan			SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
1.4.1. 2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperkim	12 Bulan	7.650.000	Dinperkim
1.4.1. 2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperkim	12 Bulan	2.550.000	Dinperkim
1.4.1. 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah				100 orang/Kali	157.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperkim	100 orang/Kali	160.650.000	Dinperkim
1.4.1. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**946.942.000**						100 persen	**965.880.000**	
1.4.1. 2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	1.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperkim	12 Bulan	1.836.000	Dinperkim
1.4.1. 2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	758.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperkim	12 Bulan	773.364.000	Dinperkim
1.4.1. 2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 Bulan	186.942.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	Dinperkim	12 Bulan	190.680.000	Dinperkim
		Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan				2 orang/ Kali							2 orang/Kal		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		SK Walikota						Kelurahan			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota		i		
1.4.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**315.180.000**						100 persen	**321.483.000**	
1.4.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				18 Unit	100.180.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperkim	18 Unit	102.183.000	Dinperkim
1.4.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 Unit	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperkim	1 Unit	122.400.000	Dinperkim
1.4.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 Bulan	95.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperkim	12 Bulan	96.900.000	Dinperkim
1.4.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	92,35 persen		0 persen	91,02 persen	**1.805.000.000**						91,02 persen	**1.200.000.000**	
1.4.2.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Data Rumah pada Kawasan Rawan Bencana yang disusun	6 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	**75.000.000**						1 dokumen	**-**	
1.4.2.2.01.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang teridentifikasi				10 Unit	75.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Rumah korban bencana	10 Unit	-	Dinperkim
1.4.2.2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau**	Jumlah Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	15 kegiatan		0 kegiatan	3 kegiatan	**75.000.000**						3 kegiatan	**-**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Relokasi Program Kabupaten/Kota														
1.4.2.2.02.1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat / sukarelawan tanggap bencana yang dilaksanakan				2 kegiatan	10.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Rumah korban bencana	2 kegiatan	-	Dinperkim
1.4.2.2.02.4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator				2 kegiatan	50.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Rumah korban bencana	2 kegiatan	-	Dinperkim
1.4.2.2.02.5	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah kegiatan rembug warga yang dilaksanakan				3 kegiatan	15.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Rumah korban bencana	3 kegiatan	-	Dinperkim
1.4.2.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Presentase Rumah Layak Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah (SPM/IKK Outcome)	100 persen		100 persen	100 persen	**455.000.000**						100 persen	**-**	
1.4.2.2.03.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah yang direhabilitasi				20 unit	262.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	rumah korban bencana	20 unit	-	Dinperkim
1.4.2.2.03.4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit rumah yang terbangun bagi korban bencana				5 unit	192.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	rumah korban bencana	5 unit	-	Dinperkim
1.4.2.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 persen		100 persen	100 persen	**1.200.000.000**						100 persen	**1.200.000.000**	
1.4.2.2.05.1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni	Jumlah Bulan pelaksanaan Fasilitas Pemugaran Perumahan Sewa				12 bulan	1.200.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi	6. Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas	rumah susun	12 bulan	1.200.000.000	Dinperkim

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Rumah Susun	Jumlah unit Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa				1 unit		Kecamatan, Semua Kelurahan		Dan Pelayanan Dasar	perumahan kumuh dan permukiman kumuh		1 unit		
1.4.3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Luas kawasan permukiman kumuh	0 hektar		498,47 hektar	419,47 hektar	**17.936.680.000**						419,47 hektar	**565.240.000**	
1.4.3.2.01	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	Persentase pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100 persen		100 persen	100 persen	**236.400.000**						100 persen	**239.760.000**	
1.4.3.2.01.2	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen DE disusun				3 Dokumen	168.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	kawasan permukiman kumuh	3 Dokumen	171.360.000	Dinperkim
		Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola				2 Kegiatan							2 Kegiatan		
1.4.3.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha yang dilaksanakan				12 kali	68.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	kawasan permukiman kumuh	12 kali	68.400.000	Dinperkim
1.4.3.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	Persentase dokumen penataan kawasan permukiman kumuh yang disusun	100 persen		100 persen	100 persen	**250.000.000**						100 persen	**250.000.000**	
1.4.3.2.02.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	jumlah bulan pemeliharaan aplikasi untuk RT/RW				12 bulan	250.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	kawasan permukiman kumuh	12 bulan	250.000.000	Dinperkim
		jumlah sosialisasi / ToT aplikasi yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
1.4.3.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	Luasan kawasan kumuh yang tertangani	508,47 hektar		10 hektar	79 hektar	**17.450.280.000**						79 hektar	**75.480.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.4.3. 2.03.1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan (Dokumen RP3KP) yang disusun				1 Dokumen	75.480.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	kawasan permukiman kumuh	1 Dokumen	75.480.000	Dinperkim
1.4.3. 2.03.6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi jalan permukiman yang dibangun/direhab				126 lokasi	17.374.800.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	kawasan permukiman kumuh	126 lokasi	-	Dinperkim
		Jumlah rumah yang dibangun di kawasan permukiman kumuh				50 unit							50 unit		
1.4.4	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	2147,88 hektar		1649,41 hektar	1728,41 hektar	**4.260.000.000**						1728,41 hektar	**-**	
1.4.4. 2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pencegahan Rumah Tidak Layak Huni	1.31 persen		0 persen	0.26 persen	**4.260.000.000**						0.26 persen	**-**	
1.4.4. 2.01.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Rangka Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh				371 unit	4.260.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	RTLH	371 unit	-	Dinperkim
1.4.5	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	14,55 persen		14,44 persen	14,46 persen	**676.375.000**						14,46 persen	**476.375.000**	
1.4.5. 2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Persentase Perumahan yang Sudah Menyerahkan PSU	79.35 persen		25 persen	35.87 persen	**676.375.000**						35.87 persen	**476.375.000**	
1.4.5. 2.01.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah aplikasi infrastruktur perumahan dan permukiman yang dibangun dan dikelola				1 dokumen	250.000.000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi	6. Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas	PSU Perumahan	1 dokumen	50.000.000	Dinperkim

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Perencanaan Penyediaan PSU				1 dokumen		Kecamatan, Semua Kelurahan		Dan Pelayanan Dasar	perumahan kumuh dan permukiman kumuh		1 dokumen		
1.4.5. 2.01.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah fasilitas jalan lingkungan yang ditangani				330 meter	298.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PSU Perumahan	330 meter	298.000.000	Dinperkim
		Jumlah fasilitas RTNH yang ditangani				2 unit							2 unit		
1.4.5. 2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya kegiatan legalisasi aset prasarana, sarana dan utilitas perumahan				12 Unit	128.375.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	PSU Perumahan	12 Unit	128.375.000	Dinperkim
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**11.682.795.000**							**12.792.392.000**	
1.5.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**5.737.326.000**						100 persen	**5.619.125.000**	
1.5.1. 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**29.500.000**						100 persen	**41.170.000**	
1.5.1. 2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Satpol PP	2 Dokumen	11.070.000	Satpol PP
		Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
1.5.1. 2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Satpol PP	2 Dokumen	1.650.000	Satpol PP
1.5.1. 2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				7 Bulan	25.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis	Satpol PP	7 Bulan	28.450.000	Satpol PP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan			SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 Dokumen							4 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen							5 Dokumen		
1.5.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**4.895.285.000**						100 persen	**4.746.650.000**	
1.5.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 Bulan	4.842.185.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Satpol PP	12 Bulan	4.692.000.000	Satpol PP
1.5.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	51.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Satpol PP	12 Bulan	53.000.000	Satpol PP
1.5.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Satpol PP	1 Dokumen	1.650.000	Satpol PP
1.5.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**9.785.000**	
1.5.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Satpol PP	2 kali	9.785.000	Satpol PP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**301.138.000**						100 persen	**326.020.000**	
1.5.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Satpol PP	12 Bulan	7.500.000	Satpol PP
1.5.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	130.638.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Satpol PP	12 Bulan	134.520.000	Satpol PP
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				57 unit							57 unit		
1.5.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bULAN	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Satpol PP	12 bULAN	10.000.000	Satpol PP
1.5.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 Bulan	97.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Satpol PP	12 Bulan	99.000.000	Satpol PP
1.5.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	6.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Satpol PP	12 Bulan	7.500.000	Satpol PP
1.5.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Satpol PP	12 Bulan	2.500.000	Satpol PP
1.5.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar				124 orang/kali	50.000.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,	Satpol PP	124 orang/kali	65.000.000	Satpol PP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Konsultasi SKPD	daerah						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
1.5.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**140.500.000**						100 persen	**140.500.000**	
1.5.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Satpol PP	12 Bulan	2.000.000	Satpol PP
1.5.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	138.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Satpol PP	12 Bulan	138.500.000	Satpol PP
1.5.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**361.403.000**						100 persen	**355.000.000**	
1.5.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				28 Unit	325.403.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Satpol PP	28 Unit	335.000.000	Satpol PP
1.5.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 Bulan	36.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Satpol PP	12 Bulan	20.000.000	Satpol PP
1.5.2	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	70,00 persen		60,00 persen	62 persen	**5.331.396.000**						62 persen	**6.304.585.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.2.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (IKK Outcome)	100 persen		80 persen	85 persen	**1.731.687.000**						85 persen	**2.073.941.000**	
1.5.2.2.01.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran				48 kali	106.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Warga Kota Pekalongan, Satpol PP	48 kali	109.700.000	Satpol PP
1.5.2.2.01.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kegiatan PAM Insidental dan Operasi Gabungan Tri Pilar yang dilaksanakan				9 bulan	446.777.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Warga Kota Pekalongan, Satpol PP	9 bulan	337.885.000	Satpol PP
		Jumlah Operasi Kader Siaga Trantib yang dilaksanakan				6 kali							6 kali		
1.5.2.2.01.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah hari PAM Obvit yang dilaksanakan				365 hari	980.410.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Warga Kota Pekalongan, Satpol PP	365 hari	1.430.356.000	Satpol PP
		Jumlah hari Piket Posko Bencana Alam (PBA) yang dilaksanakan				60 hari							60 hari		
		Jumlah kegiatan operasional linmas yang dilaksanakan (Insidental, latihan Defile, Lomba HUT Tk. Prov, Jambore)				25 kali							25 kali		
		Jumlah kegiatan PAM Car Free Day yang dilaksanakan				48 kali							48 kali		
		Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan Tahun Baru				4 kegiatan							4 kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.2.2.01.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah kegiatan bintek perundang-undangan dan pelatihan fisik yang dilaksanakan				5 kali	48.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Warga Kota Pekalongan, Satpol PP	5 kali	48.000.000	Satpol PP
1.5.2.2.01.7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Pelaithan SDM yang dilaksanakan				8 kali	150.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Warga Kota Pekalongan, Satpol PP	8 kali	148.000.000	Satpol PP
		Jumlah kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Fisik/Stamnina dan Beladiri yang dilaksanakan				48 kali							48 kali		
		Jumlah keikutsertaan upacara peringatan HUT Pol PP dan Jambore Tingkat Provinsi Jawa Tengah				2 kegiatan							2 kegiatan		
1.5.2.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)	120 persen		20 persen	20 persen	**3.578.209.000**						20 persen	**4.209.144.000**	
1.5.2.2.02.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan intelejen/deteksi dini yang dilaksanakan				12 kali	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Warga Kota Pekalongan	12 kali	240.750.000	Satpol PP
1.5.2.2.02.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan				24 kali	3.558.209.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Warga Kota Pekalongan	24 kali	3.968.394.000	Satpol PP
		Jumlah pelaksanaan kegiatan penerapan SIM Penegakan Perda				5 kali							5 kali		
1.5.2.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	21 persen		8 persen	11 persen	**21.500.000**						11 persen	**21.500.000**	
1.5.2.2.03.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier	Jumlah kegiatan pembinaan dan rakor sekretariat PPNS				12 kali	21.500.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam	PPNS	12 kali	21.500.000	Satpol PP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	PPNS	yang dilaksanakan						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	mewujudkan kondusivitas wilayah				
1.5.4	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100 persen		100,00 persen	100 persen	**614.073.000**						100 persen	**868.682.000**	
1.5.4.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran	100 persen		100 persen	100 persen	**614.073.000**						100 persen	**868.682.000**	
1.5.4.2.01.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Latihan Pemadaman Kebakaran, Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran, dan Inspeksi Alat Proteksi Kebakaran yang dilaksanakan				40 kali	44.379.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Warga Kota Pekalongan	40 kali	74.336.000	Satpol PP
1.5.4.2.01.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran yang tertangani				150 kali	569.694.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Warga Kota Pekalongan	150 kali	794.346.000	Satpol PP
		Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota				2 orang/bulan							2 orang/bulan		
		Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan				4 kegiatan							4 kegiatan		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**2.772.208.000**							**3.201.900.000**	
1.5.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**1.735.988.000**						100 persen	**1.959.800.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**12.500.000**						100 Persen	**20.770.000**	
1.5.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BPBD	2 dokumen	2.700.000	BPBD
1.5.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BPBD	2 dokumen	1.600.000	BPBD
1.5.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	8.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BPBD	12 bulan	16.470.000	BPBD
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
1.5.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**1.360.467.000**						100 Persen	**1.480.450.000**	
1.5.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	1.329.542.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BPBD	12 bulan	1.445.350.000	BPBD
1.5.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	29.425.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	BPBD	12 bulan	33.500.000	BPBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
1.5.1. 2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BPBD	1 dokumen	1.600.000	BPBD
1.5.1. 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**21.600.000**						100 Persen	**23.870.000**	
1.5.1. 2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran, Hakteknas dan Karnaval batik				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BPBD	2 kali	10.500.000	BPBD
		Jumlah pakaian dinas yang diadakan				0 buah							0 buah		
1.5.1. 2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				40 orang	12.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BPBD	40 orang	13.370.000	BPBD
1.5.1. 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**101.089.000**						100 Persen	**161.380.000**	
1.5.1. 2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BPBD	12 bulan	2.660.000	BPBD
1.5.1. 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	35.739.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BPBD	12 bulan	61.960.000	BPBD
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				5 unit							5 unit		
1.5.1. 2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis	BPBD	12 bulan	5.300.000	BPBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan			SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
1.5.1. 2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 bulan	29.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BPBD	12 bulan	31.510.000	BPBD
1.5.1. 2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	6.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BPBD	12 bulan	9.550.000	BPBD
1.5.1. 2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BPBD	12 bulan	2.650.000	BPBD
1.5.1. 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				20 orang/ kali	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BPBD	20 orang/ kali	47.750.000	BPBD
1.5.1. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**110.250.000**						100 Persen	**114.900.000**	
1.5.1. 2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BPBD	12 bulan	1.910.000	BPBD
1.5.1. 2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	46.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BPBD	12 bulan	70.450.000	BPBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	62.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BPBD	12 bulan	42.540.000	BPBD
1.5.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**130.082.000**						100 Persen	**158.430.000**	
1.5.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				12 unit	72.582.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BPBD	12 unit	84.730.000	BPBD
1.5.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BPBD	1 unit	10.050.000	BPBD
1.5.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BPBD	12 bulan	63.650.000	BPBD
1.5.3	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	persentase korban bencana alam yang ditangani	100 persen		100,00 persen	100 persen	**1.036.220.000**						100 persen	**1.242.100.000**	
1.5.3.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)	persen		persen	100 persen	**104.700.000**						100 persen	**72.500.000**	
1.5.3.2.01.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos)				3 jenis	104.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Masyarakat	3 jenis	72.500.000	BPBD
		Jumlah kegiatan apel siaga yang difasilitasi				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanaka				2 kali							2 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah sosialisasi tanggap darurat terhadap bencana yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
1.5.3.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)	persen		persen	100 persen	**182.650.000**						100 persen	**112.400.000**	
1.5.3.2.02.2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar/masyarakat yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan Penanggulangan bencana				200 orang	61.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Masyarakat, BPBD	200 orang	62.400.000	BPBD
1.5.3.2.02.4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan				5 unit	121.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Masyarakat, BPBD	5 unit	50.000.000	BPBD
1.5.3.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM/IKK Outcome)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**748.870.000**						100 Persen	**1.057.200.000**	
1.5.3.2.03.2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	jumlah bulan penanggulangan bencana yang difasilitasi				12 bulan	709.095.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	korban bencana	12 bulan	907.200.000	BPBD
1.5.3.2.03.4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan				3 kejadian	39.775.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kot	korban bencana	3 kejadian	150.000.000	BPBD
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**8.213.444.000**							**8.101.581.120**	
1.6.1	**PROGRAM PENUNJANG**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**4.002.084.000**						100 persen	**4.118.934.320**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
1.6.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**16.500.000**						100 persen	**25.654.600**	
1.6.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinsos P2KB	2 dokumen	11.404.600	Dinsos P2KB
		Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
1.6.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinsos P2KB	2 dokumen	1.750.000	Dinsos P2KB
1.6.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinsos P2KB	12 bulan	12.500.000	Dinsos P2KB
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
1.6.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**3.043.484.000**						100 persen	**3.174.226.470**	
1.6.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	2.993.684.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinsos P2KB	12 bulan	3.121.235.000	Dinsos P2KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.6.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	48.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinsos P2KB	12 bulan	51.241.470	Dinsos P2KB
1.6.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinsos P2KB	1 Dokumen	1.750.000	Dinsos P2KB
1.6.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**10.078.000**	
1.6.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 Kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinsos P2KB	2 Kali	10.078.000	Dinsos P2KB
1.6.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**256.000.000**						100 persen	**368.448.250**	
1.6.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	8.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinsos P2KB	12 Bulan	10.609.000	Dinsos P2KB
1.6.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	75.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinsos P2KB	12 Bulan	95.480.000	Dinsos P2KB
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				3 Unit							3 Unit		
1.6.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinsos P2KB	12 Bulan	5.304.000	Dinsos P2KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.6.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	65.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinsos P2KB	11 Bulan	90.176.000	Dinsos P2KB
1.6.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinsos P2KB	12 Bulan	10.609.000	Dinsos P2KB
1.6.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinsos P2KB	12 Bulan	2.652.250	Dinsos P2KB
1.6.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				242 Kali	90.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinsos P2KB	242 Kali	153.618.000	Dinsos P2KB
1.6.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**220.600.000**						100 persen	**228.729.000**	
1.6.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinsos P2KB	12 Bulan	2.546.000	Dinsos P2KB
1.6.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	148.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinsos P2KB	12 Bulan	157.013.000	Dinsos P2KB
1.6.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan				12 Bulan	70.200.000	Semua Kab/Kota,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,	Dinsos P2KB	12 Bulan	69.170.000	Dinsos P2KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kantor	kebersihan kantor						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
1.6.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**456.000.000**						100 persen	**311.798.000**	
1.6.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				69 Unit	240.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinsos P2KB	69 Unit	265.225.000	Dinsos P2KB
1.6.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 Unit	196.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinsos P2KB	1 Unit	26.522.000	Dinsos P2KB
1.6.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 Bulan	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinsos P2KB	12 Bulan	20.051.000	Dinsos P2KB
1.6.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75,00 persen		42,00 persen	50 persen	**274.800.000**						50 persen	**381.180.500**	
1.6.2.2.01	**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen		10 persen	10 persen	**125.800.000**						10 persen	**159.453.000**	
1.6.2.2.01.2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah bulan pendampingan program KUBE				12 Bulan	125.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan	Warga miskin	12 Bulan	159.453.000	Dinsos P2KB
1.6.2.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen		75 persen	75 persen	**149.000.000**						75 persen	**221.727.500**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.6.2.2.03.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan Fasilitasi pembinaan PSKS				12 Bulan	45.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan	PSKS	12 Bulan	89.115.000	Dinsos P2KB
1.6.2.2.03.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan Fasilitasi pembinaan PSKS				12 Bulan	104.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan	PSKS	12 Bulan	132.612.500	Dinsos P2KB
1.6.4	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen		100,00 persen	100 persen	**1.564.060.000**						100 persen	**1.789.781.600**	
1.6.4.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**1.494.060.000**						100 Persen	**1.715.518.600**	
1.6.4.2.01.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah anggota veteran dan ahli waris pejuang 3 okt yang mendapat bantuan sembako				122 Orang	365.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan	PMKS	122 Orang	400.171.300	Dinsos P2KB
		Jumlah disabilitas yang mendapat bantuan sembako				225 Orang							225 Orang		
		Jumlah lansia yang mendapat bantuan sembako				600 Orang							600 Orang		
1.6.4.2.01.3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pelayanan Anak Rentan Kesejahteraan Sosial				100 Orang	90.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan	PMKS	100 Orang	100.616.800	Dinsos P2KB
		Jumlah PMKS yang mendapat alat bantu				7 Orang							7 Orang		
		Jumlah Wanita Rawan Sosial yang mendapat pelatihan				10 Orang							10 Orang		
1.6.4.2.01.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah kelayan yang dilayani				135 Orang	45.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta	PMKS	135 Orang	63.654.000	Dinsos P2KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan			peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan				
1.6.4. 2.01.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah bulan pelayanan PMKS di RPSBM				12 Bulan	994.060.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan	PMKS	12 Bulan	1.151.076.500	Dinsos P2KB
		Jumlah fasilitasi kegiatan dalam peringatan Harlun				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah keikutsertaan dalam kegtn HDI (Hari Disabilitas Internasional)				1 Kali							1 Kali		
1.6.4. 2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.98 Persen		3.32 Persen	3.43 Persen	**70.000.000**						3.43 Persen	**74.263.000**	
1.6.4. 2.02.9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah warga miskin yang difasilitasi nikah masal				10 Pasang	70.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan	PMKS	10 Pasang	74.263.000	Dinsos P2KB
1.6.5	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	52,49 persen		60,45 persen	58,46 persen	**999.500.000**						58,46 persen	**1.151.234.700**	
1.6.5. 2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase graduasi KPM PKH	10 Persen		10 Persen	10 Persen	**999.500.000**						10 Persen	**1.151.234.700**	
1.6.5. 2.02.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan fasilitasi BPNT				12 Bulan	679.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan	Warga miskin	12 Bulan	781.511.700	Dinsos P2KB
		Jumlah bulan pelayanan SLRT				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah dokumen database kemiskinan yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
1.6.5. 2.02.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah bulan pendampingan PKH				12 Bulan	320.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan	Warga miskin	12 Bulan	369.723.000	Dinsos P2KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah KPM PKH yang mendapat sosialisasi				400 Orang							400 Orang		
1.6.6	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen		100,00 persen	100 persen	**1.321.000.000**						100 persen	**575.450.000**	
1.6.6.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen		100 persen	100 persen	**1.321.000.000**						100 persen	**575.450.000**	
1.6.6.2.01.1	Penyediaan Makanan	Jumlah fasilitasi kegiatan bantuan untuk korban bencana alam				1 Kegiatan	500.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan	Korban bencana alam dan sosial	1 Kegiatan	530.450.000	Dinsos P2KB
1.6.6.2.01.4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah bantuan sosial yang diberikan				10 paket	821.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan	Korban bencana alam dan sosial	10 paket	45.000.000	Dinsos P2KB
		Jumlah keluarga yang diberikan bantuan sosial				18 keluarga							18 keluarga		
1.6.7	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	100 persen		100,00 persen	100 persen	**52.000.000**						100 persen	**85.000.000**	
1.6.7.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen		100 persen	100 persen	**52.000.000**						100 persen	**85.000.000**	
1.6.7.2.01.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pemeliharaan taman makam pahlawan				12 Bulan	52.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan	Taman makam pahlawan	12 Bulan	85.000.000	Dinsos P2KB
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**3.472.465.000**							**3.617.465.000**	
2.14.2	**PROGRAM PENGENDALIAN**	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi modern	100 persen		100,00 persen	67,45 persen	**76.000.000**						67,45 persen	**76.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	PENDUDUK	(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)													
2.14.2.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen		100 persen	100 persen	**76.000.000**						100 persen	**76.000.000**	
2.14.2.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga yang disusun				13 Dokumen	76.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Dinsos P2KB	13 Dokumen	76.000.000	Dinsos P2KB
2.14.3	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun	7,20 persen		8,20 persen	8 persen	**3.251.380.000**						8 persen	**3.396.380.000**	
2.14.3.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	7,74 perseribu		9,72 perseribu	9.22 perseribu	**2.821.938.000**						9.22 perseribu	**2.921.938.000**	
2.14.3.2.01.4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR				49 Kelompok	90.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Akseptor KB	49 Kelompok	190.000.000	Dinsos P2KB
2.14.3.2.01.7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah bulan penyediaan operasional Balai Penyuluhan KB				12 Bulan	2.731.938.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Akseptor KB	12 Bulan	2.731.938.000	Dinsos P2KB
2.14.3.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20,8 persen		19,8 persen	20 persen	**429.442.000**						20 persen	**474.442.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.3.2.03.6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan				10 Unit	184.442.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Akseptor KB	10 Unit	184.442.000	Dinsos P2KB
2.14.3.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah PUS dari Keluarga Miskin yang mendapat pelayanan KB				95 Orang	245.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Akseptor KB	95 Orang	290.000.000	Dinsos P2KB
2.14.4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Unmeet need KB	persen		persen	16 persen	**145.085.000**						16 persen	**145.085.000**	
2.14.4.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen		100 persen	100 persen	**145.085.000**						100 persen	**145.085.000**	
2.14.4.2.02.1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan/fasilitasi PPKBD, KKB, Kelompok Kegiatan, Rumah Data Kependudukan dan PPKS				5 Kegiatan	145.085.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Warga Kota Pekalongan	5 Kegiatan	145.085.000	Dinsos P2KB
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**28.848.788.000**							**111.251.426.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**12.707.494.000**						100 persen	**93.683.594.000**	
2.11.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**25.650.000**						100 Persen	**26.600.000**	
2.11.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	2 dokumen	2.500.000	DLH
2.11.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	2 dokumen	1.750.000	DLH
2.11.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	21.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	12 bulan	22.350.000	DLH
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP				5 dokumen							5 dokumen		
2.11.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**9.134.978.000**						100 Persen	**90.357.978.000**	
2.11.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	9.024.478.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	12 bulan	90.244.478.000	DLH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	109.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	12 bulan	112.000.000	DLH
2.11.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	1 dokumen	1.500.000	DLH
2.11.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**31.375.000**						100 Persen	**31.375.000**	
2.11.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran, Hakteknas dan Karnaval Batik				2 kali	31.375.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	2 kali	31.375.000	DLH
		umlah pakaian dinas yang diadakan				209 buah							209 buah		
2.11.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**246.066.000**						100 Persen	**257.616.000**	
2.11.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	6.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	12 bulan	6.200.000	DLH
2.11.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	64.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	12 bulan	72.300.000	DLH
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				12 unit							12 unit		
2.11.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	8.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	DLH	12 bulan	8.500.000	DLH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
2.11.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	84.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	11 bulan	87.500.000	DLH
2.11.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	19.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	12 bulan	19.600.000	DLH
2.11.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	12 bulan	2.700.000	DLH
2.11.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				75 kali	60.816.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	75 kali	60.816.000	DLH
2.11.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**250.000.000**						100 Persen	**-**	
2.11.1.2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah IPAL Laboratorium yang dibangun				1 unit	250.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	1 unit	-	DLH
2.11.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**578.500.000**						100 Persen	**595.600.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	12 bulan	2.600.000	DLH
2.11.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	270.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	12 bulan	278.000.000	DLH
2.11.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	306.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	12 bulan	315.000.000	DLH
2.11.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**2.440.925.000**						100 Persen	**2.414.425.000**	
2.11.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				23 unit	177.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	23 unit	173.000.000	DLH
2.11.1.2.09.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang terpelihara secara rutin/berkala				40 unit	2.129.675.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	40 unit	2.129.675.000	DLH
2.11.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	108.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	1 unit	111.750.000	DLH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	25.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	12 bulan	-	DLH
2.11.2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100 persen		0 persen	80 persen	**353.000.000**						80 persen	**-**	
2.11.2.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	3 dokumen		0 dokumen	3 dokumen	**253.000.000**						3 dokumen	**-**	
2.11.2.2.01.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen dan Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	253.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	1 Dokumen	-	DLH
2.11.2.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Jumlah penyusunan dokumen KLHS untuk perencanaan	2 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	**100.000.000**						1 dokumen	**-**	
2.11.2.2.02.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis				1 Dokumen	100.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DLH	1 Dokumen	-	DLH
2.11.3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase limbah yang diolah	49,01 persen		33,37 persen	39,29 persen	**1.276.695.000**						39,29 persen	**1.551.200.000**	
2.11.3.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya	53.57 persen		42.51 persen	43.38 persen	**926.695.000**						43.38 persen	**1.086.200.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.3.2.01.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jumlah monitoring terhadap kegiatan/usaha pemanfaat air tanah yang dilaksanakan				40 titik	575.962.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	Lingkungan Hidup	40 titik	672.500.000	DLH
		jumlah pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang disosialisasi				120 usaha/kegiatan							120 usaha/kegiatan		
		jumlah pemantauan kualitas udara emisi/ambien yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		jumlah pengambilan sampel air sungai yang dilakukan				30 kali							30 kali		
		jumlah sampah yang diambil dari sungai				1800 m3							1800 m3		
2.11.3.2.01.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	jumlah kampung iklim yang dibentuk				4 lokasi	27.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	Lingkungan Hidup	4 lokasi	30.000.000	DLH
2.11.3.2.01.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah pengadaan alat laboratorium				1 unit	323.733.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	Lingkungan Hidup	1 unit	383.700.000	DLH
		jumlah sampel yang diuji				155 sampel							155 sampel		
		jumlah uji profesiensi/uji banding				1 hasil uji							1 hasil uji		
		persentase parameter yang diakreditasi				0 persen							0 persen		
2.11.3.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase upaya penanggulangan pencemaran air	76.47 persen		70.59 persen	70.59 persen	**350.000.000**						70.59 persen	**465.000.000**	
2.11.3.2.02.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah DIKPLHD yang disusun				1 dokumen	65.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala	Lingkungan Hidup	1 dokumen	70.000.000	DLH
		jumlah dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				1 dokumen							1 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		(IKLH) yang disusun									luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun				
2.11.3.2.02.3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	jumlah IPAL komunal yang dibangun				0 unit	285.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	Lingkungan Hidup	0 unit	395.000.000	DLH
		jumlah limbah cair yang dikelola				230000 m3							230000 m3		
2.11.4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,949 persen		2,889 persen	2,909 persen	**4.862.771.000**						2,909 persen	**4.341.692.000**	
2.11.4.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Luas RTH Publik	110.355 Ha		108.484 Ha	108.858 Ha	**4.862.771.000**						108.858 Ha	**4.341.692.000**	
2.11.4.2.01.4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	jumlah lokasi pemeliharaan pohon di sempadan jalan				4 wilayah	4.642.051.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	RTH	4 wilayah	3.966.692.000	DLH
		jumlah lokasi pemeliharaan rutin/berkala makam				2 lokasi							2 lokasi		
		jumlah lokasi pemeliharaan rutin/berkala taman kota				4 lokasi							4 lokasi		
		jumlah pengadaan konstruksi taman kota				2 lokasi							2 lokasi		
		Jumlah taman yang difasilitasi pembangunan/pemeliharaan				6 lokasi							6 lokasi		
2.11.4.2.01.5	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	jumlah TAHURA yang dipelihara				6 lokasi	220.720.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	RTH	6 lokasi	375.000.000	DLH
2.11.5	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN**	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	100 persen		31,11 persen	13,33 persen	**5.000.000**						13,33 persen	**2.500.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														
2.11.5.2.01	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3	44 persen		13 persen	6 persen	**5.000.000**						6 persen	**2.500.000**	
2.11.5.2.01.2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah verifikasi lapangan ke usaha/kegiatan yang mengajukan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 maupun perpanjangan Izinnya				14 kegiatan/ usaha	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	Limbah B3	14 kegiatan/ usaha	2.500.000	DLH
2.11.6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	100 persen		16,67 persen	16,67 persen	**173.150.000**						16,67 persen	**83.150.000**	
2.11.6.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan	60 kegiatan		10 kegiatan	10 kegiatan	**173.150.000**						10 kegiatan	**83.150.000**	
2.11.6.2.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah inventarisasi data perusahaan di Kota Pekalongan berbasis aplikasi				1 Pekerjaan	130.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	PPLH	1 Pekerjaan	40.000.000	DLH
		Jumlah monitoring/pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan kepada perusahaan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan				50 Perusahaan							50 Perusahaan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.6.2.01.3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang memiliki Izin Lingkungan yang diawasi				65 Perusahaan	38.150.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	PPLH	65 Perusahaan	38.150.000	DLH
2.11.6.2.01.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah pengawasan terpadu dengan pihak terkait dalam rangka penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH				5 Kegiatan	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	PPLH	5 Kegiatan	5.000.000	DLH
2.11.8	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50,00 persen		0 persen	50 persen	**437.000.000**						50 persen	**435.000.000**	
2.11.8.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	5 komunitas		0 komunitas	5 komunitas	**437.000.000**						5 komunitas	**435.000.000**	
2.11.8.2.01.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan komunitas peduli lingkungan hidup di Kota Pekalongan				10 Kegiatan	130.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Warga Kota Pekalongan	10 Kegiatan	100.000.000	DLH
		Jumlah kelompok lembaga kemasyarakatan (PKK RT/ RW/Kelurahan/Kecamatan) yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan lingkungan hidup				2 Kelompok							2 Kelompok		
		Jumlah mesin perahu untuk komunitas peduli lingkungan hidup yang dibeli				1 Unit							1 Unit		
		Jumlah mesin potong rumput untuk komunitas peduli lingkungan hidup yang dibeli				1 Unit							1 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.8.2.01.2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Saka Kalpataru (Pramuka) yang dibina				40 Orang	32.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Warga Kota Pekalongan	40 Orang	60.000.000	DLH
2.11.8.2.01.3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah fasilitasi persiapan Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Provinsi dan/atau Nasional yang diselenggarakan				1 Event	275.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Warga Kota Pekalongan	1 Event	275.000.000	DLH
		Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan				2 Event							2 Event		
		Jumlah Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Kota Pekalongan yang diselenggarakan				1 Event							1 Event		
		Jumlah lomba-lomba dalam rangka peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan				4 Lomba							4 Lomba		
2.11.9	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	75 persen		75 persen	75 persen	**125.000.000**						75 persen	**125.000.000**	
2.11.9.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	18 penghargaan		3 penghargaan	3 penghargaan	**125.000.000**						3 penghargaan	**125.000.000**	
2.1a1.9.2.01.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan dan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah dan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional/Mandiri				2 Event	125.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Warga Kota Pekalongan	2 Event	125.000.000	DLH
		Jumlah pembinaan dan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Pekalongan yang diselenggarakan				1 Event							1 Event		
		Jumlah pembinaan dan penilaian Peringkat Kinerja				1 Event							1 Event		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		(Proper) Perusahaan yang diselenggarakan													
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen		100 persen	100 persen	**20.000.000**						100 persen	**20.000.000**	
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	36 kasus		6 kasus	6 kasus	**20.000.000**						6 kasus	**20.000.000**	
2.11.10.2.01.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani				6 Kasus	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Warga Kota Pekalongan	6 Kasus	20.000.000	DLH
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengelolaan sampah	0,31 persen		2,19 persen	0,27 persen	**8.888.678.000**						0,27 persen	**11.009.290.000**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	Persentase pengurangan sampah	18.19 persen		17.01 persen	17.23 persen	**8.888.678.000**						17.23 persen	**11.009.290.000**	
2.11.11.2.01.3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah bulan layanan pengangkutan sampah				12 bulan	6.600.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	Pengelolaan sampah	12 bulan	6.800.000.000	DLH
		Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota				128 orang							128 orang		
		Jumlah ruas jalan yang disapu				12 ruas jalan							12 ruas jalan		
		Jumlah tenaga admistrasi persampahan				5 orang							5 orang		
		Jumlah TPS3R yang difasilitasi				20 TPS3R							20 TPS3R		
		Jumlah TPS3R yang operasional				20 unit							20 unit		
2.11.11.2.01.4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bank sampah RW yang dibina				27 unit	624.790.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan	Pengelolaan sampah	27 unit	426.790.000	DLH
		Jumlah komposter yang dibeli				50 unit							50 unit		
		Jumlah lokasi pembuangan sampah liar yang diawasi				25 lokasi							25 lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah perlengkapan bank sampah yang dibeli				6 jenis		Kelurahan			kebijakan yang telah disusun		6 jenis		
		Jumlah tempat sampah yang dibeli				50 unit							50 unit		
		Jumlah tenaga kerja Bank Sampah Induk yang difasilitasi				5 orang/bulan							5 orang/bulan		
		Jumlah tenaga kerja persampahan yang difasilitasi				6000 orang/kali							6000 orang/kali		
2.11.11.2.01.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah bahan habis pakai yang dibeli				8 jenis	1.663.888.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	Pengelolaan sampah	8 jenis	3.782.500.000	DLH
		Jumlah dumptruk yang dibeli				1 unit							1 unit		
		Jumlah kendaraan roda 3 yang dibeli				9 unit							9 unit		
		Jumlah perlengkapan pakaian kerja yang dibeli				5 jenis							5 jenis		
		Jumlah songkro sampah yang diadakan				30 unit							30 unit		
		Jumlah TPS3R yang direvitalisasi				4 unit							4 unit		
		Jumlah TPS yang dipelihara				3 unit							3 unit		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**4.786.992.000**							**6.392.849.000**	
2.12.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**4.074.728.000**						100 persen	**5.455.542.000**	
2.12.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**11.550.000**						100 Persen	**13.462.000**	
2.12.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindukcapil	2 dokumen	2.750.000	Dindukcapil
2.12.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA yang disusun				4 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	Dindukcapil	4 dokumen	1.750.000	Dindukcapil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
2.12.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	7.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindukcapil	12 bulan	8.962.000	Dindukcapil
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
2.12.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**2.899.502.000**						100 Persen	**3.518.189.000**	
2.12.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	2.837.776.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindukcapil	12 bulan	3.453.539.000	Dindukcapil
2.12.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	60.226.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindukcapil	12 bulan	63.000.000	Dindukcapil
2.12.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindukcapil	1 dokumen	1.650.000	Dindukcapil
2.12.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**62.986.000**						100 Persen	**118.567.000**	
2.12.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	Dindukcapil	2 kali	9.500.000	Dindukcapil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
2.12.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditingkatkan kompetensinya				50 orang	9.486.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindukcapil	50 orang	12.000.000	Dindukcapil
2.12.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan pelaksanaan Sosialisasi melalui media massa dan elektronik				12 bulan	44.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindukcapil	12 bulan	97.067.000	Dindukcapil
2.12.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**715.090.000**						100 Persen	**1.383.728.000**	
2.12.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	1.187.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindukcapil	12 bulan	1.500.000	Dindukcapil
2.12.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	577.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindukcapil	12 bulan	1.110.888.000	Dindukcapil
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				1 unit							1 unit		
2.12.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	4.275.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindukcapil	12 bulan	4.500.000	Dindukcapil
2.12.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	35.844.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	Dindukcapil	11 bulan	35.805.000	Dindukcapil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
2.12.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	39.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindukcapil	12 bulan	53.045.000	Dindukcapil
2.12.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	3.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindukcapil	12 bulan	4.000.000	Dindukcapil
2.12.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				34 kali	53.884.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindukcapil	34 kali	173.990.000	Dindukcapil
2.12.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**294.367.000**						100 Persen	**321.596.000**	
2.12.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	3.040.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindukcapil	12 bulan	3.500.000	Dindukcapil
2.12.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	110.040.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindukcapil	12 bulan	112.000.000	Dindukcapil
2.12.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan adminduk				12 bulan	181.287.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindukcapil	12 bulan	206.096.000	Dindukcapil
		Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kebersihan kantor				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota				1 orang/bulan							1 orang/bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**91.233.000**						100 Persen	**100.000.000**	
2.12.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				16 unit	48.483.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindukcapil	16 unit	50.000.000	Dindukcapil
2.12.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				3 unit	23.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindukcapil	3 unit	25.000.000	Dindukcapil
2.12.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	19.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindukcapil	12 bulan	25.000.000	Dindukcapil
2.12.2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	88,75 persen		80,00 persen	81,77 persen	**323.380.000**						81,77 persen	**353.710.000**	
2.12.2.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	1453824 dokumen		235446 dokumen	238189 dokumen	**323.380.000**						238189 dokumen	**353.710.000**	
2.12.2.2.01.2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	jumlah penerbitan KK				26200 KK	261.955.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Warga Kota Pekalongan	26200 KK	282.100.000	Dindukcapil
		jumlah perekaman KTP elektronik (IKK OUTCOME)				31000 KTP-el							31000 KTP-el		
2.12.2.2.01.4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen audit dan surveilance ISO				1 dokumen	31.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Warga Kota Pekalongan	1 dokumen	33.418.000	Dindukcapil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.2.2.01.7	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Cakupan kepemilikan KIA (IKK OUTCOME)				55 persen	29.925.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Warga Kota Pekalongan	55 persen	38.192.000	Dindukcapil
2.12.3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	94,00 persen		93,25 persen	93,4 persen	**272.072.000**						93,4 persen	**295.240.000**	
2.12.3.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	574182 dokumen		92438 dokumen	93742 dokumen	**272.072.000**						93742 dokumen	**295.240.000**	
2.12.3.2.01.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	jumlah penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak (IKK OUTCOME)				5475 akta kelahiran	261.955.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Warga Kota Pekalongan	5475 akta kelahiran	283.240.000	Dindukcapil
		jumlah penerbitan Kutipan Akta Kematian (IKK OUTPUT)				3225 akta kematian							3225 akta kematian		
2.12.3.2.01.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	jumlah penerbitan Kutipan Akta Perceraian dalam 1 tahun (IKK OUTPUT)				10 akta perceraian	10.117.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Warga Kota Pekalongan	10 akta perceraian	12.000.000	Dindukcapil
		jumlah penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dalam 1 tahun (IKK OUTPUT)				50 akta perkawinan							50 akta perkawinan		
2.12.4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	14,00 OPD		5,00 OPD	7 OPD	**116.812.000**						7 OPD	**288.357.000**	
2.12.4.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Penyajian data kependudukan (IKK Output)	2 OPD		2 OPD	2 OPD	**116.812.000**						2 OPD	**288.357.000**	
2.12.4.2.03.3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (Penyajian Data Kependudukan)				110 buku	24.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindukcapil	110 buku	180.000.000	Dindukcapil
		Jumlah Rapat Koordinasi pelaporan Kependudukan yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
2.12.4.2.03.5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Sosialisasi Adminduk yang dilaksanakan				1 kali	61.912.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	Dindukcapil	1 kali	86.357.000	Dindukcapil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kependudukan							Kecamatan, Semua Kelurahan		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
2.12.4.2.03.8	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)				13650 berkas	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindukcapil	13650 berkas	22.000.000	Dindukcapil
		Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)				273 buku							273 buku		
		Jumlah Fumigasi Arsip				1 kali							1 kali		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**957.210.000**							**478.128.000**	
2.8.2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	11,09 persen		1,85 persen	3,7 persen	**100.000.000**						3,7 persen	**66.650.000**	
2.8.2.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender	16.67 persen		0 persen	16.67 persen	**45.000.000**						16.67 persen	**10.000.000**	
2.8.2.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Event Gender Champions yang dilaksanakan				1 Kali	45.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak	Gender	1 Kali	10.000.000	DPMPPA
		Jumlah dokumen PPRG yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
		Jumlah peserta yang diberikan Bintek penyusunan dokumen yang responsif gender				45 Orang							45 Orang		
2.8.2.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan	40 persen		6.67 persen	13.33 persen	**40.000.000**						13.33 persen	**41.200.000**	
2.8.2.2.02.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan	Jumlah peserta yang mengikuti advokasi PUG				90 Orang	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta	Perempuan	90 Orang	41.200.000	DPMPPA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Ekonomi							Kelurahan			penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak				
2.8.2.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita	100 persen		50 persen	100 persen	**15.000.000**						100 persen	**15.450.000**	
2.8.2.2.03.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah monev Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan				20 Kali	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak	lembaga layanan pemberdayaan perempuan	20 Kali	15.450.000	DPMPPA
2.8.3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	23,99 persen		23,99 persen	23,99 persen	**269.250.000**						23,99 persen	**70.905.000**	
2.8.3.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)	100 persen		100 persen	100 persen	**269.250.000**						100 persen	**70.905.000**	
2.8.3.2.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Case Conference Kasus Perempuan yang dilaksanakan				48 Kali	269.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak	Perempuan korban kekerasan	48 Kali	70.905.000	DPMPPA
		Jumlah FGD Manajemen Kasus yang dilaksanakan				1 Kali			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1 Kali		
		Jumlah pemberian konsultasi pengasuhan anak dan permasalahan keluarga				9 Kali							9 Kali		
		Jumlah pendampingan kasus kekerasan yang dilaksanakan				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah peserta PPKBM				100 Orang							100 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.8.6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	55,56 persen		25,93 persen	29,63 persen	**307.965.000**						29,63 persen	**286.478.000**	
2.8.6.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase SRA (Sekolah Ramah Anak)	10.96 persen		9.98 persen	10.18 persen	**170.865.000**						10.18 persen	**120.865.000**	
2.8.6.2.01.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi kelurahan layak anak yang dilaksanakan				27 Keluraha n	170.865.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak	Anak	27 Keluraha n	120.865.000	DPMPPA
		Jumlah dokumen RAD Kota Layak Anak yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
		Jumlah Lembaga APSAI yang dibentuk				1 Lembaga							1 Lembaga		
		Jumlah sekolah yang terpilih mendapat penghargaan SRA Tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, atau sederajat				12 Sekolah							12 Sekolah		
2.8.6.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase forum anak yang aktif	40.63 persen		3.13 persen	9.38 persen	**137.100.000**						9.38 persen	**165.613.000**	
2.8.6.2.02.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Posyandu yang terpilih mendapat penghargaan lomba Posyandu				4 Kelompo k	45.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak	Lembaga layanan peningkata n kualitas hidup anak	4 Kelompok	46.350.000	DPMPPA
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan KHA				40 Orang							40 Orang		
2.8.6.2.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Festival Anak yang dilaksanakan				1 Kali	50.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak	Lembaga layanan peningkata n kualitas hidup anak	1 Kali	51.827.000	DPMPPA
		Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Forum Anak				75 Anak							75 Anak		
2.8.6.2.02.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga	Jumlah pelatihan kader Ketahanan Keluarga dan kader				135 Orang	41.200.000		Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	5. Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan	Lembaga layanan	135 Orang	67.436.000	DPMPPA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PATBM tingkat Kelurahan							Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak	peningkatan kualitas hidup anak			
2.8.7	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100 persen		0 persen	100 persen	**279.995.000**						100 persen	**54.095.000**	
2.8.7.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK Outcome)	100 Persen		0 Persen	100 Persen	**279.995.000**						100 Persen	**54.095.000**	
2.8.7.2.01.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Case Conference Kasus Anak yang dilaksanakan				48 Kali	279.995.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak	Anak	48 Kali	54.095.000	DPMPPA
		Jumlah pemberian konsultasi pengasuhan anak dan permasalahan keluarga				6 Kali							6 Kali		
		Jumlah pendampingan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan				13 Kali							13 Kali		
		Jumlah pendampingan orang tua dan anak beresiko/rentan yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah peserta Bimtek Program Roots				100 Orang							100 Orang		
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan manajemen kasus bagi media massa				30 Orang							30 Orang		
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**4.447.480.000**							**6.257.478.225**	
2.13.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**2.606.450.000**						100 persen	**4.040.215.225**	
2.13.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**17.500.000**						100 Persen	**20.450.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPPA	2 Dokumen	5.300.000	DPMPPA
2.13.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPPA	2 Dokumen	1.650.000	DPMPPA
2.13.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	13.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPPA	12 Bulan	13.500.000	DPMPPA
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 Dokumen							4 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen							5 Dokumen		
2.13.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**2.023.090.000**						100 Persen	**3.323.115.225**	
2.13.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 Bulan	1.989.640.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPPA	12 Bulan	3.274.965.225	DPMPPA
2.13.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	31.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPPA	12 Bulan	46.500.000	DPMPPA
2.13.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis	DPMPPA	1 Dokumen	1.650.000	DPMPPA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan			SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
2.13.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**9.500.000**						100 Persen	**9.500.000**	
2.13.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 Kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPPA	2 Kali	9.500.000	DPMPPA
2.13.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**219.810.000**						100 Persen	**219.800.000**	
2.13.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	1.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPPA	12 Bulan	1.250.000	DPMPPA
2.13.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	33.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPPA	12 Bulan	33.500.000	DPMPPA
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				7 Unit							7 Unit		
2.13.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPPA	12 Bulan	2.500.000	DPMPPA
2.13.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	24.060.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPPA	11 Bulan	24.050.000	DPMPPA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	6.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPPA	12 Bulan	6.000.000	DPMPPA
2.13.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPPA	12 Bulan	2.500.000	DPMPPA
2.13.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				159 Orang/Kali	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPPA	159 Orang/Kali	150.000.000	DPMPPA
2.13.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**146.000.000**						100 Persen	**187.400.000**	
2.13.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPPA	12 Bulan	2.400.000	DPMPPA
2.13.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	62.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPPA	12 Bulan	75.000.000	DPMPPA
2.13.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 Bulan	81.300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPPA	12 Bulan	110.000.000	DPMPPA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**190.550.000**						100 Persen	**279.950.000**	
2.13.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				18 Unit	59.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPPA	18 Unit	68.950.000	DPMPPA
2.13.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 Unit	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPPA	1 Unit	200.000.000	DPMPPA
2.13.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 Bulan	10.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPPA	12 Bulan	11.000.000	DPMPPA
2.13.3	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	100 persen		16,67 persen	33,33 persen	**1.017.237.000**						33,33 persen	**1.287.000.000**	
2.13.3.2.01	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI dan Kelurahan	11.11 persen		11.11 persen	11.11 persen	**1.017.237.000**						11.11 persen	**1.287.000.000**	
2.13.3.2.01.2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah jamban keluarga yang dibangun (karya bakti TNI)				0 Unit	1.017.237.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	stakeholder pembangunan kelurahan	0 Unit	1.287.000.000	DPMPPA
		Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan Karya Bakti TNI				0 Kelurahan							0 Kelurahan		
		Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan TMMD				3 Kelurahan							3 Kelurahan		
2.13.4	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	70,37 persen		51,85 persen	55,56 persen	**56.000.000**						55,56 persen	**56.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.4.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Persentase kinerja administrasi kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**56.000.000**						100 persen	**56.000.000**	
2.13.4.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi perkembangan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	56.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	kelurahan	1 Dokumen	56.000.000	DPMPPA
		Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba kelurahan				3 Kelurahan							3 Kelurahan		
2.13.5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	96,92 persen		95,97 persen	96,16 persen	**767.793.000**						96,16 persen	**874.263.000**	
2.13.5.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100 persen		100 persen	100 persen	**767.793.000**						100 persen	**874.263.000**	
2.13.5.2.01.2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi pemberdayaan LKK yang disusun				2 Dokumen	206.940.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Lembaga kemasyarakatan	2 Dokumen	266.415.000	DPMPPA
		Jumlah laporan pengolahan data aplikasi jogotonggo yang disusun				4 Dokumen							4 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	dan Masyarakat Hukum Adat														
2.13.5.2.01.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat				27 Orang	87.853.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Lembaga kemasyarakatan	27 Orang	172.875.000	DPMPPA
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator pemberdayaan				28 Orang							28 Orang		
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas LKK				162 Orang							162 Orang		
2.13.5.2.01.6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Inovator TTG				3 Inovator	102.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Lembaga kemasyarakatan	3 Inovator	121.323.000	DPMPPA
		Jumlah inovator TTG kelompok umum dan sekolah				0 Inovator							0 Inovator		
		Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba stand gelar karya TTG				3 Kelurahan							3 Kelurahan		
2.13.5.2.01.7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kelurahan yang terpilih menjadi pelaksana terbaik gotong royong masyarakat				3 Kelurahan	71.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Lembaga kemasyarakatan	3 Kelurahan	71.000.000	DPMPPA
2.13.5.2.01.9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan TP PKK Kota Pekalongan				12 Bulan	300.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Lembaga kemasyarakatan	12 Bulan	242.650.000	DPMPPA
		Jumlah kelompok bank sampah yang dibentuk				4 Kelompok							4 Kelompok		
		Jumlah Kelompok UP2K PKK yang terpilih mendapat penghargaan Lomba UP2K PKK				3 TP PKK Kelurahan							3 TP PKK Kelurahan		
		Jumlah peserta pelatihan ketrampilan				50 Orang							50 Orang		
		Jumlah Peserta Pelatihan TP3 PKK				86 Orang							86 Orang		
		Jumlah TP PKK Kelurahan yang dibina				8 TP PKK Kelurahan							8 TP PKK Kelurahan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Administrasi PKK				3 TP PKK Kelurahan							3 TP PKK Kelurahan		
		Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Beberan dan Simulasi Pola Asuh Anak				3 TP PKK Kelurahan							3 TP PKK Kelurahan		
		Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Hatinya PKK				3 TP PKK Kelurahan							3 TP PKK Kelurahan		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**25.139.813.000**							**28.694.086.000**	
2.15.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**18.019.573.000**						100 persen	**18.647.000.000**	
2.15.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**19.220.000**						100 persen	**22.500.000**	
2.15.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinhub	2 Dokumen	5.000.000	Dinhub
2.15.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinhub	2 dokumen	2.000.000	Dinhub
2.15.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi aset OPD				12 bulan	15.220.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi	Dinhub	12 bulan	15.500.000	Dinhub
		Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen					penerapan MRI di tingkat Kota		4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
2.15.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**5.034.881.000**						100 persen	**4.920.000.000**	
2.15.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	4.947.656.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinhub	12 bulan	4.837.000.000	Dinhub
2.15.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	85.725.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinhub	12 bulan	80.000.000	Dinhub
2.15.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinhub	1 dokumen	3.000.000	Dinhub
2.15.1.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen		0 persen	100 persen	**20.000.000**						100 persen	**42.000.000**	
2.15.1.2.03.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah bulan pelaksanaan monitoring BMD				12 bulan	20.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinhub	12 bulan	42.000.000	Dinhub

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**155.000.000**	
2.15.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam pameran Harteknas dan pekan batik				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinhub	2 kali	155.000.000	Dinhub
2.15.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**601.702.000**						100 persen	**790.500.000**	
2.15.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinhub	12 bulan	8.000.000	Dinhub
2.15.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	65.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinhub	12 bulan	130.000.000	Dinhub
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				10 unit							10 unit		
2.15.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	5.702.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinhub	12 bulan	5.000.000	Dinhub
2.15.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 bulan	298.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinhub	12 bulan	300.000.000	Dinhub
2.15.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan				12 bulan	138.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	Dinhub	12 bulan	195.000.000	Dinhub

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan		Kecamatan, Semua Kelurahan		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota		12 bulan		
2.15.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinhub	12 bulan	2.500.000	Dinhub
2.15.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				63 kali	87.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinhub	63 kali	150.000.000	Dinhub
2.15.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**11.652.270.000**						100 persen	**12.417.000.000**	
2.15.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	1.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinhub	12 bulan	2.000.000	Dinhub
2.15.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	11.351.373.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinhub	12 bulan	12.200.000.000	Dinhub
2.15.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	299.097.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinhub	12 bulan	215.000.000	Dinhub
		Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota				4 bulan/orang							4 bulan/orang		
2.15.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**682.000.000**						100 persen	**300.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin berkala				32 unit	266.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinhub	32 unit	250.000.000	Dinhub
2.15.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				3 unit	380.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinhub	3 unit	-	Dinhub
2.15.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	36.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinhub	12 bulan	50.000.000	Dinhub
2.15.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,44 ratio		0,35 ratio	0,4 ratio	**7.120.240.000**						0,4 ratio	**10.047.086.000**	
2.15.2.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	100 persen		100 persen	100 persen	**60.000.000**						100 persen	**60.000.000**	
2.15.2.2.01.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen survey lalu lintas yang disusun				2 Dokumen	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	LLAJ	2 Dokumen	60.000.000	Dinhub
2.15.2.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Jumlah penyediaan perlengkapan jalan	5 jenis		4 jenis	5 jenis	**2.872.500.000**						5 jenis	**5.334.722.000**	
2.15.2.2.02.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lampu Penerangan Jalan Umum bermeterisasi				147 unit	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	perlengkapan jalan	147 unit	970.000.000	Dinhub
		Jumlah Lokasi Penataan lampu PJU bermeterisasi				6 lokasi							6 lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.2.2.02.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pemasangan APILL ATCS				1 lokasi	1.469.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	perlengkapan jalan	1 lokasi	2.675.061.000	Dinhub
		Jumlah lokasi yang dibangun PJU				12 lokasi							12 lokasi		
		Jumlah pengecatan Marka Jalan				7610 m							7610 m		
2.15.2.2.02.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum				12 bulan	1.030.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	perlengkapan jalan	12 bulan	1.350.000.000	Dinhub
		Jumlah Lampu penerangan jalan umum di ganti LED				100 unit							100 unit		
2.15.2.2.02.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Kegaiatan Wahana Tata Nugraha				1 kegiatan	323.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	perlengkapan jalan	1 kegiatan	339.661.000	Dinhub
		Jumlah Lampu Aspek Yang Diadakan				2 Unit							2 Unit		
		Jumlah Lampu Flashing yang Dipelihara				57 Unit							57 Unit		
		Jumlah Mesin Control Yang Diadakan				2 Unit							2 Unit		
		Jumlah Pemeliharaan Rambu - Rambu dan Instalasi Lalu Lintas				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Reinstalasi Jaringan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah Traffic Light (APILL) Yang Dipelihara				13 Unit							13 Unit		
2.15.2.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Jumlah pembinaan dan pengawasan Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaran dan Pembangunan Fasilitas Parkir dilaksanakan	1080 kali		180 kali	180 kali	**340.000.000**						180 kali	**680.000.000**	
2.15.2.2.04.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan				1 Pekerjaan	340.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	fasilitas parkir	1 Pekerjaan	680.000.000	Dinhub
		Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Parkir				12 Bulan							12 Bulan		
		Pengadaan Gate Parkir				1 Pekerjaan							1 Pekerjaan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.2.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala (IKK Output)	94.08 persen		93.93 persen	93.97 persen	**954.940.000**						93.97 persen	**675.000.000**	
2.15.2.2.05.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat Cetak Bukti Lulus Uji (Printer Smart Card)				1 unit	700.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	kendaraan wajib uji	1 unit	400.000.000	Dinhub
		Brake Tester (Alat Uji Rem)				1 unit							1 unit		
2.15.2.2.05.4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Bukti Lulus Uji				6000 buah	150.695.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	kendaraan wajib uji	6000 buah	160.000.000	Dinhub
2.15.2.2.05.7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Honor Penguji Kendaraan Bermotor				12 bulan	104.245.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	kendaraan wajib uji	12 bulan	115.000.000	Dinhub
		Perawatan Alat Uji dan Kalibrasi				9 unit							9 unit		
		Perawatan Aplikasi				1 unit							1 unit		
2.15.2.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan kegiatan Managemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	98 persen		97 persen	98 persen	**2.835.800.000**						98 persen	**3.198.864.000**	
2.15.2.2.06.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Pelaksanaan Operasional ATCS				12 Bulan	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	Rekayasa lalu lintas	12 Bulan	642.864.000	Dinhub
		Jumlah CCTV ATCS yang diadakan				4 Unit							4 Unit		
2.15.2.2.06.3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pelajar pelopor				2 kegiatan	31.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	Rekayasa lalu lintas	2 kegiatan	50.000.000	Dinhub
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi keselamatan lalu lintas				3 kegiatan							3 kegiatan		
2.15.2.2.06.4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan	Jumlah kegiatan operasi laik jalan kendaraan bermotor				40 kali	2.375.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem	Rekayasa lalu lintas	40 kali	2.428.000.000	Dinhub

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengamanan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru				3 kegiatan		Semua Kelurahan			pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun		3 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pengamanan rutin dan insidentil				300 kali							300 kali		
		Jumlah kegiatan pengawalan				26 kali							26 kali		
		Jumlah perlintasan sebidang yang dipelihara				4 unit							4 unit		
		Jumlah tenaga operasional lalu lintas				480 orang/bulan							480 orang/bulan		
		Jumlah tenaga operasional perlintasan sebidang				396 orang/bulan							396 orang/bulan		
2.15.2.2.06.5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Forum LLAJ				3 Kegiatan	29.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	Rekayasa lalu lintas	3 Kegiatan	78.000.000	Dinhub
2.15.2.2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas (andalalin)	83 persen		75 persen	83 persen	**29.000.000**						83 persen	**43.500.000**	
2.15.2.2.07.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah kegiatan fasilitasi penilaian Andalalin				4 kegiatan	29.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	dinhub	4 kegiatan	43.500.000	Dinhub
2.15.2.2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan	12 kegiatan		2 kegiatan	2 kegiatan	**28.000.000**						2 kegiatan	**55.000.000**	
2.15.2.2.08.4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Awak Angkutan Umum yang Dibina				30 orang	18.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	LLAJ di jalan	30 orang	45.000.000	Dinhub

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.2.2.08.5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Pengusaha Angkutan Umum yang Dibina				20 orang	10.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun	LLAJ di jalan	20 orang	10.000.000	Dinhub
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**12.330.522.000**							**13.905.685.000**	
2.16.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**4.419.052.000**						100 persen	**5.285.014.000**	
2.16.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**35.750.000**						100 persen	**39.650.000**	
2.16.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokumen	10.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkominfo	2 dokumen	11.400.000	Dinkominfo
2.16.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkominfo	2 dokumen	1.750.000	Dinkominfo
2.16.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				2 dokumen	23.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkominfo	2 dokumen	26.500.000	Dinkominfo
2.16.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**3.078.342.000**						100 persen	**3.699.800.000**	
2.16.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	3.026.842.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	Dinkominfo	12 bulan	3.645.000.000	Dinkominfo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Barat, Podosugih		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
2.16.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	50.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkominfo	12 Bulan	53.050.000	Dinkominfo
2.16.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	: jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkominfo	2 dokumen	1.750.000	Dinkominfo
2.16.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**10.075.000**	
2.16.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	mlah keikutsertaan dalam pameran hakteknas dan karnaval batik				2 event	9.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkominfo	2 event	10.075.000	Dinkominfo
2.16.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**404.540.000**						100 persen	**498.589.000**	
2.16.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	umlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkominfo	12 Bulan	5.300.000	Dinkominfo
2.16.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	131.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkominfo	12 Bulan	111.500.000	Dinkominfo
		jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				15 unit							15 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 Bulan	110.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkominfo	12 Bulan	123.000.000	Dinkominfo
2.16.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkominfo	12 bulan	44.000.000	Dinkominfo
2.16.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	13.940.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkominfo	12 bulan	14.789.000	Dinkominfo
2.16.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				250 ok	104.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkominfo	250 ok	200.000.000	Dinkominfo
2.16.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**505.300.000**						100 persen	**548.800.000**	
2.16.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	JumlahJumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkominfo	12 bulan	2.500.000	Dinkominfo
2.16.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	405.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkominfo	12 Bulan	442.500.000	Dinkominfo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	97.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkominfo	12 bulan	103.800.000	Dinkominfo
2.16.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**385.620.000**						100 persen	**488.100.000**	
2.16.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				27 unit	196.620.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkominfo	27 unit	208.600.000	Dinkominfo
2.16.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				3 gedung	89.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkominfo	3 gedung	150.000.000	Dinkominfo
2.16.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 Bulan	100.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkominfo	12 Bulan	129.500.000	Dinkominfo
2.16.2	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 persen		100 persen	100 persen	**4.540.770.000**						100 persen	**5.295.171.000**	
2.16.2.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Daerah	92,50 persen		80 persen	82 persen	**4.540.770.000**						82 persen	**5.295.171.000**	
2.16.2.2.01.2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah aduan masyarakat yang terlayani melalui SP4N				12 Bulan	12.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis	Warga Kota Pekalongan	12 Bulan	50.000.000	Dinkominfo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyelenggaraan call center 112				12 Bulan		Semua Kelurahan			SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota		12 Bulan		
2.16.2.2.01.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah jam siaran RKB				18 jam	106.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Warga Kota Pekalongan	18 jam	3.425.500.000	Dinkominfo
		Jumlah jam tayangan Batik TV				10 jam							10 jam		
2.16.2.2.01.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah jam siaran RKB				18 jam	2.852.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Warga Kota Pekalongan	18 jam	113.087.000	Dinkominfo
		Jumlah jam tayangan Batik TV				10 jam							10 jam		
2.16.2.2.01.6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah layanan internet keliling yang diselenggarakan				40 kali	507.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Warga Kota Pekalongan	40 kali	455.020.000	Dinkominfo
		Jumlah penyelenggaraan pameran KIP (Pekan Informasi Daerah)				1 kali							1 kali		
		jumlah siaran keliling Mobil M-Pustika yang dilaksanakan				30 kali							30 kali		
2.16.2.2.01.7	Layanan Hubungan Media	Jumlah advertorial yang dimuat di media massa dalam setahun				3 kali	787.770.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Warga Kota Pekalongan	3 kali	806.814.000	Dinkominfo
		Jumlah Liputan Press Conference yang diselenggarakan				4 kali							4 kali		
2.16.2.2.01.8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah bulan pendampingan FK Metra (Forum Komunikasi MEdia Tradisional				12 Bulan	33.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Warga Kota Pekalongan	12 Bulan	50.000.000	Dinkominfo
		Jumlah bulan pendampingan KIM (Kelembagaan Infoprmasi Komunikasi Publik				12 Bulan							12 Bulan		
2.16.2.2.01.9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah FGD yang diselenggarakan				3 kali	220.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Warga Kota Pekalongan	3 kali	344.750.000	Dinkominfo
		Jumlah jasa konsultansi penanganan krisis komunikasi publik				1 dokumen							1 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.2.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Press Conference yang diadakan				12 kali	22.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Warga Kota Pekalongan	12 kali	50.000.000	Dinkominfo
		Jumlah Press Release yang diadakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah Press Room yang diadakan				12 kali							12 kali		
2.16.3	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,30 indeks		2,80 indeks	2,90 indeks	**3.370.700.000**						2,90 indeks	**3.325.500.000**	
2.16.3.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase unit kerja yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo (IKK Output)	66.06 persen		56.97 persen	58.79 persen	**2.147.700.000**						58.79 persen	**2.077.500.000**	
2.16.3.2.01.2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan dalam layanan Pengembangan dan Operasionalisasi Domain dan Subdomain Pemerintah Kota Pekalongan				12 Bulan	30.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	OPD Kota Pekalongan	12 Bulan	32.500.000	Dinkominfo
2.16.3.2.01.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan dilakukan pemeliharaan jaringan Batik.Net				12 bulan	2.117.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	OPD Kota Pekalongan	12 bulan	2.045.000.000	Dinkominfo
		Jumlah Kapasitas Bandwidth internet untuk layanan Batik.Net				1500 Mbps							1500 Mbps		
		Jumlah pembangunan titik jaringan berbasis Fiber Optic				4 titik							4 titik		
2.16.3.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (IKK Output)	51,40 persen		4.67 persen	9.35 persen	**1.223.000.000**						9.35 persen	**1.248.000.000**	
2.16.3.2.02.2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen/Domain yang tersusun				2 dokumen	350.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	OPD Kota Pekalongan	2 dokumen	190.000.000	Dinkominfo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.3.2.02.3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah partisi ruang DC/DRC				1 partisi	99.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	OPD Kota Pekalongan	1 partisi	200.000.000	Dinkominfo
		Jumlah pemeliharaan peralatan DC dan DRC				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah penyelenggaraan capacity building tehnik pelayanan jaringan				3 kali							3 kali		
		Jumlah peserta sertifikasi DC/DRC				1 orang							1 orang		
2.16.3.2.02.7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah bulan Pengembangan, Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi SPBE				12 Bulan	429.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	OPD Kota Pekalongan	12 Bulan	415.000.000	Dinkominfo
2.16.3.2.02.9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Fasilitasi kegiatan yang mendukung Komunitas TIK				3 kali	275.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	OPD Kota Pekalongan	3 kali	300.000.000	Dinkominfo
		Jumlah Portal Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan				1 aplikasi							1 aplikasi		
2.16.3.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pelatihan TIK bagi ASN dan Masyarakat				8 kali	39.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	OPD Kota Pekalongan	8 kali	93.000.000	Dinkominfo
2.16.3.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Bulan diadakannya Evaluasi Ekosistem SPBE				4 Bulan	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	OPD Kota Pekalongan	4 Bulan	50.000.000	Dinkominfo
		Jumlah Bulan diadakannya monitoring Ekosistem SPBE				12 bulan							12 bulan		
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**110.000.000**							**120.000.000**	
2.20.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	80,00 persen		66,00 persen	100 persen	**110.000.000**						100 persen	**120.000.000**	
2.20.2.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen data statistik sektoral yang disusun	12 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	**110.000.000**						2 dokumen	**120.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.20.2.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	: jumlah aplikasi satu data yang dikembangkan				1 aplikasi	110.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	OPD Kota Pekalongan	1 aplikasi	120.000.000	Dinkominfo
		jumlah dokumen data SDTD yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		jumlah dokumen indikator database TIK yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**144.000.000**							**210.000.000**	
2.21.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	3,74 persen		0,93 persen	1,87 persen	**144.000.000**						1,87 persen	**210.000.000**	
2.21.2.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik	56.07 persen		9.35 persen	9.35 persen	**116.000.000**						9.35 persen	**165.000.000**	
2.21.2.2.01.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	umlah kebijakan tata kelola dan manajemen kemanan informasi				2 dokumen	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkominfo	2 dokumen	50.000.000	Dinkominfo
2.21.2.2.01.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah leaflet promosi keamanan informasi				4 rim	30.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinkominfo	4 rim	65.000.000	Dinkominfo
		Jumlah lisensi Endpoint Security (Antivirus)				25 lisensi							25 lisensi		
		Jumlah lisensi Sertifikat Elektronik TLS *.pekalongankota.go.id				1 lisensi							1 lisensi		
		Jumlah penilaian mandiri Indeks Keamanan Informasi				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah sosialisasi Keamanan Informasi				1 kegiatan							1 kegiatan		
2.21.2.2.01.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Audit TIK				2 kegiatan	71.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	Dinkominfo	2 kegiatan	50.000.000	Dinkominfo
		Jumlah Sistem Elektronik yang telah memanfaatkan sertifikat elektronik				10 buah							10 buah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pelatihan teknis keamanan informasi dan teknologi informasi				1 kegiatan		Kelurahan			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota		1 kegiatan		
2.21.2.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelancaran pengiriman dan penerimaan naskah dinas melalui jaring komunikasi sandi	100 persen		100 persen	100 persen	**28.000.000**						100 persen	**45.000.000**	
2.21.2.2.02.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah naskah dinas yang dikirim / diterima				74 artikel	28.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	OPD Kota Pekalongan	74 artikel	45.000.000	Dinkominfo
		Jumlah perangkat keamanan TIK khusus berupa peralatan sandi untuk Jairng Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Daerah				2 unit							2 unit		
		Jumlah prosedur persandian				2 dokumen							2 dokumen		
		Penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang persandian				1 dokumen							1 dokumen		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**7.309.016.000**							**11.098.959.900**	
2.18.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**5.776.337.000**						100 persen	**8.269.743.800**	
2.18.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**22.450.000**						100 Persen	**34.000.000**	
2.18.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja/Restra disusun				2 dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPTSP	2 dokumen	12.000.000	DPMPTSP
2.18.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun				1 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis	DPMPTSP	1 dokumen	2.000.000	DPMPTSP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan			SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
2.18.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	18.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPTSP	4 dokumen	20.000.000	DPMPTSP
		Jumlah dokumen SAKIP ynag disusun (Penetapan dan Perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemnatauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun				1 laporan							1 laporan		
2.18.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**3.533.979.000**						100 Persen	**3.890.361.000**	
2.18.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	3.483.879.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPTSP	12 bulan	3.835.361.000	DPMPTSP
2.18.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	48.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPTSP	12 bulan	52.000.000	DPMPTSP
2.18.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPTSP	1 dokumen	3.000.000	DPMPTSP
2.18.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen		Persen	100 Persen	**9.500.000**						100 Persen	**52.390.800**	
2.18.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis	DPMPTSP	2 kali	52.390.800	DPMPTSP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah keikutsertaan dalam pameran Harteknas dan Karnaval Batik				0 kali		Semua Kelurahan			SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota		0 kali		
2.18.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**441.485.000**						100 Persen	**973.782.000**	
2.18.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPTSP	12 bulan	3.500.000	DPMPTSP
2.18.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	188.261.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPTSP	12 bulan	703.782.000	DPMPTSP
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				5 unit							5 unit		
2.18.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPTSP	12 bulan	3.500.000	DPMPTSP
2.18.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	69.284.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPTSP	11 bulan	70.000.000	DPMPTSP
2.18.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPTSP	12 bulan	70.000.000	DPMPTSP
2.18.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	DPMPTSP	12 bulan	3.000.000	DPMPTSP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
2.18.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				60 kali	116.440.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPTSP	60 kali	120.000.000	DPMPTSP
2.18.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**576.749.000**						100 Persen	**806.000.000**	
2.18.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat				12 bulan	12.800.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPTSP	12 bulan	6.000.000	DPMPTSP
2.18.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	376.520.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPTSP	12 bulan	600.000.000	DPMPTSP
2.18.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	187.429.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPTSP	12 bulan	200.000.000	DPMPTSP
2.18.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**1.192.174.000**						100 Persen	**2.513.210.000**	
2.18.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				12 buah	128.964.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPTSP	12 buah	150.000.000	DPMPTSP
2.18.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan/gedung terpelihara				1 buah	1.000.000.000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	DPMPTSP	1 buah	2.300.000.000	DPMPTSP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
2.18.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	63.210.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPMPTSP	12 bulan	63.210.000	DPMPTSP
2.18.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	**109.463.000**						1 dokumen	**207.441.000**	
2.18.2.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Peraturan penanaman modal yang disusun	6 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	**38.737.000**						1 dokumen	**127.441.000**	
2.18.2.2.01.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	audit ISO				1 dokumen	38.737.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	DPMPTSP	1 dokumen	127.441.000	DPMPTSP
		jumlah peraturan penanaman modal disusun				1 peraturan							1 peraturan		
2.18.2.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Peta potensi Penanaman Modal yang disusun	5 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	**70.726.000**						1 dokumen	**80.000.000**	
2.18.2.2.02.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil investasi disusun				1 dokumen	70.726.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	DPMPTSP	1 dokumen	80.000.000	DPMPTSP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen		50,00 persen	100 persen	**45.000.000**						100 persen	**225.000.000**	
2.18.3.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	11 Kegiatan		1 Kegiatan	2 Kegiatan	**45.000.000**						2 Kegiatan	**225.000.000**	
2.18.3.2.01.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BIMTEK dan Sosialisasi Kemitraan Penanaman Modal yang dilaksanakan				2 Kali	45.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	DPMPTSP	2 Kali	225.000.000	DPMPTSP
		Jumlah bulan Pengelolaan Website				12 Bulan							12 Bulan		
		Penyelenggaraan Pameran Investasi Penanaman Modal				2 Kali							2 Kali		
2.18.4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2500 dokumen		2500 dokumen	2500 dokumen	**880.000.000**						2500 dokumen	**1.614.975.100**	
2.18.4.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah laporan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang disusun	bulan		bulan	12 bulan	**880.000.000**						12 bulan	**1.614.975.100**	
2.18.4.2.01.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah laporan izin				1 laporan	540.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	DPMPTSP	1 laporan	750.000.000	DPMPTSP
2.18.4.2.01.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman	jumlah bulan pemenuhan komitmen perizinan				12 bulan	200.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun	DPMPTSP	12 bulan	500.000.000	DPMPTSP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Modal							Kelurahan		Berkeadilan	masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal				
2.18.4.2.01.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat				2 dokumen	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	DPMPTSP	2 dokumen	307.375.000	DPMPTSP
		Jumlah laporan pengaduan perizinan dan non perizinan				12 laporan							12 laporan		
		Jumlah sosialisasi penanaman modal dan pelayanan perizinan				2 kali							2 kali		
2.18.4.2.01.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah dokumen yang dibuat				1 dok	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	DPMPTSP	1 dok	57.600.100	DPMPTSP
		Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan				20 kali							20 kali		
2.18.5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Nilai Invetasi Baru pertahun	40,514 Miliar Rupiah		6,42 Miliar Rupiah	6,55 Miliar Rupiah	**378.216.000**						6,55 Miliar Rupiah	**331.800.000**	
2.18.5.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah perusahaan yang dikunjungi dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal	848 Perusahaan		110 Perusahaan	121 Perusahaan	**378.216.000**						121 Perusahaan	**331.800.000**	
2.18.5.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan Pemantauan				100 Perusahaan	55.820.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database	Warga Kota Pekalongan	100 Perusahaan	90.820.000	DPMPTSP
									Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Non Fisik		ekonomi kreatif berbasis potensi lokal				
2.18.5.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				4 Kali	217.016.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Warga Kota Pekalongan	4 Kali	123.600.000	DPMPTSP
									Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2.18.5.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				150 Kali	105.380.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Warga Kota Pekalongan	150 Kali	117.380.000	DPMPTSP
									Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2.18.6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen		100 persen	100 persen	**120.000.000**						100 persen	**450.000.000**	
2.18.6.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Data dan informasi perizinan dan non perizinan kab/kota yang disajikan	34 aplikasi		4 aplikasi	6 aplikasi	**120.000.000**						6 aplikasi	**450.000.000**	
2.18.6.2.01.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah bulan pengelolaan aplikasi				12 bulan	120.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	DPMPTSP	12 bulan	450.000.000	DPMPTSP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**565.900.000**							**-**	
2.23.2	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	16,58 indeks		15,77 indeks	15,93 indeks	**565.900.000**						15,93 indeks	**-**	
2.23.2.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (IKK Output)	3.33 persen		0 persen	0.67 persen	**395.900.000**						0.67 persen	**-**	
2.23.2.2.01.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Bertambahnya konten digital perpustakaan / ePustaka iPekalongankota				800 konten	89.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	perpustakaan	800 konten	-	Dinarpus
2.23.2.2.01.4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan dan Layanan diluar jam kerja				10 bulan	25.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	perpustakaan	10 bulan	-	Dinarpus
2.23.2.2.01.6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan perpustakaan binaan				20 perpustakaan	58.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	perpustakaan	20 perpustakaan	-	Dinarpus
2.23.2.2.01.7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Perpustakaan yang disinkronkan dengan UCS Kota Pekalongan dan Pojok Online				5 perpustakaan	113.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	perpustakaan	5 perpustakaan	-	Dinarpus

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.23.2.2.01.9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah buku koleksi perpustakaan umum daerah (buku naskah & ebook) yang diadakan				300 buku	110.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	perpustakaan	300 buku	-	Dinarpus
		Jumlah sarana prasarana bahan informasi perpustakaan yang diadakan				1 paket							1 paket		
2.23.2.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kenaikan Nilai Budaya Baca (Jumlah Koleksi Dipinjam dibagi Jumlah koleksi Perpusda x 100)	34,45 persen		32.78 persen	33.1 persen	**170.000.000**						33.1 persen	**-**	
2.23.2.2.02.1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Lomba minat baca				1 kegiatan	25.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	Warga Kota Pekalongan	1 kegiatan	-	Dinarpus
2.23.2.2.02.2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang difasilitasi sarana membaca di ruang publik				2 lokasi	115.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	Warga Kota Pekalongan	2 lokasi	-	Dinarpus
2.23.2.2.02.4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Penyelenggaraan Kegiatan Literasi				2 kegiatan	30.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pningk akss pnddkn mll ktrjangk biay pnddkn&mningk penget masy mll ltrsi srt pningk prn srt masy dlm mnmukenali ank tdk brsklh utk dpt didrng kmbl mngkti pnddkn baik jlr frml,nonfrml,/pun lemb pnddkn keagmaan dlm upy mningk kualts&religiusitas wrg	Warga Kota Pekalongan	2 kegiatan	-	Dinarpus
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**3.068.165.000**							**120.000.000**	
2.24.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**2.627.169.000**						100 persen	**100.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.24.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.000.000**						100 persen	**-**	
2.24.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinarpus	2 dokumen	-	Dinarpus
		Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
2.24.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinarpus	2 dokumen	-	Dinarpus
2.24.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinarpus	4 dokumen	-	Dinarpus
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
2.24.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**1.885.773.000**						100 persen	**-**	
2.24.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	1.852.273.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinarpus	12 bulan	-	Dinarpus
2.24.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	32.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinarpus	12 bulan	-	Dinarpus

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.24.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinarpus	1 dokumen	-	Dinarpus
2.24.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**-**	
2.24.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				3 event	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinarpus	3 event	-	Dinarpus
2.24.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**89.500.000**						100 persen	**-**	
2.24.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	2.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinarpus	12 bulan	-	Dinarpus
2.24.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	22.604.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinarpus	12 bulan	-	Dinarpus
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				2 unit							2 unit		
2.24.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	2.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinarpus	12 bulan	-	Dinarpus
2.24.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 bulan	20.396.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	Dinarpus	12 bulan	-	Dinarpus

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
2.24.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinarpus	12 bulan	-	Dinarpus
2.24.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangundangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinarpus	12 bulan	-	Dinarpus
2.24.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				40 kali	35.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinarpus	40 kali	-	Dinarpus
2.24.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah dokumen DE Gedung perpustakaan	dokumen		dokumen	1 dokumen	**100.000.000**						1 dokumen	**100.000.000**	
2.24.1.2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah DE yang disusun				1 dokumen	100.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinarpus	1 dokumen	100.000.000	Dinarpus
2.24.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**385.916.000**						100 persen	**-**	
2.24.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	1.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinarpus	12 bulan	-	Dinarpus
2.24.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	259.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	Dinarpus	12 bulan	-	Dinarpus

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Utara, Panjang Wetan		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
2.24.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	124.966.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinarpus	12 bulan	-	Dinarpus
2.24.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**147.480.000**						100 persen	**-**	
2.24.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				12 unit	62.380.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinarpus	12 unit	-	Dinarpus
2.24.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				2 unit	64.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinarpus	2 unit	-	Dinarpus
2.24.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	21.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinarpus	12 bulan	-	Dinarpus
2.24.2	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	66,67 persen		33,33 persen	40 persen	**274.976.000**						40 persen	**-**	
2.24.2.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang di Tata Arsip Dinamisnya	32.26 persen		32.26 persen	32.26 persen	**207.031.000**						32.26 persen	**-**	
2.24.2.2.01.2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah berkas arsip yang didata dan ditata				1000 berkas	182.031.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	Arsip dinamis daerah	1000 berkas	-	Dinarpus

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
2.24.2.2.01.3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang diaudit dan dimonitoring				30 OPD	25.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Arsip dinamis daerah	30 OPD	-	Dinarpus
2.24.2.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Jumlah Arsip Statis OPD yang diserahkan ke Depo Arsip	20 persen		10 persen	12 persen	**39.885.000**						12 persen	**-**	
2.24.2.2.02.2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah pemeliharaan arsip dalam 1 tahun				12 kali	39.885.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Arsip statis daerah	12 kali	-	Dinarpus
2.24.2.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Pemahaman Pengelola Arsip tentang Kearsipan	90 persen		50 persen	60 persen	**28.060.000**						60 persen	**-**	
2.24.2.2.03.2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inhouse				1 kegiatan	28.060.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinarpus	1 kegiatan	-	Dinarpus
		Jumlah Pameran kearsipan yang dilaksanakan				1 pameran							1 pameran		
		Jumlah regulasi kearsipan yang diterbitkan				1 peraturan							1 peraturan		
		Jumlah sosialisasi kearsipan yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
2.24.3	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100 persen		100 persen	100 persen	**156.020.000**						100 persen	**10.000.000**	
2.24.3.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di**	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK (IKK Output)	100 persen		100 persen	100 persen	**79.020.000**						100 persen	**-**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Bawah 10 (sepuluh) Tahun														
2.24.3.2.01.1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dinilai dan ditetapkan untuk dimusnahkan				5000 berkas	54.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Arsip daerah	5000 berkas	-	Dinarpus
		Jumlah perangkat daerah yang melakukan pemusnahan arsip				7 OPD							7 OPD		
2.24.3.2.01.2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan				4500 berkas	24.720.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Arsip daerah	4500 berkas	-	Dinarpus
2.24.3.2.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	Penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab/kota yang sesuai NSPK (IKK Output)	600 arsip		100 arsip	100 arsip	**10.000.000**						100 arsip	**10.000.000**	
2.24.3.2.03.1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung yang sesuai NSPK				1000 arsip	10.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Arsip daerah	1000 arsip	10.000.000	Dinarpus
2.24.3.2.04	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	Persentase Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip hasil alih media kabupaten/kota	100 persen		100 persen	100 persen	**67.000.000**						100 persen	**-**	
2.24.3.2.04.2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip hasil alihmedia yang diautentikasi				500 berkas	67.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Arsip daerah	500 berkas	-	Dinarpus
		Jumlah perangkat daerah yang melakukan pemusnahan arsip				7 OPD							7 OPD		
2.24.4	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	100 persen		100 persen	100 persen	**10.000.000**						100 persen	**10.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.24.4.2.01	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan SOP penggunaan arsip tertutup sampai dengan tahun N	100 Tahun		0 Tahun	100 Tahun	**10.000.000**						100 Tahun	**10.000.000**	
2.24.4.2.01.1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Ijin Penggunaan arsip tertutup yang disusun				1 SOP	10.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Arsip daerah	1 SOP	10.000.000	Dinarpus
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**9.487.151.000**							**10.000.800.000**	
3.25.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**5.151.339.500**						100 persen	**5.349.800.000**	
3.25.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**17.000.000**						100 Persen	**34.100.000**	
3.25.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dok	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DKP	2 dok	11.450.000	DKP
		Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun				1 dok							1 dok		
3.25.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dok	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DKP	2 dok	1.600.000	DKP
3.25.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	13.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DKP	12 bulan	21.050.000	DKP
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dok							4 dok		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dok							2 dok		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dok							5 dok		
3.25.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**4.259.676.000**						100 Persen	**3.963.700.000**	
3.25.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	4.192.926.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DKP	12 bulan	3.900.000.000	DKP
3.25.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	65.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DKP	12 bulan	62.000.000	DKP
3.25.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DKP	1 dokumen	1.700.000	DKP
3.25.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**9.500.000**						100 Persen	**7.000.000**	
3.25.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran, Hakteknas dan Karnaval batik				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DKP	2 kali	7.000.000	DKP
		Jumlah pakaian dinas yang diadakan (Opsional, tidak semua OPD)				30 buah							30 buah		
3.25.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**250.532.000**						100 Persen	**348.000.000**	
3.25.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 kali	7.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	DKP	12 kali	10.000.000	DKP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
3.25.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	60.976.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DKP	12 bulan	65.000.000	DKP
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				6 unit							6 unit		
3.25.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	4.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DKP	12 bulan	-	DKP
3.25.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	55.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DKP	11 bulan	60.000.000	DKP
3.25.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	8.056.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DKP	12 bulan	10.000.000	DKP
3.25.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DKP	12 bulan	3.000.000	DKP
3.25.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				200 Orang	111.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DKP	200 Orang	200.000.000	DKP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.25.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**325.577.500**						100 Persen	**352.000.000**	
3.25.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	1.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DKP	12 bulan	2.000.000	DKP
3.25.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	162.377.500	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DKP	12 bulan	200.000.000	DKP
3.25.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	161.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DKP	12 bulan	150.000.000	DKP
3.25.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**289.054.000**						100 Persen	**645.000.000**	
3.25.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				25 Unit	101.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DKP	25 Unit	100.000.000	DKP
3.25.1.2.09.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				2 Unit	17.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DKP	2 Unit	20.000.000	DKP
3.25.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	145.480.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis	DKP	12 bulan	500.000.000	DKP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Wetan			SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
3.25.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	25.074.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DKP	12 bulan	25.000.000	DKP
3.25.3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1,00 persen		1,00 persen	1 persen	**3.531.692.500**						1 persen	**3.651.000.000**	
3.25.3.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Sarpras Perikanan Tangkap yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 persen		5 persen	5 persen	**865.000.000**						5 persen	**782.000.000**	
3.25.3.2.01.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data yang tersedia				1 dokumen	35.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	nelayan	1 dokumen	35.000.000	DKP
3.25.3.2.01.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang diadakan				1 unit	830.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	nelayan	1 unit	747.000.000	DKP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.25.3.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Nelayan Kecil yang dibina	10 persen		10 persen	10 persen	**184.760.000**						10 persen	**105.000.000**	
3.25.3.2.02.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang difasilitasi sarana dan prasarana				1 kelompok	145.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	nelayan	1 kelompok	45.000.000	DKP
		Jumlah nelayan yang dilatih				30 Orang							30 Orang		
3.25.3.2.02.2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok yang dibina				4 kelompok	39.760.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	nelayan	4 kelompok	60.000.000	DKP
3.25.3.2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Bersumber dari TPI	6,15 persen		1 persen	1 persen	**2.470.932.500**						1 persen	**2.750.000.000**	
3.25.3.2.03.2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Bulan sewa gedung dan pelataran TPI				12 bulan	2.470.932.500	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Tempat Pelelangan Ikan	12 bulan	2.750.000.000	DKP
3.25.3.2.04	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan**	Persentase jumlah permohonan kapal yang didaftarkan	48.33 persen		40 persen	41.67 persen	**11.000.000**						41.67 persen	**14.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
3.25.3.2.04.2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Pelayanan Pendaftaran yang dilayani				70 kapal	11.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	stakeholder perikanan	70 kapal	14.000.000	DKP
3.25.4	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	6.15 persen		1 persen	1 persen	**281.539.000**						1 persen	**690.000.000**	
3.25.4.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Persentase Pembudidaya yang dibina	79.36 persen		38.66 persen	50.29 persen	**76.200.000**						50.29 persen	**130.000.000**	
3.25.4.2.02.1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya yang dibina				10 kelompok	35.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Pembudidaya ikan	10 kelompok	60.000.000	DKP
3.25.4.2.02.2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kategori lomba kinerja Pokdakan dan Poklasar yang dilaksanakan				4 kategori	41.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Pembudidaya ikan	4 kategori	70.000.000	DKP
3.25.4.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Persentase ketercapaian aspek-aspek pengelolaan pembudidayaan ikan	100 persen		100 persen	100 persen	**205.339.000**						100 persen	**560.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.25.4.2.04.1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data bidang budidaya				1 dokumen	10.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Pembudidaya ikan	1 dokumen	30.000.000	DKP
3.25.4.2.04.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasrana Pembudidaya yang tersedia				1 Pekerjaan	73.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Pembudidaya ikan	1 Pekerjaan	300.000.000	DKP
3.25.4.2.04.4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bintek Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB)/ Cara Pembenihan Ikan Baim(CPIB) yang diselenggarakan				2 Kali	23.035.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Pembudidaya ikan	2 Kali	50.000.000	DKP
3.25.4.2.04.5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pengadaan pakan ikan (induk & benih)				1 jenis	99.304.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Pembudidaya ikan	1 jenis	180.000.000	DKP
3.25.6	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	2,00 pelaku usaha		2 pelaku usaha	2 pelaku usaha	**522.580.000**						2 pelaku usaha	**310.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.25.6.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	70 persen		0 persen	70 persen	**522.580.000**						70 persen	**310.000.000**	
3.25.6.2.03.2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi pelaku usaha perikanan yang diberikan				1 unit	522.580.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	pelaku usaha perikanan	1 unit	310.000.000	DKP
		Jumlah lomba olahan ikan yang diadakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah pelaksanaan gemar makan ikan				1 kali							1 kali		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**11.573.045.000**							**11.000.336.500**	
2.19.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**5.033.733.000**						100 persen	**5.626.826.000**	
2.19.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**22.450.000**						100 Persen	**31.774.000**	
2.19.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja yang disusun				2 Dokumen	2.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinparbudpora	2 Dokumen	11.072.000	Dinparbudpora
		Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Dearah yang Disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
2.19.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinparbudpora	2 Dokumen	1.699.000	Dinparbudpora
2.19.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	18.450.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	Dinparbudpora	12 Bulan	19.003.000	Dinparbudpora

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun				4 Dokumen		Kecamatan, Semua Kelurahan		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota		4 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen							5 Dokumen		
2.19.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**4.110.813.000**						100 Persen	**4.778.046.000**	
2.19.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	4.028.863.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinparbudpora	12 Bulan	4.693.484.000	Dinparbudpora
2.19.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	80.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinparbudpora	12 Bulan	82.863.000	Dinparbudpora
2.19.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun`				1 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinparbudpora	1 Dokumen	1.699.000	Dinparbudpora
2.19.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**9.500.000**						100 Persen	**9.785.000**	
2.19.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik				2 Kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinparbudpora	2 Kali	9.785.000	Dinparbudpora
2.19.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**327.030.000**						100 Persen	**248.714.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.19.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinparbudpora	12 Bulan	7.725.000	Dinparbudpora
2.19.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	110.055.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinparbudpora	12 Bulan	37.564.000	Dinparbudpora
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				6 Unit							6 Unit		
2.19.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinparbudpora	12 Bulan	10.300.000	Dinparbudpora
2.19.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	55.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinparbudpora	11 Bulan	41.200.000	Dinparbudpora
2.19.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan				12 Bulan	19.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinparbudpora	12 Bulan	20.600.000	Dinparbudpora
2.19.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	2.175.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinparbudpora	12 Bulan	2.575.000	Dinparbudpora
2.19.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah				155 Orang/Kali	125.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	Dinparbudpora	155 Orang/Kali	128.750.000	Dinparbudpora

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
2.19.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**393.000.000**						100 Persen	**380.482.000**	
2.19.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinparbudpora	12 Bulan	2.472.000	Dinparbudpora
2.19.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	270.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinparbudpora	12 Bulan	276.040.000	Dinparbudpora
2.19.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor				12 Bulan	120.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinparbudpora	12 Bulan	101.970.000	Dinparbudpora
2.19.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**170.940.000**						100 Persen	**178.025.000**	
2.19.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				17 Unit	70.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinparbudpora	17 Unit	77.085.000	Dinparbudpora
2.19.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 Unit	80.940.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinparbudpora	1 Unit	80.340.000	Dinparbudpora
2.19.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung				12 Bulan	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	Dinparbudpora	12 Bulan	20.600.000	Dinparbudpora

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kantor atau Bangunan Lainnya	kantor						Kecamatan, Semua Kelurahan		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
2.19.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	95,24 persen		91,95 persen	92,93 persen	**1.639.950.000**						92,93 persen	**1.551.054.000**	
2.19.2.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (IKK Outcome)	0.99 Persen		0.39 Persen	0.51 Persen	**994.950.000**						0.51 Persen	**1.046.054.000**	
2.19.2.2.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Paskibra Kota Pekalongan yang dibina				71 Orang	475.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Pemuda	71 Orang	591.000.000	Dinparbudpora
2.19.2.2.01.8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah generasi muda yang dibina				300 Orang	519.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Pemuda	300 Orang	455.054.000	Dinparbudpora
		Jumlah kegiatan kepemudaan yang difasilitasi				2 Kegiatan							2 Kegiatan		
		Jumlah Kejuaraan Lomba Kepemudaan				2 Kegiatan							2 Kegiatan		
		Jumlah pemuda yang ikut kemah bakti pemuda				300 Orang							300 Orang		
		Jumlah pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan				300 Orang							300 Orang		
		Jumlah peserta yang dikirim mengikuti upacara tingkat provinsi				30 Orang							30 Orang		
2.19.2.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat**	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan (IKK	0,621 persen		0,259 persen	0,385 persen	**645.000.000**							**505.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Daerah Kabupaten/Kota	*Outcome*)													
2.19.2.2.02.2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah faslitasi Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota				12 kegiatan	645.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota		12 kegiatan	505.000.000	Dinparbudpora
2.19.3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	42,86 persen		11,43 persen	28,57 persen	**4.899.362.000**						28,57 persen	**3.822.456.500**	
2.19.3.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan sarpras olahraga pada jenjang pendidikan	80.95 Persen		47.62 Persen	57.14 Persen	**1.455.200.000**						57.14 Persen	**2.488.482.000**	
2.19.3.2.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi/lembaga olahraga yang difasilitasi sarprasnya				8 lokasi/lembaga	1.455.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	atlet daerah	8 lokasi/lembaga	2.488.482.000	Dinparbudpora
		Jumlah lokasi yang diadakan sarpras olahraga				1 Lokasi							1 Lokasi		
		Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga				5 Paket							5 Paket		
		Jumlah sarana olahraga yang ditinggikan (lapangan dan sport center)				1 Lokasi							1 Lokasi		
		Jumlah sarana prasarana olahraga yang direhabilitasi sedang/berat				1 Lokasi							1 Lokasi		
		Jumlah sarpras olahraga yang terpelihara secara rutin/berkala				3 Lokasi							3 Lokasi		
2.19.3.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan prestasi olahraga tingkat kota	47.62 Persen		23.81 Persen	28.57 Persen	**805.190.000**						28.57 Persen	**705.550.000**	
2.19.3.2.02.2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat	Jumlah cabang olahraga masyarakat yang dipertandingkan				8 Cabor	602.490.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	atlet daerah	8 Cabor	499.550.000	Dinparbudpora

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga pelajar yang dibina				21 Cabor		Kecamatan, Semua Kelurahan		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota		21 Cabor		
		Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan				16 Cabor							16 Cabor		
2.19.3.2.02.3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mengikuti Kejuaraan				71 Sekolah	202.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	atlet daerah	71 Sekolah	206.000.000	Dinparbudpora
2.19.3.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi	205 orang		10 orang	35 orang	**2.370.360.000**						35 orang	**437.874.500**	
2.19.3.2.03.1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlit yang dibina dalam rangka persiapan POPDA tk. provinsi				250 Orang	229.830.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	atlet daerah	250 Orang	222.274.000	Dinparbudpora
2.19.3.2.03.2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah atlit yang dibina di PPLOPD				72 Orang	160.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	atlet daerah	72 Orang	123.600.000	Dinparbudpora
2.19.3.2.03.3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang dibina				6 Cabor	1.979.630.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	atlet daerah	6 Cabor	92.000.500	Dinparbudpora
		Jumlah Cabang Olahraga yang difasilitasi Pengembangannya				4 Cabor							4 Cabor		
2.19.3.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Peningkatan event olahraga tk Provinsi dan Nasional	24 Event		4 Event	4 Event	**268.612.000**						4 Event	**190.550.000**	
2.19.3.2.05.5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah cabang olahraga dalam kompetisi olahraga masyarakat				8 Cabor	268.612.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	atlet daerah	8 Cabor	190.550.000	Dinparbudpora

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.626.850.000**							**3.353.724.000**	
2.22.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100 persen		100 persen	100 persen	**916.093.000**						100 persen	**1.096.435.000**	
2.22.2.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Event kesenian dan kebudayaan yang dikembangkan	32 Event		2 Event	6 Event	**516.093.000**						6 Event	**511.395.000**	
2.22.2.2.01.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kegiatan dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival Pekalongan Tempo Dulu) yang diselenggarakan				6 Kegiatan	516.093.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan event seni dan budaya	0	6 Kegiatan	511.395.000	Dinparbudpora
		Jumlah komunitas seni dan budaya yang difasilitasi kegiatannya				15 Komunitas							15 Komunitas		
		Jumlah penyelenggaraan kegiatan kerjasama pusaka budaya yang difasilitasi				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
2.22.2.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Event kesenian dan kebudayaan yang dilestarikan	52 Event		2 Event	10 Event	**400.000.000**						10 Event	**585.040.000**	
2.22.2.2.02.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah cabang seni yang dilombakan dalam Pekan Seni Daerah				1 Cabang	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan event seni dan budaya	stakeholder budaya	1 Cabang	585.040.000	Dinparbudpora
		Jumlah event/ kegiatan yang diselenggarakan dalam pelindungan, pengembangan , pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya				2 Event							2 Event		
		Jumlah penyelenggaran pelesterian budaya kepada komunitas yang terfasilitasi				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		jumlah sarana prasarana pelestarian budaya yang terfasilitasi				1 Paket							1 Paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.22.3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100 persen		100,00 persen	100 persen	**426.757.000**						100 persen	**941.496.000**	
2.22.3.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	165 komunitas		5 komunitas	26 komunitas	**426.757.000**						26 komunitas	**941.496.000**	
2.22.3.2.01.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah cabang seni yang dibintekkan				1 Cabang Seni	112.621.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan event seni dan budaya	pelaku seni	1 Cabang Seni	76.209.000	Dinparbudpora
		Jumlah paguyuban/sanggar seni yang difasilitasi sarpras kesenian				2 kelompok							2 kelompok		
		Jumlah sanggar seni rakyat yang difasilitasi kegiatannya				1 Sanggar Seni							1 Sanggar Seni		
2.22.3.2.01.3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah komunitas seni dan budaya yang difasilitasi				25 Komunitas	314.136.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan event seni dan budaya	pelaku seni	25 Komunitas	865.287.000	Dinparbudpora
2.22.5	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	97,52 persen		88,65 persen	90,43 persen	**24.500.000**						90,43 persen	**20.600.000**	
2.22.5.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	3.19 Persen		1.42 Persen	1.77 Persen	**24.500.000**						1.77 Persen	**20.600.000**	
2.22.5.2.01.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah dokumen dalam kegiatan Inventarisasi Benda Cagar Budaya yang disusun				2 Dokumen	24.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan event seni dan budaya	cagar budaya	2 Dokumen	20.600.000	Dinparbudpora
		Jumlah pengadaan prasasti objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya				3 Unit							3 Unit		
2.22.6	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase pengunjung museum batik	4,80 persen		4,55 persen	4,60 persen	**1.259.500.000**						4,60 persen	**1.295.193.000**	
2.22.6.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Jumlah pengunjung museum batik	139000 Orang		25000 Orang	26000 Orang	**1.259.500.000**						26000 Orang	**1.295.193.000**	
2.22.6.2.01.1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi	Jumlah Bulan Pengelolaan dan Pemeliharaan Museum Batik				12 Bulan	210.684.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan event seni	Museum	12 Bulan	217.004.000	Dinparbudpora

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	secara Terpadu							Kecamatan, Semua Kelurahan	Non Fisik		dan budaya				
2.22.6.2.01.3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Kegiatan yang Diselenggarakan dalam Pengelolaan Batik				7 Kegiatan	927.605.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan event seni dan budaya	Museum	7 Kegiatan	956.978.000	Dinparbudpora
									Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2.22.6.2.01.4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah bulan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum				12 bulan	121.211.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan event seni dan budaya	Museum	12 bulan	121.211.000	Dinparbudpora
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**4.596.082.000**							**8.624.476.000**	
3.26.2	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	12,50 persen		10 persen	10,5 persen	**3.219.382.000**						10,5 persen	**5.819.268.000**	
3.26.2.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Persentase usaha pariwisata yang difasilitasi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**1.274.000.000**						100 Persen	**3.359.612.000**	
3.26.2.2.01.2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dtw				1 Dokumen	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	obyek wisata	1 Dokumen	250.000.000	Dinparbudpora
3.26.2.2.01.3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan untuk Pengembangan Obyek Wisata				3 Pekerjaan	1.159.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database	obyek wisata	3 Pekerjaan	3.094.162.000	Dinparbudpora

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											ekonomi kreatif berbasis potensi lokal				
3.26.2.2.01.4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi usaha pariwisata yang dimonitoring /dibina				25 Lokasi	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	obyek wisata	25 Lokasi	15.450.000	Dinparbudpora
3.26.2.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase destinasi wisata yang berkembang	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**1.945.382.000**						100 Persen	**2.459.656.000**	
3.26.2.2.03.3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan untuk Pengembangan Obyek Wisata				2 Lokasi	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	obyek wisata	2 Lokasi	1.025.674.000	Dinparbudpora
3.26.2.2.03.4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Berdasarkan SK Walikota				2 orang/tahun	545.382.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	obyek wisata	2 orang/tahun	433.982.000	Dinparbudpora
		Jumlah lokasi Obyek Wisata yang dipelihara secara rutin/berkala				2 lokasi							2 lokasi		
3.26.2.2.03.7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Wisata Yang diPelihara				1 Lokasi	1.000.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database	obyek wisata	1 Lokasi	1.000.000.000	Dinparbudpora

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											ekonomi kreatif berbasis potensi lokal				
3.26.3	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	46,98 persen		21,98 persen	26,98 persen	**1.006.700.000**						26,98 persen	**1.800.959.000**	
3.26.3.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	25 Persen		25 Persen	25 Persen	**1.006.700.000**						25 Persen	**1.800.959.000**	
3.26.3.2.01.1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah bulan promosi pariwisata kota pekalongan Jumlah media promosi pariwisata kota Pekalongan				3 Media	53.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	stakeholder pariwisata	3 Media	55.105.000	Dinparbudpora
3.26.3.2.01.2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan				4 Kegiatan	294.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	stakeholder pariwisata	4 Kegiatan	1.039.274.000	Dinparbudpora
		Jumlah kegiatan pemilihan Duta wsata Tk. Kota dan Provinsi yang diselenggarakan				2 Kegiatan							2 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan yang mendapat Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata				5 Kegiatan							5 Kegiatan		
3.26.3.2.01.3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen/database statistik pariwisata				1 Dokumen	214.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	stakeholder pariwisata	1 Dokumen	196.730.000	Dinparbudpora
		Jumlah kegiatan workshop promosi pariwisata yang diselenggarakan bagi biro perjalanan				2 Kegiatan							2 Kegiatan		
3.26.3	Peningkatan Kerja	Jumlah pameran nasional dan				3	445.000.000		Dana Transfer	Memperkuat Ketahanan	9. Pningk promosi,	stakeholder	3	509.850.000	Dinparbudpor

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
.2.01.4	Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	regional yang dilaksanakan				Pameran			Umum-Dana Alokasi Umum	Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	pariwisata	Pameran		a
3.26.5	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	100 persen		0 persen	20 persen	**370.000.000**						20 persen	**1.004.249.000**	
3.26.5.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Peningkatan kapasitas SDM EKRAF tingkat dasar	14,29 Persen		0 Persen	20 Persen	**370.000.000**						20 Persen	**1.004.249.000**	
3.26.5.2.01.1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelatihan pengembangan SDM Ekonomi Kreatif tingkat dasar yang diselenggarakan				40 Pelaku Ekraf	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	pelaku ekonomi kreatif	40 Pelaku Ekraf	100.000.000	Dinparbudpora
3.26.5.2.01.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah SIM EKRAF yang disusun				1 Paket	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	pelaku ekonomi kreatif	1 Paket	89.249.000	Dinparbudpora
3.26.5.2.01.3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan	Jumlah pelatihan SDM EKRAF bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau				40 Kali	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh	pelaku ekonomi kreatif	40 Kali	100.000.000	Dinparbudpora

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	siswa) yang diselenggarakan						Kecamatan, Semua Kelurahan		Berkualitas dan Berkeadilan	mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal				
3.26.5.2.01.4	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang EKRAF				5 Pelaku	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	pelaku ekonomi kreatif	5 Pelaku	100.000.000	Dinparbudpora
3.26.5.2.01.5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Focus Group Discussion (FGD) komunitas yang diselenggarakan				2 kali	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	pelaku ekonomi kreatif	2 kali	500.000.000	Dinparbudpora
3.26.5.2.01.6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan atau BIMTEK				100 orang	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	pelaku ekonomi kreatif	100 orang	100.000.000	Dinparbudpora
3.26.5.2.01.7	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku EKRAF yang dimonitoring tahun N				30 Pelaku	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan	pelaku ekonomi kreatif	30 Pelaku	15.000.000	Dinparbudpora

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal				
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**861.726.000**							**906.151.000**	
2.9.3	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase cadangan pangan daerah	4,80 persen		3,80 persen	4.3 persen	**766.643.000**						4.3 persen	**811.068.000**	
2.9.3.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 persen	**144.883.000**						100 persen	**139.308.000**	
2.9.3.2.01.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen neraca bahan makanan yang disusun				1 dokumen	21.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	stakeholder pangan	1 dokumen	21.500.000	Dinperpa
2.9.3.2.01.2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah produk olahan pangan berbahan baku lokal yang diuji coba dalam pelatihan/lomba				2 produk	100.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	stakeholder pangan	2 produk	100.000.000	Dinperpa
2.9.3.2.01.4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan pemantauan harga pangan pokok strategis				12 dokumen	23.383.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	stakeholder pangan	12 dokumen	17.808.000	Dinperpa
2.9.3.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Jumlah cadangan pangan daerah	31035 Kg		4500 Kg	5000 Kg	**91.760.000**						5000 Kg	**91.760.000**	
2.9.3.2.02.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Presentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya untuk				100 persen	86.260.000		Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa	Dinperpa	100 persen	86.260.000	Dinperpa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	penanganan kerentanan/ kerawanan pangan							Alokasi Umum	Saing	meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada				
2.9.3. 2.02.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah dokumen penyusunan pola pangan harapan konsumsi				1 dokumen	5.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Dinperpa	1 dokumen	5.500.000	Dinperpa
2.9.3. 2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Jumlah pelaksanaan pendampingan kelompok pemberdayaan pekarangan	20 kegiatan		7 kegiatan	2 kegiatan	**530.000.000**						2 kegiatan	**580.000.000**	
2.9.3. 2.04.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pelaksanaan pendampingan kelompok masyarakat				2 kelompok	530.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	stakeholder pangan	2 kelompok	580.000.000	Dinperpa
								Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
								Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat							
								Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol							
								Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer							
								Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono							
								Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton							
								Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo							
2.9.4	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100 persen		100,00 persen	100 persen	**23.000.000**						100 persen	**23.000.000**	
2.9.4.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Jumlah kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	4 kecamatan		4 kecamatan	4 kecamatan	**23.000.000**						4 kecamatan	**23.000.000**	
2.9.4.2.01.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah dokumen peta ketahanan dan kerentanan pangan				1 dokumen	23.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Dinperpa	1 dokumen	23.000.000	Dinperpa
2.9.5	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase pangan segar yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	88,00 persen		80,00 persen	81,6 persen	**72.083.000**						81,6 persen	**72.083.000**	
2.9.5.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	174 sample		24 sample	24 sample	**72.083.000**						24 sample	**72.083.000**	
2.9.5.2.01.5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengawasan keamanan pangan segar yang dilaksanakan				1 kegiatan	72.083.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP yang ada	Stakeholder pangan	1 kegiatan	72.083.000	Dinperpa
		Jumlah kegiatan sosialisasi keamanan pangan bagi anak sekolah				1 kegiatan							1 kegiatan		
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**7.935.422.000**							**7.921.251.000**	
3.27.1	**PROGRAM PENUNJANG**	Persentase ketersediaan	100		100 persen	100	**6.064.499.000**						100	**6.470.124.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	laporan capaian kinerja	persen			persen							persen		
3.27.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**22.250.000**						100 persen	**31.680.000**	
3.27.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperpa	2 dokumen	11.130.000	Dinperpa
		Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
3.27.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperpa	2 dokumen	1.750.000	Dinperpa
3.27.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	18.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperpa	12 bulan	18.800.000	Dinperpa
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
3.27.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**4.854.513.000**						100 persen	**4.768.094.000**	
3.27.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	4.768.542.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperpa	12 bulan	4.680.273.000	Dinperpa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.27.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	84.471.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperpa	12 bulan	86.071.000	Dinperpa
3.27.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperpa	1 dokumen	1.750.000	Dinperpa
3.27.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**10.070.000**	
3.27.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran, Hakteknas dan Karnaval batik				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperpa	2 kali	10.070.000	Dinperpa
3.27.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	ersentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	**249.000.000**						100 Persen	**255.030.000**	
3.27.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperpa	12 bulan	1.550.000	Dinperpa
3.27.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	60.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperpa	12 bulan	61.800.000	Dinperpa
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				9 unit							9 unit		
3.27.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	Dinperpa	12 bulan	3.090.000	Dinperpa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kertoharjo			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
3.27.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	41.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperpa	11 bulan	42.400.000	Dinperpa
3.27.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	10.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperpa	12 bulan	10.600.000	Dinperpa
3.27.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperpa	12 bulan	3.090.000	Dinperpa
3.27.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				350 org/kali	130.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperpa	350 org/kali	132.500.000	Dinperpa
3.27.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**495.000.000**						100 persen	**1.000.000.000**	
3.27.1.2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/ pekerjaan konstruksi yang terbangun				4 unit	495.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperpa	4 unit	1.000.000.000	Dinperpa
3.27.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**279.236.000**						100 persen	**282.050.000**	
3.27.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	2.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	Dinperpa	12 bulan	2.050.000	Dinperpa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Selatan, Kuripan Kertoharjo		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
3.27.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	120.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperpa	12 bulan	120.000.000	Dinperpa
3.27.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	157.236.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperpa	12 bulan	160.000.000	Dinperpa
3.27.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**155.000.000**						100 persen	**123.200.000**	
3.27.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				34 unit	80.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperpa	34 unit	82.000.000	Dinperpa
3.27.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				6 unit	55.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperpa	6 unit	20.600.000	Dinperpa
3.27.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperpa	12 bulan	20.600.000	Dinperpa
3.27.2	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Nilai produksi pertanian pertahun	55.84 Miliar Rupiah		55.56 Miliar Rupiah	55.62 Miliar Rupiah	**268.596.000**						55.62 Miliar Rupiah	**243.900.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.27.2.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 persen		100 persen	100 persen	**130.700.000**						100 persen	**127.200.000**	
3.27.2.2.01.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah bulan pengelolaan lahan tanaman pangan dan hortikultura				12 bulan	130.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi loka	Petani	12 bulan	127.200.000	Dinperpa
		Jumlah bulan penyediaan paket data PPL				12 bulan			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12 bulan		
		Jumlah dokumen rekap RDKK tk kota				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah pelatihan tematik yg dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		
3.27.2.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDG hewan, tumbuhan dan mikroorganisme wewenang kabupaten/kota	100 persen		100 persen	100 persen	**65.896.000**						100 persen	**79.700.000**	
3.27.2.2.02.1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bulan pengelolaan lab kultur jaringan				12 bulan	40.146.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Dinperpa	12 bulan	53.000.000	Dinperpa
3.27.2.2.02.2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Kegiatan Pelatihan yg dilaksanakan				1 kegiatan	25.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Dinperpa	1 kegiatan	26.700.000	Dinperpa
3.27.2.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan**	Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29 kali		4 kali	5 kali	**55.000.000**						5 kali	**20.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	dalam Daerah Kabupaten/Kota														
3.27.2.2.03.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	jumlah bulan pemeliharaan demplot ternak				12 bulan	30.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	petani/peternak	12 bulan	-	Dinperpa
3.27.2.2.03.2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pelatihan pengolahan pakan ternak yang dilaksanakan				1 kali kegiatan	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	petani/peternak	1 kali kegiatan	20.000.000	Dinperpa
		Jumlh bulan monev pakan ternak				12 bulan							12 bulan		
3.27.2.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kenaikan pelayanan ULIB	27,63 persen		5 persen	5 persen	**17.000.000**						5 persen	**17.000.000**	
3.27.2.2.05.1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah ternak yang dilayani kawin suntik (IB)				200 ekor	17.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	petani/peternak	200 ekor	17.000.000	Dinperpa
3.27.3	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100 persen		100,00 persen	100 persen	**741.727.000**						100 persen	**743.227.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.27.3.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Persentase prasarana yang digunakan (IKK Output)	100 persen		100 persen	100 persen	**741.727.000**						100 persen	**743.227.000**	
3.27.3.2.02.8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang direhab				1 unit	691.727.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	sarpras pertanian/peternakan	1 unit	691.727.000	Dinperpa
3.27.3.2.02.9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian				100 persen	50.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	sarpras pertanian/peternakan	100 persen	51.500.000	Dinperpa
3.27.4	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5,00 persen		5,00 persen	5 persen	**685.000.000**						5 persen	**275.000.000**	
3.27.4.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kejadian penyakit hewan menular (PHM) yang tertangani	4.800 kasus		800 kasus	800 kasus	**60.000.000**						800 kasus	**60.000.000**	
3.27.4.2.01.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Bulan terlaksananya fasilitasi asuransi ternak sapi				12 bulan	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database	peternak	12 bulan	60.000.000	Dinperpa
		Jumlah Bulan terlaksananya pengendalian penyakit hewan dilapangan				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											ekonomi kreatif berbasis potensi lokal				
3.27.4.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah hewan yang tertangani di PUSKESWAN	3.000 ekor		500 ekor	500 ekor	**35.000.000**						500 ekor	**35.000.000**	
3.27.4.2.03.2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah hewan yang dilayani di PUSKESWAN				1000 ekor	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	peternak	1000 ekor	35.000.000	Dinperpa
		Jumlah kegiatan Hari rabies sedunia				1 kali							1 kali		
3.27.4.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada pelaku usaha	100 persen		100 persen	100 persen	**590.000.000**						100 persen	**180.000.000**	
3.27.4.2.04.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah bulan operasional RPH				12 bulan	130.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	peternak	12 bulan	130.000.000	Dinperpa
3.27.4.2.04.2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah bulan pemantauan keamanan bahan pangan asal hewan segar				12 bulan	460.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	peternak	12 bulan	50.000.000	Dinperpa
		Jumlah laboratorium pemantauan pangan yang dibangun				1 unit							1 unit		
		Jumlah panitia qurban yang dilatih tentang tata cara penanganan hewan qurban yang ASUH				1 kali kegiatan							1 kali kegiatan		
		Jumlah panitia qurban yang dilatih tentang tata cara				50 orang							50 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		penanganan hewan qurban yang ASUH													
		Jumlah pelatihan penyembelihan hewan secara asuh yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah wilayah yang dilakukan pemantauan kesehatan hewan qurban				27 kelurahan							27 kelurahan		
3.27.5	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100 persen		100 persen	100 persen	**63.350.000**						100 persen	**64.300.000**	
3.27.5.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian/peternakan	20 kali		0 kali	4 kali	**63.350.000**						4 kali	**64.300.000**	
3.27.5.2.01.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah pelatihan pembuatan pestisida hayati				1 kegiatan	25.750.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Petani	1 kegiatan	26.700.000	Dinperpa
		Pelaksanaan pengendalian OPT di lapangan per musim tanam				2 musim tanam							2 musim tanam		
3.27.5.2.01.5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Prosentase pelaksanaan keg penaggulangan banjir di usaha peternakan				100 persen	37.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Petani	100 persen	37.600.000	Dinperpa
3.27.6	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	100 persen		0,00 persen	20 persen	**35.000.000**						20 persen	**45.000.000**	
3.27.6.2.02	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas**	Persentase penurunan jumlah usaha pemotongan hewan yang tidak berijin	26,49 persen		5 persen	5 persen	**35.000.000**						5 persen	**45.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan														
3.27.6.2.02.5	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang dilaksanakan				6 kegiatan	35.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	peternak	6 kegiatan	45.000.000	Dinperpa
3.27.7	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5,00 persen		5,00 persen	5 persen	**77.250.000**						5 persen	**79.700.000**	
3.27.7.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Persentase pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani	100 persen		100 persen	100 persen	**77.250.000**						100 persen	**79.700.000**	
3.27.7.2.01.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Prosentase kenaikan kelas kelompok tani				5 persen	25.750.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	petani	5 persen	26.700.000	Dinperpa
3.27.7.2.01.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase kenaikan kelas kelompok tani				5 persen	51.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	petani	5 persen	53.000.000	Dinperpa
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**1.309.800.000**							**1.453.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.3	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	33,23 persen		24,59 persen	29,41 persen	**70.000.000**						29,41 persen	**117.000.000**	
2.17.3.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	65.29 persen		0 persen	61.98 persen	**70.000.000**						61.98 persen	**117.000.000**	
2.17.3.2.01.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan				100 koperasi	70.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	koperasi	100 koperasi	117.000.000	Dindagkop UKM
		Jumlah KSP/USP/KSPPS/USPPS yang dinilai kesehatannya				100 koperasi							100 koperasi		
2.17.5	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	59,68 persen		38,36 persen	57,84 persen	**589.800.000**						57,84 persen	**-**	
2.17.5.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	1.39 persen		0.36 persen	0.57 persen	**589.800.000**						0.57 persen	**-**	
2.17.5.2.01.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi dan UMKM yang mendapatkan pendampingan peningkatan kapasitas				127 koperasi dan UMKM	589.800.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database	koperasi	127 koperasi dan UMKM	-	Dindagkop UKM
		Jumlah lembaga yang difasilitasi hibah				1 lembaga							1 lembaga		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											ekonomi kreatif berbasis potensi lokal				
2.17.8	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,37 persen		11,85 persen	11,95 persen	**650.000.000**						11,95 persen	**1.336.000.000**	
2.17.8.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	7.26 UMKM		1.25 UMKM	2.45 UMKM	**650.000.000**						2.45 UMKM	**1.336.000.000**	
2.17.8.2.01.1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah event festival kuliner yang dilaksanakan				1 Event	650.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	UMKM	1 Event	1.336.000.000	Dindagkop UKM
		Jumlah pelatihan UMKM yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi digital marketing				40 UMKM							40 UMKM		
		Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi promosi produk unggulan melalui event Virtual Expo Hybrid				90 UMKM							90 UMKM		
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**15.362.187.000**							**16.497.650.000**	
3.30.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**8.460.373.000**						100 persen	**9.812.650.000**	
3.30.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**22.450.000**						100 Persen	**31.750.000**	
3.30.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindagkop UKM	2 dokumen	11.500.000	Dindagkop UKM
3.30.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	Dindagkop UKM	2 dokumen	1.800.000	Dindagkop UKM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
3.30.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	18.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindagkop UKM	12 bulan	18.450.000	Dindagkop UKM
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
3.30.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**7.237.149.000**						100 Persen	**8.279.400.000**	
3.30.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	7.159.449.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindagkop UKM	12 bulan	8.200.000.000	Dindagkop UKM
3.30.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	76.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindagkop UKM	12 bulan	77.600.000	Dindagkop UKM
3.30.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindagkop UKM	1 dokumen	1.800.000	Dindagkop UKM
3.30.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**9.500.000**						100 Persen	**15.500.000**	
3.30.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				1 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	Dindagkop UKM	1 kali	15.500.000	Dindagkop UKM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah pakaian dinas yang diadakan				30 buah		Kecamatan, Semua Kelurahan		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota		30 buah		
3.30.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**316.316.000**						100 Persen	**454.400.000**	
3.30.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindagkop UKM	12 bulan	4.000.000	Dindagkop UKM
3.30.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	52.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindagkop UKM	12 bulan	115.000.000	Dindagkop UKM
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				8 unit							8 unit		
3.30.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	6.875.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindagkop UKM	12 bulan	2.700.000	Dindagkop UKM
3.30.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan penyediaan makanan dan minuman				12 bulan	88.421.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindagkop UKM	12 bulan	80.000.000	Dindagkop UKM
3.30.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	48.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindagkop UKM	12 bulan	-	Dindagkop UKM
3.30.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis	Dindagkop UKM	12 bulan	2.700.000	Dindagkop UKM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan			SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
3.30.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				55 kali	115.270.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindagkop UKM	55 kali	250.000.000	Dindagkop UKM
3.30.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**416.713.000**						100 Persen	**617.600.000**	
3.30.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindagkop UKM	12 bulan	2.600.000	Dindagkop UKM
3.30.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	313.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindagkop UKM	12 bulan	500.000.000	Dindagkop UKM
3.30.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	100.413.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindagkop UKM	12 bulan	115.000.000	Dindagkop UKM
3.30.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**458.245.000**						100 Persen	**414.000.000**	
3.30.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				36 unit	372.815.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindagkop UKM	36 unit	360.000.000	Dindagkop UKM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.30.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				2 unit	65.430.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindagkop UKM	2 unit	32.000.000	Dindagkop UKM
3.30.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				12 bulan	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dindagkop UKM	12 bulan	22.000.000	Dindagkop UKM
3.30.3	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 persen		75,00 persen	75 persen	**5.950.000.000**						75 persen	**5.500.000.000**	
3.30.3.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	18.75 persen		6.25 persen	6.25 persen	**5.700.000.000**						6.25 persen	**5.500.000.000**	
3.30.3.2.01.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dibangun				1 pasar	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	stakeholder pasar tradisional	1 pasar	100.000.000	Dindagkop UKM
3.30.3.2.01.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah bangunan pasar yang dilakukan pemeliharaan				11 pasar	5.600.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	stakeholder pasar tradisional	11 pasar	5.400.000.000	Dindagkop UKM
		Jumlah jasa tenaga kontrak di pasar berdasarkan SK Walikota pasar				64 org/bulan							64 org/bulan		
		jumlah lokasi perdagangan yang difasilitasi sarprasnya				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan pasar				84 org/bulan							84 org/bulan		
		Jumlah petugas kebersihan, kemanan dan pengelola pasar				157 orang							157 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		yang dirtingkatkan kapasitas SDM nya													
		Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dibangun				1 pasar							1 pasar		
3.30.3.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Presentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	68.97 Persen		11.49 Persen	22.99 Persen	**250.000.000**						22.99 Persen	**-**	
3.30.3.2.02.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah lokasi perdagangan yang difasilitasi sarprasnya				1 lokasi	250.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Pedagang kaki lima	1 lokasi	-	Dindagkop UKM
		Jumlah pedagang yang mendapatkan sosialisasi pembinaan penataan kawasan PK5				120 orang							120 orang		
		Jumlah petugas retribusi pasar dan PK5 yang ditingkatkan kapasitasnya				120 orang							120 orang		
3.30.4	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	100 persen		80,00 persen	84 persen	**140.000.000**						84 persen	**140.000.000**	
3.30.4.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	100 persen		27.27 persen	45.45 persen	**140.000.000**						45.45 persen	**140.000.000**	
3.30.4.2.02.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilakukan pengawasan barang beredar dan pemantauan harga				95 komoditas	140.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	pelaku usaha	95 komoditas	140.000.000	Dindagkop UKM
3.30.5	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase peningkatan volume ekspor	8,19 persen		7,24 persen	7,42 persen	**140.000.000**						7,42 persen	**140.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.30.5.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir	27 pelaku usaha		22 pelaku usaha	23 pelaku usaha	**140.000.000**						23 pelaku usaha	**140.000.000**	
3.30.5.2.01.1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan dan pendampingan produk ekspor				30 UMKM	140.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	stakeholder perdagangan	30 UMKM	140.000.000	Dindagkop UKM
3.30.6	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	83,99 persen		73,99 persen	75,99 persen	**372.064.000**						75,99 persen	**365.000.000**	
3.30.6.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	83.99 persen		73.99 persen	75.99 persen	**372.064.000**						75.99 persen	**365.000.000**	
3.30.6.2.01.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera ulang				4500 alat UTTP	346.364.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	pelaku usaha	4500 alat UTTP	330.000.000	Dindagkop UKM
		umlah jasa tenaga kontrak di UPTD Metrologi legal berdasarkan SK Walikota				2 orang							2 orang		
3.30.6.2.01.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang dilakukan pengawasan dan penyuluhan				4500 alat UTTP	25.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan	pelaku usaha	4500 alat UTTP	35.000.000	Dindagkop UKM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal				
3.30.7	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	7,50 persen		2,09 persen	3,17 persen	**299.750.000**						3,17 persen	**540.000.000**	
3.30.7.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	100 persen		7.14 persen	6.67 persen	**299.750.000**						6.67 persen	**540.000.000**	
3.30.7.2.01.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah				6 UMKM	250.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	stakeholder perdagangan	6 UMKM	440.000.000	Dindagkop UKM
		umlah UMKM yang difasilitasi promosi produknya melalui Dekranasda				100 UMKM							100 UMKM		
3.30.7.2.01.3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi promosi produk melalui E-Marketplace				60 UMKM	49.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	stakeholder perdagangan	60 UMKM	100.000.000	Dindagkop UKM
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**1.262.510.000**							**5.043.650.000**	
2.7.3	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	0,55 persen		0,33 persen	0,372 persen	**973.738.000**						0,372 persen	**4.435.150.000**	
2.7.3.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	100 persen		100 persen	100 persen	**800.440.000**						100 persen	**4.133.650.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.7.3.2.01.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan				2 kali	629.953.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	pencari kerja	2 kali	1.197.400.000	Dinperinaker
		Jumlah penganggur yang dilatih				112 Orang							112 Orang		
		Jumlah Perusahaan yang mengadakan kemitraan MOU dengan BLK melalui Kios 3 in 1				16 Perusahaan							16 Perusahaan		
		Lulusan bersertifikat kompetensi				0 orang							0 orang		
2.7.3.2.01.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah instruktur yang dinilai				14 Instruktur	85.660.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	pencari kerja	14 Instruktur	86.250.000	Dinperinaker
		Jumlah kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat				11 kejuruan							11 kejuruan		
2.7.3.2.01.3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah kejuruan dan perlengkapan pelatihan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan				5 kejuruan	84.827.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	pencari kerja	5 kejuruan	2.850.000.000	Dinperinaker
2.7.3.2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100 persen		0 persen	60 persen	**83.500.000**						60 persen	**111.000.000**	
2.7.3.2.02.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Instruktur yang mengikuti pelatihan kompetensi				20 orang	83.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	Lembaga Pelatihan Kerja swasta	20 orang	111.000.000	Dinperinaker
		Jumlah orang yang mengikuti workshop tata kelola LPKS				30 orang							30 orang		
		Jumlah volume kunjungan monitoring ke LPKS selama 1 (satu) tahun				24 Kali							24 Kali		
2.7.3.2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Jumlah kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dilaksanakan	36 tenant		6 tenant	6 tenant	**79.298.000**						6 tenant	**100.000.000**	
2.7.3.2.04.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah tenant yang mendapat bantuan sarana usaha				6 Tenant	79.298.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	perusahaan	6 Tenant	100.000.000	Dinperinaker
2.7.3.	**Pengukuran Produktivitas Tingkat**	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas	53.33		0 persen	26.67	**10.500.000**						26.67	**90.500.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.05	**Daerah Kabupaten/Kota**	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	persen			persen							persen		
2.7.3. 2.05.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah alumni siswa pelatihan yang termonitor				600 alumni siswa	10.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tenaga Kerja	600 alumni siswa	90.500.000	Dinperinaker
2.7.4	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	29,93 persen		19,93 persen	21 persen	**123.132.000**						21 persen	**292.500.000**	
2.7.4. 2.01	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	14.08 persen		8.52 persen	9.63 persen	**24.851.800**						9.63 persen	**180.500.000**	
2.7.4. 2.01.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja ditempatkan di luar daerah				1 KK	24.851.800	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	pencari kerja	1 KK	180.500.000	Dinperinaker
		Perjanjian antar daerah				1 Dokumen							1 Dokumen		
2.7.4. 2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun	72 buku		12 buku	12 buku	**81.938.000**						12 buku	**90.000.000**	
2.7.4. 2.03.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	jumlah operator iyang menangani aplikasi informasi pasar kerja online				1 orang	31.938.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	pencari kerja	1 orang	35.000.000	Dinperinaker
2.7.4. 2.03.3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pelaksanaan job fair				20 perusahaan	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	pencari kerja	20 perusahaan	55.000.000	Dinperinaker
2.7.4. 2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah CPMI yang terlayani secara legal	249 orang		29 orang	34 orang	**16.342.200**						34 orang	**22.000.000**	
2.7.4. 2.04.2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon	jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/calon				50 orang	16.342.200	Kota Pekalongan,	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	4. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan	pekerja migran	50 orang	22.000.000	Dinperinaker

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pekerja Migran	Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang mendapatkan sosialisasi						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	produktivitas tenaga kerja				
2.7.5	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	49,02 persen		45,33 persen	46,05 persen	**165.640.000**						46,05 persen	**316.000.000**	
2.7.5.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	42.28 persen		37.00 persen	38.06 persen	**53.235.000**						38.06 persen	**117.500.000**	
2.7.5.2.01.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama				30 perusahaan	15.550.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	pengusaha, tenaga kerja	30 perusahaan	30.000.000	Dinperinaker
2.7.5.2.01.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang didata ketenagakerjaannya				108 perusahaan	37.685.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	pengusaha, tenaga kerja	108 perusahaan	87.500.000	Dinperinaker
		Jumlah sidang/ rapat Anggota Dewan Pengupahan				8 kali							8 kali		
2.7.5.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	80.06 persen		48.57 persen	52.19 persen	**112.405.000**						52.19 persen	**198.500.000**	
2.7.5.2.02.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan	Jumlah perusahaan yang mengikuti dialog pencegahan perselisihan HI				50 perusahaan	26.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	4. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	pengusaha, tenaga kerja	50 perusahaan	45.000.000	Dinperinaker

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							Semua Kelurahan		Saing					
2.7.5.2.02.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah pengurus serikat pekerja/serikat buruh/pengusaha/manajemen perusahaan, dan organisasi pengusaha yang didata untuk mengikuti pembinaan				80 Pengurus	20.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	pengusaha, tenaga kerja	80 Pengurus	33.500.000	Dinperinaker
2.7.5.2.02.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Porseni Tripartit				160 orang	66.405.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	pengusaha, tenaga kerja	160 orang	120.000.000	Dinperinaker
		Jumlah sidang / rapat LKS Tripartit				6 kali							6 kali		
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**7.535.537.000**							**9.808.514.000**	
3.31.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**7.005.537.000**						100 persen	**7.052.654.000**	
3.31.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**21.301.000**						100 persen	**25.800.000**	
3.31.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun				2 dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperinaker	2 dokumen	2.650.000	Dinperinaker
3.31.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA, perubahan RKA, DPA, dan Perubahan DPA yang disusun.				4 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis	Dinperinaker	4 Dokumen	1.600.000	Dinperinaker

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan			SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
3.31.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	17.301.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperinaker	12 bulan	21.550.000	Dinperinaker
		Jumlah dokumen data sektoral yang dihasilkan				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
		Jumlah doumen Evaluasi Renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
3.31.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**5.908.706.000**						100 persen	**6.082.054.000**	
3.31.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	5.846.206.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperinaker	12 bulan	6.015.754.000	Dinperinaker
3.31.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	61.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperinaker	12 bulan	64.700.000	Dinperinaker
3.31.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperinaker	1 dokumen	1.600.000	Dinperinaker

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.31.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**14.700.000**	
3.31.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperinaker	2 kali	14.700.000	Dinperinaker
3.31.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**146.866.000**						100 persen	**290.900.000**	
3.31.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	3.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperinaker	12 bulan	4.000.000	Dinperinaker
3.31.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	39.666.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperinaker	12 bulan	70.200.000	Dinperinaker
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				1 unit							1 unit		
3.31.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	7.784.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperinaker	12 bulan	5.300.000	Dinperinaker
3.31.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	30.966.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperinaker	11 Bulan	42.500.000	Dinperinaker
3.31.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	11.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	Dinperinaker	12 Bulan	15.000.000	Dinperinaker

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
3.31.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	3.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperinaker	12 Bulan	3.900.000	Dinperinaker
3.31.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				30 Orang/Kali	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperinaker	30 Orang/Kali	150.000.000	Dinperinaker
3.31.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**405.000.000**						100 persen	**20.000.000**	
3.31.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang diadakan				1 unit	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperinaker	1 unit	20.000.000	Dinperinaker
3.31.1.2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan				1 pekerjaan	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperinaker	1 pekerjaan	-	Dinperinaker
3.31.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**413.400.000**						100 persen	**507.600.000**	
3.31.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat				12 Bulan	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperinaker	12 Bulan	2.600.000	Dinperinaker
3.31.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik				10 Bulan	185.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	Dinperinaker	10 Bulan	268.500.000	Dinperinaker

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
3.31.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 Bulan	226.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperinaker	12 Bulan	236.500.000	Dinperinaker
		Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota				13 Orang/Bulan							13 Orang/Bulan		
3.31.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**100.764.000**						100 persen	**111.600.000**	
3.31.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				39 Unit	33.364.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperinaker	39 Unit	37.700.000	Dinperinaker
3.31.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 Unit	48.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperinaker	1 Unit	52.700.000	Dinperinaker
3.31.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 Bulan	18.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Dinperinaker	12 Bulan	21.200.000	Dinperinaker
3.31.2	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	21,04 persen		20,59 persen	20,41 persen	**510.000.000**						20,41 persen	**427.800.000**	
3.31.2.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan	4.5 persen		2.0 persen	2.5 persen	**510.000.000**						2.5 persen	**427.800.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.31.2.2.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah bangunan yang dirawat/dipelihara				1 bangunan	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	pelaku industri Kota Pekalongan	1 bangunan	217.800.000	Dinperinaker
		Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kegiatan industri				12 bulan							12 bulan		
3.31.2.2.01.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM industri yang melaksanakan pelatihan dan pengembangan produksi bersih				30 IKM	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	pelaku industri Kota Pekalongan	30 IKM	150.000.000	Dinperinaker
		Jumlah lembaga yang difasilitasi hibah				1 lembaga							1 lembaga		
3.31.2.2.01.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah buruh rokok yang terampil dan mampu berdaya saing				40 orang	360.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	pelaku industri Kota Pekalongan	40 orang	60.000.000	Dinperinaker
3.31.3	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	26,00 persen		23,00 persen	24 persen	**20.000.000**						24 persen	**2.328.060.000**	
3.31.3.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri**	Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	33 persen		23 persen	23 persen	**20.000.000**						23 persen	**2.328.060.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota														
3.31.3.2.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah IKM yang melaksanakan prosedur industri				13 IKM	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Pningk promosi, pmbrdy&pnglolaan prwsta,indstr,prdagn&js, dg lbh mndrng prn brbgai phk, baik swsta, kmntas, /pun masy&pmrintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Pelaku industri Kota Pekalongan	13 IKM	2.328.060.000	Dinperinaker
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**						**13.820.265.000**							**15.649.893.000**	
4.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**13.820.265.000**						100 persen	**15.649.893.000**	
4.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**13.820.265.000**						100 persen	**15.649.893.000**	
4.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	13.820.265.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat Daerah	12 bulan	15.649.893.000	Setda
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**						**960.435.000**							**925.045.000**	
4.1.2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	**960.435.000**						100 persen	**925.045.000**	
4.1.2.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase capaian kinerja penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	persen		persen	100 persen	**874.935.000**						100 persen	**841.045.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.1.2.2.01.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Laporan evaluasi capaian SPM yang disusun				1 dokumen	13.119.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bagian Pemerintahan - Sekretariat Daerah	1 dokumen	13.625.000	Setda
4.1.2.2.01.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tercapainya pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik				100 persen	678.651.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bagian Pemerintahan - Sekretariat Daerah	100 persen	626.000.000	Setda
4.1.2.2.01.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah				2 dokumen	183.165.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bagian Pemerintahan - Sekretariat Daerah	2 dokumen	201.420.000	Setda
4.1.2.2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	rsentase efektivitas kerja sama daerah	persen		persen	100 persen	**85.500.000**						100 persen	**84.000.000**	
4.1.2.2.04.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	jumlah kerjasama antara Pemkot dengan pihak lain				70 kegiatan	85.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bagian Pemerintahan - Sekretariat Daerah	70 kegiatan	84.000.000	Setda
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**						**859.095.000**							**1.251.500.000**	
4.1.2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	100 persen		100,00 persen	100 persen	**859.095.000**						100 persen	**1.251.500.000**	
4.1.2.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Persentase Capaian Kinerja Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	persen		persen	100 persen	**859.095.000**						100 persen	**1.251.500.000**	
4.1.2.2.03.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	jumlah kajian peraturan perundang undangan daerah yang disusun				4 prduk hukum	135.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	Bagian Hukum - Sekretariat	4 prduk hukum	190.000.000	Setda

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Barat, Podosugih		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Daerah			
		jumlah produk hukum daerah yang disusun				9 raperda/perda							9 raperda/perda		
4.1.2.2.03.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah laporan RANHAM/Kota peduli HAM di Kota Pekalongan yang disusun				2 laporan	561.595.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bagian Hukum - Sekretariat Daerah	2 laporan	861.500.000	Setda
		Jumlah masyakat yang mengikuti Fasilitasi Pelayanan dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat				350 orang							350 orang		
		Jumlah pelayanan advokasi dan bantuan hukum dilingkungan Pemerintah Pekalongan yang dilaksanakan				3 perkara							3 perkara		
		jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani				12 kali							12 kali		
		jumlah perkara hukum masyarakat miskin yang terselesaikan				6 kali							6 kali		
4.1.2.2.03.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundang undangan di bidang cukai (DBHCHT)				9 kali	162.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bagian Hukum - Sekretariat Daerah	9 kali	200.000.000	Setda
		Terlaksanannya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum				12 bulan							12 bulan		
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**						**412.300.000**							**447.300.000**	
4.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100 persen		100 persen	100 persen	**412.300.000**						100 persen	**447.300.000**	
4.1.1.2.13	**Penataan Organisasi**	Indeks Kelembagaan Kota	81 indeks		76 indeks	77 indeks	**412.300.000**						77 indeks	**447.300.000**	
4.1.1.2.13.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	jumlah dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja				1 dokumen	115.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	Bagian Organisasi -	1 dokumen	125.300.000	Setda

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan yang disusun				1 dokumen		Barat, Podosugih		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	1 dokumen		
4.1.1.2.13.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen Peta Proses Bisnis				1 dokumen	162.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bagian Organisasi - Sekretariat Daerah	1 dokumen	172.000.000	Setda
		Jumlah OPD yang mengusulkan Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik				2 OPD							2 OPD		
		Jumlah OPD yang menyusun SOP				1 OPD							1 OPD		
		Jumlah OPD yang terfasilitasi Penyusunan SP				1 OPD							1 OPD		
		Nilai Persepsi Kinerja Unit Pelayanan				84 indeks							84 indeks		
4.1.1.2.13.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 dokumen	135.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bagian Organisasi - Sekretariat Daerah	1 dokumen	150.000.000	Setda
		Jumlah dokumen LKJIP Kota Pekalongan yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah kegiatan pembinaan internalisasi nilai-nilai budaya kerja yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah laporan capaian kinerja OPD yang disusun				31 dokumen							31 dokumen		
		Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki potensi menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi				2 OPD							2 OPD		
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**						**677.505.000**							**705.000.000**	
4.1.3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Presentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	100 persen		100 persen	100 persen	**677.505.000**						100 persen	**705.000.000**	
4.1.3.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Presentase Capaian Kinerja Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100 persen		100 persen	100 persen	**214.505.000**						100 persen	**242.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.1.3.2.01.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang difasilitasi				4 BUMD	57.410.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bagian Perekonomian dan SDA - Sekretariat Daerah	4 BUMD	80.500.000	Setda
4.1.3.2.01.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah OPD pengelola DBHCHT yang dimonitoring				4 OPD	58.430.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bagian Perekonomian dan SDA - Sekretariat Daerah	4 OPD	72.000.000	Setda
		Jumlah Penyedia Barang Bersubsidi yang dimonitoring				10 Penyedia							10 Penyedia		
		Jumlah Rakor Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
4.1.3.2.01.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumah Rakor Pemantauan Pengelolaan KUR yang dilaksanakan				3 Kali	98.665.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bagian Perekonomian dan SDA - Sekretariat Daerah	3 Kali	89.500.000	Setda
		Jumlah barang cetak kegiatan aktivasi dan publikasi branding				2435 Buah							2435 Buah		
		Jumlah Rakor Komite Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
4.1.3.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Jumlah Bulan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bersumber dari DBHCHT	12 bulan		12 bulan	12 bulan	**463.000.000**						12 bulan	**463.000.000**	
4.1.3.2.04.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Penerima BLT buruh rokok				275 Orang/Bulan	463.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bagian Perekonomian dan SDA - Sekretariat Daerah	275 Orang/Bulan	463.000.000	Setda
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**						**609.450.000**							**723.000.000**	
4.1.3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	6,00 persen		7,00 persen	7 persen	**609.450.000**						7 persen	**723.000.000**	
4.1.3.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD	100 persen		100 persen	100 persen	**95.724.000**						100 persen	**130.850.000**	
4.1.3.2.02.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah pekerjaan tender fisik yang dilaksanakan 100 %				25 Pekerjaan	42.681.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis	Bagian Administrasi dan Pengadaan	25 Pekerjaan	58.400.000	Setda

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan			SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Barang/Jasa			
4.1.3.2.02.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah rakor pengendalian pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan				3 kali	53.043.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bagian Administrasi dan Pengadaan Barang/Jasa	3 kali	72.450.000	Setda
4.1.3.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 persen	**513.726.000**						100 persen	**592.150.000**	
4.1.3.2.03.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengadaan barang/jasa (tender/seleksi) yang difasilitasi Bagian PBJ				80 Pekerjaan	209.390.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bagian Administrasi dan Pengadaan Barang/Jasa - Sekretariat Daerah	80 Pekerjaan	263.750.000	Setda
4.1.3.2.03.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah pengadaan (tender/seleksi) melalui sistem LPSE				80 Pekerjaan	304.336.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bagian Administrasi dan Pengadaan Barang/Jasa - Sekretariat Daerah	80 Pekerjaan	328.400.000	Setda
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**						**20.461.275.000**							**22.398.575.000**	
4.1.2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 persen		100,00 persen	100 persen	**20.461.275.000**						100 persen	**22.398.575.000**	
4.1.2.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase capaian kinerja bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	persen		persen	100 persen	**20.461.275.000**						100 persen	**22.398.575.000**	
4.1.2.2.02.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah guru TPQ/MADIN Kota Pekalongan yang dapat difasilitasi bantuan transport, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan				2540 Orang	18.449.654.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi	Bagian Kesejahteraan Rakyat - Sekretariat Daerah	2540 Orang	20.493.575.000	Setda

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan fasilitasi haji				2 Kegiatan					penerapan MRI di tingkat Kota		2 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) tingkat Kota Pekalongan				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan Hari Santri Nasional				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan pelatihan pemulasaran jenasah				2 Kegiatan							2 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan PHBI				5 Kegiatan							5 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan STQ MTQ tingkat Kota Pekalongan, untuk pelajar dan umum				2 Kegiatan							2 Kegiatan		
		Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi bantuan hibah				191 Lembaga							191 Lembaga		
		Jumlah petugas TKHD dan TPHD kegiatan fasilitasi BPIH Kota Pekalongan				3 Orang							3 Orang		
		Jumlah takmir masjid, takmir musholla dan lebe jenasah (non-PNS) yang mendapat fasilitiasi bantuan transport				2985 Orang							2985 Orang		
4.1.2.2.02.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pemberian bantuan sosial berupa beras kepada panti asuhan, yayasan dan pondok pesantren				26 Lembaga	678.125.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bagian Kesejahteraan Rakyat - Sekretariat Daerah	26 Lembaga	890.000.000	Setda
		Jumlah takmir masjid, takmir musholla dan lebe non pns yang mendapat santunan kematian				3600 Orang							3600 Orang		
4.1.2.2.02.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah kegiatan fasilitasi BP4				1 Kegiatan	1.333.496.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bagian Kesejahteraan Rakyat - Sekretariat Daerah	1 Kegiatan	1.015.000.000	Setda
		Jumlah kegiatan Houl Habib				2 Kegiatan							2 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan Pengajian Akbar Peringatan Hari Jadi				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan senam aerobik Jumat pagi di lapangan Setda dan Minggu pagi di lapangan Tirto bersama masyarakat				45 Kegiatan							45 Kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah SMK yang difasilitasi hibah untuk renovasi				1 lokasi							1 lokasi		
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**						**16.366.041.000**							**17.493.112.000**	
4.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**16.366.041.000**						100 persen	**17.493.112.000**	
4.1.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**75.250.000**						100 persen	**73.385.000**	
4.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokumen	3.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	2 dokumen	28.378.000	Setda
4.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian Hukum yang disusun				2 dokumen	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	2 dokumen	3.900.000	Setda
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian Kesejahteraan Rakyatyang disusun				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian Organisasi yang disusun				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian PBJ dan Minbangyang disusun				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian Pemerintahan yang disusun				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian Perekonomian dan SDAyang disusun				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinanyang disusun				2 dokumen							2 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian Umumyang disusun				2 dokumen							2 dokumen		
4.1.1. 2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	59.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	12 bulan	41.107.000	Setda
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP Bagian Hukum yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP Bagian Kesejahteraan Rakyat yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP Bagian Organisasi yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP Bagian PBJ dan Minbang yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP Bagian Pemerintahan yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP Bagian Perekonomian dan SDA yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP Bagian Umum yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
4.1.1. 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**223.600.000**						100 persen	**69.225.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.1.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian hukum				12 bulan	211.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	12 bulan	65.246.000	Setda
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Organisasi				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian PBJ dan Minbang				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Pemerintahan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian protokol dan komunikasi pimpinan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Umum				12 bulan							12 bulan		
4.1.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD bagian hukum yang disusun				1 dokumen	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	1 dokumen	3.979.000	Setda
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD bagian Kesra yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD bagian Organisasi yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD bagian PBJ dan minbang yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD bagian Pemerintahan yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD bagian Perekonomian dan SDAyang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD bagian Protokol dan				1 dokumen							1 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		komunikasi pimpinan yang disusun													
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD bagian umum yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
4.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**87.250.000**						100 persen	**293.338.000**	
4.1.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 kali	87.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	2 kali	293.338.000	Setda
		Jumlah pakaian dinas yang diadakan				65 stel							65 stel		
4.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**6.961.495.000**						100 persen	**6.644.081.000**	
4.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	80.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	12 bulan	84.872.000	Setda
4.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Hukum				12 bulan	1.430.716.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	12 bulan	1.357.755.000	Setda
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian organisasi				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian PBJ dan minbang				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Pemerintahan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Umum				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan Bagian Umum				86 unit							86 unit		
4.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan Rumah Tangga				12 bulan	170.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	12 bulan	180.353.000	Setda
4.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian hukum				11 bulan	1.591.721.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	11 bulan	1.600.806.000	Setda
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian Kesejahteraan rakyat				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian Organisasi				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian PBJ dan Minbang				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian Pemerintahan				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian Perekonomian dan SDA				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian Umum				11 bulan							11 bulan		
4.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Hukum				12 bulan	257.500.000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	Sekretariat Daerah	12 bulan	31.827.000	Setda

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan		Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Organisasi				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian PBJ dan Minbang				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Pemerintahan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Umum				12 bulan							12 bulan		
4.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan bagian Hukum				12 bulan	77.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	12 bulan	2.652.000	Setda
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan bagian Organisasi				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan bagian PBJ dan Minbang				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan bagian Pemerintahan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan bagian umum				12 bulan							12 bulan		
4.1.1. 2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu				12 bulan	1.085.258.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	12 bulan	1.117.816.000	Setda
4.1.1. 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian Hukum				120 orang/kali	2.268.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	120 orang/kali	2.268.000.000	Setda
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat				304 orang/kali							304 orang/kali		
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian organisasi				50 orang/kali							50 orang/kali		
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian PBJ dan Minbang				25 orang/kali							25 orang/kali		
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian Pemerintahan				60 orang/kali							60 orang/kali		
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian Perekonomian dan SDA				115 orang/kali							115 orang/kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan				87 orang/kali							87 orang/kali		
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian Umum				900 orang/kali							900 orang/kali		
4.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**2.433.420.000**						100 persen	**3.076.992.000**	
4.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat bagian Hukum				12 bulan	32.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	12 bulan	21.600.000	Setda
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan							12 bulan		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat bagian Organisasi				12 bulan							12 bulan		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat bagian PBJ dan Minbang				12 bulan							12 bulan		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat bagian pemerintahan				12 bulan							12 bulan		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan							12 bulan		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat bagian Protokol dan komunikasi pimpinan				12 bulan							12 bulan		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat bagian umum				12 bulan							12 bulan		
4.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan jasa komnikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	969.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	12 bulan	1.591.350.000	Setda
4.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	1.431.820.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	12 bulan	1.464.042.000	Setda

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**4.144.768.000**						100 persen	**5.445.811.000**	
4.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				78 unit	1.390.080.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	78 unit	1.464.042.000	Setda
4.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				7 unit	2.354.188.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	7 unit	3.625.307.000	Setda
4.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor bagian Hukum				12 bulan	400.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	12 bulan	356.462.000	Setda
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor bagian Organisasi				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor bagian PBJ dan Minbang				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor bagian Pemerintahan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		dan perlengkapan gedung kantor bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan													
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor bagian Umum				12 bulan							12 bulan		
4.1.1.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan dan operasional kepala daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**1.000.258.000**						100 persen	**1.030.951.000**	
4.1.1.2.11.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 bulan	790.258.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	12 bulan	819.124.000	Setda
4.1.1.2.11.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				3 kali	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	3 kali	31.827.000	Setda
4.1.1.2.11.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 bulan	180.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	12 bulan	180.000.000	Setda
4.1.1.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Persentase ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**1.440.000.000**						100 persen	**859.329.000**	
4.1.1.2.12.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				12 bulan	840.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat Daerah	12 bulan	509.232.000	Setda
4.1.1.2.12.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				12 bulan	600.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis	Sekretariat Daerah	12 bulan	350.097.000	Setda

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan			SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.192.910.000**							**1.427.900.000**	
4.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan keprotokoleran	100 persen		100 persen	100 persen	**1.192.910.000**						100 persen	**1.427.900.000**	
4.1.1.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase ketercapaian kinerja fasilitasi keprotokolan, komunikasi tugas pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan	100 persen		100 persen	100 persen	**1.192.910.000**						100 persen	**1.427.900.000**	
4.1.1.2.14.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah bulan penyelenggaraan keprotokoleran dalam kegiatan kedinasan				12 bulan	241.170.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan - Sekretariat Daerah	12 bulan	313.000.000	Setda
4.1.1.2.14.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kinerja Pemerintah Daerah yang Terpublikasi				1 tahun	633.540.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan - Sekretariat Daerah	1 tahun	1.063.400.000	Setda
4.1.1.2.14.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Publikasi ILPPD dalam satu tahun				1 kali	318.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan - Sekretariat Daerah	1 kali	51.500.000	Setda
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.2	**SEKRETARIAT DPRD**						**51.631.834.000**							**57.012.700.000**	
4.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**30.031.834.000**						100 persen	**31.218.700.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.2.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**12.000.000**						100 Persen	**26.000.000**	
4.2.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	2 dokumen	12.000.000	Set. DPRD
		Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
4.2.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	2 dokumen	2.500.000	Set. DPRD
4.2.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				12 bulan	8.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	12 bulan	11.500.000	Set. DPRD
		Jumlah dokumenevaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok. rencana tindak pengawasan(RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
4.2.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**2.747.525.000**						100 Persen	**3.572.900.000**	
4.2.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	2.675.625.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	12 bulan	3.500.000.000	Set. DPRD
4.2.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	70.400.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	Sekretariat DPRD	12 bulan	70.400.000	Set. DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
4.2.1. 2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	1 dokumen	2.500.000	Set. DPRD
4.2.1. 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**9.500.000**						100 Persen	**10.000.000**	
4.2.1. 2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam pameran, hakteknas dan karnaval batik				2 kali	9.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	2 kali	10.000.000	Set. DPRD
4.2.1. 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**3.030.000.000**						100 Persen	**4.035.000.000**	
4.2.1. 2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	25.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	12 bulan	35.000.000	Set. DPRD
4.2.1. 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	355.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	12 bulan	355.000.000	Set. DPRD
		Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan				20 unit							20 unit		
4.2.1. 2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	25.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	12 bulan	25.000.000	Set. DPRD
4.2.1. 2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makan dan minuman				11 bulan	645.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis	Sekretariat DPRD	11 bulan	635.000.000	Set. DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan			SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
4.2.1. 2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	145.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	12 bulan	145.000.000	Set. DPRD
4.2.1. 2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	40.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	12 bulan	40.000.000	Set. DPRD
4.2.1. 2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitas kunjungan tamu				12 bulan	295.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	12 bulan	300.000.000	Set. DPRD
4.2.1. 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				130 orang/kali	1.500.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	130 orang/kali	2.500.000.000	Set. DPRD
4.2.1. 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Persen		0 Persen	100 Persen	**1.000.000.000**						100 Persen	**-**	
4.2.1. 2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan penambahan ruang Sekretariat DPRD yang diadakan				1 lokasi	1.000.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	1 lokasi	-	Set. DPRD
4.2.1. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**901.800.000**						100 Persen	**939.800.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.2.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	1.800.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	12 bulan	1.800.000	Set. DPRD
4.2.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik				12 bulan	200.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	12 bulan	200.000.000	Set. DPRD
4.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	700.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	12 bulan	738.000.000	Set. DPRD
4.2.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**1.282.661.000**						100 Persen	**1.775.000.000**	
4.2.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				32 unit	903.911.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	32 unit	1.100.000.000	Set. DPRD
4.2.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpeliharan secara rutin/berkala				2 lokasi	273.750.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	2 lokasi	400.000.000	Set. DPRD
4.2.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	105.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	12 bulan	275.000.000	Set. DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.2.1.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**20.168.348.000**						100 Persen	**20.130.000.000**	
4.2.1.2.15.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD				12 bulan	19.103.348.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	12 bulan	18.740.000.000	Set. DPRD
4.2.1.2.15.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas anggota DPRD yang diadakan				140 Stel	500.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	140 Stel	750.000.000	Set. DPRD
4.2.1.2.15.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah pelaksanaan perawatan dan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan				35 orang	565.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	35 orang	640.000.000	Set. DPRD
4.2.1.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**880.000.000**						100 Persen	**730.000.000**	
4.2.1.2.16.3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah bulan fasilitasi rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan				12 bulan	400.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	12 bulan	250.000.000	Set. DPRD
4.2.1.2.16.4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan Rumah Tangga DPRD				12 bulan	480.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	12 bulan	480.000.000	Set. DPRD
4.2.2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Perda yang ditetapkan	100 persen		100 persen	100 persen	**21.600.000.000**						100 persen	**25.794.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.2.2.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase ketercapaian pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**6.250.000.000**						100 Persen	**8.250.000.000**	
4.2.2.2.01.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang ditetapkan				12 Perda	3.000.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	12 Perda	4.750.000.000	Set. DPRD
4.2.2.2.01.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah pendampingan/pengkajian Raperda yang dilaksanakan				10 kali	3.250.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	10 kali	3.500.000.000	Set. DPRD
4.2.2.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Jumlah pembahasan dokumen anggaran dan evaluasi	30 dokumen		5 dokumen	5 dokumen	**450.000.000**						5 dokumen	**900.000.000**	
4.2.2.2.02.3	Pembahasan APBD	Jumlah pembahasan APBD yang dilaksanakan				4 kali	450.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	4 kali	900.000.000	Set. DPRD
4.2.2.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase ketercapaian Peningkatan kapasitas DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**3.710.000.000**						100 Persen	**4.215.000.000**	
4.2.2.2.04.2	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan				6 kali	2.500.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	6 kali	2.750.000.000	Set. DPRD
4.2.2.2.04.3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah produk hukum yang disosialisasikan				6 Perda	860.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	6 Perda	865.000.000	Set. DPRD
4.2.2.2.04.6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah rapat dengar pendapat/dialog dengan pejabat pemerintah daerah,				20 kali	300.000.000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	Sekretariat DPRD	20 kali	400.000.000	Set. DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dilaksanakan						Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
4.2.2.2.04.7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah program kerja/agenda kerja DPRD yang disusun				2 kali	50.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	2 kali	200.000.000	Set. DPRD
4.2.2.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase ketercapaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**1.890.000.000**						100 Persen	**1.929.000.000**	
4.2.2.2.05.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah fasilitas koordinasi dan konsultasi dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan				96 kali	525.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	96 kali	600.000.000	Set. DPRD
4.2.2.2.05.3	Pelaksanaan Reses	Jumlah fasilitas pelaksanaan reses daerah wilayah pemilihan anggota DPRD yang dilaksanakan				3 kali	1.365.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Sekretariat DPRD	3 kali	1.329.000.000	Set. DPRD
4.2.2.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase ketercapaian Fasilitasi Tugas DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**9.300.000.000**						100 Persen	**10.500.000.000**	
4.2.2.2.08.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah fasilitas kunjungan kerja alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan				50 kali	9.300.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	DPRD Kota Pekalongan	50 kali	10.500.000.000	Set. DPRD
		Jumlah fasilitas pelaksanaan adeksi yang dilaksanakan				8 kali							8 kali		
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5.1	**PERENCANAAN**						**7.011.185.000**							**8.303.905.694**	
5.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**5.680.760.000**						100 persen	**6.476.705.694**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.1.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.400.000**						100 persen	**362.120.740**	
5.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokumen	2.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bappeda	2 dokumen	326.474.500	Bappeda
5.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bappeda	2 dokumen	1.750.485	Bappeda
5.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bappeda	12 bulan	33.895.755	Bappeda
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen evaluasi SPIP yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen RTP yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP (penetapan dan perubahan)yang disusun				2 dokumen							2 dokumen		
5.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**5.052.789.000**						100 persen	**5.452.397.990**	
5.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Bappeda				14 bulan	4.998.589.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bappeda	14 bulan	5.401.147.990	Bappeda
5.1.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	52.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis	Bappeda	12 bulan	49.500.000	Bappeda

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan			SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
5.1.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bappeda	1 dokumen	1.750.000	Bappeda
5.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.750.000**						100 persen	**10.000.000**	
5.1.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Hakteknas dan Pekan Batik				3 kali	9.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bappeda	3 kali	10.000.000	Bappeda
5.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**360.320.000**						100 persen	**398.064.000**	
5.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bappeda	12 bulan	1.500.000	Bappeda
5.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda-benda pos				12 bulan	66.470.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bappeda	12 bulan	67.564.000	Bappeda
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				3 unit							3 unit		
5.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bappeda	12 bulan	3.000.000	Bappeda
5.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	56.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	Bappeda	11 bulan	57.000.000	Bappeda

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
5.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	15.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bappeda	12 bulan	16.000.000	Bappeda
5.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bappeda	12 bulan	3.000.000	Bappeda
5.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				139 org/kali	215.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bappeda	139 org/kali	250.000.000	Bappeda
5.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**159.050.000**						100 persen	**164.122.964**	
5.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	1.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bappeda	12 bulan	1.600.000	Bappeda
5.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	75.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bappeda	12 bulan	78.000.000	Bappeda
5.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	82.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	Bappeda	12 bulan	84.522.964	Bappeda
		Jumlah jasa tenaga kontrak				1							1		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota				orang/bulan		Kelurahan			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota		orang/bulan		
5.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**89.451.000**						100 persen	**90.000.000**	
5.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				15 unit	65.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bappeda	15 unit	65.000.000	Bappeda
5.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	24.451.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Bappeda	12 bulan	25.000.000	Bappeda
5.1.2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 persen		100,00 persen	100 persen	**455.425.000**						100 persen	**735.200.000**	
5.1.2.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 persen		100 persen	100 persen	**351.825.000**						100 persen	**600.000.000**	
5.1.2.2.01.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD yang disusun				3 dokumen	351.825.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	stakeholder perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen	600.000.000	Bappeda
5.1.2.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100 persen		100 persen	100 persen	**20.000.000**						100 persen	**12.500.000**	
5.1.2.2.02.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun				1 dokumen	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	stakeholder satu data	1 dokumen	12.500.000	Bappeda

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
5.1.2.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**83.600.000**						100 persen	**122.700.000**	
5.1.2.2.03.3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi RKPD yang disusun				4 dokumen	83.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	OPD di Kota Pekalongan	4 dokumen	122.700.000	Bappeda
		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
5.1.3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100 persen		100,00 persen	100 persen	**875.000.000**						100 persen	**1.092.000.000**	
5.1.3.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 persen	**260.000.000**						100 persen	**343.000.000**	
5.1.3.2.01.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan				2 kali	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Stakeholder perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia	2 kali	10.000.000	Bappeda
5.1.3.2.01.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang disusun				1 dokumen	75.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Stakeholder perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia	1 dokumen	88.000.000	Bappeda
		Jumlah dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.1.3.2.01.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia				4 kali	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Stakeholder perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia	4 kali	25.000.000	Bappeda
5.1.3.2.01.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Anggaran Responsif Anak (ARA) Kota Pekalongan				1 dokumen	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Stakeholder perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia	1 dokumen	220.000.000	Bappeda
		Jumlah dokumen Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Pekalongan				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah dokumen perencanaan pendukung penanggulangan masalah gizi yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
5.1.3.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 persen	**175.000.000**						100 persen	**285.000.000**	
5.1.3.2.02.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pendampingan pengembangan ekonomi lokal				1 dokumen	175.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Stakeholder perencanaan perekonomian dan SDA	1 dokumen	285.000.000	Bappeda
		Jumlah dokumen pendukung pengembangan Teknopark				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah rakor, sosialisasi dan workshop pengembangan teknopark				5 kali							5 kali		
5.1.3.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen		100 persen	100 persen	**440.000.000**						100 persen	**464.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.1.3.2.03.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen koordinasi AMPL yang disusun				1 dokumen	240.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Stakeholder perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	1 dokumen	227.000.000	Bappeda
		Jumlah dokumen koordinasi infrastruktur yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
5.1.3.2.03.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen/laporan kegiatan koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang disusun				1 dok	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Stakeholder perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	1 dok	237.000.000	Bappeda
		Jumlah dokumen/laporan koordinasi penataan ruang yang disusun				1 dok							1 dok		
5.5	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**963.584.000**							**1.363.000.000**	
5.5.2	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100 persen		100,00 persen	100 persen	**963.584.000**						100 persen	**1.363.000.000**	
5.5.2.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan	100 persen		100 persen	100 persen	**250.000.000**						100 persen	**276.806.000**	
5.5.2.2.01.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah kajian riset bersama yang dilaksanakan				0 riset	175.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	stakeholder kelitbangan	0 riset	196.000.000	Bappeda
		Jumlah penelitian dan pengembangan bidang otonomi daerah yang dilaksanakan				6 riset							6 riset		
5.5.2.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah aplikasi kelitbangan yang dikembangkan				1 aplikasi	75.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	stakeholder kelitbangan	1 aplikasi	80.806.000	Bappeda
		Jumlah jurnal litbang yang diterbitkan				1 dokumen							1 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.5.2.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100 persen		100 persen	100 persen	**250.000.000**						100 persen	**322.610.000**	
5.5.2.2.02.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah FGD/workshop/Rakor kelitbangan yang dilaksanakan				3 kali	250.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Stakeholder kelitbangan	3 kali	322.610.000	Bappeda
		Jumlah kajian dewan riset yang disusun				2 dokumen kajian							2 dokumen kajian		
		Jumlah kajian riset bersama yang dilaksanakan				1 riset							1 riset		
		Jumlah workshop/FGD pengabdian masyarakat yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
5.5.2.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	100 persen		100 persen	100 persen	**463.584.000**						100 persen	**763.584.000**	
5.5.2.2.04.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah keikutsertaan dalam pameran inovasi tingkat regional				1 event	463.584.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Stakeholder inovasi dan teknologi	1 event	763.584.000	Bappeda
		Jumlah Koordinasi dan evaluasi Sida				4 kali							4 kali		
		Jumlah pelaksanaan Pameran Inovasi				1 kali							1 kali		
		Jumlah Pemenang Krenova				5 pemenang							5 pemenang		
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5.2	**KEUANGAN**						**30.998.400.000**							**31.164.780.000**	
5.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**19.434.665.000**						100 persen	**20.463.000.000**	
5.2.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**17.000.000**						100 Persen	**21.500.000**	
5.2.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis	BKD	2 dokumen	5.000.000	BKD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan			SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
5.2.1. 2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	2 dokumen	3.000.000	BKD
5.2.1. 2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	13.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	12 bulan	13.500.000	BKD
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
5.2.1. 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**12.878.065.000**						100 Persen	**14.148.000.000**	
5.2.1. 2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12.740.065.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	12 bulan	14.000.000.000	BKD
5.2.1. 2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	136.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	12 bulan	145.000.000	BKD
5.2.1. 2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	1 dokumen	3.000.000	BKD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.2.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**9.500.000**						100 Persen	**10.000.000**	
5.2.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	2 kali	10.000.000	BKD
5.2.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**933.000.000**						100 Persen	**1.102.500.000**	
5.2.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	12 bulan	10.000.000	BKD
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				15 unit							15 unit		
5.2.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	420.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	12 bulan	435.000.000	BKD
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				78 unit							78 unit		
5.2.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	18.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	12 bulan	25.000.000	BKD
5.2.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	110.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	11 bulan	140.000.000	BKD
5.2.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	BKD	12 bulan	60.000.000	BKD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
5.2.1. 2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	12 bulan	2.500.000	BKD
5.2.1. 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				200 orang/kali	325.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	200 orang/kali	430.000.000	BKD
5.2.1. 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**4.509.000.000**						100 Persen	**4.033.000.000**	
5.2.1. 2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan Roda 2 yang diadakan				1 unit	2.863.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	1 unit	2.863.000.000	BKD
		Jumlah Kendaraan Jabatan Roda 4 yang diadakan				6 unit							6 unit		
		Jumlah Sepeda Listrik yang diadakan				2 unit							2 unit		
5.2.1. 2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 4 yang diadakan				4 unit	1.646.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	4 unit	1.170.000.000	BKD
5.2.1. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**714.570.000**						100 Persen	**803.000.000**	
5.2.1. 2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	12 bulan	3.000.000	BKD
5.2.1. 2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	506.400.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	BKD	12 bulan	575.000.000	BKD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
5.2.1. 2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	205.170.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	12 bulan	225.000.000	BKD
5.2.1. 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**373.530.000**						100 Persen	**345.000.000**	
5.2.1. 2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				47 unit	133.530.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	47 unit	150.000.000	BKD
5.2.1. 2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	1 unit	150.000.000	BKD
5.2.1. 2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	12 bulan	45.000.000	BKD
5.2.2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	7,26 persen		11,91 persen	8,33 persen	**7.883.470.000**						8,33 persen	**6.928.000.000**	
5.2.2. 2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	**1.225.960.000**						100 persen	**1.085.500.000**	
5.2.2. 2.01.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan	Jumlah dokumen KUA PPAS APBD yang disusun				2 dokumen	50.000.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,	BKD	2 dokumen	40.000.000	BKD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	PPAS							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
5.2.2.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUPA PPAS Perubahan APBD yang disusun				2 dokumen	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	2 dokumen	40.000.000	BKD
5.2.2.2.01.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA yang disusun				2 dokumen	62.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	2 dokumen	73.000.000	BKD
		Jumlah kegiatan asistensi RKA PD/unit kerja yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
5.2.2.2.01.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen perda dan perwal APBD Kota Pekalongan				2 dokumen	911.320.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	2 dokumen	732.500.000	BKD
		Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
5.2.2.2.01.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bahan sidang perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan				4 dokumen	126.640.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	4 dokumen	149.500.000	BKD
		Dokumen perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
5.2.2.2.01.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal / perwal di Kota Pekalongan				12 bulan	26.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	BKD	12 bulan	28.000.000	BKD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan				16 kali		Kelurahan			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota		16 kali		
5.2.2.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun				2 dokumen	-	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	2 dokumen	22.500.000	BKD
		Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun				12 laporan							12 laporan		
		Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan				6 kali							6 kali		
5.2.2.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	100 persen		100 persen	100 persen	**264.910.000**						100 persen	**334.500.000**	
5.2.2.2.02.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan dan dicairkan				67 OPD	87.760.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	67 OPD	92.500.000	BKD
		Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan				3 dokumen							3 dokumen		
		Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah				12 kali							12 kali		
5.2.2.2.02.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan Dana Transfer per bidang yang disusun				30 laporan	23.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	30 laporan	30.000.000	BKD
5.2.2.2.02.6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah pelaksanaan pelatihan/monitoring pelaksanaan transaksi non tunai				2 kali	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	2 kali	35.000.000	BKD
5.2.2.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan				3300 data SPT Tahunan	72.150.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	3300 data SPT Tahunan	82.000.000	BKD
		Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota				14 kali							14 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Pekalongan													
5.2.2.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen/pedoman penatausahaan keuangan daerah yang disusun				1 dokumen	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	1 dokumen	35.000.000	BKD
5.2.2.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah				3 kali	32.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	3 kali	60.000.000	BKD
5.2.2.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	**440.600.000**						100 persen	**508.000.000**	
5.2.2.2.03.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan				7 laporan	57.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	7 laporan	73.000.000	BKD
		Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD/SKPKD				68 laporan							68 laporan		
5.2.2.2.03.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun				13 laporan	8.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	13 laporan	14.500.000	BKD
5.2.2.2.03.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun				7 laporan	95.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	7 laporan	120.000.000	BKD
		Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD dan SKPD yang dilaksanakan				5 kali							5 kali		
5.2.2.2.03.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang				2 dokumen	90.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	BKD	2 dokumen	140.000.000	BKD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	disusun						Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
		Jumlah publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 kali							1 kali		
5.2.2.2.03.7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun				12 laporan	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	12 laporan	14.000.000	BKD
5.2.2.2.03.9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang disusun				1 dokumen	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	1 dokumen	27.500.000	BKD
5.2.2.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan/ desk/ rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD yang dilaksanakan secara triwulanan				4 kali	145.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKD	4 kali	119.000.000	BKD
		Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan OPD yang dilaksanakan triwulanan				4 kali							4 kali		
		Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pelaporan dana bergulir				4 unit kerja							4 unit kerja		
5.2.2.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100 persen		100 persen	100 persen	**5.952.000.000**						100 persen	**5.000.000.000**	
5.2.2.2.04.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah bulan penyediaan dana BTT				12 bulan	5.952.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Warga Kota Pekalongan	12 bulan	5.000.000.000	BKD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.2.3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100 persen		100,00 persen	100 persen	**1.920.780.000**						100 persen	**1.920.780.000**	
5.2.3.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan	100 persen		100 persen	100 persen	**1.920.780.000**						100 persen	**1.920.780.000**	
5.2.3.2.01.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah buku Analis Standar Biaya yang disusun				10 buku	154.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Aset daerah	10 buku	154.900.000	BKD
		Jumlah buku standar harga yang disusun				2 buku							2 buku		
5.2.3.2.01.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah				2 buku	29.130.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Aset daerah	2 buku	29.130.000	BKD
5.2.3.2.01.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah pengajuan sertifikat				750 bidang	879.630.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Aset daerah	750 bidang	879.630.000	BKD
5.2.3.2.01.8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah jenis BMD yang akan dinilai untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD				3 jenis	116.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Aset daerah	3 jenis	116.000.000	BKD
5.2.3.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah gedung /aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala				2 unit	175.690.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Aset daerah	2 unit	175.690.000	BKD
		Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat				3 unit							3 unit		
		Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok				5 kali							5 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.2.3.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan				79 laporan	565.430.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Aset daerah	79 laporan	565.430.000	BKD
5.2.4	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	0,05 persen		0,05 persen	0,05 persen	**1.759.485.000**						0,05 persen	**1.853.000.000**	
5.2.4.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak	5.0 persen		4.5 persen	4.6 persen	**1.759.485.000**						4.6 persen	**1.853.000.000**	
		Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BKD	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
5.2.4.2.01.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun				2 dokumen	75.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Wajib pajak	2 dokumen	150.000.000	BKD
		Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun				12 laporan							12 laporan		
		Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan				8 kali							8 kali		
		Jumlah sosialisasi dan kegiatan Walikota Pekalongan Regional Tax Award yang dilaksanakan				0 kali							0 kali		
		Jumlah sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
5.2.4.2.01.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak dan retribusi yang didata				1500 objek	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Wajib pajak	1500 objek	40.000.000	BKD
		Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring				1140 objek							1140 objek		
5.2.4.2.01.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumkah sistem informasi baru yang diadakan				1 aplikasi	141.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Wajib pajak	1 aplikasi	248.000.000	BKD
		Jumlah sistem informasi yang dilakukan pemeliharaan				8 aplikasi							8 aplikasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.2.4.2.01.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan				2000 berkas	371.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Wajib pajak	2000 berkas	180.000.000	BKD
		Jumlah Buku DHKP PBB yang disusun				94 buku							94 buku		
		Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB				4 buku							4 buku		
		Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate				12000 objek							12000 objek		
5.2.4.2.01.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan				94000 lembar	300.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Wajib pajak	94000 lembar	315.000.000	BKD
		Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat				19000 lembar							19000 lembar		
5.2.4.2.01.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota				1 orang/bulan	384.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Wajib pajak	1 orang/bulan	405.000.000	BKD
		Jumlah wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani				18000 WP/WR							18000 WP/WR		
5.2.4.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi				1500 SSPD BPHTB	55.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Wajib pajak	1500 SSPD BPHTB	75.000.000	BKD
5.2.4.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah surat tagihan yang diterbitkan				3060 surat	219.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Wajib pajak	3060 surat	250.000.000	BKD
5.2.4.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah				96 kali	183.435.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Wajib pajak	96 kali	190.000.000	BKD
		Terperiksanya wajib pajak dan retribusi daerah				48 wajib pajak							48 wajib pajak		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5.3	**KEPEGAWAIAN**						**5.733.978.000**							**8.001.786.000**	
5.3.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**5.085.810.000**						100 persen	**6.973.586.000**	
5.3.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**12.450.000**						100 persen	**23.300.000**	
5.3.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKPPD	2 Dokumen	10.800.000	BKPPD
5.3.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA yang disusun				4 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKPPD	4 Dokumen	4.000.000	BKPPD
5.3.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	8.450.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKPPD	12 bulan	8.500.000	BKPPD
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 Dokumen							4 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dokumen Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen							5 Dokumen		
5.3.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**4.428.231.000**						100 persen	**3.990.086.000**	
5.3.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	4.376.731.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis	BKPPD	12 bulan	3.929.986.000	BKPPD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Podosugih		Publik	SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
5.3.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	50.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKPPD	12 Bulan	57.100.000	BKPPD
5.3.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 Dokumen	1.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKPPD	1 Dokumen	3.000.000	BKPPD
								Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih							
5.3.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**20.000.000**	
5.3.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam even tingkat kota				2 Kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKPPD	2 Kali	20.000.000	BKPPD
5.3.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**251.752.000**						100 persen	**673.200.000**	
5.3.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	5.012.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKPPD	12 bulan	5.500.000	BKPPD
5.3.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	46.212.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	BKPPD	12 bulan	250.000.000	BKPPD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor gedung yang diadakan				4 unit					perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota		4 unit		
5.3.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan Penyediaan Peralatan rumah tangga				12 bulan	4.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKPPD	12 bulan	5.000.000	BKPPD
5.3.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman rapat				11 bulan	70.028.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKPPD	11 bulan	75.000.000	BKPPD
5.3.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan				12 bulan	24.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKPPD	12 bulan	35.000.000	BKPPD
5.3.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang- undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKPPD	12 bulan	2.700.000	BKPPD
5.3.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				100 orang	100.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKPPD	100 orang	300.000.000	BKPPD
5.3.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**208.600.000**						100 persen	**216.000.000**	
5.3.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	BKPPD	12 Bulan	3.000.000	BKPPD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
5.3.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	150.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKPPD	12 Bulan	155.000.000	BKPPD
5.3.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 Bulan	56.100.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKPPD	12 Bulan	58.000.000	BKPPD
5.3.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**175.277.000**						100 persen	**2.051.000.000**	
5.3.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				13 unit	35.877.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKPPD	13 unit	39.000.000	BKPPD
5.3.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala				2 gedung	127.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKPPD	2 gedung	2.000.000.000	BKPPD
5.3.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				20 unit	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	BKPPD	20 unit	12.000.000	BKPPD
5.3.2	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	80,00 persen		80,00 persen	80 persen	**648.168.000**						80 persen	**1.028.200.000**	
5.3.2.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan**	Persentase ketersediaan data PNS	100 persen		100 persen	100 persen	**161.200.000**						100 persen	**165.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Informasi Kepegawaian ASN														
5.3.2.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah kebutuhan data yang dapat terintegrasi melalui aplikasi SAPK				1000 data	96.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	ASN Kota Pekalongan	1000 data	100.000.000	BKPPD
5.3.2.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data yang disinkronkan/diupdate				1000 data	65.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	ASN Kota Pekalongan	1000 data	65.000.000	BKPPD
5.3.2.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase Ketersediaan Data Mutasi dan Promosi ASN	110 persen		110 persen	110 persen	**126.493.000**						110 persen	**219.000.000**	
5.3.2.2.02.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				550 orang	20.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	ASN Kota Pekalongan	550 orang	19.000.000	BKPPD
5.3.2.2.02.3	Pengelolaan Promosi ASN	1. Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Yang Lulus Seleksi				3 orang	105.893.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	ASN Kota Pekalongan	3 orang	200.000.000	BKPPD
		2. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Yang Dilantik				50 orang							50 orang		
		3. Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian Dinas (25 orang) dan Ujian Penyesuaian Ijasah (25 0rang)				50 orang							50 orang		
5.3.2.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	Persentase PNS berkembang kompetensinya (Diklat teknis dan Latpim)	42 persen		42 persen	42 persen	**270.775.000**						42 persen	**592.700.000**	
5.3.2.2.03.2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah PNS yang mengikuti Asesmen				30 orang	150.655.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	ASN Kota Pekalongan	30 orang	200.000.000	BKPPD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.3.2.2.03.4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang menerima bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas				2 orang	51.420.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	ASN Kota Pekalongan	2 orang	127.700.000	BKPPD
		Jumlah Praja taruna/taruni yang mengikuti pendidikan kedinasan				6 orang							6 orang		
5.3.2.2.03.6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah kepala sekolah yang ditingkatkan kompetensi manajerialnya				2 orang	9.220.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	ASN Kota Pekalongan	2 orang	100.000.000	BKPPD
5.3.2.2.03.7	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan Hasil Monitoring Pasca Diklat Struktural				3 Laporan	1.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	ASN Kota Pekalongan	3 Laporan	5.000.000	BKPPD
5.3.2.2.03.8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Laporan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi				1 Laporan	1.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	ASN Kota Pekalongan	1 Laporan	5.000.000	BKPPD
5.3.2.2.03.9	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Diklat Penjenjangan Fungsional				10 kegiatan	36.480.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	ASN Kota Pekalongan	10 kegiatan	100.000.000	BKPPD
5.3.2.2.03.11	Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Laporan Monitoring Evaluasi Diklat Teknis Fungsional				1 Laporan	1.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	ASN Kota Pekalongan	1 Laporan	5.000.000	BKPPD
5.3.2.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 kegiatan	20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	ASN Kota Pekalongan	1 kegiatan	50.000.000	BKPPD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
5.3.2.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Tingkat Disiplin ASN	100 persen		100 persen	100 persen	**89.700.000**						100 persen	**51.500.000**	
5.3.2.2.04.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan satya lancana karya satya bagi PNS				100 orang	33.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	ASN Kota Pekalongan	100 orang	34.000.000	BKPPD
5.3.2.2.04.7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah CPNS dan PNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan				50 orang	50.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	ASN Kota Pekalongan	50 orang	7.500.000	BKPPD
		Jumlah Petugas yang memberikan pendampingan aplikasi e-kinerja				40 orang							40 orang		
5.3.2.2.04.8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pegawai yang mendapat pembinaan dalam penanganan kasus-kasus kepegawaian				4 orang	6.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	ASN Kota Pekalongan	4 orang	10.000.000	BKPPD
5.4	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**2.454.845.000**							**3.839.934.800**	
5.4.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase PNS berkembang kompetensinya (Latsar)	100 persen		100,00 persen	100 persen	**2.454.845.000**						100 persen	**3.839.934.800**	
5.4.2.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Persentase Penyelenggaran, Pembinaan, pengoordinasian., fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen		100 persen	100 persen	**341.110.000**						100 persen	**2.080.634.800**	
5.4.2.2.01.3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional				200 orang	252.610.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis	ASN Kota Pekalongan	200 orang	1.015.000.000	BKPPD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							Podosugih			SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
5.4.2. 2.01.4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pejabat eselon II dan III yang mengikuti pelatihan kepemimpinan PKN dan PKA Tk. II dan III				2 orang	88.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	ASN Kota Pekalongan	2 orang	1.065.634.800	BKPPD
5.4.2. 2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Cakupan penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	250 orang		207 orang	200 orang	**2.113.735.000**						200 orang	**1.759.300.000**	
5.4.2. 2.02.3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi				15 orang	77.475.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	ASN Kota Pekalongan	15 orang	250.000.000	BKPPD
5.4.2. 2.02.7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pendidikan Pelatihan Dasar				210 orang	2.031.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	ASN Kota Pekalongan	210 orang	1.500.000.000	BKPPD
5.4.2. 2.02.8	Pembinaan, Pengoordinasian,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring pasca Diklat Non				2 Laporan	4.360.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,	ASN Kota Pekalonga	2 Laporan	9.300.000	BKPPD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Struktural						Pekalongan Barat, Podosugih	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	n			
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**														
6.1	**INSPEKTORAT DAERAH**						**5.314.460.000**							**6.347.640.325**	
6.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**4.920.460.000**						100 persen	**5.905.340.325**	
6.1.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**13.500.000**						100 Persen	**14.150.000**	
6.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Inspektorat	2 Dokumen	3.000.000	Inspektorat
		Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
6.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Inspektorat	2 Dokumen	1.650.000	Inspektorat
6.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	Inspektorat	12 Bulan	9.500.000	Inspektorat
		Jumlah dokumen evaluasi renja				4							4		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		yang disusun				Dokumen		Kecamatan, Semua Kelurahan		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota		Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen							5 Dokumen		
6.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**4.476.599.000**						100 Persen	**5.456.956.325**	
6.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 Bulan	4.445.099.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Inspektorat	12 Bulan	5.421.356.325	Inspektorat
6.1.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	30.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Inspektorat	12 Bulan	34.000.000	Inspektorat
6.1.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 Dokumen	1.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Inspektorat	1 Dokumen	1.600.000	Inspektorat
6.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**45.000.000**						100 Persen	**55.500.000**	
6.1.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah				2 Kali	9.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Inspektorat	2 Kali	9.500.000	Inspektorat
6.1.1.2.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah laporan PAK tenaga fungsional yang disusun				2 laporan	5.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	Inspektorat	2 laporan	5.000.000	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kepegawaian									Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
6.1.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri				5 Laporan	30.500.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Inspektorat	5 Laporan	41.000.000	Inspektorat
6.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**199.375.000**						100 Persen	**222.700.000**	
6.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	2.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Inspektorat	12 Bulan	2.500.000	Inspektorat
6.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	40.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Inspektorat	12 Bulan	47.500.000	Inspektorat
6.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	8.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Inspektorat	12 Bulan	7.000.000	Inspektorat
6.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	32.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Inspektorat	11 Bulan	50.000.000	Inspektorat
6.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12.875.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	Inspektorat	12 Bulan	13.000.000	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
6.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	3.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Inspektorat	12 Bulan	2.700.000	Inspektorat
6.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				150 orang/kali	100.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Inspektorat	150 orang/kali	100.000.000	Inspektorat
6.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**63.100.000**						100 Persen	**64.000.000**	
6.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	3.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	0	12 Bulan	4.500.000	Inspektorat
6.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	35.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	0	12 Bulan	38.500.000	Inspektorat
6.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 Bulan	24.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	0	12 Bulan	21.000.000	Inspektorat
6.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**122.886.000**						100 Persen	**92.034.000**	
6.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				15 Unit	72.000.000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	0	15 Unit	59.034.000	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							Kecamatan, Semua Kelurahan		Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
6.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 Unit	25.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	0	1 Unit	16.500.000	Inspektorat
6.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 Bulan	25.886.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	0	12 Bulan	16.500.000	Inspektorat
6.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85,00 persen		85,00 persen	85 persen	**127.000.000**						85 persen	**124.500.000**	
6.1.2.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	100 persen		100 persen	100 persen	**116.000.000**						100 persen	**109.500.000**	
6.1.2.2.01.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja yang terbit tepat waktu				64 Laporan	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	0	64 Laporan	9.000.000	Inspektorat
6.1.2.2.01.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan yang terbit tepat waktu				35 Laporan	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	0	35 Laporan	9.000.000	Inspektorat
6.1.2.2.01.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja yang terbit tepat waktu				40 laporan	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	0	40 laporan	16.000.000	Inspektorat
6.1.2.	Reviu Laporan	Jumlah Laporan Hasil Reviu				40	15.000.000	Kota	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Peningkatan kualitas tata	0	40	11.500.000	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.01.4	Keuangan	Keuangan yang terbit tepat waktu				Laporan		Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota		Laporan		
6.1.2. 2.01.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal				2 Laporan	6.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	0	2 Laporan	10.000.000	Inspektorat
6.1.2. 2.01.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				7 Laporan	55.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	0	7 Laporan	54.000.000	Inspektorat
6.1.2. 2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Persentase ketercapaian Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang Terbit Tepat Waktu	100 persen		100 persen	100 persen	**11.000.000**						100 persen	**15.000.000**	
6.1.2. 2.02.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang diselesaikan tepat waktu				100 persen	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	0	100 persen	6.000.000	Inspektorat
6.1.2. 2.02.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang terbit tepat waktu				100 persen	6.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	0	100 persen	9.000.000	Inspektorat
6.1.3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Level Kapabilitas APIP	3,00 nilai		3,00 nilai	3 nilai	**267.000.000**						3 nilai	**317.800.000**	
6.1.3. 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	100 persen		100 persen	100 persen	**23.000.000**						100 persen	**34.300.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.1.3.2.01.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan/Regulasi tentang Pengawasan (PKPT/Jakwas) yang disusun				3 Dokumen	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	0	3 Dokumen	31.300.000	Inspektorat
		Jumlah Dokumen Peraturan/Pedoman/SOP tentang peningkatan Kapabilitas APIP yang disusun				1 Laporan							1 Laporan		
		Jumlah Laporan Dokumen RAD PPK yang disusun				1 Laporan							1 Laporan		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan yang disusun				2 Laporan							2 Laporan		
6.1.3.2.01.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pemgawasan				7 Laporan	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	0	7 Laporan	3.000.000	Inspektorat
6.1.3.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan	98 persen		93 persen	94 persen	**244.000.000**						94 persen	**283.500.000**	
6.1.3.2.02.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pendampingan asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi				17 laporan	84.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	0	17 laporan	22.000.000	Inspektorat
6.1.3.2.02.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dokumen LHKASN				2500 Dokumen	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	0	2500 Dokumen	131.500.000	Inspektorat
		Jumlah Dokumen LHKPN ASN				500 Dokumen							500 Dokumen		
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				8 Laporan							8 Laporan		
6.1.3.2.02.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi penegakan integritas yang disusun				4 Laporan	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi	0	4 Laporan	130.000.000	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											penerapan MRI di tingkat Kota				
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**8.923.115.000**							**10.052.081.000**	
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**8.484.615.000**						100 persen	**9.604.501.000**	
7.1.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**124.000.000**						100 persen	**56.600.000**	
7.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 Dokumen	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Utara	2 Dokumen	5.300.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Utara	2 Dokumen	3.100.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan				12 Bulan	116.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	48.200.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Bandengan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Dokumen Evaluasi Renja yang disusun				4 Dokumen							4 Dokumen		
		jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah Dokumen SPIP (1 Dokumen RTP, 4 Laporan Pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen							5 Dokumen		
7.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**6.892.487.000**						100 persen	**7.618.187.000**	
7.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	6.691.487.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	7.477.187.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kecamatan				12 Bulan	198.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	138.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kelurahan Bandengan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
7.1.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 dokumen	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Utara	1 dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**16.500.000**						100 persen	**29.300.000**	
7.1.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Keikutsertaan dalam Event tingkat Kota				2 Kegiatan	16.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Utara	2 Kegiatan	29.300.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**440.890.000**						100 persen	**164.000.000**	
7.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan				12 Bulan	8.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	4.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Bandengan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
7.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Kecamatan				12 Bulan	152.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	83.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Kelurahan Bandengan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Kelurahan Panjang Wetan													
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kecamatan				7 Unit							7 Unit		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kelurahan Bandengan				1 Unit							1 Unit		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kelurahan Degayu				1 Unit							1 Unit		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kelurahan Kandang Panjang				2 Unit							2 Unit		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kelurahan Krapyak				11 Unit							11 Unit		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kelurahan Padukuhan Kraton				2 Unit							2 Unit		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kelurahan Panjang Baru				3 Unit							3 Unit		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kelurahan Panjang Wetan				1 Unit							1 Unit		
7.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan				12 Bulan	12.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	4.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Bandengan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
7.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan				11 Bulan	195.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Utara	11 Bulan	37.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Bandengan				11 Bulan							11 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Degayu				11 Bulan							11 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Kandang Panjang				11 Bulan							11 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Krapyak				11 Bulan							11 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Padukuhan Kraton				11 Bulan							11 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Panjang Baru				11 Bulan							11 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Panjang Wetan				11 Bulan							11 Bulan		
7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan				12 Bulan	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	6.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Bandengan									penerapan MRI di tingkat Kota				
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
7.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan				12 Bulan	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	4.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Bandengan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Krapyak													
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah				12 Kali	12.540.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Kali	25.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**783.152.000**						100 persen	**113.000.000**	
7.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan				12 Bulan	10.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Bandengan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
7.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan				12 Bulan	125.884.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	48.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Bandengan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
7.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor Kecamatan				12 Bulan	646.768.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	62.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor Kelurahan Bandengan				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
7.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**227.586.000**						100 persen	**1.623.414.000**	
7.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kecamatan				8 Unit	104.086.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Utara	8 Unit	87.414.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Bandengan				4 Unit							4 Unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Degayu				3 Unit							3 Unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				3 Unit							3 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Kelurahan Kandang Panjang													
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Krapyak				3 Unit							3 Unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Padukuhan Kraton				3 Unit							3 Unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Panjang Baru				3 Unit							3 Unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Panjang Wetan				3 Unit							3 Unit		
7.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kecamatan				1 Unit	78.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Utara	1 Unit	1.516.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Bandengan				1 Unit							1 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Degayu				1 Unit							1 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kandang Panjang				1 Unit							1 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Krapyak				2 Unit							2 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Padukuhan Kraton				3 Unit							3 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Panjang Baru				1 Unit							1 Unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Panjang Wetan				2 Unit							2 Unit		
7.1.1.2.09.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan				12 Bulan	45.000.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,	Kecamatan Pekalonga	12 Bulan	20.000.000	Kecamatan Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
0	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	dan perlengkapan gedung kantor Kecamatan						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	n Utara			Utara
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Bandengan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100 persen		100,00 persen	100 persen	**15.000.000**						100 persen	**59.500.000**	
7.1.2.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	**15.000.000**						100 persen	**59.500.000**	
7.1.2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi Tertib				7 Keluraha	15.000.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,	warga wilayah	7 Keluraha	59.500.000	Kecamatan Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Administrasi				n		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Utara	n		Utara
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen		100 persen	100 persen	**132.500.000**						100 persen	**96.600.000**	
7.1.3.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	100 persen		0 persen	100 persen	**132.500.000**						100 persen	**96.600.000**	
7.1.3.2.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang disusun				1 dokumen	132.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Lembaga kemasyarakatan	1 dokumen	96.600.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi kegiatan bunda PAUD tingkat Kecamatan yang dilaksanakan				6 Kali			DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan				6 Kali		
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan Masyarakat yang difasilitasi				40 Kegiatan							40 Kegiatan		
		Jumlah Fasilitasi TP PKK				1 Unit							1 Unit		
		Jumlah Kegiatan Catur Pilar Yang Dilaksanakan				2 Kegiatan							2 Kegiatan		
7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100 persen		100,00 persen	100 persen	**280.000.000**						100 persen	**284.600.000**	
7.1.4.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen		100 persen	100 persen	**280.000.000**						100 persen	**284.600.000**	
7.1.4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan piket PBA yang dilaksanakan				20 Kegiatan	280.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara	20 Kegiatan	284.600.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan				48 Kegiatan							48 Kegiatan		
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	100 persen		100,00 persen	100 persen	**11.000.000**						100 persen	**6.880.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**11.000.000**						100 persen	**6.880.000**	
7.1.5.2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Forkompinca				1 kegiatan	11.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Forkompinca	1 kegiatan	6.880.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**407.433.000**							**422.597.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**407.433.000**						100 persen	**422.597.000**	
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**407.433.000**						100 persen	**422.597.000**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Kandang Panjang	1 Dokumen	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang diadakan/dibangun/dikembangkan/dipelihara				3 unit	77.638.000	Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Kandang Panjang	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Kandang Panjang	3 unit	94.638.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang diadakan/dibangun/dikembangkan/dipelihara				2 lokasi							2 lokasi		
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	317.295.000	Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Kandang	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Kandang Panjang	12 Bulan	312.959.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan Fasilitasi program akselerasi				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		pembangunan wilayah kelurahan						Panjang							
		Jumlah bulan fasilitasi sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Dokumen Rencana Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah Fasilitasi BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah fasilitas program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU)yang dilaksanakankiman (KOTAKU)				8 Kali							8 Kali		
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan/difasilitasi				8 Kali							8 Kali		
		Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah Kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pengembangan UMKM yang ddilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				777 Buah							777 Buah		
		Jumlah Rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				79 RT/RW							79 RT/RW		
		Jumlah Strip gula darah yang diadakan				34 Paket							34 Paket		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi							1 Lokasi		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**574.160.000**							**269.850.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**574.160.000**						100 persen	**269.850.000**	
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**574.160.000**						100 persen	**269.850.000**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Panjang Wetan	1 dokumen	15.450.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah gapura yang dibangun				1 unit	215.000.000	Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Panjang Wetan	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Panjang Wetan	1 unit	87.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Sarana dan Prasarana transportasi yang diadakan/dibangun/dikembangkan/dipelihara				1 lokasi							1 lokasi		
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	346.660.000	Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Panjang Wetan	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Panjang Wetan	12 bulan	167.400.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan Fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan da kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah Kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pengembangan UMKM yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				1008 buah							1008 buah		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				92 RT/RW							92 RT/RW		
		Jumlah strip gula yang diadakan				34 paket							34 paket		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
		Kegiatan rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**340.600.000**							**326.364.500**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**340.600.000**						100 persen	**326.364.500**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**340.600.000**						100 persen	**326.364.500**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Degayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Degayu	1 Dokumen	15.913.500	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang diadakan/dibangun/dikembangkan/dipelihara				2 Lokasi	70.000.000	Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Degayu	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Degayu	2 Lokasi	92.300.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	258.100.000	Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Degayu	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Degayu	12 Bulan	218.151.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali							8 Kali		
		Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				39 Kali							39 Kali		
		Jumlah kegiatan pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				441 Buah							441 Buah		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				48 RT/RW							48 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				34 Paket							34 Paket		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi							1 Lokasi		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**319.100.000**							**397.164.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**319.100.000**						100 persen	**397.164.000**	
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**319.100.000**						100 persen	**397.164.000**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Bandengan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Bandengan	1 dokumen	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang diadakan/dibangun/dikembangkan/dipelihara				1 lokasi	70.000.000	Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Bandengan	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Bandengan	1 lokasi	93.600.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	236.600.000	Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Bandengan	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Bandengan	12 bulan	288.564.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU)				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah dokumen rencana penanganan bencana tingkat kelurahan yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				8 kali							8 kali		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan pengembangan UMKM yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				27 Kali							27 Kali		
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				924 buah							924 buah		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				33 rt/rw							33 rt/rw		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				76 paket							76 paket		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**676.626.000**							**855.612.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**676.626.000**						100 persen	**855.612.000**	
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**676.626.000**						100 persen	**855.612.000**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Krapyak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Krapyak	1 Dokumen	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang diadakan/dibangun/dikembangkan/dipelihara				2 Lokasi	200.000.000	Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Krapyak	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Krapyak	2 Lokasi	400.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi hibah sarpras				3 lokasi							3 lokasi		
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	464.126.000	Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Krapyak	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Krapyak	12 Bulan	440.612.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah fasiliyasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan``				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida yang dilaksanakan				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya yang dilaksanakan				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				867 Buah							867 Buah		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				122 RT/RW							122 RT/RW		
		Jumlah RT yang diadakan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah				103 RT							103 RT		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				77 Paket							77 Paket		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi							1 Lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**498.520.000**							**1.207.750.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**498.520.000**						100 persen	**1.207.750.000**	
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**498.520.000**						100 persen	**1.207.750.000**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Padukuhan Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Padukuhan Kraton	1 Dokumen	15.450.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah MCK yang dilakukan pemeliharaan				1 lokasi	119.000.000	Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Padukuhan Kraton	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Padukuhan Kraton	1 lokasi	747.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Sarana dan Prasarana transportasi yang diadakan/dibangun/deikembangkan/dipelihara				1 lokasi							1 lokasi		
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	367.020.000	Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Padukuhan Kraton	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Padukuhan Kraton	12 Bulan	445.300.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				96 Kali							96 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali							8 Kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				78 Kali							78 Kali		
		Jumlah kegiatan pengembangan UMKM yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				1197 Buah							1197 Buah		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				1116 RT/RW							1116 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				67 Paket							67 Paket		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi							1 Lokasi		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**387.625.000**							**383.439.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**387.625.000**						100 persen	**383.439.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**387.625.000**						100 persen	**383.439.000**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Panjang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Panjang Baru	1 dokumen	15.900.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang diadakan/dibangun/dikembangkan/dipelihara				1 Lokasi	70.000.000	Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Panjang Baru	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Panjang Baru	1 Lokasi	92.300.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	305.125.000	Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Panjang Baru	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Panjang Baru	12 Bulan	275.239.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Dokumen Rencana Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi Peningkatan Keterampilan dan Kinerja PKK yang Dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah Kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular				1 kali							1 kali		
		Jumlah Kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pengembangan UMKM yang ddilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				819 Buah							819 Buah		
		Jumlah Rakor TKPK Tingkat Kelurahan yang Dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				71 RT/RW							71 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				34 Paket							34 Paket		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi							1 Lokasi		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**7.944.075.000**							**7.623.404.000**	
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**7.542.025.000**						100 persen	**7.276.604.000**	
7.1.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**113.000.000**						100 Persen	**47.000.000**	
7.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokumen	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 dokumen	5.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
7.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	105.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	39.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan (RTP) yang disusun)				5 dokumen							5 dokumen		
7.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**6.055.861.000**						100 Persen	**6.796.133.000**	
7.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	5.878.261.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	6.728.662.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	174.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	64.471.000	Kecamatan Pekalongan Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Banyurip				12 bulan		Semua Kelurahan			SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota		12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		
7.1.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**16.500.000**						100 Persen	**21.000.000**	
7.1.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam even tingkat kota				2 kali	16.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 kali	21.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**386.300.000**						100 Persen	**94.900.000**	
7.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	7.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		
7.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	136.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	40.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor				2 unit							2 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Kelurahan Banyurip yang diadakan													
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Buaran Kradenan yang diadakan				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Jenggot yang diadakan				1 unit							1 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo yang diadakan				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo yang diadakan				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sokoduwet yang diadakan				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				4 unit							4 unit		
7.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	9.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	3.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	168.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Selatan	11 bulan	28.400.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Banyurip				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Buaran Kradenan				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Jenggot				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kuripan Kertoharjo				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kuripan Yosorejo				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Sokoduwet				11 bulan							11 bulan		
7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	35.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	5.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		penggandaan Kelurahan Sokoduwet													
7.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	17.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	2.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		
7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				4 kali	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Selatan	4 kali	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**762.794.000**						100 Persen	**219.455.000**	
7.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	9.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	2.100.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan		Kelurahan			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota		12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		
7.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				12 bulan	98.720.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	50.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		
7.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Banyurip				12 bulan	654.774.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	167.355.000	Kecamatan Pekalongan Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan		Semua Kelurahan			SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota		12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa TIK				12 bulan							12 bulan		
7.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**207.570.000**						100 Persen	**98.116.000**	
7.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				11 unit	105.570.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Selatan	11 unit	77.116.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Banyurip				5 unit							5 unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Buaran Kradenan				4 unit							4 unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Jenggot				5 unit							5 unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Kertoharjo				3 unit							3 unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Yosorejo				4 unit							4 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Sokoduwet				5 unit							5 unit		
7.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				2 unit	62.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 unit	11.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah gedung/kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Banyurip				2 unit							2 unit		
		Jumlah gedung/kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Buaran Kradenan				2 unit							2 unit		
		Jumlah gedung/kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Jenggot				1 unit							1 unit		
		Jumlah gedung/kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Kertoharjo				2 unit							2 unit		
		Jumlah gedung/kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Yosorejo				3 unit							3 unit		
		Jumlah gedung/kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Sokoduwet				2 unit							2 unit		
7.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	10.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		dan perlengkapan kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo													
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	100 persen		100 persen	100 persen	**15.000.000**						100 persen	**23.200.000**	
7.1.2.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Selatan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**15.000.000**						100 Persen	**23.200.000**	
7.1.2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi				6 kelurahan	15.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	warga wilayah kecamatan pekalongan Selatan	6 kelurahan	23.200.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan	100 persen		100 persen	100 persen	**132.500.000**						100 persen	**93.600.000**	
7.1.3.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	100 Persen		0 Persen	100 Persen	**132.500.000**						100 Persen	**93.600.000**	
7.1.3.2.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi kegatan TP. PKK				1 kali	132.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Lembaga Kemasyarakatan	1 kali	93.600.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah fasilitasi kegiatan bunda PAUD tingkat kecamatan yang dilaksanakan				6 kali							6 kali		
		Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi				5 kegiatan							5 kegiatan		
		Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang terfasilitasi				2 kegiatan							2 kegiatan		
		Jumlah rapat koordinasi catur pilar				1 kali							1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	100 persen		100,00 persen	100 persen	**243.550.000**						100 persen	**216.000.000**	
7.1.4.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Selatan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**243.550.000**						100 Persen	**216.000.000**	
7.1.4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan				48 kali	243.550.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	48 kali	216.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	100 persen		100,00 persen	100 persen	**11.000.000**						100 persen	**14.000.000**	
7.1.5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Selatan	100 Persen		0 Persen	100 Persen	**11.000.000**						100 Persen	**14.000.000**	
7.1.5.2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat Forkompinca				1 kali	11.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Forkompinca	1 kali	14.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**425.945.000**							**390.541.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**425.945.000**						100 persen	**390.541.000**	
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**425.945.000**						100 persen	**390.541.000**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Jenggot	1 dokumen	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pembangunan di Kelurahan										perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Lokasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang dibangun/dipelihara				4 lokasi	110.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Jenggot	4 lokasi	100.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah sarpras yang dihibahkan				2 paket							2 paket		
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	302.795.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Jenggot	12 bulan	275.541.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Dokumen Rencana Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				2 kegiatan							2 kegiatan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan pelatihan komputer				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan pelatihan setir mobil				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah Fasilitasi Pendataan Anak Usia Sekolah yang tidak sekolah				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan FKSS yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 kegiatan							2 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah PMT Balita yang diadakan				1575 dos							1575 dos		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				65 RT/RW							65 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				34 paket							34 paket		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**386.904.000**							**376.195.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**386.904.000**						100 persen	**376.195.000**	
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**386.904.000**						100 persen	**376.195.000**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Buaran Kradenan	1 dokumen	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang dibangun/dipelihara				2 lokasi	81.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Buaran Kradenan	2 lokasi	100.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang dibangun/dipelihara				2 lokasi		Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan					2 lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	293.404.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Buaran Kradenan	12 bulan	261.195.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Dokumen Rencana Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan pembinaan BKR				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan FKSS yang dilaksanakan				6 kegiatan							6 kegiatan		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan Pendataan Anak Usia Sekolah yang tidak Sekolah				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Kegiatan Penyuluhan Persampahan yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah PMT Balita yang diadakan				924 dos							924 dos		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				62 RT/RW							62 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				76 paket							76 paket		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**342.170.000**							**604.585.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**342.170.000**						100 persen	**604.585.000**	
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**342.170.000**						100 persen	**604.585.000**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Kuripan Kertoharjo	1 Dokumen	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang dibangun/dipelihara				1 lokasi	98.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Kuripan Kertoharjo	1 lokasi	157.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang dibangun/dipelihara				2 lokasi							2 lokasi		
		Jumlah mesin potong rumput yang dihibahkan				2 unit							2 unit		
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	231.170.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Kuripan	12 bulan	432.585.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan		Kertoharjo			perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kertoharjo	12 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				10 kali							10 kali		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Fasilitasi Sosialisasi Penanganan Kebencanaan dan praktek penanganan kebencanaan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan FKSS yang dilaksanakan				6 kegiatan							6 kegiatan		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Kegiatan Pendataaan anak usia sekolah yang tidak sekolah				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Pelatihan digital marketing yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah Pelatihan Menjahit yang dilaksankan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah PMT Balita yang diadakan				1365 dos							1365 dos		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				37 RT/RW							37 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				34 paket							34 paket		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 kali							1 kali		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**405.949.000**							**15.000.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**405.949.000**						100 persen	**15.000.000**	
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**405.949.000**						100 persen	**15.000.000**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Kuripan Yosorejo	1 dokumen	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah kegiatan PLPBK yang dilaksanakan				1 Kali	112.638.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Kuripan Yosorejo	1 Kali	-	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah lokasi bermain anak yang difasilitasi hibah sarpras				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah lokasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang dibangun/dipelihara				2 lokasi							2 lokasi		
		Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang dibangun/dipelihara				1 lokasi							1 lokasi		
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	280.811.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Kuripan Yosorejo	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				10 kali							10 kali		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan FKSS yang dilaksanakan				6 Kegiatan							6 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan pelatihan Boga dan rias pengantin Jawa yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pelatihan Boga Remaja yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan Pendataan Anak Usia Sekolah yang tidak Sekolah				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah PMT yang diadakan				981 dos							981 dos		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				62 RT/RW							62 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				34 paket							34 paket		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**351.687.000**							**15.000.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**351.687.000**						100 persen	**15.000.000**	
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**351.687.000**						100 persen	**15.000.000**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Soko Duwet	1 dokumen	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang dibangun/dipelihara				1 lokasi	77.638.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Soko Duwet	1 lokasi	-	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang dibangun/dipelihara				2 lokasi							2 lokasi		
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	261.549.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Soko Duwet	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				7 kali							7 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				2 kegiatan							2 kegiatan		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan				1 kali							1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan													
		Jumlah kegiatan FKSS yang dilaksanakan				6 kegiatan							6 kegiatan		
		Jumlah Kegiatan Pelatihan pada Masyarakat Kelurahan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah kegiatan Pendataan Anak Usia Sekolah yang tidak Sekolah				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah PMT Balita yang diadakan				754 dos							754 dos		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				50 RT/RW							50 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				34 paket							34 paket		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**432.611.000**							**436.611.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**432.611.000**						100 persen	**436.611.000**	
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**432.611.000**						100 persen	**436.611.000**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Banyurip	1 dokumen	-	Kecamatan Pekalongan Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan PLPBK yang dilaksanakan				1 kali	133.138.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Banyurip	1 kali	149.638.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah lembaga/ormas yang difasilitasi hibah sarpras				2 lembaga/ ormas							2 lembaga/ ormas		
		Jumlah lokasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang dibangun/dipelihara				2 lokasi							2 lokasi		
		Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang dibangun/dipelihara				2 lokasi							2 lokasi		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Posbindu yang diadakan				1 unit							1 unit		
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	286.973.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga Kelurahan Banyurip	12 bulan	286.973.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan Fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Bulan Fasilitasi Sekretrariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Dokumen Rencana Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan yang disusun				1 dokumen							1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				8 kali							8 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		jumlah fasilitasi program peningkatan kwalitas kawasan pemukiman KOTAKU) yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan FKSS yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Kegiatan Pelatihan Bisnis Online yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan Pendataan Anak Usia Sekolah yang tidak Sekolah				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah Kegiatan Pengendalian Pemakaian Pupuk dan Pestisida yang dilakasanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah PMT Balita yang diadakan				1134 dos							1134 dos		
		Jumlah Rakor TKPK Tingkat Kelurahan Yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				66 RT/RW							66 RT/RW		
		jumlah strip gula darah yang diadakan				34 paket							34 paket		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**8.995.483.000**							**8.705.202.000**	
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**8.640.041.000**						100 persen	**8.320.182.000**	
7.1.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**124.000.000**						100 Persen	**47.000.000**	
7.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokumen	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Barat	2 dokumen	5.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA yang disusun pada kecamatan				4 dokumen	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Barat	4 dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kecamatan, Kel. Tirto, Kel. Pasirkratonkramat, Kel. Podosugih, Kel. BendanKergon, Kel. SapuroKebulen, Kel. Medono dan kel. Pringrejo				12 bulan	116.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Barat	12 bulan	39.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (perencanan dan Perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan 4 Laporan Pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
7.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**7.002.490.000**						100 Persen	**7.882.101.000**	
7.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	6.801.490.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Barat	12 bulan	7.811.630.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan kecamatan				12 bulan	198.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Barat	12 bulan	67.471.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan kel Bendan Kergon				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan kel. Medono				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan kel Pasirkratonkramat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan kel. Podosugih				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan kel. Pringrejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan kel. SapuroKebulen				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan kel. Tirto				12 bulan							12 bulan		
7.1.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Barat	1 dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**16.500.000**						100 Persen	**20.350.000**	
7.1.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik				2 kali	16.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Barat	2 kali	20.350.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**435.600.000**						100 Persen	**111.040.000**	
7.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan				12 bulan	8.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Barat	12 bulan	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kel. Bendan Kergon				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kel. Medono				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kel. Pasirkratonkramat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kel. Podosugih				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kel. Prigrejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kel. Sapuro Kebulen				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kel. Tirto				12 bulan							12 bulan		
7.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kecamatan, Kel. Tirto, Kel. Pasirkratonkramat, Kel. Podosugih, Kel. BendanKergon, kel. Sapuro kebulen , Kel. Medono dan Kel. Pringrejo				12 bulan	152.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Barat	12 bulan	50.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kecamatan,				5 unit							5 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. BendanKergon				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Medono				1 unit							1 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Pasirkratonkramat				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Podosugih				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Pringrejo				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. SapuroKergon				1 unit							1 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Tirto				2 unit							2 unit		
7.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kecamatan, Kel. Trirto, Kel. Pasirkratonkramat, Kel. Podosugih, Kel. BendanKergon, Kel. SapuroKebulen, Kel. Medono dan kel. Pringrejo				12 bulan	11.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Barat	12 bulan	3.500.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kecamatan, Kel. Tirto, Kel. Pasirkratonkramat, Kel. Podosugih, Kel. BendanKergon, Kel. SapuroKebulen, Kel. Medono dan Kel. Pringrejo				11 bulan	191.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Barat	11 bulan	35.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan				12 bulan	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Barat	12 bulan	5.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kel. Bendan Kergon				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kel. Medono				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kel. Pasirkratonkramat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kel. Podosugih				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kel. Pringrejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kel. Sapuro Kebulen				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kel. Tirto				12 bulan							12 bulan		
7.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kecamatan, Kel. Tirto, Kel. Pasirkratonkramat, Kel. Podosugih, Kel. Bendankergon, Kel. SapuroKebulen, Kel. Medono dan kel. Pringrejo.				12 bulan	20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Barat	12 bulan	2.040.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				7 orang/kl	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Barat	7 orang/kl	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**821.753.000**						100 Persen	**146.013.000**	
7.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulam penyediaan jasa surat menyurat pada Kecamatan, Kel. Tirto, Kel.Pasirkratonkramat, Kel. Podosugih, Kel. BendanKergon, Kel. SapuroKebulen, Kel. Medono dan Kel. Pringrejo				12 bulan	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Barat	12 bulan	2.100.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air				12 bulan	105.000.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,	Kecamatan Pekalonga	12 bulan	43.500.000	Kecamatan Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Daya Air dan Listrik	dan listrik pada Kecamatan, Kel. Tirto, Kel. Pasirkratonkramat, Kel. Podosugih, Kel. BendanKergon, Kel. SapuroKebulen, Kel. Medono dan Kel. Pringrejo						Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	n Barat			Barat
7.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada kecamatan, kel. tirto, kel. pasirkratonkramat, kel. Podosugih, kel. BendanKergon, Kel. Sapuro Kebulen, Kel. Medono dan kel. Pringrejo				12 bulan	706.253.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Barat	12 bulan	100.413.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah jasa tenaga administrasi pada kecamatan, Kel. Medono, Kel.Pasirkratonkramat				4 orang/bulan							4 orang/bulan		
		Jumlah jasa tenaga keamanan pada kecamatan, Kel. Tirto, Kel. Pasirkratonkramat, Kel. Podosugih, Kel. Bendankergon, Kel. SapuroKebulen, Kel. Medono dan kel. Pringrejo				11 orang/bulan							11 orang/bulan		
		Jumlah jasa tenaga kebersihan pada kel. Tirto, Kel. Pasirkratonkramat, Kel. Bendan kergon, Kel. Podosugih, Kel. Pringrejo dan kel SapuroKebulen				10 org/bln							10 org/bln		
		Jumlah jasa tenaga kegiatan kantor pada kel. sapurokebulen, kel podosugih, dan kel. Pasirkratonkramah				3 orang/bulan							3 orang/bulan		
		Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota pada kecamatan dan kel. pringrejo				3 orang/bulan							3 orang/bulan		
		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum pada kel. pringrejo, kel. Bendankergon dan kel. SapuroKebulen				4 orang/bulan							4 orang/bulan		
		Jumlah Jasa Tenaga TIK Kecamatan				2 org							2 org		
7.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik	100		100 Persen	100	**239.698.000**						100	**113.678.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen			Persen							Persen		
7.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala pada kecamatan				14 unit	110.198.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Barat	14 unit	89.678.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kel. BendanKergon				3 unit							3 unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kel. Medono				3 unit							3 unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kel. Pasirkratonkramat				5 unit							5 unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kel. Podosugih				3 unit							3 unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kel. Pringrejo				4 unit							4 unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kel. Sapuro Kebulen				3 unit							3 unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kel. Tirto				3 unit							3 unit		
7.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kecamatan , Kel. Tirto, Kel. Pasirkratonkramat, Kel. Podosugih, Kel. BendanKergon, Kel. SapuroKebulen, Kel. Medono dan Kel. Pringrejo				8 unit	84.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Barat	8 unit	14.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kecamatan, Kel. Tirto,				7 unit							7 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		kel. Pasirkratonkramat, Kel. Podosugih, Kel. SapuroKebulen, Kel. Medono dan kel. Pringrejo													
7.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana gedung kantor pada Kecamatan, Kel. Tirto, Kel. Pasirkratonkramat, Kel. Podosugih, Kel. BendanKergon, Kel. SapuroKebulen, Kel. Medono dan Kel. Pringrejo				12 bulan	45.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Barat	12 bulan	10.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	100 persen		100,00 persen	100 persen	**15.000.000**						100 persen	**44.420.000**	
7.1.2.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Presentase ketercapaian koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**15.000.000**						100 Persen	**44.420.000**	
7.1.2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi				7 kelurahan	15.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	warga wilayah kecamatan pekalongan barat	7 kelurahan	44.420.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	100 persen		100 persen	100 persen	**132.500.000**						100 persen	**73.600.000**	
7.1.3.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Presentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan yang dilaksanakan	100 Persen		0 Persen	100 Persen	**132.500.000**						100 Persen	**73.600.000**	
7.1.3.2.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi Kegiatan Bunda PAUD tingkat kecamatan yang dilaksanakan (Rakor, bintek, lomba, pendataan PAUD, pembinaan ke kelurahan, Monev ke kelurahan)				6 kali	132.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Lembaga kemasyarakatan	6 kali	73.600.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah kegiatan catur pilar yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan yang dilaksanakan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah kegiatan musrenbang dan FDKP yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah TP PKK yang di fasilitasi				12 bulan							12 bulan		
7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat	100 persen		100,00 persen	100 persen	**196.942.000**						100 persen	**256.000.000**	
7.1.4.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	presentase tercapainya koordinasi upaya penyelenggaraan Trantibum	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**196.942.000**						100 Persen	**256.000.000**	
7.1.4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Patroli trantib yang dilaksanakan				48 kali	196.942.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Wilayah kecamatan pekalongan barat	48 kali	256.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	100 persen		100,00 persen	100 persen	**11.000.000**						100 persen	**11.000.000**	
7.1.5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Presentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**11.000.000**						100 Persen	**11.000.000**	
7.1.5.2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan Forkompimcam yang dilaksanakan				1 kali	11.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Forkompinca	1 kali	11.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**594.793.000**							**432.664.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	0 persen		100 persen	100 persen	**594.793.000**						100 persen	**432.664.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**594.793.000**						100 Persen	**432.664.000**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlahdokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Medono	1 dokumen	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Lokasi Sarpras Transportasi yang dibangun/dipelihara				2 lokasi	244.638.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Medono	2 lokasi	64.288.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah Rakor PLPBK yang diadakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi hibah sarpras				12 RT/RW							12 RT/RW		
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (Yankes, LKK, Trantib, Senam, dll)				19 kegiatan	337.655.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Medono	19 kegiatan	353.376.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**380.623.000**							**343.029.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	0 persen		100 persen	100 persen	**380.623.000**						100 persen	**343.029.000**	
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**380.623.000**						100 Persen	**343.029.000**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Podosugih	1 dokumen	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Lokasi sarpras yang dibangun/dipelihara				3 lokasi	132.638.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Podosugih	3 lokasi	100.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi hibah sarpras				2 RT/TW					perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota		2 RT/TW		
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi				8 kegiatan	235.485.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Podosugih	8 kegiatan	228.029.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi				5 kegiatan							5 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah LKK yang difasilitasi				3 LKK							3 LKK		
		Jumlah personil RT yang dibina				41 orang							41 orang		
		umlah personil RW yang dibina				9 orang							9 orang		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**406.423.000**							**388.051.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	0 persen		100 persen	100 persen	**406.423.000**						100 persen	**388.051.000**	
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**406.423.000**						100 Persen	**388.051.000**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan di Kelurahan				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Tirto	1 dokumen	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lembaga/ormas yang difasilitasi hibah				1 dokumen	117.638.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirto	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Tirto	1 dokumen	129.638.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi pembangunan gapura				1 RT/RW							1 RT/RW		
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi				8 kegiatan	276.285.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirto	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Tirto	8 kegiatan	243.413.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi				5 kegiatan							5 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi				2 kegiatan							2 kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah LKK yang difasilitasi				4 LKK							4 LKK		
		Juml;ah personil RT yang dibina				44 orang							44 orang		
		Jumlah Personil RW yang dibina				9 orang							9 orang		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**417.320.000**							**-**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	0 persen		100 persen	100 persen	**417.320.000**						100 persen	**-**	
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**417.320.000**						100 Persen	**-**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Sapuro Kebulen	1 dokumen	-	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana Transportasi yang Diadakan/Dibangun/Dikembangkan/Dipelihara				1 unit	70.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Sapuro Kebulen	1 unit	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana Transportasi yang Diadakan/Dibangun/Dikembangkan/Dipelihara				2 lokasi							2 lokasi		
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi				8 kegiatan	334.820.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Sapuro Kebulen	8 kegiatan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi				5 kegiatan							5 kegiatan		
		Jumlah Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah LKK yang difasilitasi				3 LKK							3 LKK		
		Jumlah Personil RT yang dibina				60 orang							60 orang		
		Jumlah Personil RW yang dibina				16 orang							16 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**515.480.000**							**494.929.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	0 persen		100 persen	100 persen	**515.480.000**						100 persen	**494.929.000**	
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**515.480.000**						100 Persen	**494.929.000**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Bendan Kergon	1 dokumen	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang diadakan/dibangun/dikembangkan/dipelihara				3 lokasi	104.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Bendan Kergon	3 lokasi	100.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang diadakan/dibangun/dikembangkan/dipelihara				1 unit							1 unit		
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	398.230.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Bendan Kergon	12 bulan	379.929.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				7 kali							7 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah fasilitasi kelurahan tangguh bencana				2 kali							2 kali		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				10 kali							10 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah				1 kali							1 kali		
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				1806 buah							1806 buah		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				118 RT/RW							118 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				45 pak							45 pak		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**540.978.000**							**517.638.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	0 persen		100 persen	100 persen	**540.978.000**						100 persen	**517.638.000**	
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**540.978.000**						100 Persen	**517.638.000**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Pasirkratonkramat	1 dokumen	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang diadakan/dibangun/dikembangkan/dipelihara				2 lokasi	110.638.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Pasirkratonkramat	2 lokasi	85.638.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah Rakor PLPBK yang diadakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang diadakan/dibangun/dikembangkan/dipelihara				1 lokasi							1 lokasi		
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	417.840.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Pasirkratonkramat	12 bulan	417.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan Fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah fasilitasi Gelar TTG yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				7 kali							7 kali		
		Jumlah Fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah Fasilitasi kegiatan PHBS yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi Pendataan Anak Usia Sekolah yang tidak sekolah				1 paket							1 paket		
		Jumlah Fasilitasi Peningkatan Ketrampilan dan Kinerja PKK yang dilaksanakan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Fasilitasi Program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali							8 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah fasilitasi Program Peningkatan kualitas kawasan pemukiman (TTG) yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan Penanganan Stunting (Kelas Ibu Balita Stunting) yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		JUmlah PMT dan Vitamin yang diadakan				2884 buah							2884 buah		
		Jumlah Rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				111 RT/RW							111 RT/RW		
		Jumlah Strip gula darah yang diadakan				42 paket							42 paket		
		Jumlah Taman Baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**533.547.000**							**490.143.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	0 persen		100 persen	100 persen	**533.547.000**						100 persen	**490.143.000**	
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**533.547.000**						100 Persen	**490.143.000**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Pringrejo	1 dokumen	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pekerjaan pembangunan				1 pekerjaan	115.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Pringrejo	1 pekerjaan	70.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi hibah sarpras				2 RT/RW							2 RT/RW		
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan				20 kegiatan	405.547.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Pringrejo	20 kegiatan	405.143.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**13.045.264.000**							**15.322.614.000**	
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**12.703.133.000**						100 persen	**14.896.314.000**	
7.1.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**124.000.000**						100 persen	**47.000.000**	
7.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun				4 dokumen	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Timur	4 dokumen	5.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Timur	2 dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	116.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Timur	12 bulan	39.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah dokumen dokumen evaluasi Renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan				5 dokumen							5 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		(RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun													
7.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**7.284.114.000**						100 persen	**7.990.493.000**	
7.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	7.083.114.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Timur	12 bulan	7.851.330.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	198.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Timur	12 bulan	136.163.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				12 bulan	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Timur	12 bulan	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**16.500.000**						100 persen	**20.350.000**	
7.1.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam pameran, harteknas dan karnaval batik				2 kali	16.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Timur	2 kali	20.350.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah pakaian dinas yang diadakan				14 buah							14 buah		
7.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**439.600.000**						100 persen	**93.700.000**	
7.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	8.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Timur	12 bulan	2.200.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	152.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Timur	12 bulan	38.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				5 unit							5 unit		
7.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Timur	12 bulan	3.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 bulan	196.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Timur	12 bulan	35.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Timur	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Timur	12 bulan	2.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				7 orang/kali	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Timur	7 orang/kali	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**3.700.000.000**						100 persen	**6.550.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.1.2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/unit/lokasi yang dibangun				2 unit	3.700.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Timur	2 unit	6.550.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**888.931.000**						100 persen	**88.771.000**	
7.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Timur	12 bulan	2.100.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	139.838.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Timur	12 bulan	53.200.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	738.593.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Timur	12 bulan	33.471.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**249.988.000**						100 persen	**106.000.000**	
7.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				14 unit	138.988.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Timur	14 unit	76.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				2 unit	66.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis	Kecamatan Pekalongan Timur	2 unit	20.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan			SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
7.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	45.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kecamatan Pekalongan Timur	12 bulan	10.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	100 persen		100,00 persen	100 persen	**15.000.000**						100 persen	**34.200.000**	
7.1.2.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase ketercapaian koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	**15.000.000**						100 persen	**34.200.000**	
7.1.2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kelurahan yang dibina tertib administrasinya				7 Kelurahan	15.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	warga wilayah kecamatan pekalongan timur	7 Kelurahan	34.200.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100 persen		100 persen	100 persen	**132.500.000**						100 persen	**85.000.000**	
7.1.3.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 persen		0 persen	100 persen	**132.500.000**						100 persen	**85.000.000**	
7.1.3.2.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Musrenbang Kecamatan yang disusun				1 dokumen	132.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Lembaga kemasyarakatan	1 dokumen	85.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		jumlah fasilitasi kegiatan bunda PAUD tingkat kesamatan yang dilaksanakam				6 kali							6 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				24 kegiatan							24 kegiatan		
		Jumlah fasilitasi TP.PKK				1 unit							1 unit		
		Jumlah kegiatan Catur Pilar yang dilaksanakan				2 kegiatan							2 kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	100 persen		100,00 persen	100 persen	**183.631.000**						100 persen	**292.000.000**	
7.1.4.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase ketercapaian koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen		100 persen	100 persen	**183.631.000**						100 persen	**292.000.000**	
7.1.4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Patroli Trantib				48 Kali	183.631.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Wilayah kecamatan pekalongan timur	48 Kali	292.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	100 persen		100,00 persen	100 persen	**11.000.000**						100 persen	**15.100.000**	
7.1.5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen		0 persen	100 persen	**11.000.000**						100 persen	**15.100.000**	
7.1.5.2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat Forkompinca yang dilaksanakan				1 Kali	11.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Forkompinca	1 Kali	15.100.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**556.655.000**							**655.228.850**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**556.655.000**						100 persen	**655.228.850**	
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**556.655.000**						100 persen	**655.228.850**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kelurahan (Dokumen Musrenbangkel) yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Kauman	1 dokumen	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pembangunan di Kelurahan										perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
7.1.3. 2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Lokasi Saluran Lingkungan yang dibangun/dipelihara				1 Lokasi	138.294.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Kauman	1 Lokasi	180.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah Lokasi Sarpras Transportasi yang dibangun/dipelihara				1 Lokasi							1 Lokasi		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi hibah sarpras				3 RT/RW							3 RT/RW		
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi				8 Kegiatan	405.861.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Kauman	8 Kegiatan	460.228.850	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah Kegiatan Pelatihan Pengembangan UMKM yang difasilitasi				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan yang difasilitasi				5 Kegiatan							5 Kegiatan		
		Jumlah Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan yang difasilitasi				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah LKK yang difasilitasi				3 LKK							3 LKK		
		Jumlah Personil RT yang dibina				108 orang							108 orang		
		Jumlah Personil RW yang dibina				18 Orang							18 Orang		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**685.073.000**							**725.134.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**685.073.000**						100 persen	**725.134.000**	
7.1.3. 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**685.073.000**						100 persen	**725.134.000**	
7.1.3. 2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang disusun				1 Dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Poncol	1 Dokumen	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3. 2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah rakor PLPBK yang diadakan				1 Kali	310.638.000	Semua Kab/Kota,	DAU Tambahan untuk Dukungan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,	sarpras lingkungan/	1 Kali	317.638.000	Kecamatan Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kelurahan	Jumlah RT/RW yang difasilitasi hibah sarpras				16 RT/RW		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendanaan Kelurahan	Transformasi Pelayanan Publik	keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	warga kelurahan Poncol	16 RT/RW		Timur
		Jumlah Sarana Prasarana yang diadakan /diperbaiki				1 Unit							1 Unit		
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi				10 Kegiatan	361.935.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Poncol	10 Kegiatan	392.496.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi				5 Kegiatan							5 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan ang difasilitasi				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
		Jumlah personil RT yang dibina				68 Orang							68 Orang		
		Jumlah personil RW yang dibina				13 Orang							13 Orang		
		LKK yang difasilitasi				3 LKK							3 LKK		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**395.057.000**							**377.395.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**395.057.000**						100 persen	**377.395.000**	
7.1.3. 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**395.057.000**						100 persen	**377.395.000**	
7.1.3. 2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen musrenbangkel yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Klego	1 dokumen	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3. 2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang diadakan/dibangun/dikembangkan/dipelihara				2 Lokasi	90.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Klego	2 Lokasi	85.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi hibah sarpras				1 RT/RW							1 RT/RW		
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	292.557.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Klego	12 Bulan	277.395.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan					perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota		12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Karangtaruna				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi TAGANA				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Fasilitasi Gelar TTG yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (TTG) yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan/ difasilitasi				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Peralatan Dapur Umum yang diadakan				1 Paket							1 Paket		
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				10 buah							10 buah		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				64 RT/RW							64 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 Paket							1 Paket		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**348.675.000**							**-**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**348.675.000**						100 persen	**-**	
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**348.675.000**						100 persen	**-**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Gamer	1 dokumen	-	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarpras transportasi, yang dibangun/dipelihara				0 lokasi	55.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Gamer	0 lokasi	-	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi hibah sarpras				1 RT/RW							1 RT/RW		
		Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang diadakan/dibangun/dikembangkan/dipelihara				1 unit							1 unit		
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan				12 bulan	281.175.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan	sarpras lingkungan/ warga	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Timur, Gamer	Kelurahan	Publik	informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	kelurahan Gamer			
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**465.445.000**							**-**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**465.445.000**						100 persen	**-**	
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**465.445.000**						100 persen	**-**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Noyontaan sari	1 dokumen	-	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RT/RW yang difasilitasi hibah sarpras				3 RT/RW	130.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Noyontaan sari	3 RT/RW	-	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi				8 kegiatan	322.945.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Noyontaan sari	8 kegiatan	-	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi				5 kegiatan							5 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi				1 kegiatan							1 kegiatan		
		Jumlah LKK yang difasilitasi				2 LKK							2 LKK		
		Jumlah personil RT yang dibina				60 orang							60 orang		
		Jumlah personil RW yang dibina				14 orang							14 orang		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**486.530.000**							**584.707.650**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**486.530.000**						100 persen	**584.707.650**	
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**486.530.000**						100 persen	**584.707.650**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen musrenbangkel yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Setono	1 dokumen	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah lembaga/ormas yang difasilitasi hibah				12 bulan	117.638.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Setono	12 bulan	87.638.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi hibah sarpras				2 RT/RW							2 RT/RW		
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				12 bulan	356.392.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Setono	12 bulan	482.069.650	Kecamatan Pekalongan Timur
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.1	**KECAMATAN**						**360.224.000**							**504.425.000**	
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**360.224.000**						100 persen	**504.425.000**	
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
7.1.3.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	**360.224.000**						100 persen	**504.425.000**	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan				100 persen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Kalibaros	100 persen	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3. 2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang diadakan/dibangun/dikembang kan/dipelihara				2 unit	70.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Kalibaros	2 unit	142.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah bulan terfasilitasi				12 bulan	277.724.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	sarpras lingkungan/ warga kelurahan Kalibaros	12 bulan	347.425.000	Kecamatan Pekalongan Timur
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**														
8.1	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**5.259.367.000**							**2.142.476.398**	
8.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	**1.914.312.000**						100 persen	**482.999.648**	
8.1.1. 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**13.500.000**						100 persen	**27.050.000**	
8.1.1. 2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan perubahan Renja yang disusun				2 dokumen	2.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kesatuan Bangsa dan Politik	2 dokumen	12.250.000	Kesbangpol
8.1.1. 2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kesatuan Bangsa dan Politik	2 dokumen	3.500.000	Kesbangpol
8.1.1. 2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan monitoring dan evaluasi perangkat daerah Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun jumlah dokumen sakip				12 bulan 4 dokumen 1 dokumen	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi	Kesatuan Bangsa dan Politik	12 bulan 4 dokumen 1 dokumen	11.300.000	Kesbangpol

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen SPIP yang disusun (1 RTP,)				5 dokumen					penerapan MRI di tingkat Kota		5 dokumen		
8.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**1.516.032.000**						100 persen	**38.749.648**	
8.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	1.481.532.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kesatuan Bangsa dan Politik	12 bulan	1.749.648	Kesbangpol
8.1.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	33.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kesatuan Bangsa dan Politik	12 bulan	35.000.000	Kesbangpol
8.1.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kesatuan Bangsa dan Politik	1 dokumen	2.000.000	Kesbangpol
8.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**9.500.000**						100 persen	**25.500.000**	
8.1.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				1 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kesatuan Bangsa dan Politik	1 kali	25.500.000	Kesbangpol
8.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**142.630.000**						100 persen	**217.400.000**	
8.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kesatuan Bangsa dan Politik	12 bulan	4.200.000	Kesbangpol

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				12 bulan 4 unit	66.466.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kesatuan Bangsa dan Politik	12 bulan 4 unit	80.000.000	Kesbangpol
8.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kesatuan Bangsa dan Politik	12 bulan	3.500.000	Kesbangpol
8.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	16.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kesatuan Bangsa dan Politik	11 bulan	17.200.000	Kesbangpol
8.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	9.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kesatuan Bangsa dan Politik	12 bulan	9.000.000	Kesbangpol
8.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kesatuan Bangsa dan Politik	12 bulan	3.500.000	Kesbangpol
8.1.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu				12 bulan	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kesatuan Bangsa dan Politik	12 bulan	-	Kesbangpol

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				24 kali	37.064.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kesatuan Bangsa dan Politik	24 kali	100.000.000	Kesbangpol
8.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**142.650.000**						100 persen	**101.300.000**	
8.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	1.050.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kesatuan Bangsa dan Politik	12 bulan	1.100.000	Kesbangpol
8.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	39.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kesatuan Bangsa dan Politik	12 bulan	28.200.000	Kesbangpol
8.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	102.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kesatuan Bangsa dan Politik	12 bulan	72.000.000	Kesbangpol
8.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	**90.000.000**						100 persen	**73.000.000**	
8.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				8 unit	26.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kesatuan Bangsa dan Politik	8 unit	28.000.000	Kesbangpol
8.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	49.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya	Kesatuan Bangsa dan Politik	1 unit	25.000.000	Kesbangpol

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota				
8.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota	Kesatuan Bangsa dan Politik	12 bulan	20.000.000	Kesbangpol
8.1.2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100 persen		100 persen	100 persen	**1.351.780.000**						100 persen	**789.654.750**	
8.1.2.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Persentase pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korp musik	100 persen		100 persen	100 persen	**1.351.780.000**						100 persen	**789.654.750**	
8.1.2.2.01.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan bagi aparatur				4 kali	27.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Kesatuan Bangsa dan Politik	4 kali	28.665.000	Kesbangpol
8.1.2.2.01.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah sosialisasi penguatan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan				30 kali	1.164.740.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Kesatuan Bangsa dan Politik	30 kali	567.000.000	Kesbangpol
8.1.2.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Jumlah pelaksaan pembinaan korp musik				13 kali	139.740.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Kesatuan Bangsa dan Politik	13 kali	171.989.750	Kesbangpol
		Jumlah upacara tingkat kota yang dilaksanakan				13 kali							13 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
8.1.2.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan bagi pelajar dan mahasiswa				2 kali	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Kesatuan Bangsa dan Politik	2 kali	22.000.000	Kesbangpol
8.1.3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16 lembaga		0 lembaga	16 lembaga	**926.950.000**						16 lembaga	**175.297.000**	
8.1.3.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	100 persen		100 persen	100 persen	**926.950.000**						100 persen	**175.297.000**	
8.1.3.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah peserta sosialisasi yang diikuti 9 parpol				18 orang	774.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Partai politik / warga kota pekalongan	18 orang	15.435.000	Kesbangpol

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah							Kelurahan							
8.1.3.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik				400 orang	152.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Partai politik / warga kota pekalongan	400 orang	159.862.000	Kesbangpol
8.1.4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100 persen		100 persen	100 persen	**505.000.000**						100 persen	**375.000.000**	
8.1.4.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	jumlah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat	7 kali		7 kali	7 kali	**505.000.000**						7 kali	**375.000.000**	
8.1.4.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah lembaga/ormas yang difasilitasi bantuan hibah				23 lembaga / ormas	505.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Organisasi kemasyarakatan	23 lembaga/ ormas	375.000.000	Kesbangpol

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.1.5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100 persen		100 persen	100 persen	**256.035.000**						100 persen	**109.235.000**	
8.1.5.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	jumlah pembinaan bidang Ketahanan Ekonomi dan sosial budaya	6 kali		1 kali	1 kali	**256.035.000**						1 kali	**109.235.000**	
8.1.5.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah sosialisasi kerukunan antar umat beragama Jumlah sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika				1 kali 18 kali	256.035.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Warga Kota Pekalongan	1 kali 18 kali	109.235.000	Kesbangpol
8.1.6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100 persen		100 persen	100 persen	**305.290.000**						100 persen	**210.290.000**	
8.1.6.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Jumlah laporan rencana penanganan konflik sosial yang disusun	6 laporan		1 laporan	1 laporan	**305.290.000**						1 laporan	**210.290.000**	
8.1.6.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	Jumlah dokumen pelaporan pengawasan orang asing yang disusun Jumlah peserta sosialisasi yang diberikan pemahaman penanganan konflik sosial				4 dokumen 80 orang	305.290.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Daerah potensi konflik	4 dokumen 80 orang	210.290.000	Kesbangpol

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi yang diberikan pemehaman kewaspadaan dini				100 orang							100 orang		
TOTAL							**986.520.238.000**							**1.119.821.161.962**	

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

5.2 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan dan pagu indikatif Belanja Daerah untuk tahun 2022 disajikan dalam Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2 Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Pekalongan Tahun 2022

URAIAN	PROYEKSI 2022
PENDAPATAN	**946.520.238.000**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**220.966.005.000**
Pendapatan Pajak Daerah	87.150.000.000
Hasil Retribusi Daerah	17.309.414.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.951.841.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	110.554.750.000
PENDAPATAN TRANSFER	**692.787.233.000**
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	603.132.016.000
Bagi Hasil Pajak	24.270.118.000
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.543.489.000
Dana Alokasi Umum	426.399.738.000
Dana Alokasi Khusus	145.222.411.000
Dana Insentif Daerah	4.696.260.000
Transfer Pemerintah Provinsi	89.655.217.000
Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi	78.202.217.000
Bantuan Keuangan Provinsi	11.453.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**32.767.000.000**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32.767.000.000
Pendapatan Hibah	0
BELANJA	**986.520.238.000**
BELANJA OPERASI	**813.299.519.800**
Belanja Pegawai	429.578.291.917
Belanja Barang dan Jasa	354.594.559.883
Belanja Hibah	25.844.160.000
Belanja Bantuan Sosial	3.282.508.000
BELANJA MODAL	**167.283.718.200**
Belanja Modal Tanah	876.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.318.454.200
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.980.665.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.681.144.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.427.455.000
Belanja Aset Lainnya	0
BELANJA TAK TERDUGA	**5.937.000.000**
Belanja Tak Terduga	5.937.000.000
PEMBIAYAAN	**40.000.000.000**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**46.000.000.000**

URAIAN	PROYEKSI 2022
Penggunaan SiLPA	46.000.000.000
Pencairan Dana Cadangan	0
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**6.000.000.000**
Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3.000.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2021

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2022

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2022, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekalonggan Tahun 2022

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET 2022
1	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,25
2	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	128,28
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	8,21
4	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	10,23
5	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	1,00
6	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,27
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	58,78
8	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00
9	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70,28
11	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	90,96
12	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1.230,00
13	Indeks Kualitas Air	indeks	35,35
14	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60
15	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	6,00
16	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00
17	Persentase pelayanan sampah	persen	69,12
18	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	B
19	Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20
20	Pertumbuhan ekonomi	persen	2,28 - 2,84
21	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	88,89
22	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00
23	Indeks SPBE	indeks	2,85
24	IKM Kota	persen	83,49
25	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	95,00

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET 2022
26	Indeks Merit System	indeks	225,00
27	Nilai SAKIP Kota	skor	74,07
28	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	kategori	WTP
29	Maturitas SPIP	nilai	3,2
30	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	4

Sumber : RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 2021

6.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Untuk indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disajikan dalam Tabel 6.2 merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD Kota Pekalongan.

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
	- Usia Harapan Hidup	Tahun	74,47	Tujuan Kota	Kota
	- Angka Kemiskinan	persen	6,71	Tujuan Kota	Kota
	- Indeks Pembangunan Manusia	indeks	75,32	Tujuan Kota	Kota
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,66	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	persen	62,96	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase Luas genangan Banjir dan Rob	persen	26,50	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	persen	88,77	Tujuan Kota	Kota
	- PDRB Perkapita	Rp. Juta/jiwa/ tahun	35,97 - 36,21	Tujuan Kota	Kota
	- Jumlah konflik sosial	kasus	0,00	Tujuan Kota	Kota
	- Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,25	IKU Kota	Kota
	- Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	128,28	IKU Kota	Kota
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	8,21	IKU Kota	Kota
	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	10,23	IKU Kota	Kota
	- Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	1,00	IKU Kota	Kota
	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	58,78	IKU Kota	Kota
	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70,28	IKU Kota	Kota

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
	- Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	90,96	IKU Kota	Kota
	- Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1230,00	IKU Kota	Kota
	- Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	IKU Kota	Kota
	- Persentase pelayanan sampah	persen	69,12	IKU Kota	Kota
	- Pertumbuhan ekonomi	persen	2,28 - 2,84	IKU Kota	Kota
	- Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	IKU Kota	Kota
B.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PENDIDIKAN				
	- Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	100	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	- Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	persen	100	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	URUSAN KESEHATAN				
	- Persentase capaian SPM Kesehatan	persen	88	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	- Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK *Outcome*)	persen	98,60	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	persen	73,50	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	persen	87,092	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	persen	1,09	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	regulasi	96,203	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- Pengembangan Sarana Persampahan	persen	20	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	- Persentase Jumlah Rumah	persen	93,12	IKU Renstra	OPD Pengampu

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
Layak Huni				Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS				
- Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	persen	60,00	IKU Renstra	Satpol PP
- Persentase korban bencana yang ditangani	persen	100,00	IKU Renstra	BPBD
- Persentase penanganan bencana kebakaran	persen	100,00	IKU Renstra	Satpol PP
URUSAN SOSIAL				
- Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	3.32	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN TENAGA KERJA				
- Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	52,22	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
- Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	28,51	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Skor Kota Layak Anak	Skor	628,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PANGAN				
- Persentase penanganan daerah rawan pangan	persen	100	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pangan
URUSAN PERTANAHAN				
- Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	persen	100	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
- Persentase tingkat pencemaran air	Persen	62.86	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
- Persentase Kenaikan Luasan RTH	Persen	0,35	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	71,48	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Tertib Hukum Lingkungan	Persen	25,30	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
- Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	persen	87.59	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
- Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	8,08	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
- Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	67,45	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PERHUBUNGAN				
- Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	persen	28	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
- Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	2.85	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kominfo
- Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu pelayanan	Baik (Nilai 76.61 – 88.30)	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kominfo
URUSAN KOPERASI DAN UKM				
- Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. Trilyun	7.82	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
URUSAN PENANAMAN MODAL				
- Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Milyar Rupiah	200,28	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
URUSAN KEBUDAYAAN				
- Persentase peningkatan kelompok budaya	Persen	1.55	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
URUSAN PERPUSTAKAAN				
- Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK *Outcome*)	indeks	19,92	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
URUSAN KEARSIPAN				
- Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Kota (ANRI)	indeks	72,80	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
- Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1.15	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
- Prestasi olahraga tingkat provinsi	Cabor	13	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
URUSAN STATISTIK				
- Persentase ketersediaan data statistik sektoral	persen	68,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Statistik
URUSAN PERSANDIAN				
- Indeks tata kelola KAMI	Tingkat	I	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Persandian
URUSAN PILIHAN				
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN				
- Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	ton	14991,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
URUSAN PARIWISATA				
- Tingkat Kunjungan Wisata	Orang	565.000	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pariwisata

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
URUSAN PERTANIAN				
- Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Juta	243762,11	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pertanian
URUSAN PERINDUSTRIAN				
- Pertumbuhan Industri	persen	0,10	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
URUSAN PERDAGANGAN				
- Nilai ekspor perdagangan	Juta USD	26,44	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
UNSUR PENDUKUNG URUSN PEMERINTAHAN				
SEKRETARIAT DAERAH				
- Persentase capaian kinerja pembangunan	persen	93,00	IKU Renstra	Setda
SEKRETARIAT DPRD				
- Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	persen	100,00	IKU Renstra	Set DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
PERENCANAAN				
- Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Perencanaan
KEUANGAN				
- Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Keuangan
- Rasio PAD	persen	1,95	IKU Renstra	OPD Pengampu Keuangan
KEPEGAWAIAN				
- Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Persen	86,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Kepegawaian
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
- Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	persen	40,00	IKU Renstra	OPD Pendidikan dan Pelatihan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
- Persentase laporan hasil litbang	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Litbang
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
INSPEKTORAT DAERAH				
- Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	persen	58.06	IKU Renstra	Inspektorat Daerah

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
	- Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	OPD	12	IKU Renstra	Inspektorat Daerah
	UNSUR KEWILAYAHAN				
	KECAMATAN				
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum dan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	IKU Renstra	Kec.Pekalongan Utara
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100,00	IKU Renstra	Kec. Pekalongan Selatan
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100,00	IKU Renstra	Kec. Pekalongan Barat
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100,00	IKU Renstra	Kec.Pekalongan Timur
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	- Persentase etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	persen	100,00	IKU Renstra	Badan Kesbangpol
	- Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	persen	100,00	IKU Renstra	Badan Kesbangpol
C.	**ASPEK DAYA SAING**				
	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	50,86	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	persen	100,00	Tujuan Kota	Kota
	- Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	71,69	Tujuan Kota	Kota
	- Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,27	IKU Kota	Kota
	- Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	IKU Kota	Kota
	- Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	IKU Kota	Kota

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
	- Indeks Kualitas Air	indeks	35,35	IKU Kota	Kota
	- Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	IKU Kota	Kota
	- Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	6,00	IKU Kota	Kota
	- Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	B	IKU Kota	Kota
	- Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20	IKU Kota	Kota
	- Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	88,89	IKU Kota	Kota
	- Indeks SPBE	indeks	2,85	IKU Kota	Kota
	- IKM Kota	persen	83,49	IKU Kota	Kota
	- Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	95,00	IKU Kota	Kota
	- Indeks Merit System	indeks	225,00	IKU Kota	Kota
	- Nilai SAKIP Kota	skor	74,07	IKU Kota	Kota
	- Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	kategori	WTP	IKU Kota	Kota
	- Maturitas SPIP	nilai	3,20	IKU Kota	Kota
	- Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	4,00	IKU Kota	Kota

Sumber : RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 2021

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 merupakan rencana kerja tahun pertama atas RPJMD tahun 2021-2026. Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2021 juga disusun dengan memperhatikan RKP tahun 2022, arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang relevan.

Memedomani dokumen perencanaan diatas, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2022 yaitu :

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang ada;
2. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan;
3. Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menemukenali anak tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal, nonformal, ataupun lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga;
4. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja;
5. Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak;
6. Pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
7. Pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan mengembangkan model sistem pelayanan skala luas, berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun;
8. Pemantapan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan serta pengembangan model sistem pelayanan skala luas berdasarkan validasi data dan kebijakan yang telah disusun;
9. Peningkatan promosi, pemberdayaan dan pengelolaan pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, dengan lebih mendorong peran berbagai pihak, baik swasta, komunitas, ataupun masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya badan layanan usaha dan/atau BUMD, serta membangun database ekonomi kreatif berbasis potensi lokal;
10. Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat melalui penyelenggaraan *event* seni dan budaya;
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah;

12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE disertai upaya perancangan rencana aksi penerapan MRI di tingkat Kota.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 merupakan dokumen rencana kerja tahunan Pemerintah Kota Pekalongan yang akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Akhirnya, RKPD Kota Pekalongan Tahun 2022 diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, dan tentu saja sejalan dengan arah kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.

Pekalongan, 27 Agustus 2021

WALI KOTA PEKALONGAN,

WALIKOTA KOTA PEKALONGAN

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. (2021). Kota Pekalongan Dalam Angka.

www.bps.go.id Tahun 2021